



Peraturan Daerah
**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2021-2026

RPJMD

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021-2026





BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 263 ayat (1) huruf b, ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005 Nomor 5).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA adalah PD yang membidangi urusan perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
22. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
23. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
- (2) Kerangka pendanaan adalah untuk menghitung kapasitas riil keuangan Daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun kedepan.

- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan Sistematika penulisan RPJMD sebagai berikut:
- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. BAB IX Penutup.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah 5 (lima) tahunan, RKPD tahunan dan RENJA Perangkat Daerah tahunan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi :

- a. perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan program pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026;
- b. dasar penyusunan RKPD; dan
- c. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala BAPPELITBANGDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah.
- (3) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang pemanfaatan struktur dan ruang Daerah

- b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah selaras dengan arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD Nasional sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah lain di sekitarnya;
 - d. program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten lain di sekitarnya;
 - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
- (5) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RPJMD Kabupaten berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya.
- (6) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPELITBANGDA kabupaten melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (7) Kepala BAPPELITBANGDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Bupati.
- (8) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kabupaten kepada gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Apabila dalam pelaksanaan RPJMD terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan kewenangan/Urusan Pemerintahan dan kebijakan dibidang keuangan terkait alokasi dana transfer ke Daerah.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan Peraturan Daerah yang mengatur susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah lainnya yang berimplikasi terhadap RPJMD ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 26 Agustus 2021
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2021
NOMOR. 7

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B. HK. 07. 095. 21

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas kehendaknya semata maka Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 dapat tersusun tepat waktu. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan yang mencakup penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program prioritas pembangunan daerah, perumusan program perangkat daerah dan kajian terhadap lingkungan hidup strategis yang selanjutnya dituangkan dalam gambaran kondisi umum, gambaran keuangan daerah, permasalahan serta isu strategis daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 telah memperhatikan keselarasan dengan arah dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, beserta program strategis nasional yang tertuang dalam RPJMN, yang selanjutnya menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), APBD, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan merupakan tolak ukur kinerja Kepala Daerah.

Dokumen rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sehingga arah pembangunan dan target-target kinerja yang telah ditetapkan harus dipahami dan menjadi ukuran bagi setiap pembangunan yang akan dilakukan.

Pangkajene, Agustus 2021

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, SP.i, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR GRAFIK	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3. Hubungan Antar Dokumen	11
1.3.1. Keterhubungan RPJMD dan RPJPD	14
1.3.2. Keterhubungan RPJMD dan RPJMN Tahun 2020-2024	15
1.3.3. Keterhubungan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan RPJM Provinsi Sulawesi Selatan	17
1.3.4. Keterhubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	18
1.3.5. Keterhubungan RPJMD dengan Renstra PD	18
1.3.6. Keterhubungan RPJMD dengan RKPD	19
1.3.7. Keterhubungan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	21
1.4. Maksud dan Tujuan	21
1.5. Sistematika Penulisan	22
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	24
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	24
2.1.1. ASPEK GEOGRAFI	24
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	24
2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	24
2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis	25
2.1.1.1.3. Kondisi Topografi	27
2.1.1.1.4. Kondisi Geologi	29
2.1.1.1.5. Kondisi Hidrologi	30
2.1.1.1.6. Kondisi Klimatologi	32
2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan	33
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	33
2.1.1.2.1 Kawasan Lindung	33
2.1.1.2.2 Kawasan Budidaya	37

	Halaman
2.1.2. KONDISI DEMOGRAFI	45
2.1.2.1. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	45
2.1.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk	49
2.1.2.3. Dinamika Penduduk yang Dipengaruhi oleh Kelahiran, Kematian dan Perpindahan Penduduk	49
2.1.2.4. Distribusi/Persebaran Penduduk	50
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	51
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	51
2.2.1.1. Tingkat Kemiskinan	51
2.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi	55
2.2.1.3. Inflasi.....	60
2.2.1.4. PDRB Perkapita	62
2.2.1.5. Rasio Gini	63
2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial	65
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia.....	65
2.2.2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	66
2.2.2.3. Indeks Pendidikan	66
2.2.2.4. Indeks Kesehatan.....	69
2.2.2.5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71
2.2.2.6. Indeks Reformasi Birokrasi	73
2.2.2.7. Nilai SAKIP	74
2.2.2.8. Indeks Pelayanan Publik	75
2.2.2.9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75
2.2.2.10 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	76
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	76
2.3.1 Pelayanan Dasar	76
2.3.1.1. Pendidikan	76
2.3.1.2. Kesehatan.....	86
2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	109
2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	114
2.3.1.4. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	120
2.3.1.5. Sosial	121
2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar	127
2.3.2.1. Tenaga Kerja	127

	Halaman
2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ...	130
2.3.2.3. Pangan	138
2.3.2.4. Pertanahan	140
2.3.2.5. Lingkungan Hidup.....	141
2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	149
2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	152
2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	153
2.3.2.9. Perhubungan	169
2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika.....	172
2.3.2.11 Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	174
2.3.2.12 Penanaman Modal	176
2.3.2.13 Statistik	178
2.3.2.14 Persandian.....	180
2.3.2.15 Kebudayaan	180
2.3.2.16 Perpustakaan	183
2.3.2.17 Kearsipan.....	186
2.3.3 Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	187
2.3.3.1 Pariwisata	187
2.3.3.2 Pertanian	187
2.3.3.3 Kelautan dan Perikanan	191
2.3.4 Penunjang Urusan	196
2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan	196
2.3.4.2 Keuangan	198
2.3.4.3 Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan.....	201
2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan.....	204
2.3.4.5 Pengawasan.....	206
2.3.4.6 Sekretariat Dewan.....	208
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH	208
2.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita	208
2.4.2 Nilai Tukar Petani	209
2.4.3 Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita.....	209
2.4.4 Produktivitas Total Daerah.....	210
2.4.5 Presentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa.	210
2.4.6 Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi).....	211
2.4.7 Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum.....	211

	Halaman
2.4.8 Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di BPR.....	211
2.4.9 Angka Kriminalitas yang Tertangani	212
2.5 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	212
2.6 Evaluasi Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019	235
2.7 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).....	239
BAB III GAMBARAN KONDISI KEUANGAN DAERAH	246
3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU	247
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	248
3.1.1.1 Pendapatan Daerah	249
3.1.1.2 Kinerja Pelaksanaan Belanja Daerah	273
3.1.1.3 Pembiayaan Daerah.....	278
3.1.2 Neraca Daerah	279
3.1.2.1 Aset.....	280
3.1.2.2 Kewajiban	280
3.1.2.3 Ekuitas Dana	280
3.1.2.4 Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas).....	282
3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU.....	285
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran.....	285
3.2.2 Analisis Pembiayaan	288
3.2.3 Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat.....	290
3.3 KERANGKA PENDANAAN	291
3.3.1 Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal	291
3.3.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	294
3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	297
3.3.4 Dampak Pandemi terhadap Pendapatan Daerah.....	299
3.3.5 Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah	299
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	307
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN.....	307
4.1.1. Permasalahan Pembangunan untuk Prioritas dan Sasaran	307
4.1.2. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan	313
4.2 ISU STRATEGIS.....	332
4.2.1. Isu Startegis Global	332

	Halaman
4.2.2. Isu Strategis Nasional	355
4.2.3. Isu Strategis Daerah.....	357
4.2.3.1. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan.....	357
4.2.3.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	361
BAB V VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN.....	374
5.1 Visi.....	374
5.2 Misi	376
5.3 Tujuan dan Sasaran	384
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	399
6.1 Strategi Pembangunan Daerah	399
6.2 Arah Kebijakan.....	411
6.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah	418
6.4 Program Pembangunan Daerah.....	421
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	445
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan	445
7.2. Program Perangkat Daerah.....	447
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	487
8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah	487
8.1.1 Indikator Kinerja Makro	487
8.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	487
8.1.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	488
8.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	504
8.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	507
BAB IX PENUTUP	512
9.1. Pedoman Transisi.....	512
9.2. Kaidah Pelaksanaan.....	512

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Keterkaitan antar Misi RPJM Nasional Tahun 2020-2024, Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026	12
Tabel 1.2. Keterkaitan antar Misi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026.....	14
Tabel 2.1. Luas Wilayah Per Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan, Lingkungan, Dusun, RW/RK dan RT Menurut Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	25
Tabel 2.2. Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	26
Tabel 2.3. Klasifikasi Sudut Lereng di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	28
Tabel 2.4. Jumlah Sungai Dirinci Menurut Panjang dan DAS di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	30
Tabel 2.5. Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	33
Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016 s.d 2020	47
Tabel 2.7. Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 s.d 2020	48
Tabel 2.8. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020	49
Tabel 2.9. Dinamika Penduduk yang Dipengaruhi oleh Kelahiran, Kematian dan Perpindahan Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020.....	50
Tabel 2.10. Distribusi/Persebaran Penduduk menurut Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020	50
Tabel 2.11. Indikator Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2016-2020	51
Tabel 2.12. Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020 Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	55
Tabel 2.13. Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 s.d 2020.....	56
Tabel 2.14. Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2016 s.d. Tahun 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	58
Tabel 2.15. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020	60

	Halaman
Tabel 2.16. Inflasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020.....	61
Tabel 2.17. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020	63
Tabel 2.18. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020.....	63
Tabel 2.19. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020	65
Tabel 2.20. Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020.....	65
Tabel 2.21. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016-2020.....	66
Tabel 2.22. Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2016-2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	67
Tabel 2.23. Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	68
Tabel 2.24. Jumlah Gizi Buruk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020	70
Tabel.2.25. Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020	70
Tabel.2.26. Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020	71
Tabel.2.27. Cakupan Desa Siaga Aktif per Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020.....	71
Tabel.2.28. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020	73
Tabel 2.29. Rincian Hasil Evaluasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020.....	73
Tabel 2.30. Nilai Standar Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP) Tahun 2018-2019.....	74
Tabel 2.31. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020	75
Tabel 2.32. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020.....	75
Tabel 2.33. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020	76
Tabel 2.34. Perkembangan Capaian APK PAUD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020.....	78
Tabel 2.35. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020.....	78
Tabel 2.36. Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Kabupaten Pangkajene Tahun 2016-2020.....	79

	Halaman
Tabel 2.37. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020.....	80
Tabel 2.38. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020	81
Tabel 2.39. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020.....	82
Tabel 2.40. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020	82
Tabel 2.41. Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020	82
Tabel 2.42. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020	83
Tabel 2.43. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2016-2020.....	83
Tabel 2.44. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020	84
Tabel 2.45. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020.....	85
Tabel 2.46. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020 (dalam persen)	85
Tabel 2.47. Angka Kematian Bayi Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	87
Tabel 2.48. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	87
Tabel 2.49. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	88
Tabel 2.50. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	88
Tabel 2.51. Jumlah Kematian Neonatal (berumur kurang 1 bulan) Tahun 2016 s/d 2020 Per Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	88
Tabel 2.52. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	89
Tabel 2.53. Rasio Posyandu per satuan balita Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	90
Tabel 2.54. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	90
Tabel 2.55. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	91
Tabel 2.56. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	91

	Halaman
Tabel 2.57. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	92
Tabel 2.58. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	92
Tabel 2.59. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	93
Tabel 2.60. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	93
Tabel 2.61. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	94
Tabel 2.62. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun 2016 s.d 2020 Per Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	94
Tabel 2.63. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	95
Tabel 2.64. Jumlah Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Tahun 2016 s.d 2020 Per Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	95
Tabel 2.65. Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	96
Tabel 2.66. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	97
Tabel 2.67. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	98
Tabel 2.68. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	98
Tabel 2.69. Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	99
Tabel 2.70. Penderita Diare yang ditangani Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	99
Tabel 2.71. Angka Kejadian Malaria Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	100
Tabel 2.72. Prevalensi HIV/AIDS (%) Dari Total Populasi Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	101
Tabel 2.73. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	102
Tabel 2.74. Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	103
Tabel 2.75. Cakupan Puskesmas Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	103
Tabel 2.76. Cakupan Pembantu Puskesmas Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	104

	Halaman
Tabel 2.77. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	105
Tabel 2.78. Cakupan Pelayanan Nifas Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	106
Tabel 2.79. Cakupan Neonstus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	106
Tabel 2.80. Cakupan Pelayanan anak balita Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	107
Tabel 2.81. Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	108
Tabel 2.82. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	108
Tabel 2.83. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	110
Tabel 2.84. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	111
Tabel 2.85. Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 s.d 2020.....	111
Tabel 2.86. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	112
Tabel 2.87. Persentase rumah tinggal bersanitasi Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	112
Tabel 2.88. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	113
Tabel 2.89. Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020	113
Tabel 2.90. Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2016-2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	114
Tabel 2.91. Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2016-2020 Per Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	114
Tabel 2.105. Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	115
Tabel 2.106. Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Per Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	115
Tabel 2.92. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	116
Tabel 2.93. Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni Disuatu Wilayah Kerja Tahun 2016 s/d 2020 Per Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	116

	Halaman
Tabel 2.94 Persentase Pemukiman Yang Tertata Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	117
Tabel 2.95 Luas Area Pemukiman Yang Tertata Tahun 2016 s/d 2020 Per Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	117
Tabel 2.96 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	118
Tabel 2.97 Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	118
Tabel 2.98 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	119
Tabel 2.99 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	119
Tabel 2.100 Jumlah Lingkungan Yang Didukung Dengan PSU Tahun 2016 s/d 2020 Per Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	119
Tabel 2.101 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	120
Tabel 2.102 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	121
Tabel 2.103 Persentase Penegakan PERDA Tahun 2016 s/d 2020.....	121
Tabel 2.104 Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	122
Tabel 2.105 Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	123
Tabel 2.106 Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	124
Tabel 2.107 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	124
Tabel 2.108 Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	125
Tabel 2.109 Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	126
Tabel 2.110. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun dari Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	127

	Halaman
Tabel 2.111. Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	127
Tabel 2.112. Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	128
Tabel 2.113. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	128
Tabel 2.114. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	129
Tabel 2.115. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	129
Tabel 2.116. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	130
Tabel 2.117. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2012-2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	130
Tabel 2.118. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	131
Tabel 2.119. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	131
Tabel 2.120. Partisipasi perempuan di lembaga swasta Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	131
Tabel 2.121. Rasio KDRT Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	132
Tabel 2.122. Partisipasi angkatan kerja perempuan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	132
Tabel 2.123. Cakupan layanan rehabilitasi ector yang diberikan oleh petugas rehabilitasi ector terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	134
Tabel 2.124. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	135
Tabel 2.125. Cakupan layanan reintegrasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	136
Tabel 2.126. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	136
Tabel 2.127. Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	137

	Halaman
Tabel 2.128 Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 tahun. Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	137
Tabel 2.129 Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Non pertanian Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	138
Table 2.130 Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	138
Tabel 2.131 Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	139
Tabel 2.132 Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	139
Tabel 2.133 Persentase Bidang Tanah Bersertifikat Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	140
Tabel 2.134 Penyelesaian kasus tanah Negara Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	140
Tabel 2.135 Penyelesaian Izin Lokasi Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	141
Tabel 2.136 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Tahun 2016 s/d 2020 dan Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	141
Tabel 2.137 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	142
Tabel 2.138 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	142
Tabel 2.139 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	143
Tabel 2.140 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	143
Tabel 2.141 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kotaTahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	144
Tabel 2.142 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	145
Tabel 2.143 Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	145
Tabel 2.144 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup tahun 2016 S/D 2020 Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	146
Tabel 2.145 Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Lokasi	147

	Halaman
Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	
Tabel 2.146 Timbulan Sampah Yang Ditangani Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	147
Tabel 2.147 Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	148
Tabel 2.148 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	148
Tabel 2.149 Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Diterbitkan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	149
Tabel 2.150 Rasio Penduduk Ber- KTP Per Satuan Penduduk Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	149
Tabel 2.151 Rasio Bayi Berakte Kelahiran Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	150
Tabel 2.152 Rasio Pasangan Berakte Nikah Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	151
Tabel 2.153 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	151
Tabel 2.154 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	152
Tabel 2.155 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	152
Tabel 2.156 Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	153
Tabel 2.157 Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	153
Tabel 2.158 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	154
Tabel 2.159 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	154
Tabel 2.160 Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	155
Tabel 2.161. Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	155

	Halaman
Tabel 2.162 Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	156
Tabel 2.163 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	156
Tabel 2.164 Rasio Akseptor KB Tahun 2016-2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	157
Tabel 2.165 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun 2016-2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan...	157
Tabel 2.166 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun. Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	158
Tabel 2.167 Cakupan PUS Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	159
Tabel 2.168 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	159
Tabel 2.169 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	160
Tabel 2.170 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	160
Tabel 2.171 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	161
Tabel 2.172 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	162
Tabel 2.173 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	162
Tabel 2.174 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	163
Tabel 2.175 Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	163
Tabel 2.176 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang ber-KB Mandiri Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	164
Tabel 2.177 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	164
Tabel 2.178 Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	165

	Halaman
Tabel 2.179 Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	165
Tabel 2.180. Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	166
Tabel 2.181. Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	166
Tabel 2.182 Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	167
Tabel 2.183. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	168
Tabel 2.184 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	168
Tabel 2.185 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	169
Tabel 2.186 Rasio Ijin Trayek Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	169
Tabel 2.187 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	170
Tabel 2.188. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	170
Tabel 2.189 Persentase layanan angkutan darat Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	170
Tabel 2.190. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	171
Tabel 2.191 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	171
Tabel 2.192. Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	172
Tabel 2.193. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	172
Tabel 2.194 Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	173
Tabel 2.195. Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	173

	Halaman
Tabel 2.196 Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	174
Tabel 2.197 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Dan Kepemilikan Computer Pribadi Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	174
Tabel 2.198 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	175
Tabel 2.199 Persentase BPR/LKM Aktif Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	175
Tabel 2.200 Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	176
Tabel 2.201 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	176
Tabel 2.202 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	177
Tabel 2.203 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	178
Tabel 2.204 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	178
Tabel 2.205 Tersedianya Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	179
Tabel 2.206 Buku "Kabupaten Dalam Angka" Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	179
Tabel 2.207 Buku "PDRB" Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	180
Tabel 2.208 Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunkasi Perangkat Daerah Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	180
Tabel 2.209 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	181
Tabel 2.210 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	182
Tabel 2.211 Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	182
Tabel 2.212 Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	183
Tabel 2.213 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	184
Tabel 2.214 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	184

	Halaman
Tabel 2.215 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	185
Tabel 2.216 Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	185
Tabel 2.217 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	185
Tabel 2.218. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	186
Tabel 2.219. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	186
Tabel 2.220 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	187
Tabel 2.221. Lama kunjungan Wisata Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	187
Tabel 2.222. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	188
Tabel 2.223 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	188
Tabel 2.224 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	189
Tabel 2.225. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	190
Tabel 2.226. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	190
Tabel 2.227. Cakupan Bina Kelompok Petani Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	191
Tabel 2.228. Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	192
Tabel 2.229. Konsumsi Ikan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	193
Tabel 2.230. Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	193
Tabel 2.231. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	194
Tabel 2.232. Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	195
Tabel 2.233 Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	196
Tabel 2.234. Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	196

	Halaman
Tabel 2.235 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPd Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	197
Tabel 2.236 Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	198
Tabel 2.237 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	198
Tabel 2.238. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan dan Penetapan APD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	199
Tabel 2.239. Persentase SILPA Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	199
Tabel 2.240. Persentase Belanja Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	200
Tabel 2.241. Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	200
Tabel 2.242 Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	201
Tabel 2.243 Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	201
Tabel 2.244. Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	201
Tabel 2.245. Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	202
Tabel 2.246 Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	202
Tabel 2.247. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	203
Tabel 2.248 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	203
Tabel 2.249 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	204
Tabel 2.250 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	204
Tabel 2.251 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	205
Tabel 2.252 Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	205
Tabel 2.253 Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	205

	Halaman
Tabel 2.254. Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	206
Tabel 2.255. Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	207
Tabel 2.256. Jumlah Temuan BPK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020	207
Tabel 2.257. Sekretariat Dewan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020	208
Tabel 2.258. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Rumah Tangga per kapita Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	209
Tabel 2.259. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	209
Tabel 2.260. Pengeluaran Konsumsi Bukan Makanan Perkapita Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	209
Tabel 2.261. Produktivitas Total Daerah Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	210
Tabel 2.262. Presentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	210
Tabel 2.263. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	211
Tabel 2.264. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	211
Tabel 2.265. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di BPR Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	212
Tabel 2.266. Angka Kriminalitas Yang Tertangani Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	212
Tabel 2.267. Capaian Indikator Kinerja RPJMD 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020	214
Tabel 2.268. Mapping Program SPM Dalam Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	235
Tabel 2.269. Target Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	235
Tabel 2.270. Target Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	236
Tabel 2.271. Target Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	237
Tabel 2.272. Target Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	237
Tabel 2.273. Target Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	238

	Halaman
Tabel 2.274. Target Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	238
Tabel 2.275. Capaian Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 – 2020	241
Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkep	252
Tabel 3.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020	256
Tabel 3.3. Retribusi Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2016-2020	263
Tabel 3.4. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2016-2020	264
Tabel 3.5. Lain-Lain PAD yang sah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2016-2020	266
Tabel 3.6. Dana Perimbangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2016-2020	267
Tabel 3.7. Dana Perimbangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2016-2020	271
Tabel 3.8. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016-2020	275
Tabel 3.9. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020	279
Tabel 3.10. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2019	281
Tabel 3.10. Rasio Lancar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018-2020	281
Tabel 3.11. Rasio Cepat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018-2020	283
Tabel 3.12. Rasio Cepat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018-2020	284
Tabel 3.13. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016-2019	285
Tabel 3.14. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2018-2020	286
Tabel 3.15. Perkembangan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018 – 2020..	287
Tabel 3.16. Realisasi Pembiayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2016 - 2020 (Rp juta)	288
Tabel 3.17. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020	288
Tabel 3.18. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020	289

	Halaman
Tabel 3.19. Realisasi Sisa Perhitungan Anggaran Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020	298
Tabel 3.20. Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018-2020 ...	290
Tabel 3.21. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2021-2026	293
Tabel 3.22. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	293
Tabel 3.23. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2026	296
Tabel 3.24. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	298
Tabel 3.25. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2026	303
Tabel 3.26. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	306
Tabel 4.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	313
Tabel 4.2. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berdasarkan Tujuan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	334
Tabel 4.2. Jumlah Capaian Indikator TPB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	335
Tabel 4.3. Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB pada Kelompok Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	336
Tabel 4.4. Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB pada Kelompok Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	340
Tabel 4.4. Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB pada Kelompok Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	343
Tabel 4.5. Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB pada Kelompok Indikator Belum Memiliki Data di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	344
Tabel 5.1. Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026	375
Tabel 5.2. Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026	376
Tabel 5.3. Keselarasan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026	381
Tabel 5.4. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	383

	Halaman
Tabel 5.5. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Proritas Pembangunan Sulawesi Selatan, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	384
Tabel 5.6. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026	389
Tabel 5.7 Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Visi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	392
Tabel 5.8 Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	392
Tabel 5.9 Keselarasan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Sasaran RPJMD Kabupayen Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026.....	393
Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	409
Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2026	413
Tabel 6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	419
Tabel 6.4 Kesesuaian Prioritas Pembangunan dengan Misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	421
Tabel 6.5 Integrasi Program KDH dan Wakil KDH Terpilih ke dalam Program Pembangunan Daerah	422
Tabel 6.6 Rencana Proyek Prioritas Strategis Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026	425
Tabel 6.6 Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026	431
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2026.....	446
Tabel 7.2 Rencana Program Prioritas disertai Pendanaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2026.....	448
Tabel 8.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2026	487
Tabel 8.2 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2022-2026.....	488
Tabel 8.3 Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2026	489
Tabel 8.4 Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2026	504
Tabel 8.5 Penetapan Target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2026	508

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Rapat Koordinasi Startegi Pencapaian Visi, Misi dan Dasa Cita Pangkajene dan Kepulauan Hebat dan Penyusunan Ranwal RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Hotel Grand Asia, Makassar 5-8 April 2021	2
Gambar 1.2 Keterkaitan Rancangan Akhir RPJMD terhadap Penyusunan Dokumen RPJMD.....	4
Gambar 1.3 Penyerahan Dokumen Ranwal RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 oleh Bupati H. Muhammad Yusran Lalogau kepada Ketua DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan H. Haris Gani pada Rapat Paripurna.....	6
Gambar 1.4 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan	12
Gambar 1.5 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan RTRW Kabupaten	18
Gambar 1.6 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan RENSTRA	19
Gambar 1.7 Hubungan RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.....	20
Gambar 1.8 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	20
Gambar 2.1 Peta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	24
Gambar 2.2 Peta Daerah Rawan Banjir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	44
Gambar 4.1 Kelompok Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	335
Gambar 5.1. Pondasi Pilar Misi dalam Pencapaian Visi.....	381
Gambar 5.2 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-1	385
Gambar 5.3 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-2	386
Gambar 5.4 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-3	387
Gambar 5.5 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-4	387
Gambar 5.6 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5	388
Gambar 6.1 Tema Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2026	412
Gambar 6.2 Ilustrasi Transformasi Agneda Politik Kepala Daerah	420

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sul-Sel Tahun 2016 – 2020	52
Grafik 2.2. Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulsel, dan Nasional Tahun 2016-2020	53
Grafik 2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulsel Tahun 2016 – 2020.....	54
Grafik 2.4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulsel, Tahun 2016 – 2020	55
Grafik 2.5. Perkembangan PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2016-2020	59
Grafik 2.6. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.....	60
Grafik 2.7. Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	62
Grafik.2.8. Rasio Gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020.	64
Grafik.2.9. Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2016 – 2020.....	64
Grafik 2.10 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 – 2019.....	68
Grafik 2.11 Angka Harapan Lama Sekolah (AHS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 – 2020	68
Grafik 2.12 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 – 2020	69
Grafik 2.13 Perbandingan IPG Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Provinsi Sulsel Tahun 2017–2020	72
Grafik 2.14 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2020	72
Grafik 3.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	251
Grafik 3.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	254
Grafik 3.3 Struktur Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	254
Grafik 3.4 Pajak Hotel Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020.....	257
Grafik 3.5 Pajak Restoran Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020	257
Grafik 3.6 Pajak Hiburan Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020	258

		Halaman
Grafik 3.7	Pajak Reklame Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020.....	258
Grafik 3.8	Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020	259
Grafik 3.9	Pajak Parkir Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020	259
Grafik 3.10	Pajak Air Tanah KabupatenPangkepTahun 2016 s/d 2020	260
Grafik 3.11	Pajak Minerba Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020	260
Grafik 3.12	Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020	261
Grafik 3.13	Pajak Daerah Lainnya Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020	261
Grafik 3.14	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020	268
Grafik 3.15	Dana Alokasi Umum Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020	269
Grafik 3.14	Dana Alokasi Khusus Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020	269
Grafik 3.17	Komposisi Belanja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 s/d 2020	276
Grafik 3.18	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 s/d 2020	277

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2021-2026.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terhitung sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Periode 2021-2026, **H. YUSRAN LALOGAU. S.Pi, M.Si** dan **H. SYAHBAN SAMMANA,SH.**, pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr., maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berkewajiban menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dokumen tersebut harus selesai dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 5 ayat 2 dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 menyatakan bahwa “Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan

tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergi dengan perencanaan pemerintah yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Penyusunan RPJMD juga berpedoman pada RPJP Nasional, RPJM Nasional, Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun sebelumnya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), berbagai kebijakan pembangunan nasional seperti SDGs, pengentasan kemiskinan, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dokumen hasil studi, dan hasil kajian lainnya. RPJMD memuat gambaran umum wilayah, kemampuan pengelolaan keuangan daerah, masalah dan isu strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan, strategi, arah kebijakan, dan program serta pendanaan pembangunan daerah serta dibagian akhir menyajikan indikator kinerja daerah.

Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional disamping harus memperhatikan adanya regulasi. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Gambar 1.1

Rapat Koordinasi Strategi Pencapaian Visi Misi dan dasacita Pangkajene dan Kepulauan Hebat dan Penyusunan Ranwal RPJMD KabupatenPangkajene dan Kepulauan di Hotel Grand Asia Makassar 5-8 April 2021



Sumber; Tim Media Bappeda KabupatenPangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

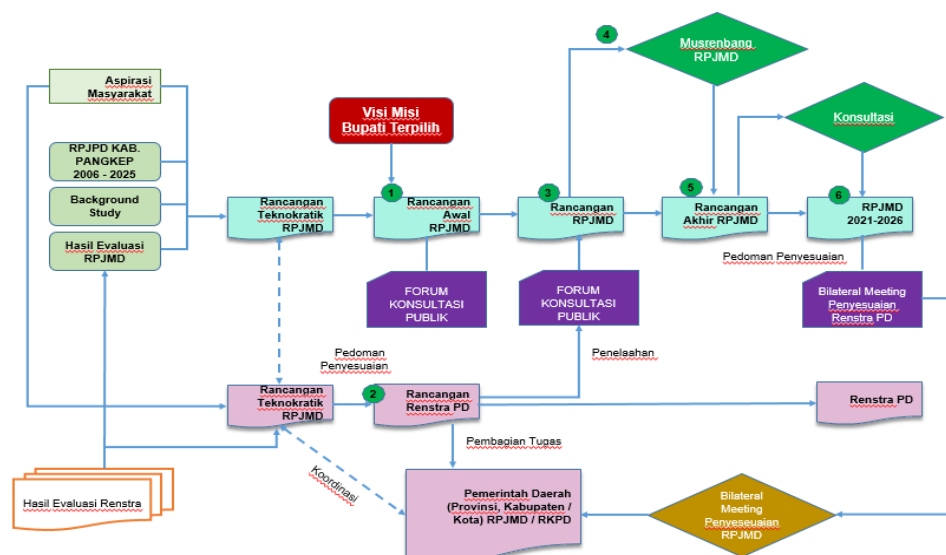
Tahapan proses penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 diawali dengan Persiapan Penyusunan RPJMD dimulai dengan; penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD, orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 dimulai sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik dimana penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan rancangan RPJMD yang merupakan penyempurnaan rancangan awal RPJMD dan berdasarkan rancangan Restra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi. Kemudian dilakukan Musrenbang RPJMD yang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan yang mencakup penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, perumusan program perangkat daerah dan kajian terhadap lingkungan hidup strategis sebagaimana amanat pada pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 dibahas untuk memperoleh kesepakatan, bersama perangkat daerah dan para pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik dan disempurnakan. Tahapan berikutnya Rancangan Awal RPJMD diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD. Selanjutnya melakukan konsultasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk memperoleh masukan terhadap Rancangan Awal RPJMD. Kemudian Rancangan Awal RPJMD disempurnakan berdasarkan saran penyempurnaan dari Gubernur Sulawesi Selatan. Pada tahapan selanjutnya, Rancangan Awal RPJMD yang telah disempurnakan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renstra perangkat daerah tahun 2021-2026. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,

dan program pembangunan daerah terhadap rancangan RPJMD dilakukan dalam Forum Musrenbang yang menghasilkan kesepakatan sebagai bahan perumusan menjadi Rancangan Akhir RPJMD. Selanjutnya dilakukan penyampaian Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 kepada DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disertai lampiran Rancangan Akhir RPJMD, untuk dibahas dalam rangka memperoleh kesepakatan bersama DPRD dan ditetapkan menjadi Perda tentang RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026.

Gambar 1.2

Keterkaitan Rancangan Akhir RPJMD terhadap Penyusunan Dokumen RPJMD



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 dipengaruhi juga dengan capaian kinerja ekonomi makro pada pelaksanaan RPJMD di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 sebesar -1,69 persen, tentunya sangat jauh dari apa yang ditargetkan pada RPJMD Tahun 2020 sebesar 8,20-9,50 persen. Penurunan pertumbuhan tersebut diakibatkan dari penyebaran COVID-19 yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terutama pada sektor industri pengolahan dalam hal ini mayoritas dari industri semen, perhotelan, jasa, ketenagakerjaan dan perdagangan. Melemahnya industri semen dikarenakan serapan pasar akan produk semen turun, sehingga terjadi over produksi semen di Pangkajene dan Kepulauan yang memberikan dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Selanjutnya inflasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 sebesar 2,04 persen, capaian tersebut masih dibawah kisaran yang ditargetkan

pada RPJMD Tahun 2020. Mengenai kondisi ketenagakerjaan meliputi capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 sebesar 5,18 persen dan target RPJMD sebesar 6,00 persen. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 menunjukkan tren penurunan sebesar 13,96 persen dari total populasi atau sebanyak 47,12 ribu jiwa. Dibandingkan dengan tahun 2019, penduduk miskin Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meningkat sekitar 0,05 persen atau sekitar 5 ribu jiwa tahun 2020. Peningkatan tersebut diakibatkan karena adanya pembatasan aktifitas masyarakat oleh pemerintah untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Angka IPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 68,72 persen mengalami peningkatan 0,43 persen dari tahun 2019 yaitu sebesar 68,29 persen. Sedangkan kondisi Gini Ratio Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 sebesar 0,345 masih termasuk kategori sedang.

Dokumen RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 juga telah memperhatikan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil evaluasi capaian SDGs tahun 2020, jumlah Indikator yang menjadi Kewenangan Kabupaten adalah 220 Indikator SDGs. Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 42 indikator (19,09 persen), indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 43 indikator (19,55 persen), Indikator yang belum dilaksanakan / belum mencapai target sebanyak 12 indikator (5,45 persen), dan indikator yang belum memiliki data sebanyak 123 indikator (55,91 persen).

Dokumen RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021-2026 selaras dengan RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005-2025, RPJMD periode ini merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 tahun 2005 serta Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032, dengan memperhatikan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Dokumen RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Gambar 1.3.

Penyerahan Dokumen Ranwal RPJMD KabupatenPangkajene dan Kepulauan 2021-2026 Oleh Bupati H. Muhammad Yusran Lalogau kepada Ketua DPRD KabupatenPangkajene dan Kepulauan H. Haris Gani pada Rapat Paripurna



Sumber; Bagian Protokol Sekretariat daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021-2026 ini, sejumlah peraturan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka

- Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Percepatan

- Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
25. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 27. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 29. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 39. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
 40. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
 42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
 43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
 44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
 45. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023; (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2002 Nomor 5);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 8);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembaran daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 5);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 5);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

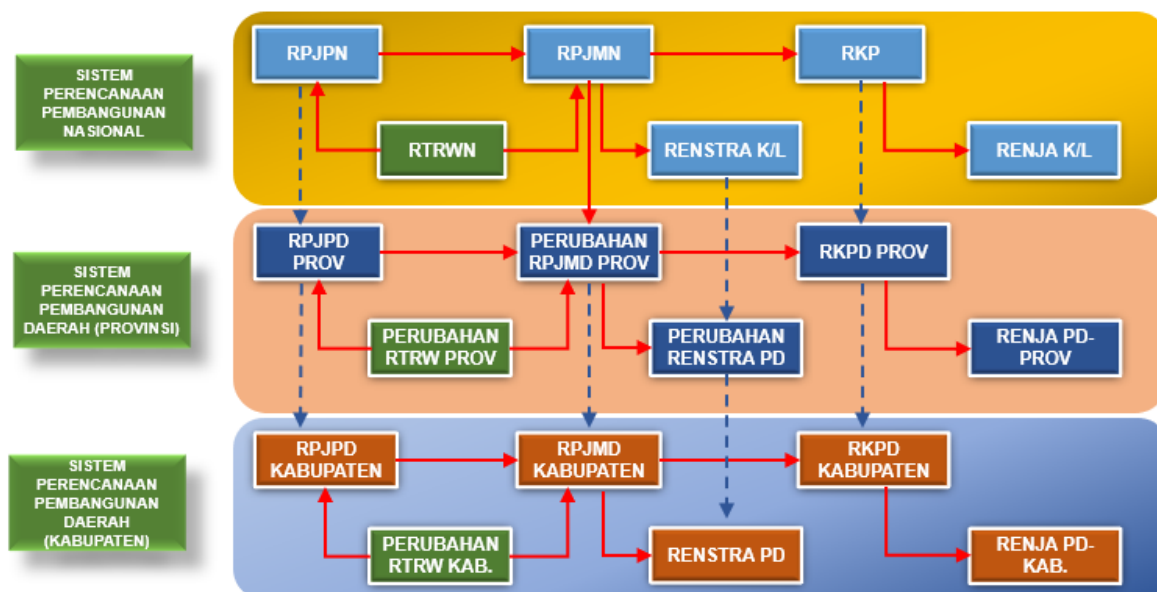
Dokumen RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005-2025, pada tahapan keempat (2021-2025), serta Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011-2031. RTRW berposisi memberi arahan spasial kepada rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dalam RPJMD. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga disertai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD untuk

memastikan bahwa desain perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan benar-benar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 1.4

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 1.1.

Keterkaitan Antar Misi RPJM Nasional Tahun 2020-2024, Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026.

Visi RPJMN 2020-2024 : “Terwujudnya Indonesia Maju, yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”	Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 : “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”	Visi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 : “Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan “
Misi		
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	4. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel	3. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian,

Visi RPJMN 2020-2024 : “Terwujudnya Indonesia Maju, yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”	Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 : “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”	Visi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 : “Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan “
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	kelautan/perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	5. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya lokal
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya		2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga		
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya		
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		

Sumber : RPJMN 2020-2024, RPJMD Prov. Sulawesi Selatan 2019-2023

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 juga memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD yang menggunakan analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sejumlah substansi yang terdapat di dalam dokumen KLHS, seperti daya dukung dan daya tampung (DDDT) lingkungan hidup, isu strategis dan permasalahan, serta rekomendasi, dipastikan terakomodir di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026.

Secara regional, penyusunan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 juga memperhatikan dokumen RPJMD kabupaten tetangga, antara lain, RPJMD Kabupaten Maros, RPJMD Kabupaten Barru, RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan RPJMD Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi acuan bagi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam lingkup pemerintahan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Selain itu, RPJMD ini juga dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun selama periode 2021-2026 dimana RKPD ini selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) setiap tahunnya, untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di dalam RPJMD ini akan dicapai secara bertahap setiap tahun, sehingga proses pembangunan daerah akan terlaksana dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan.

Sesuai tahapan penyusunan bahwa Rancangan Akhir RPJMD diselesaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD mencakup beberapa hal antara lain:

1.3.1. Keterhubungan RPJMD dan RPJPD

RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005-2025. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan RPJMD yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD, sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026

VISI	
Menjadi daerah maju dan mandiri di Sulawesi Selatan yang didukung oleh struktur ekonomi dan struktur wilayah yang kuat dengan dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan pada tahun 2025	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan
MISI RPJPD PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	MISI RPJMD PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
1) Menjadi daerah yang maju mandiri melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mantap	2) Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi
2) Mengembangkan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan dalam rangka mendukung struktur ekonomi daerah dan wilayah yang kuat	3) Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah
	4) Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif
	5) Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan
3) Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan dalam berbagai aspek kehidupan yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan	1) Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya lokal

Visi Jangka Panjang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025 adalah **“Menjadi Daerah Maju Dan Mandiri di Sulawesi Selatan Yang Didukung Oleh Struktur Ekonomi Dan Struktur Wilayah Yang Kuat Dengan Dijiwai Oleh Nilai-Nilai Keagamaan Pada Tahun 2025”**.

Visi singkat ini mengandung pengertian yang luas dan menggambarkan aspirasi dan cita-cita masyarakat Pangkajene dan Kepulauan yang menginginkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dimasa yang akan datang menjadi daerah yang maju di Sulawesi Selatan dalam berbagai dimensi kehidupan, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dan alam, posisi geografis, kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dan tatanan budaya masyarakat lokal.

Sejalan dengan visi tersebut dan dengan memperhatikan kondisi obyektif yang dimiliki, maka visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjadi daerah yang maju mandiri melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mantap;
2. Mengembangkan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan dalam rangka mendukung struktur ekonomi daerah dan wilayah yang kuat;
3. Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan dalam berbagai aspek kehidupan yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.

1.3.2. Keterhubungan RPJMD dan RPJMN Tahun 2020-2024.

RPJMD memperhatikan dan mempedomani RPJMN, sehingga penyusunan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempedomani substansi RPJMN yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Dalam Peraturan Presiden tersebut, dinyatakan bahwa RPJPN 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024. Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, adalah: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan **5 (lima) arahan utama** sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyederhanaan Regulasi Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

1.3.3. Keterhubungan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu daerah dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 juga tidak lepas dari visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam dokumen RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023.

Visi Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun ke depan adalah: **“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif Dan Berkarakter”** yang diwujudkan melalui misi:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Mewujudkan Infrastruk-tur yang Berkualitas dan Aksesibel;
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif;
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;
5. Meningkatkan Produk-tivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan

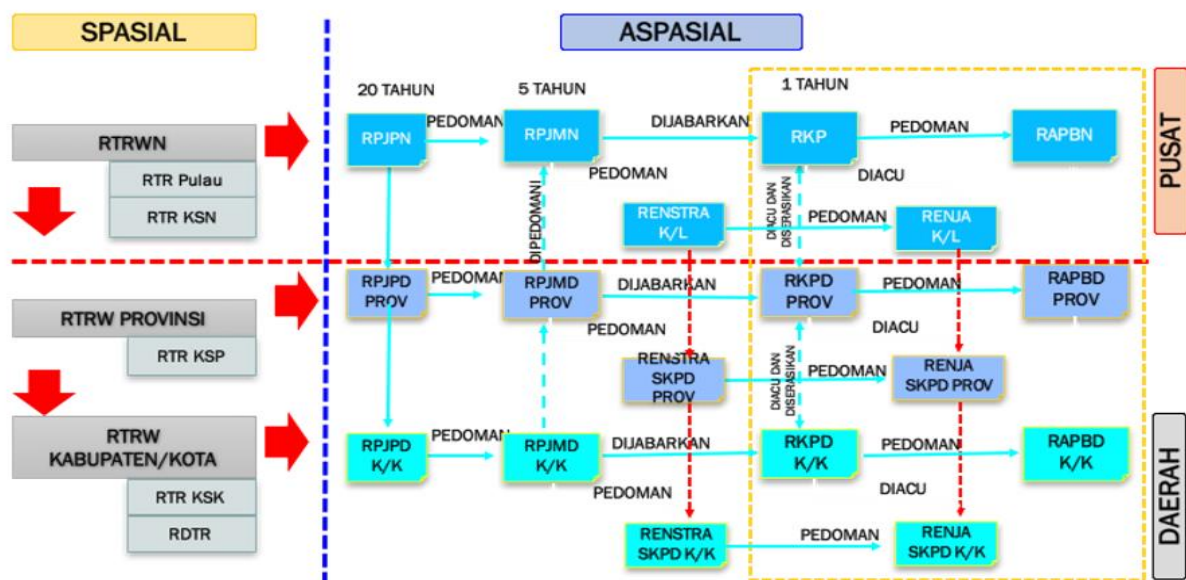
Sasaran dari Misi ke lima pembangunan untuk mewujudkan Visi Pembangunan provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan;
2. Berkembangnya inovasi dalam pelayanan public;
3. Meningkatnya Akseibilitas Infrastruktur;
4. Meningkatnya Produktivitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
5. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat secara merata;
6. Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah;
7. Meningkatnya derajat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat;
8. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan;
9. Meningkatnya Produktifitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis Sumber Daya Alam;
10. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;

1.3.4. Keterhubungan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai dasar dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. RPJMD Kabupaten PangKajene dan Kepulauan juga memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan sebagaimana tujuan dari RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Keterhubungan RPJMD dengan RTRW sebagaimana pada gambar berikut ini;

Gambar. 1.5.
Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan RTRW Kabupaten



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

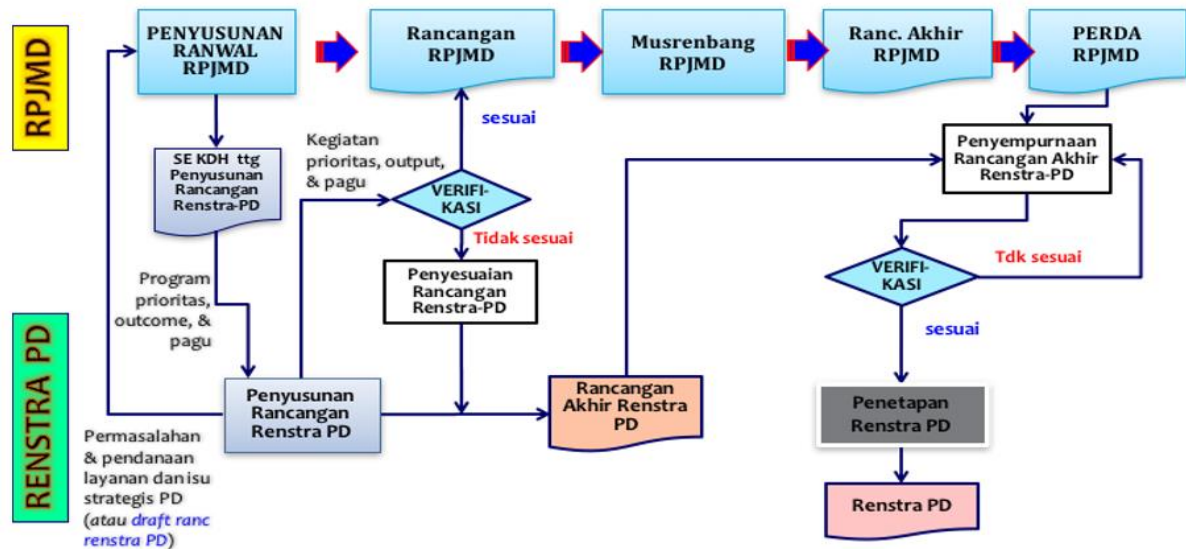
1.3.5. Keterhubungan RPJMD dengan Renstra PD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Renstra PD kemudian dijabarkan

menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Keterhubungan RPJMD dengan Renstra PD sebagaimana pada gambar berikut ini:

Gambar. 1.6.
Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan RENSTRA



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

1.3.6. Keterhubungan RPJMD dengan RKPD

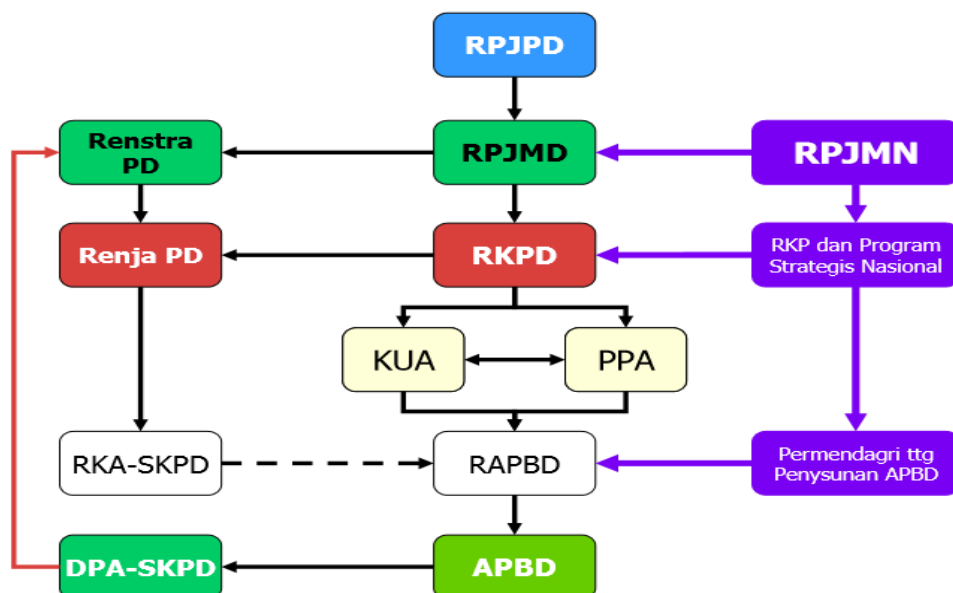
Pelaksanaan RPJMD setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda), dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran, serta bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Keterhubungan RPJMD dengan RKPD sebagaimana pada gambar berikut ini:

Gambar 1.7
Hubungan RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Gambar. 1.8.
Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

1.3.7. Keterhubungan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi. Berdasarkan kajian KLHS diatas, rekomendasi yang dihasilkan harus ditindaklanjuti sebagai bentuk penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005-2025 dan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 disusun dengan Tujuan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD perencanaan daerah untuk satu tahun.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. Sebagai pedoman Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
5. Menjadi instrument bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.
6. Menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulsel dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan, Pemerintah Pusat dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN.

8. Sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 terdiri atas 9 (sembilan) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; merupakan bagian yang menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD serta sistematika penulisan perubahan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah: adalah bagian yang menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan aspek-aspek tersebut. Gambaran kondisi umum daerah dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian pada tahap perumusan berupa informasi yang relevan dan penting yang menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah; menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, meliputi: kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan, dan kerangka pendanaan.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah; menguraikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama dalam penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah, yang menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terpilih Periode Tahun 2021-2026 serta menjelaskan pengertian dari kata-kata kunci yang ada dalam pernyataan visi tersebut, dan kemudian menjabarkan ke dalam pernyataan misi. Berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan hendak

dicapai kepala dan wakil kepala daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan hingga akhir periode RPJMD ini.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; merupakan bagian yang menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam RENSTRA Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; menguraikan penetapan indikator kinerja daerah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX Penutup; menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pedoman transisi untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dengan memasukan program-program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Kaidah pelaksanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dokumen.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, meliputi aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, untuk memberikan gambaran tentang potensi dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan guna menjadi sumber daya pokok bagi pengembangan di masa depan, berikut kelemahan-kelemahan yang harus diatasi. Dengan demikian, apa yang dibahas di bab ini merupakan fondasi tentang perencanaan pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lima tahun kedepan.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki luas wilayah 12.362,29 km². Luas wilayah tersebut meliputi: Daratan seluas 898,29 km² dan laut 4 mil seluas 11.464 km². Luas wilayah tersebut merupakan penetapan dari dua Kementerian Lembaga Negara, yaitu masing-masing: luas darat menurut Permendagri Nomor 66 Tahun 2011 dan luas laut menurut Bakosurtanal (2011) dalam buku cakupan dan luas wilayah daerah otonom seluruh Indonesia.

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2020

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 (Tiga Belas) kecamatan, dimana 9 (sembilan) kecamatan terletak pada wilayah daratan dan 4 (empat) kecamatan terletak di wilayah kepulauan, dengan luas wilayah masing-masing kecamatan sesuai yang tertera pada tabel 2.1;

Tabel. 2.1.
Luas Wilayah Per Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan, Lingkungan, Dusun, RW / RK dan RT Menurut Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Kecamatan	Luas Daratan (Km ²)	% Terhadap Luas Wilayah (%)	Jumlah Pulau	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jumlah Desa	Jumlah Kel.	Jumlah Lingk.	Jumlah Dusun	Jumlah RW/RK	Jumlah RT
1.	Lk. Tangaya	120.00	10,79	62	5	8	1	2	29	35	74
2.	Lk. Kalmas	91.50	8,23	14	5	6	1	2	16	23	53
3.	Lk. Tupabbiring	54.44	4,89	20	5	7	2	0	18	32	92
4.	Lk. Tupabbiring Utara	85.56	7,69	18	5	7	0	0	21	32	75
5.	Pangkajene	47.39	4,26	1	10	0	9	11	0	48	119
6.	Minaste'ne	76.48	6,88	-	50	2	6	10	4	57	140
7.	Balocci	143.48	12,90	-	700	1	4	8	2	25	77
8.	Tondong Tallasa	111.20	10,00	-	625	6	0	0	13	30	75
9.	Bungoro	90.12	8,10	-	150	5	3	10	13	54	149
10.	Labakkang	98.46	8,85	-	100	9	4	9	26	97	136
11.	Ma'rang	75.22	6,76	-	100	6	4	10	18	19	171
12.	Segeri	78.28	7,04	-	100	2	4	8	5	6	117
13.	Mandalle	40.16	3,61	-	100	6	0	0	14	31	80
	Pangkajene dan Kepulauan	1.112,29	100,00	115	350	65	38	70	179	489	1.358

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Cakupan wilayah yang luas menjadikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki batas administrasi dan kedekatan dengan pulau-pulau daratan utama lainnya yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Maros.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone.
- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar (Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali).

2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak di bagian barat dari Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Ibukota Pangkajene sebagai pusat pelayanan wilayah bagi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selain itu letaknya juga sangat strategis karena dekat dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan letak astronomi, Kabupaten pangkajene dan kepulauan berada pada koordinat antara Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak diantara 4°40'LS sampai 8°00'LS dan diantara 110°BT sampai 119°48'67" BT dengan jarak tempuh 51 km dari kota Makassar.

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari wilayah daratan, pegunungan dan kepulauan, masing-masing wilayah memiliki jarak tempuh yang

berbeda menuju ibukota kabupaten. Kecamatan yang jarak tempuhnya terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Liukang Tangaya, yaitu sejauh 291,29 km. Sedangkan kecamatan yang terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Pangkajene disusul Kecamatan Minasatene, masing-masing berjarak 2 km dan 2,5 km.

Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, 38 kelurahan dan 65 desa dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Pangkajene	Jagong, Tumampua, Anrong Appaka, Sibatua, Pabundukang, Bonto Perak, Mappasaile, Paddoang Doangan, Tekolabbua.	-
2	Minasate'ne	Biraeng, Bontokio, Bontoa, Kalabbirang, Minasate'ne, Bonto Langkasa	Kabba, Panaikang
3	Balocci	Balleangin, Balocci Baru, Kassi, Tonasa.	Tompo Bulu
4	Tondong Tallasa	-	Bantimurung, Bonto Birao, Bulu Tellue, Lanne, Malaka, Tondong Kura.
5	Bungoro	Boriappaka, Samalewa, Sapanang	Biring Ere, Bowong Cindea, Bulu Cindea, Mangilu, Tabo-Tabo.
6	Labakkang	Borimasunggu, Mangallekana, Labakkang, Pundata Baji	Bara Batu, Batara, Bonto Manai, Gentung, Kanaungan, Kassi Loe, Manakku, Patallasang, Taraweang.
7	Ma'rang	Bonto-Bonto, Talaka, Marang, Attang Salo	Alesipitto, Padang Lampe, Pitu Sunggu, Pitue, Punranga, Tamangapa.
8	Segeri	Bawasalo, Bone, Bonto Matene, Segeri.	Baring, Parenreng
9	Mandalle		Benteng, Boddie, Coppo Tompong, Mandalle, Manggalung, Tamarupa.
10	Liukang Tupabbiring	Mattiro Bintang, Mattiro Sompe	Mattiro Bone, Mattiro Deceng, Mattiro Dolangeng, Mattiro Langi, Mattiro Matae, Mattaro Adae, Mattiro Ujung.
11	Liukang Tupabbiring Utara		Mattiro Baji, Mattiro Bombang, Mattiro Bulu, Mattiro Kanja, Mattiro Labangeng, Mattiro Uleng, Mattiro Walie
12	Liukang Tangaya	Sapuka	Balo Baloang, Kapoposan Bali, Poleonro, Sabalana, Sabaru Sailus, Satanger, Tambaang.
13	Liukang Kalmas	Kalu-Kalukuang	Dewakang, Doang Doangan Iompo, Kanyurang, Marasende, Pammas, Sabaru.

Sumber: DPMD, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2020

Berdasarkan kondisi fisik wilayahnya, wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dibagi menjadi tiga kawasan yaitu:

1) Kawasan Pesisir.

Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0–100 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Minasatene, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandalle. Berdasarkan

kemiringan lahan, memiliki lereng 0–2%, merupakan wilayah pantai dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 24,8 km.

2) Kawasan Pegunungan.

Merupakan dataran tinggi/ perbukitan, meliputi wilayah Kecamatan Balocci dan Kecamatan Tondong Tallasa.

3) Kawasan Kepulauan.

Wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas wilayah. Wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi wilayah yang sangat besar untuk dikembangkan secara lebih optimal, untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Kecamatan yang terletak di wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meliputi Kecamatan Liukang Tupabiring, Kecamatan Liukang Tupabiring Utara, Kecamatan Liukang Kalmas dan Kecamatan Liukang Tangaya.

2.1.1.1.3. Kondisi Topografi

Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan kabupaten yang struktur wilayah terdiri atas 2 bagian utama yang membentuk kabupaten ini yaitu:

1. Wilayah Daratan

Secara garis besar wilayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan ditandai dengan bentang alam wilayah dari daerah dataran rendah sampai pegunungan, di mana potensi cukup besar juga terdapat pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu ditandai dengan terdapatnya sumber daya alam berupa hasil tambang, seperti batu bara, marmer, dan semen. Disamping itu potensi pariwisata alam yang mampu menambah pendapatan daerah.

Kecamatan yang terletak pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu terdiri dari: Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Minasa Te'ne, Kecamatan Tondong Tallasa, dan Kecamatan Mandalle.

2. Wilayah Kepulauan

Wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas wilayah yang sangat urgen untuk dibahas, wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan memiliki potensi wilayah yang sangat besar untuk dikembangkan secara lebih optimal, untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan. Kecamatan yang terletak di wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu:

- Kecamatan Liukang Tupabiring
- Kecamatan Liukang Tupabiring Utara

- Kecamatan Liukang Kalmas
- Kecamatan Liukang Tangaya

1) Kemiringan Lahan

Secara garis besar kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan data hasil penelitian Laporan Geologi Terpadu, terbagi dalam 4 (empat) kategori wilayah yaitu Klasifikasi pengelompokan sudut lereng yang terdapat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagai berikut:

- wilayah sudut lereng 0-2 %
- wilayah sudut lereng 2-15 %
- wilayah sudut lereng 15-45 %
- wilayah sudut lereng > 45 %

Tabel 2.3
Klasifikasi Sudut Lereng di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Sudut Lereng (%)	Ketinggian Diatas Muka Laut (MpdI)	Bentangan dan Batuan Penyusun	Sebaran (Kecamatan)	Jenis/Peruntukan Lahan
1	0-2	0-25	Gamping, lava/breksi, endapan alluvium	Mandalle, Segeri, Ma'rang, Labakkang, Bungoro, Pangkajene	Persawahan, Pertambakan, Perkebunan, Permukiman, Pertambangan
2	2-15	25-100	Gamping, lava/breksi, Basal, Komplek melage, Malihan, Kars dan Sedimen Flis	Mandalle, Segeri, Bungoro, Minasate'ne, Tondong Tallasa, Balocci	Perkebunan, Peternakan, Permukiman, Hutan Belukar, Alang-Alang
3	15-45	100-500	Gamping, Sedimen, Lava/breksi, Tufa, Konglomerat, Perbukitan Kars, Basal, Malihan dan Trakit	Mandalle, Segeri, Bungoro, Minasate'ne, Tondong Tallasa, Balocci	Perkebunan, Hutan Lindung, Semak Belukar, Peternakan, Permukiman
4	>45	500-1000 (puncak)	Lava/breksi, Tufa, Konglomerat, Gamping, Ultra Basa dan Basal, Retas Basal Batu Gamping, Lava dan Breaksi	Mandalle, Segeri, Bungoro, Ma'rang, Tondong Tallasa, Balocci, Minasate'ne	Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Perkebunan, Rekreasi, Pertambangan, Permukiman

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012

2) Ketinggian Lahan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempunyai kondisi topografi yang relatif bervariasi secara garis besar dapat dibagi dalam 4 (empat) bagian yaitu:

- Dataran rendah (0-25 MpdI) sebagian besar terletak di Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Minasa Te'ne, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandalle.
- Dataran Tinggi (25-100 MpdI) terletak di sebahagian wilayah Kecamatan Balocci, Kecamatan Tondong Tallasa, Kecamatan Segeri, Kecamatan Minasa Te'ne dan Kecamatan Mandalle, terutama dibagian utara.

3. Dataran Pegunungan (500-1000 MpdI), sebagian besar di Kecamatan Balocci, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Tondong Tallasa atau pada bagian timur Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Daerah Pesisir terletak di bagian pantai barat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terutama pada Kecamatan Pangkajene, Labakkang, Ma'rang, Segeri dan Mandalle, serta kecamatan kepulauan yang tergolong sebagai daerah datar terletak pada Kecamatan Liukang Tupabiring, Liukang Tupabiring Utara, Liukang Tangaya, dan Liukang Kalmas.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempunyai kondisi topografi yang relatif bervariasi secara garis besar dapat dibagi dalam 4 (empat) bagian yaitu:

- a. Dataran rendah (0-25 MpdI) sebagian besar terletak di Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Minasa Te'ne, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandalle.
- b. Dataran Tinggi (25-100 MpdI) terletak di sebagian wilayah Kecamatan Balocci, Kecamatan Tondong Tallasa, Kecamatan Segeri, Kecamatan Minasa Te'ne dan Kecamatan Mandalle, terutama dibagian utara.
- c. Dataran Pegunungan (500-1000 MpdI), sebagian besar di Kecamatan Balocci, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Tondong Tallasa atau pada bagian timur Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- d. Daerah Pesisir terletak di bagian pantai barat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terutama pada Kecamatan Pangkajene, Labakkang, Ma'rang, Segeri dan Mandalle, serta kecamatan kepulauan yang tergolong sebagai daerah datar terletak pada Kecamatan Liukang Tupabiring, Liukang Tupabiring Utara, Liukang Tangaya, dan Liukang Kalmas.

2.1.1.1.4. Kondisi Geologi

1) Struktur dan Karakteristik

Berdasarkan peta geologi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka terdapat 4 (empat) bagian besar dari kondisi struktur geologi yang menyusun tanah dan batuan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Data dan informasi tentang kondisi geologi sangat penting artinya dalam memanfaatkan lahan dan memanfaatkan sumber daya mineral dan batuan yang terkandung di dalamnya. Adapun struktur geologi batuan yang terdapat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut:

- a. Endapan Permukaan: jenis endapan permukaan ini berupa jenis tanah alluvial, daerah rawa, endapan pantai, delta dan daerah aliran sungai.
- b. Batuan Sedimen: jenis batuan sedimen meliputi batuan berpasir, batuan kerikil, kerakal konglomerat, batuan berlempung, batuan lanau, napal, tuvaran, lava dan breksi.
- c. Batuan sedimen bercampur batuan gunung api: jenis struktur batuan ini terbentuk dari formasi camba: terdiri dari batuan sedimen laut berselingan dengan batuan gunung api,

breksi, lava, tufa, konglomerat, batu pasir, batu lanau, batu lempung dan batuan napalm alihan.

- d. Batuan Terobosan: jenis struktur batuan ini terdiri dari terobosan bersifat basa terutama batuan terobosan yang bersifat asam dan menengah, meliputi granodiamit diorite, tralit, dan batuan baku terobosan bersifat ultra basa terutama pridotil.

Secara garis besar sebaran dari jenis struktur geologi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari:

- a. Jenis endapan permukaan tersebar secara tidak merata pada sepanjang bagian pesisir.
- b. Jenis batuan sedimen tersebar secara tidak merata pada bagian dataran rendah.
- c. Jenis batuan sedimen berselingan gunung api dan batuan terobosan sebagian besar tersebar di dataran tinggi terutama di Kecamatan Balocci, Tondong Tallasa dan Ma'rang.

2) Potensi Kandungan

Berdasarkan struktur geologi, maka terdapat berbagai jenis bahan tambang, seperti basal, batu gamping, batu sabak, diorite, tras, kaolin, feldspar, lempung, marmer, batu bara dan lain-lain. Bahan galian ini tersebar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2.1.1.1.5. Kondisi Hidrologi

1) Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dialiri oleh 5 (lima) sungai yang cukup besar yang mengalir dari timur ke barat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sungai yang terpanjang adalah sungai tabo-tabo, sungai yang terdapat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan semuanya langsung bermuara kelaut, sehingga airnya masih dipengaruhi oleh kondisi pasang surut. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah dan panjang sungai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4

Jumlah Sungai Dirinci Menurut Panjang dan DAS di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Nama Sungai	Lokasi (Kecamatan)	Panjang sungai (km)	Luas DAS (km ²)
1	Tabo-Tabo	Labakkang	32.125	208,50
2	Segeri	Segeri	29.250	117,00
3	Leang Lonrong	Minasate'ne	6.250	25,00
4	Bantimala	Tondong Tallasa	11.000	44,00
5	Sangkara	Minasate'ne	15.250	61,00

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2012

2) Sungai, Danau dan Rawa

Data dan informasi mengenai sebaran sumber air tidak terdata dengan baik, sehingga tidak dapat diberikan gambaran secara statistik, namun berdasarkan pengamatan saat survey lapangan, maka dapat diberikan gambaran mengenai sebaran sumber air. Sebaran sumber air permukaan berupa danau atau waduk. Pada daerah sepanjang wilayah pesisir air tanah

dapat diperoleh dengan kedalaman 2-8 meter, namun kondisi air terkontaminasi oleh intrusi air laut, sedangkan pada daerah dataran tinggi air tanah dapat dijumpai secara bervariasi antara 8-25 meter, namun pada daerah yang terdapat di sekitar pegunungan seperti Balocci dan Tondong Tallasa sumber air masyarakat diperoleh dari pegunungan.

Curah hujan yang tinggi pada bulan Desember dan Februari, sehingga pada bulan itu daerah yang rawan banjir terjadi banjir. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan lokasi daerah rawan banjir terdapat di Kecamatan Labakkang, Ma'rang, Segeri dan Kecamatan Mandalle, terutama pada daerah yang masih terpengaruh oleh pasang-surut air laut. Daerah rawan banjir tersebut mempunyai guna lahan berupa rawa dan tambak, kondisi tersebut sangat terlihat pada sisi kanan poros regional.

3) Debit Air

Potensi sumber daya air permukaan pada aliran sungai, selain dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih untuk keperluan air minum dan rumah tangga, juga dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan untuk kegiatan industri.

Kondisi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Tabo-tabo disekitar wilayah bendungan telah mengalami pendangkalan yang menyebabkan berkurangnya debit air sekitar 70%, hal tersebut disebabkan karena tingginya tingkat erosi akibat penebangan liar di luar wilayah hutan pendidikan BDK yakni sekitar perbatasan Kabupaten Barru dan Kabupaten Bone.

4) Air Tanah Dangkal

Air tanah dangkal sampai saat ini dimanfaatkan petani dengan pembuatan sumur-sumur sementara untuk sumber air bagi pertanian dan hortikultura sayuran. Penggunaan air tanah dangkal secara terbatas oleh petani belum berdampak negatif, namun apabila penyedotan air tanah dengan pompa mesin, maka perlu diantisipasi dari sekarang.

Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat 6 (enam) lokasi mata air dan 3 (tiga) lokasi diantaranya durap untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku air bersih. Ketiga sumber mata air ini dikelola oleh PDAM setempat untuk keperluan air minum (air bersih). Mata air di daerah Lejang dan kampung baru dijumpai pada Batu Gamping Formasi Tonasa dengan debit lebih dari 100 liter/detik. Sedangkan mata air di daerah Camado dijumpai batuan Vulkanik dengan debit air 10-50 liter/detik.

5) Air Tanah Dalam

Air tanah dalam yang berada > 60 M dibawah permukaan tanah yang disebut aquateer banyak terdapat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, namun sampai pada saat ini belum ada informasi data tentang berapa besarnya potensi air yang ada di lapisan aquateer. Air tanah umumnya terdapat didaerah batuan induknya adalah batu gamping. Air tanah dalam dapat dideteksi oleh para ahli geologi dengan pompa mesin. Cadangan air tanah dalam yang disedot dengan sumur pipa yang dalam bentuk air tanah dalam oleh PU pengairan telah diinformasikan keberadaannya namun secara pasti belum ada datanya.

Potensi air tanah dalam pada khususnya di daerah dataran rendah bagian barat wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dapat dibagi menjadi 6 (enam) berdasarkan sebaran ke dalam lapisan pembawa air yaitu:

- a. Potensi air tanah pada kedalaman 25 meter, tahapan jenis lapisan batuan 11-62 ohm-meter.
- b. Potensi air tanah pada kedalaman 50 meter, tahapan jenis lapisan batuan 12-75 ohm-meter. Potensi air tanah pada kedalaman 75 meter, tahapan jenis lapisan batuan 12-75 ohm-meter.
- c. Potensi air tanah pada kedalaman 100 meter, tahapan jenis lapisan batuan 15-86 ohm-meter.
- d. Potensi air tanah pada kedalaman 125 meter, tahapan jenis lapisan batuan 15-86 ohm-meter.
- e. Potensi air tanah pada kedalaman 150 meter, tahapan jenis lapisan batuan 15-86 ohm-meter.

2.1.1.1.6. Kondisi Klimatologi

Sebagian besar daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempunyai suhu berkisar 23-34°C, sehingga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempunyai iklim tropis dan masuk dalam zona iklim hutan hujan basah. Pola curah hujan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan topografi. Secara umum, wilayah kabupaten ini memiliki bulan basah (dengan curah hujan lebih dari 300 mm) dari 6 bulan per tahun, kecuali untuk tahun-tahun tertentu dimana musim kemarau berlangsung. Kondisi agroklimat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tersebut menunjukkan bahwa iklim di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada umumnya sangat menunjang untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.

1) Tipe

Kondisi tipe iklim Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadi iklim tipe C1 dengan bulan kering < 2 bulan, iklim tipe C2 dengan bulan kering 2-3 bulan, dan iklim dengan bulan kering 3 bulan. Keduanya memiliki bulan basah antara 5-6 bulan secara berturut-turut dalam satu tahun dengan curah hujan rata-rata 2.500-3.000 mm/tahun. Tipe ini merupakan tipe iklim agak basah.

2) Curah hujan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan daerah yang mempunyai Iklim Tropis Basah (Type B) dengan musim kemarau. Curah Hujan disuatu wilayah (tempat) dipengaruhi oleh keadaan iklim geografi dan perputaran/pertemuan arus udara, oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat.

3) Suhu

Temperatur udara di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada kisaran 21° - 31°C atau rata-rata suhu udara 26,4 °C.

4) Kelembaban

Keadaan angin berada pada kecepatan sedang, dimana pada daerah ketinggian, kelembaban udara rendah sedangkan pada wilayah pesisir kelembaban udara tinggi.

2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.5
Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Uraian	Luas (Ha)
1.	Kawasan Lindung	
	Kawasan Hutan Lindung	7.934,540
	Kawasan Perlindungan Setempat	1.641,448
	Kawasan Konservasi	637.611,348
	Kawasan Lindung Geologi	1.504,451
	Kawasan Cagar Budaya	
	Kawasan Ekosistem Mangrove	2.984,236
2.	Kawasan Budidaya	
	Kawasan Hutan Produksi	5.369,943
	Kawasan Perkebunan Rakyat	412,093
	Kawasan Pertanian	21.192,566
	Kawasan Perikanan	1.086.885,99
	Kawasan Pertambangan dan Energi	62.765,820
	Kawasan Industri	783,076
	Kawasan Pariwisata	24.958
	Kawasan Permukiman	39.022,072
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2012-2032

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012– 2032 disebutkan bahwa potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut:

2.1.1.2.1 Kawasan Lindung

1) Kawasan Hutan Lindung

Kawasan peruntukan lindung ditujukan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Penetapan kawasan

peruntukan lindung merupakan perwujudan dari pengembangan pola ruang wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 7.934,540 Ha, yang tersebar pada 6 (enam) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Balocci (1.081,899 Ha); Mandalle (1.994,737 Ha); Ma'rang (776,291 Ha); Segeri (1.005,880); dan Tondong Tallasa (1.736,497 Ha).

2) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan penyediaan tata air dan kelancaran serta ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Kawasan perlindungan setempat juga dimanfaatkan sebagai kawasan lindung yang melindungi daerah setempat dimana kawasan tersebut berada. Pada kawasan ini tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya, dan apabila telah terdapat kegiatan budidaya diupayakan untuk diadakan pemindahan lokasi kegiatan budidaya. Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sempadan pantai, dan kawasan sempadan sungai.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berada di kawasan pesisir tentunya memiliki sempadan pantai sepanjang garis pantai di kawasan pesisir tersebut. Terdapat 6 (enam) kecamatan di wilayah pesisir dengan total luas sempadan pantai yaitu 230,303 hektar, dengan rincian : Kecamatan Pangkajene (23,613 Ha); Kecamatan Bungoro (36,526 Ha); Kecamatan Labakkang (61,039 Ha); Kecamatan Ma'rang (56,443 Ha); Kecamatan Segeri (24,805 Ha); dan Kecamatan Mandalle (27,877 Ha).

Sedangkan sempadan sungai di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didasarkan pada klasifikasi sungai-sungai yang mengalir, baik yang melintas maupun dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Berdasarkan ketentuan penetapan sempadan sungai, tujuan penetapan sempadan sungai, serta kondisi sungai, maka dapat didelineasi luas sempadan sungai di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan seluas 1.411,145 hektar yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan, yaitu: Kecamatan Balocci (2,365 Ha); Kecamatan Bungoro (180,265 Ha); Kecamatan Labakkang (345,905 Ha); Kecamatan Ma'rang (149,583 Ha); Kecamatan Minasatene (192,756 Ha); Kecamatan Pangkajene (226,331 Ha); Kecamatan Segeri (188,433 Ha); dan Kecamatan Tondong Tallasa (125,507 Ha).

3) Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi didefinisikan sebagai satuan wilayah yang memiliki keragaman hayati yang unik atau langka sehingga perlu dicegah kepunahannya dengan memberikan perlindungan khusus. Kawasan konservasi terdiri dari Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan ini terdiri dari Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, dan Taman wisata laut Kapoposang.

Penetapan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung (TNBB) sebagai taman nasional berdasarkan Kepmenhut. No. SK. 398/Menhut-II/2004 Tanggal 18 Oktober 2004. Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung seluas 42.794,24 hektar, yang meliputi 2 (dua) wilayah administrasi kabupaten, yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdaat di 3 (tiga) kecamatan dengan rincian Kecamatan Balocci (7.636,887 Ha); Kecamatan Minasatene (2.880,068 Ha); dan Kecamatan Tondong Tallasa (3.732,524 Ha).

Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Kapoposang adalah merupakan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.588/Kpts-VI/1996 sebagai Taman Wisata Alam. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dari Departemen Kehutanan Kepada Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor: BA.01/Menhut-IV/2009-BA 108/MEN.KP/III/2009 tanggal 4 Maret. Cakupan wilayah Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya, meliputi wilayah perairan di 6 (enam) pulau, yakni Pulau Kapoposang, Pulau Papandangan, Pulau Tambakhulu, Pulau Gondong Bali, Pulau Pamanggangan, dan Pulau Suranti. Penetapan Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Kapoposang seluas 49.946,688 hektar.

Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Kawasan konservasi perairan. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yaitu di Kecamatan Liukang Tangayya dengan luas 510.000,000 hektar. Sedangkan Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, dengan luas 63.415.181 hektar, yang tersebar di wilayah Kecamatan Liukang Tupabbiring dan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara. Kawasan konservasi ini merupakan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD).

4) Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan ini terdiri dari dua, yaitu Kawasan imbuhan air tanah, dan Kawasan Sempadan mata air.

Kawasan imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah. Penetapan kawasan imbuhan air tanah sebagai kawasan perlindungan terhadap air tanah ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi sumber-sumber air tanah yang ada di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang tersebar di beberapa lokasi, yaitu : Kecamatan Balocci (654,774 Ha); Kecamatan Bungoro (363,134 Ha); Kecamatan Labakkang (48,250 Ha); Kecamatan Minasatene (299,494 Ha); Kecamatan Pangkajene (8,726 Ha); Kecamatan Segeri (44,112 Ha); dan Kecamatan Tondong Tallasa (85,961 Ha). Sedangkan kawasan sempadan mata air adalah pemusatan keluarnya air tanah yang muncul di permukaan tanah sebagai arus dari aliran air tanah. Terdapat beberapa sumber mata air di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yaitu: Kecamatan Tondong Tallasa (Mata Air Tagari ; Mata Air Bulu Tanae; Mata Air Bantimurung; Mata Air Bonto Birao; Mata Air Lanne; Mata Air Tondong Kura; dan Mata Air Malaka), Kecamatan Minasatene (Mata Air Kalabbiriang), Kecamatan Bungoro (Mata Air Bulu Cindea); Kecamatan Mandalle (Mata Air Mandalle; dan Mata Air Manggalung), Kecamatan Segeri (Mata Air Parenreng), dan Kecamatan Balocci (Mata Air Balleanging; dan Mata Air Tompo Bulu).

5) Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya, yaitu satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Kawasan cagar budaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tersebar di 4 (empat) kecamatan, yaitu: Kecamatan Balocci (Taman Purbakala Sumpang Bitu, dan Gua Bulu Sumi); Kecamatan Minasatene (Gua Lukisan Purbakala, meliputi Leang Pattenung, Leang Kassi, Leang Limbubbuka, Leang Caddia, Leang Lambuto, Leang Ujung Bulu, Leang Kajuara, Leang Saka Pao, Leang Bulu Ribba, Leang Camming Kana, Leang Sassang, Leang Batang Lamara, Leang Sapiria, Leang Ulu Tedong, Leang Garunggung, Leang Saluka, Leang Maccina, Leang Lesang, Leang Cumi Lantang, dan Leang Lompoa); Kecamatan Bungoro (Gua Lukisan Purbakala Leang Biringere), dan Kecamatan Labakkang (Gua Lukisan Purbakala, meliputi Leang Bulu Balang, Leang Lasi Tae, dan Leang Pamelakang Tedong).

6) Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan ekosistem mangrove adalah suatu lingkungan yang mempunyai ciri khusus karena rantai hutannya secara teratur digenangi oleh air yang dipengaruhi oleh salinitas serta fluktuasi ketinggian permukaan air karena adanya pasang surut air laut.

Kawasan ekosistem mangrove memiliki luas 2.984,236 Ha, yang tersebar pada 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Kecamatan Pangkajene (20,524 Ha); Kecamatan Bungoro (32,620 Ha); Kecamatan Labakkang (46,186 Ha); Kecamatan Liukang Kalmas (894,169 Ha); Kecamatan Liukang Tangaya (1.868,597 Ha); Kecamatan Tupabbiring Utara (42,700 Ha); Kecamatan Mandalle (29,638 Ha); Kecamatan Ma'rang (32,616 Ha); dan Kecamatan Segeri (17,186 Ha).

2.1.1.2.2 Kawasan Budidaya

Potensi pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diarahkan dengan mengacu pada RTRWW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diharapkan dapat mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui pengembangan kawasan budidaya diantaranya meliputi: Kawasan hutan produksi, Kawasan perkebunan rakyat, Kawasan pertanian, Kawasan perikanan, Kawasan pertambangan dan energi, Kawasan industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, dan Kawasan pertahanan dan keamanan.

1) Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi dilakukan dengan pemanfaatan hutan dan pelestarian hasil (kayu dan non kayu), sehingga diperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi yang maksimal bagi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan. Mengacu pada kriteria-kriteria, kaidah perencanaan dan fungsi kawasan hutan produksi, maka arahan pengelolaan kawasan hutan produksi di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditetapkan seluas 5,369.943 hektar.

Kawasan hutan produksi terdiri atas Kawasan hutan produksi tetap, dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah hutan produksi yang dapat dieksploitasi hasil hutannya melalui cara tebang pilih atau tebang habis. Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah seluas 2.761,402 hektar, yang tersebar pada 5 (lima) kecamatan, yaitu: Kecamatan Balocci (247,327 Ha); Kecamatan Bungoro (83,996 Ha); Kecamatan Ma'rang (31,774 ha); Kecamatan Minasatene (972,001 Ha); dan Kecamatan Tondong Tallasae (1.426,306 Ha).

Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan budidaya hasil-hasil hutan secara terbatas dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai hutan untuk melindungi kawasan bawahannya. Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah seluas 2.608,541 hektar, yang tersebar pada 5 (lima) kecamatan, yaitu: Kecamatan Bungoro (123,174 Ha); Kecamatan Labakkang (64,814 Ha); Kecamatan Ma'rang (365,214 Ha); Kecamatan Segeri (177,315 Ha); dan Kecamatan Tondong Tallasa (1.878,024 Ha).

2) Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Perkebunan Rakyat adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga perkebunan rakyat. Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi pengembangan usaha perkebunan rakyat dengan berbagai komoditi, seperti kakao, kopi, kemiri, jeruk, kelapa, dan berbagai jenis komoditi lainnya. Potensi pengembangan perkebunan rakyat ini memiliki luas potensi sebesar 412,093 hektar, yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan, seperti Kecamatan Balocci (387,718 Ha); Kecamatan Bungoro (0,640 Ha); Kecamatan Minasatene (0,403 Ha); Kecamatan Segeri (5,768 Ha); dan Kecamatan Tondong Tallasa (18,564 Ha).

3) Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan berdasarkan kesesuaian lahan dalam pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kawasan tanaman pangan merupakan kawasan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agro-ekosistem yang sama sedemikian rupa, sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan. Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki total luas 16.382,814 Ha, yang tersebar pada 11 (sebelas) kecamatan, yaitu: Kecamatan Balocci (1.173,646 Ha); Kecamatan Bungoro (1.997,457 Ha); Kecamatan Labakkang (3.384,514 Ha); Kecamatan Liukang Tangaya (0,936 Ha); Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara (0,214 Ha); Kecamatan Mandalle (1.439,415 Ha); Kecamatan Ma'rang (1.661,108 Ha); Kecamatan Minasatene (1.870,719 Ha); Kecamatan Pangkajene (730,584 Ha); Kecamatan Segeri (2.175,945 Ha); dan Kecamatan Tondong Tallasa (1.948,276 Ha).

Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya maupun faktor infrastruktur fisik buatan. Kawasan tanaman hortikultura di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki total luas 3.382,382 Ha, yang tersebar pada 9 (sembilan) kecamatan, yaitu: Kecamatan Balocci (1.173,646 Ha); Kecamatan Bungoro (90,341 Ha); Kecamatan Labakkang (772,131 Ha); Kecamatan Mandalle (157,591 Ha); Kecamatan Ma'rang (1.674,975 Ha); Kecamatan Minasatene (76,516 Ha); Kecamatan Pangkajene (3,357 Ha); Kecamatan Segeri (299,776 Ha); dan Kecamatan Tondong Tallasa (157,255 Ha).

Kawasan perkebunan adalah kawasan dengan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Jenis komoditi tanaman perkebunan yang diusahakan adalah perkebunan kelapa dalam, kopi rebusta, kakai, cengkeh, lada, jambu mete, kemiri, dan kapuk. Kawasan perkebunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki total luas 11.427,370 Ha, yang tersebar pada 13 (tiga belas) kecamatan,

yaitu: Kecamatan Balocci (1.383,050 Ha); Kecamatan Bungoro (1.216,702 Ha); Kecamatan Labakkang (1.000,659 Ha); Kecamatan Liukang Tangaya (2.280,457 Ha); Kecamatan Liukang Kalmas (2.133,355 Ha); Kecamatan Liukang Tupabiring (48,520 Ha); Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara (15,193 Ha); Kecamatan Mandalle (148,953 Ha); Kecamatan Ma'rang (209,618 Ha); Kecamatan Minasatene (23,960 Ha); Kecamatan Pangkajene (0,009 Ha); Kecamatan Segeri (456,363 Ha); dan Kecamatan Tondong Tallasa (2.510,531 Ha).

Kawasan peternakan memiliki peran yang penting dalam penyediaan protein hewani, lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengembangan potensi wilayah. Lokasi untuk kawasan peternakan diutamakan pada tanah yang tidak produktif dan terpisah dari lahan pertanian penduduk sekitarnya. Kawasan potensi peternakan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan jenis ternaknya, yaitu: Pengembangan Ternak Besar (Kecamatan Tondong Tallasa, Kecamatan Balocci, Kecamatan Labakkang, dan Kecamatan Ma'rang); Pengembangan Ternak Kecil (Kecamatan Ma'rang, dan Kecamatan Segeri); dan Pengembangan Ternak Unggas (Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Balocci, Kecamatan Mandalle, dan Kecamatan Minasatene).

4) Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan budidaya perikanan, termasuk didalamnya sarana dan prasarana penunjangnya, dengan tujuan pemanfaatan dan pengelolaan potensi dan sumber daya lahan sehingga dapat mendorong pengembangan dan peningkatan produksi perikanan. Kawasan perikanan dibedakan menjadi kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya.

Kawasan perikanan tangkap adalah kawasan yang memiliki aktivitas melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut, sungai, danau, maupun rawa. Potensi kawasan perikanan tangkap memiliki total luas 1.074.456,070 Ha, yang tersebar pada 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu: Wilayah Perairan Kec. Liukang Kalmas (267.888,250 Ha); Wilayah Perairan Kec. Liukang Tangaya (599.837,380 Ha); Wilayah Perairan Kec. Liukang. Tupabbiring (94.883,230 Ha); Wilayah Perairan Kec. Liukang Tupabbiring Utara (105.466,740 Ha); Wilayah Perairan Kec. Bungoro (345,670 Ha); Wilayah Perairan Kec. Labakkang (937,260 Ha); Wilayah Perairan Kec. Ma'rang (1.635,020 Ha); Wilayah Perairan Kec. Pangkajene (1.466,340 Ha); Wilayah Perairan Kec. Mandalle (1.222,840 Ha); dan Wilayah Perairan Kec. Segeri (773,340 Ha).

Komoditas tangkapan unggulan di wilayah perikanan tangkap Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, memiliki 10 (sepuluh) jenis ikan unggulan, yaitu ikan rajungan, ikan kerapu karang, ikan teri, ikan kakap merah, cumi-cumi, ikan tuna, ikan cakalang, ikan tenggiri, kepiting bakau, dan ikan layang. Untuk wilayah perairan Kecamatan Liukang Kalmas adalah merupakan wilayah perikanan tangkap demersal, dan wilayah perairan Kecamatan Liukang Tangaya merupakan perikanan tangkap demersal, dan perikanan tangkap pelagis demersal.

Kawasan perikanan budidaya adalah kawasan yang memiliki usaha pemeliharaan dan pengembang biakan ikan atau organisme air lainnya. Potensi kawasan perikanan budidaya memiliki total luas 12.429,917 Ha, yang tersebar pada 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu: Kecamatan Liukang Tangaya (2,991 Ha); Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara (92,623 Ha); Kecamatan Bungoro (1.129,466 Ha); Kecamatan Labakkang (3.204,315 Ha); Kecamatan Ma'rang (3.325,015 Ha); Kecamatan Pangkajene (1.964,116 Ha); Kecamatan Mandalle (08,886 Ha); Kecamatan Segeri (944,668 Ha); Kecamatan Minasatene (951,936 Ha); dan Kecamatan Balocci (5,901 Ha).

Komoditas unggulan perikanan budidaya untuk 3 (tiga) jenis perikanan budidaya, yaitu budidaya air tawar, budidaya air payau, dan budidaya air laut di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang terdiri dari: Perikanan budidaya air tawar (potensi komoditi unggulan Ikan Lele, dan Ikan Mas); Perikanan budidaya air payau (dengan potensi komoditi unggulan Bandeng, Windu, Vaname, Nila, Rumput Laut Gracilliria); dan Perikanan budidaya air laut (dengan potensi komoditi unggulan Rumput Laut Cottoni, Lobster, dan Kerapu).

Sementara itu komoditi perikanan budidaya potensial di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, meliputi: Ikan hias (terdapat di Kecamatan Liukang Tupabbiring, di Pulau Balang Lompo, Pulau Sarappo Lompo, dan Pulau Pajenekang); Kerang Mutiara (terdapat di Kecamatan Liukang Tupabbiring, di Pulau Bontosua); dan Kuda Laut (terdapat di Kecamatan Liukang Tupabbiring, di Pulaun Badi).

Selain potensi perikanan tersebut diatas, di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga merupakan salah satu daerah penghasil garam di Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat 2 (dua) wilayah yang menjadi sentra garam, yakni Kecamatan Bungoro dan Kecamatan Labakkang. Potensi lahan tambak garam di kedua wilayah tersebut mencapai sekitar 844 hektar. Potensi lahan tambak garam di Kecamatan Bungoro adalah Desa Bulu Cindea, sedangkan di Kecamatan Labakkang berada pada Desa Bontomanai, Kelurahan Pundata Baji dan Kelurahan Borimasunggu.

5) Kawasan Pertambangan Dan Energi

Kawasan pertambangan adalah kawasan dengan luas tertentu yang digunakan sebagai lokasi pemusatan kegiatan pertambangan. Potensi kawasan pertambangan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didominasi oleh potensi WUP Batubara yang tersebar di wilayah Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Tondong Tallasa dengan luas 3.625,27 hektar. Sementara itu WUP Bukan Logam dan Batuan seluas 2.532,53 hektar. Saat ini terdapat jenis tambang yang telah dieksploitasi yaitu jenis tambang bukan logam untuk bahan baku semen yang dikelola oleh PT. Semen Indonesia (Semen Tonasa), dan tambang marmer yang dikelola oleh beberapa perusahaan swasta. Sebaran WUP di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Potensi WUP dengan luas 62.765,82 Ha yang tersebar pada 13 (tiga belas) kecamatan, yaitu: Kecamatan Balocci (4.398,26 Ha); Kecamatan Bungoro (9.023,11 Ha); Kecamatan Labakkang (10.505,88 Ha); Kecamatan Liukang Kalmas (2,25 Ha); Kecamatan Liukang Tupabiring (6,07 Ha); Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara (222,52 Ha); Kecamatan Mandalle (4.578,17 Ha); Kecamatan Ma'rang (9.560,77 Ha); Kecamatan Minasatene (5.010,49 Ha); Kecamatan Pangkajene (4.078,60 Ha); Kecamatan Segeri (6.358,58 Ha); dan Kecamatan Tondong Tallasa (9.021,12 Ha).

Pembangkit tenaga listrik dikembangkan untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan perekonomian. Potensi kawasan pembangkitan tenaga listrik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan rincian persebarannya terdapat di Kecamatan Bungoro seluas 16,284 Ha, dan Kecamatan Minasatene seluas 3,342 Ha.

6) Kawasan Industri

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan potensi wilayah maritim yang sangat besar, tentunya menjadi peluang untuk mengembangkan industri di sektor kemaritiman. Hal ini tentunya sejalan dengan rencana strategis nasional di bidang kemaritiman sebagai poros maritim dunia. Oleh karena arahan rencana pola ruang kawasan peruntukan industri, dititikberatkan pada pengembangan kawasan industri kemaritiman dengan konsep industri terpadu, yaitu galangan kapal, industri pembuatan kapal, industri pengolahan hasil perikanan, pelabuhan peti kemas, serta kawasan perkantoran.

Pada sisi lain di wilayah daratan, potensi sumber daya alam di sektor pertambangan saat ini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu wilayah pertambangan khusus untuk produksi semen yang dikelola oleh PT. Semen Indonesia (Persero)/Semen Tonasa, begitupula untuk jenis batuan marmer yang terdapat di beberapa lokasi sumber sumber bahan baku untuk tambang marmer. Potensi pengembangan kawasan industri di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan total luas potensi 783,076 Ha, yaitu: Kec. Bungoro (439,818 Ha); Kec. Labakkang (163,891 Ha); dan Kec. Minasatene (179,367 Ha).

Potensi sentra industri kecil dan menengah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagai wilayah dengan sumber daya alam laut/pesisir, pertanian dan perkebunan, tentunya menjadi modal dalam mengembangkan industri kecil dan menengah dengan tersedianya bahan baku industri, baik industri makanan/minuman, industri kerajinan, maupun industri pertanian. Arahan pengembangan sentra industri kecil dan menengah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diarahkan di seluruh kecamatan wilayah daratan, melalui: (1) Pembangunan dan peningkatan usaha industri kecil dan menengah melalui pemberdayaan

UMKM; (2) Pembangunan sentra-sentra industri kecil dan menengah beserta sarana dan prasarana penunjangnya yang berbasis perikanan dan kelautan; (3) Pembangunan sentra industri kecil/menengah yang berbasis pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan (4) Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam mengelola unit-unit usaha industri kerajinan dan usaha kecil.

7) Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan kegiatan pariwisata. Potensi pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan difokuskan pada pengembangan pariwisata alam yang didukung oleh wisata budaya dan wisata buatan. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki berbagai objek wisata yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu: (a) Wisata Alam, Seperti: Wisata Bentang Alam Laut (Pantai Tekolabua, Pantai Labakkang); Wisata Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Pulau Camba-Cambang, Pulau Saugi, Pulau Samatellu Pedda, Pulau Bana-Banawang, Pulau Reang-Reang, Pulau Salemo, Pulau Sabutung, Pulau Kapoposang, Pulau Saranti, Pulau Pammanggangan, Pulau Langkadea, Pulau Badi, Pulau Pajenekang, Pulau Cangke, Pulau Tambakulu, Pulau Podang-Podang, Pulau Kulambing, Pulau Pannambungan, Pulau Bonto Sua, Pulau Balang Lompo, Pulau Pala, Pulau Kalukalukuang, Dan Pulau Pamantauang); Wisata Alam Bawah Laut (Pulau Panambungan, Pulau Pajenekang, Pulau Badi, Pulau Marasende, Pulau Pamantauang, dan Pulau Kalukalukuang); Wisata Alam Daratan Dan Pegunungan (Sungai Pangkajene, Sungai Kalibone, Kalibbong Aloa, Dewi Lamsang, Leang Lonrong, Goa/Leang Bulu Sipong, Desa Wisata Berkasi, Taman Wisata Ciddokang, Wisata Alam Mattampa, Desa Wisata Tana Rajae, Pungkalawaki Pitu Sunggu, Bukit Teletubies Bulu Pao, Bulu Sorongan, Amputtang, Baruttunga, Ere Tallasa, Air Terjun Golae, Padang Pa'bo, Desa Wisata Tompobulu, Bulusaraung, Air Terjun Tombolo, Sumpang Bitu, Taman Batu, Suangga, Salo Mettie (Cambang Cui), Dan Galaggara); (b) Wisata Budaya, Seperti: Arajang Bissu, Rumah Adat Labakkang, Situs Makam Somba Labakkang, Situs Makam Andi Mauraga, Makam Arung Sabila, Makam Andi Maruddani, Makam Puang Awalli & Meriam, Dan Makam Lipang Marasende; dan (c) Wisata Buatan, Seperti: Kawasan Kuliner Palampang, Kawasan Kuliner Bambu Runcing, Kawasan Kuliner Gasebo, Agrowisata Jeruk Padang Lampe, Ekowisata Tana Rajae, Rest Area Wisata Limbangan, dan Bendungan Tagari.

8) Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman adalah kawasan di luar kawasan lindung yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang berada di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Tujuan pengelolaan kawasan adalah untuk menyediakan tempat bermukim yang sehat, serasi dengan lingkungannya serta aman dari bencana alam, dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.

Permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan konsekuensi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang sangat intensif dalam pemanfaatan ruang darat, perairan maupun udaranya. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditetapkan seluas 3.292,389 hektar, dengan rincian seperti: Pusat Permukiman Perkotaan (PKW), terdiri dari: PKW Pangkajene dengan lokasi Kecamatan Pangkajene (874,816 Ha); Kec. Minasatene (559,652 Ha); Kec. Bungoro (111,535 Ha); Pusat Permukiman Perkotaan (PPK), terdiri dari: PPK Sapuka (82,337 Ha); PPK Kalu-Kalukuang (167,888 Ha); PPK Mattiro Sompe (26,397 Ha); PPK Mattiro Kanja (25,730 Ha); PPK Balleangin (82,876 Ha); PPK Bantimurung (25,200 Ha); PPK Labakkang (439,305 Ha); PPK Bonto-Bonto (152,710 Ha); PPK Segeri (386,717 ha); dan PPK Tama'rupa (357,226 ha).

Permukiman perdesaan didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana permukiman yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris. Kawasan permukiman perdesaan dengan luas 5.729,683, dengan pola sebaran kawasan permukiman perdesaan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah : Kecamatan Balocci (440,663 Ha); Kecamatan Bungoro (864,451 ha); Kecamatan Labakkang (835,059 Ha); Kecamatan Liukang Kalmas (386,444 Ha); Kecamatan Liukang Tangaya (527,879 Ha); Kecamatan Liukang Tupabbiring (94,958 Ha); Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara (100,348 ha); Kecamatan Mandalle (262,173 Ha); Kecamatan Marang (1.081,189 ha); Kecamatan Minasatene (492,785 Ha); Kecamatan Pangkajene (38,526 Ha); Kecamatan Segeri (347,624 ha); dan Kecamatan Tondong Tallasa (V Ha).

9) Kawasan Pertahanan Dan Keamanan

Pengalokasian kawasan pertahanan dan keamanan pada hakekatnya diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geo-strategi nasional. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan termasuk di dalamnya daerah basis militer, daerah latihan militer dan atau daerah uji coba sistem persenjataan. Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan rincian Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) 1421 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Kec. Pangkajene); Kantor Komando Rayon Militer (Koramil) (semua kecamatan); Kantor Kepolisian Resort (Polres) Pangkajene dan Kepulauan (Kec. Pangkajene), dan Kantor Kepolisian Sektor/Polsek (semua kecamatan)

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia. Bencana alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diantaranya adalah angin topan/angin puting beliung, banjir, gelombang ektrim,

abrasi, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan . Berikut dapat dijelaskan terkait potensi rawan bencana di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu:

1) Angin Topan/Angin Puting Beliung.

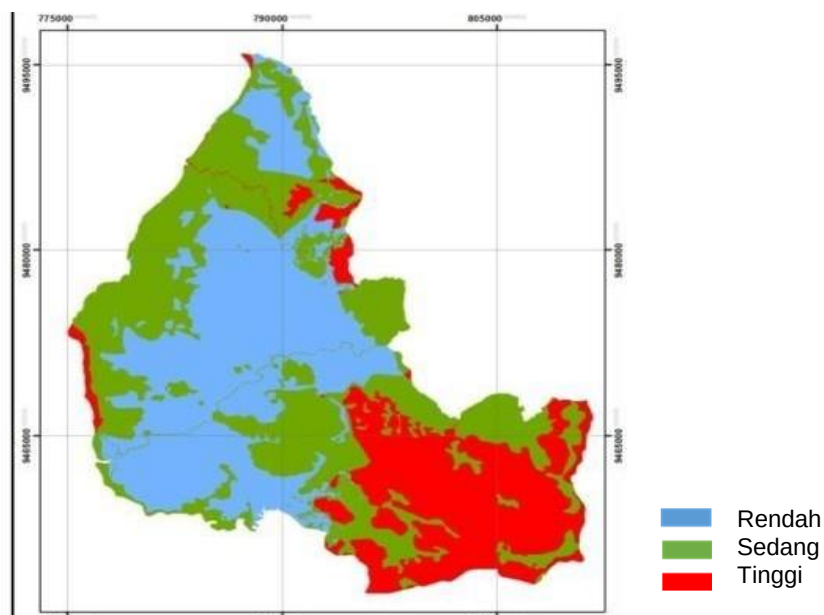
Angin puting beliung terjadi pada musim pancaroba dari musim penghujan ke musim kemarau, begitu pula sebaliknya akibat adanya perbedaan tekanan udara yang sangat cepat dari daratan yang panas lalu ke atas dengan suhu uap lebih dingin. Dalam kondisi dinamika atmosfer yang tidak stabil peluang angin puting beliung sangat besar terjadi.

Daerah Rawan Angin Puting Beliung, di Kecamatan Minasatene, Kecamatan Tondong Tallasa, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kecamatan Liukang Tangaya dan Kecamatan Liukang Kalmas.

2) Banjir

Bencana banjir yang sering terjadi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi serta faktor-faktor kerusakan lingkungan seperti kritisnya daerah resapan air, pendangkalan sungai dan kurang berfungsinya saluran drainase. Kawasan yang sering terjadi banjir, terutama Daerah-daerah yang dilewati oleh aliran sungai yaitu di Kecamatan Minasatene, Kecamatan Segeri, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Ma'rang dan Kecamatan Mandalle. Potensi terjadi banjir juga akan terjadi dan menjadi ancaman bagi masyarakat, tidak hanya bahaya banjir bandang tapi juga disebabkan oleh laut pasang dan buruknya kondisi drainase akibat hujan yang turun terus menerus.

Gambar. 2.2
Peta Daerah Rawan Banjir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: Prosiding Seminar Nasional Geofisika 2014

Potensi terjadi banjir juga akan terjadi dan menjadi ancaman bagi masyarakat, tidak hanya bahaya banjir bandang tapi juga disebabkan oleh laut pasang dan buruknya kondisi drainase akibat hujan yang turun terus menerus.

Begitupun ancaman bahaya tanah longsor akan terjadi bila penebangan pohon secara liar tidak terkendali dan penambangan galian tambang secara berlebihan, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan lereng atau berat berlebihan yang harus ditanggung lereng.

3) Wilayah Lokasi Bencana Alam

Beberapa wilayah lokasi bencana alam di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang teridentifikasi antara lain sebagai berikut:

- i. Kawasan yang sering terjadi banjir, terutama Daerah-daerah yang dilewati oleh aliran sungai yaitu di Kecamatan Minasatene, Kecamatan Segeri, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Ma'rang dan Kecamatan Mandalle.
- ii. Daerah Rawan Angin Puting Beliung, di Kecamatan Minasatene, Kecamatan Tondong Tallasa, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kecamatan Liukang Tangaya dan Kecamatan Liukang Kalmas.

2.1.2. KONDISI DEMOGRAFI

2.1.2.1. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara pada dasarnya dapat dikelaskan sebagai suatu modal atau beban pembangunan. Pernyataan ini didasarkan atas kenyataan bahwa jumlah penduduk yang banyak jika disertai dengan kualitas yang memadai baik tingkat kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi sangat mendukung terhadap proses pembangunan negara. Namun, jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka akan menjadi beban bagi pembangunan dan menjadi suatu hambatan bagi lajunya roda pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2020 mencapai 345.775 jiwa, terdiri dari 169.454 laki-laki dan 176.321 perempuan. Penduduk ini tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan, 4 (empat) kecamatan yang berada di wilayah kepulauan, yaitu

Kecamatan Liukang Tangaya, Kecamatan Liukang Kalmas, Kecamatan Liukang Tupfabiring dan Kecamatan Liukang Tupfabiring Utara. Terdapat 2 (dua) Kecamatan yang memiliki daerah pegunungan, yaitu Kecamatan Balocci dan Kecamatan Tondong Tallasa. Sementara sisanya tersebar di wilayah dataran rendah, yaitu Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Minasatene, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Marang, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandalle.

Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Labakkang yaitu 51.616 jiwa yang berarti kecamatan Labakkang menyumbang 14,93% dari total populasi penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sedangkan Kecamatan Tondong Tallasa memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 10.099 jiwa atau 2,92% dari total populasi penduduk.

Tabel. 2.6
Jumlah Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2016 s.d 2020

Kelompok Umur	2016			2017			2018			2019			2020		
	Lk	Per	Jumlah	Lk	Per	Jumlah	Lk	Per	Jumlah	Lk	Per	Jumlah	Lk	Per	Jumlah
0-4	16.196	15.641	31.837	16.145	15.558	31.703	16.083	15.474	31.557	16.025	15.387	31.412	15.447	14.569	29.598
5-9	16.444	15.895	32.339	16.525	15.968	32.493	16.596	16.034	32.630	16.673	16.089	32.762	17.331	13.638	27.914
10-14	16.070	15.307	31.377	16.070	15.304	31.374	16.088	15.323	31.411	16.120	15.362	31.482	16.733	15.610	31.848
15-19	15.729	15.074	30.803	15.657	14.956	30.613	15.515	14.798	30.313	15.377	14.632	30.009	13.958	15.928	32.637
20-24	13.545	13.844	27.389	13.852	13.997	27.849	14.128	14.124	28.252	14.336	14.203	28.539	11.804	15.455	31.736
25-29	11.994	12.841	24.835	12.165	12.937	25.102	12.342	13.027	25.369	12.539	13.126	25.665	11.557	14.013	28.047
30-34	11.122	12.802	23.924	11.167	12.767	23.934	11.230	12.751	23.981	11.335	12.767	24.102	10.975	13.398	26.322
35-39	10.999	12.298	23.297	10.961	12.316	23.277	10.921	12.323	23.244	10.905	12.308	23.213	10.966	12.016	23.394
40-44	11.171	12.607	23.778	11.232	12.698	23.930	11.260	12.763	24.023	11.254	12.827	24.081	10.064	12.257	23.295
45-49	9.635	10.826	20.461	9.876	11.060	20.936	10.076	11.262	21.338	10.228	11.426	21.654	7.720	11.033	21.100
50-54	7.332	8.504	15.836	7.614	8.786	16.400	7.900	9.063	16.963	8.177	9.334	17.511	6.025	10.520	19.807
55-59	6.177	7.314	13.491	6.389	7.599	13.988	6.607	7.876	14.483	6.845	8.159	15.004	4.917	8.553	15.836
60-64	4.502	5.491	9.993	4.676	5.707	10.383	4.848	5.949	10.797	5.022	6.194	11.216	3.697	6.338	11.820
65+	7.060	10.280	17.340	7.282	10.527	17.809	7.524	10.789	18.313	7.782	11.082	18.864	9.428	12.993	22.421
Jumlah	157.976	167.309	326.700	159.611	170.180	329.791	161.118	171.556	332.674	162.618	172.896	335.514	169.454	176.321	345.775

Sumber: BPS Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Tabel. 2.7
Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 s.d 2020

No.	Kecamatan	2016			2017			2018			2019			2020		
		Lk	Per	Jumlah	Lk	Per	Jumlah	Lk	Per	Jumlah	Lk	Per	Jumlah	Lk	Per	Jumlah
1.	Lk. Tangaya	10.547	11.029	21.576	10.873	11.350	22.223	11.150	11.632	22.782	11.440	11.919	23.359	9.456	9.893	19.349
2.	Lk. Kalmas	6.654	6.928	13.582	6.729	6.995	13.724	6.768	7.032	13.800	6.813	7.066	13.879	7.294	7.324	14.618
3.	Lk. Tuppabiring	9.366	9.576	18.942	9.487	9.688	19.175	9.932	10.139	20.071	10.065	10.265	20.330	8.900	8.828	17.728
4.	Lk. Tupabbiring Utara	5.578	5.960	11.538	5.608	5.981	11.589	5.607	5.974	11.581	5.611	5.966	11.577	6.793	6.772	13.565
5.	Pangkajene	21.767	23.068	44.835	22.100	23.381	45.481	22.313	23.587	45.900	22.540	23.797	46.337	23.864	24.792	48.656
6.	Minaste'ne	17.249	18.414	35.663	17.532	18.687	36.219	17.722	18.873	36.595	17.923	19.064	36.987	19.068	19.872	38.940
7.	Balocci	7.872	8.178	16.050	7.947	8.241	16.188	7.977	8.267	16.244	8.011	8.293	16.304	8.112	8.448	16.560
8.	Tondong Tallasa	4.343	4.550	8.893	4.370	4.571	8.941	4.372	4.568	8.940	4.376	4.569	8.945	4.931	5.168	10.099
9.	Bungoro	21.223	21.909	43.132	20.992	21.635	42.627	22.010	22.669	44.679	22.370	23.012	45.382	21.582	22.297	43.879
10.	Labakkang	21.628	24.325	45.953	21.881	24.559	46.440	22.011	24.683	46.694	22.157	24.807	46.964	24.932	26.684	51.616
11.	Ma'rang	14.695	15.936	30.631	14.813	16.028	30.841	14.849	16.039	30.888	14.897	16.059	30.956	16.763	17.638	34.401
12.	Segeri	10.129	11.108	21.237	10.264	11.237	21.501	9.342	10.214	19.556	9.296	10.149	19.445	10.970	11.369	22.339
13.	Mandalle	6.925	7.743	14.668	7.015	7.827	14.842	7.065	7.879	14.944	7.119	7.930	15.049	6.789	7.236	14.025
Pangkajene dan Kepulauan		157.976	168.724	326.700	159.611	170.180	329.791	161.118	171.556	332.674	162.618	172.896	335.514	169.454	176.321	345.775

Sumber: BPS Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.1.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan permasalahan krusial yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia, khususnya negara-negara berpenduduk besar dan padat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan data dasar yang diperoleh mengenai jumlah kelahiran, sehingga diperlukan berbagai upaya yang berkesinambungan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang dengan penduduk terbesar nomor empat di dunia, juga menghadapi persoalan yang serupa. Definisi dari laju pertumbuhan penduduk sendiri adalah Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.

Tabel. 2.8
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,01	1,00	1,02	1,00	1,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.1.2.3. Dinamika Penduduk yang Dipengaruhi oleh Kelahiran, Kematian dan Perpindahan Penduduk

Dinamika penduduk adalah serangkaian permasalahan yang berkaitan dengan regulasi penyebaran atas komposisi ketidakmerataan pendudukan, sehingga menimbulkan gejala sosial serta penyimpangan-penyimpangan dalam tata kelola kehidupan masyarakat.

Hampir semua bangsa di dunia mengalami dinamika pendudukan, tak terkecuali ialah Indonesia sebagai ciri negara berkembang sampai saat ini mermasalah tentang kependudukan selalu menjadi problem klasik yang sulit diselesaikan.

Pengertian dinamika penduduk adalah perbedaan atas keadaan penduduk yang ada di dalam sebuah negara akibat dari pertumbuhan dan penyebaran yang tidak merata sehingga sulit mendistribusikan konsep kebersamaan dalam wilayah dan perwilayahannya.

Macam-macam faktor yang biasanya menjadi latar belakang adanya dinamika penduduk dalam suatu negara, antara lain adalah sebagai berikut;

- 1) *Kelahiran*, Kelahiran menjadi salah satu bentuk dinamika penduduk yang dialami oleh sebagai wilayah di Indonesia dan dunia. Terutama sekali untuk negara berkembang, dimana masyarakat banyak yang melakukan perkawinan usia muda, sehingga sangat sulit untuk memaksimalkan kualitas SDMnya jika keluarga tersebut berasal dari ekonomi menengah ke bawah.

- 2) *Kematian*, Faktor yang menjadi salah satu pendorong dari pada dinamika penduduk lainnya ialah kematian yang ada di dalam wilayah atau daerah di seluruh dunia. Kematian ini terutama sekali akan terasa jika memiliki kualitas SDM yang tinggi.
- 3) *Migrasi*, Migrasi adalah perpindahan penduduk yang ada di dalam sebuah wilayah ke wilayah lainnya, yang dianggap memiliki kemajuan pesat dalam perekonomian. Kondisi ini sehingga menimbulkan sulitnya pembangunan yang ada di wilayah maju, lantaran terkenal dampak daripada membludaknya jumlah pendudukan.

Tabel 2.9
Dinamika Penduduk yang Dipengaruhi oleh Kelahiran, Kematian dan Perpindahan Penduduk
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 - 2020

No	Dinamika Penduduk	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kelahiran	6.484	6.580	6.207	6.095	4.778
2	Kematian	1.686	1.830	989	761	1.830
3	Perpindahan Penduduk (Migrasi)	8.085	7.563	8.648	8.032	6.030
	Jumlah	16.255	15.973	15.844	14.888	12.638

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.1.2.4. Distribusi / Persebaran Penduduk

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya. Daya dukung lingkungan dari berbagai daerah di Indonesia tidak sama. Daya dukung lingkungan pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain, sehingga setiap satuan luas di Pulau Jawa dapat mendukung kehidupan yang lebih tinggi dibandingkan dengan, misalnya di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatra.

Kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kehidupan itu ada batasnya. Apabila kemampuan wilayah dalam mendukung lingkungan terlampaui, dapat berakibat pada terjadinya tekanan-tekanan penduduk.

Tabel 2.10.
Distribusi/Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Lk. Tangaya	21.576	22.223	22.782	23.359	19.349
2.	Lk. Kalmas	13.582	13.724	13.800	13.879	14.618
3.	Lk. Tupabiring	18.942	19.175	20.071	20.330	17.728
4.	Pangkajene	11.538	11.589	11.581	11.577	13.565
5.	Balocci	44.835	45.481	45.900	46.337	48.656
6.	Bungoro	35.663	36.219	36.595	36.987	38.940
7.	Labakkang	16.050	16.188	16.244	16.304	16.560
8.	Ma'rang	8.893	8.941	8.940	8.945	10.099
9.	Segeri	43.132	42.627	44.679	45.382	43.879

No.	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
10.	Minaste'ne	45.953	46.440	46.694	46.964	51.616
11.	Mandalle	30.631	30.841	30.888	30.956	34.401
12.	Tondong Tallasa	21.237	21.501	19.556	19.445	22.339
13.	Lk. Tupabbiring Utara	14.668	14.842	14.944	15.049	14.025
	Pangkajene dan Kepulauan	326.700	329.791	332.674	335.514	345.775

Sumber: BPS Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Dengan menggunakan dasar penghitungan Badan Pusat Statistik maka diperoleh persentase tingkat kemiskinan tahun 2019 sebesar 14,06%, lebih rendah dari tahun 2018 yaitu sebesar 15,10%. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan sebesar 13,96%.

Tabel. 2.11
Indikator Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2016-2020

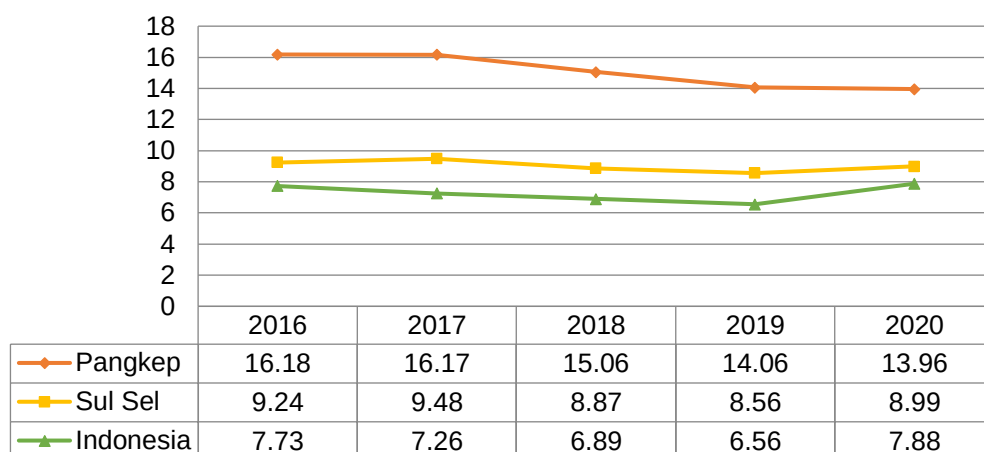
Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	52.86	53.38	50.12	47.07	47,12
Persentase (%)	16.22	16.22	15.10	14.06	13,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan tren penurunan selama kurun waktu Tahun 2016 hingga Tahun 2020. Pada Tahun 2016 jumlah penduduk miskin Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebanyak 52,86 jiwa, kemudian menurun hingga mencapai 47,12 jiwa pada Tahun 2020. Secara umum persentase penduduk miskin Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih berada di atas persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Persentase angka kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 13,96% pada tahun 2020 masih di atas angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 8,99% dan Nasional yaitu 7,88% pada tahun 2020.

Grafik. 2.1
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sul-Sel
Tahun 2016 – 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

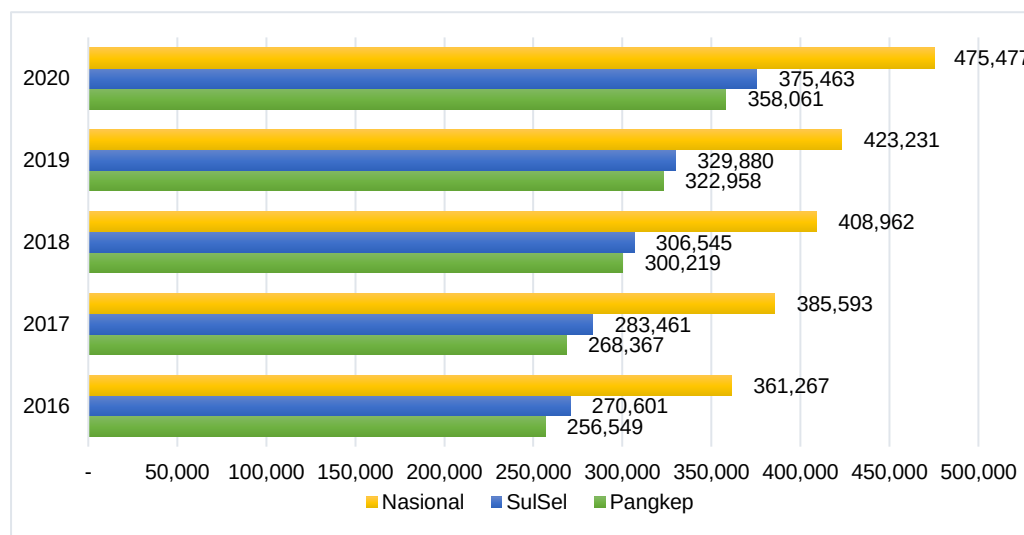
a. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu daerah atau wilayah. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosial-ekonomi.

Perkembangan garis kemiskinan selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 meningkat sangat pesat, dengan laju pertumbuhan sebesar 6,41 %. Pada tahun 2016 garis kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar Rp 256.549 perkapita/bulan kemudian meningkat menjadi Rp 358.061 perkapita/pada tahun 2020. Dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat 47,12 jiwa penduduk yang memiliki pendapatan dibawah Rp 358.061(penduduk miskin).

Kondisi Garis Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional.

Grafik. 2.2.
Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
Provinsi Sulsel, dan Nasional Tahun 2016-2020



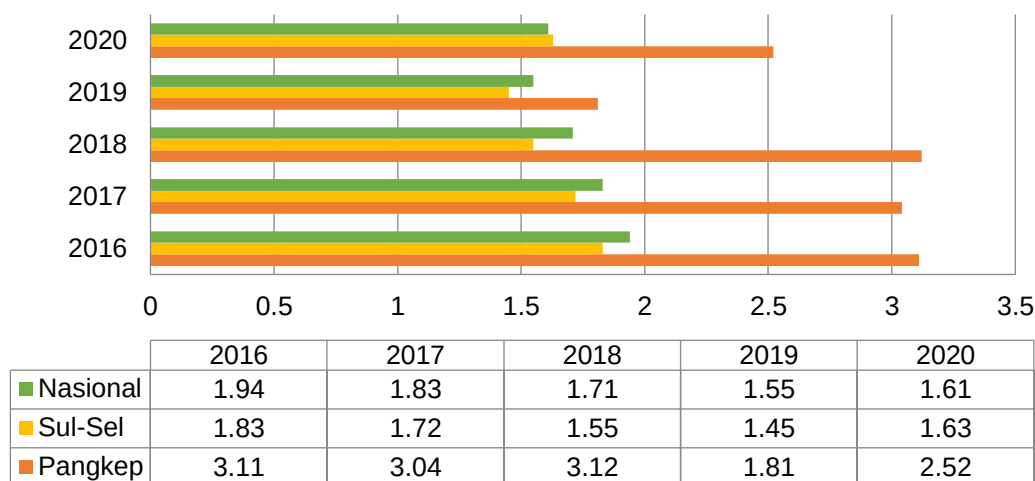
Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021

b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kondisi Indeks Kedalamam Kemiskinan (P1) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan tren yang berfluktuatif. Pada tahun 2016 nilai P1 sebesar 3,11 kemudian menurun sebesar 3,04 pada tahun 2017 dan meningkat sebesar 3,12 pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 kembali menurun dengan nilai P1 sebesar 1,81, dan kembali meningkat menjadi 2,52 pada tahun 2020.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk semakin menjauh dari kemiskinan pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Secara umum, nilai P1 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih lebih tinggi dibandingkan dengan nilai P1 Propinsi Sulawesi Selatan dengan nilai sebesar 1,63 dan P1 Nasional sebesar 1,61. Dengan demikian dapat diketahui bahwa rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih lebih baik dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Grafik. 2.3
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2016 – 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Pengurangan angka kemiskinan setiap tahunnya menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dilakukan melalui program berkelanjutan antara lain; program penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sampai ditingkat RT/RW, pemuthakiran data kemiskinan melalui Mekanisme Pemuthakiran Mandiri (MPM), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), program pemberdayaan masyarakat melalui Produk Andalan Setempat (PAS), Program Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) serta kegiatan-kegiatan pelatihan. Selain itu, program bantuan keuangan khusus produktif dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara berkesinambungan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pengurangan angka kemiskinan.

c. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

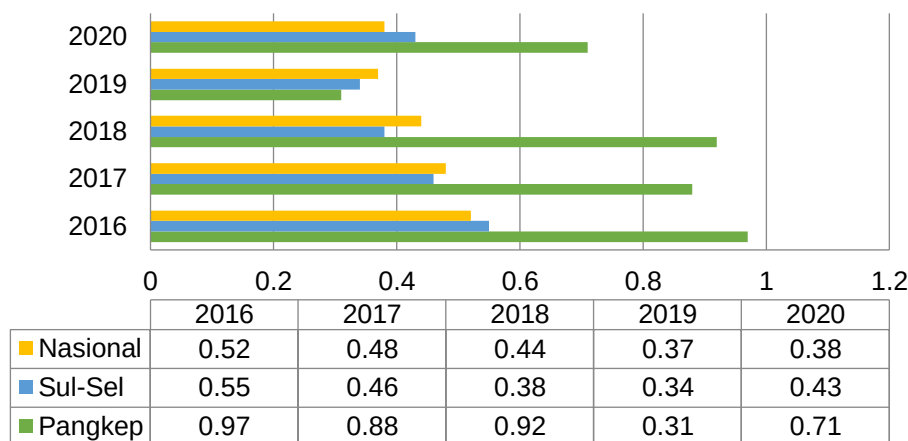
Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Kondisi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 nilai P2 sebesar 0,97 kemudian menurun pada tahun 2017 sebesar 0,88, selanjutnya pada tahun 2018 meningkat sebesar 0,92, kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebesar 0,31 dan kemabali mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 0,71.

Kondisi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2016 – 2020 dan perbandingan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik. 2.4.

Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2016 – 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021

2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan PDRB ADHK selama kurun waktu tahun 2016- 2020 menunjukkan peningkatan yang cukup stabil dari tahun ke tahun. Peningkatan PDRB ADHK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan digambarkan pada tabel berikut;

Tabel 2.12
Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020
Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Lapangan Usaha		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.174,81	15,02	2.350,19	15,23	2.584,26	15,98	2.833,96	16,47	2.860,37	16,91
B	Pertambangan dan Penggalian	1.199,40	8,28	1.297,27	8,41	1.439,25	8,90	1.602,20	9,31	1.610,08	9,52
C	Industri Pengolahan	7.741,44	53,47	8.132,35	52,69	8.144,00	50,37	8.410,85	48,89	8.074,90	47,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,79	0,07	10,36	0,07	10,69	0,07	10,80	0,06	10,39	0,06
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,92	0,03	5,30	0,03	5,87	0,04	6,04	0,04	6,50	0,04
F	Konstruksi	638,14	4,41	695,61	4,51	769,83	4,76	832,62	4,84	856,09	5,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran;	782,10	5,40	862,72	5,59	976,09	6,04	1.068,95	6,21	1.045,84	6,18

Lapangan Usaha		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor										
H	Transportasi dan Pergudangan	459,74	3,18	514,59	3,33	548,05	3,39	620,14	3,60	535,41	3,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58,22	0,40	65,16	0,42	75,35	0,47	81,64	0,47	74,53	0,44
J	Informasi dan Komunikasi	244,24	1,69	260,85	1,69	295,77	1,83	330,17	1,56	369,17	2,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	134,82	0,93	136,16	0,88	134,85	0,83	137,53	0,80	141,64	0,84
L	Real State	219,63	1,52	238,01	1,54	253,10	1,57	268,22	1,56	279,10	1,65
M	Jasa Perusahaan	0,80	0,01	0,86	0,01	0,97	0,01	1,07	0,01	0,99	0,01
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	420,00	2,90	440,63	2,86	465,63	2,88	498,27	2,90	497,29	2,94
P	Jasa Pendidikan	223,78	1,55	243,18	1,58	267,92	1,66	287,98	1,67	315,98	1,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	161,12	1,11	175,50	1,14	191,77	1,19	208,76	1,21	231,43	1,37
R	Jasa Lainnya	4,37	0,03	4,78	0,03	5,51	0,03	6,03	0,04	5,51	0,03
S	Produk Domestik Regional Bruto	14.477,29	100	15.433,50	100	16.168,91	100	17.205,17	100	16.915,23	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Capaian PDRB ADHK pada tahun 2016 sebesar Rp 14.477,92 Milyar, meningkat sebesar Rp 15.433,50 Milyar pada tahun 2017. Pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 16.168,91 Milyar, dan pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp 17.205,17 Milyar. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 16.915,23 Milyar. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berdasarkan PDRB ADHB selama kurun waktu tahun 2016 - 2020 juga menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Peningkatan PDRB ADHB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan digambarkan pada tabel 2.14

Tabel 2.13
Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 s.d 2020

Lapangan Usaha		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.178,94	15,47	3.643,50	16,34	4.136,07	17,27	4.649,68	17,89	4.821,21	18,79

Lapangan Usaha		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
B	Pertambangan dan Penggalian	1.941,84	9,45	2.061,59	9,25	2.351,98	9,82	2.642,03	10,17	2.699,25	10,52
C	Industri Pengolahan	11.011,37	53,57	11.651,81	52,26	11.829,45	49,40	12.401,86	47,72	11.768,75	45,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,05	0,04	10,37	0,05	11,22	0,05	11,39	0,04	11,03	0,04
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,46	0,03	6,03	0,03	6,80	0,03	7,18	0,03	7,76	0,03
F	Konstruksi	881,54	4,29	1.005,63	4,51	1.198,25	5,00	1.361,11	5,24	1.404,63	5,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	971,19	4,72	1.094,00	4,91	1.291,77	5,39	1.449,29	5,58	1.424,94	5,55
H	Transportasi dan Pergudangan	588,48	2,86	651,08	2,92	700,16	2,92	808,40	3,11	708,61	2,76
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	73,49	0,36	82,35	0,37	96,38	0,40	106,65	0,41	100,08	0,39
J	Informasi dan Komunikasi	249,27	1,21	274,77	1,23	319,01	1,33	356,14	1,37	400,21	1,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	183,52	0,89	193,48	0,87	199,56	0,83	207,80	0,80	213,13	0,83
L	Real State	312,25	1,52	347,40	1,56	383,19	1,60	413,66	1,59	431,02	1,68
M	Jasa Perusahaan	1,08	0,01	1,22	0,01	1,44	0,01	1,61	0,01	1,58	0,01
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	616,13	3,00	663,58	2,98	734,22	3,07	810,06	3,12	822,99	3,21
O	Jasa Pendidikan	300,04	1,46	344,35	1,54	388,60	1,62	431,21	1,66	470,56	1,83
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	226,84	1,10	255,81	1,15	288,47	1,20	322,78	1,24	368,61	1,44
Q	Jasa Lainnya	6,07	0,03	7,00	0,03	8,34	0,03	9,28	0,04	8,18	0,03
R	Produk Domesti Regional Bruto	20.555,57	100	22.293,96	100	23.944,89	100	25.990,11	100	25.662,55	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Dari tabel diatas menunjukkan peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) ADHB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk tahun 2016 sebesar Rp 20.555,57 Milyar, dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar Rp 22.293 96 Milyar. Kemudian pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 23.944,89 Milyar dan berturut-turut selama tahun 2019 sampai 2020 kembali meningkat masing-masing sebesar Rp 25.990,11 Milyar dan Rp 25.662,55 Milyar. PDRB atas dasar harga berlaku ini menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini.

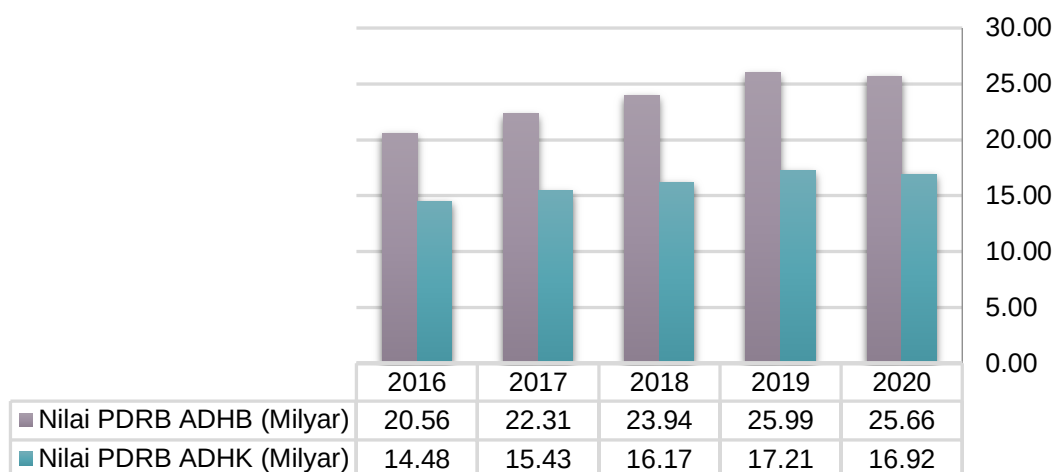
Tabel 2.14
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Tahun 2016 s.d. Tahun 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Sektor	Pertumbuhan	
		Hb %	Hk %
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,6425	0,7025
B	Pertambangan dan Penggalian	0,2375	0,835
C	Industri Pengolahan	-1,47	-1,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0	1,1525
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0	0,63
F	Konstruksi	0,275	-0,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,23	0,21
H	Transportasi dan Pergudangan	-0,035	4,2475
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,0125	0,4925
J	Informasi dan Komunikasi	0,04	0,2325
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,0125	-1,3625
L	Real State	0,0225	-0,355
M	Jasa Perusahaan	0	1,2075
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,0375	0,4025
O	Jasa Pendidikan	0,0525	-0,1825
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,0425	-0,2
Q	Jasa Lainnya	0,0025	0,055
R	Produk Domesti Regional Bruto	0	-0,305

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka 2021, yang diolah kembali

Memperhatikan tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan pada hampir seluruh sektor dalam PDRB, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Real State yang telah berimplikasi kepada pendapatan masyarakat, walaupun di sisi lain terdapat juga sebagian sektor yang turun yaitu sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas, Transportasi dan Pergudangan; Jasa Keuangan dan Asuransi dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Disamping itu ada pula beberapa sektor yang stagnan atau tidak ada perubahan signifikan diantaranya sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah; dan Jasa Perusahaan.

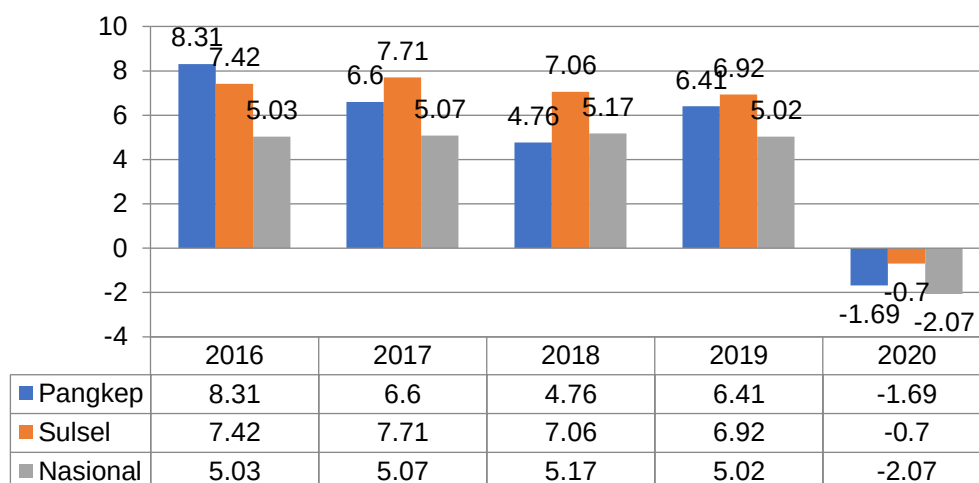
Grafik. 2.5
Perkembangan PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menurut Lapangan Usaha
Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu gambaran kinerja perekonomian daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Berdasarkan data yang disampaikan dalam tabel menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan cukup berfluktuatif. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 7,63 persen, dan tahun 2016 sebesar 8,31 jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 6,60 persen, sedangkan pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,76 hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2018 mengalami perlambatan. Meskipun mengalami perlambatan pada tahun 2018, perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 6,41 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi di sektor industri pengolahan yang sedang melemah, dalam hal ini mayoritas dari industri semen. Melemahnya industri semen dikarenakan serapan pasar akan produk semen turun, sehingga terjadi over produksi semen di Pangkajene dan Kepulauan yang memberikan dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Grafik. 2.6
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 - 2020

	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,37	8,06	9,96	9,66	0,93
B	Pertambangan dan Penggalian	11,81	8,16	10,94	11,32	0,49
C	Industri Pengolahan	9,37	5,05	0,14	3,28	-3,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,22	5,90	3,14	1,05	-3,79
E	Pengadaan Air;Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,28	7,65	10,89	2,86	7,59
F	Konstruksi	8,93	9,01	10,67	8,16	2,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,83	10,31	13,14	9,51	-2,16
H	Transportasi dan Pergudangan	-2,65	11,93	6,5	13,15	-13,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,93	11,92	15,65	8,34	- 8,70
J	Informasi dan Komunikasi	7,84	6,80	13,39	11,61	11,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	15,51	1,00	-0,96	1,99	2,99
L	Real State	6,71	8,37	6,34	5,97	4,06
M	Jasa Perusahaan	6,95	7,26	13,69	10,44	-7,44
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,07	4,91	5,67	7,01	-0,19
O	Jasa Pendidikan	6,32	8,67	10,17	7,48	9,72
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,09	8,92	9,28	8,85	10,86
Q	Jasa Lainnya	8,33	9,55	15,13	9,55	-8,60
R	Produk Domesti Regional Bruto	8,31	6,60	4,76	6,41	-1,69

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka 2021

2.2.1.3. Inflasi

Inflasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menggambarkan indeks harga konsumen yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Tingkat inflasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tingkat Inflasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 adalah sebesar 2,04% dengan kategori ringan sebagaimana pada table berikut.

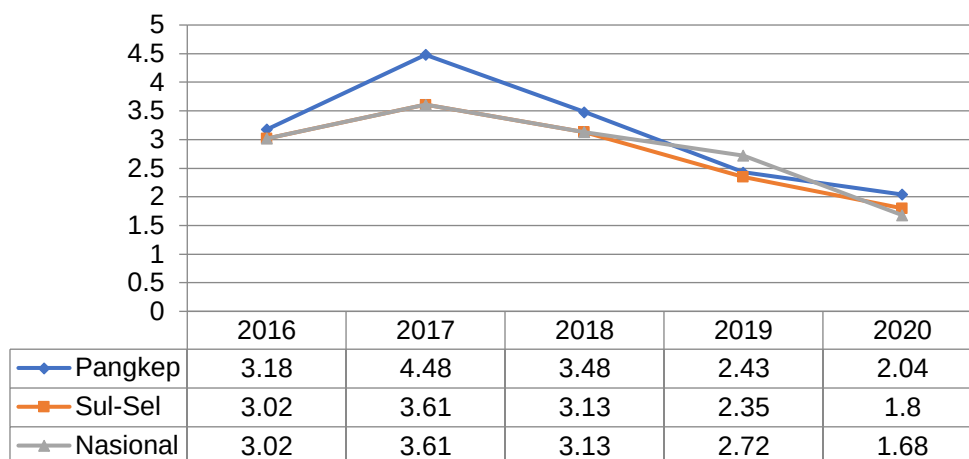
Tabel. 2.16
Inflasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Inflasi	3,18	4,48	3,48	2,43	2,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan kenaikan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada indeks harga konsumen (IHK) yang dihitung secara sampel di 45 (empat puluh lima) kota di Indonesia yang mencakup 283-397 komoditas dan dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup (SBH). Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2020 masih mengalami pasang surut, demikian juga dengan inflasi yang terjadi pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diwakili oleh Kota Makassar sangat dinamis dari tahun 2016 sampai 2020, dan pada tahun 2020 inflasi kota makassar yang berdampak pada inflasi kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami penurunan sebesar 2,04, setidaknya mempengaruhi kondisi inflasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang masuk dalam Zona Makassar.

Grafik. 2.7
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Tingkat inflasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 menurut data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka sebesar 2,04%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2019 adalah sebesar 2,43% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2020. Namun/Dengan demikian inflasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Provinsi dan Nasional yang sebesar 1,8% untuk nilai provinsi Sulawesi Selatan dan sebesar 1,68% pada tingkat Nasional. Pendorong inflasi tahun 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di antaranya adalah naiknya harga beberapa bahan pokok makanan termasuk naiknya harga makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi pada kelompok ini, yaitu: beras, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, dan sayur-sayuran.

2.2.1.4. PDRB Perkapita

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah atau wilayah diperlukan indikator ekonomi yang menunjukkan bahwa aktifitas ekonomi daerah tersebut berjalan. Berjalannya kegiatan ekonomi dapat meningkatkan kemakmuran masyarakatnya dan ini tercermin dari Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita. PDRB per kapita yang semakin meningkat mengindikasikan kesejahteraan di wilayah tersebut. PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau persatuan penduduk.

PDRB perkapita sebesar 75,88 juta rupiah tahun 2020 persatuan penduduk. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Tahun 2019 dan 2018 yaitu sebesar 77,46 juta rupiah dan Rp 71,98 juta rupiah. Walaupun belum mencapai target akan tetapi PDRB perkapita mengalami penurunan, ini belum mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang sesungguhnya karena masih dipengaruhi oleh inflasi. Namun demikian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.17
Perkembangan PDRB Perkapita
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rp)	62,91	67,60	71,98	77,46	75,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Tabel 2.18
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020

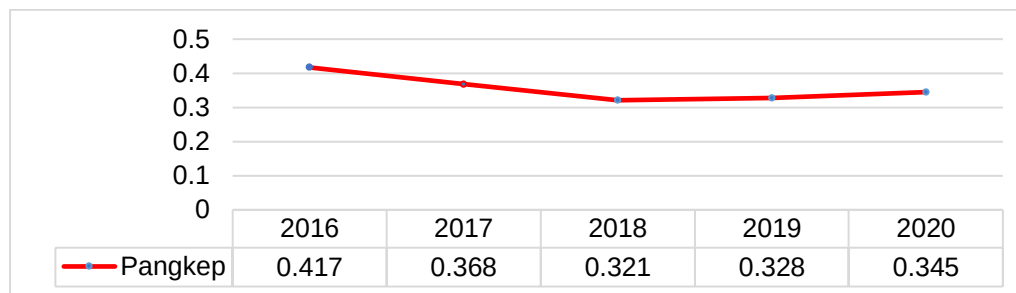
Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pangkajene dan Kepulauan	62,91	67,60	71,98	77,46	75,88
Sulawesi Selatan	43,82	47,82	52,64	56,98	56,51
Nasional	47,94	51,89	55,99	59,07	56,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.2.1.5. Rasio Gini

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah masalah sosial di masyarakat. Rasio gini merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai rasio gini berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan rasio gini dibagi menjadi 3 bagian, rasio gini antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai rasio gini antara 0,30-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai rasio gini kurang dari 0,30 termasuk ketimpangan rendah.

Grafik.2.8
Rasio Gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

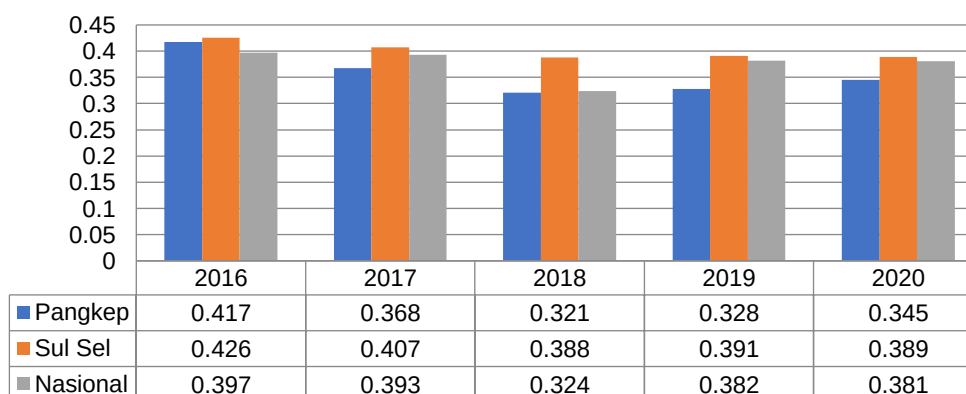


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Pada tahun 2016, rasio gini naik menjadi 0,417. Kenaikan rasio gini ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2015 sebesar 7,63% naik menjadi 8,31% pada tahun 2016. Pada tahun 2017, rasio gini turun menjadi 0,368 seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 6,6% pada tahun yang sama. Pertumbuha ekonomi pada 2018 sebesar 4,76% menurunkan rasio gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadi 0,321. Sedangkan peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 menjadi 6,41%, rasio gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan naik 0,328 pada tahun yang sama. Indikator rasio gini Pada tahun 2019 adalah tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk kabupaten Pangkajene dan Kepulaun yang diukur oleh rasio gini sebesar 0,328. Angka ini menurun sebesar 0,007 poin jika dibandingkan dengan rasio gini pada tahun 2018 yang sebesar 0,321. Selanjutnya pada tahun 2020 angka rasio gini meningkat menjadi 0,345, naik sebesar 0,017 point.

Hal ini tidak jauh berbedah dengan pertumbuhan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,389 dan Nasional 0,345 tahun 2020.

Grafik. 2.9
Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2016 – 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.

Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Tantangan besar pembangunan adalah bagaimana dapat memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Upaya perbaikan kualitas manusia, selain upaya peningkatan pendapatan adalah juga perlu upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan manusia. sebagai alat ukur yang relevan untuk mengetahui peningkatan derajat kualitas SDM ditetapkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara atau daerah dengan tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat (a long healthy life), dimensi pengetahuan (knowledge) dan dimensi standar hidup layak (descent standard of living).

Selama beberapa tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan perkembangan yang positif yaitu nilai IPM yang terus mengalami peningkatan yakni sebesar 66,86 pada tahun 2016 hingga 68,72 pada tahun 2020.

Tabel 2.19
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	66,86	67,25	67,71	68,29	68,72

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Angka IPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, mulai dari tahun 2016 sebesar 66,86, kemudian pada tahun 2017 sebesar 67,25. Selanjutnya pada tahun 2018 sebesar 67,71, tahun 2019 sebesar 68,29 dan tahun 2020 meningkat lagi sebesar 68,72.

Tabel 2.20
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Harapan Hidup	65,77	65,86	66,12	66,49	66,66
2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,39	12,4	12,41	12,51	12,76
3	Angka Harapan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,33	7,48	7,49	7,60	7,66
4	Purchasing Power Parity (Daya Beli)	10,670	10,837	11,197	11,392	11,405

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
5	Indeks Pendidikan	58,85	59,38	59,44	60,08	60,98
6	Indeks Pengeluaran	72,12	72,50	73,59	75,12	74,15
7	Indeks Kesehatan	66,86	67,25	67,71	68,29	71,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberikan konsekuensi terhadap meningkatnya jumlah penduduk usia kerja. Pertambahan penduduk usia kerja yang tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan yang memadai memberikan dampak peningkatan pengangguran terbuka di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2016 tidak dihitung, sementara pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 7,05 persen. Untuk tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan menjadi 6,91 persen kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 5,41 persen, dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 5,18. Tingkat pengangguran terbuka yang meningkat dari tahun ke tahun merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, diantaranya melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mendorong pembukaan lapangan kerja baru serta peningkatan keterampilan dan mental kerja masyarakat yang dapat membangun mental kewirausahaan dan kemandirian masyarakat. Persentase tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sulsel dan Nasional.

Tabel 2.21
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	5,6	5,5	5,3	5,2	7,1
Prov Sul Sel	4,80	5,61	4,94	4,62	6,31
Kabupaten Pangkep	N/A	7,05	6,91	5,41	5,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.2.2.3 Indeks Pendidikan

1) Angka Melek Huruf

Angka melek huruf oleh Badan Pusat Statistik didefinisikan sebagai proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf Lontara, Bugis Makassar) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Data ini dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang melek huruf. Dengan demikian,

dapat dikaji seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, menambah pengetahuan dan ketrampilan, memudahkan komunikasi, serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik sehingga penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya diberbagai bidang kehidupan, dapat digunakan sebagai tolak ukur target perencanaan dan evaluasi program pemberantasan buta huruf, Dapat digunakan untuk mengevaluasi program pemberantasan kemiskinan, program pembangunan di bidang kesehatan dan program pembangunan manusia lainnya; Dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis media informasi dan komunikasi yang dapat diakses masyarakat, dan lain-lain.

Tabel 2.22
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2016-2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	248.007	278.801	244.991	238.297	236.606
2.	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	265.617	290.418	267.457	256.509	258.586
3.	Angka Melek Huruf (%)	93,37	96,00	91,60	92,90	91,50

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021

Tingginya angka melek huruf menggambarkan bekerjanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, angka melek huruf sudah terbilang tinggi, di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Ada trend positif pada perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Tahun 2016-2020, naik dengan cukup signifikan setiap tahunnya.

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah

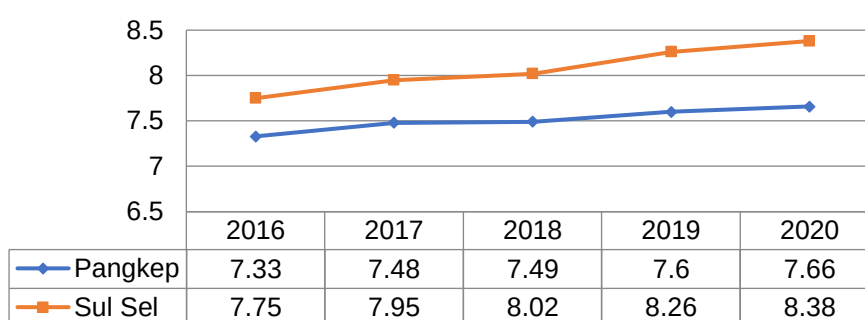
Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan secara moderat. Apabila pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah hanya 7,33 tahun, pada tahun berikutnya 2017 menjadi 7,48 tahun. Pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah menjadi 7,49 tahun, dan di tahun 2019 sebesar 7,60 tahun. Sementara untuk tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,66. Dibandingkan target Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional target yang ditetapkan sebesar 7,76. Angka tersebut masih rendah dari angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Selatan yang pada tahun 2020 berada pada angka 8,38.

Tabel 2.23
Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2016 - 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,33	7,48	7,49	7,60	7,66

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021

Grafik. 2.10
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 – 2020

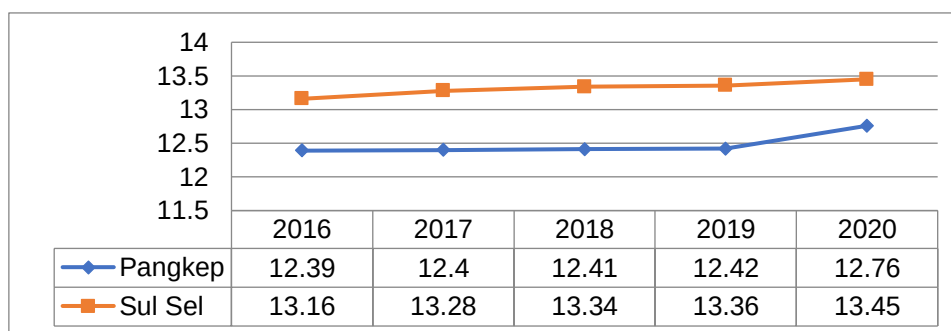


Sumber: Badan Pusat Statistik 2020 Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Grafik. 2.11
Angka Harapan Lama Sekolah (AHS)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 – 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan periode tahun 2016 – 2019 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,04 persen. Pada tahun 2016, angka Harapan Lama Sekolah sebesar 12,41 tahun. Selama kurun waktu lima tahun terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2020 menjadi 12,76 tahun.

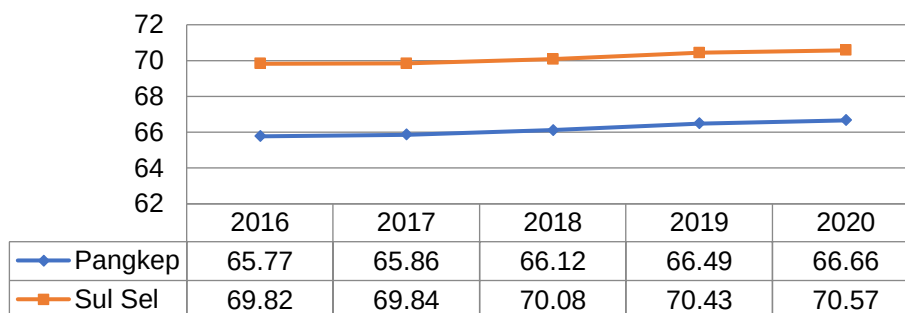
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 12,76 tahun, artinya bahwa penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan masih bersekolah selama minimal 12 tahun atau minimal di umur 19 tahun masih sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2020 ini masih lebih rendah dari angka Provinsi Sulawesi Selatan yang besarnya 13,45 tahun.

2.2.2.4 Indeks Kesehatan

1) Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2016-2020, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan semakin meningkat dari 65,77 pada tahun 2016 menjadi 66,66 di tahun 2020.

Grafik. 2.12
Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 – 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Bila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih lebih rendah. Hal ini dapat terlihat pada Grafik. 2.12. Dari tahun 2016-2020, AHH Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih di dibawah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk tahun 2020 sesuai dengan data BPS Angka Harapan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami peningkatan yaitu sebesar 66,66 dari 66,49 ditahun 2019.

2) Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita, keadaan tubuh anak bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah kondisi terparah dari kekurangan gizi menahun. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.24
Jumlah Gizi Buruk
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Bayi Lahir	5.151	5.161	5.797	5.794	5.673
2.	Penderita Gizi Buruk	6	16	8	4	1
3.	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,116	0,310	0,138	0,069	0,176

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021

3) Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi Balita Gizi Kurang adalah proporsi dari populasi yang memiliki gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun.

Walaupun berdasarkan data Riskesdas Tahun 2018 dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) yang dilaksanakan pada tahun 2019 angka gizi kurang sempat turun 1,5% dari 17,7 menjadi 16,29 secara nasional, tetapi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan angka gizi kurang masih menunjukkan tren yang meningkat. Dari angka 0,01 di tahun 2017, meningkat menjadi 0,08 di tahun 2019 dan 0,09 di tahun 2020. Hal ini masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi bukan hanya oleh petugas kesehatan di lapangan, tapi juga menjadi tujuan dari Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang menjadi tujuan pembangunan global, termasuk Indonesia.

Tabel.2.25
Prevalensi Balita Gizi Buruk
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	0,02	0,01	0,01	0,08	0,09

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021

4) Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan strategi baru pembangunan kesehatan. Desa siaga lahir sebagai respon pemerintah terhadap masalah kesehatan di Indonesia yang tak kunjung selesai. Tingginya angka kematian ibu dan bayi, munculnya kembali berbagai penyakit lama seperti tuberkulosis paru, merebaknya berbagai penyakit baru yang bersifat pandemik seperti SARS, HIV/AIDS dan flu burung serta belum hilangnya penyakit endemis seperti diare dan demam berdarah merupakan masalah utama kesehatan di Indonesia. Bencana alam yang sering menimpa bangsa Indonesia seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, banjir,

tanah longsor dan kecelakaan massal menambah kompleksitas masalah kesehatan di Indonesia.

Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan bottom up. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI/II/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa siaga, desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri.

Tabel.2.26
Cakupan Desa Siaga Aktif
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	94	91	98	96	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021

Tabel.2.27
Cakupan Desa Siaga Aktif
Per Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020

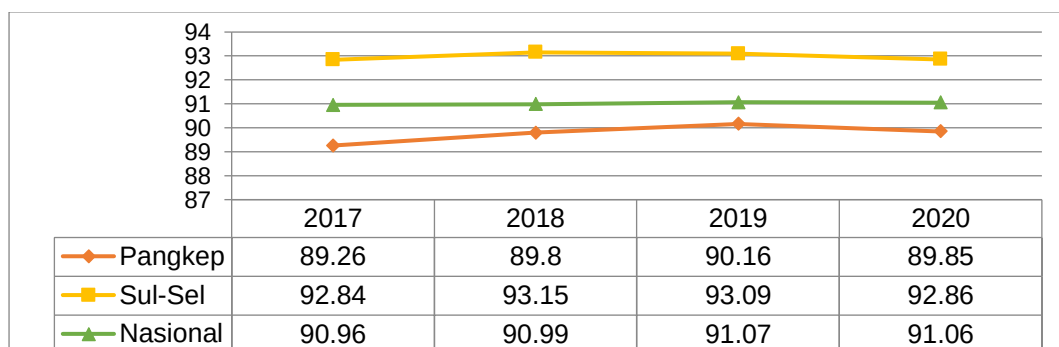
No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Balocci	5	5	5	5	5
2.	Minasate'ne	8	8	8	8	8
3.	Tondong Tallasa	6	6	6	6	6
4.	Pangkajene	9	9	9	9	9
5.	Bungoro	8	8	8	8	8
6.	Labbakkang	13	13	13	13	13
7.	Ma'rang	10	10	10	10	10
8.	Segeri	6	6	6	6	6
9.	Segeri Mandalle	1	6	6	6	6
10.	Lk Tupabbiring	9	11	9	9	9
11.	Lk Tupabbiring Utara	5	5	7	7	7
12.	Lk Tangaya	5	5	6	9	9
13.	Lk Kalmas	11	8	8	7	7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021

2.2.2.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

Grafik 2.13
Perbandingan IPG Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Provinsi Sulsel
Tahun 2017–2020

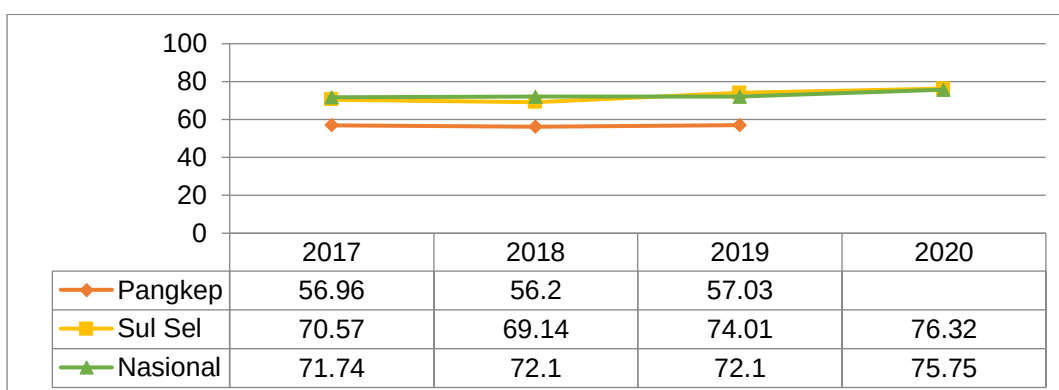


Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan BPS Tahun 2021

Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, IPG Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada tahun 2020, IPG Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 89,85, IPG Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 92,86 dan Nasional sebesar 91,06.

IPG sebesar 89,85 ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia berbasis gender di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah berjalan baik, karena mengalami penurunan angka IPG dibandingkan tahun 2019 (sebesar 90,16). Sementara nilai IDG Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama lima tahun dari tahun 2016 sampai 2020, berfluktuasi cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011, nilai IDG Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 68,44 mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 67,44. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2016-2020 nilai IDG Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dalam kehidupan ekonomi dan politik menurun partisipasinya.

Grafik 2.14
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2020



Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan BPS Tahun 2021

2.2.2.6 Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah berjalan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya. Adapun capaian indeks reformasi birokrasi Sulawesi selatan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.28
Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	C	C	C

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020

Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 43,01 dengan kategori “C” atau kurang. Namun capaian ini meningkat dari capaian indeks RB tahun sebelumnya yaitu sebesar 37,15. Rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.29
Rincian Hasil Evaluasi
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020

No	Komponen Penilaian	Bobot	Hasil 2020
A	Komponen Pengungkit		
1.	Pemenuhan	20,00	6,42
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,57
3.	Reform	30,00	6,19
	Total Komponen Pengungkit	60,00	17,18
B	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,13
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	6,83
3.	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.	10,00	7,80
4.	Kinerja Organisasi	10,00	4,07
	Total Komponen Hasil	40,00	25,83
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	43,01

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Capaian kategori C ini menunjukkan bahwa masih perlu banyak perbaikan dan perubahan mendasar terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Perbaikan mendasar tersebut antara lain:

- Masih kurang lengkapnya bukti/eviden administratif pelaksanaan kegiatan berupa: undangan kegiatan, foto/dokumentasi, berita acara/notulen serta laporan kegiatan.
- Laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
- Kegiatan yang belum memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur).

2.2.2.7 Nilai SAKIP

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah diukur melalui penilaian terhadap Standar Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP). Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Adapun capaian kinerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30.
Nilai Standar Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP)
Tahun 2016 - 2020

Komponen Yang dinilai	Bobot	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Perencanaan Kinerja	30	17,78	18,73	18,73	18,95	19,09
Pengukuran Kinerja	25	12,81	13,31	13,31	13,44	13,73
Pelaporan Kinerja	15	10,26	9,06	9,62	9,83	10,20
Evaluasi Kinerja	10	4,97	5,64	5,64	5,86	6,01
Capaian Kinerja	20	8,18	10,82	10,82	10,86	11,14
Nilai Hasil Evaluasi	100	54,01	57,56	58,12	58,94	60,17
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	CC	CC	B

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai SAKIP mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Adapun komponen yang capaian kinerja tertinggi adalah perencanaan kinerja, Sedangkan yang terendah adalah evaluasi kinerja. Nilai hasil evaluasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 Tingkat akuntabilitas kinerja meningkat dari CC menjadi B yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah berkinerja dengan lebih baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang handal, untuk kedepannya diharapkan mampu untuk dipertahankan dan ditingkatkan.

2.2.2.8 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang beberapa tahun terakhir diganti menjadi Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan melibatkan akademisi merupakan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disajikan pada tabel di bawah.

Tabel. 2.31.
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 - 2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	71,59	74,44	77,40	80,48	83,68

Sumber: Bappeda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021

2.2.2.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menggunakan beberapa kriteria yaitu Kualitas Air, Kualitas Udara dan Kualitas Tutupan Lahan. Penghitungan IKLH mengalami perkembangan (2009 - 2020) dan penyempurnaan sebanyak 4 kali. IKLH mulai dapat dihitung dengan baik di tahun 2018 karena data Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara Dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan tersedia dan diketahui. Nilai IKLH di tahun 2018 sampai dengan 2020 menunjukkan nilai yang semakin meningkat meskipun predikatnya cukup baik. Predikat IKLH yang "Cukup Baik" membutuhkan perbaikan strategi pengelolaan dan pengendalian pencemaran melalui perbaikan indikator kualitas lingkungan (air, udara dan tutupan lahan). Semuanya tidak lepas dari peningkatan anggaran dan penyediaan sarana dan prasarana serta kerja sama yang baik antara pemda, pihak swasta dan masyarakat.

Tabel. 2.32.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 - 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Peningkatan Indeks Kualitas Air	45,71	35	58,57	64,29	65
Peningkatan Indeks Kualitas Udara	0	72,80	76,06	76,95	81,32
Peningkatan Indeks Tutupan Lahan	0	0	53,63	54,35	58,78
IKLH (%)	13,73	32,34	61,84	64,11	67,40

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.2.2.10 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Inventarisasi gas rumah kaca dilakukan setiap tahunnya sejak tahun 2016 s/d 2019. Profil emisi Gas Rumah Kaca di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan nilai yang fluktuatif. Ditahun 2017 emisi GRK mengalami kenaikan sebesar 2048 CO₂ eq gg dan kemudian turun kembali secara berurut ditahun 2018 dan 2019. Tahun 2020 tidak dilakukan inventarisasi GRK karena refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Tabel. 2.33.
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 - 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Emisi GRK (CO ₂ eq gg/thn)	9.162,35	11.210,72	9.570,38	8.642,69	n/a

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Tahun 2017 emisi GRK mengalami kenaikan disebabkan nilai emisi GRK dari sektor energi mengalami kenaikan 5 kali lipat dibandingkan di tahun 2016. Kenaikan tersebut disebabkan karena data inventarisasi GRK sektor energi yang diperoleh di tahun 2017 cukup lengkap hingga tahun 2019. Namun berbanding terbalik dengan nilai emisi GRK sektor pertanian. Emisi GRK sektor pertanian yang diperoleh di tahun 2017 mengalami penurunan 3 kali lebih sedikit dibandingkan nilai yang diperoleh di tahun 2016. Data inventarisasi GRK yang kurang lengkap dan adanya perbedaan data yang diperoleh dari instansi terkait mempengaruhi nilai Emisi GRK yang diperoleh. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari instansi terkait dan pihak swasta diharapkan dapat memperbaiki nilai emisi GRK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal utama dalam pembangunan nasional. Salah satu strategi untuk meningkatkan SDM yang berdaya saing adalah melalui pendidikan. Di dalam UUD 1945 Pasal 31 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sementara itu, tujuan ke-4 dari Sustainable Development Goals (SDGs) adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Fokus utama dalam pembangunan pendidikan di Indonesia adalah peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2020 disebutkan bahwa tantangan pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, meningkatkan

akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial-ekonomi, antar wilayah, dan antar jenis kelamin; serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Karena pentingnya aspek pembangunan manusia ini, RPJMN 2020-2024 memasukkan peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemerataan layanan pendidikan sebagai salah satu agenda pembangunan.

Strategisnya peran pendidikan dalam pembangunan nasional membuat seluruh tingkatan pemerintah, dari nasional hingga daerah, menjadikan pendidikan sebagai salah satu agenda pembangunan yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan. Untuk itu, Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan manajemen pendidikan hingga pada akhirnya terjadi perbaikan dalam beberapa indikator utama pendidikan, baik itu di tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), maupun pendidikan dasar.

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan jenjang pendidikan persiapan anak sebelum memasuki pendidikan dasar. Pendidikan pada jenjang ini bertujuan untuk mengoptimalkan perkembangan jasmani, rohani, motorik, kognitif, emosional, dan sosial anak sebagai bekal dalam mengikuti pendidikan dasar nantinya. Persiapan anak yang kurang sebelum memasuki pendidikan dasar dapat membuat anak tidak dapat mengikuti proses pembelajaran di tingkat pendidikan dasar, hingga pada akhirnya putus sekolah. Adapun rentang usia anak yang diharapkan memasuki jenjang pendidikan ini adalah pada rentang umur 5-6 tahun.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan persentase perbandingan jumlah siswa yang sedang bersekolah pada jenjang PAUD dengan jumlah penduduk sekolah PAUD (5-6 tahun). Persentase penduduk usia sekolah PAUD yang berpartisipasi dalam PAUD di Pangkajene dan Kepulauan dapat terlihat melalui indikator angka partisipasi kasar (APK) PAUD. APK PAUD Pangkajene dan Kepulauan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu dari 43,83 persen di tahun 2015 lalu terus meningkat sampai di tahun 2020 menjadi 82,03 persen. Peningkatan ini dapat terjadi karena tingginya kesadaran masyarakat akan pendidikan anak usia dini (PAUD) sebelum memasukkannya ke jenjang pendidikan dasar. Tersedianya PAUD di setiap Desa/kelurahan tersedianya sarana dan Prasarana pendukung PAUD, Pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia di setiap PAUD dengan kualifikasi S1 PGTK. Tersedianya Anggaran BOP bagi PAUD melalui dana APBN, tersedianya Insentif bagi guru Non PNS sumber dana APBD.

Tabel 2.34
Perkembangan Capaian APK PAUD
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Siswa PAUD	9.841	10.425	9.187	9.752	10.273
2	Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun	22.453	22.525	37.695	19.263	12.524
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	43,83	46,28	48,36	50,63	82,03

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) dimaknai sebagai Rasio jumlah siswa pada jenjang pendidikan SD/SLTP atau yang sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun (7-12 tahun untuk SD atau yang sederajat, 13-15 tahun untuk SLTP atau yang sederajat), berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Meskipun demikian APK merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam melihat keberhasilan pembangunan pendidikan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dalam kurun waktu 2016-2019 terjadi perbaikan indikator angka partisipasi kasar (APK) Pangkajene dan Kepulauan untuk jenjang pendidikan sekolah dasar, namun ditahun terakhir (tahun 2020) mengalami penurunan draktis yakni dari 106,61 persen turun menjadi 97,26 untuk jenjang SD/MI. Begitupun untuk jenjang SMP/MTs terjadi penurunan ditahun 2020 yakni dari 107,73 persen ditahun 2019 turun menjadi 89,64 persen. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19, Kurang aksesnya layanan secara virtual kepada siswa yang berada pada daerah terpenci, Sarana pendukung untuk pembelajaran dari rumah masih kurang untuk pembelajaran on line maupun tatap muka langsung, masih perlunya peningkatan ketrampilan guru dalam menggunakan media pembelajaran, Anggaran yang tersedia untuk penggunaan internet masih kurang.

Tabel 2.35
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 - 2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	39.677	38.610	42.452	37.510	38.291
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	37.730	36.226	40.265	35.185	39.370
1.3	APK SD/MI (%)	105,16	106,58	105,43	106,61	97,26

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	24.735	24.399	21.984	18.572	18.419
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	23.521	22.438	21.479	17.240	20.548
2.3	APK SMP/MTs (%)	105,16	108,74	102,35	107,73	89,64

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Indikator pendidikan ini bermanfaat untuk menunjukkan capaian hasil pembangunan pendidikan di suatu daerah, selain itu berguna pula untuk menyusun perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk mengetahui kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Perkembangan pendidikan yang ditamatkan (APT) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tingkat pendidikan SD dan SMP sangat berfluktuasi dan cenderung stagnan di tahun 2018. Jika dilihat dari perkembangan siswa SD yang ditamatkan di tahun 2018 sebanyak 6,916 terjadi penurunan di tahun 2019 menjadi 6,271. demikian juga untuk tingkat pendidikan SMP di tahun 2019 merupakan tahun tertinggi siswa yang ditamatkan yaitu sebanyak 6,029 dan menurun di tahun 2020 menjadi 5,152. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19, Peserta didik tidak mengikuti Ujian Akhir Nasional disebabkan Pandemi covid 19, kehadiran siswa tidak terkondisikan saat mereka belajar baik melalui daring maupun luring, tidak ada tatap muka langsung siswa dengan guru, kurang kurangnya komunikasi orang tua dan pihak sekolah untuk pembelajaran peserta didik disebabkan karena penggunaan media terbatas. Kurang aksesnya layanan secara virtual kepada siswa yang berada pada daerah terpencil, Sarana pendukung untuk pembelajaran dari rumah masih kurang untuk pembelajaran on line maupun tatap muka langsung.

Tabel 2.36
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)
Kabupaten Pangkajene Tahun 2016 - 2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah siswa yang ditamatkan di jenjang pendidikan SD/MI	6,260	6,689	6,916	6,271	6,719
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	37.730	36.226	40.265	35.185	39.370
1.3	APT SD/MI (%)	15.60	18.46	17.18	17.82	17.07

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah siswa yang ditamatkan di jenjang pendidikan SMP/MTs	5,661	5,728	5,784	6,029	5,152
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	23.521	22.438	21.479	17.240	20.548
2.3	APT SMP/MTs (%)	24.08	25.53	26.93	34.97	25.07

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan jumlah penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan, dan juga merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan pendidikan atas pemerataan serta perluasan akses pendidikan. Pada tahun 2020 APM untuk jenjang pendidikan SD/MI atau sederajat sebesar 91,76 persen, dan untuk jenjang SMP/MTs atau sederajatnya sebesar 78,80 persen, dari kurung waktu 5 tahun terakhir APM pangkajene dan kepulauan yang tertinggi adalah ditahun 2020 walaupun 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2020 sistem penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan cara online dan offline, kesadaran orangtua siswa sangat tinggi untuk memastikan anaknya masuk sekolah, pemerintah memberi ruang yang sangat luas untuk penerimaan siswa baru meskipun masa pandemi, kepastian siswa tetap belajar oleh pemerintah sangat tinggi, Pemberian kuota internet pendidikan oleh kemendikbud, Bantuan Subsidi bagi semua guru non pns oleh kemendikbud ,untuk memastikan kesejahteraan bagi guru non pns dimasa pandemi. Kemudahan dalam penerimaan peseerta didik oleh setiap sekolah.

Tabel 2.37
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2016 - 2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	34.527	33.172	36.740	32.070	36.126
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	37.730	36.226	40.265	35.185	39.370
1.3	APM SD/MI (%)	91,51	91,57	91,25	91,15	91,76
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	15.928	16.227	15.958	13.046	16.110
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	23.521	22.438	21.479	17.240	20.548
2.3	APM SMP/MTs (%)	67,72	72,32	74,30	75,67	78,40

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

5. Angka Partisipasi Sekolah

Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Angka partisipasi sekolah (APS) Pangkajene dan Kepulauan untuk jenjang pendidikan SD/MI cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2016-2020. Di tahun 2015, terdapat 87,57 persen penduduk usia 7-12 tahun yang telah berpartisipasi pada SD/MI penduduk di Pangkajene dan Kepulauan. Angka ini terus meningkat sampai tahun 2020, dimana terdapat 92,75 persen penduduk per seribu penduduk usia 7-12 tahun yang telah terserap pada jenjang pendidikan SD/MI. APS pada jenjang pendidikan SMP Pangkajene dan Kepulauan juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2016-2020. Sampai pada tahun 2020 terjadi peningkatan APS, yaitu dari 57,88 persen penduduk per seribu penduduk usia 13-15 tahun di tahun 2015 menjadi 90,75 persen penduduk di tahun 2020. Hal ini adanya Layanan pembelajaran yang lebih berpihak pada peserta didik, Layanan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan tujuan target di setiap wilayah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kolaborasi berbagai stakeholder pendidikan, Sarana dan prasarana pembelajaran semakin baik, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan semakin baik.

Tabel 2.38
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
Tahun 2016 - 2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah siswa usia 7-12 tahun	33.040	32.136	36.291	32.039	36.453
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	37.730	36.226	40.265	35.185	39.370
1.3.	APS SD/MI (%)	87,57	88,71	90,13	91,06	92,75
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah siswa usia 13-15 tahun	13.283	13.828	15.544	15.273	18.647
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	23.521	22.438	21.479	17.240	20.548
2.3.	APS SMP/MTs (%)	57,88	61,63	72,37	88,59	90,75

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2021

6. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Semakin rendah angka putus sekolah makin baik.

Jumlah anak putus Sekolah jenjang pendidikan dasar SD/MI dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan walau tidak yang cukup signifikan. Dari 0,13 pada tahun 2016 turun menjadi 0,10 pada tahun 2020. Semakin terbukanya layanan pendidikan di semua

wilayah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mengakomodir peserta didik semakin baik, kesadaran masyarakat untuk pendidikan semakin baik, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan semakin baik, ketersediaan media pembelajaran dari sekolah meningkat, peran serta dari sekolah semakin baik.

Tabel 2.39
Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,13	0,14	0,13	0,11	0,10

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2021

Jumlah anak putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama SMP/MTs dari tahun 2015-2017 cenderung mengalami peningkatan juga. Dari 0,39 pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 0,30 pada tahun 2020. Semakin terbukanya layanan pendidikan di semua wilayah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mengakomodir peserta didik semakin baik, kesadaran masyarakat untuk pendidikan semakin baik, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan semakin baik, ketersediaan media pembelajaran dari sekolah meningkat, peran serta dari sekolah semakin baik.

Tabel 2.40
Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,39	0,36	0,33	0,32	0,30

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2021

7. Angka Kelulusan

Angka Kululusan (AL) menunjukkan rasio perbandingan siswa yang berhasil lulus pada jenjang pendidikan tertentu dengan seluruh siswa pada jenjang yang bersangkutan.

Tahun 2016-2020, peserta didik tingkat SD/MI di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang lulus dan menyelesaikan pendidikan mencapai 100 persen.

Tabel 2.41
Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Lulusan	6,260	6,689	6,916	6,271	6,719
2	Jumlah Siswa Kelas VI	6,260	6,689	6,916	6,271	6,719
3	Angka Lulusan SD/MI (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2021

Sedangkan Angka Kelulusan (AL) untuk peserta didik tingkat SMP/MTs di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang lulus dan menyelesaikan pendidikan mencapai 100 persen dua tahun terakhir yakni di tahun 2019 dan 2020.

Tabel 2.42
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Lulusan	5,661	5,728	5,784	6,029	5,152
2	Jumlah Siswa Kelas IX	5,687	5,781	5,810	6,029	5,152
3	Angka Lulusan SMP/MTs (%)	99,54	99,08	99,55	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2021

8. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Ketersediaan sekolah merupakan bentuk layanan dasar dari sebuah sistem pemerintahan daerah. Untuk jenjang pendidikan SD/MI, ketersediaan sekolah per seribu penduduk menunjukkan kecenderungan mengalami fluktuasi, dengan rasio tertinggi ada di tahun 2019 yakni 92 gedung/sekolah untuk setiap 10.000 jumlah penduduk sedangkan rasio terendah ada di tahun 2015 yakni 78 gedung/sekolah untuk setiap 10.000 jumlah penduduk. Untuk jenjang SMP/MTs juga menunjukkan mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020, dengan rasio tertinggi ada di tahun 2019 yakni 67 gedung/sekolah untuk setiap 10.000 jumlah penduduk sedangkan rasio terendah ada di tahun 2015 yakni 48 gedung/sekolah untuk setiap 10.000 jumlah penduduk. Ketersediaan Gedung sekolah telah mampu meningkatkan angka melanjutkan pendidikan, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.43
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Gedung Sekolah	295	303	321	322	323
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 - 12 Tahun	37.730	36.226	40.265	35.185	39.370
1.3	Rasio tiap per 10.000 penduduk	78	84	80	92	82
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Gedung Sekolah	112	114	115	116	118
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 – 15 Tahun	23.521	22.438	21.479	17.240	20.548
2.3	Rasio tiap per 10.000 penduduk	48	51	54	67	57

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2021

9. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru terhadap murid adalah perbandingan jumlah guru tingkat pendidikan dasar per jumlah murid pendidikan dasar. Semakin kecil rasionya berarti semakin sedikit jumlah murid yang dihadapi satu guru. Untuk jenjang SD/MI Jumlah guru di Pangkajene dan Kepulauan pada rentang tahun 2016-2020 juga cukup berfluktuatif yang juga diikuti dengan jumlah murid yang berflutuasi juga. Hal ini membuat rasio guru/murid juga menjadi cukup berfluktuasi dalam rentang tahun tersebut. Jika di tahun 2016, satu guru menghadapi 14 murid, di tahun 2017 cakupannya meningkat menjadi 12 murid. Meski ditahun 2018 menurun yaitu satu guru menghadapi 15 murid. Begitu cakupan ketersediaan guru ini mulai membaik di dua tahun terakhir menjadi 13 murid di tahun 2019 dan tahun 2020. sedangkan untuk jenjang SMP/MTs rasio guru dalam kurung waktu lima tahun juga mengalami fluktuasi. namun dalam 2 tahun terakhir (2019-2020) satu guru sudah menghadapi 10 murid. Jumlah peserta didik berkurang, orang tua siswa memilih boarding school di luar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, ketersediaan ruangan belajar bagi siswa sesuai rasio, Peran serta guru Non PNS dalam pembagia tugas sesuai rombel yang tersedia.

Tabel 2.44
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	2.744	3.160	2.578	2.836	2.773
1.2	Jumlah Murid	39.677	38.610	38.316	38.284	37.293
1.3	Rasio	14	12	15	13	13
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	1.216	1.421	1.308	1.521	1.485
2.2	Jumlah Murid	15.735	15.854	15.301	15.253	15.249
2.3	Rasio	13	11	12	10	10

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2021

10. Penduduk yang Berusia di atas 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Penduduk yang Berusia di atas 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) adalah Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Manfaatnya untuk Melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Angka melek huruf di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah cukup baik dalam kurung waktu 5 tahun, karena secara persentase hampir mencapai angka 100 persen, jika dilihat dari tahun 2016 Penduduk yang Berusia di atas 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta

Aksara) persentasenya 96,37 persen sampai dengan tahun 2020 menjadi 99,50 persen. Jadi terdapat 0,50 persen lagi atau 127.379 penduduk/jiwa yang masih buta aksara. Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran di setiap jenjang pendidikan yang telah mendukung pembelajaran, pelaksanaan Paket A, B dan C dalam layanan pendidikan, tersedianya sekolah yang dapat dijangkau masyarakat, adanya PKBM sebagai pendidikan non formal sebagai bentuk layanan pendidikan, Peran serta Pamong, Penilik dan tutor sangat tinggi

Tabel 2.45
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia diatas 15 Tahun keatas yang bisa membaca dan menulis	222.756	257.999	357.864	251.473	253.490
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas	231.147	265.213	362.364	254.173	254.757
3	Angka Melek Huruf (%)	96,37	97,28	98,76	98,94	99,50

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2021

11. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV merupakan persentase perbandingan jumlah guru yang sudah memenuhi kualifikasi S1/D-IV sekolah dasar dengan jumlah guru keseluruhan pendidikan dasar. Dalam kurun waktu 2016 sampai 2020 terjadi perbaikan kompetensi guru pada seluruh jenjang pendidikan dasar. Di tahun 2020, persentase guru yang telah berkualifikasi S1/D-IV ke atas di jenjang pendidikan SD/MI mencapai 90,2 persen dan SMP/MTs telah mencapai 98,1 persen yang telah berkualifikasi S1 ke atas. Tingginya pemahaman guru baik PNS maupun non PNS untuk pemenuhan kualifikasi S1, Amanat undang undang Guru dan dosen untuk kualifikasi seorang guru adalah S1, Program Kemendikbud dalam peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk pemenuhan kualifikasi jenjang S1, Syarat dalam petunjuk teknis dana BOS untuk pembayaran guru honorer, Adanya Beasiswa PEMDA untuk biaya pendidikan mahasiswa,

Tabel 2.46
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020 (dalam persen)

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru berkualifikasi S1 Keatas SD/MI	2.368	2.658	2.289	2.538	2.501
1.2	Jumlah GuruSD/MI	2.744	3.160	2.578	2.836	2.773
1.3	Persentase Guru berkualifikasi S1 Keatas SD/MI (%)	86.3	84.1	88.8	89.5	90.2
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru berkualifikasi S1 Keatas SMP/MTs	1.103	1.364	1.265	1.484	1.457
2.2	Jumlah GuruSMP/MTs	1.216	1.421	1.308	1.521	1.485

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
2.3	Persentase Guru berkualifikasi S1 Keatas SMP/MTs (%)	90.7	96.0	96.7	97.6	98.1

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2021

2.3.1.2. Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata. Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kesehatan secara komprehensif meliputi tindakan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitative, sehingga sektor kesehatan juga harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya keempat jenis tindakan tersebut. Dalam bidang kesehatan, beberapa ukuran yang digunakan untuk melihat kualitas kesehatan yang ada, meliputi: angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan angka usia harapan hidup, angka balita gizi buruk, dan jumlah fasilitas kesehatan.

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, setiap tahun masih mengalami terjadinya kematian bayi dan angka kematian pertahun berfluktuatif, pada tahun 2016 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup sebesar 2,91, pada tahun 2018 naik menjadi 3,11. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 3,17 sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel. 2.47
Angka Kematian Bayi Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kelahiran Bayi Hidup	5.151	5.161	5.797	5.794	5.673
2.	Jumlah Kematian Bayi per Tahun	15	14	18	12	18
3.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	2,91	2,90	3,11	2,1	3,17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Masih adanya angka kematian bayi setiap tahun di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini memberikan gambaran tentang pentingnya pemerintah memperhatikan persoalan akses masyarakat ke fasilitas kesehatan, kesadaran dan pengetahuan ibu dan keluarga tentang pentingnya memeriksakan kehamilan dan kualitas serta kuantitas tenaga kesehatan guna meminimalisir kejadian tersebut.

2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi cukup berfluktuasi dalam rentang tahun 2016-2020. Angka kelangsung hidup bayi di tahun 2016 mencapai 997,09. Capaian ini mengalami kenaikan sedikit di tahun berikutnya (2017) menjadi 997,1 tetapi mengalami penurunan yang signifikan menjadi 996,9 di tahun 2018. Dari angka kelangsung hidup bayi ini memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah harus berupaya lebih keras untuk memperbaiki kualitas kesehatan ibu dan anak, terutama pada masa kehamilan dan pasca melahirkan sehingga angka kelangsungan hidup bayi di upayakan mencapai nilai maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Tabel. 2.48.
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	15	14	18	12	18
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran	997,09	997,1	996,9	997,9	996,73

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rentang tahun 2016-2020 cukup berfluktuasi. Di tahun 2016 hingga 2018 capaian indikator kematian balita sempat menurun, yaitu dari 1,55 balita di tahun 2016 menjadi 0,03 balita di tahun 2017 dan mengalami kenaikan menjadi 0,14 balita di tahun 2018. Setelahnya, di tahun 2019 angka kematian balita menurun menjadi 0,09 balita per 1000

kelahiran hidup. Tetapi di tahun 2020 angka kematian balita kembali mengalami kenaikan di angka 0,19 kematian balita per 1000 kelahiran hidup.

Tabel. 2.49.
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 Tahun)	8	1	4	3	5
2	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup (/1000 KLH)	1,55	0,03	0,14	0,09	0,19

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

4. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Neonatal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Dari tahun 2016 hingga tahun 2017 terjadi kenaikan signifikan dari 8,74 hingga 11,82. Kemudian pada tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan dari 9,15 menjadi 7,23. Hal ini menandakan adanya keseriusan dari pemerintah melalui Dinas Kesehatan untuk menurunkan angka kematian neonatal yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel. 2.50
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Neonatal (berumur kurang 1 bulan)	45	61	48	53	41
2	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	8,74	11,82	8,28	9,15	7,23

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021

Untuk jumlah kematian neonatal di kecamatan, Pangkajene merupakan kecamatan tertinggi yang memiliki angka kematian neonatal dan pada tahun 2020 Kecamatan Labakkang memiliki angka tertinggi.

Tabel 2.51
Jumlah Kematian Neonatal (berumur kurang 1 bulan) Tahun 2016 s/d 2020
Per Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pangkajene	20	16	8	4	5
2	Minasatene	3	5	4	8	2
3	Bungoro	4	11	6	4	7
4	Labakkang	2	10	7	11	10
5	Ma'rang	2	2	7	6	5
6	Segeri	3	3	5	3	1
7	Mandalle	4	3	1	5	2

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
8	Balocci	3	0	3	2	2
9	Tondong Tallasa	1	0	0	1	1
10	Lk. Tupabbiring	1	1	5	4	1
11	Lk. Tupabbiring Utara	0	4	1	3	4
12	Lk. Kalmas	0	2	0	1	1
13	Lk. Tangaya	2	4	1	1	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

5. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Kesehatan adalah pelayanan dasar yang harus dipastikan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, termasuk seorang ibu hamil harus dipastikan kesehatannya. Banyak kematian perempuan terjadi pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mencatat masih terdapat angka kematian ibu hamil dan melahirkan yang angkanya justru meningkat di tahun tiap tahunnya dari 2016 sampai dengan 2019, dimana pada tahun 2019 mencapai angka tertinggi sebesar 2,25 kemudian menurun di tahun 2020 dengan angka sebesar 1,05 sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Angka kematian ibu yang cenderung meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020 bisa juga disebabkan karena pencatatan dan pelaporan yang sudah cukup baik dari fasilitas kesehatan yang melayani ibu hamil. Akan tetapi ini juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan serta edukasi kepada ibu-ibu hamil untuk lebih waspada jika ada keluhan yang dialami selama kehamilan.

Tabel. 2.52.
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	1,36	2,13	2,24	2,25	1,05

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

6. Rasio Posyandu Per 1000 Balita

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Salah satu bentuk peningkatan kesadaran hidup sehat melalui pembangunan sarana posyandu sebagai wadah dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya kepada balita. Rasio posyandu pada lingkup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat digambarkan pada tabel berikut;

Tabel 2.53.
Rasio Posyandu per 1000 Balita Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah posyandu	375	384	372	359	383
2.	Jumlah balita	35.271	33.635	29.064	31.595	26.095
3.	Rasio Posyandu per 1000 Balita	10,63	11,42	12,80	11,36	14,68

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Jumlah Posyandu dari tahun 2016 sampai tahun 2019 memiliki kecenderungan penurunan tiap tahunnya tetapi kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 yang mencapai 383 Posyandu. Sedangkan Rasio pos pelayanan terpadu per 1000 Balita pada tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung mengalami kenaikan yaitu sebesar 10,63 pada tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 14,68.

7. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 1000 Penduduk

Rasio ketersediaan puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk, cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor diantaranya ketersediaan anggaran dan integrasi program yang belum optimal. Selain itu, ketersediaan infrastruktur ini merupakan kewenangan penuh masing-masing kabupaten/kota. Angka rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk, dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.54.
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per 1000 Penduduk Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Puskesmas	23	23	23	23	23
2.	Jumlah Poliklinik	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Pustu	60	60	60	60	61
4.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 1000 penduduk	0,25	0,27	0,25	0,24	0,24

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Di tahun 2020 ada penambahan 1 pustu dan diharapkan tahun-tahun selanjutnya kebutuhan infrastruktur semakin tercukupi karena pertumbuhan penduduk pun semakin meningkat tiap tahunnya, agar rasio jumlah fasilitas kesehatan terhadap penduduk juga bergerak kearah yang positif, sehingga pelayanan bisa semakin optimal.

8. Rasio Rumah Sakit per 1000 Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan

penyakit yang diderita oleh pasien. Untuk menghitung rasio rumah sakit per 1000 penduduk disusun dalam tabel sebagai berikut.

Tabel. 2.55.
Rasio Rumah Sakit per 1000 Penduduk Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	1	1	1	2	2
2.	Jumlah Penduduk	325.239	301,464	320.293	350.208	351.877
3.	Rasio Rumah Sakit per 1000 Penduduk	0,003074	0,003317	0,003122	0,005711	0,005683

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Pada tahun 2016 hingga 2018, jumlah rumah sakit rujukan di kabupaten hanya satu sehingga rasio Rumah Sakit terhadap penduduk adalah 0,003 per 1.000 penduduk dan pada tahun 2019 jumlah Rumah Sakit bertambah menjadi 2 yang juga disertai pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat tetapi sudah mampu meningkatkan Rasio menjadi 0,005 per 1.000 penduduk.

9. Rasio Dokter/Tenaga Medis Per 1000 Penduduk

Ketersediaan dokter per satuan penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kesehatan masyarakat penting sebagai modal masyarakat menjalani aktifitas kehidupan. Dalam kurun waktu 2016 - 2020 rasio dokter umum di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami peningkatan yang signifikan meskipun nilainya sempat menurun di tahun 2018 akan tetapi meningkat pesat di tahun 2020.

Karena dari tahun 2016 hingga tahun 2018 tidak diadakannya penerimaan CPNS yang khususnya juga tenaga dokter, sehingga jumlahnya tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Di tahun 2019 hingga 2020 yang patut disyukuri karena Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mendapat cukup kuota tenaga dokter pada seleksi penerimaan CPNS yang diharapkan juga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dari segi kuantitas dan kualitasnya. Yang bermuara kepada meningkatnya kesehatan masyarakat dan lebih meratanya pelayanan pada daerah terpencil seperti kepulauan dan pegunungan.

Tabel 2.56
Rasio Dokter/Tenaga Medis Per 1000 Penduduk Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter/Tenaga Medis	43	46	35	70	137
2	Jumlah Penduduk	325.239	301,464	320.293	350.208	351.877
3	Rasio Dokter/Tenaga Medis Per 1000 Penduduk	0,13	0,15	0,11	0,19	0,39

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

10. Rasio Paramedis Per 1000 Penduduk

Rasio paramedis per 1000 penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Paramedis yang tertuang pada Tabel mengacu kepada jumlah perawat, bidan, tenaga farmasi dan tenaga gizi yang tersedia. Pada tahun 2016 rasio paramedis adalah 2,02 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan dengan angka 2,56. Rasio paramedis per 1000 penduduk sebagaimana table berikut:

Tabel 2.57
Rasio Tenaga Medis Per 1000 Penduduk Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tenaga Medis	661	N/a	574	508	886
2	Rasi paramedis Per 1000 Penduduk	2,02	N/a	1,76	1,51	2,56

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

11. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan atau janin dalam kandungan, baik langsung maupun tidak langsung termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu atau janin yang tidak disebabkan oleh trauma/kecelakaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah cakupan penanganan komplikasi kebidanan (Cakupan PK). Indikator ini mengukur kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara professional kepada Ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi. Dari tabel 2.108. cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami angka yang fluktuatif dari tahun 2016 hingga 2020. Dimana angka cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan nilai cakupan sebesar 86,00 dan kembali menurun di angka 61,57 pada tahun 2020.

Terjadi penurunan cakupan di Tahun 2020 dikarenakan wabah Covid-19, yang membuat sebagian ibu hamil takut untuk datang ke fasilitas kesehatan memeriksakan kehamilannya. Akses tenaga kesehatan untuk turun ke masyarakat untuk melakukan pelacakan juga terbatas dikarenakan aturan untuk meminimalisir kontak dengan pasien, dan juga pelayanan lebih terkonsentrasi untuk pelayanan wabah Covid-19.

Tabel. 2.58
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	63,25	64,95	63,90	86,00	61,57

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

12. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2016 sebesar 89,32 %, tahun 2017 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat pesat menjadi 96,60 % di tahun 2017. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kembali menurun di tahun 2018 menjadi 85,80 %, kemudian tahun 2019 persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat ke angka 91,05 % dan pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menurun drastis menjadi 61,57 %.

Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebenarnya cukup mengalami peningkatan karena di tingkat kabupaten juga telah diberlakukan uji kompetensi yang wajib diikuti oleh tenaga bidan yang melayani pasien secara langsung. Tetapi karena wabah Covid-19 yang turut memberi andil sehingga ada sebagian ibu hamil yang tidak datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel. 2.59

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan (%)	89,32	96,6	85,8	91,05	61,57

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

13. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Penyelenggaraan imunisasi di Indonesia diukur dengan cakupan UCI (*Universal Child Immunization*) yaitu suatu kondisi dimana minimal 80 % bayi yang berada dalam suatu desa telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel. 2.60

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	95	95	96	96	81,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Pada tahun 2016 hingga 2019 cakupan desa mengalami kestabilan disekitar angka 96 dan 95, akan tetapi di tahun 2020 menurun di angka 81,6. Hal ini dikarenakan kegiatan Posyandu dimana sebagian besar cakupan imunisasi didapatkan, sempat mengalami kendala atau tidak berjalan dikarenakan wabah Covid-19.

14. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Persoalan gizi buruk berhubungan erat dengan masalah ketersediaan pangan sebuah keluarga, sejauh mana kebutuhan pangan keluarga tercukupi dan memenuhi standar gizi yang cukup. Pemerintah melalui kebijakan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's) pada goals kedua menyebutkan komitmen Pemerintah untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, persoalan gizi buruk menjadi salah satu tantangan pembangunan yang harus diselesaikan, termasuk oleh daerah.

Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020, konsisten di angka 100%. Hal ini menandakan adanya kemajuan yang sangat baik mengenai perhatian pemerintah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam menangani persoalan gizi buruk.

Tabel. 2.61.
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Balita Gizi Buruk	6	16	8	4	1
2.	Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	6	16	8	4	1
3.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Adapun cakupan balita gizi buruk per kecamatan disajikan pada table berikut:

Tabel. 2.62.
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun 2016 s.d 2020
Per Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pangkajene	1	3	3	1	0
2	Minasatene	0	0	1	1	1
3	Bungoro	0	5	0	0	0
4	Labakkang	0	2	0	0	0
5	Ma'rang	2	1	0	0	0
6	Segeri	0	0	1	0	0
7	Mandalle	0	3	1	0	0
8	Balocci	1	0	0	0	0
9	Tondong Tallasa	0	0	0	0	0
10	LK. Tupabbiring	0	0	0	0	0
11	LK. Tupabbiring Utara	1	1	0	0	0
12	LK. Kalmas	1	0	0	1	0
13	LK. Tangaya	0	1	2	1	0
	Jumlah	6	16	8	4	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

15. Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Dibawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar Yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Kapita/Hari).

Tingkat konsumsi minimum adalah tingkat konsumsi energi yang besarnya 70% dari angka yang dianjurkan (70% dari Angka Kecukupan Gizi = 2100 kkal). Standar kecukupan disesuaikan dengan distribusi populasi penduduk berdasarkan usia. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Proporsi penduduk dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum dalam lima tahun (2016 – 2020) berada di angka nol. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah terbebas dari asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum atau dengan kata lain semua penduduk memiliki asupan gizi yang telah terpenuhi.

16. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Indonesia dinyatakan telah berhasil menekan terjangkitnya jumlah penyakit cacar dan polio. Pada 2020 mendatang, Indonesia diharapkan untuk terbebas dari penyakit campak. Di Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama tahun 2016 sampai dengan 2017 terjadi peningkatan dan penurunan persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi. Pada tahun 2019 menunjukkan nilai 95 persen, akan tetapi pada tahun 2020 telah terjadi penurunan di angka 86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa imunisasi campak bagi anak usia 1 tahun di Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum maksimal secara keseluruhan, dan diharapkan pada tahun-tahun berikutnya akan tercapai di atas angka 86 persen.

Cakupan yang menurun cukup signifikan ini juga disebabkan karena hampir di sebagian besar wilayah kerja Posyandu mengalami kendala karena adanya wabah Covid-19. Dan para orang tua juga masih takut membawa anaknya ke Puskesmas, dimana para nakes masih memberi pelayanan imunisasi.

Tabel. 2.63.
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak (%)	97	89	91	95	86

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021

Tabel. 2.64.
Jumlah Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Tahun 2016 s.d 2020
Per Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pangkajene	674	772	763	749	694
2	Minasatene	614	583	617	587	546
3	Bungoro	632	610	615	766	696

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Labakkang	819	684	718	780	820
5	Ma'rang	601	555	520	578	468
6	Segeri	369	371	374	329	309
7	Mandalle	242	235	270	254	254
8	Balocci	302	242	270	267	259
9	Tondong Tallasa	181	121	124	126	148
10	LK. Tupabbiring	341	398	283	112	266
11	LK. Tupabbiring Utara	214	184	215	301	236
12	LK. Kalmas	248	314	299	272	204
13	LK. Tangaya	329	254	329	295	318
	Jumlah	5566	5323	5397	5416	5218

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

17. Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

Kasus AFP adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya flacid (layuh) terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa. Berdasarkan target nasional yaitu penemuan kasus minimal 2 kasus per 100.000 penduduk yang berusia dibawah 15 tahun, maka dapat dilihat pada table 2.116 pada tahun 2016 sampai tahun 2020 yang mencapai target hanya pada tahun 2018 dan 2019. Sedangkan pada tahun 2020 hanya dapat ditemukan 1 kasus yaitu pada Kecamatan Labakkang wilayah Puskesmas Taraweang. Pada kenyataannya, penemuan kasus AFP Non Polio cukup sulit karena rentang waktu dari perkembangan kelumpuhan yang berlangsung cepat (rapid progressive) antara 1 - 14 hari sejak terjadinya gejala awal (rasa nyeri, kesemutan, rasa tebal/kebas) sampai kelumpuhan maksimal. Dengan ditemukannya jumlah 1 kasus pada tahun 2020, artinya tidak memenuhi target, hal ini disebabkan karena tenaga surveilans lebih fokus ke tracking kontak kasus Covid-19.

Tabel. 2.65.
Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Non Polio AFP Rate (per 100.000 Penduduk)	1	0	3	2	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

18. Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani

Pneumonia merupakan infeksi saluran pernafasan bawah akut umumnya menyebabkan hampir semua kematian ISPA pada balita. Di negara berkembang pneumonia merupakan penyakit yang terabaikan (the neglected disease) atau penyakit yang terlupakan (the forgotten disease) karena begitu banyak anak yang meninggal karena pneumonia, namun sangat sedikit perhatian yang diberikan kepada masalah pneumonia. Tetapi hal ini tidak berlaku di

Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan karena cakupan balita pneumonia yang ditangani telah mencapai 100 % selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

19. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Trend cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC selama 5 tahun (2016- 2020) menunjukkan angka 100 persen. Semakin meningkatnya penemuan kasus TBC BTA disertai dengan adanya perluasan jejaring DPM (Dokter Praktek Mandiri dan penguatan surveilans di rumah sakit dan klinik dengan melakukan penyisiran kasus atau mopping up). Selengkapnya pada tabel berikut.

Beberapa hal yang masih menjadi masalah yaitu data penemuan dan pengobatan pada RS dan fasilitas kesehatan swasta masih ada yang belum masuk dalam sistem pelaporan program TBC. Selain itu beberapa fasilitas kesehatan swasta tidak memberikan penanganan yang tepat sesuai standar ISTC, serta Petugas TB di faskes tidak melakukan surveilans secara aktif dimasyarakat karena kondisi geografis yang masuk dalam remote area. Oleh karena itu masih perlu ditingkatkan peran kader kesehatan dalam melakukan penyisiran kasus di masyarakat.

20. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Prevalensi Kasus TBC untuk semua tipe menunjukkan peningkatan dari tahun 2016- 2017. Dan tahun 2018 – 2019. Peningkatan Prevalensi Kasus TBC semakin meningkat dengan adanya rekomendasi Kementerian Kesehatan untuk melakukan penyisiran kasus di Rumah Sakit baik Pemerintah maupun Swasta karena masih banyaknya kasus TBC yang ditemukan namun tidak dilaporkan.

Tabel. 2.66
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya kasus penderita TBC	598	814	696	812	596
2	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	184	270	217	232	169

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

21. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

Angka kematian pada Penderita TBC pada tahun 2016-2020 memiliki kenaikan yang signifikan, pada tahun 2019 ke 2020 meningkat dari 32 ke 62 per 100.000 penduduk. Selengkapnya pada tabel berikut. Hal ini disebabkan karena pelacakan dan penemuan kasus dini pada masyarakat terkendala karena pandemi. Beberapa pasien ditemukan dan diobati terlambat karena takut memeriksakan diri ke Puskesmas.

Tabel. 2.67
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)
Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Paise TB yang meninggal	14	21	19	32	62
2	Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	4	7	6	9	17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

22. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Proporsi penemuan kasus TBC mengalami fluktuatif selama lima tahun yaitu tahun 2016 sebanyak 41 %, 2017 sebanyak 57 %, 2018 sebanyak 51 %, 2019 sebanyak 73 % dan 2020 sebanyak 54 %. Semakin meningkatnya penemuan kasus TBC disertai dengan adanya perluasan jejaring DPM (Dokter Praktek Mandiri) dan penguatan surveilans di rumah sakit dan klinik dengan melakukan penyisiran kasus atau mopping up. Selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel. 2.68
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS
Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	598	814	696	812	597
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	1450	1437	1353	1110	1111
3	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS (%)	41	57	51	73	54

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Adapun beberapa hal yang menjadi masalah belum mencapai target 70 % adalah:

- Belum adanya kewajiban pelaporan dari RS dan Fasilitas Kesehatan Swasta lainnya dalam penemuan kasus TBC (*mandatory notification*).
- Masih terdapat beberapa rumah sakit yang tidak memiliki SIMRS yang mengakomodir kebutuhan data TBC.
- Jejaring internal dan eksternal antara fasilitas kesehatan belum berjalan dengan baik di beberapa Rumah Sakit.
- Upaya skrining terduga TBC belum dilaksanakan pada kelompok populasi berisiko tinggi seperti daerah kumuh dan miskin, Lapas, dan lain-lain.
- Masih terdapat petugas TB yang belum terlatih karena adanya *turn over* pegawai terlatih yang tidak dibarengi dengan pergantian pegawai yang juga terlatih.

23. Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi penemuan kasus TBC mulai menurun selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018 sebanyak 87 persen, 2019 sebanyak 88 persen dan 2020 sebanyak 88 persen. Semakin menurunnya penemuan kasus TBC disertai dengan adanya perluasan jejaring DPM (Dokter Praktek Mandiri) dan penguatan surveilans di rumah sakit dan klinik dengan melakukan penyisiran kasus atau mopping up. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel. 2.69
Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS
Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun	232	258	499	602	707
2	Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama	268	282	574	682	805
3	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS (%)	87	91	87	88	88

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

24. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita penyakit DBD

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Penyakit ini dikenal dengan gejala yang sangat khas, yaitu suhu tubuh tinggi atau panas sekaligus nyeri sendi, sakit kepala, otot, tulang, dan sakit area belakang mata. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Telah dilakukan secara optimal hal ini diketahui dari data cakupan dalam lima tahun berturut turut (2016 – 2020) telah konsisten di angka 100 persen.

25. Penderita Diare Yang Ditangani

adapun penderita diare yang ditangani oleh petugas di fasilitas kesehatan di kabupaten kabupaten pangkajene dan kepulauan pada tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan pola yang cenderung menurun. pada tahun 2016 sudah mencapai 100% akan tetapi di tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan hingga tahun 2020 yang hanya mencapai 49%. hal ini disebabkan karena kurangnya kunjungan ke puskesmas, masyarakat masih takut berkunjung ke fasilitas kesehatan, dan menganggap apabila diare yang dialami ringan, cukup diobati dengan minum obat yang dijual bebas.

Tabel. 2.70
Penderita Diare Yang Ditangani
Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penderita Diare yang ditangani (%)	100	100	59	74	49

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

26. Angka Kejadian Malaria

Pengendalian penyakit malaria telah menunjukkan pencapaian program yang cukup baik. Hal ini terlihat dari Angka Kejadian Malaria yang diukur dengan Annual Parasite Incidence (API) yang menjadi indikator keberhasilan upaya penanggulangan malaria cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa segala upaya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan memiliki nilai signifikan dalam pengendalian malaria.

Pencapaian kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya peningkatan sumber daya manusia baik dalam diagnosis dan tata laksana, serta manajemen program, dan peningkatan kapasitas tenaga laboran dalam pemeriksaan sediaan darah malaria. Selain itu dilakukan juga surveilans migrasi dan penyelidikan epidemiologi kasus positif malaria, penemuan suspek malaria baik secara aktif maupun pasif, pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi (PE) 1-2-5 terhadap semua kasus positif malaria, serta pemberian pengobatan sesuai standar kepada penderita malaria.

Tabel. 2.71
Angka Kejadian Malaria Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk yang menderita malaria	55	70	29	24	11
2	Angka Kejadian Malaria (per 100.000 Penduduk)	16,29	23,55	9,05	6,85	3,12

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan berbagai faktor yang menghambat diantaranya masih belum maksimalnya keterlibatan lintas sektor dan lintas program dalam hal penemuan kasus, minimnya anggaran pencegahan dan pengendalian malaria di tingkat Kab/Kota, serta tidak adanya regulasi daerah yang dapat mendukung pencegahan dan pengendalian malaria di Kab/Kota.

27. Tingkat Kematian Akibat Malaria

Malaria adalah penyakit yang menyebar akibat gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi parasit. Infeksi malaria bisa terjadi hanya dengan satu gigitan nyamuk. Jika tidak ditangani dengan benar, penyakit ini bisa menyebabkan kematian. Malaria jarang sekali menular secara langsung dari satu orang ke orang lainnya. Penyakit ini bisa menular jika terjadi kontak langsung dengan darah penderita. Janin di dalam kandungan juga bisa terinfeksi malaria karena tertular dari darah sang ibu. Angka kematian akibat malaria di Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan tidak ada kematian.

28. Proporsi Anak Balita Yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida

Penggunaan kelambu berinsektisida menjadi salah satu cara efektif mencegah terjadinya penyakit malaria, Menurut WHO (2007) penggunaan kelambu berinsektisida di beberapa Negara di Benua Afrika telah berhasil menurunkan angka kesakitan malaria rata-rata 50%. Adapun di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sendiri. Sejak tahun 2016 hingga 2020 proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida adalah nol proporsi. Hal ini dikarenakan program kelambu berinsektisida sudah tidak berjalan dari beberapa tahun yang lalu.

29. Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat

Malaria adalah penyakit yang menakutkan sejak dahulu kala. Meskipun di negara berkembang sudah hampir dimusnahkan, tetapi malaria terus mengancam kehidupan manusia di belahan dunia lainnya. Anak-anak yang terkena dampak terburuk, khususnya anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Di bagian dunia lainnya malaria merupakan penyakit endemik, dapat menyebabkan sebanyak 10 % dari semua kematian pada anak. Penanganan Malaria pada anak balita di Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sepanjang tahun 2016-2020 telah maksimal dengan capaian 0.

30. Prevalensi HIV/AIDS (%) Dari Total Populasi

Prevalensi HIV masih dibawah target indikator 0,5 %, sesuai dengan tingkat epidemiologi, di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2016 tingkat prevalensi HIV/AIDS (%) dari total Populasi adalah sebesar 0,001 % dan pada tahun 2017 sebesar 0,01 %. Adapun pada tahun 2020 sebesar 0,01 %.

Pada tabel di atas menunjukkan prevalensi HIV AIDS di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak mengalami kenaikan dengan angka yang cenderung stabil. Tetapi hal ini tetap menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan untuk terus memberi edukasi tentang pentingnya menghindari faktor-faktor resiko penyakit HIV/AIDS utamanya pada kelompok masyarakat yang rentan terpapar seperti ibu hamil, penderita TBC, penaja seks, waria dan pengguna NAPZA.

Tabel. 2.72.
Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Prevalensi HIV/AIDS (%) dari total Populasi	0,001	0,001	0,001	0,0014	0,0007

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

31. Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Bersiko Tinggi Terakhir

Kondom adalah salah satu alat kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Penggunaan Kondom pada hubungan seks bersiko tinggi pada tahun 2016 hingga 2020 secara konsisten memiliki angka 100%.

32. Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Persentase Pengetahuan Komprehensif pada Penduduk Usia 15-24 tahun tentang HIV dan AIDS telah berada di angka 100, hal tersebut dapat dicapai karena telah dilakukan sosialisasi HIV di Sekolah oleh Puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Namun demikian, Survey tidak dilakukan setiap tahun karena belum semua kab/kota memiliki pendanaan APBD untuk melakukan survey, yang sumber pendanaannya masih bergantung pada APBD Kabupaten. Selengkapnya pada tabel berikut.

33. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah masyarakat miskin kali 100. Cakupan ini tergantung pada kondisi kesehatan masyarakat miskin sehingga cakupannya tidak 100 %. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pada tahun 2016 telah tertangani sebanyak 5,18 % masyarakat miskin yang mendapat rujukan. Angka ini meningkat di tahun 2019 dengan nilai persentase 9,41 %.

Tabel. 2.73.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	5,18	4,58	4,41	9,41	9,29

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021

34. Cakupan Kunjungan Bayi

Berdasarkan data capaian dari tahun 2016 sampai 2020, cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan estimasi sasaran yang berbeda antara pusat dan daerah sehingga mempengaruhi cakupan kunjungan bayi. Selain itu, faktor lainnya yang mempengaruhi adalah belum optimalnya tingkat kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan bayi dan Balita, kompetensi petugas dalam pelayanan kesehatan bayi dan balita masih rendah, serta dokumentasi hasil pelayanan kesehatan bayi dan balita yang belum optimal. Untuk itu diperlukan kesepakatan tentang estimasi sasaran yang sama dan terstandar. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel. 2.74
Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	96,93	96,62	101,2	91,6	99,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Dalam mengatasi kondisi di atas, beberapa upaya telah dilakukan diantaranya peningkatan kompetensi petugas dalam pelayanan kesehatan bayi dan balita, khususnya perawatan bayi sehat/SDIDTK untuk mendeteksi kelainan pertumbuhan dan perkembangan sejak dini. Selain itu juga dilakukan peningkatan pengetahuan ibu tentang perawatan/pola asuh anak dengan mengoptimalkan pemanfaatan Buku KIA melalui Kelas Ibu (Kelas Ibu Balita), mengoptimalkan dokumentasi report and recording pelayanan kesehatan bayi dan balita melalui optimalisasi kohort bayi dan balita sebagai satu-satunya sumber data pelayanan kesehatan bayi dan balita, serta peningkatan kepedulian petugas terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan bayi dan balita.

35. Cakupan Puskesmas

Cakupan Puskesmas dari tahun ke tahun meningkat hal ini disebabkan jumlah ketersediaan puskesmas setiap tahunnya bertambah. Di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat Puskesmas bahkan ada kecamatan memiliki lebih dari satu Puskesmas. Berdasarkan Permenkes RI No. 75 Tahun 2014, puskesmas harus didirikan di setiap kecamatan, dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas. Selain itu juga harus didukung pula oleh adanya aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel. 2.75
Cakupan Puskesmas Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan Puskesmas (%)	176,9	176,9	176,9	176,9	176,9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Cakupan puskesmas dari tahun 2016 hingga 2020 tidak mengalami perubahan yang berarti dikarenakan tidak adanya penambahan jumlah puskesmas. Angka yang stabil yaitu pada angka 176,9%. Diharapkan dengan sarana dan prasarana yang ada, pelayanan yang optimal tetap dapat diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat.

36. Cakupan Pembantu Puskesmas

Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan jaringan pelayanan Puskesmas. Puskesmas Pembantu didirikan dengan perbandingan 1 (satu) Puskesmas Pembantu untuk melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa/kelurahan. Adanya Pustu di Desa/ Kelurahan meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Cakupan puskesmas pembantu dari tahun 2016 – 2019 tidak mengalami peningkatan karena tidak adanya penambahan jumlah Pustu dan stabil di angka 58,2. Cakupan Pustu baru mengalami peningkatan di Tahun 2020 walaupun tidak terlalu signifikan yaitu pada angka 59,2 %.

Tabel. 2.76
Cakupan Pembantu Puskesmas Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan Pembantu Puskesmas (%)	58,2	58,2	58,2	58,2	59,2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

37. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Berdasarkan data di bawah, cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) berfluktuasi dari tahun ke tahun dan masih ada disparitas antar Kabupaten/kota yang variasinya cukup besar selain adanya kesenjangan, ditemukan juga ibu hamil yang tidak menerima pelayanan dimana seharusnya diberikan saat kontak dengan tenaga kesehatan (missed opportunity). Selain faktor tersebut adanya pernikahan dini sehingga ibu hamil malu kontak dengan petugas kesehatan dan pada akhirnya terlambat memperoleh pelayanan antenatal lengkap sesuai standar yang seharusnya diperoleh oleh ibu hamil, kondisi geografis yang sulit akses ke fasilitas kesehatan sehingga ibu hamil tidak rutin datang memeriksakan kehamilannya dimana setiap ibu hamil seharusnya mendapatkan pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai standar minimal 4 kali selama kehamilannya dengan distribusi waktu : 1 kali pada trimester ke-1 (0-12 minggu), 1 kali pada trimester ke-2 (>12-24 minggu), dan 2 kali pada trimester ke-3 (>24 minggu sampai dengan kelahiran). Jika ibu hamil tidak memperoleh pelayanan seperti tersebut di atas pada masa kehamilan, maka tidak dapat dilaporkan sebagai cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4), kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan jika ada keluhan, penyakit dan gangguan kehamilan. Perkembangannya mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel. 2.77
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)	89,68	91,77	86,58	91,30	89,09

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Secara umum penyebab masih adanya ibu hamil yang tidak memperoleh pelayanan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) diantaranya belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan, kondisi tempat tinggal ibu hamil dan keluarga yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan (wilayah kepulauan dan pegunungan, serta adanya ibu hamil yang berpindah tempat sehingga tidak terpantau sampai masa persalinannya.

Meskipun demikian, beberapa faktor yang mendukung peningkatan cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diantaranya adanya regulasi terkait pelayanan Standar Minimal untuk Pelayanan Antenatal Care yang sesuai SOP, kunjungan oleh tenaga kesehatan kepada ibu hamil, adanya keterlibatan dan perhatian tokoh masyarakat dan kader agar setiap ibu hamil memeriksakan diri kepada tenaga kesehatan secara teratur, memperkuat Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Kader dan Masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan, adanya pelaksanaan kelas ibu hamil di Desa dalam upaya untuk peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga, serta berjalannya Pemantauan Wilayah Setempat Program Kesehatan Ibu dan Anak.

38. Cakupan Pelayanan Nifas

Pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat, diharapkan dapat mengatasisebagian besar masalah kesehatan masyarakat. Salah satu pelayanan kesehatan tersebut adalah pelayanan kesehatan ibu nifas (Kemenkes RI, 2009). Perawatan nifas adalah perawatan terhadap ibu yang telah selesai melahirkan, salah satunya adalah perawatan payudara (Siregar, 2009). Perawatan nifas mencakup pemeriksaan tanda vital, keadaan umum untuk melihat tanda anemia, pemeriksaan abdomen dan luka, pemeriksaan genitalia, melihat komplikasi persalinan, dan perawatan payudara.

Cakupan pelayanan bagi ibu nifas dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung meningkat. Tahun 2016 pelayanan ibu nifas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mencapai 88,14 %. Capaian ini kemudian mengalami perluasan cakupan di tahun 2017 menjadi 90,02 %. Namun di tahun 2018 mengalami penurunan tajam ke angka 85,8 %. Peningkatan cakupan pelayanan nifas kemudian meningkat kembali di tahun 2019 di angka 92,9 % dan tahun 2020 kembali mengalami penurunan di angka 89,91 %.

Terjadi penurunan cakupan pelayanan ibu nifas pada tahun 2020 ini, karena pandemi Covid-19. Ibu yang melahirkan ada sebagian yang tidak datang berkunjung kembali ke fasilitas kesehatan karena pandemi. Kunjungan rumah ibu nifas juga mengalami penurunan karena petugas meminimalisir kontak dengan masyarakat.

Tabel. 2.78.
Cakupan Pelayanan Nifas Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan Pelayanan Nifas (%)	88,14	90,02	85,8	92,9	89,91

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

39. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Berdasarkan data di bawah, terlihat bahwa capaian pelayanan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Bahkan cakupan tertinggi ternyata terjadi di tahun 2016 kemudian menurun di tahun-tahun selanjutnya. Kondisi ini disebabkan oleh salah satunya faktor medik secara langsung yaitu distribusi SDM Kesehatan yang Kompeten untuk penanganan Komplikasi neonatus belum merata, serta menyangkut sarana dan prasarana yang belum adekuat dalam menangani bayi baru lahir bermasalah. Selain itu masalah kesehatan bayi baru lahir tidak terlepas dari kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil, dimana salah satu aspek yang mempengaruhinya adalah tingkat pengetahuan Ibu dan keluarga untuk penanganan bayi baru yang masih kurang. Cakupan neonatalis dengan komplikasi yang ditangani mengalami fluktuatif yang bervariasi tiap tahunnya, Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel. 2.79.
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	60,18	40,66	53,4	55,4	49,82

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Dalam meningkatkan Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang ditangani di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebenarnya telah dilakukan berbagai upaya diantaranya pemenuhan SDM Kesehatan dan Distribusi yang merata untuk penanganan kasus ke gawat darurat neonatal yang kompeten, pemenuhan sarana dan prasarana untuk pertolongan kasus ke gawat darurat Neonatal di fasilitas kesehatan baik pada Fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat rujukan, serta peningkatan pemanfaatan

Buku KIA dan optimalisasi pelaksanaan kelas ibu hamil untuk peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga terkait perawatan bayi baru lahir.

40. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Berdasarkan data capaian pelayanan anak balita dari tahun 2016 sampai 2020, terlihat bahwa peningkatannya tidak signifikan bahkan cenderung turun. Hal ini disebabkan salah satunya karena kegiatan posyandu yang sifatnya monoton sehingga mengurangi minat ibu untuk datang membawa balitanya berkunjung ke posyandu. Selain itu keterlibatan lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan pelayanan di posyandu yang masih kurang maksimal, belum optimalnya tingkat kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan bayi dan Balita, kompetensi petugas dalam pelayanan kesehatan bayi dan balita masih rendah, dan dokumentasi hasil pelayanan kesehatan bayi dan Balita belum optimal. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel. 2.80.
Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan Pelayanan anak balita (%)	70,97	71,09	74,0	75,2	69,51

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2021

Meskipun demikian, pada dasarnya telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan tersebut melalui peningkatan kompetensi petugas dalam pelayanan kesehatan bayi dan balita, khususnya perawatan bayi sehat/SDIDTK untuk mendeteksi kelainan pertumbuhan dan perkembangan sejak dini. Upaya lainnya adalah peningkatan pengetahuan ibu tentang perawatan/pola asuh anak dengan mengoptimalkan pemanfaatan Buku KIA melalui Kelas Ibu (Kelas Ibu Balita), mengoptimalkan dokumentasi repport and reporting pelayanan kesehatan bayi dan balita melalui optimalisasi kohort bayi dan balita sebagai satu-satunya sumber data pelayanan kesehatan bayi dan balita, serta peningkatan kepedulian petugas terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan bayi dan balita.

41. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin

Data pemberian makanan Pendamping ASI untuk khusus untuk keluarga miskin, tidak tersedia disebabkan dalam juknis MP-ASI yg dikeluarkan oleh kemenkes, Prioritas pemberian MP-ASI adalah diperuntukkan bagi baduta kategori kurus (BB/TB) <-2 SD sehingga tanpa memandang status kemiskinan semua balita kategori kurus mendapatkan MP-ASI. Begitu pula untuk keluarga miskin bila balitanya memiliki status gizi baik maka tidak diberikan MP-ASI. Selengkapnya pada tabel berikut.

42. Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat

Pada tahun 2019 mencapai angka 78,6% dan tahun 2020 menurun di angka 76,5%. Karena masa pandemi ini, untuk meminimalisir kontak guna mencegah penularan sehingga sekolah ditutup, siswa tetap belajar walaupun secara daring (dalam jaringan). Hal ini juga sangat berpengaruh dengan program penjangkaran yang rutin dilaksanakan oleh Puskesmas ke sekolah-sekolah. Capaian pada tahun 2020 yang sangat menurun disebabkan oleh hal ini. Program penjangkaran seperti imunisasi, pengukuran status gizi, pemeriksaan kesehatan dan gigi pada anak sekolah juga mengalami penurunan cakupan yang cukup signifikan. Pengumpulan siswa juga sudah diusahakan di titik tertentu, tetapi masih terkendala sebagian orang tua siswa yang tidak mengizinkan anaknya untuk di imunisasi.

Tabel. 2.81.

Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	90,58	84,62	39,8	78,6	76,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

43. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Pemerintah Pusat melalui Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin sejak tahun 2008 yang merupakan peralihan program Asuransi Miskin (ASKESKIN) dan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui Program Jaminan Kesehatan Gratis yang keduanya sekarang telah berintegrasi menjadi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berupaya untuk menghadapi permasalahan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan penjaminan/pembebasan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang berlaku. Selain itu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat miskin didukung dengan penganggaran kegiatan-kegiatan operasional untuk meningkatkan penyediaan serta efektivitas berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat non personal seperti penyuluhan kesehatan, regulasi pelayanan kesehatan dan penyediaan obat, keamanan dan kesehatan makanan, pengawasan terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan pemukiman dan realokasi berbagai sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan daerah miskin dan masyarakat tidak mampu. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel. 2.82

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1	143.592	182.311	201.776	287.540	160.859

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah seluruh masyarakat miskin	192.601	231.702	232.391	236.291	233.761
3	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	74,55	78,68	86,83	121,69	68,81

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

44. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Pelayanan IGD Level 1 adalah standar minimal untuk pelayanan gawat darurat bagi Rumah Sakit Kelas D. Hingga tahun 2019, jumlah Rumah Sakit Kelas D dan Kelas D Pratama sebanyak 18 RS. Apabila mengacu pada PMK Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009, maka rumah sakit tersebut telah memenuhi standar minimal sehingga cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan rumah sakit telah mencapai 100 %.

Faktor pendukung terpenuhinya cakupan tersebut adalah dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimal, khususnya pemenuhan sarana dan prasarana RS. Pelaksanaan akreditasi oleh KARS juga mendukung bagi upaya RS dalam memenuhi standar pelayanan di IGD masing-masing. Sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan SDM khususnya yang tersertifikasi kegawatdaruratan (ATCLS/BTCLS).

45. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

Adapun cakupan Desa/Kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi di bawah 24 jam di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sudah mencapai 100 % dalam lima (5) tahun berturut-turut. Pada tahun 2020 hanya terdapat 2 wilayah Puskesmas yang mengalami KLB, yaitu wilayah Puskesmas Ma'rang dan Mandalle. Dan keduanya telah dilakukan penyelidikan sebelum 24 jam. Yang berarti tenaga surveilans di Puskesmas telah cepat tanggap dalam menangani kejadian luar biasa (KLB).

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur baik di bidang jalan, jembatan, dan irigasi merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Jaringan infrastruktur yang baik, dapat mendorong percepatan dan kelancaran arus distribusi barang/jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian daerah. Kinerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur dapat dilihat dari capaian kinerja indikator di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pembangunan prasarana Kabupaten meliputi jalan dan jembatan, irigasi dan drainase, pengendalian banjir serta penataan ruang.

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Jalan dianggap dalam kondisi mantap (Baik + Sedang) jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan, Peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Pada Tahun 2016, panjang jalan kondisi baik mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2015, yaitu menjadi sepanjang 583,65 km dari panjang jalan secara keseluruhan sepanjang 646,20 km, dengan persentase sebesar 90,32%. Sementara pada Tahun 2017, panjang jalan dalam kondisi baik 431,3 km menurun dengan persentase 66,74% diakibatkan dengan meningkatnya kondisi jalan yang rusak akibat umur jalan yang sudah melewati ambang batas. Pada akhir tahun 2017 ditetapkan panjang ruas jalan berdasarkan status yang semula panjang 646,20 Km menjadi 818.512 Km yang tertuang dalam SK Bupati Nomor 697 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017. tahun 2018 – tahun 2020, panjang jalan dalam kondisi baik mengalami fluktuatif dari 618,457 Km dengan persentase 75,56% kemudian menurun 574,479 Km dengan persentase 71.69% diakibatkan adanya pemotongan anggaran dan meningkat ditahun 2020 dengan panjang jalan dalam kondisi baik 603,095 Km dengan persentase 73,68%. Persentase Kondisi Jalan Mantap di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel 2.96

Tabel. 2.83
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan kondisi baik	307,53	292,55	329,269	355,581	370,431
2	Panjang jalan Kondisi Sedang	276,12	138,75	289,188	231,218	232,664
3	Panjang jalan Kondisi Rusak Ringan	61,38	161,22	154,680	214,763	213,967
4	Panjang jalan Kondisi Rusak Berat	1,17	53,68	45,375	16,950	1,450
5	Persentase Kondisi Jalan Mantap	90.32	66.74	75.56	71.69	73.68

Sumber: Dinas PU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di

wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk tertentu. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan terlihat pada tahun 2017 ke tahun 2018 saat dilakukan perubahan SK Penetapan ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel. 2.84.
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah panjang jalan	646.20	646.20	818.512	818.512	818.512
2	Jumlah Penduduk	360.557	362.472	361.318	350.208	351.877
3	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	0,00179	0,00178	0,00246	0,00246	0,00246

Sumber: Dinas PU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Persentase Kawasan Pemukiman Yang Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 (empat)

Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 dari tahun 2017 – 2020 mengalami penurunan, ini menandakan bahwa jumlah kawasan permukiman penduduk yang sudah dilalui kendaraan roda 4 sudah meningkat seiring bertambahnya jumlah seluruh kawasan permukiman yang ada di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, data ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.85.
Persentase Kawasan Pemukiman Yang Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 s.d 2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4	n/a	109	109	109	104
2	Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk	n/a	284	289	297	302
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 (%)	n/a	38.38	37.72	36.70	34.44

Sumber: Dinas Perumahan Permukiman Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

4. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terus meningkat dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020. Pada tahun 2016 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki panjang jalan dalam kondisi Baik dengan persentase 34,20% dengan panjang jalan 280 Km kemudian bertambah terus di tiap tahunnya 2% – 4% dimana di tahun 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dengan panjang 352 Km dengan persentase yang cukup signifikan menjadi 43%, data ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.86.
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	280	299,985	329,95	350	352
2	Panjang seluruh jalan kabupaten	818.512	818.512	818.512	818.512	818.512
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	34,20	36,65	40,31	42,76	43

Sumber: Dinas PU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

5. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sanitasi juga dapat berarti cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Pengertian ini benar tetapi belum memberikan gambaran yang konkrit tentang apa itu sanitasi. Sanitasi pada dasarnya merupakan kebutuhan dasar manusia yang dihubungkan dengan tiga komponen untuk dikelola yaitu persampahan, air limbah dan drainase. Sanitasi tidak hanya berimplikasi pada kesehatan masyarakat, tetapi memiliki manfaat yang luas. Dalam kurun waktu 2016-2020, terjadi tren peningkatan rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Meski tiap tahun jumlah rumah tinggal bertambah tapi sejalan dengan pertambahan jumlah rumah tinggal berakses sanitasi, ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah sadar akan pentingnya kesehatan dengan dimulai dari rumah tinggal yang bersanitasi. Dari tahun 2016 persentasi 80,64% sampai di tahun 2020 dengan persentasi 84,92%, data ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.87
Persentase rumah tinggal bersanitasi Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	n/a	49.446	53.922	61.698	66.859

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah rumah tinggal	n/a	61.320	65.796	73.571	78.732
3	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	n/a	80.64	81.95	83.86	84.92

Sumber: Dinas Perumahan Permukiman Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

6. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Persentasi Irigasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari capaian kondisi baik pada keseluruhan kondisi jaringan irigasi kabupaten di tahun 2020 telah mencapai 59,54 persen. Capaian ini mengalami peningkatan yang jauh lebih baik dibandingkan di tahun 2016 dengan capaian sebesar 27,39 persen. Hal ini disebabkan karena prioritas penanganan pada kondisi rusak berat telah ditingkatkan menjadi kondisi baik. Walaupun peningkatan persentase yang dicapai tiap tahunnya, dengan hasil ini masih dianggap perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang. Data ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.88
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	3.668	1.687	720	825	1.073
2	Luas irigasi Kabupaten	13.392	13.392	13.392	13.392	13.392
3	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	27,39	39,99	45,37	51,53	59,54

Sumber: Dinas PU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

7. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan ditiap tahunnya. Pada tahun 2016, rasio irigasi kota sebesar 0,107 dengan panjang saluran irigasi 10,59 Km. adapun peningkatan yang signifikan yaitu pada tahun 2019 dengan rasio 0,254 dengan panjang saluran irigasi 25,12 Km mengalami pelonjakan Pada akhir periode tahun 2020 rasio jaringan irigasi sebesar 0,453 dengan panjang saluran irigasi 44,84 Km. Adapun data selengkapnya tersaji pada Tabel 2.89

Tabel. 2.89.
Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang saluran irigasi	10.59	17.91	24.41	25.12	44.84
2	Luas lahan budidaya pertanian	9897	9897	9897	9897	9897
3	Rasio Jaringan Irigasi	0,107	0,181	0,247	0,254	0,453

Sumber: Dinas PU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.3.1.3 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Urusan perumahan merupakan amanat undang-undang dasar kepada pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumah bertindak sebagai sarana tumbuh kembang individu, sehingga perkembangan individu juga ditentukan dari seberapa layak tempat tinggal yang dihuninya. Rumah yang layak huni, sebagaimana yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Pemenuhan rumah yang layak ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersifat wajib sekaligus mendasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pembagian urusan pemerintahan. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tiap tahun meningkat dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel. 2.90
Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2016-2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah layak huni	n/a	52.858	56.716	63.418	68.926
2.	Jumlah Penduduk	360557	362.472	361.318	350.208	351.877
3.	Rasio rumah layak huni	n/a	0.146	0.157	0.181	0.196

Sumber: Dinas Perumahan & Permukiman, Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Tabel. 2.91
Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2016 - 2020
Per Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Kecamatan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Pangkajene	7.186	7.710	8.621	9.370
2	Minasatene	5.584	5.992	6.700	7.282
3	Bungoro	7.152	7.674	8.581	9.326
4	Labakkang	6.987	7.497	8.383	9.111
5	Ma'rang	4.860	5.214	5.831	6.337
6	Segeri	3.354	3.599	4.024	4.374
7	Mandalle	2.294	2.462	2.753	2.992
8	Balocci	2.878	3.088	3.453	3.753
9	Tondong Tallasa	2.213	2.375	2.655	2.886
10	Lk.Tupabiring	3.320	3.562	3.983	4.329
11	Lk.Tupabiring Utara	2.041	2.190	2.448	2.661
12	Lk.Kalmas	2.135	2.291	2.562	2.784
13	Lk.Tangaya	2.854	3.062	3.424	3.721
	Jumlah	52.858	56.716	63.418	68.926

Sumber: Dinas Perumahan & Permukiman, Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2. Rasio Permukiman Layak Huni

Untuk rasio permukiman layak huni di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan penanganan kawasan kumuh belum

dilakukan secara menyeluruh sehingga belum tuntas mengurangi pertitik wilayah kumuh di Kabupaten Pangkep. Selain itu pengembang perumahan belum memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan kawasan pemukiman layak huni dikarenakan dari seluruh luasan lahan hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk hunian.

Tabel. 2.105
Rasio permukiman layak huni Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas permukiman layak huni	31.942,3	31.942,3	31.942,3	31.942,3	31.947,9
2	Luas wilayah permukiman	32.000	32.034,48	32.034,48	32.063,11	32.063,11
3	Rasio permukiman layak huni	0.9982	0.9982	0.9983	0.9983	0.9984

Sumber: Dinas Perumahan & Permukiman, Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Tabel. 2.106
Luas permukiman layak huni Tahun 2016 s/d 2020
Per Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pangkajene	2.341,8	2.341,8	2.341,8	2.341,8	2.346,94
2	Minasatene	3.148,5	3.148,5	3.148,5	3.148,5	3.148,72
3	Bungoro	3.817	3.817	3.817	3.817	3.817,06
4	Labakkang	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444,03
5	Ma'rang	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477
6	Segeri	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190,12
7	Mandalle	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161
8	Balocci	2.861	2.861	2.861	2.861	2.861
9	Tondong Tallasa	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
10	Lk.Tupabiring	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
11	Lk.Tupabiring Utara	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362
12	Lk.Kalmas	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
13	Lk.Tangaya	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Jumlah	31.942,3	31.942,3	31.942,3	31.942,3	31.947,9

Sumber: Dinas Perumahan & Permukiman, Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Ketersediaan rumah layak huni disuatu wilayah kerja di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2017 adalah 86,20 dan mengalami peningkatan ditiap tahunnya dimana pada akhir periode tahun 2020 adalah 87,55 data tersebut bias dilihat pada Tabel berikut.

Tabel. 2.92
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni Disuatu Wilayah Kerja	n/a	52.858	56.716	63.418	68.926
2	Jumlah Rumah di Suatu Wilayah Kerja	n/a	61.320	65.796	73.571	78.732
3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	n/a	86.20	86.20	86.20	87.55

Sumber: Dinas Perumahan & Permukiman, Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Tabel. 2.93
Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni Disuatu Wilayah Kerja Tahun 2016 s/d 2020
Per Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Kecamatan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Pangkajene	7.186	7.710	8.621	9.370
2	Minasatene	5.584	5.992	6.700	7.282
3	Bungoro	7.152	7.674	8.581	9.326
4	Labakkang	6.987	7.497	8.383	9.111
5	Ma'rang	4.860	5.214	5.831	6.337
6	Segeri	3.354	3.599	4.024	4.374
7	Mandalle	2.294	2.462	2.753	2.992
8	Balocci	2.878	3.088	3.453	3.753
9	Tondong Tallasa	2.213	2.375	2.655	2.886
10	Lk.Tupabiring	3.320	3.562	3.983	4.329
11	Lk.Tupabiring Utara	2.041	2.190	2.448	2.661
12	Lk.Kalmas	2.135	2.291	2.562	2.784
13	Lk.Tangaya	2.854	3.062	3.424	3.721
	Jumlah	52.858	56.716	63.418	68.926

Sumber: Dinas Perumahan & Permukiman, Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

4. Persentase Pemukiman Yang Tertata

Permukiman yang tertata merupakan lingkungan hunian yang terdiri dari satu satuan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai fungsi penunjang lainnya yang terletak baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Dalam pengertian yang lebih umum permukiman dapat diartikan sebagai bentukan baik buatan manusia ataupun alami dengan segala kelengkapannya yang digunakan untuk bertempat tinggal baik sementara maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya.

Luasan permukiman yang tertata di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami peningkatan ditiap tahunnya walaupun tidak terlalu signifikan, persentase kawasan permukiman yang tertata pada tahun 2016 adalah 23,27% dengan luas area permukiman tertata 7446 Ha dari 32000 Ha luas area permukiman keseluruhan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pada tahun 2020 persentase baru mencapai mencapai 24,36%. Pencapaian ini masih perlu ditingkatkan karena masih dibawah 25%.

Tabel. 2.94
Persentase Pemukiman Yang Tertata Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas area permukiman tertata (Ha)	7.446	7.567	7.641	7.735	7.812
2	Luas area permukiman keseluruhan (Ha)	32.000	32.034,48	32.034,48	32.063,11	32.063,11
3	Persentase permukiman yang tertata (%)	23.27	23.62	23.85	24.12	24.36

Sumber: Dinas Perumahan & Permukiman, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Tabel. 2.95
Luas Area Pemukiman Yang Tertata Tahun 2016 s/d 2020
Per Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pangkajene	782	822	830	841	849
2	Minasatene	630	637	643	651	658
3	Bungoro	1530	1545	1561	1580	1596
4	Labakkang	758	774	782	791	799
5	Ma'rang	869	878	886	897	906
6	Segeri	440	449	453	459	463
7	Mandalle	349	353	356	360	364
8	Balocci	429	433	438	443	447
9	Tondong Tallasa	500	505	510	516	521
10	Lk.Tupabiring	275	278	281	284	287
11	Lk.Tupabiring Utara	204	206	208	211	213
12	Lk.Kalmas	260	263	265	268	271
13	Lk.Tangaya	420	424	428	434	438
	Jumlah	7.446	7.567	7.641	7.735	7.812

Sumber: Dinas Perumahan & Permukiman, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

5. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP, permukiman kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh juga dapat menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah karena karakteristik permukiman kumuh biasanya digambarkan dengan tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat penghuninya yang rendah. Selain karena menjadi potret tingkat kesejahteraan yang rendah, perhatian pemerintah pada penanganan permukiman kumuh diperlukan karena biasanya menjadi sumber penyakit endemik yang akhirnya menular. Persentase luas lingkungan permukiman kumuh dibandingkan luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam kurun waktu tahun 2016-2019 belum menunjukkan perubahan. Dalam kurun waktu tersebut, persentase lingkungan permukiman kumuh konsisten di angka 0,180%. Pada Tahun 2020 persentase luas lingkungan permukiman

kumuh sudah mengalami penurunan sebesar 0,163% berbanding lurus dengan penurunan luas lingkungan permukiman kumuh.

Tabel. 2.96
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Lingkungan Permukiman Kumuh	57,7	57,7	57,7	57,7	52,13
2	Luas Wilayah Permukiman	32.000	32.034,48	32.034,48	32.063,11	32.063,11
3	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (%)	0.180	0.180	0.180	0.180	0.163

Sumber: Dinas Perumahan & Permukiman, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

6. Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan

Persentase luas permukiman kumuh yang tertangani di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dimana luas permukiman kumuh yang tertangani dibandingkan luas permukiman kumuh dalam kurun waktu tahun 2018-2020 menunjukkan perubahan yang signifikan. Pada tahun 2018 persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani 3,206% dengan luas permukiman kumuh yang tertangani 1,85 Ha dari 57,7 Ha luas permukiman kumuh secara keseluruhan. Kemudian mengalami peningkatan di Tahun 2019 dimana luas permukiman kumuh yang tertangani menjadi 3,71 Ha dan Pada Tahun 2020 luasan permukiman kumuh yang tertangani 9,653% dengan luas permukiman kumuh yang tertangani 5,57 Ha, data ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel. 2.97
Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Luasan pemukiman kumuh yang tertangani	n/a	n/a	1,85	3,71	5,57
2	Luas pemukiman kumuh	n/a	n/a	57,7	57,7	57,7
3	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	n/a	n/a	3,206	6,430	9,653

Sumber: Dinas Perumahan & Permukiman, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

7. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Di kawasan perkotaan Kabupatn Pangkajene dan Kepulauan jumlah rumah tangga kumuh perkotaan ada sekitar 2.503 rumah sejak pendataan yang dilakukan pada tahun 2017 dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah 61.320 rumah jadi proporsi rumah tangga kumuh perkotaan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada diangka 4.082. Dalam kurun waktu tahun 2017-2020 jumlah rumah tangga kumuh perkotaan belum menunjukkan perubahan dimana angkanya tetap 2.503. Dalam kurun waktu tersebut, proporsi rumah

tangga kumuh perkotaan berkurang, ini dipengaruhi dengan bertambahnya jumlah rumah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tiap tahunnya. Pada Tahun 2020 proporsi rumah tangga kumuh perkotaan sebesar 3.179. data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel. 2.98
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	n/a	2.503	2.503	2.503	2.503
2	Jumlah seluruh rumah	n/a	61.320	65.796	73.571	78.732
3	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	n/a	4,082	3,804	3,402	3,179

Sumber: Dinas Perumahan & Permukiman, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

8. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan PSU

Lingkungan yang nyaman adalah salah satu faktor yang bias memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, lingkungan yang nyaman tercipta dengan adanya lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dari tahun 2017 – 2020, setiap tahunnya hanya bertambah sekitar 1% dengan bertambahnya jumlah lingkungan yang didukung PSU sekitar 4 - 5 lingkungan. Pada tahun 2017 jumlah lingkungan yang didukung PSU 191 dari 269 jumlah lingkungan perumahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dimana Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU sebesar 71%. Pada akhir periode Tahun 2020 jumlah lingkungan yang didukung PSU sudah 199 dengan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU sebesar 73,98%, data ini dapat dilihat pada Tabel yang tersaji berikut,

Tabel. 2.99
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lingkungan yang didukung PSU	n/a	191	194	194	199
2	Jumlah lingkungan perumahan	n/a	269	269	269	269
3	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	n/a	71.00	72.12	72.12	73.98

Sumber: Dinas Perumahan & Permukiman, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Tabel. 2.100
Jumlah Lingkungan Yang Didukung Dengan PSU Tahun 2016 s/d 2020
Per Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Kecamatan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Pangkajene	11	11	11	12
2	Minasatene	16	16	16	16
3	Bungoro	14	14	14	14

No	Kecamatan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
4	Labakkang	28	27	27	28
5	Ma'rang	25	25	25	26
6	Segeri	10	10	10	10
7	Mandalle	13	13	13	14
8	Balocci	7	7	7	7
9	Tondong Tallasa	13	14	14	14
10	Lk.Tupabiring	11	12	12	12
11	Lk.Tupabiring Utara	13	13	13	14
12	Lk.Kalmas	9	10	10	10
13	Lk.Tangaya	21	22	22	22
	Jumlah	191	194	194	199

Sumber: Dinas Perumahan & Permukiman, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.3.1.4 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Rasio jumlah Perlindungan Masyarakat *per 10.000 penduduk* mencerminkan tingkat kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban dan penegakan aturan, dan semakin mampu daerah tersebut menjalankan otonomi daerah.

Tabel. 2.101.
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Limas Kabupaten	1157	1153	1932	1647	1418
2	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	32,08	31,80	53,47	47,02	40,29

Sumber: Satuan Polisi dan Pamong Praja, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami angka yang fluktuatif, jumlah anggota Linmas terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan mengalami penurunan ditahun 2019 dan 2020 dimana jumlah rasio Linmas per 10.000 penduduk tahun 2020 sebesar 40,29, terkait keberadaan anggota Linmas telah diberikan pembekalan tentang penanganan bencana, membantu tertib dan lancarnya pelaksanaan pemilu, serta pendeteksi awal atas potensi-potensi konflik dan ketidaknyamanan di dalam masyarakat.

2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Tabel. 2.102
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelanggaran K3 yang Terselesaikan	50	51	43	40	30
2	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	50	57	45	42	37
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	89,4	96	95,2	81

Sumber: Satuan Polisi dan Pamong Praja, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Persentase Penegakan PERDA

Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja.

Tabel. 2.103
Persentase Penegakan PERDA Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	55	46	42	40	35
2	Jumlah pelanggaran PERDA	55	50	47	43	38
3	Persentase Penegakan PERDA (%)	100	92	89,36	93,02	92,11

Sumber: Satuan Polisi dan Pamong Praja, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.3.1.5 Sosial

1. Persentase PMKS Yang Tertangani

Angka persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dalam rentang tahun 2016-2020 beriringan dengan tren yang terjadi pada indikator persentase PMKS yang menerima bantuan sosial. Di tahun 2016, persentase PMKS tertangani di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mencapai 1,53 persen. Penduduk PMKS di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum menunjukkan progress yang nyata dalam penanganannya, terlihat dari persentase PMKS yang tertangani menunjukkan angka yang turun di tahun 2017 yaitu 1,34 persen dan mengalami banyak peningkatan di tahun 2018 sebanyak 45,92 persen. Dan kembali meningkat ditahun 2019 sebanyak 46,09. Sementara di tahun 2020 progress penanganan PMKS ini kembali mengalami banyak peningkatan yaitu 63,37.

Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tergambar bahwa pemerintah belum bisa mengcover PMKS. Terlihat dalam tabel ditahun 2020 jumlah PMKS yang diberikan bantuan sebanyak 31789 jiwa lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 25294 jiwa pada tahun 2019. Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan pada tahun 2019 adalah

sebanyak 25294 jiwa. Secara persentase pada tahun 2020, PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 63,37 persen lebih rendah 46,09 persen dari tahun 2019 yaitu 46,09 persen.

Tabel. 2.104
Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang tertangani	850	730	24554	25294	31789
2	Jumlah PMKS yang ada	55610	54533	53467	54877	50167
3	Persentase PMKS yang tertangani (%)	1,53	1,34	45,92	46,09	63,37

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Ada beberapa hambatan dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu:

- Penanganan PMKS belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Belum optimalnya persiapan sosial fakir miskin perkotaan dan pedesaan sebelum memperoleh layanan
- Peran PMKS Belum optimal dalam mendukung UKS serta basic Data Terpadu (BST)
- Belum menjadi dasar intervensi penanggulangan kemiskinan Lintas Sektoral dan pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat

2. Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dari banyaknya PMKS yang dibantu maka laporan jumlah PMKS yang telah selesai ditangani. Jumlah PMKS yang selesai ditangani pada tahun 2016 sebanyak 1,53 persen. Dan mengalami penurunan pada tahun 2017 sebanyak 1,34 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 1,80 persen. Pada tahun 2019 kembali mengalami banyak peningkatan sebanyak 3,10 persen. Sementara pada tahun 2020 progress penanganan PMKS ini mengalami penurunan secara tajam yaitu 1,82 persen. Demi meningkatnya pemecahan masalah sosial di Kabupten Pangkajene Kepulauan, penanganan PMKS sudah melibatkan semua stakeholder baik masyarakat umum maupun instansi pemerintahan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang muncul. Hal tersebut tentunya menekankan pada sisi koordinasi berbagai lintas sek/tor juga termasuk dari masyarakat untuk berperan aktif meningkatkan penanganan masalah sosial.

Tabel. 2.105
Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	850	730	962	1702	915
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	55.610	54.533	53.467	54.877	50.167
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	1,53	1,34	1,80	3.10	1,82

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya.

Sebagai pelaksana standar pelayanan minimal, urusan social daerah juga menitikberatkan pada penanganan dalam panti. Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene Kepulauan tidak memiliki panti yang tersebar di daerah kabupaten baik di daratan maupun di kepulauan.

Tidak hanya menyasar individu PMKS, pemerintah daerah juga menargetkan pemberian bantuan kepada panti sosial atau kelompok sosial ekonomi yang layak mendapat bantuan bantuan pemberdayaan sosial. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, angka persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak bisa terdefenisikan dikarenakan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum memiliki panti social selain panti asuhan.

4. Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Salah satu instusi yang berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat PMKS adalah panti sosial. Berdasarkan Kepmensos No.50/HUK/2004, panti sosial diartikan sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial. Karena pentingnya peran panti sosial, maka sarana dan prasaran pelayanan kesehatan sosial menjadi salah satu indikator menilai kemampuan pemsberian layanan. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tidak semua panti sosial memiliki sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial. Sejak tahun 2016 dan 2017 hanya 33 persen dari total panti sosial. Pada tahun 2018-2020 menunjukkan adanya 3 panti sosial yang telah menyediakan sarana dan prasarana kesos.

Tabel. 2.106.
Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	1	1	3	3	3
2	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	3	3	3	3	3
3	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	33	33	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

5. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Ketersediaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial juga penting bagi PMKS. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat merupakan sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri dari usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Menurut Kemensos RI, wahana ini merupakan jejaring kerja pada kelembagaan sosial komunitas lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkembangkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Angka persentase panti yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan sosial berbeda persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pangkajene Kepulauan mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 4,8 persen dengan 1 WKBSM dari 21 dan ditahun 2020 sebanyak 24 persen dengan 13 laanan WKBSM yang telah menyediakan sarana dan prasarana kesos dari yang seharusnya sebanyak 54 layanan WKBSM.

Tabel. 2.107.
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	1	3	5	8	13

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos skala	21	39	39	43	54
3	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	4,8	7,7	13	18,8	24

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut mengelola WKSBM dan kurangnya kesadaran atas kebermanfaatan WKSBM bagi masyarakat merupakan beberapa penyebab masyarakat enggan bergabung dalam kegiatan WKSBM. Manfaat dari program ini adalah tersalurnya program pemerintah melalui bantuan sosial, akan tetapi WKBSM ini sudah tidak mendapatkan dukungan Anggaran dari kementerian sosial untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Wahana Kesejahteraan Sosial.

6. Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Kabupaten Pangkajene Kepulauan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bencana yaitu tsunami, banjir, longsor, dan kebakaran. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam membantu penduduk yang menjadi korban bencana dapat dilihat dari angka persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

Dalam rentang waktu 2016 sampai 2020, persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan konstan 100% Hal ini menunjukkan perhatian besar pemerintah dan proses tanggap bencana yang akurat dalam menanggulangi masalah ini.

Tabel. 2.108
Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	293	214	134	2715	146
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	293	214	134	2715	146
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

7. Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial.

Pelayanan kepada penyandang cacat dan lanjut usia juga merupakan standar pelayanan minimal. Pelayanan kepada lanjut usia sudah lama dilakukan di dinas sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk penanganan penyandang disabilitas masih dilakukan terpadu dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terdaftar secara administrasi.

Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, termasuk bagi para penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak produktif. Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dalam lima tahun terakhir, berusaha mengakomodir jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya untuk membantu masyarakat rentan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak mereka dan terus berusaha memperluas cakupannya.

Persentase penerima jaminan sosial selama lima (5) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 sebanyak 1,21 persen penduduk penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial telah mendapatkan bantuan jaminan sosial, dan jumlahnya mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 0,71 persen. Mengalami sedikit peningkatan di tahun 2018 yaitu 0,75 persen. Terjadi penurunan Kembali di tahun 2019 sebanyak 0,50 persen. Sementara ditahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya yakni 1,31 persen. Meskipun terjadi fluktuasi, namun persentasenya masih relatif rendah.

Tabel. 2.109
Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	62	35	38	25	58
2	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	5139	4955	5045	5000	4415
3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	1,21	0,71	0,75	0,50	1,31

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Berdasarkan tabel pada tahun 2016-2020 memperlihatkan masih minimnya unit pelaksana teknis daerah untuk pelayanan dan rehabilitasi lanjut usia serta tidak adanya panti rehabilitasi milik daerah untuk pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat fisik dan mental.

Walaupun demikian peran pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan penyandang cacat dan lanjut usia dalam pemberian jaminan social masih terus berusaha ditingkatkan.

2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

1. Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja Per Tahun

Angka sengketa perusahaan-pekerja pada tahun 2016 – 2017 mengalami kenaikan dimana pada tahun 2016 sebesar 7,2 dan di tahun 2017 meningkat menjadi 18,0 Kemudian di tahun 2018 menurun menjadi 4,8 dan pada tahun 2019 – 2020 mengalami peningkatan. Tahun 2019 sebesar 6,3 dan di tahun 2020 meningkat menjadi 11,8. Hal-hal yang menyebabkan adalah kurangnya kesepahaman antara perusahaan dan pekerja mengenai aturan, hak, kewajiban, kesejahteraan dan hak maupun kewajiban pekerja lainnya.

Tabel. 2.110
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun dari Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	5	11	3	3	7
2	Jumlah perusahaan	69	61	62	47	59
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	7,2	18,0	4,8	6,3	11,8

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2. Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama adalah perbandingan antara kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) terhadap kasus yang dicatatkan. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kasus yang ada pada setiap tahunnya diselesaikan, sehingga besaran kasus yang diselesaikan yaitu 100 persen. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu kedua pihak memang mempunyai etiket baik untuk menyelesaikan permasalahan, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terutama tentang penyelesaian secara Perjanjian Bersama (PB).

Tabel. 2.111.
Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	5	11	3	3	7
2	kasus yang dicatatkan	5	11	3	3	7
3	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah perbandingan antara pencari kerja yang ditempatkan terhadap pencari kerja yang terdaftar. Pada tahun 2016-2018 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 sebesar 60 persen dan di tahun 2018 turun menjadi 13 persen. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan mmenjadi 60,8 persen dan tahun 2020 menurun menjadi 4,15 persen. Fluktuasi besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bergantung dari jumlah angkatan kerja yang mendaftarkan dirinya di Dinas Tenaga Kerja untuk kemudian ditempatkan pada tempat kerja tertentu.

Tabel. 2.112
Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	pencari kerja yang ditempatkan	87	91	389	369	38
2	pencari kerja yang terdaftar	145	325	2940	607	914
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	60	28	13	60,8	4,15

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

4. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang berkurang dalam jangka waktu tertentu, yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari resiko keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di masa yang akan datang. Pada tahun 2016 – 2017 mengalami penurunan, tahun 2016 sebesar 11,59 persen dan turun menjadi 11,45 di tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 – 2020 mengalami kenaikan menjadi 13,37 persen di tahun 2018 dan tahun 2020 menjadi 19,69 persen. Hal tersebut menunjukkan keseriusan pengusaha dalam menjamin keselamatan pekerjaanya di masa yang akan datang. Data besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta peserta Jamsostek dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel. 2.113.
Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	pekerja/buruh JAMSOSTEK	6.817	6.411	7.567	8.559	11.966
2	pekerja/buruh	58.866	55.995	56.595	58.285	60.760
3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	11,59	11,45	13,37	14,68	19,69

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

5. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi adalah perbandingan antara tenaga kerja yang dilatih terhadap pendaftar pelatihan berbasis kompetensi. Dalam kurun waktu 2016 – 2020 mengalami fluktuatif, pada tahun 2016 sebesar 85,33 persen dan pada tahun 2017 naik menjadi 92,90 persen. Kemudian di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 91,11 persen, pada tahun 2019 naik menjadi 94,12 persen dan di tahun 2020 turun lagi menjadi 89,15 persen. Fluktuasi yang terjadi setiap tahunnya bergantung pada ketersediaan anggaran untuk menjalankan program pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.114
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tenaga Kerja yang dilatih	448	288	658	640	224
2	Pendaftar Pelatihan Berbasis Kompetensi	525	310	722	680	251
3	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (%)	85,33	92,90	91,11	94,12	89,16

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

6. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Pelatihan berbasis masyarakat bertujuan untuk menambah keterampilan masyarakat yang diharapkan dapat memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sebesar 64 persen dan di tahun 2020 menurun hingga 33 persen. Pelatihan yang diselenggarakan juga disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, seperti pada tabel di bawah.

Tabel. 2.115
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tenaga kerja yang dilatih	128	144	48	128	16
2	Pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	200	200	100	200	48
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	64	72	48	64	33

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

7. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan berbasis kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam memberdayakan UKM, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan produktivitas UKM. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dalam kurun waktu 2016 – 2018 terus

mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebesar 73 persen dan meningkat menjadi 85 persen di tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 62 persen dan pada tahun 2020 kegiatan pelatihan kewirausahaan tidak dapat terlaksana karena adanya pengurangan anggaran akibat pandemi covid 19.

Tabel. 2.116
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tenaga kerja yang dilatih	36	55	50	90	0
2	Pendaftar pelatihan kewirausahaan	49	73	59	145	0
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	73	75	85	62	0

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

8. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan memberikan indikasi kemajuan suatu daerah. Dimana rasio lulusan S1/S2/S3 adalah perbandingan antara jumlah lulusan strata satu/ strata dua/ strata tiga terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2016 – 2017 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 sebesar 0,043 dan tahun 2017 turun menjadi 0,041. Kemudian di tahun 2018 dan 2019 rasionya sama dan mengalami kenaikan yaitu 0,045. Pada tahun 2020 rasionya menurun menjadi 0,044, meskipun jumlah lulusan bertambah tetapi dipengaruhi juga oleh kenaikan jumlah penduduk seperti pada table berikut.

Tabel. 2.117
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	14.110	13.593	14.843	14.934	15.351
2	Rasio lulusan S1/S2/S3	0.043	0.041	0.045	0.045	0.044

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pekerja lembaga pemerintahan 2016-2020 menunjukkan peningkatan sekalipun tidak terlalu besar jumlahnya. Sedangkan jumlah seluruh pekerja perempuan dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan cukup besar karena adanya yang kerja di perusahaan atau membuat usaha sendiri. Selain membantu perekonomian keluarga perempuan juga mengurus rumah tangga.

Tabel. 2.118.
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	3.394	3.422	3.291	3.521	3.543
2	Jumlah pekerja perempuan	39.979	46.528	54.361	51.072	61.075
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	8,49	7,35	6,05	6,89	5,80

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021

2. Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR

Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan tahun 2016-2020 mengalami peningkatan walaupun belum memenuhi kuota 30 persen.

Tabel. 2.119.
Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	3	3	3	4	4
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	35	35	35	35	35
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	8,57	8,57	8,57	11,43	11,43

Sumber: Kantor Sekretaris Dewan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, perempuan tidak hanya memilih profesi yang duduk di lembaga pemerintah tapi sebagian juga memilih bekerja di lembaga swasta, termasuk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Partisipasi perempuan di lembaga swasta dari tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 perempuan di lembaga swasta sebanyak 0,21 persen dan menurun pada tahun 2018 sebanyak 0,3 persen sehingga menjadi 0,18 persen. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,64 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 0,11 persen sehingga menjadi 0,53 persen. Hal ini disebabkan oleh karena akses yang dibuka untuk perempuan bekerja seperti di perusahaan atau pabrik sudah terbuka secara luas.

Tabel. 2.120.
Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja perempuan di lembaga swasta	0	98	98	326	326
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	0	0,21	0,18	0,64	0,53

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

4. Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penyebab KDRT yaitu masalah 132ector dan ekonomi yang biasanya dapat juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh perempuan sebagai korban kekerasan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jumlah KDRT antara 2016-2018 mengalami peningkatan sedangkan 2018-2020 mengalami penurunan kasus KDRT.

Tabel. 2.121
Rasio KDRT Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KDRT	0	9	12	9	2
2	Jumlah rumah tangga	0	102.320	105.406	104.909	106.666
3	Rasio KDRT (%)	0	0,0088	0,0114	0,0086	0,0019

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

5. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau pengangguran. Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan pada tahun 2016-2020 tidak ada pekerja anak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

6. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 36,58 persen, tahun 2017 menjadi 40,88 dan tahun 2018 naik 5,29 persen sehingga menjadi 40,88 persen. Angkatan kerja perempuan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3,73 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 48,71 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel. 2.122.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	44.145	50.545	57.700	53.600	64.645
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	120.676	123.640	124.968	126.301	132.701

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	36,58	40,88	46,17	42,44	48,71

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

7. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, layanan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap korban kekerasan. Pada tahun 2016 belum ada datanya karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terbentuk pada tahun 2017. Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu pada tahun 2017 sebanyak 13 pengaduan/laporan dan menurun pada tahun 2018 sebanyak 8 pengaduan/laporan. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 14 pengaduan/laporan, dan tahun 2020 sebanyak 15 pengaduan/laporan. Sehingga cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sudah mencapai 100 persen karena sudah mendapatkan penanganan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA Polres Pangkajene dan Kepulauan) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

8. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Pangkajene dan Kepulauan dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pada tahun 2016 belum ada datanya karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terbentuk pada tahun 2017. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit pada tahun 2017-2020 sudah mencapai 100 persen karena sudah mendapatkan layanan kesehatan.

9. Cakupan Layanan Rehabilitasi Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sektor Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, Layanan Rehabilitasi adalah pelayanan yang ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Pada tahun 2016 belum ada datanya karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terbentuk pada tahun 2017. Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Pangkajene dan Kepulauan dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), cakupan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh petugas rehabilitasi terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2017 dari 35 kasus terdapat 1 orang yang mendapatkan layanan rehabilitasi atau 0,03 persen sedangkan tahun 2018 tidak ada kasus yang mendapatkan rehabilitasi. Pada tahun 2019 dari 47 kasus terdapat 1 orang yang mendapatkan layanan rehabilitasi atau 0,02 persen. Tahun 2020 dari 24 kasus terdapat 1 orang yang mendapatkan layanan rehabilitasi atau 0,04 persen.

Tabel. 2.123.

Cakupan Layanan Rehabilitasi Sektor Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sektor Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan layanan rehabilitasi sektor yang diberikan oleh petugas rehabilitasi terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	0	0,03	0	0,02	0,04

Sumber: UPPA Polres dan P2TP2A Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

10. Cakupan Penegakan Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus- Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Pangkajene pada tahun 2016-2020 semua perkara kekerasan perempuan dan anak sudah mendapatkan putusan pengadilan dan mencapai 100 persen dengan status perkara berkekuatan tetap, pemberitahuan putusan kasasi, dan pemberitahuan putusan banding.

11. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, Layanan Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban kekerasan. Pada tahun 2016 belum ada datanya karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terbentuk pada tahun 2017. Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Pangkajene dan Kepulauan dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada tahun 2017-2020 sudah mencapai 100 persen karena sudah mendapatkan layanan bantuan hukum.

12. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, Layanan Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari luar negeri ketitik debarkasi/entry point atau dari daerah penerima/terjadinya kekerasan kedaerah asal atau pihak keluarga, keluarga/institusi pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban kekerasan. Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Pangkajene dan Kepulauan dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada tahun 2016-2018 layanan pemulangan bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak tidak ada. Sedangkan tahun 2019 dari 47 kasus terdapat 1 orang yang mendapatkan layanan pemulangan atau 0,02 persen dan tahun 2020 dari 24 kasus terdapat 2 orang yang mendapatkan layanan pemulangan atau 0,08 persen.

Tabel. 2.124

Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	0	0	0	0,02	0,08

Sumber: UPPA Polres dan P2TP2A Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

13. Cakupan Layanan Reintegrasi Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, Reintegrasi adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kekerasan kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan lainnya yang dapat memberikan perlindungan. Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Pangkajene dan Kepulauan dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), cakupan layanan reintegrasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada tahun 2016-2018 layanan reintegrasi bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak tidak ada kasus. Pada tahun 2019 dari 47 kasus terdapat 1 kasus yang mendapatkan layanan reintegrasi atau 0,02 persen dan tahun 2020 dari 24 kasus terdapat 1 kasus yang mendapatkan layanan reintegrasi atau 0,04 persen.

Tabel. 2.125
Cakupan Layanan Reintegrasi Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan layanan reintegrasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	0	0	0	0,02	0,04

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

14. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD, SMP, SMA

APM merupakan perbandingan antara banyaknya murid pada masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok umur untuk jenjang pendidikan yang bersangkutan. APM digunakan untuk proporsi anak yang bersekolah tepat waktu yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD (penduduk usia 7-12 tahun), SMP (penduduk usia 13-15 tahun), dan SMA (penduduk usia 16-18 tahun). Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD/SMP/SMA dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi sehingga jenjang pendidikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan bahwa terjadi kesetaraan kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

Tabel. 2.126.
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	APM-SD perempuan	94,20	96,94	96,58	89,55	92,28
2	APM-SD laki-laki	96,00	110,5	95,86	90,73	91,28
3	APM-SMP perempuan	87,20	36,95	84,75	79,92	79,81
4	APM-SMP laki-laki	86,20	36,40	82,54	71,62	77,01

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16-18 tahun	6.188	6.616	6.812	6.031	7.131
6	Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16-18 tahun	6.105	6.544	6.813	5.850	6.831
7	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD (%)	0,98	0,88	1,01	0,99	1,01
8	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP (%)	1,01	1,07	1,03	1,12	1,04
9	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA (%)	1,01	1,01	1,00	1,03	1,04

Sumber: Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2021

15. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi

Berdasarkan data dari Perguruan Tinggi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2016-2020 jumlah anak perempuan di tingkat pendidikan lebih tinggi dibanding jumlah anak laki-laki di perguruan tinggi karena jenjang pada perguruan tinggi khusus perempuan yang ada akademi kebidanan aisyiyah dan mayapada.

Tabel. 2.127.

Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak perempuan di tingkat pendidikan tinggi usia 19-24 tahun	262	476	705	801	796
2	Jumlah anak laki-laki di tingkat pendidikan tinggi usia 19-24 tahun	109	190	392	376	421
3	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi (%)	2,40	2,51	1,80	2,13	1,89

Sumber: Perguruan Tinggi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

16. Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 tahun

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, pada tahun 2016-2020 angka melek huruf laki-laki lebih besar angka melek huruf perempuan karena jenjang pendidikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan bahwa terjadi kesetaraan kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

Tabel. 2.128.

Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 tahun
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	AMH15-24 perempuan	27.001	31.676	32.622	31.464	32.869
2	AMH15-24 laki-laki	27.333	32.985	33.733	32.495	34.055

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun (%)	0,99	0,96	0,97	0,97	0,97

Sumber: Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

17. Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non pertanian

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 Badan Pusat Statistik tidak melakukan pendataan, pada tahun 2017 kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian sebanyak 26,23 persen dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 12,93 persen. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 3,75 persen sehingga menjadi 16,68 persen, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 2,44 persen sehingga menjadi 14,24 persen. Hal ini disebabkan karena di sektor non pertanian lebih besar laki-laki dibanding sektor perempuan

Tabel. 2.129.

Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Non pertanian Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian	0	1.847	766	846	466
2	Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian	0	7.042	5.926	5.072	3.272
3	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian (%)	0	26,23	12,93	16,68	14,24

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

2.3.2.3 Pangan

1. Ketersediaan Pangan Utama

Tabel. 2.130

Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)	571.529	596.857	657.271	526.371	585.980
2	Ketersediaan Pangan Utama (kg)	207.357	230.387	230.042	174.742	194.501

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa rata-rata jumlah ketersediaan Pangan Utama per tahun (kg) untuk tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017

sampai 2018 hal ini disebabkan untuk tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan produksi padi, Jagung, ubi jalar dan ubi kayu, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan produksi yang disebabkan karena adanya kemarau berkepanjangan, gagal panen dan Puso yang diserang pada tanaman padi.

2. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Tabel. 2.131
Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari)	3995	4312	4477	4.052	4.066
2	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	127,92	158,17	147,11	136,19	141,60
3	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/gr)	4.123	4.470	4.624	4.188	4.208

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa ketersediaan energi dan protein perkapita pada tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan jika melihat data perhitungan NBM begitu pula pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan, untuk komoditi tanaman pangan sebagian besar telah cukup tersedia seperti padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar sebagai sumber karbohidrat cukup besar, hanya sayur-sayuran yang masih kurang tersedia, untuk sektor perikanan juga cukup banyak tersedia untuk di konsumsi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk tahun 2019 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena ketersediaan pangan mengalami penurunan produksi akibat kemarau yang menyebabkan gagal panen.

3. Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan

Keamanan Pangan Segar adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan segar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Tabel. 2.132
Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (Kec)	9	9	9	9	9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar terdiri dari pengawasan dan pembinaan keamanan produk pangan segar pada 9 kecamatan daratan, serta kegiatan pengujian keamanan pangan segar. Dari hasil pengujian cemaran pestisida dan formalin pada beberapa Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sejak tahun 2017 sampai 2019, diperoleh hasil bahwa semua sampel masih aman untuk dikonsumsi.

2.3.2.4 Pertanian

1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Total luas tanah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan hingga tahun 2020 adalah 8.514.629, 51 M², yang sudah disertifikatkan sampai tahun 2020 seluas 1.882.447, 39 M² (22,11 %), sedangkan yang belum disertifikatkan seluas 6.632.182, 12 M² (77,89 %). Capaian sertifikasi lahan pemerintah dalam kurun waktu 2016-2020 berdasarkan jumlah bidang tanah seperti pada tabel.

Tabel. 2.133.
Persentase Bidang Tanah Bersertifikat Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Bidang Tanah	933	1433	1460	1480	1492
2	Jumlah Bidang Tanah bersertifikat	412	426	429	445	503
3	Persentase Bidang Tanah Bersertifikat (%)	44,16	29,73	29,38	30,07	33,71

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Persentase capaian kasus tanah Negara (Asset Pemda) dalam kurun waktu 2016- 2020 memperlihatkan tren yang meningkat. Di tahun 2017 terdapat 3 kasus tanah negara asset Pemda yang berhasil dimediasi dan diberikan pemahaman ke pihak yang menggugat ke Pemda, kemudian meningkat di tahun berikutnya. Akhirnya pada tahun 2020 terjadi peningkatan persentase penyelesaian kasus tanah Negara sebesar 70 persil tanah, karena berkat kerjasama semua stakeholder yang bersinergi dilapangan.

Tabel. 2.134.
Penyelesaian kasus tanah Negara Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus yang diselesaikan	n/a	3	4	5	7
2	Jumlah kasus yang terdaftar	n/a	5	7	8	10
3	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	n/a	60	57	63	70

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Penyelesaian Izin Lokasi

Capaian rekomendasi izin lokasi dalam kurun waktu 2016-2020 memperlihatkan tren yang meningkat sehubungan dengan adanya Proyek Strategis Nasional pembangunan jalur kereta api Parepare-Makassar yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai

ekonomi yang secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tahun 2017 terdapat 70 permohonan ijin lokasi dan yang terealisasi sebanyak 50 ijin lokasi, kemudian meningkat di 2 tahun berikutnya. Akhirnya pada tahun 2020 terjadi penurunan realisasi ijin lokasi, dari yang sebelumnya 110 dan ditahun 2020 sebanyak 50 ijin lokasi dengan persentase penyelesaian sebanyak 33 persen.

Tabel. 2.135.
Penyelesaian Izin Lokasi Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ijin Lokasi	n/a	50	60	110	50
2	Permohonan Ijin Lokasi	n/a	70	80	120	150
3	Penyelesaian izin lokasi (%)	n/a	71	75	92	33

Sumber: Dinas Pertanahan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

1. Tersusunnya RPPLH Kabupaten Kota dan Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota

Dalam kurun 5 tahun pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melakukan persiapan dalam penyusunan RPPLH yaitu dengan menyusun laporan SLHD atau sekarang disebut dengan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dan penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup DDDTLH. DIKPLHD disusun setiap tahunnya sedangkan DDDTLH disusun di tahun 2019. Kedua Dokumen ini merupakan sumber data dan informasi penting yang dibutuhkan dalam tahapan penyusunan RPPLH. Selain itu, Dokumen DDDTLH yang telah dibuat juga dijadikan salah satu sumber data dalam penyusunan RPJMD tahun 2021 -2026.

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meskipun tidak melakukan penyusunan RPPLH namun telah melakukan penyusunan beberapa dokumen pendukung yang menjadi sumber data utama dalam penyusunan RPPLH yang juga digunakan dalam rencana pembangunan daerah untuk tahun berikutnya.

Tabel. 2.136
Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Tahun 2016 s/d 2020 dan Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten / kota	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Provinsi

Berdasarkan Permendagri no 67 tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD tahun 2016-2020 yang pelaksanaan didelegasikan kepada SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel. 2.137
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: DinasLingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Peningkatan Indeks Kualitas Air

Hasil penghitungan indeks kualitas air (IKA) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir (2016-2020), kondisi air sungai yang berada di Kab. Pangkajene dan Kepulauan berada dalam kondisi tercemar dengan status cemar ringan dan cemar sedang. Angka indeks kualitas air di tahun 2017 menunjukkan penurunan dari 45,71 di tahun 2016 turun menjadi 35 di tahun 2017. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah sungai yang memiliki status cemar sedang. Namun Kualitas air sungai di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai IKA yang semakin meningkat sampai tahun 2020. Nilai IKA yang semakin meningkat diikuti dengan meningkatnya jumlah sungai yang kualitas air sungainya memenuhi baku mutu dan cemar ringan serta tidak berstatus cemar sedang.

Tabel. 2.138.
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Lokasi/Titik Pengujian Sampel Air	12	8	7	7	8
2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air (%)	45,71	35	58,57	64,29	65

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

4. Peningkatan Indeks Kualitas Udara

Pengukuran kualitas udara ambien di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan di beberapa titik yang mencakup wilayah pemukiman, wilayah industri, wilayah padat transportasi dan wilayah komersil. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2016-2020 kualitas udara di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tergolong dalam kondisi baik. Di tahun 2017 sampai dengan 2019 angka indeks kualitas udara mencapai 70an yang

mana masih berada pada kategori kualitas udara cukup baik. Namun di tahun 2020 capaian ini meningkat menjadi 81,32.

Peningkatan Nilai IKU dari tahun 2017 sampai dengan 2020 menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas udara seperti adanya kegiatan uji emisi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemantauan kualitas udara oleh pihak swasta dan pemerintah daerah, pemeliharaan rutin terhadap kendaraan yang dilakukan oleh masyarakat dan kegiatan kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kualitas udara di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 2.139
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara (%)	0	72,80	76,06	76,95	81,32

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

5. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki nilai IKTL yang semakin meningkat setiap tahunnya. Meskipun nilai IKTL tersebut masuk dalam kategori kurang baik. Nilai IKTL Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kegiatan pembukaan lahan, kegiatan rehabilitasi hutan/lahan, rehabilitasi kawasan pesisir, kegiatan pemulihan lahan bekas tambang, dan kurangnya ruang terbuka hijau.

Tabel. 2.140
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Hasil Pengukuran Indeks kualitas tutupan lahan (%)	0	0	53,63	54,35	58,78

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

6. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LHD yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menaati izin lingkungan yang diterbitkan terus meningkat dalam kurun waktu 2016-2020. Di tahun 2017, persentase pembinaan dan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha jawab usaha yang menaati peraturan terkait lingkungan hidup baru mencapai 8 persen. Namun meningkat di tahun 2020 sebesar 25. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan

semakin banyak yang sadar akan lingkungan meskipun masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah izin lingkungan yang telah diterbitkan.

Tabel. 2.141

Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	0	8	8,7	11,8	25

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

7. Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD). Beberapa syarat tersebut yaitu telah mengikuti kursus-kursus dasar AMDAL dan atau kursus dasar-dasar teknis pengelolaan lingkungan hidup; dan telah mengikuti pendidikan khusus di bidang pengawas lingkungan hidup. Karena adanya beberapa syarat tersebut, maka pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPLHD. Beberapa PNS sudah mengikuti beberapa kursus dan pelatihan teknis namun belum dianggap cukup untuk memenuhi persyaratan tersebut.

8. Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, disebutkan bahwa masyarakat hukum adat, diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur unsur sebagai berikut: 1) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban. 2) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya. 3) ada wilayah hukum adat yang jelas. 4) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati. 5) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melakukan inventarisasi lokasi dan masyarakat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Namun jika melihat kriteria yang telah disebutkan di atas, masyarakat/lokasi di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang sudah diinventarisasi dan diamati tidak dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum

hukum adat. Masyarakat/lokasi yang diinventarisasi hanya menunjukkan adanya kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang masih digunakan hingga sekarang.

Kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang di temukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu pengamatan dan kajian lebih lanjut. Dibutuhkan waktu dan alokasi anggaran yang cukup untuk menginventarisasi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sehingga diharapkan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang ada dapat terverifikasi, diakui dan dibina selanjutnya.

Tabel 2.142
Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	0	0	1	1	1
2.	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional (Angka)	0	0	2	1	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

9. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat

Bentuk pendidikan dan pelatihan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten pangkep melalui Dinas Lingkungan Hidup yaitu berupa pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas sekolah agar peduli dan berbudaya lingkungan. Setiap sekolah diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju kesejahteraan hidup yang berkelanjutan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan bagi kepentingan generasi sekarang dan akan datang.

Pendidikan dan pelatihan telah diberikan kepada 10 sekolah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pelatihan ini juga diharapkan dapat membawa sekolah untuk memperoleh penghargaan ADIWiyata.

Tabel. 2.143
Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat (Angka)	10	10	10	10	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

10. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Selama 5 tahun berjalan, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menerima beberapa penghargaan di bidang lingkungan hidup yaitu

- Penghargaan ADIPURA (sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan) di tahun 2017 dan 2018;
- Sekolah ADIWIYATA (merupakan gelar yang diberikan kepada sekolah yang sudah melaksanakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pendidikan lingkungan hidup melalui gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS)) sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 . Adiwiyata terdiri dari tiga tingkatan yaitu ADIWIYATA Mandiri, ADIWIYATA Nasional dan ADIWIYATA Kabupaten;
- PROPER (penilaian kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan yang memerlukan indikator yang terukur) yaitu PROPER hijau PT. Semen Tonasa ditahun 2016,2018 dan 2019
- PROKLIM/Program Kampung Iklim (bentuk apresiasi terhadap kelompok masyarakat yang melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan) yaitu Proklam Madya dan Proklam Utama di tahun 2017,2018 dan 2019.

Tabel. 2.144.

Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup tahun 2016 S/D 2020
Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

11. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha Dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan pengaduan yang masuk melalui Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat ditangani dan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengaduan yang masuk dapat berupa lisan maupun tertulis. Pengaduan yang diregistrasi adalah pengaduan yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.

Jumlah pengaduan yang teregistrasi di tahun 2017 sebanyak 1 pengaduan, Tahun 2018 sebanyak 4 pengaduan, tahun 2019 sebanyak 7 pengaduan dan tahun 2020 sebanyak 2 pengaduan. Semua kasus tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan Permen LHK Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan Yang berlaku.

Tabel. 2.145

Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha Dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten /Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota (%)	0	10	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

12. Timbulan Sampah Yang Ditangani

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki jumlah armada pengangkutan sampah (convector, arm roll & dump truck) ditahun 2016 dan 2017 sebanyak 13 kendaraan, tahun 2018 sebanyak 15 kendaraan dan tahun 2019 dan 2020 sebanyak 17 kendaraan. Armada pengangkutan tersebut memiliki kapasitas antara 4 sampai dengan 5 m³. Dengan jumlah dan kapasitas armada yang ada dapat diketahui volume timbulan sampah yang di tangani. Volume timbulan sampah yang ditangani dari tahun ke tahun semakin meningkat mengikuti jumlah armada pengangkutan sampah.

Jumlah dan kapasitas armada juga mempengaruhi luas area pelayanan persampahan. Saat ini pelayanan persampahan meliputi 9 kecamatan daratan. Meskipun peningkatan cakupan area pelayanan mengalami peningkatan , namun peningkatannya tidak signifikan. Cakupan area pelayanan pelayanan di pengaruhi juga oleh jumlah buruh dan bahan bakar minyak yang digunakan.

Tabel. 2.146

Timbulan Sampah Yang Ditangani Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Volume timbulan sampah yang ditangani (M3/Tahun)	48.180	51.100	61.320	64.970	64.970
2.	Total timbulan sampah (M3/Tahun)	327.415,95	27.415,95	303.563,20	319.564,80	315.516,95
3.	Timbulan sampah yang ditangani (%)	14,7	15,6	20,22	20,33	20,59
4.	Persentase cakupan area pelayanan (%)	16,92	24,87	25,3	26	27

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

13. Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki beberapa tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan Bank Sampah. TPST Samatajang memiliki kapasitas 3 m³ berlokasi di Kecamatan Bungoro dan TPST Padamampu dengan kapasitas 8 m³ di Kecamatan Pangkajene. TPST itu melakukan pengolahan sampah organik menjadi

kompos. Sampah organik yang dikelola berasal dari wilayah kecamatan lokasi masing masing TPST.

Bank Sampah Induk (BSI) Rahmawati berlokasi di Jl. Matahari. Bank Sampah Induk Rahmawati mengolah sampah an organik seperti plastik, kertas, kaca dan aluminium. Saat ini Bank Sampah Induk memiliki 6 Bank Sampah Unit di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel. 2.147
Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (%)	8,23	5,83	6,3	6,66	6,80

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

14. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota

Operasionalisasi TPA/TPST di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan penilaian ADIPURA dari tahun 2016 hingga tahun 2018 semakin meningkat. Hal ini diperkuat dengan diraihnya penghargaan ADIPURA di tahun 2018. Tahun 2019 dan tahun 2020 penilaian ADIPURA dari KLHK tidak ada. Sehingga Penilaian ADIPURA untuk operasionalisasi TPA/TPST tidak ada.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki dua TPA yaitu TPA Bontoa dan TPA Taraweang. TPA Bontoa terletak di Kelurahan Bontoa Kecamatan Minasatene. TPA Bontoa memiliki luas 6 Ha yang terdiri dari zona aktif, zona tidak aktif, kolam lindi, komposter, kantor dan gudang. Saat ini zona aktif TPA Bontoa sudah semakin sedikit sehingga TPA Taraweang akan digunakan secepatnya. TPA Taraweang memiliki luas 8 Ha dengan sistem pengolahan Sanitary Landfill yang terdiri dari jembatan timbang, zona aktif dan kolam lindi.

Tabel. 2.148
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	71	71	72	72	72

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

15. Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Diterbitkan

Pengolahan sampah oleh swasta yang ada di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu berupa lapak besar yang mengelolah sampah an organik berupa plastik, kertas/dus, besi dan aluminium. Jumlah pengolahan sampah oleh swasta (lapak) yang mengajukan permohonan rekomendasi izin lingkungan di tahun 2017 sebanyak 1 usaha dan tahun 2020 juga sebanyak 1 usaha.

Pengelola sampah oleh swasta yang mengajukan rekomendasi izin lingkungan saat ini tidak pernah mengirimkan laporan kegiatannya ke Dinas Lingkungan hidup sehingga dianggap tidak taat terhadap aturan.

Tabel. 2.149
Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Diterbitkan Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit	0	1	0	0	1
2	Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan dalam satu tahun	0	1	0	0	1
3	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (%)	0	100	0	0	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Rasio Penduduk ber- KTP Per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin. Untuk memenuhi hal tersebut, Pemerintah senantiasa memberi dukungan dalam bentuk pengalokasian DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota. Kebutuhan akan akses pelayanan publik yang mensyaratkan penggunaan KTP-EL, juga semakin mendorong masyarakat untuk segera memiliki KTP-EL. Di sisi lain, pengadaan blangko KTP-EL yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga ketersediaan blangko KTP-EL di Kabupaten/Kota sangat tergantung akan alokasi anggaran pengadaan blangko KTP-EL di Ditjen kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan pendistribusiannya ke instansi pelaksana di Kabupaten/Kota. Untuk tahun 2016 Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk mengalami peningkatan dari 0,32 menjadi 0,94 di tahun 2020. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel. 2.150
Rasio Penduduk Ber- KTP Per Satuan Penduduk Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	79.995	203.152	215.647	229.483	230.647

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	245.706	251.012	252.957	242.685	243.685
3	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	0,32	0,80	0,85	0,94	0,94

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Akta kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara terkait hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Akte kelahiran sangat penting peranannya untuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya seperti pendidikan dan paspor. Untuk itu, pelayanan terkait penerbitan akta kelahiran semakin dipermudah, namun dalam beberapa hal, masih ada sebagian masyarakat yang tingkat kesadaran dan pemahamannya yang masih rendah sehingga tidak segera melakukan pengurusan akta kelahiran bayinya setelah lahir. Rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami peningkatan dari 0,16 pada tahun 2016 menjadi 0,82 pada tahun 2020. Selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel. 2.151
Rasio Bayi Berakte Kelahiran Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah bayi berakte kelahiran	5.205	8.828	12.465	21.522	26.874
2	Jumlah bayi (0-5)	31.919	31.197	29.153	32.749	32.767
3	Rasio bayi berakte kelahiran	0,16	0,28	0,42	0,65	0,82

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di kantor urusan agama (KUA). Sedangkan bagi yang bergama Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu, pencatatan perkawinannya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta Perkawinan sangat penting bagi setiap penduduk yang telah menikah sebab merupakan alat bukti otentik kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Adanya program nasional percepatan penerbitan akta kelahiran, secara tidak langsung mendorong peningkatan rasio pasangan berakte nikah sebab seharusnya pemohon akta kelahiran melampirkan buku nikah/ akta perkawinan orang tuanya. Untuk tahun 2016 Rasio pasangan berakte nikah sebesar 0,26 sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,50.

Tabel. 2.152
Rasio Pasangan Berakte Nikah Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	40.737	42.600	42.752	94.929	77.847
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	156.577	157.705	158.729	151.433	54.990
3	Rasio pasangan berakte nikah	0,26	0,27	0,26	0,62	0,50

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Masih banyaknya akte perkawinan yang telah diterbitkan sebelumnya secara konvensional dan belum terintegrasi dengan SIAK, menyebabkan datanya perkawinannya belum tercatat dalam SIAK. Demikian halnya dengan Akte perkawinan untuk penduduk muslim sepenuhnya dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA).

4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Penyajian database kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diterbitkan secara berskala persemester berupa data agregat kependudukan, pengelolaan database kependudukan meliputi perekaman pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berupa verifikasi dan validasi data.

Tabel. 2.153
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

5. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Cakupan penerbitan akta kelahiran dalam kurun waktu 2016 – 2020 mengalami fluktuatif, pada tahun 2016 sebesar 85,67 persen dan pada tahun 2017 naik menjadi 89,45 persen. Kemudian di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 84,91 persen, pada tahun 2019 naik menjadi 88,39 persen dan di tahun 2020 turun lagi menjadi 80,26 persen. Penurunan disebabkan karena telah diberlakukan pengajuan secara online yang notabene masyarakat masih kurang mengetahui caranya dan khusus di daerah kepulauan masih kurangnya akses jaringan dan faktor cuaca yang tidak menentu, ketika dilakukan pelayanan keliling menyisir daerah kepulauan ketika cuaca baik warga kepulauan yang tidak memiliki dokumen kependudukan terkadang tidak berada ditempat dikarenakan mencari nafkah (melaut). Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel. 2.154
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	2.445	2.027	2.256	2.839	2.320
2	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	2.854	2.266	2.657	3.212	2.903
3	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	85,67	89,45	84,91	88,39	80,26

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik akan berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat desa. Oleh karena itu, cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik menjadi tolak ukur jumlah kantor pemerintahan desa yang baik terhadap jumlah seluruh pemerintahan desa. pada tahun 2016, cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik adalah 45 persen, meningkat di tahun 2017 sebesar 50 persen. Selanjutnya, cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik terus meningkat sepanjang tahun 2018 sampai 2020, dimana pada tahun 2020 cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik mencapai 62 persen. Masih rendahnya capaian terhadap cakupan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik disebabkan oleh karena masih terdapat beberapa kantor desa yang merupakan milik aset pemerintah daerah sehingga pemerintah desa belum dapat melakukan pemeliharaan dan peningkatan fungsi saran dan prasarana perkantoran desa.

Tabel. 2.155
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	45,00	50,00	52,00	60,00	62,00

Sumber: DPMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks desa membangun merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Ekologi/lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM berdasarkan

konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka pembangunan berkelanjutan dimana aspek Sosial, Ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa dengan memperkuat nilai – nilai lokal budaya sebagai penggerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel. 2.156
Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tahun	Target IDM	Realisasi IDM	Tingkat Perkembangan	Ket.
2016	0,4907	n/a	Tertinggal	n/a
2017	0,4907	n/a	Tertinggal	n/a
2018	0,4907	0,4907	Tertinggal	Desa sangat tertinggal 14, Desa tertinggal 31, Desa Berkembang 19, Desa maju 1
2019	0,5989	0,5589	Berkembang	Desa sangat tertinggal 1, Desa tertinggal 18, Desa Berkembang 41, Desa maju 5
2020	0,6800	0,6565	Berkembang	Desa tertinggal 5, Desa Berkembang 53, Desa maju 7

Sumber: DPMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan jumlah 65 Desa nilai perolehan IDM 0,5989 dengan Katorgeri Berkembang dengan rincian sebagai berikut:

- Desa tertinggal sebanyak 5 Desa (7,69%)
- Desa berkembang sebanyak 53 Desa (81,54%)
- Desa Maju sebanyak 7 Desa (10,77%)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara keseluruhan tingkat status perkembangan desa dalam kondisi berkembang meskipun masih terdapat 5 desa yang dalam status tertinggal, adapun 5 desa tersebut terjadi oleh karena adanya kekosongan Kepala desa sehingga capaian terhadap pencapaian prioritas pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa terhambat, hal lain disebabkan oleh faktor tingkat kesulitan geografis terhadap sarana dan prasarana transportasi masyarakat desa di wilayah Kepulauan.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Total Fertility Rate (TFR)

Tabel. 2.157.
Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Fertility Rate (TFR) (%)	2,43	2,13	2,3	2,48	2,48

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, serta tingkat urbanisasi. Pada tahun 2016 dan 2017, total fertility rate di Kabupaten pangkajene dan Kepulauan adalah 2,43 dan 2,13 persen. Pada tahun 2018, total fertility rate sebesar 2,3 persen dan meningkat menjadi 2,48 persen pada tahun 2019 dan 2020. Peningkatan dan penurunan fertilitas yang terjadi di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan secara umum adalah karena keinginan orang tua yang menginginkan kualitas yang baik untuk anak-anaknya, tinggi rendahnya tingkat Kesehatan dan Pendidikan dan penggunaan alat kontrasepsi.

2. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Tabel. 2.158.

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	3	10	13	15	15
2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	6	20	26	30	30

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB merupakan perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB terhadap jumlah semua perangkat daerah di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan. Pada tahun 2016, persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB adalah sebesar 6 persen. Meningkat pesat di tahun 2017 dan 2018 sebesar 40 persen. Angka ini meningkat di tahun 2019 menjadi sebesar 48 persen dan 50 persen pada tahun 2020.

3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Tabel. 2.159.

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk	2	2	2	2	3

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	4	4	4	4	6

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk dari rentang tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah sebesar 4 persen. Pada tahun 2020, persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk meningkat secara pesat sebesar 26 persen.

4. Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk

Tabel. 2.160.

Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	1	1	1	1

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk dari tahun 2016 sampai dengan 2020 di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebanyak 1 kebijakan.

5. Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Tabel. 2.161.

Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (Sektor)	3	5	7	10	10

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Pada tahun 2016, jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan adalah sebanyak 3 sektor. Pada tahun 2017 dan 2018 terjadi peningkatan jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sebanyak 7 sektor. Angka ini terus meningkat menjadi 10 sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil di tahun 2019 dan 2020.

6. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Tabel. 2.162
Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan (Sektor)	0	0	5	4	9

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Tahun 2016 sampai dengan 2017 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 0. Pada tahun 2018, Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan meningkat menjadi 5 dan 4 di tahun 2019. Pada tahun 2020 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan meningkat menjadi 9.

7. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Tabel. 2.163.
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak	94.940	95.553	92.886	35.035	35.479
2	Jumlah keluarga	101.142	105.713	105.406	85.953	86.356
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	4	4	4	3	3

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan perbandingan antara jumlah anak dan jumlah keluarga di Kabupaten pangkajene dan Kepulauan. Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan salah satu indikator keberhasilan program keluarga berencana. Pada tahun 2016 sampai dengan 2018, rata-rata jumlah anak per keluarga sebesar 4 dan mengalami penurunan menjadi 3 di tahun 2019 dan 2020. Diharapkan angka ini tetap atau cenderung menurun agar dapat mempengaruhi penurunan laju pertumbuhan penduduk sehingga berdampak baik pada kualitas generasi.

8. Ratio Akseptor KB

Tabel. 2.164.
Ratio Akseptor KB Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Akseptor KB	41.892	44.179	45.674	46.189	46.520
2	Jumlah pasangan usia subur	56.630	58.568	59.673	60.196	59.935
3	Ratio Akseptor KB (%)	73,97	76,54	76,54	76,73	77,62

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Pada tahun 2016, ratio akseptor KB adalah sebesar 73 persen. Ratio Akseptor KB pada tahun 2017 dan 2018 sama yaitu sebesar 76,54 persen lalu mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 76,73 persen. Hingga tahun 2020, ratio akseptor KB Kabupaten Pangkajene dan kepulauan adalah sebesar 77,62 persen. Rasio akseptor KB di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan angka yang cenderung meningkat dimana angka ini akan mempengaruhi Angka kelahiran total Fertility rate (TFR) di Kabupaten pangkajene dan Kepulauan.

9. Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15–49

Tabel. 2.165
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta KB aktif	41.892	44.179	45.674	46.189	46.520
2	perempuan menikah usia 15 – 49	56.630	58.568	59.673	60.196	59.935
3	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 (%)	73,97	76,54	76,54	76,73	77,62

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. Pada tahun 2016, Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 Tahun Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebesar 73 persen. Meningkat di tahun 2017 dan 2018 menjadi sebesar 76,54 persen. Pada tahun 2019, Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebesar 76,73 persen dan terus mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 77,62 persen. Hal ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan promosi keluarga berencana di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, meskipun CPR ini belum memberikan gambaran pemakaian kontrasepsi modern, karena CPR ini mengukur pemakaian metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern.

10. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Tabel. 2.166
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	26.772	27.119	27.119	26.255	26.810
2	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (%)	10,97	13,33	13,33	12,93	11,04

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang isterinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan adapun Cakupan PUS yang usia isterinya di bawah 20 tahun adalah proporsi PUS yang isterinya di bawah usia 20 tahun dibandingkan dengan seluruh PUS yang ada dalam suatu wilayah. Pada tahun 2016, cakupan pasangan usia subur yang istrinya berada di bawah usia 20 tahun adalah sebesar 10,97 persen. Meningkat di tahun 2017 dan 2018 sebesar 13,33 persen. Selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi sebesar 12,93 persen. Pada tahun 2020, cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 Tahun adalah sebesar 11,04 persen.

11. Cakupan PUS Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Tabel. 2.167
Cakupan PUS Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	8.241	8.296	7.957	7.784	6.619
2	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	13,32	13,33	13,33	12,93	11,04

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Cakupan unmet need KB merupakan presentase yang diperoleh dari PUS yang ingin punya anak ditunda (IAT) dan tidak ingin anak lagi (TIAL) tetapi tidak menggunakan atau memakai alat kontrasepsi, yang dibagi dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) dan dikalikan 100%. Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi pada tahun 2016 adalah sebesar 13,32 persen. Pada tahun 2017 dan 2018, cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) adalah sama yaitu sebesar 13,33 persen. Pada tahun 2019, cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi adalah sebesar 12,93 persen dan 11,04 persen di tahun 2020. Cakupan unmet need Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menurun atau semakin kecil pada kurun waktu 2018 hingga 2020, memiliki arti nilai yang semakin baik, karena menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun demikian, persentase unmet need KB dimasa datang bisa semakin turun persentasenya. Olehnya itu, upaya penurunan unmet need di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan harus menjadi prioritas untuk keberhasilan pelayanan KB dalam rangka menurunkan Angka kelahiran total Fertitity rate (TFR).

12. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Tabel. 2.168.
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	3.244	4.065	4.521	5.123	6.038
2	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	7,74	9,20	9,90	11,09	12,98

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Persentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pada tahun 2016 dan 2017 di Kabupaten pangkajene dan Kepulauan adalah sebesar 7,74 persen dan 9,20 persen. Pada tahun 2018, persentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) adalah 9,90 persen. Pada tahun 2019 dan 2020,

persentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) mengalami peningkatan sebesar 11,09 dan 12,98 persen. Persentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang di Kabupaten pangkajene dan Kepulauan mengalami peningkatan beberapa tahun. Salah satu hal yang berpengaruh signifikan dalam pemilihan MKJP ini adalah faktor pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama oleh akseptor bersama pasangan atau bersama penyedia layanan secara substansi mempunyai peluang yang lebih besar terhadap penggunaan MKJP. Untuk dapat meningkatkan penggunaan MKJP, peran pasangan dan penyedia layanan untuk mendiskusikan pemilihan alat kontrasepsi dengan akseptor perlu ditingkatkan. MKJP ini juga diharapkan dapat menjadi pilihan pasangan usia subur laki-laki maupun perempuan, sehingga memberi kontribusi dalam meningkatkan kesetaraan gender, utamanya dalam meningkatkan kesertaan MKJP laki-laki di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

13. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Tabel. 2.169
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan Kontrasepsi	859	398	3.298	4.395	1.935
2	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	73,97	76,51	76,54	76,73	75,58

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Pada tahun 2016, persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi adalah sebesar 73,97 persen. Selanjutnya pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 76,51 dan 76,54 persen. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebesar 76,73 persen di tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 75,58 persen.

14. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Tabel. 2.170.
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	1.482	1.681	1.442	1.932	1.985
2	Jumlah anggota kelompok BKB	2.182	2.652	2.523	3.138	2.810
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	67,91	63,38	57,15	61,57	70,64

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Cakupan anggota bina keluarga balita (BK) ber-KB adalah perbandingan antara jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB terhadap jumlah anggota kelompok BKB di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Bina Keluarga Balita bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap orangtua serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang secara menyeluruh dan terpadu guna mencapai tumbuh kembang yang optimal. Sasaran BKB secara langsung adalah orangtua yang memiliki balita dan secara tidak langsung juga anggota keluarga yang lain, tokoh masyarakat, tokoh agama, dll (organisasi profesi, LSM). Dalam mewujudkan pengasuhan yang berkualitas, diharapkan orang tua yang mempunyai balita merencanakan kelahiran anak berikutnya sehingga orang tua dapat focus pada pengasuhan balitanya. Dalam rentang tahun 2016 sampai dengan 2018, cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB cenderung menurun yaitu sebesar 67,91 persenn, 63,38 persen dan 57,15 persen. Pada tahun 2019, Cakupan anggota bina keluarga balita (BK) ber-KB meningkat sebesar 61,57 persen dan terus meningkat di tahun 2020 sebesar 70,64 persen.

15. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Tabel. 2.171
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	1.482	1.318	1.256	1.421	1.192
2	Jumlah anggota kelompok BKR	2.182	2.434	2.288	2.622	2.039
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	67,92	54,15	54,89	54,19	58,46

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Bina keluarga remaja (BKR) merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat. Program bina keluarga remaja merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif. Dalam wadah BKR ini diharapkan dapat meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber KB bagi anggota kelompok. Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2016 adalah sebesar 67,92 persen. Mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 54,15 persen. Pada tahun 2018 dan 2019, Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebesar 54,89 dan 54,19 persen. Angka ini meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 58,46 persen.

16. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Tabel. 2.172.
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	615	820	687	626	694
2	Jumlah anggota kelompok BKL	1.609	1.850	1.714	1.912	1.901
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	38,22	44,32	40,08	32,74	36,51

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga yang memiliki lanjut usia, diharapkan PUS dalam keluarga menjadi akseptor KB. Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB pada tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah 38,22 persen, 44,32 persen dan 40,08 persen. Pada tahun 2019, Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB menurun sebesar 32,74 persen dan pada tahun 2020 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB sebesar 36,51.

17. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

Tabel. 2.173.
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PPKS	0	1	1	1	1
2	Jumlah kecamatan	0	13	13	13	13
3	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (%) (PPKS) di setiap Kecamatan	0	7,69	7,69	7,69	7,69

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah berbasis institusi dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan perbandingan antara jumlah PPKS dan Jumlah kecamatan di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Rentang tahun 2017 sampai dengan 2020, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sama yaitu sebesar 7,69 persen. Angka ini menunjukkan masih banyak kecamatan yang belum menyediakan wadah layanan PPKS.

Salah satu faktor penghambat pembentukan PPKS ini adalah Kader atau petugas PPKS yang masih kurang baik dari kuantitas maupun kualitas. Olehnya itu, masih diperluakan komitmen dan upaya yang lebih serius untuk membentuk dan mengembangkan PPKS di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

18. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa

Tabel. 2.174
Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PIK R/M	38	51	61	61	49
2	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	38	40	59	61	49

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar 38 persen dan 40 persen. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di tahun 2018 dan 2019 meningkat menjadi 59 persen dan 61 persen. Pada tahun 2020 cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling menurun menjadi 49 persen.

19. Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk.

Tabel. 2.175.
Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	63	62	59	58	57
2	Jumlah PKB/PLKB	63	62	59	58	57
3	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100	100	100	100	100

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk rentang tahun 2016 sampai dengan 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebesar 100 persen.

20. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang ber-KB Mandiri

Tabel. 2.176.

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang ber-KB Mandiri Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	397	357	290	327	309
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS	739	778	930	605	602
3	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	53,72	45,88	31,18	54,05	51,33

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri adalah perbandingan antara jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri dengan jumlah anggota kelompok UPPKS di kabupaten pangkajene dan Kepulauan. Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri cenderung menurun yaitu sebesar 53,72 persen, 45,88 persen dan 31,18 persen. Kemudian meningkat pada tahun 2019 dimana cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri adalah 54,05 persen. Pada tahun 2020, Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri adalah sebesar 51,33 persen.

21. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Tabel. 2.177

Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD/K) merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan pelaksanaan program KB di masyarakat. Oleh sebab itulah peran mereka harus diberi perhatian dan dukungan agar lebih maksimal membantu masyarakat dalam melaksanakan program KB. Seiring dengan diterapkannya paradigma pelayanan publik di bidang KB yang bersifat desentralistik, maka perlu dan penting

untuk dikaji faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja PPKBD. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan dalam rentang tahun 2016 sampai dengan 2020 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebesar 100 persen. Artinya secara kuantitatif telah mencukupi.

22. Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Tabel. 2.178

Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	33.890	64.025	38.914	41.615	57.135
2	Perkiraan Permintaan Masyarakat	37.673	37.119	33.137	36.036	39.558
3	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	89,82	168,71	46,41	108,32	53,31

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat pada tahun 2016 adalah 89,82 dan meningkat di tahun 2017 sebesar 168,71 persen. Pada tahun 2018, cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat menurun menjadi 46,41 persen dan meningkat di tahun 2019 menjadi 108,32. Pada tahun 2020, Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah sebesar 53,31 persen.

23. Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan.

Tabel. 2.179

Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	63	45	23	22	24
2	Jumlah Faskes dan jejaring	89	51	25	28	33
3	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	24,2 7	24,2 7	24,2 7	26,2 1	26,21

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan akan berdampak pada peningkatan kesertaan KB aktif, karena masyarakat akan lebih mudah memperoleh layanan berkualitas. Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah sama yaitu sebesar 24,27 persen. Pada tahun 2019 dan 2020, Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan adalah sebesar 26,21 persen.

24. Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

Tabel. 2.180.

Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0	9	11	3	3
2	Jumlah remaja	35.295	35.810	36.650	36.927	37.377
3	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)	0	0,025	0,03	0,0081	0,0080

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS) pada tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah sebesar 0 persen, 0,00025 persen dan 0,03 persen. Pada tahun 2019 dan 2020, Persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS) adalah sebesar 0,0081 persen dan 0,0080 persen. Keberhasilan Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) karena meningkatnya pembinaan remaja aktif dan partisipasi kelompok PIK remaja tingkat sekolah.

25. Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga.

Tabel. 2.181

Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	0,97	12,62	8,74	0,97	0

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga pada tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah 0,97 persen, 12,62 persen dan 8,74

persen. Pada tahun 2019 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebesar 0,97 persen. Adapun pada tahun 2020, cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga adalah 0 persen. Mengingat program delapan fungsi keluarga yang berada didalam kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), perlu pelatihan kader delapan fungsi keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dibentuknya kader khusus ber SK Bupati untuk bertugas pada kelompok di wilayah masing-masing.

26. Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Tabel. 2.182

Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	2.182	2.652	2.523	3.138	2.810
2	Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	6.591	7.321	6.894	9.149	14.004
3	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	33,1	36,22	36,59	34,29	20,06

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak pada tahun 2016, 2017 dan 2018 mengalami peningkatan yaitu sebesar 33,1 persen, 36,22 persen dan 36,59 persen. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 34,29 persen kemudian pada tahun 2020, cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak menurun sebesar 20,06 persen. Rendahnya peran serta masyarakat dalam melakukan aktifitas kegiatan karena adanya regulasi batasan untuk berkumpul dan berkegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya penyebaran virus COVID 19.

27. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Tabel. 2.183
Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut usia kawin pertama)	51.36 7	50.689	48.990	47.667	47.015
2	Jumlah wanita menurut usia kawin pertama	24.38 0	23.416	22.517	21.412	20.715
3	Rata-rata usia kawin pertama wanita (%)	47,46	46,19	45,96	44,92	44,06

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Rata-rata usia kawin pertama wanita adalah besarnya jumlah umur kawin pertama wanita kali (x) jumlah wanita menurut usia kawin pertama terhadap jumlah wanita menurut usia kawin pertama. Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 rata-rata usia kawin pertama wanita adalah sebesar 47,46 persen, 46,19 persen dan 45,96 persen. Persentase ini menurun di tahun 2019 dan 2020 menjadi sebesar 44,92 dan 44,06 persen. Program Rata-rata usia kawin pertama wanita mengalami penurunan presentase disebabkan karena pembinaan sosialisasi terhadap dampak pernikahan anak dibawah umur sudah terlaksana atas kerja sama dengan mitra kerja KB.

28. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Tabel. 2.184
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes (%)	75	75	72,45	68,7	69,7

Sumber: DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Pada tahun 2016 dan 2017, Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes adalah sebesar 75 persen. Menurun di tahun 2018 menjadi 72,45 persen. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes di tahun 2019 menurun menjadi 68,7 persen lalu sedikit meningkat menjadi 69,7 persen di tahun 2020.

2.3.2.9 Perhubungan

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami penurunan dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 sebanyak 547.500 orang, tahun 2017 menjadi 539.477 dan pada tahun 2018 turun menjadi 255.917. Kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 turun drastis menjadi 17.028 dan 14.400. Adapun dengan menurunnya penumpang setiap tahun disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi masyarakat serta meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi.

Tabel. 2.185
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	547.500	539.477	255.917	17.028	14.400

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2. Rasio Ijin Trayek

Rasio ijin trayek menggambarkan jumlah angkutan umum yang tersedia untuk satuan penduduk tertentu. Rasio ijin trayek mengalami penurunan dari tahun 2016-2019, angka rasio untuk tiap penduduk pada tahun 2016 sebesar 0,00022 dan pada tahun 2019 menurun menjadi 0,00001. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan dengan rasio 0,00005. Kecenderungan berkurangnya ijin trayek yang dikeluarkan disebabkan karena banyak masyarakat yang lebih memilih jenis angkutan lain seperti bentor karena lebih praktis serta banyaknya mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum.

Tabel. 2.186
Rasio Ijin Trayek Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	79	34	16	3	17
2	Rasio ijin trayek	0.00022	0.00009	0.00004	0.00001	0.00005

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan. Dari tahun 2016-2017 mengalami kenaikan dengan angka sebesar 2.064 kendaraan di tahun 2016 menjadi 2.585 kendaraan di tahun 2017. Kemudian dari tahun 2018 menurun menjadi 2.276 kendaraan dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2.841 kendaraan. Pada tahun 2020 mengalami penurunan

menjadi 756 kendaraan. Hal ini disebabkan oleh Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) ditutup pada pertengahan tahun 2020 karena kondisi alat yang tidak layak jalan.

Tabel. 2.187
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah uji kir angkutan umum	2.064	2.585	2.276	2.841	756

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur laut, udara dan darat yang mampu memfasilitasi mobilitas barang dan jasa serta penduduk dalam suatu daerah. Berdasarkan data yang ada pada tabel di bawah dari tahun 2016-2020 Kabupaten pangkajene dan kepulauan tidak mengalami perubahan pada jumlah pelabuhan laut yaitu sebanyak 6 dan terminal bis/angkutan kota (type C) sebanyak 2 unit.

Tabel. 2.188
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelabuhan Laut	6	6	6	6	6
2	Jumlah Terminal Bus	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

5. Persentase Layanan Angkutan Darat

Persentase layanan angkutan darat dari tahun 2016-2017 mengalami kenaikan sebesar 0,22 persen di tahun 2016 dan 0,34 persen di tahun 2017. Kemudian tahun 2018 turun menjadi 0,17 persen dan di tahun 2019 juga mengalami penurunan dengan nilai persentase 0,15 persen. Pada tahun 2020 persentase layanan angkutan darat naik menjadi 1,05 persen yang disesuaikan dengan jumlah angkutan darat dan jumlah penumpang angkutan darat pada tahun tersebut.

Tabel. 2.189
Persentase layanan angkutan darat Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah angkutan darat	1203	1175	376	170	151
2	Jumlah penumpang angkutan darat	547.500	340.773	225.917	114.615	14.400

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase layanan angkutan darat (%)	0.22	0.34	0.17	0.15	1.05

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

6. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum adalah perbandingan antara jumlah angkutan umum yang memiliki KIR terhadap jumlah angkutan umum. Pada tahun 2016 – 2018 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 persentasenya sebesar 97,85 persen dan pada tahun 2018 turun menjadi 68,66 persen. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 79,15 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 98,25 persen.

Tabel. 2.190
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR	10.123	9.408	4.986	11.163	42.346
2	Jumlah angkutan umum	10.345	12.003	7.262	14.103	43.100
3	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	97.85	78.38	68.66	79.15	98.25

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

7. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan antara panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 1,502, pada tahun 2017 sebesar 1,935 dan pada tahun 2018 sebesar 1,642, pada tahun 2019 sebesar 0,894 dan pada tahun 2020 menjadi 0,890.

Tabel. 2.191
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan (km)	687,33	859,64	919,41	919,41	919,41
2	Jumlah Kendaraan	45.754	44.416	55.987	102.786	103.286
3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1,502	1,935	1,642	0,894	0,890

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

8. Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dari tahun 2016 - 2020 terjadi tren penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah yang terangkut angkutan umum

sebanyak 572.580 orang/barang dan pada tahun 2019 menjadi 114.615 orang/barang. Pada tahun 2020 yang terangkut angkutan umum menurun drastis menjadi 14.400 orang/barang. Terjadinya penurunan yang drastis pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kurangnya mobilitas masyarakat.

Tabel. 2.192
Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	572.580	340.733	169.350	114.615	14.400

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

9. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun

Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/ bandara/ terminal dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebanyak 171.000 orang/barang, tahun 2017 meningkat menjadi 198.704 orang/barang dan di tahun 2018 naik menjadi 213.075 orang/barang yang melalui dermaga/ bandara/ terminal. Kemudian pada tahun 2019-2020 terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 sebanyak 127.123 orang/barang dan pada tahun 2020 turun menjadi 126.472 orang/barang.

Tabel. 2.193
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	171.000	198.704	213.075	127.123	126.472

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

1. Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berfungsi dalam pemberdayaan masyarakat lokal untuk memperoleh/mengakses informasi dan teknologi komunikasi. Komunikasi dan informasi menjadi kebutuhan mendasar masyarakat di era digital saat ini, tak terkecuali bagi masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Mengingat bahwa penyelenggaraan layanan telekomunikasi bertujuan untuk membuka akses masyarakat terhadap berbagai sumber informasi yang tersedia melalui jaringan telekomunikasi. Di era masyarakat informasi seperti sekarang ini, penggunaan teknologi informasi menjadi semakin tidak terhindarkan.

Hampir seluruh kegiatan masyarakat dalam bersosialisasi atau kegiatan tertentu lainnya harus difasilitasi dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi. Maka pemerintah, bersama-sama dengan penyelenggara layanan telekomunikasi, berupaya memperluas cakupan layanan telekomunikasi agar akses masyarakat akan layanan telekomunikasi menjadi semakin terbuka. Penyediaan layanan itu berupaya dioptimalkan baik di daerah daratan maupun daerah kepulauan.

Tabel. 2.194

Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KIM	1	2	3	3	3
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	7,69	15,38	23,08	23,08	23,08

Sumber: Dinas Kominfo, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Di tahun 2018-2020 sudah ada KIM yang terbentuk di Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang secara mandiri dan kreatif melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah taraf kehidupannya melalui akses layanan telekomunikasi. Sampai dengan tahun 2020 ada 3 (tiga) KIM yang terbentuk di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Beberapa wilayah yang berada di Kabupaten Pangkajene Kepulauan telah mengakses layanan telekomunikasi, namun masih ada beberapa wilayah yang belum mencapai cakupan layanan telekomunikasi khususnya daerah kepulauan dan pegunungan yang sulit dijangkau layanan telekomunikasi.

Tabel. 2.195

Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Wilayah Yang Tercoverage (km ²)	18	191	196	203	215
2	Luas Wilayah Keseluruhan (km ²)	1.112,29	1.112,29	1.112,29	1.112,29	1.112,29
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	0,16	0,171	0,176	0,182	0,193

Sumber: Dinas Kominfo, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Namun di beberapa wilayah daratan menunjukkan peningkatan cakupan layanan telekomunikasi, hal bias dilihat dari cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan peningkatan di tahun 2016 menunjukkan 0,16% dan di tahun 2020 sebanyak 0,193%.

3. Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon

Jumlah penduduk yang menggunakan alat komunikasi cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Jumlah pengguna HP/telepon terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016 sampai tahun 2020. Dimana pada tahun 2020 ada 158.345 orang pengguna HP atau 45 dari total jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel. 2.196
Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon	144.223	155.863	162.593	157.594	158.345
2	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	40	43	45	45	45

Sumber: Dinas Kominfo, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

4. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Proporsi rumah tangga dengan akses internet dari tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan dan di tahun 2020 sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,57 menurunnya proporsi rumah tangga dengan akses internet disebabkan menurunnya daya beli masyarakat.

Tabel. 2.197
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Dan Kepemilikan Computer Pribadi
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	45.514	47.067	47.927	49.307	48.000
2	Proporsi rumah tangga dengan akses internet (%)	0,45	0,46	0,46	0,59	0,57

Sumber: Dinas Kominfo, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.11 Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Persentase koperasi aktif pada tahun 2020 sebesar 78,68 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2016 lebih banyak yaitu 79,64 persen. Kemudian pada tahun 2017 naik menjadi 79,70 persen dan tahun 2018 menurun

menjadi 78,48 persen. Lalu naik lagi pada tahun 2019 menjadi 78,48. Angka tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan mengingat koperasi dan sektor ekonomi mikro lainnya menjadi faktor pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM juga diarahkan untuk memperkuat, meningkatkan kontribusinya dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun dalam peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Tabel. 2.198.
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	262	267	246	248	251
2	Jumlah seluruh koperasi	329	335	314	316	319
3	Persentase koperasi aktif (%)	79.64	79.70	78.34	78.48	78.68

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

1. Persentase BPR/LKM aktif

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan yang masuk kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan/ tabungan, kredit dan / atau jasa konsultasi pengembangan usaha bagi pengusaha kecil.

Pada tahun 2016 – 2017 persentase BPR/LKM aktif tetap di nilai 69,57 persen dan di tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 69,94 persen. Pada tahun 2019 mengalami penurunan 69,09 persen dan di tahun 2020 turun menjadi 68,48 persen. Yang dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah BPR/LKM yang aktif di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berjumlah 113, seperti pada tabel berikut.

Tabel. 2.199.
Persentase BPR/LKM Aktif Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah BPR/LKM aktif	112	112	114	114	113
2	Jumlah seluruh BPR/LKM	161	161	163	165	165
3	Persentase BPR/LKM aktif (%)	69.57	69.57	69.94	69.09	68.48

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2. Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif

Persentase UKM non BPR/LKM aktif adalah perbandingan antara Jumlah UKM non BPR/LKM aktif terhadap Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM. Pada tahun 2016 – 2020 terus

mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sebesar 91 persen dan tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 97,80 persen.

Tabel. 2.200
Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	10.291	10.497	10.908	10.910	11.003
2	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	11.308	11.287	11.457	11.189	11.250
3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	91	93	95,2	97,5	97,80

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Persentase usaha mikro dan kecil adalah penopang perekonomian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Serta mampu bertahan pada masa-masa krisis ekonomi dan juga membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan data, dari tahun 2016 – 2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 persentase usaha mikro dan kecil sebesar 94,96 persen dan meningkat menjadi 96,75 persen.

Tabel. 2.201.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah usaha mikro dan kecil	29.203	31.367	32.721	34.154	47.348
2	Jumlah seluruh UKM	30.753	32.946	34.300	35.733	48.939
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	94.96	95.21	95.40	95.58	96.75

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.12 Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Majunya perekonomian suatu daerah tidak lepas dari peran investasi dimana menjadi hal yang penting karena merupakan modal utama dalam menggerakkan potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah. Demikian pula dengan roda perekonomian pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai penyangga bagi pembangunan daerah yang dapat berperan sebagai kontributor untuk meningkatkan pendapatan daerah serta peningkatan stok modal sehingga kapasitas produksi ekonomi menjadi semakin meningkat. Jumlah investor berskala nasional diawal periode tahun 2016 hingga akhir tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan dimudahkannya para pelaku usaha yang ingin berinvestasi yakni ketersediaan lahan dan kemudahan dalam melakukan

pelaporan LKPM terhadap pelaku usaha yang masih dalam bentuk manual. Tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan masih kurangnya kesadaran investor untuk melakukan pelaporan secara online dan meningkat kembali pada tahun 2019 karena sebagian pelaku usaha sudah melakukan pelaporan LKPM secara online. Dengan mewabahnya pandemi covid-19 pada tahun 2020 terjadi penurunan realisasi investasi yang menjadi sebab utama anjloknya investasi diberbagai sektor. Salah satu dampaknya yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tenaga kerja lapangan secara keseluruhan.

Tabel. 2.202.
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Investor/Pengusaha)	359	218	220	410	201

Sumber: DPMPSTP, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Dengan adanya investasi akan menciptakan multi efek yang sangat tinggi dalam perkembangan ekonomi sebagai contoh: apabila investor masuk disuatu daerah dengan mendirikan pabrik maka dampak yang akan diambil manfaatnya yaitu dapat berupa upah/gaji dan keuntungan yang diterima oleh pekerja/pegawai dan pengusaha pabrik. Peningkatan investasi dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap pembangunan ekonomi suatu daerah, selain itu investasi juga memiliki peran sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Apabila investasi mengalami kenaikan maka PDB juga akan mengalami peningkatan.

Investasi adalah sebuah aktifitas menyimpan atau menempatkan asset/dana oleh sebuah perusahaan/perseorangan untuk jangka waktu tertentu tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan memperoleh timbal balik (keuntungan/peningkatan nilai investasi) yang lebih besar dimasa mendatang untuk mencapai tujuan tertentu. Jumlah nilai investasi berskala nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuatif. Pencapaian tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 yang mencapai 58,6 Trilyun Rupiah. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat drastis hingga mencapai 217,9 Milyar Rupiah.

Tabel. 2.203.
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta)	1.749.649	58.602.927	217.997	4.140.280	348.766

Sumber: DPMPTSP, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN pada tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan karena penginputan data pada perusahaan masih bersifat manual, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh banyaknya perusahaan baru yang berinvestasi untuk tahun 2018. Penurunan nilai investasi terjadi karena penginputan data yang sudah memakai sistem online yang mana masih pada tahap pengenalan (pembelajaran) aplikasi LKPM, sehingga masih ada beberapa perusahaan yang belum melaporkan datanya secara online. Tahun 2019 terjadi penurunan jumlah tenaga kerja karena banyak perusahaan yang tidak beroperasi yang disebabkan oleh dampak covid-19 dan tahun 2020 kembali mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja karena perusahaan yang tadinya tutup ditahun tersebut sudah mulai beroperasi kembali. Jumlah PMA/PMDN tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuatif karena masih adanya beberapa perusahaan yang baru buka dan menerima tenaga kerja administrasi tidak melihat dari latar belakang pendidikan dan keterampilannya, sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan oleh dampak covid-19 sehingga banyak perusahaan yang tidak beroperasi.

Tabel. 2.204.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	2236	4035	2170	410	889
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	359	218	220	410	201
3	Rasio daya serap tenaga kerja	6,23	18,50	9,86	1,00	4,42

Sumber: DPMPTSP, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.13 Statistik

1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegritas

Dinas Statistik terbentuk Tahun 2017, Dinas Statistik sebagai walidata daerah adalah unit dalam pemerintah daerah yang melakukan penyebarluasan data tingkat daerah dan mencakup lintas sektor serta menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai walidata daerah Dinas Statistik bertindak sebagai pusat data seluruh Perangkat Daerah.

Dinas Statistik telah mengembangkan aplikasi terintegrasi yang disebut LIDASS (Layanan Data Statistik Sektoral) dari tahun 2019, dimana sistem data statistik sektoral ini berfungsi sebagai database data sektoral perangkat daerah yang dapat disajikan secara cepat dan akurat guna mendorong pelaksanaan kinerja terutama percepatan dalam pembangunan daerah.

Tabel. 2.205.
Tersedianya Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	Tidak	tidak	Ada	Ada

Sumber: Dinas Statistik, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2. Buku “Kabupaten Dalam Angka”

Indikator ini tercapai karena buku Pangkajene dan Kepulauan Dalam angka telah dipublikasikan dan merupakan dokumen penting karena melibatkan data-data dari stakeholder terkait. Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka menyajikan data tentang gambaran keberhasilan pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tiap tahunnya yang dilengkapi dengan tabel dan grafik. Ketersediaan buku Provinsi Dalam Angka, seperti pada tabel berikut.

Tabel. 2.206.
Buku “Kabupaten Dalam Angka” Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku “kabupaten dalam angka”	Ada	Ada	ada	Ada	Ada

Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Buku “PDRB”

Hal ini tercapai karena Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadikan Buku PDRB untuk keperluan perencanaan, evaluasi dan penentuan kebijakan pembangunan daerah. Buku PDRB memegang peranan penting karena perannya sebagai salah satu indikator utama dalam perekonomian. Dengan data pada buku PDRB dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perkonomanian dan tingkat kemakmuran penduduk. Ketersediaan buku PDRB, seperti pada tabel berikut.

Tabel. 2.207.
Buku "PDRB" Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku "PDRB"	Ada	Ada	ada	Ada	Ada

Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.14 Persandian

1. Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunkasi Perangkat Daerah

Sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum ada perangkat daerah yang menggundakan sandi dalam komunikasi, kecuali bidang sandi Dinas Komunikasi dan Informatika yang menggunakan sandi menggunakan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS). Kurangnya perangkat daerah menggunakan sandi dalam berkomunikasi disebabkan karena belum mampunya pemda dalam menetapkan kategori informasi yang dimiliki, apakah masuk dalam kategori informasi dikecualikan. Praktek komunikasi persandian di pemda hakekatnya dapat mrmbantu pemda dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang otentik, utuh dan terbebas dari ancaman kebocoran atau kerusakan informasi dalam rangka pengiriman dan penyimpanannya. Upaya meningkatkan hasil guna praktek komunikasi persandian perlu dilakukan :

- Penguatan dasar hukum yang mengatur tatakelola persandian
- Peningkatan Standard pengamanan system dan jaringan sandi
- Penyediaan sarana dan prasarana persandian dengan standard yang sama
- Sumber daya manusia persandian (sandiman) yang berkualitas

Tabel. 2.208.
Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunkasi
Perangkat Daerah Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (%)	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Kominfo, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.15 Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah meliputi semua atraksi atau pertunjukan seni budaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun dilaksanakan pihak lainnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan maupun diluar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sepanjang kegiatan pertunjukan seni budaya tersebut melibatkan

komunitas budaya, sanggar seni budaya ataupun lembaga adat. Adapun kegiatan yang sering diselenggarakan antara lain : ritual adat mappalili, mappadandang, tammu taung, ma'panre tasi, ma'bissu, kegiatan penerimaan dan penjemputan secara adat, dan kegiatan lainnya seperti: pentas seni budaya daerah, pemilihan putra-putri (Taulolona Taurungkana-Dara Daeng) serta kegiatan seni budaya lainnya yang diikuti baik dalam provinsi maupun luar provinsi seperti Festival seni budaya, kemah seni, parade busana daerah dan lain-lain. Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami penurunan dikarenakan pandemi Covid-19 pada tahun 2020, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk meniadakan penyelenggaraan acara-acara besar yang menimbulkan perkumpulan.

Tabel. 2.209.
Penyelenggaraan festival seni dan budaya Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	13	29	31	28	7

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Sesuai Amanah Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (CB), upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan tugas dan wewenang pasal 95 dan 96 (pendanaan) (pasal 98), antara lain, (1) menetapkan tahapan rencana kerja Pelestarian Cagar Budaya; (2) membentuk Tim Pendaftaran Cagar Budaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai bagian dari registrasi Nasional Cagar Budaya Indonesia. Adapun tugas Tim Pendaftaran Cagar Budaya Kabupaten adalah (a) menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya dan mengkoordinasikan dengan lembaga teknis UPT Kemdikbud Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulsel di Makassar (b) melakukan pendataan lapangan dengan menginventarisir semua warisan budaya benda yang diduga sebagai Cagar Budaya dan (c) menghimpun data Cagar Budaya dan menyampaikan kepada Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (3) membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (2017 sampai sekarang) dan enam anggota tim bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan melakukan pengkajian dan pemeringkatan Warisan Budaya Benda yang diduga Cagar Budaya dan merekomendasikan kepada Bupati untuk segera ditetapkan statusnya sebagai Cagar Budaya melalui SK Bupati.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tersebut dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut ini, dimana indikator pertama merupakan hasil data Cagar Budaya telah dikaji dan direkomendasikan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Daerah untuk ditetapkan statusnya sebagai Cagar Budaya dengan SK Bupati.

Tabel. 2.210.
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	10	18	56	108	108
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0	0	0	6	6

Sumber: Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada tugas dan wewenang Pemerintah Daerah pasal 44 salah satunya adalah menghidupkan kembali (Revitalisasi) dan menjaga ekosistem kebudayaan berkelanjutan, dan pasal 46 salah satunya merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dan pasal 47 (pendanaan), maka Pemerintah Daerah telah melakukan upaya perlindungan dengan menginventarisasi Karya Budaya yang terdiri dari 10 data Objek Pemajuan Kebudayaan : Tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional dan juga melakukan upaya pengembangan dengan melakukan Revitalisasi.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini, dimana indikator pertama adalah jumlah Karya Budaya yang diinventarisasi dan indikator kedua adalah jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi.

Tabel. 2.211.
Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah karya budaya yang dinventarisasi	3	4	138	481	481
2	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi	3	4	5	6	9

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

4. Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu

Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang status awalnya didaftarkan dan dikelola oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan aturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya khususnya pasal 6 ayat 2 yang mengatur tentang pendaftaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah TK. II dan ditetapkan statusnya dengan Peraturan Menteri dan dikelola oleh UPT Kementerian terkait, setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang secara otomatis ikut membatalkan Undang-Undang

sebelumnya termasuk didalamnya telah diatur pembagian tugas dan kewenangan secara berjenjang mulai dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Olehnya itu, maka status pengelolaan situs Cagar Budaya masih dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan hingga saat ini.

Upaya pengembangan situs seperti penelitian dilakukan oleh Puslit Arkenas melalui UPT Balai Arkeologi Makassar Jurusan Arkeologi FIB Unhas. Sementara tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam melestarikan situs Cagar Budaya tersebut mendaftarkan ulang dan mengkaji dan memeringkatkan situs Cagar Budayanya. Selain itu Pemerintah Daerah secara bersama stakeholder terkait melakukan pengawasan, menindaklanjuti dan mengkomunikasikan laporan tentang potensi kerusakan situs yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat maupun sebab lainnya, juga melakukan sinkronisasi program dan pelaksanaan kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan situs seperti pembentukan Tim Pendaftaran terpadu yang melibatkan masing-masing anggota stakeholder terkait dan Penarikan Retribusi Daerah pada situs Cagar Budaya Sumpang Bitu yang dikelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola Cagar Budaya secara terpadu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.212.
Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	9	67	6	6	6

Sumber: Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.16 Perpustakaan

1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Oleh karena itu, tidak keliru ketika Perpustakaan dianggap sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Tabel. 2.213.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan (Orang)	5.492	7.062	9.005	9.029	2.135

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Setidaknya sepanjang tahun 2016-2017, jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terus bertambah. Di tahun 2016, pengunjung perpustakaan dalam satu tahun mencapai 5,942. Peningkatan pengunjung juga terjadi di tahun 2017, dimana jumlah pengunjungnya mencapai 7.062. Tidak berhenti di tahun 2017, pada tahun 2018 pengunjung perpustakaan naik lebih tinggi dari tahun sebelumnya mencapai 9.005. Selain itu pada tahun 2019 pengunjung ke perpustakaan mencapai 9.029. Pada tahun 2020 terjadi kunjungan menurun ke perpustakaan sebesar 2.135, hal ini disebabkan pembatasan akses ke perpustakaan akibat wabah covid 19.

2. Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dari tahun 2016 sampai 2020 terus meningkat, dari 1.959 di tahun 2016 bertambah menjadi 3.726 di tahun 2020. Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah seperti pada tabel berikut.

Tabel. 2.214.
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah (Buku)	1.959	2.131	3.137	3.231	3.726

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Perpustakaan sebagai salah satu media memperoleh pengetahuan, penting untuk diperluas aksesnya dengan cara memperbanyak jumlah perpustakaan sesuai dengan tren pertumbuhan jumlah penduduk. Dalam rentang tahun 2016-2020, terjadi peningkatan rasio ketersediaan perpustakaan persatuan penduduk. Rasio perpustakaan persatuan penduduk di sepanjang tahun 2016 - 2018 sama yaitu 0,65 dan meningkat di tahun 2019 dan 2020 yaitu 0,67 dan 0,69.

Tabel. 2.215.
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perpustakaan	233	235	236	237	239
2	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,65	0,65	0,65	0,67	0,69

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

4. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

Di tahun 2016, jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan sebesar 22,5. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pada tahun 2017 sebesar 26,6. Adapun pada tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun sebesar 34,11 dan terjadi penurunan pada tahun 2019 sebesar 34,2. Pada tahun 2020 jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun menurun sebesar 8,8 yang disebabkan pembatasan akses pengunjung ke perpustakaan akibat wabah covid 19.

Tabel. 2.216.
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun %	22,5	26,6	34,11	34,2	8,8

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

5. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Jumlah koleksi judul buku perpustakaan pada perpustakaan umum daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 terdapat 10.055 judul buku. Hal tersebut ditandai komitmen pemerintah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berupaya meningkatkan sarana berupa bahan pustaka yang memadai sehingga mampu meningkatkan minat baca dan antusiasme masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan.

Tabel. 2.217.
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	1.035	1.079	1.626	1.665	1.930

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

6. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat di Tahun 2020 adalah sebanyak 53 orang dari jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai yaitu sebanyak 350 orang atau 0,15. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 pasal 35 ayat 1 pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi yang bertujuan untuk mengembangkan SDM agar memiliki keahlian yang spesifik dan pengembangan profesionalisme yang berkesinambungan.

Tabel. 2.218.
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	50	50	51	53	53
2	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	275	280	280	325	350
3	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	0.18	0,17	0,18	0,16	0,15

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.17 Kearsipan

1. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Arsip merupakan dokumen penting yang berisi rekaman aktivitas lembaga negara. Oleh sebab itu penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan arsip secara baku atau terstandarisasi. Pada tahun 2020, persentasi perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku meningkat sebesar 66% dimana sebanyak 35 organisasi perangkat daerah dari 50 jumlah organisasi perangkat daerah telah mengelola arsip secara baku. Peningkatan perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku ditunjang oleh dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang rutin melakukan pembinaan organisasi perangkat daerah terkait pengelolaan kearsipan secara baku.

Tabel. 2.219.
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	0	0	15	20	35
2	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	0	0	0,29	0,39	0,66

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terus berupaya untuk memperbaiki pengelolaan arsip agar semua dokumen penting terkait dengan kegiatan

pemerintah realiable dan akurat untuk digunakan. Untuk itu, pemerintah daerah, dalam rentang tahun 2016-2020 terus menambah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Pangkajene dan tahun 2020 telah dilakukan 10 kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan.

Tabel. 2.220.
Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Orang)	0	0	2	5	10

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.3.3 Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.3.1 Pariwisata

1. Lama kunjungan Wisata

Lama kunjungan wisata pada suatu destinasi wisata dipengaruhi oleh ketersediaan informasi yang cukup tentang suatu destinasi wisata bagi wisatawan sehingga memutuskan untuk melakukan eksplorasi lebih mendalam destinasi tersebut. Lama kunjungan wisata di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 mencapai 6 hari. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu menjadi 1 hari. Hal ini diakibatkan oleh pandemi Covid-19, banyak tempat wisata yang ditutup untuk menghindari penyebaran penularan dan terbatasnya aktivitas masyarakat sehingga di tahun 2020 mengalami penurunan.

Tabel. 2.221.
Lama kunjungan Wisata Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Lama Kunjungan Wisata	6	1	2	2	1

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.3.3.2 Pertanian

1. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB dijadikan indikator untuk melihat secara makro peran lapangan usaha pertanian/perkebunan terhadap pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perhitungan indikator ini didasarkan pada nilai tambah yang dihasilkan sektor pertanian/perkebunan pada periode waktu tertentu terhadap total PDRB berdasarkan harga berlaku.

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam kurun waktu 2016 – 2020 cenderung menurun, namun ada peningkatan

pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, hal ini dapat disebabkan oleh menurunnya kontribusi sektor -sektor lainnya terhadap PDRB sementara pertanian malah mengalami peningkatan dalam hal kontribusi karena adanya Pandemi Covid 19 yang berdampak negatif pada sektor – sektor lain sementara pada sektor pertanian tidak terlalu berdampak negative, yaitu petani masih dapat mempertahankan produksinya.

Tabel. 2.222.
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan	713,63	748,30	736,54	739,53	814,78
2	Jumlah PDRB	20.555,57	22.293,96	23.944,89	25.990,18	25.662,55
3	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	3,47	3,36	3,08	2,85	3,17

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB pertanian/perkebunan dimaksudkan untuk mengetahui porsi nilai tambah pertanian (palawija) terhadap total nilai tambah pertanian/perkebunan, sekaligus mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian (palawija) itu sendiri. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor pertanian (palawija) dengan total PDRB pertanian/perkebunan menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor pertanian (palawija) mencakup nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya).

Nilai tambah sector pertanian (pangan dan palawija) menurut harga berlaku selama periode 2016 – 2020 cenderung menurun, namun ada peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, hal ini dapat disebabkan oleh iklim yang mendukung peningkatan produksi tanaman pangan dan palawija, ketersediaan benih/bibit unggul dan pemupukan yang berimbang

Tabel. 2.223.
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija)	18,84	18,86	16,35	14,79	18,74
2	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan	713,63	748,3	736,54	739,53	814,78
3	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	2,64	2,52	2,22	2	2,30

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Kontribusi sector perkebunan terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan sector perkebunan, yang sekaligus menggambarkan besarnya kontribusi nilai tambah yang diciptakan sektor perkebunan terhadap nilai total nilai tambah pertanian/perkebunan. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sector perkebunan dengan total PDRB pertanian/perkebunan menurut harga berlaku. Nilai tambah sector perkebunan mencakup nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas dari tanaman perkebunan baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah mente, kakao, kopi, kemiri, cengkeh, lada, pala dan kapuk.

Nilai tambah sektor perkebunan menurut harga berlaku selama periode 2016 – 2020 relatif stabil, meski dengan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sector pertanian pangan dan palawija.

Tabel. 2.224.
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)	0,57	0,60	0,66	0,59	0,65
2	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan	713,63	748,3	736,54	739,53	814,78
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

4. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi non formal di perdesaan yang ditumbuh kembangkan “dari oleh dan untuk petani”. Keberadaan organisasi non formal ini memiliki peran penting tidak hanya dalam peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani, tetapi juga memberi pengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah, termasuk pada indikator PDRB daerah. Pengaruh keberadaan kelompok tani terhadap perekonomian daerah, terkait fungsi kelompok tani yang diemban yakni sebagai wadah belajar, dengan fungsi ini pengetahuan, keterampilan dan Kerjasama petani dapat meningkatkan efisiensi produksinya serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Sebagai unit produksi; usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kualitas maupun kontinuitas.

Persentase Kontribusi Produksi Kelompok Petani di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap PDRB periode tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan, pada tahun 2020 mencapai 80%. Hal ini disebabkan oleh petani semakin sadar akan manfaat dan pentingnya bergabung dalam sebuah wadah kelompok sehingga hampir semua petani sudah tergabung dalam kelompok tani dan memudahkan penyuluh pertanian untuk mentransfer ilmu dan penerapan teknologi pertanian di lapangan.

Tabel. 2.225.
Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama local hasil kelompok petani (ton)	161.274	177.887	161.509	126.419	165.636
2	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton)	212.202	237.183	224.318	180.598	207.045
3	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	76	75	72	70	80

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

5. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan termasuk sebagai salah satu sentra pengembangan tanaman pangan di Sulawesi Selatan, terutama komoditi padi, Jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau, ubi kayu serta ubi jalar. Peran ini didukung oleh sumber daya lahan berupa lahan sawah seluas 16.732 Ha yang tersebar pada 9 kecamatan daratan.

Produktivitas padi pada tahun 2019 cenderung menurun hal ini disebabkan karena adanya serangan hama penggerek batang pada beberapa kecamatan sebagai dampak dari kondisi iklim yang ekstrim terjadi kekeringan sehingga tanaman menjadi puso (tidak mendapatkan hasil).

Tabel. 2.226.
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	212.202	237.183	224.318	180.598	207.045
2	Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama local lainnya (ha)	33.445	35.965	32.113	31.091	31.829
3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	561,52	576,97	591,51	465,20	580,03

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

6. Cakupan Bina Kelompok Petani

Cakupan bina kelompok petani berdasarkan atas jumlah kelompok tani yang dibina oleh penyuluh pertanian yang mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah, maka jumlah petani yang tergabung dalam kelompok semakin meningkat sehingga memudahkan penyuluh pertanian melakukan pembinaan kelompok yang lebih efektif dan efisien.

Cakupan bina kelompok di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan periode 2016 – 2020 meningkat setiap tahun sebesar 5% berarti bantuan yang diberikan pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah ke kelompok tani meningkat rata-rata 5% per tahun.

Tabel. 2.227.
Cakupan Bina Kelompok Petani Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda	1.344	1.448	1.551	1.655	1.758
2	Jumlah kelompok tani	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068
3	Cakupan bina kelompok petani (%)	65	70	75	80	85

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.3.3.3 Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan

Produksi perikanan adalah perbandingan jumlah produksi ikan dengan target daerah dimana jumlah produksi ikan merupakan cakupan semua hasil penangkapan dan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan termasuk juga kegiatan pembenihan ikan. Tahun 2020 produksi perikanan kab. Pangkajene dan Kepulauan mencapai 442.581,20 ton dimana produksi tersebut mencakup produksi perikanan budidaya sebesar 442.581,20 ton dan produksi perikanan tangkap sebesar 18.194,00 ton. Kenaikan produksi perikanan didukung pada nilai produksi, dimana kontribusi produksi dari sektor perikanan budidaya sebesar 96,05 persen dan perikanan tangkap sebesar 3,95 persen. sehingga berdasarkan data BPS kontribusi PDRB Perikanan tahun 2020 berkontribusi sebesar 16,12 persen dengan nilai PDRB Perikanan berdasarkan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sebesar Rp. 4.003.19 Milyar.

Sebagai daerah maritim, produksi perikanan Kab. Pangkajene dan Kepulauan dapat dikatakan cukup tinggi sehingga merupakan salah satu produsen perikanan terbesar di Sulawesi Selatan. Produksi Perikanan Produksi Perikanan pada tahun 2016 hanya sebesar 237.369,50 ton meningkat sebesar 460.775,20 ton pada tahun 2020. Kenaikan produksi

perikanan ini didukung dengan produksi perikanan budidaya yang juga mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 hanya sebesar 226.369,50 ton meningkat sebesar 442.581,20 ton pada tahun 2020. Sedangkan produksi perikanan tangkap juga mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 hanya sebesar 11.000,00 ton meningkat sebesar 18.194,00 ton pada tahun 2020. Komoditas perikanan yang dikembangkan adalah komoditas seperti Rumput Laut, Udang Windu dan Udang Vaname, Bandeng, Nila, Kepiting Rajungan, Kerapu, Tuna, Cakalang dan komoditas ikan lainnya yang bernilai ekonomis tinggi.

Dalam rangka peningkatan produksi perikanan maka didukung beberapa program pembangunan pada tahun 2020 yaitu: (1) Program pemberdayaan nelayan kecil, melalui kegiatan : Pendidikan, pelatihan, pendampingan nelayan kecil; Kemitraan usaha, ilmu pengetahuan dan informasi nelayan kecil; dan Pembinaan kelembagaan nelayan kecil; (2) Program pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, melalui kegiatan : Pendidikan, pelatihan, pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan; Kemitraan usaha, ilmu pengetahuan dan informasi usaha kecil pembudidayaan ikan; dan Pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan; (3) Program Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, melalui kegiatan : Pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan; Pengelolaan sarana pembudidayaan ikan; dan Pengelolaan pembudidayaan ikan yang baik; dan (4) Program Perizinan usaha perikanan, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, melalui kegiatan : Penerbitan SIUP pembudidayaan ikan; Penerbitan TPUPI dan TPKPIH; dan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI.

Tabel. 2.228.
Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	226.369,50	301.369,50	336.454,10	468.312,30	442.581,20
2	Target Daerah (Ton)	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000
3	Produksi Perikanan (%)	102,90	131,03	140,19	187,32	170,22

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2. Konsumsi Ikan

Persentase konsumsi ikan diperoleh dari jumlah konsumsi ikan dibanding target daerah. Dalam periode 2016-2020 rata-rata mencapai target konsumsi ikan, kecuali tahun 2020. Pencapaian target dari 2016 – 2019 tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan berupa keikutsertaan pada pameran produk perikanan, penyebarluasan informasi melalui promosi dan pameran, lomba masak serba ikan, pengembangan sarana dan prasarana hasil perikanan, dan sosialisasi gemar makan ikan. Pada tahun 2020 target konsumsi ikan hanya mencapai 94,88 %, Hal ini disebabkan karena pandemi Covid 19 yang menyebabkan daya

beli masyarakat menjadi menurun. Disamping itu, terjadinya pandemi covid 19, program kegiatan untuk mendukung pencapaian target tidak berjalan sesuai dengan perencanaan akibat adanya *refocusing* anggaran. Hal ini berdampak pada tidak berjalannya beberapa kegiatan seperti lomba masak ikan, keikutsertaan pada pameran. Satu-satunya kegiatan yang terlaksana dan diharapkan dapat memicu animo masyarakat untuk lebih banyak mengkonsumsi ikan adalah sosialisasi gemar makan ikan.

Tabel. 2.229.
Konsumsi Ikan Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	47,6	47	48	49	46,49
2	Target Daerah (Kg/Kapita/Tahun)	45	46	47	48	49
3	Konsumsi Ikan (%)	105,78	102,17	102,13	102,08	94,88

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan Bina Kelompok Nelayan merupakan indikator yang didapatkan dari jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dibandingkan jumlah kelompok nelayan di daerah. Selama 5 tahun terakhir sekitar 465 kelompok dengan jenis bantuan sarana dan prasarana alat tangkap sesuai permohonan proposal yang diajukan oleh kelompok.

Tahun 2016 kelompok yang mendapatkan bantuan sebanyak 177 kelompok, tahun 2017 yaitu sebanyak 104 kelompok. Kemudian di tahun 2018 kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sebanyak 45 kelompok, tahun 2019 sebanyak 109 kelompok dan tahun 2020 kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sebanyak 35 Kelompok. Cakupan bina kelompok nelayan diarahkan untuk kontribusi terhadap ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan. Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda cenderung mengalami penurunan setiap tahun, disebabkan karena jumlah anggaran yang memang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Indikator ini didukung oleh program pemberdayaan nelayan kecil.

Tabel. 2.230.
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kelompok Nelayan Mendapatkan Bantuan Pemda	177	104	45	109	35
2.	Jumlah Kelompok Nelayan	567	669	758	757	772
3.	Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	31	16	6	14	5

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan merupakan indikator yang didapatkan dari jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan dibandingkan jumlah produksi ikan di daerah. Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan telah memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok nelayan kecil. Produksi kontribusi hasil kelompok nelayan didapatkan berdasarkan data kelompok yang menerima bantuan pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan usulan yang diajukan kelompok nelayan.

Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dimana produksi ikan kontribusi kelompok nelayan pada tahun 2016 sebesar 3.434 ton, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2.348 ton, begitupula pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 990 ton kemudian pada Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 3.283 ton, dan pada tahun 2020 sebesar 3.184 ton.

Data tersebut memperlihatkan kontribusi produksi nelayan berfluktuasi dari tahun 2017 sampai tahun 2020, peningkatan kontribusi produksi yang cukup besar terjadi di tahun 2016 sebesar 31.22 persen hal ini sesuai dengan indikator cakupan bina nelayan dimana tahun 2016 puncak bantuan pemerintah yang diterima oleh nelayan. Kemudian terjadi perlambatan pertumbuhan produksi kontribusi nelayan pada tahun selanjutnya karena terjadinya penurunan jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan pemda. Oleh karena itu perlu diupayakan pembinaan kepada kelompok nelayan secara optimal dengan melakukan koordinasi dengan Penyuluh perikanan kemudian pendataan produksi kelompok nelayan dilakukan secara efektif dan berkala. Indikator ini didukung oleh program pemberdayaan nelayan kecil.

Tabel. 2.231.
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan (ton)	3.434	2.348	990	3.283	3.184
2.	Jumlah Produksi Ikan di Daerah (ton)	11.000	15.110,9	16.676,1	22.806	18.194,4
3.	Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)	31,22	15,54	5,94	14,40	17,50

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

5. Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman

Dari tahun 2016 sampai dengan saat ini, proporsi tangkapan ikan di kab. Pangkajene dan Kepulauan masih berada dalam batasan biologis yang aman. Dalam kerangka menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan nasional, proporsi tangkapan ikan harus dipertahankan untuk berada dalam batasan biologis yang aman.

Pada tahun 2016, jumlah tangkapan ikan sebesar 11.000 ton mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 15.110,9 ton. Kemudian di tahun 2018 kembali mengalami peningkatan sebesar 15.203,6 ton, tahun 2019 sebesar 22.218,07 ton dan mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 17.096,5 ton. Potensi lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) sumber daya perikanan tangkap tahun 2011 untuk nasional diperkirakan 6,4 juta ton per tahun dan untuk propinsi Sulawesi Selatan dengan potensi 929,7 ribu ton per tahun, sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan (Total Allowable Catch/jumlah tangkapan yang diperbolehkan/JTB) adalah 80 persen dari MSY atau sebesar sebesar 656,37 ton per tahun. Jumlah total hasil tangkapan ikan dari laut adalah penjumlahan dari produksi semua jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan. Data MSY ini diperoleh dari Komisi Nasional Pengkajian Ikan sehingga batasan biologis berada pada kategori aman dimana proporsi tangkapan ikan Kab. Pangkajene dan kepulauan masih dibawah 100 persen. Ini menunjukkan bahwa masih dapat dikendalikan atau tidak melebihi 100 persen dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch/TAC). Manfaat Indikator ini digunakan untuk memantau kelestarian sumberdaya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan ikan.

Tabel. 2.232.

Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tangkapan ikan	11.000	15.110,9	15.203,6	22.218,07	17.096,5
2	80% dari tangkapan maksimum lestari	656,37	656,37	656,37	656,37	656,37
3	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	16,76	23,02	23,16	33,85	26,05

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

6. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Luas kawasan lindung perairan di Kab. Pangkajene dan kepulauan sebesar 66.870 Ha, dengan rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial adalah 5,83 %. Upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat

ekosistem, jenis dan genetik termasuk penguatan fungsi otoritas pengelolaan konservasi sumberdaya ekosistem dan habitat laut.

Tabel. 2.233.
Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kawasan lindung perairan	66.870	66.870	66.870	66.870	66.870
2	Total luas perairan teritorial	1.146.998	1.146.998	1.146.998	1.146.998	1.146.998
3	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.3.4 Penunjang Urusan

2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

1. Dokumen Perencanaan Pembangunan

Tabel. 2.234.
Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	ada	ada	ada	ada
2.	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	ada	ada	ada	ada
3.	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	ada	ada	ada	ada
4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah telah tersedia dimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006 – 2025.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah tersedia. RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2021 dan juga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017;
- Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018;
- Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019;
- Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;
- Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021;

Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam rentang tahun 2016- 2020 telah tersedia.

2. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah jumlah program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Dari tahun 2016 sampai dengan 2018, konsistensi program RPJMD kedalam RKPD mengalami penurunan, namun mulai meningkat di tahun tahun 2019 dan 2020, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.235.

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	610	468	547	476	489
Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	447	443	607	505	512

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	136	105,6	89,29	94,26	95,50

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD

Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD RPJMD dari tahun 2018-2020 mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan penjabaran konsistensi program RKPD dalam APBD telah terpenuhi.

Tabel. 2.236.

Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	610	468	547	476	489
Jumlah program APBD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	555	467	542	476	489
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	90,98	99,78	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

4. Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW

Tabel. 2.237.

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang	40	38	45	45	47
Dokumen RTRW	51	51	51	51	51
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	74,83	74,51	88,24	88,24	92,16

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW rentang tahun 2018-2019 adalah sebesar 88,24 dimana sebanyak 45 kesesuaian program/ kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang terhadap 51 dokumen RTRW. Adapun pada tahun 2020 kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW meningkat 92.16 dimana sebanyak 47 kesesuaian program/ kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang terhadap 51 dokumen RTRW.

2.3.4.2. Keuangan

1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan dan Penetapan APBD

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar

akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal dimana telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan komitmen dari seluruh manajemen organisasi perangkat daerah (OPD) untuk secara konsisten menjaga dan mentaati aspek – aspek penting dalam siklus pengelolaan keuangan Pemerintah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan hingga Tahun 2020 mendapat Predikat WTP.

Tabel. 2.238.
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan dan Penetapan APBD
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2. Persentase SILPA

Berdasarkan data table, diketahui bahwa persentase SiLPA Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bersifat fluktuatif namun secara persentase masih tinggi. Ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan masih harus diperbaiki kembali, karena pemanfaatan dana yang baik seharusnya menghasilkan SiLPA yang minimal tiap tahunnya. Karena sebagaimana diketahui, SiLPA merupakan penutup defisit anggaran tahun berjalan yang maksimal hanya 2% dari total Pendapatan.

Tabel. 2.239.
Persentase SILPA
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Total SILPA (Milyar)	48,71	64,58	37,38	70,36	53,97
Total APBD (Milyar)	1.400,76	1.359,08	1.370,00	1.405,34	1.348,74
Persentase SILPA (%)	3,48	4,75	2,73	5,01	4,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Persentase Belanja Pendidikan

Berdasarkan data table, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah memenuhi belanja pendidikan berdasarkan amanat Undang-Undang, dimana persentase belanja pendidikan telah memenuhi rata-rata minimal dalam Undang-Undang Pendidikan minimal sebesar 20% dari pagu pendapatan. Hal ini terlihat dari persentase belanja pendidikan pada tahun 2016 sebesar 30,45 persen dan pada tahun 2020 mencapai 28,06 persen. Semakin tinggi belanja bidang pendidikan, diharapkan akan

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten Pangkep kedepannya.

Tabel. 2.240.
Persentase Belanja Pendidikan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan (Milyar)	426,47	411,67	397,65	416,11	378,52
Persentase belanja pendidikan (20%)	30,45	30,29	29,03	29,61	28,06

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

4. Persentase Belanja Kesehatan

Belanja kesehatan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2016 sebesar 16,25 persen, meningkat di tahun 2017 dan 2018 sebesar 19,82 persen dan 18,36 persen. Persentase ini terus meningkat di tahun 2020 mencapai 19,58 persen. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase belanja kesehatan diatas rata-rata minimal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan minimal sebesar 10% dari pagu pendapatan. Semakin tinggi belanja bidang kesehatan, diharapkan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten Pangkep kedepannya.

Tabel. 2.241.
Persentase Belanja Kesehatan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan (Milyar)	227,58	269,34	251,53	265,73	264,05
Persentase belanja kesehatan (10%)	16,25	19,82	18,36	18,91	19,58

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

5. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan data 5 tahun terakhir, proporsi belanja tidak langsung masih lebih dominan dibanding belanja langsung mulai dari 51,84% pada tahun 2016, pada tahun 2017 menjadi 50,58%, pada tahun 2018 sebesar 47,80%, pada tahun 2019 menjadi 42,97%, dan pada tahun 2020 sebesar 38,43%. Selama periode tersebut, komponen belanja tidak langsung yang bertumbuh pesat ditunjukkan pada alokasi belanja pegawai khususnya terkait kebijakan pemberian tunjangan kinerja ASN, belanja hibah dan belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota yang sekitar 90% lebih mendominasi pada komponen BTL ini. Sedangkan alokasi untuk belanja langsung cenderung mengalami penurunan selama periode 2016-2020, dimana salah satu faktornya adalah pembatasan pemberian honorarium kegiatan. Namun, yang perlu juga dicermati ulang adalah mengenai penetapan indikator ini yang sudah tidak relevan lagi digunakan, dengan terbitnya Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengganti PP Nomor 58 Tahun 2005, yang tidak lagi menggunakan kategori belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam struktur belanja daerah, tapi mengklasifikasi belanja daerah berdasarkan komponen belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Tabel. 2.242.
Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Belanja Langsung (Milyar)	726,56	677,13	666,07	592,80	521,06
Jumlah Belanja Tidak Langsung (Milyar)	674,91	661,67	727,26	786,92	834,86
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	92,89	97,72	109,19	132,75	160,22

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

6. Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa

Bagi hasil kabupaten/ kota dan desa Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2016 sebesar 4,31 persen meningkat di tahun 2017 sebesar 9,55 persen. Pada tahun 2018 sampai dengan 2020 Dana bagi hasil mencapai 10,08 persen dan 10,64 persen di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa dana bagi hasil Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah memenuhi amanat Undang-Undang yaitu minimal sebesar 10 Persen untuk pemerintahan desa.

Tabel. 2.243.
Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/ kota/ desa (Milyar)	61,19	128,60	141,17	151,84	145,13
Bagi hasil kabupaten/ kota dan desa (%)	4,37	9,46	10,30	10,81	10,76

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.3.4.3. Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan

1. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan

Tabel. 2.244.
Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (bulan)	1 s/d 3	1 s/d 3	1 s/d 3	1 s/d 3	1 s/d 3

Sumber: BKPSDM Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2. Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Selama 5 (lima) tahun capaian persentase keikutsertaan ASN dalam pendidikan dan pelatihan masih rendah, hal ini disebabkan karena belum adanya penekanan pengikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan 15 JP/Tahun bagi setiap ASN dan belum adanya Peraturan Bupati tentang pelaksanaan diklat satu pintu, sehingga data ASN yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional yang dilaksanakan oleh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak dapat diketahui oleh BKPSDM.

Tabel. 2.245.
Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang)	92	50	69	87	101
2	Jumlah total ASN (Orang)	5.933	5.830	5.572	5.836	5.810
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	1,55	0,85	1,23	1,49	1,74

Sumber: BKPSDM Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural

Tabel. 2.246.
Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	40	40	50	47	43
2	Jumlah total jabatan	1.028	1.125	1.078	1.083	1.106
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	3,89	3,55	4,63	4,33	3,88

Sumber: BKPSDM Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun masih rendahnya capaian persentase keikutsertaan ASN dalam pendidikan dan pelatihan struktural, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan struktural tersebut.

4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Tabel. 2.247.
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (Jabatan)	35	41	41	41	42

Sumber: BKPSDM Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Pada tabel di atas terlihat adanya peningkatan jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan periode tahun 2016 s/d 2017 yakni dari 35 jabatan menjadi 41 jabatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, badan/dinas (33 SKPD), rumah sakit umum daerah. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami perubahan yaitu penambahan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

5. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Tabel. 2.248.
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah (Jabatan)	2442	2457	2199	2505	2587

Sumber: BKPSDM Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Pada tabel di atas tampak penurunan terjadi dari tahun 2017 ke tahun 2018 disebabkan jumlah pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP). Disamping itu sebagai implikasi dari diterapkannya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yakni adanya pengalihan urusan dari kab/kota ke provinsi. Selanjutnya juga diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mencakup penyerahan urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kab/kota). Salah satu penyerahan tersebut adalah pengalihan PNS ke Kementerian dan Provinsi. Pengalihan PNS atau personil tersebut hanya bagi PNS atau jabatan fungsional yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dialihkan dari kab/kota ke provinsi. PNS tersebut diantaranya memiliki tugas sebagai Pengawas tenaga kerja, Guru SMA dan SMK, Penyuluh Kehutanan,

Polisi Kehutanan. Adapun dari tahun 2019 s/d 2020 terjadi kenaikan karena adanya seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.

6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Tabel. 2.249.
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Orang)	3.627	3.550	3.464	3.370	3.293

Sumber: BKPSDM Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan jumlah pemangku jabatan fungsional yang setiap tahunnya mengalami tren penurunan yang disebabkan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun lebih besar dibandingkan dengan jumlah pegawai yang beralih (diangkat) ke dalam jabatan fungsional.

2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

1. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Tabel. 2.250.
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kelitbangan dalam RKPD	0	5	10	14	16
Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	0	25	25	25	25
Persentase implementasi rencana kelitbangan (%)	0	33,33	65,57	88,89	94,12

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Pada dasarnya penelitian dan pengembangan harus berjalan seiring dan sejalan dengan pembangunan termasuk di tingkat daerah. Hasil-hasil penelitian dan pengembangan, secara valid harus mampu menopang seluruh kerangka pembangunan. Perencanaan partisipatif selalu disuarakan sebagai model terbaik, dari hasil perencanaan *bottom-up*, program yang diusulkan masyarakat, dengan versus hasil perencanaan *top-down*, program yang diusulkan pemerintah. Namun kedua model perencanaan tersebut sama-sama tidak memiliki basis data yang cukup kuat dan lengkap (*speculative conjecture*) untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas. Sekelumit persoalan yang dialami selama ini, dapat diselesaikan dengan pendekatan berbasis penelitian dan kajian, untuk mencari model-model kebijakan berkualitas terkait pencapaian arah pembangunan yang jelas dan terukur.

Hal tersebut didukung oleh para pemangku kepentingan utama dalam penelitian dan pengembangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sangat kaya dan beragam. Walaupun mensinergikan sumber daya kelitbangan yang kaya tidaklah mudah, akan tetapi

dikarenakan ini tetap menjadi kebutuhan bagi pembangunan daerah, maka semua hal tersebut dapat terimplementasikan dengan baik.

2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Tabel. 2.251.
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti	0	0	2	4	5
Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	0	0	7	13	16
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	0	0	46,84	48,84	45,96

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Dengan melihat tabel diatas, selama 2 (dua) tahun terakhir persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan mengalami kenaikandan pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 45,96%, diakibatkan adanya pandemi COVID-19, guna menerapkan pemanfaatan hasil kelitbangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki beberapa kebijakan terutama terhadap beberapa produk unggulan seperti pengolahan rumput laut, pengolahan dan pemasaran komoditas jeruk dan ikan bandeng, budidaya dan pemasaran garam dan udang.

3. Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Tabel. 2.252.
Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	0	8	23	53	23
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	0	16	46	100	46

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

4. Persentase kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah

Tabel. 2.253.
Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	0	83	122	137	162
Jumlah Inovasi yang diusulkan	0	109	159	199	239
Persentase kebijakan inovasi yangditerapkan di daerah (%)	0	126,91	125,79	109,28	99,68

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Bahwa dalam rangka penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai upaya mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menetapkan judul inovasi dan inovator dalam Surat Keputusan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 623 Tahun 2020.

Salah satu capaian Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 18 Desember 2020 meraih Piagam Penghargaan dan Piala sebagai Kabupaten Sangat Inovatif dalam *Innovative Government Award (IGA)* 2020 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2.3.4.5. Pengawasan

1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. Terkait dengan adanya temuan hasil pemeriksaandikarenakan pelaksanaan kegiatan tidaksesuai dengan peraturan yang berlaku yang disebabkan karena kurangnya kemampuan sumberdaya manusia aparatur di masing-masing perangkat daerah dalam memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku khususnya bagi para pegawai pengelola keuangan. Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2019 presentase tindak lanjut temuan mengalami tren peningkatan dan pada tahun 2020 angka persentase tindak lanjut temuan sama dengan tahun 2019 yaitu 77,00% hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel 2.254 dibawah ini. Angka peningkatan capaian kinerja indikator penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan disebabkan antara lain adanya respon dan koordinasi aktif dari perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan dan peran aktif Tim Tindak Lanjut Inspektorat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel. 2.254.

Persentase Tindak Lanjut Temuan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	98	146	156	121	154
Jumlah total temuan	137	199	208	157	200
Persentase tindak lanjut temuan (%)	71	73	75	77	77

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Selanjutnya terkait dengan indikator persentase tindak lanjut temuan ini diukur berdasarkan jumlah PNS yang direkomendasikan mendapatkan Sanksi Disiplin dibandingkan dengan total pegawai Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Berdasarkan capaian indikator dari tahun 2016 sampai dengan 2020 pelanggaran pegawai yang ada mengalami fluktuasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.255. Hal ini tergantung dari adanya laporan yang dikategorikan sebagai perbuatan indisipliner yang diadukan oleh kepala perangkat daerah supaya dilakukan pemeriksaan khusus kepada yang bersangkutan. Diharapkan ke depan dampak dari sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran disiplin dapat lebih meningkatkan kesadaran pegawai dalam mentaati peraturan- peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS sehingga pengaduan atau laporan terhadap pelanggaran disiplin pegawai dapat lebih diturunkan. Capaian Indikator ini, mengandung makna, bahwa jumlah pelanggaran Pegawai semakin meningkat di 3 tahun terakhir yaitu 2018, 2019 dan 2020. Berikut perkembangan Persentase Persentase Pelanggaran Pegawai dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.255.
Persentase Pelanggaran Pegawai
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ASN yang dikenai sanksi	5	2	10	13	14
Jumlah total ASN	5933	5830	5572	5836	5810
Persentase pelanggaran pegawai (%)	0.08	0.03	0.18	0.22	0.24

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Jumlah Temuan BPK

Perkembangan jumlah temuan oleh BPK dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan dikarenakan pada Tahun 2020 BPK melakukan pemeriksaan dua kali yaitu Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Audit Dengan Tujuan Tertentu sehingga jumlah temuan meningkat di Tahun 2020, sebagaimana dapat dilihat pada tabel

Tabel. 2.256.
Jumlah Temuan BPK
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah temuan BPK	372	395	435	462	482

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.3.4.6 Sekretariat Dewan

Kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan telah menunjukkan adanya sinergitas antara program kerja pemerintah daerah dan DPRD yang diindikasikan dengan ketersediaan rencana kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD.

Terintegrasinya program kerja pemerintah daerah dan DPRD yang diindikasikan dengan tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD) telah tercapai sejak tahun 2016-2020.

Kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi, meliputi fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan telah terlaksana mulai tahun 2016-2020 dan dilihat dari output yang dihasilkan yaitu Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Tabel. 2.257.
Sekretariat Dewan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita

Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non makanan Rumah Tangga perkapita pada periode 2019-2020 mengalami fluktuasi, bahkan menurun secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini telah dipengaruhi beberapa faktor yaitu pola konsumsi yang tidak terlepas dari pola pendapatan. Di tahun 2019 sampai dengan 2020 ada perubahan pola pendapatan masyarakat, dengan adanya pandemic COVID-19 dan berdampak pada sektor usaha, sehingga memberi dampak pada pendapatan perkapita masyarakat yang rendah

atau menurun yang berpengaruh pada pola konsumsi masyarakat. Pada tahun 2019 pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita sebesar 927.619 rupiah menjadi 910.459 rupiah di tahun 2020.

Tabel. 2.258.
Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Rumah Tangga per kapita
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per kapita (Rp)	719.649	860.812	1.001.377	927.619	910.459

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.4.2 Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan turun drastis dalam satu tahun terakhir, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, indeks penerimaan petani lebih rendah dari indeks pengeluaran petani. Penyebabnya adalah kebutuhan operasional untuk masa tanam dibelanjakan pada akhir tahun 2019, dimana harga kebutuhan operasional petani masih tinggi. Sedangkan panen dilakukan pada tahun 2020, dimana telah terjadi penurunan nilai jual produk pertanian akibat adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan bepergian skala besar yang juga merupakan dampak dari pandemic COVID-19. Sehingga pada tahun 2020 berdampak pada turunnya kesejahteraan petani di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel. 2.259.
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks yang diterima Petani (It)	130,22	131,47	138,12	141,52	102,79
2	Indeks yang dibayar Petani (Ib)	125,30	129,26	133,70	135,53	105,37
3	Rasio	103,93	101,71	103,31	104,42	97,56

Sumber: BPS, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.4.3 Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita

Tabel. 2.260.
Pengeluaran Konsumsi Bukan Makanan Perkapita Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan Perkapita (Rp)	719.649	860.812	1.001.377	927.619	408.452
2	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	52,72	49,51	47,70	48,17	44,86
3	Rasio Ketergantungan (%)	52,80	52,39	52,07	51,82	51,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.4.4 Produktivitas Total Daerah

Produktivitas daerah telah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penerimaan sektor usaha yang sangat dinamis, yang disebabkan tidak menentunya harga komoditi atau hasil produksi di pasaran. Hal mendasar yang mempengaruhi ketidakpastian pasar adalah kebijakan yang diambil pemerintah, terlebih lagi dalam dua tahun terakhir ini pandemi COVID-19 yang melanda semua Negara. Bahkan Indonesia yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, begitu juga dengan biaya operasional lima tahun terakhir ini sangat tinggi yang di picu oleh berfluktuasinya bahan-bahan kebutuhan operasional produksi rendah akibat turunnya produksi yang dihasilkan daerah sedangkan biaya operasional cukup tinggi. Pada tahun 2019 produktivitas daerah turun drastis sampai tahun 2020. Dimana dari tahun 2019 sampai 2020 penjualan hasil produksi mengalami penurunan akibat kurangnya daya beli masyarakat dan tingginya inflasi akibat kelangkaan barang di pasaran.

Tabel. 2.261.
Produktivitas Total Daerah Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produktivitas Total Daerah	152,49	155,24	153,89	171,14	153,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.4.5 Presentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Desa yang mengalami swasembada terus mengalami peningkatan lima tahun terakhir ini, namun belum optimal karena desa yang berada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berjumlah 65 desa baru sekitar 8 atau 7 desa sudah berstatus swasembada atau sekitar 7,7 persen. Faktor yang mempengaruhi adalah masih banyaknya desa tertinggal dibanding yang sudah mandiri, kurangnya program kegiatan di desa yang fokus pada kemandirian desa atau padat karya. Selain itu perekonomian di desa kurang baik pertumbuhannya, disebabkan belum adanya strategi pengembangan ekonomi kerakyatan yang melibatkan penduduk desa. Tidak optimalnya usaha milik desa yang diharapkan dapat mendorong perekonomian di desa.

Tabel. 2.262.
Presentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Presentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa (%)	1,53	1,53	1,53	4,61	7,7

Sumber: Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.4.6 Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Rasio antara PDRB dan nilai ekspor dan impor di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami kenaikan yang cukup baik dalam lima tahun terakhir ini, walau masih sekitar 40 persen lebih. Kontribusi ekspor dan impor di tahun 2020 masih belum optimal. Beberapa faktor penyebab yaitu nilai ekspor produk daerah belum terkelola dengan baik, seperti masih rendahnya mutu produksi untuk standar ekspor, sehingga berakibat pada rendahnya daya saing produk. Begitu juga dengan nilai impor daerah belum ada kebijakan yang lebih strategis, idealnya perbandingan antara nilai ekspor dan impor di daerah terhadap PDRB antara 50 – 60 persen, dimana nilai Impor dan Ekspor dapat memberikan pertumbuhan terhadap PDRB.

Tabel. 2.263.

Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi) (%)	41,75	41,46	38,52	38,07	40,17

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.4.7 Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum

Perbankan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sangat dinamis selama lima tahun terakhir. Kondisi perbankan masih dapat dikategorikan kurang baik atau perbankan kurang sehat. Loan perbankan rata-rata di atas 110 persen sedangkan batas loan untuk perbankan yang sehat adalah 110 sampai dengan 85 persen. Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya fluktuasi loan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diantaranya resiko kredit yaitu tingginya nilai kredit perbankan dari pada simpanan perbankan sehingga dikhawatirkan perbankan mengalami liquid. Faktor lain yang mengakibatkan rasio pinjaman terhadap perbankan adalah sektor usaha besar mengalami penurunan penerimaan, akibat rendahnya daya beli masyarakat begitu dengan strategi kepatuhan dan operasional yang belum optimal.

Tabel. 2.264.

Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum	208,3	113,92	173,57	348,84	187,82

Sumber: Bank Swasta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.4.8 Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di BPR

BPR di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sangat dinamis selama lima tahun terakhir kondisi perbankan masih dapat di kategorikan baik atau perbankan sehat. Loan

perbankan rata-rata di atas 70 - 92 persen dalam dua tahun terakhir. Sedangkan batas loan untuk perbankan yang sehat adalah 110 sampai dengan 85 persen. Faktor – faktor yang berpengaruh pada terjadinya fluktuasi loan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk BPR masih stabilnya BPR diakibatkan pada modal yang masih kuat, strategi kebutuhan optimal kredit kemungkinan hanya dilakukan oleh usaha kecil dalam jumlah yang kecil.

Tabel. 2.265.
Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di BPR Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di BPR	167,09	134,06	147,61	70,91	91

Sumber: Bank BPR Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.4.9 Angka Kriminalitas yang Tertangani

Tabel. 2.266.
Angka Kriminalitas Yang Tertangani Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kriminalitas yang Tertangani	0	5	4	4	2

Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Jumlah kriminal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, pada tahun 2020 angka kriminal yang tertangani hanya dua kasus atau turun sekitar 50% tadi tahun sebelumnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya angka kriminal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diantaranya, menurunnya tingkat pengangguran musiman yang terjadi pada waktu waktu tertentu dalam satu tahun dimana di ketahui pengangguran merupakan motif yang besar melakukan Tindakan kriminalitas yang terjadi di masyarakat, begitu juga dengan angka kemiskinan yang turun di tahun 2020.

2.5. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2020

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2016 -2020 diukur melalui indikator kinerja menunjukkan bahwa dari 286 indikator yang diukur, terdapat 16 indikator yang telah melampaui target yang ditetapkan tahun 2020, 67 indikator yang sesuai target 2020 dan 203 indikator yang belum mencapai target 2020. Pada aspek kesejahteraan masyarakat terdapat 19 Indikator yang diukur. Terdapat 3 indikator yang sesuai target dan 16 indikator yang belum mencapai target,

sedangkan pada aspek daya saing terdapat 10 Indikator yang diukur, satu indikator melampaui target dan satu indikator sesuai target, sebagian indikator masih belum mencapai target sehingga peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah merupakan faktor penting dan menjadi salah satu titik berat pembangunan daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan tahun 2022-2026. Disamping pengukuran kinerja dari kedua aspek tersebut di atas yang menggambarkan kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, pengukuran capaian aspek pelayanan umum yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2016-2020 dengan berbagai indikator dan capaiannya sebagaimana pada table berikut:

Tabel. 2.267
Capaian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2016 – 2020

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Indikator 2020	Realisasi Kinerja					Interprestasi Belum Tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
				Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Tingkat Kemiskinan	%	14,50-15,80	16,22	16,22	15,1	14,06	13,96	Melampaui
2	Pertumbuhan PDRB	%	8,2-9.5	8,31	6,6	4,76	6,41	-1,69	Belum Tercapai
3	Inflasi		4,5-5,5	3,18	4,48	3,48	2,43	2,04	Melampaui
4	PDRB Perkapita	Juta	86,9	62,91	67,6	71,98	77,48	75,88	Belum Tercapai
5	Rasio Gini		0,33	0,417	0,368	0,321	0,328	0,345	Belum Tercapai
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	70,61	66,86	67,25	67,71	68,29	68,72	Belum Tercapai
7	Tingkat pengangguran terbuka	%	6	n/a	7,05	6,91	5,41	5,18	Belum Tercapai
8	Angka melek huruf	%	100	93,37	96	91,6	92,9	91,5	Belum Tercapai
9	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,88	7,33	7,48	7,49	7,6	7,66	Belum Tercapai
10	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12	12,39	12,4	12,41	12,42	12,76	Belum Tercapai
11	Angka usia harapan hidup	%	69,61	65,77	65,86	66,12	66,49	66,66	Belum Tercapai
12	Persentase balita gizi buruk	%	0	0,116	0,31	0,138	0,069	0,0176	Belum Tercapai
13	Prevalense balita gizi kurang	%	0	0,02	0,01	0,01	0,08	0,09	Belum Tercapai
14	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	99	94	91	98	96	100	Melampaui
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	90,89	n/a	89,26	89,8	90,16	89,85	Belum Tercapai
16	Indeks Reformasi Birokrasi		CC	N/a	C	C	N/a	C	Belum Tercapai
17	Indeks kepuasan Masyakat	%	90	71,59	74,44	77,4	80,48	83,68	Belum Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Indikator 2020	Realisasi Kinerja					Interprestasi Belum Tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
				Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	
18	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	%	60	13,73	32,34	61,84	64,11	67,4	Melampaui
19	Emisi gas rumah kaca (GRK)	CO2 eq gg/thn	7800	9162,35	11210,72	9570,38	8642,69	N/a	Belum Tercapai
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Pelayanan Dasar								
1	Pendidikan								
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								
1.1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	55,75	43,84	46,28	48,36	50,63	82,03	Melampaui
1.2.	Angka Partisipasi Kasar								
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	100	105,16	106,58	105,43	106,61	97,26	Belum Tercapai
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	100	105,16	108,74	102,35	107,73	89,64	Belum Tercapai
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan (SD/MI dan SMP/MTs)								
1.3.1	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) SD/MI	%	20,08	15,6	18,46	17,18	17,82	17,07	Belum Tercapai
1.3.2	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) (APK) SMP/MTs	%	32,63	24,08	25,53	26,93	34,97	25,07	Belum Tercapai
1.4.	Angka Partisipasi Murni								
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	96,28	91,51	91,57	91,25	91,15	91,76	Belum Tercapai
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80,11	67,72	72,32	74,3	75,67	78,4	Belum Tercapai
1.5.	Angka Partisipasi Sekolah								
1.5.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,5	87,57	88,71	90,13	91,06	92,75	Belum Tercapai
1.5.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	66,8	57,88	61,63	72,37	88,59	90,75	Melampaui
1.6.	Angka Putus Sekolah:								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Indikator 2020	Realisasi Kinerja					Interprestasi Belum Tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
				Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	
1.6.1.	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI	%	0,08	0,13	0,14	0,13	0,11	0,1	Belum Tercapai
1.6.2.	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	%	0,24	0,39	0,36	0,33	0,32	0,3	Belum Tercapai
1.7.	Angka Kelulusan:								
1.7.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	98,22	100	100	100	100	100	Melampaui
1.7.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	99,54	99,08	99,55	100	100	Sesuai
1.8.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar								
1.8.1.	Rasio tiap per 10.000 penduduk SD/MI	Per 10.000	95	78	84	80	92	82	Belum Tercapai
1.8.2.	Rasio tiap per 10.000 penduduk SMP/MTs	Per 10.000	65	48	51	54	67	57	Belum Tercapai
1.9.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar								
1.9.1.	Rasio guru/murid SD/MI		12	14	12	15	13	13	Melampaui
1.9.2.	Rasio guru/murid SMP/MTs		10	13	11	12	10	10	Sesuai
1.10.	Perkembangan Angka melek huruf	%	100	96,37	97,28	98,76	98,94	99,5	Belum Tercapai
1.11.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV								
1.11.1.	Persentase Guru berkualifikasi S1 Keatas SD/MI	%	100	86,3	84,1	88,8	89,5	90,2	Belum Tercapai
1.11.2.	Persentase Guru berkualifikasi S1 Keatas SMP/MTs	%	100	90,7	96	96,7	97,6	98,1	Belum Tercapai
2	Kesehatan								
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000	5	2,91	2,9	3,11	2,1	3,17	Melampaui
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi per 1000 Kelahiran	Per 1.000	995	997,09	997,1	996,9	997,9	996,73	Melampaui
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000	1,5	1,55	0,03	0,14	0,09	0,19	Belum Tercapai
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000	10	8,74	11,82	8,28	9,15	7,23	Melampaui
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Per 100.000	3	1,36	2,13	2,24	2,25	1,05	Melampaui

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Indikator 2020	Realisasi Kinerja					Interprestasi Belum Tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
				Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	
2.6.	Rasio posyandu per 1000 balita	Per 1.000	15	10,63	11,42	12,8	11,36	14,68	Melampaui
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk	Per 1.000	0,3	0,25	0,27	0,25	0,24	0,24	Melampaui
2.8.	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	Per 1.000	0,00618	0,003074	0,003317	0,003122	0,005711	0,005683	Melampaui
2.9.	Rasio dokter per 1000 penduduk	Per 1000	14,22	0,13	0,15	0,11	0,19	0,39	Belum Tercapai
2.10.	Rasio tenaga medis per 1000 penduduk	per 1000	14,22	0,3	0,28	0,27	0,19	0,39	Belum Tercapai
2.11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	77	63,25	64,95	63,9	86	61,57	Belum Tercapai
2.12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	95	89,32	96,6	85,8	91,05	61,57	Belum Tercapai
2.13.	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	100	95	95	96	96	81,6	Belum Tercapai
2.16.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.15.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	0	0	0	0	0	0	Sesuai
2.16.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	98	97	89	91	95	86	Belum Tercapai
2.17.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000	1	1	0	3	2	1	Sesuai
2.18.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.20.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000	150	184	270	217	232	169	Belum Tercapai
2.21.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000	30	4	7	6	9	17	Belum Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Indikator 2020	Realisasi Kinerja					Interprestasi Belum Tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
				Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	
2.22.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	80	41	57	51	73	54	Belum Tercapai
2.23.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	95	87	91	87	88	88	Belum Tercapai
2.24.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.25.	Penderita diare yang ditangani	%	100	100	100	59	74	49	Belum Tercapai
2.26.	Angka kejadian Malaria	Per 100.000	0,1	16,29	23,55	9,05	6,85	3,12	Belum Tercapai
2.27.	Tingkat kematian akibat malaria	Per 1000	0	0	0	0	0	0	Sesuai
2.28.	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0	0	0	0	0	0	Sesuai
2.29.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	0	0	0	0	0	0	Sesuai
2.30.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,0014	0,0007	Melampaui
2.31.	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.32.	Propors jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.33.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	5,18	4,58	4,41	9,41	9,29	Belum Tercapai
2.34.	Cakupan kunjungan bayi	%	98	96,93	96,62	101,2	91,6	99,1	Melampaui
2.35.	Cakupan puskesmas	%	184,62	176,9	176,9	176,9	176,9	176,9	Belum Tercapai
2.36.	Cakupan pembantu puskesmas	%	57,28	58,2	58,2	58,2	58,2	59,2	Melampaui
2.37.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	97	89,68	91,77	86,58	91,3	89,09	Belum Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Indikator 2020	Realisasi Kinerja					Interprestasi Belum Tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
				Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	
2.38.	Cakupan pelayanan nifas	%	94	88,14	90,02	85,8	92,9	89,91	Belum Tercapai
2.39.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	65	60,18	40,66	53,4	55,4	49,82	Belum Tercapai
2.40.	Cakupan pelayanan anak balita	%	78	70,97	71,09	74	75,2	69,51	Belum Tercapai
2.41.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	0	0	0	0	0	0	Sesuai
2.42.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	90	90,58	84,62	39,8	78,6	76,5	Belum Tercapai
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	74,55	78,68	86,83	121,69	68,81	Belum Tercapai
2.44.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.45.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1.	Pekerjaan Umum:								
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	75	90,32	66,74	75,56	71,69	73,68	Belum Tercapai
3.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		0,00246	0,00179	0,00178	0,00246	0,00246	0,00246	Sesuai
3.3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	30	n/a	38,38	37,72	36,7	34,44	Belum Tercapai
3.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	50	34,2	36,65	40,31	42,76	43	Belum Tercapai
3.5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	87	n/a	80,64	81,95	83,86	84,92	Belum Tercapai
3.6	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	65	27,39	39,99	45,37	51,53	59,54	Belum Tercapai
3.7	Rasio Jaringan Irigasi		0,5	0,107	0,181	0,247	0,254	0,453	Belum Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Indikator 2020	Realisasi Kinerja					Interprestasi Belum Tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
				Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
4.1.	Rasio rumah layak huni		0,35	n/a	0,146	0,157	0,181	0,196	Belum Tercapai
4.2.	Rasio permukiman layak huni		1	0,9982	0,9982	0,9983	0,9983	0,9984	Belum Tercapai
4.3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	100	n/a	86,2	86,2	86,2	87,55	Belum Tercapai
4.4.	Persentase permukiman yang tertata	%	75	23,27	23,62	23,85	24,12	24,36	Belum Tercapai
4.5.	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0,3	0,18	0,18	0,18	0,18	0,163	Belum Tercapai
4.6.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	50	n/a	n/a	3,206	6,43	9,653	Belum Tercapai
4.7.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	5	n/a	4,082	3,804	3,402	3,179	Belum Tercapai
4.8.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	100	n/a	71	72,12	72,12	73,98	Belum Tercapai
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Per 10.000	50	32,08	31,8	53,47	47,02	40,29	Belum Tercapai
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	82,5	100	89,4	96	95,2	81	Belum Tercapai
5.3.	Persentase Penegakan PERDA	%	90	100	92	89,36	93,02	92,11	Melampaui
6	Sosial								
6.1.	Persentase PMKS yang tertangani	%	75	1,53	1,34	45,92	46,09	63,37	Belum Tercapai
6.2.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	2	1,53	1,34	1,8	3,1	1,82	Belum Tercapai
6.3.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	33	33	100	100	100	Sesuai
6.4.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	24	4,8	7,7	13	18,8	24	Sesuai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Indikator 2020	Realisasi Kinerja					Interprestasi Belum Tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
				Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	
6.5.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
6.6.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	%	2	1,21	0,71	0,75	0,5	1,31	Belum Tercapai
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
1	Tenaga Kerja								
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	20	7,2	18	4,8	6,3	11,8	Belum Tercapai
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	40	60	28	13	60,8	4,15	Belum Tercapai
1.4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	20	11,59	11,45	13,37	14,68	19,69	Belum Tercapai
1.5.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	80	85,33	92,9	91,11	94,12	89,16	Melampaui
1.6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	80	64	72	48	64	33	Belum Tercapai
1.7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	60	73	75	85	62	0	Belum Tercapai
1.8.	Rasio lulusan S1/S2/S3		5	0,043	0,041	0,045	0,045	0,044	Belum Tercapai
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Indikator 2020	Realisasi Kinerja					Interprestasi Belum Tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
				Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	60	8,49	7,35	6,05	6,89	5,8	Belum Tercapai
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	30	8,57	8,57	8,57	11,43	11,43	Belum Tercapai
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	10	0	0,21	0,18	0,64	0,53	Belum Tercapai
2.4.	Rasio KDRT	%	0,01	0	0,0088	0,0114	0,0086	0,0019	Belum Tercapai
2.5.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0	0	0	0	0	0	Sesuai
2.6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	65	36,58	40,88	46,17	42,44	48,71	Belum Tercapai
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	0	100	100	100	100	Sesuai
2.8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	0	100	100	100	100	Sesuai
2.9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	0,02	0	0,03	0	0,02	0,04	Melampaui
2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	0	100	100	100	100	Sesuai
2.12.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	0,05	0	0	0	0,02	0,08	Melampaui
2.13.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	0,02	0	0	0	0,02	0,04	Melampaui

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Indikator 2020	Realisasi Kinerja					Interprestasi Belum Tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
				Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	
2.14.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	100	98	88	101	99	101	Melampaui
2.15.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	%	100	101	107	103	112	104	Melampaui
2.16.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	%	100	101	101	100	103	104	Melampaui
2.17.	Rasio APM perempuan/laki laki di Perguruan Tinggi	%	1,8	2,4	2,51	1,8	2,13	1,89	Sesuai
2.18.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	0,97	0,99	0,96	0,97	0,97	0,97	Sesuai
2.19.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	35	0	26,23	12,93	16,68	14,24	Belum Tercapai
3	Pangan								
3.1.	Ketersediaan pangan utama	kg	150.000	207.357	230.387	230.042	174.742	194.501	Melampaui
3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/gr	4000	4.123	4.470	4.624	4,188	4.208	Melampaui
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Kec	9	9	9	9	9	9	Sesuai
4	Pertanahan								
4.1.	Persentase Bidang Tanah Bersertifikat	%	80	44,16	29,73	29,38	30,07	33,71	Belum Tercapai
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	70	n/a	60	57	63	70	Sesuai
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	%	80	n/a	71	75	92	33	Belum Tercapai
5	Lingkungan Hidup								
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Belum Tercapai
5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam pembangunan kabupaten/kota	Ada/Tidak	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Belum Tercapai
5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
5.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air		50,5	45,71	35	58,57	64,29	65	Melampaui

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Indikator 2020	Realisasi Kinerja					Interprestasi Belum Tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
				Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	
5.5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	%	74,75	0	72,8	76,06	76,95	81,32	Melampaui
5.6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	%	48,24	0	0	53,63	54,35	58,78	Melampaui
5.7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	25	0	8	8,7	11,8	25	Sesuai
5.8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Angka	5	0	0	0	0	0	Belum Tercapai
5.9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Angka	1	0	0	1	1	1	Sesuai
5.10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Angka	1	0	0	2	1	0	Belum Tercapai
5.11	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Angka	10	10	10	10	10	0	Sesuai
5.12	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Sesuai
5.13	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	80	0	10	100	100	100	Melampaui
5.14	Timbulan sampah yang ditangani	%	17	14,7	15,6	20,22	20,33	20,59	Belum Tercapai
5.15	Persentase area pelayanan	%	27	16,92	24,87	25,3	26	27	Belum Tercapai
5.16	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	7	8,23	5,83	6,3	6,66	6,8	Belum Tercapai
5.42.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	75	75	71	71	72	72	72	Belum Tercapai
5.43.	Persentase pengelolaan oleh swasta diterbitkan	%	100	0	100	0	0	100	Sesuai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Indikator 2020	Realisasi Kinerja					Interprestasi Belum Tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
				Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk		0,98	0,32	0,8	0,85	0,94	0,94	Belum Tercapai
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran		0,95	0,16	0,28	0,42	0,65	0,82	Belum Tercapai
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah		0,85	0,26	0,27	0,26	0,62	0,5	Belum Tercapai
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
6.5.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	95	85,67	89,45	84,91	88,39	80,26	Belum Tercapai
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	45	50	52	60	62	Belum Tercapai
7.2.	Indeks Desa Membangun (IDM)		0,68	n/a	n/a	0,4907	0,5589	0,6565	Belum Tercapai
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,2	0,96	0	1,02	0,09	0	
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,28	2,43	2,13	2,3	2,48	2,48	Belum Tercapai
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	80	6	20	26	30	30	Belum Tercapai
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	100	4	4	4	4	6	Belum Tercapai
8.5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Kebijakan	1	1	1	1	1	1	Sesuai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Indikator 2020	Realisasi Kinerja					Interprestasi Belum Tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
				Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	
8.6.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	10	3	5	7	10	10	Sesuai
8.7.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Sektor	15	0	0	5	4	9	Belum Tercapai
8.8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	3	4	4	4	3	3	Sesuai
8.9.	Rasio Akseptor KB	%	77,5	73,97	76,54	76,54	76,73	77,62	Belum Tercapai
8.10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	%	60	73,97	76,54	76,54	76,73	77,62	Belum Tercapai
8.11.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	11,04	10,97	13,33	13,33	12,93	11,04	Sesuai
8.12.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,93	13,32	13,33	13,33	12,93	11,04	Belum Tercapai
8.13.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	14	7,74	9,2	9,9	11,09	12,98	Belum Tercapai
8.14.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	78	73,97	76,51	76,54	76,73	75,58	Belum Tercapai
8.15.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	80	67,91	63,38	57,15	61,57	70,64	Belum Tercapai
8.16.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	80	67,92	54,15	54,89	54,19	58,46	Belum Tercapai
8.17.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	80	38,22	44,32	40,08	32,76	36,51	Belum Tercapai
8.18.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	100	0	7,69	7,69	7,69	7,69	Belum Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Indikator 2020	Realisasi Kinerja					Interprestasi Belum Tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
				Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	
8.19.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	100	38	40	59	61	49	Belum Tercapai
8.20.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
8.21.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	80	53,72	45,88	31,18	54,05	51,33	Belum Tercapai
8.22.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
8.23.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	80	89,82	168,71	46,41	108,32	53,31	Belum Tercapai
8.24.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	70,78	88,23	92	78,57	72,72	Belum Tercapai
8.25.	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0,008	0	0,025	0,03	0,0081	0,008	Sesuai
8.26.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	80	0,97	12,62	8,74	0,97	0	Belum Tercapai
8.27.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahamidan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	80	33,1	36,22	36,59	34,29	20,06	Belum Tercapai
8.28.	Rata-rata usia kawin pertama wanita	%	21,09	47,46	46,19	45,96	44,92	44,06	Melampaui
8.29.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga	%	100	75	75	72,45	68,7	69,7	Belum Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Indikator 2020	Realisasi Kinerja					Interprestasi Belum Tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
				Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	
	melalui APBD dan APBDes								
9	Perhubungan								
9.1.	Jumlah Arus penumpang Angkutan umum		584.000	547.500	539.477	255.917	17.028	14.400	Belum Tercapai
9.2.	Rasio ijin trayek		0,0057	0,00022	0,00009	0,00004	0,00001	0,00005	Belum Tercapai
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum		3.300	2.064	2.585	2.276	2.841	756	Belum Tercapai
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		9	6	6	6	6	6	Belum Tercapai
9.5.	Persentase angkutan darat	%	0,1	0,22	0,34	0,17	0,15	1,05	Melampaui
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	86,53	97,85	78,38	68,66	79,15	98,25	Melampaui
9.7.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		0,82	1,502	1,935	1,642	0,894	0,89	Melampaui
9.8.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum		580.000	572.580	340.733	169.350	114.615	14.400	Belum Tercapai
9.9.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun		210.000	171.000	198.704	213.075	127.123	126.472	Belum Tercapai
10	Komunikasi dan Informatika								
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	%	23,08	7,69	15,38	23,08	23,08	23,08	Sesuai
10.2.	Cakupan telekomunikasi	%	0,2	0,16	0,171	0,176	0,182	0,193	Belum Tercapai
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	50	40	43	45	45	45	Belum Tercapai
10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	0,5	0,45	0,46	0,46	0,59	0,57	Belum Tercapai
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Indikator 2020	Realisasi Kinerja					Interprestasi Belum Tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
				Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	94	79,64	79,7	78,34	78,48	78,68	Belum Tercapai
11.2.	Persentase BPR/LKM aktif	%	75	69,57	69,57	69,94	69,09	68,48	Belum Tercapai
11.3.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	95	91	93	95,2	97,5	97,8	Belum Tercapai
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	95	94,96	95,21	95,4	95,58	96,75	Belum Tercapai
12	Penanaman Modal								
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor / Pengusaha	250	359	218	220	410	201	Belum Tercapai
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta)	Juta	39.032.596	1.749.649	58.602.927	217.997	4.140.280	348.766	Belum Tercapai
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja		9,86	6,23	18,5	9,86	1	4,42	Belum Tercapai
14	Statistik								
14.1.	Tersedianya sistem data statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Sesuai
14.2.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
14.3.	Buku "PDRB"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
15	Persandian								
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	46	2	2	2	2	2	Belum Tercapai
16	Kebudayaan								
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	14	13	29	31	28	7	Belum Tercapai
16.2.	Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan		6	0	0	0	6	6	Sesuai
16.3.	Jumlah karya budaya yang revitalisasi dan inventarisasi								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Indikator 2020	Realisasi Kinerja					Interprestasi Belum Tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
				Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	
16.4.	Jumlah karya budaya yang inventarisasi		400	3	4	138	481	481	Belum Tercapai
16.5.	Jumlah karya budaya yang revitalisasi	Situs / Cagar Budaya	15	3	4	5	6	9	Belum Tercapai
16.6.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		6	9	67	6	6	6	Sesuai
17	Perpustakaan								
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		7.610	5.492	7.062	9.005	9.029	2.135	Belum Tercapai
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		22.431	1.959	2.131	3.137	3.231	3.726	Melampaui
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk		0,69	0,65	0,65	0,65	0,67	0,69	Sesuai
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	%	53,53	22,5	26,6	34,11	34,2	8,8	Belum Tercapai
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan		9.596	1.035	1.079	1.626	1.665	1.930	Belum Tercapai
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang bersertifikat	%	0,15	0,18	0,17	0,18	0,16	0,15	Sesuai
18	Kearsipan								
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	0,5	0	0	0,29	0,39	0,66	Belum Tercapai
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	10	0	0	2	5	10	Sesuai
	Layanan Urusan Pilihan								
1	Pariwisata								
1.1.	Lama kunjungan Wisata	Hari	1	6	1	2	2	1	Sesuai
2	Pertanian								
2.1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	16,25	3,47	3,36	3,08	2,85	3,17	Belum Tercapai
2.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	4,15	2,64	2,52	2,22	2	2,3	Belum Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Indikator 2020	Realisasi Kinerja					Interprestasi Belum Tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
				Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	
2.3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	Sesuai
2.4.	Kontribusi Produksi kelompok Petani terhadap PDRB	%	55	76	75	72	70	80	Belum Tercapai
2.5.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ku/Ha	536,38	561,52	576,97	591,51	465,2	580,03	Belum Tercapai
2.6.	Cakupan bina kelompok petani	%	85	65	70	75	80	85	Sesuai
7	Kelautan dan Perikanan								
7.1.	Produksi perikanan	%	100	102,90	131,03	140,19	187,32	170,22	Melampaui
7.2.	Konsumsi ikan	%	100	105,7	102,17	102,13	102,08	94,88	Belum Tercapai
7.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	21,91	31	16	6	14	5	Belum Tercapai
7.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	21,71	31,22	15,54	5,94	14,4	17,5	Belum Tercapai
7.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	20	17	23,02	23,16	34	26,05	Melampaui
7.6.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	%	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	Sesuai
	Penunjang Urusan								
1	Perencanaan Pembangunan								
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Indikator 2020	Realisasi Kinerja					Interprestasi Belum Tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
				Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	90	136	105,6	89,29	94,26	95,5	Melampaui
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	90	90,98	99,78	100	100	100	Melampaui
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	74,83	74,51	88,24	88,24	92,16	Belum Tercapai
2	Keuangan								
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sesuai
2.2.	Penetapan APBD	Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Sesuai
2.3.	Persentase SILPA	%	3,79	3,48	4,75	2,73	5,01	4	Belum Tercapai
2.4.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20	30,45	30,29	29,03	29,61	28,06	Melampaui
2.5.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10	16,25	19,82	18,36	18,91	19,58	Melampaui
2.6.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	71,63	51,84	50,58	47,8	42,97	38,43	Belum Tercapai
2.7.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	10	4,31	9,55	10,08	10,95	10,64	Melampaui
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan								
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (bulan)	Bulan	1 s/d 3	1 s/d 3	1 s/d 3	1 s/d 3	1 s/d 3	1 s/d 3	Sesuai
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	50%	1,55	0,85	1,23	1,49	1,74	Belum Tercapai
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	%	50%	3,89	3,55	4,63	4,33	3,88	Belum Tercapai
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	41	35	41	41	41	42	Melampaui

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Indikator 2020	Realisasi Kinerja					Interprestasi Belum Tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
				Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	2605	2.442	2.457	2.199	2.505	2.587	Belum Tercapai
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	3470	3.627	3.550	3.464	3.370	3.293	Belum Tercapai
4	Penelitian dan pengembangan								
4.1.	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	%	68	0	33,33	65,57	88,89	94,12	Belum Tercapai
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	68	0	0	46,84	48,84	45,96	Belum Tercapai
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	68	0	16	49	100	46	Belum Tercapai
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.		68	0	126,91	125,79	109,28	99,68	Melampaui
5	Pengawasan								
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	%	85	71	73	75	77	77	Belum Tercapai
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,18	0,08	0,03	0,18	0,22	0,24	Belum Tercapai
5.3.	Jumlah temuan BPK		435	372	395	435	462	482	Belum Tercapai
6	Sekretariat Dewan								
6.1.	Tersedianya Rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Prov / Kab/ Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Indikator 2020	Realisasi Kinerja					Interprestasi Belum Tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
				Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan pembentukan Perda dan anggaran dalam dokumen anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	697.217	719.649	860.812	1.001.377	927.619	910.459	Melampaui
2	Nilai tukar petani		110	103,93	101,71	103,31	104,42	97,56	Belum Tercapai
3	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	49,53	52,72	49,51	47,7	48,17	44,86	Belum Tercapai
4	Rasio ketergantungan	%	196,8	52,8	52,39	52,07	51,82	51,58	Melampaui
5	Produktivitas total daerah		157,87	152,49	155,24	153,89	171,14	153,42	Belum Tercapai
6	Persentase desa swasembada terhadap total desa	%	10	1,53	1,53	1,53	4,61	7,7	Belum Tercapai
7	Rasio Ekspor + impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	%	40,17	41,75	41,46	38,52	38,07	40,17	Sesuai
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di Bank umum		131.62	208.3	113.92	173.57	348.84	187.82	Melampaui
9	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR		91.01	167,09	134,06	147,61	70,91	91	Sesuai
10	Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk	Per 10.000	12	0	5	4	4	2	Melampaui

2.6. Evaluasi Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Dalam kerangka regulasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 100 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Untuk urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menjamin hak-hak konstitusional masyarakat yang diimplementasikan kedalam dokumen perencanaan yang meliputi 6 bidang urusan, 29 Program dan 119 Kegiatan.

Tabel. 2.268.
Mapping Program SPM Dalam Dokumen Perencanaan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

NO	Urusan SPM	Perangkat Daerah Pengampuh	Jumlah Program SPM	Jumlah Kegiatan SPM
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	3	14
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	12	71
3	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Dinas PU dan Pekerjaan Umum	2	6
4	Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	2	2
5	Ketentraman Ketertiban & Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi dan Pamong Praja	1	3
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	9
		Dinas Pemadam Kebakaran	1	5
6	Sosial	Dinas Sosial	5	9
Jumlah			29	119

Sumber: Permendagri 100 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kinerja pemenuhan SPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diukur dari ketercapaian indikator pada masing-masing bidang urusan dan jenis pelayanan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, seperti pada tabel berikut.

1. Pendidikan

Tabel. 2.269.
Target Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	
				2019	2020
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	85,24%	87,17%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	
				2019	2020
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2,07%	2,20%
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	37,42%	53,04%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021

2. Kesehatan

Tabel. 2.270.

Target Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	
				2019	2020
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	91,67%	89,78 %
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	93,29%	92,60 %
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	99,88%	96,76 %
4.	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	78,25%	75,27 %
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	76,56%	28,10 %
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	27,71%	36,37 %
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	44,81%	54,31 %
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	28,64%	24,46%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	75,09%	68,23%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	58,74%	77,82 %
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	56,25%	33,20 %
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	100%	88,31%	89,05%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	
				2019	2020
	terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)			

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3. Pekerjaan Umum

Tabel. 2.271.

Target Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	
				2019	2020
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	49,60%	49,96 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	77%	90,94%

Sumber: Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021

4. Perumahan dan Permukiman

Tabel. 2.272.

Target Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Perumahan dan Pemukiman
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	
				2019	2020
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%
2.	Fasilitasi penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerinta Daerah Kab/Kota yang memperoleh Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	21,6%

Sumber: Dinas Perumahan & Permukiman Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021

5. Ketentraman, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat

Tabel. 2.273.

Target Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	
				2019	2020
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	63,92%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	63,92%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%

Sumber: Badan Penanggulangan & Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran & Satpol PP Tahun 2021

6. Sosial

Tabel. 2.274.

Target Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	
				2019	2020
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	79,40%	31,03%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	51,70%	11,05%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

2.7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals(TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB / SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata Kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB / SDGs telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB / SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Milenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen Global dan Nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 Tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Laut
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan

Upaya pencapaian Target TPB/SDGs menjadi prioritas Pembangunan Daerah yang memerlukan Sinergi Kebijakan Perencanaan di tingkat Kabupaten. Target-target SDGs di tingkat Kabupaten sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta dukungan pembiayaan. Jumlah tujuan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan mencapai target nasional sejumlah 17 Tujuan

(Goals) sejumlah 75 indikator dari total keseluruhan indikator yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten sejumlah 220 indikator, namun untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sendiri telah melaksanakan sekitar 94 indikator dari berbagai OPD yang terkait. Capaian target indikator 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang mencakup Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai Target 42 Indikator.

Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai Target 44 Indikator dan Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai Target 12 Indikator, sedangkan Indikator TPB yang belum memiliki data TAD 122 Indikator disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 2. 275
Capaian Target Indikator TPB/SDGs
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 – 2020

No. TPB	Tujuan, Isu Strategis, dan Indikator TPB	Urusan	Baseline				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tujuan TPB: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun						
	Isu strategis TPB: Masih adanya setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi.						
	Indikator 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Sosial	16.22%	16.22%	15.06%	14.06%	13.96%
	Isu Strategis TPB: Belum diterapkannya sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin dan rentan.						
	Indikator 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Kesehatan	80.14%	-	86.60%	88.80%	-
	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.						
	Indikator 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Pendidikan	-	61.6%	74.3%	75.7%	-
	Isu Strategis TPB: Belum optimalnya pembangunan ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan masih adanya kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.						
	Indikator 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	-	-	168	168	-
2	Tujuan TPB: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan						
	Isu Strategis TPB: Masih adanya kelaparan dan belum terjaminnya akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.						
	Indikator 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Pangan	99.97	100.00	99.46	99.80	-
	Isu Strategis TPB: Masih adanya segala bentuk kekurangan gizi, termasuk untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan belum terpenuhinya kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.						

No. TPB	Tujuan, Isu Strategis, dan Indikator TPB	Urusan	Baseline				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Indikator 2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Kesehatan	89.68%	91.77%	95.00%	91.67%	-
3	Tujuan TPB: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia						
	Isu Strategis TPB: Masih kurangnya upaya untuk mengurangi rasio angka kematian ibu.						
	Indikator 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).	Kesehatan	73529	46948	44643	40161	-
	Indikator 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Kesehatan	89.32%	88.86%	92.00%	93.29%	-
	Isu Strategis TPB: Masih adanya kematian bayi baru lahir dan balita yang tidak dapat dicegah.						
	Indikator 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Kesehatan	4.47	0.19	0.20	1.20	-
	Indikator 3.2.2* Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Kesehatan	6.41	9.69	8.30	9.00	-
	Indikator 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Kesehatan	96.12%	91.43%	84.90%	93.30%	-
	Isu Strategis TPB: Masih adanya epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan masih adanya hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.						
	Indikator 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Kesehatan	13.0%	35.0%	12.0%	65.0%	-
	Indikator 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Kesehatan	246	421	184	296	-
	Indikator 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Kesehatan	12	26	1	6	-
	Isu Strategis TPB: Masih adanya hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular dan belum meningkatnya kesehatan mental dan kesejahteraan.						
	Indikator 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.	Kesehatan	9.2%	6.0%	30.3%	35.8%	-
	Indikator 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Kesehatan	35.8%	41.2%	38.4%	79.3%	-
	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan belum terintegrasinya kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						
	Indikator 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	41.89%	36.86%	45.67%	46.05%	-

No. TPB	Tujuan, Isu Strategis, dan Indikator TPB	Urusan	Baseline				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Indikator 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.7%	9.2%	9.9%	11.1%	12.7%
	Indikator 3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54	49	43	39	-
	Indikator 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.43	2.13	2.28	2.48	-
4	Tujuan TPB: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua						
	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.						
	Indikator 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Pendidikan	24.3%	76.0%	75.5%	75.9%	-
	Indikator 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Pendidikan	21.80%	41.20%	50.50%	60.60%	-
	Indikator 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Pendidikan	105.16%	106.61%	105.43%	106.61%	-
	Indikator 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Pendidikan	7.3 thn	7.5 thn	7.5 thn	7.6 thn	-
	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.						
	Indikator 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Pendidikan	44.5%	47.3%	49.9%	52.6%	-
5	Tujuan TPB: Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan						
	Isu Strategis TPB: Masih adanya praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa.						
	Indikator 5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54 thn	49 thn	43 thn	39 thn	-

No. TPB	Tujuan, Isu Strategis, dan Indikator TPB	Urusan	Baseline				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi.						
	Indikator 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.8%	8.3%	8.0%	12.9%	-
	Indikator 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	73.97%	76.51%	76.54%	76.73%	75.75%
8	Tujuan TPB: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua						
	Isu Strategis TPB: Belum optimalnya upaya dalam menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan masih belum terdorongnya formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.						
	Indikator 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Tenaga Kerja	-	-	4.22	-	-
	Indikator 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal.	Tenaga Kerja	-	-	42.62%	-	-
	Indikator 8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Tenaga Kerja	-	-	3.25%	-	-
	Isu Strategis TPB: Belum tercapainya pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.						
	Indikator 8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran.	Tenaga Kerja	-	-	33.59	-	-
	Isu Strategis TPB: Masih adanya proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.						
	Indikator 8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Tenaga Kerja	7.01%	7.09%	6.91%	5.41%	-
	Isu Strategis TPB: Belum optimalnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.						
	Indikator 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Pariwisata	0.68%	0.92%	0.56%	0.95%	-
	Indikator 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara.	Pariwisata	70	4	31	75	10
	Indikator 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Pariwisata	58958	59411	59704	3497	692

No. TPB	Tujuan, Isu Strategis, dan Indikator TPB	Urusan	Baseline				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Indikator 8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.	Pariwisata	8.89	12.58	7.85	4.00	-
10	Tujuan TPB: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara						
	Isu Strategis TPB: Belum tercapainya pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi.						
	Indikator 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Sosial	16.22%	16.22%	15.06%	14.06%	13.96%
	Indikator 10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.22	13.13	11.02	-	-
11	Tujuan TPB: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan						
	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta belum tertatanya kawasan kumuh.						
	Indikator 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	295	-
	Isu Strategis TPB: Masih adanya jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial masih adanya kerugian ekonomi relatif terhadap PDB yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.						
	Indikator 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	168.4	168.4	168.4	-	-
	Isu Strategis TPB: Masih adanya dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan belum diberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.						
	Indikator 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Lingkungan Hidup	-	14.70%	15.60%	20.22%	-
12	Tujuan TPB: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan						
	Isu Strategis TPB: Lemahnya upaya mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.						
	Indikator 12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Lingkungan Hidup	1	1	1	1	1

BAB III

GAMBARAN KONDISI KEUANGAN DAERAH

Kondisi keuangan daerah menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa gambaran keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Untuk menunjang efektivitasnya pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah dirumuskan berbagai strategi yang adaptif, dalam lingkup mikro gambaran keuangan daerah meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah. Strategi yang ditempuh kemudian diterjemahkan dalam bentuk struktur APBD yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa APBD merupakan instrumen kunci dalam sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan. Fungsi perencanaan adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan. Fungsi pengawasan adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi adalah anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah. Berbagai literatur dan best practice mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah instrument kunci dari kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan

keseimbangan antara “*revenue* dan *expenditure*”. Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

Selanjutnya, beberapa prinsip yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran daerah yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; dan
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam buku Kas Umum Daerah.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan berdasarkan urusan pemerintahan kongkuren serta asas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan dasar, serta daya saing daerah. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selama tahun 2016 sampai tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat aturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat. Tertib berarti bahwa pengelolaan keuangan dilaksanakan secara teratur, tepat waktu dengan dukungan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efisien, efektif serta ekonomis dimaksudkan sebagai pencapaian keluaran yang maksimal dengan kualitas dan kuantitas tertentu dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan. Transparansi berarti keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang pengelolaan keuangan daerah.

Bertanggung jawab merupakan perwujudan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumberdaya yang diimbangi dengan keadilan dalam hal distribusi kewenangan dan pendanaan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Secara umum pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan tolok ukur pengelolaan keuangan daerah bagi pemerintah daerah selama setahun dan realisasi pelaksanaannya merupakan gambaran kinerja pemerintah daerah. Secara teoritis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendali, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik. Fungsi-fungsi tersebut kemudian melandasi perumusan kebijakan fiskal baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Dalam rangka melakukan penyesuaian atas Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolok ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran pelayanan publik.

Penggalan sumber-sumber pendapatan, melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan pemanfaatan kekayaan/aset daerah sebagai upaya optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah serta dukungan pendanaan dari pusat melalui kebijakan transfer ke daerah telah mampu menaikkan penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2016 senilai Rp1.400.762.724.893,77, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp52.013.644.367,84 sehingga realisasi pendapatan tahun 2020 sebesar Rp1.348.749.080.525,93 dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp1.370.922.526.029,00.

Analisis kinerja pelaksanaan APBD, selama tahun 2016-2020 dan perbandingannya terhadap kinerja pelaksanaan APBD akhir tahun periode pemerintahan sebelumnya (tahun 2016) dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah adalah penambah nilai kekayaan bersih daerah dalam masa satu tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri dari;

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Periode 2016 – 2020 total alokasi anggaran pendapatan yang telah ditargetkan dalam APBD sebesar Rp7.048.844.575.843,70 dengan total realisasi pendapatan sebesar Rp6.883.937.622.938,00 atau 97,66%. Pertumbuhan pendapatan selama periode 2016–2020 mengalami defisit sebesar 0,94%, hal ini disebabkan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat dan turunnya beberapa potensi PAD akibat adanya pandemi Covid-19.

Rincian Realisasi penerimaan pendapatan daerah selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut;

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pada periode tahun bersangkutan. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada periode tahun bersangkutan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern.

Aspek yang dapat mempengaruhi kebijakan pendapatan daerah antara lain adanya regulasi peraturan yang merupakan acuan yang dipakai dalam menggali penerimaan daerah dan struktur ekonomi/sosial masyarakat yang sangat menentukan kemampuan masyarakat dengan membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi harus lebih realistis yakni tidak hanya didasarkan pada

keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak dan retribusi, akan tetapi juga melihat aspek lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

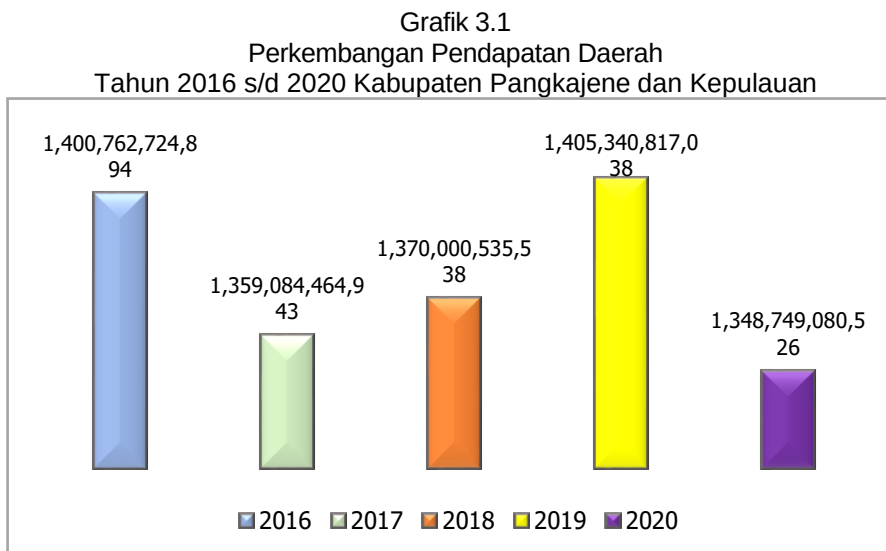
Adapun kebijakan strategis yang akan dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain :

1. Meningkatkan kinerja perangkat daerah bidang pendapatan dan kualitas sistem pemungutan pendapatan daerah terutama pelayanan pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah dengan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran serta menggunakan sumber daya manusia yang berkualitas;
3. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah berdasarkan karakteristik daerah dan pendayagunaan aset daerah termasuk pendapatan dari ihak ketiga;
4. Optimalisasi pendapatan asli daerah dengan menitikberatkan pendekatan potensi sumber daya alam;
5. Melakukan koordinasi koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya peningkatan penerimaan dari dana bagi hasil dan dana perimbangan.

Secara keseluruhan, semua kelompok pendapatan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan total pendapatan daerah. Uraian pertumbuhan pada masing-masing kelompok pendapatan daerah selama periode tahun 2016-2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan yang cukup baik dalam periode 2016-2020 dengan rerata sebesar 5,91% pertahun atau mendekati tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi daerah yang berada pada kisaran 5 – 6% pertahun. Pada pos PAD ini terlihat adanya pertumbuhan yang sangat tinggi pada lain-lain pendapatan daerah yang sah yang mencapai sebesar 40,20% pertahun, kemudian pendapatan pajak daerah sebesar 1,55%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tumbuh sebesar 1,16% pertahun dan hasil retribusi daerah mengalami rerata pertumbuhan negative sebesar 37,09% pertahun;
- Dana perimbangan mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3,62 persen yang tidak setara dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5-6 persen selama periode 2016-2020, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami penurunan rerata pertumbuhan sebesar 5,54 persen, Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami pertumbuhan sebesar 0,42 persen, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan rerata pertumbuhan sebesar 12,54 persen;
- Lain-lain Pendapatan daerah juga mengalami pertumbuhan sebesar 17,06 persen, dengan rincian Pendapatan Hibah memberikan kontribusi rerata pertumbuhan sebesar 28,34 persen, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar 1,03%, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 9,87%, Bantuan Keuangan dari Provinsi

atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 4,61% terhadap rerata pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Cukup tingginya pencapaian target pendapatan daerah sebenarnya dapat dianalisis dari dua perspektif, yaitu: pertama, kinerja pengelola pendapatan daerah sudah baik sehingga dapat merealisasikan target yang ditetapkan; kedua, rencana pendapatan yang ditetapkan masih terlalu rendah sehingga sangat mudah bagi pengelola pendapatan daerah untuk merealisasikannya. Dari kedua perspektif tersebut mempunyai implikasi sama, bahwa pengelola pendapatan daerah perlu diberikan tantangan berupa target yang lebih tinggi di masa mendatang.

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkep

U R A I A N	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN	1.400.762.724.893,77	1.359.084.464.942,54	1.370.000.535.537,94	1.405.340.817.037,02	1.348.749.080.525,93	-0,94%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	156.226.631.623,17	162.773.899.914,54	174.288.744.559,94	185.010.202.184,64	196.530.900.657,27	5,91%
Pendapatan Pajak Daerah	75.565.057.992,00	72.915.174.176,00	75.013.342.158,16	74.881.677.150,02	80.365.490.090,05	1,55%
Hasil Retribusi Daerah	44.441.430.495,00	6.722.211.814,00	7.552.825.277,00	8.382.643.655,00	6.960.700.326,00	-37,09%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.916.672.337,00	11.264.745.448,35	10.630.772.849,00	12.391.379.384,00	11.432.941.608,00	1,16%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.303.470.799,17	71.871.768.476,19	81.091.804.275,78	89.354.501.995,62	97.771.768.633,22	40,20%
DANA PERIMBANGAN	1.114.262.819.971,00	1.010.789.986.729,00	1.032.137.488.223,00	1.011.383.049.413,00	961.344.950.496,00	-3,62%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.954.288.350,00	31.252.940.140,00	24.873.535.233,00	23.653.274.163,00	24.647.150.589,00	-5,54%
Dana Alokasi Umum	701.629.223.000,00	689.947.090.000,00	752.773.975.000,00	784.495.577.000,00	713.388.948.000,00	0,42%
Dana Alokasi Khusus	381.679.308.621,00	289.589.956.589,00	254.489.977.990,00	203.234.198.250,00	223.308.851.907,00	-12,54%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	130.273.273.299,60	185.520.578.299,00	163.574.302.755,00	208.947.565.439,38	190.873.229.372,66	17,06%
Pendapatan Hibah	19.442.241.309,00	18.092.250.798,00	45.782.920.000,00	48.139.400.000,00	52.744.135.000,00	28,34%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47.149.673.928,60	47.972.622.280,00	42.214.848.870,00	57.393.104.300,00	49.130.449.372,66	1,03%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	49.093.759.000,00	63.085.494.357,00	64.274.262.000,00	93.222.008.800,00	71.528.276.000,00	9,87%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14.587.599.062,00	10.887.111.200,00	11.302.271.885,00	10.141.012.800,00	17.470.369.000,00	4,61%
Pendapatan Lainnya	0,00	45.483.099.664,00	0,00	52.039.539,38	0,00	0,00%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Dari Tabel 3.1 dan Grafik 3.1, dapat dilihat pada tahun 2016 sampai 2020 target pendapatan tidak tercapai hal ini dikarenakan adanya penundaan dana transfer oleh pemerintah pusat pada DAK Non Fisik. Beberapa permasalahan optimalisasi mobilisasi pendapatan daerah, sebagai berikut:

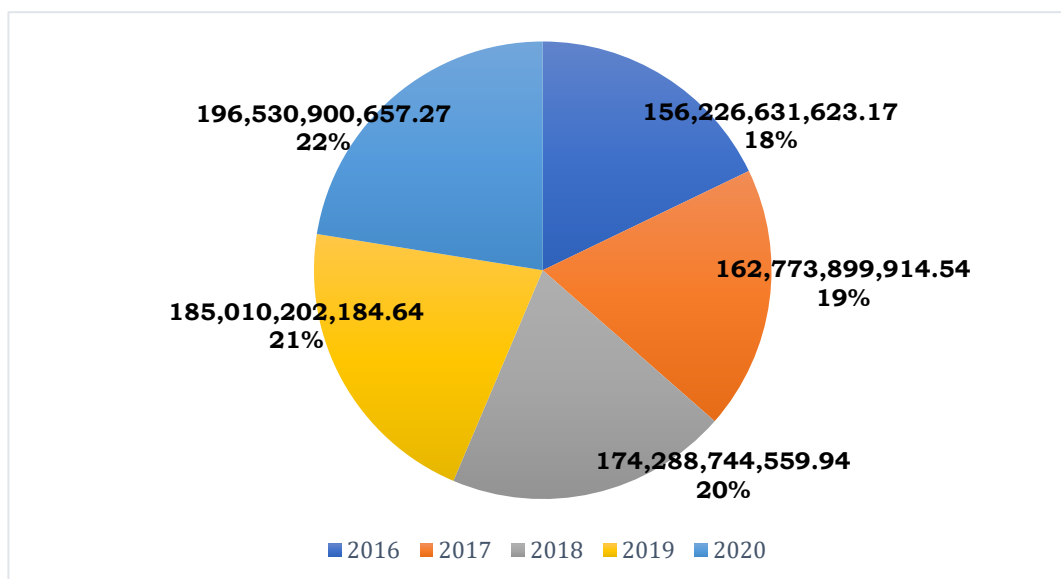
- Belum optimalnya pendapatan daerah pada beberapa objek pajak dan retribusi daerah.
- Belum memadainya sarana dan prasarana serta instrumen pendukung dalam mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- Belum optimalnya pemutahiran secara realtime potensi database sumber-sumber penerimaan daerah.
- Perlunya merevisi Peraturan Daerah baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.
- Perlunya menggali potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peran dan kontribusi BUMD kurang optimal dalam mengelola dalam peningkatan PAD
- Kurangnya pengawasan dan koordinasi pada tempat-tempat pemungutan.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Penerimaan daerah yang bersumber dari daerah, digali berdasarkan potensi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana daerah berwenang memungut pajak atau retribusi sesuai kewenangan yang dimiliki. Secara garis besar jenis penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah meliputi PAD mencakup Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya.

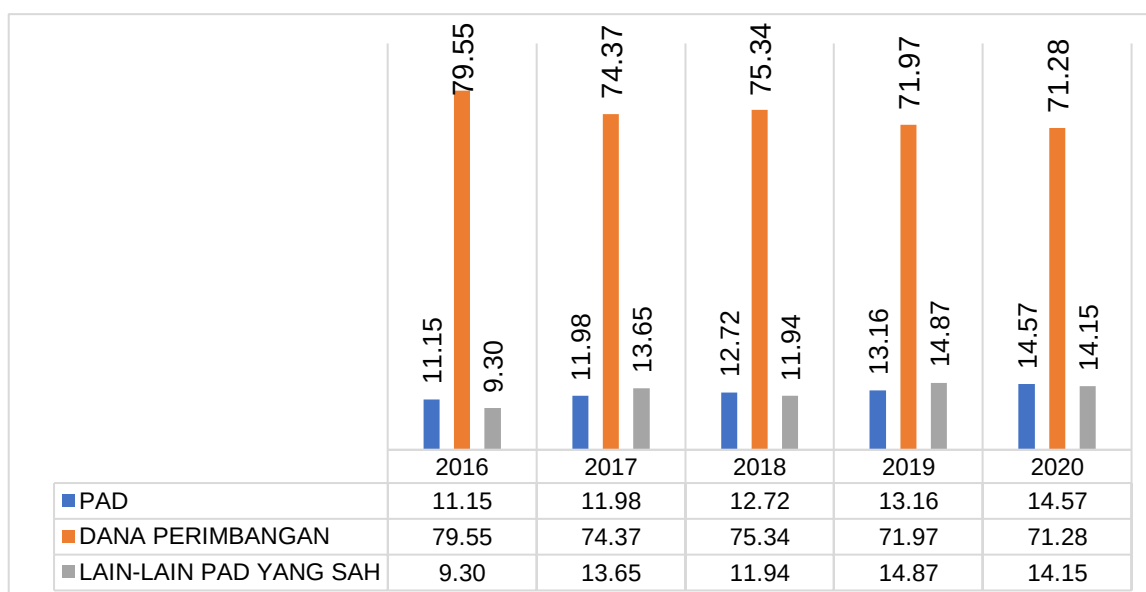
Grafik 3.2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih tergantung pada dana perimbangan. Namun demikian, pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang sangat signifikan sehingga diharapkan kemandirian fiskal daerah dapat diwujudkan.

Grafik 3.3
Struktur Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Selama periode tahun 2016-2020, target pendapatan daerah yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD sudah dapat terpenuhi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data realisasi pendapatan yang dapat diwujudkan oleh daerah yang selalu hampir pada kisaran angka 100 persen.

1.a. Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Ketentuan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten untuk melaksanakan pungutan meliputi **Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral bukan Batuan dan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Pajak Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).**

Saat ini Pajak Daerah masih menjadi tulang punggung PAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya meskipun ditahun 2020 diguncang dengan adanya Pandemi Covid-19, yakni sebesar 5,91%.

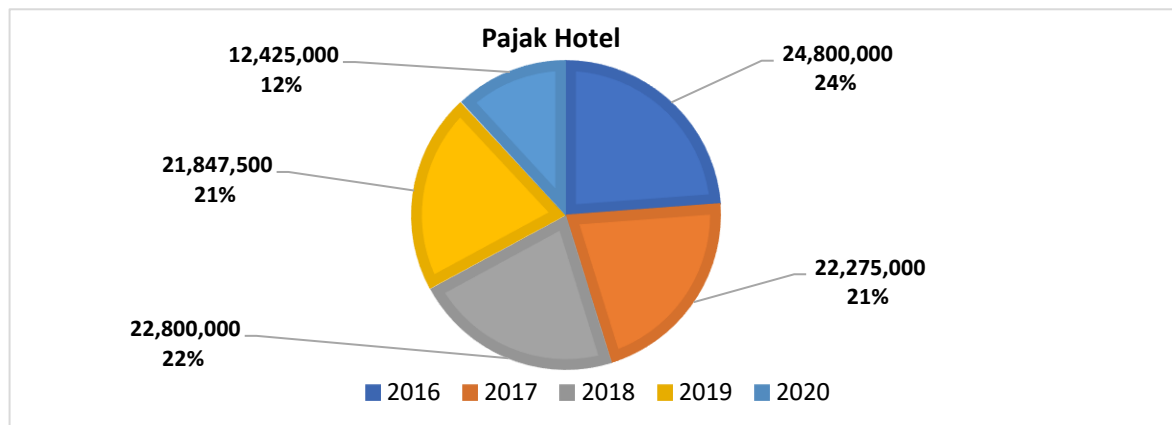
Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
Tahun 2016-2020

No	URAIAN	TAHUN					Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendapatan Pajak Daerah	75.565.057.992,00	72.915.174.176,00	75.013.342.158,16	74.881.677.150,02	80.365.490.090,05	1,55%
	Pajak Hotel	24.800.000,00	22.275.000,00	22.800.000,00	21.847.500,00	12.425.000,00	-15,87%
	Pajak Restoran	147.317.500,00	193.925.000,00	213.481.000,00	1.166.610.556,00	1.683.061.206,50	83,85%
	Pajak Hiburan	20.250.000,00	12.950.000,00	14.650.000,00	11.150.000,00	5.400.000,00	-28,14%
	Pajak Reklame	201.588.750,00	369.262.500,00	461.588.750,00	537.838.125,00	662.275.750,00	34,63%
	Pajak Penerangan Jalan	18.594.535.372,00	21.274.654.365,00	22.019.431.462,00	21.662.001.104,44	20.683.282.105,00	2,70%
	Pajak Parkir	7.200.000,00	14.940.000,00	18.570.000,00	18.570.000,00	13.530.000,00	17,08%
	Pajak Air Tanah	48.193.000,00	49.021.200,00	41.101.600,00	67.452.200,00	72.927.275,00	10,91%
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	51.112.713.802,00	45.336.785.137,00	45.397.065.206,00	45.284.464.702,00	49.987.024.096,00	-0,56%
	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.171.023.990,00	3.647.927.932,00	3.650.514.807,16	4.055.381.155,68	4.324.915.624,10	8,07%
	Pajak Daerah Lainnya	2.237.435.578,00	1.993.433.042,00	3.174.139.333,00	2.056.361.806,90	2.920.649.033,45	6,89%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

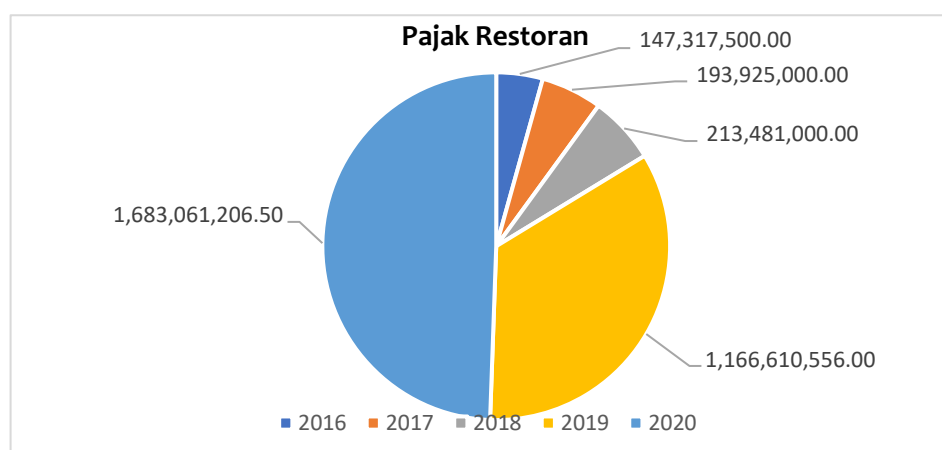
Pertumbuhan Pajak Hotel terus mengalami penurunan sepanjang kurun waktu periode 2016-2020 yakni defisit 15,87%. Hal ini terjadi karena Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan biasanya hanya dijadikan tempat persinggahan untuk beristirahat sejenak, sehingga kamar-kamar yang disewapun hanya yang bertarif shorttime, selain hal tersebut letak penginapan yang kurang strategis, ada beberapa hotel / penginapan yang tidak beroperasi dan belum dipasanginya alat pemantau seperti M-POS serta kurangnya pengawasan bisa menjadi pemicu turunnya pendapatan pajak hotel ini.

Grafik 3.4
Pajak Hotel Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020



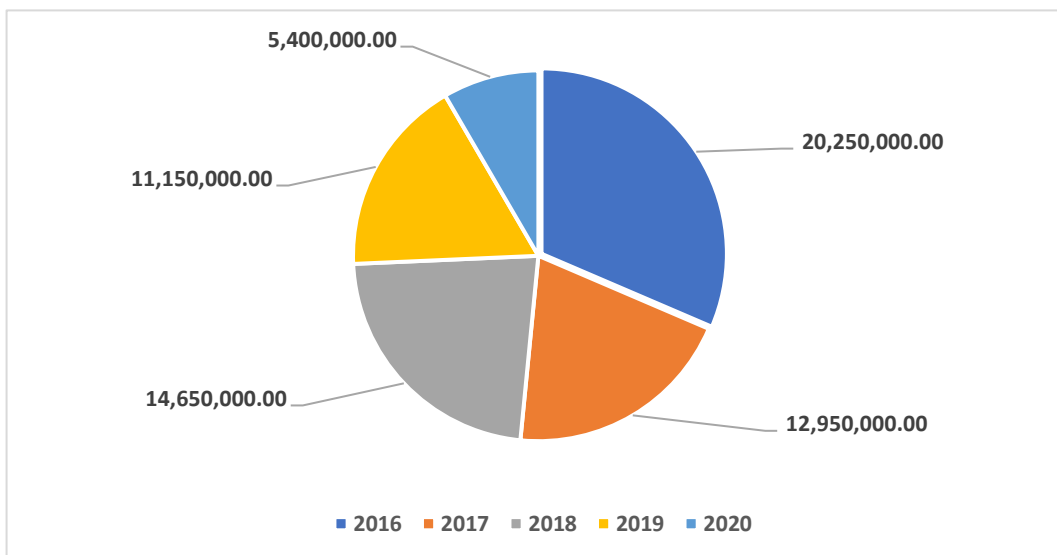
Kenaikan yang signifikan selama periode 2016-2021 terdapat pada pajak restoran, yakni sebesar 83,85%. Disebabkan adanya kerjasama antara pemerintah daerah, KPK dan Bank SulSelbar Pangkep, dengan menggunakan alat *Mobile Payment Online System (M-POS)* pada beberapa restoran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering yang ada di Kabupaten Pangkep serta adanya kebijakan Surat Edaran Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 973 / 110 / Bapenda tanggal 6 Mei 2019 bahwa Bendahara Pengeluaran OPD membantu sebagai Pemungut Pajak pada belanja makan minum OPD yang tersedia didalam APBD Kabupaten Pangkep.

Grafik 3.5
Pajak Restoran Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020



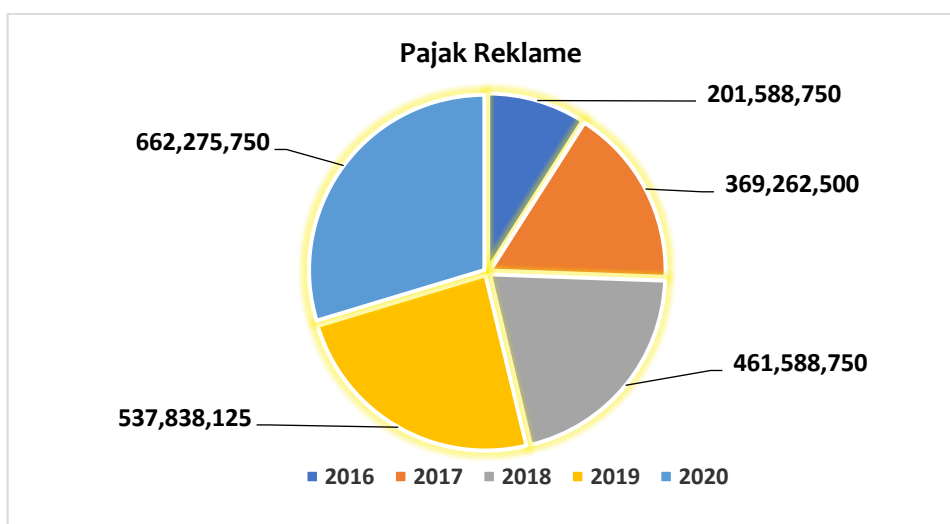
Rata-rata pertumbuhan pada Pajak Hiburan mengalami defisit 28,14%, penurunan ini terjadi secara terus menerus dalam kurun waktu 2016-2020, hal ini disebabkan semakin berkurangnya pelaksanaan event-event yang terkait dengan hiburan, seperti pagelaran kesenian, music, pameran, pertandingan olahraga seperti sepak bola, motor cross.

Grafik 3.6
Pajak Hiburan Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020



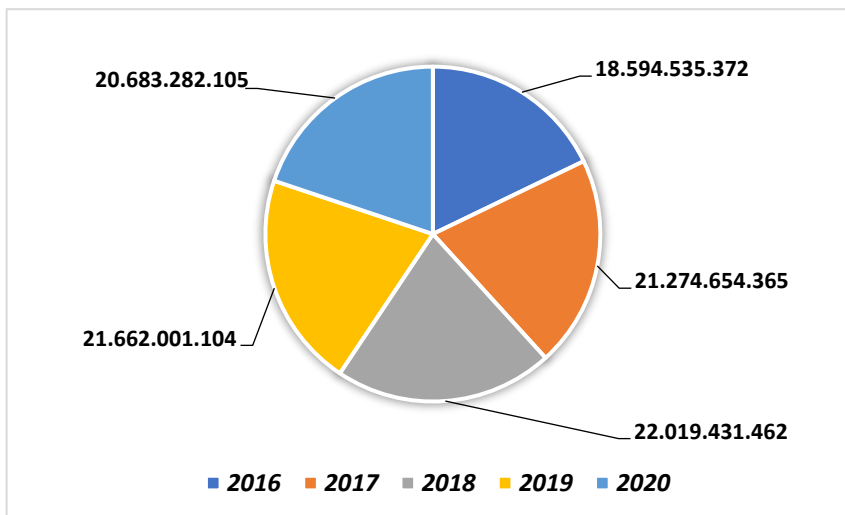
Rata-rata pertumbuhan pada sektor pajak reklame sebesar 34,63% dalam kurun waktu 2016-2020 hal ini disebabkan semakin meningkatnya pemanfaatan penggunaan videotron/papan reklame/billboard. Masyarakat dan pelaku usaha yang sudah memahami pemanfaatan penggunaan videotron (bando jalan), billboard, papan, banner, baleho dan spanduk kain akan meningkatkan pendapatan usaha mereka, bahkan memudahkan untuk mengetahui lokasi usaha mereka, sehingga kedepannya semakin banyak pelaku usaha yang akan memanfaatkan titik-titik reklame yang disediakan.

Grafik 3.7
Pajak Reklame Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020



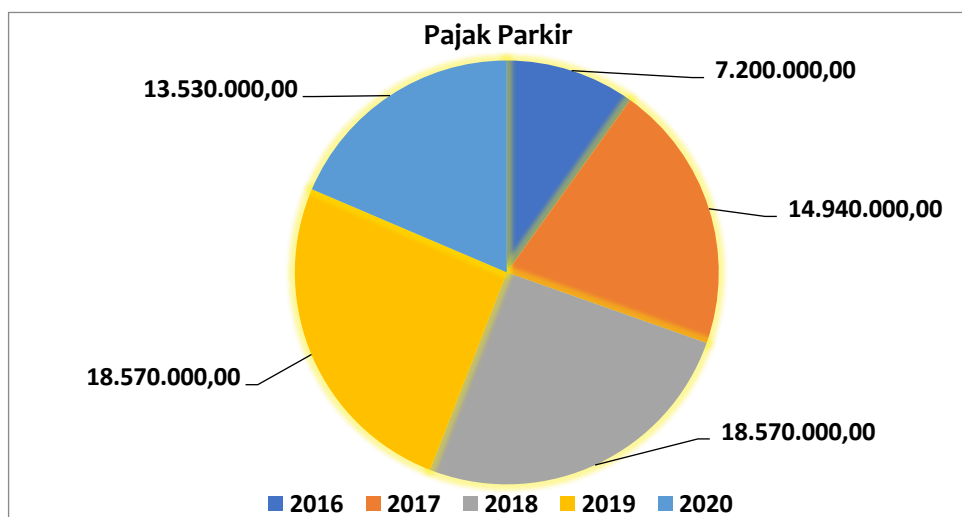
Pajak Penerangan Jalan dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2,70%, hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya semakin banyaknya pemanfaatan tenaga listrik yang menggunakan meteran analog dan token atau prabayar serta peningkatan tarif dasar listrik (TDL). Selain itu selama ini masyarakat yang menikmati subsidi dan harga diskon dari pemerintah karena adanya pandemic covid-19, sehingga masyarakat mulai membayar tarif dasar listrik yang normal.

Grafik 3.8
Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020



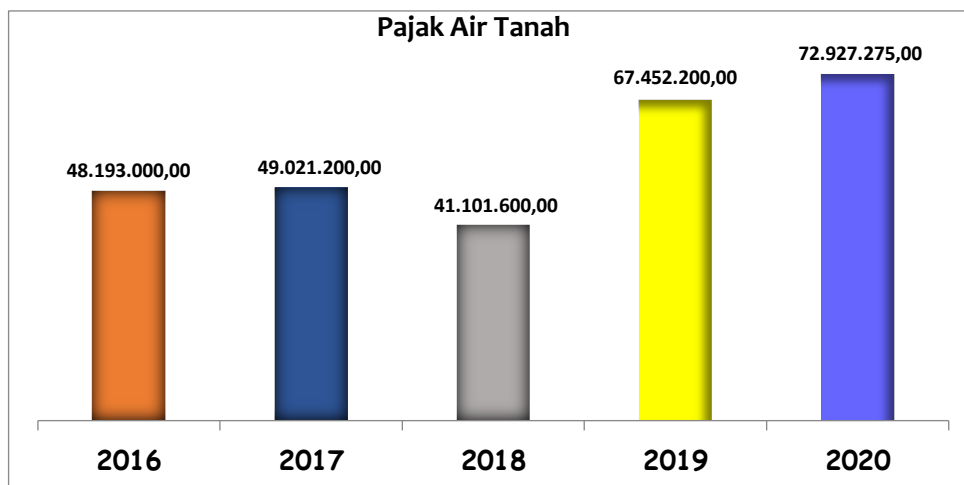
Pajak Parkir sepanjang kurun waktu 2016-2020 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 17,08%, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kerja sama dengan beberapa tempat pelayanan umum seperti kepada pelaku usaha modern, perbankan atau pertokoan/retailer seperti Indomaret, Alfamidi, Alfamart, Cahaya Ujung. Untuk kedepannya rumah makan dan cafetaria akan dipungut tarif pajak parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Grafik 3.9
Pajak Parkir Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020



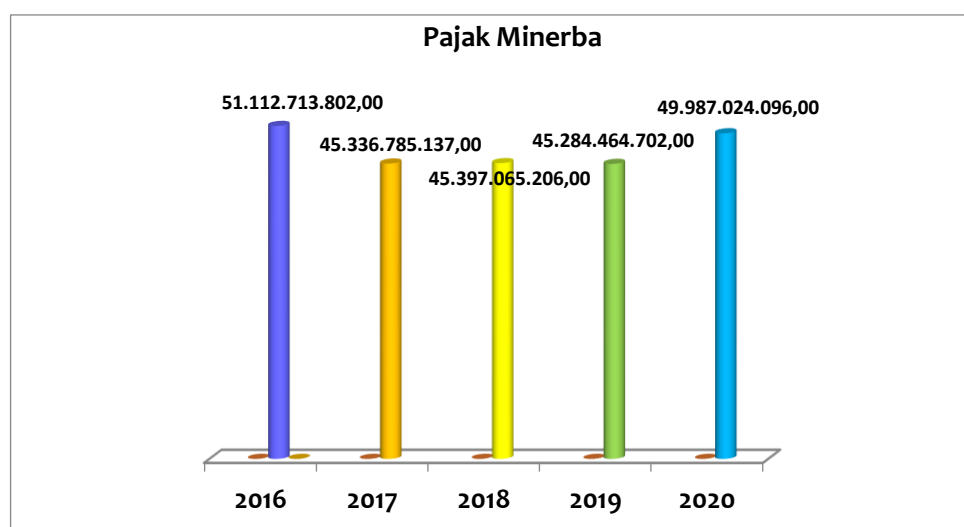
Pajak Air Tanah sepanjang kurun waktu 2016-2020 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 10,91%, hal ini disebabkan karena semakin aktif dalam melakukan pendataan yang memanfaatkan air tanah ini, seperti pada PT. Semen Tonasa dan PT. Satwa Utama Raya dimana ada penambahan sumur di beberapa lokasi penggunaan air tanah.

Grafik 3.10
Pajak Air Tanah Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020



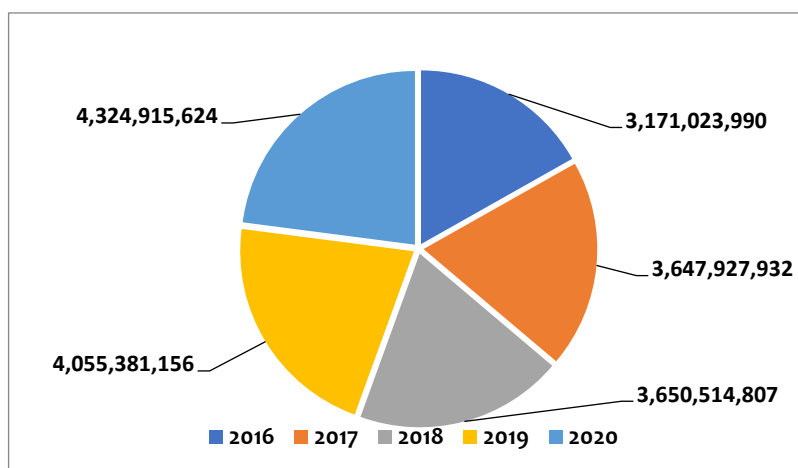
Kenaikan Harga Dasar Pajak Mineral Bukan Logam Batuan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417 / VI / Tahun 2020 Tentang Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, tidak membuat Pajak Minerba mengalami peningkatan karena realisasi yang terus menurun sejak tahun 2016-2020 disebabkan karena adanya beberapa perusahaan yang tidak beroperasi kembali, ada peningkatan realisasi di tahun 2020 karena adanya kenaikan Harga Dasar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tetap belum bisa mendongkrak rata-rata pertumbuhan, sehingga diakhir tahun 2020 untuk Pajak Minerba mengalami defisit sebesar 0,56% pada akhir periode.

Grafik 3.11
Pajak Minerba Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020



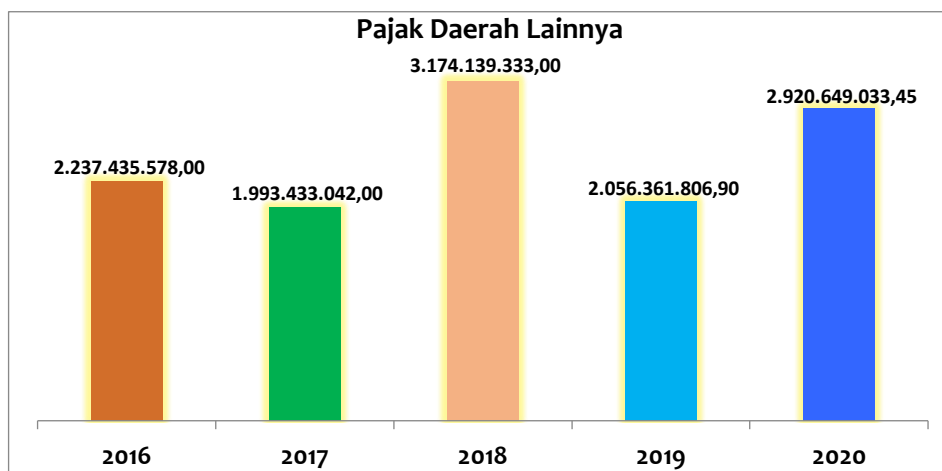
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) sepanjang kurun waktu 2016-2020 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 8,07%, hal ini disebabkan adanya peremajaan data obyek subyek tanah dan bangunan serta peningkatan pemanfaatan lahan yang dijadikan berbagai sarana, baik perumahan, perusahaan dan lain-lain serta penggunaan aplikasi perekaman STTS-PBB (SISMIOP). Namun dasar pengenaan atas PBB P-2 ini sebagian besar masih menggunakan NJOP beberapa tahun yang lalu dan belum dilakukan penyesuaian, kecuali Kecamatan Balocci dan Segeri.

Grafik 3.12
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Perkotaan dan Perdesaan
Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020



Pajak Daerah Lainnya merupakan Pajak Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sepanjang kurun waktu 2016-2020 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 6,89% hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya terjadinya transaksi jual beli tanah dimasyarakat dalam jumlah lahan yang luas untuk dibangun sarana perumahan serta tempat usaha yang baru dan pemukiman masyarakat, hanya saja di tahun 2020 dengan adanya pandemic covid-19 mengakibatkan penurunan pendapatan dari sektor ini.

Grafik 3.13
Pajak Daerah Lainnya Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020



1.b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor Retribusi Daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berkontribusi cukup kecil terhadap Pendapatan Daerah tetapi tetap dilakukan upaya – upaya untuk meningkatkan penerimaannya dengan cara memperbaiki regulasi yang menjadi dasar pemungutannya.

Tabel 3.3
Retribusi Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
Tahun 2016-2020

No	Uraian						Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pendapatan Retribusi Daerah	44.441.430.495,00	6.722.211.814,00	7.552.825.277,00	8.382.643.655,00	6.960.700.326,00	-37,09%
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	39.393.387.303,00	2.122.953.796,00	3.119.119.000,00	4.541.602.000,00	2.932.474.454,00	-47,77%
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	226.510.000,00	209.508.500,00	319.947.500,00	315.247.500,00	287.960.000,00	6,18%
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	288.308.000,00	321.451.000,00	308.761.000,00	288.538.000,00	208.750.000,00	-7,76%
	Retribusi Pelayanan Pasar	1.231.493.575,00	1.301.818.668,00	1.205.839.200,00	1.057.955.570,00	911.693.000,00	-7,24%
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	50.140.000,00	62.883.500,00	55.542.500,00	70.528.000,00	18.895.500,00	-21,65%
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.750.000,00	2.000.000,00	1.750.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	26,63%
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	91.294.701,00	-	-	73.912.500,00	492.489.900,00	52,40%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.722.395.000,00	1.274.805.000,00	1.281.802.500,00	1.132.195.000,00	1.341.320.000,00	-6,06%
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	74.000.000,00	74.816.000,00	67.200.000,00	80.656.000,00	72.630.000,00	-0,47%
	Retribusi Terminal	100.150.000,00	86.406.505,00	48.963.521,00	12.000.000,00	7.900.000,00	-47,00%
	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.925.000,00	53.725.000,00	73.010.000,00	69.860.000,00	63.455.000,00	5,65%
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	24.515.000,00	26.000.000,00	25.965.000,00	26.125.000,00	30.387.500,00	5,52%
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	52.317.000,00	52.350.000,00	37.400.000,00	28.960.000,00	26.495.000,00	-15,64%
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	661.112.416,00	1.031.068.845,00	1.007.125.056,00	680.989.085,00	561.324.972,00	-4,01%
	Retribusi Izin Gangguan	471.157.500,00	101.575.000,00	-	-	-	-100,00%
	Retribusi Izin Trayek	1.975.000,00	850.000,00	400.000,00	75.000,00	425.000,00	-31,89%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Realisasi penerimaan retribusi daerah selama lima tahun mengalami penurunan dengan rata - rata persentase (37,09%) hal ini disebabkan beberapa potensi mengalami penurunan karena kebijakan pemerintah pusat yang memindahkan kewenangannya dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi seperti retribusi terminal yang memindahkan kewenangan terminal type b menjadi kewenangan pemerintah provinsi, pelaksanaan uji KIR bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, retribusi izin trayek lebih banyak dilaksanakan secara teknis di Kota Makassar dibandingkan di Kota Pangkajene serta pencabutan retribusi gangguan (HO).

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mengalami penurunan pendapatan karena terkendala dalam melakukan penagihan pada tahun 2017 dan 2018 disebabkan adanya gugatan oleh PT. Kame Komunikasi Indonesia terkait penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal 2% sesuai NJOP.

Begitu pula dengan berubahnya status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Siang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2017, mengakibatkan berkurangnya salah satu potensi pendapatan retribusi kesehatan, karena pendapatan atas BLUD tersebut pindah sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Retribusi Izin Gangguan yang dicabut dasar pemungutannya oleh Kementrian Dalam Negeri pada pertengahan 2017, mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sejak tahun 2017 kehilangan salah satu potensi pendapatannya.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami defisit rata-rata pertumbuhan, hal ini disebabkan beberapa hal, diantaranya masih harus memperbaiki komunikasi antara OPD terkait dalam menerbitkan IMB tersebut.

1.c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan pada perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan PAD sangat dibutuhkan dalam mengerjakan ekonomi.

Tabel 3.4
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun					Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
2	3	4	5	6	7	8
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.916.672.337,00	11.264.745.448,35	10.630.772.849,00	12.391.379.384,00	11.432.941.608,00	1,16%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	692.659.846,00	-	500.000.000,00	-	18.000.000,00	-59,85%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN	10.224.012.491,00	11.264.745.448,35	10.130.772.849,00	12.391.379.384,00	11.414.941.608,00	2,79%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Jenis penerimaan lainnya yang termasuk dalam kelompok pendapatan asli daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari; penerimaan bagi hasil laba BUMD yaitu penerimaan deviden dari Bank Sulawesi Selatan dan Barat dan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Rata-rata pertumbuhan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sebesar 1,16%. Hal ini disebabkan selama periode 2016-2021 pemerintah kabupaten melakukan penyertaan modal pada PT. Bank SulSelbar sebesar Rp.10.000.000.000,00 dan pada BPR Citra Mas sebesar Rp.1.500.000.000,00.

Untuk penyertaan modal pada BUMD, pemerintah kabupaten belum menerima deviden secara maksimal seperti pada BPR Citra Mas, hal ini disebabkan penyertaan modal Pemda belum mencapai angka minimal yang telah ditetapkan oleh OJK sebesar Rp.6.000.000.000,00, sedangkan pemda pangkep telah menyertakan modalnya sebesar Rp.4.625.000.000,00.

Perusahaan Daerah Mappatuwo belum memberikan kontribusi selama periode 2016-2019, disebabkan karena perusahaan ini melaporkan kerugian dalam pengelolaannya dan belum pernah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), namun pada tahun 2020 perusahaan ini sudah menyeter sebesar Rp.18.000.000,00 sebagai deviden tanpa hasil audit dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelumnya.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) belum pernah memberikan kontribusi selama periode 2016-2020 karena selalu menyajikan laporan keuangan dalam kondisi rugi.

1.d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD, pendapatan dari JKN Kapitasi dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.5
Lain-Lain PAD yang sah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
Tahun 2016-2020

No	Uraian	TAHUN					Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lain-Lain PAD yang Sah	25.303.470.799,17	71.871.768.476,19	75.402.277.864,05	89.406.541.535,00	97.771.768.633,22	40,20%
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	16.500.000,00	39.815.013,00	113.826.032,00	30.292.000,00	22.406.000,00	7,95%
	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-	0,00%
	Penerimaan Jasa Giro	3.478.490.972,55	1.978.933.897,99		4.150.706.960,67	4.399.802.418,92	6,05%
	Pendapatan Bunga	2.633.804.186,08	2.916.849.394,00	2.619.657.554,00	2.571.599.791,46	7.069.381.321,14	28,00%
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.070.798.950,51	1.925.479.366,27	773.022.947,32	1.043.474.747,47	808.774.870,60	-6,78%
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	331.171.148,81	-	334.178.494,89	41.592.274,55	131.361.265,10	-20,64%
	Pendapatan Denda Pajak	-	60.869.283,00	8.773.334,00	65.745.357,56	-	3,93%
	Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	-	-	0,00%
	Pendapatan dari Pengembalian	564.395.541,22	384.452.671,00	1.201.510.515,59	1.916.593.305,79	693.598.399,37	5,29%
	Pendapatan BLUD	-	45.311.364.841,40	46.994.121.998,25	54.334.542.779,50	59.495.671.968,09	9,50%
	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	168.800.000,00	-	-	-	-	-100,00%
	Lain-Lain PAD yang Sah lainnya	16.953.010.000,00	-	-	111.613.536,00	447.579.509,00	-59,69%
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	-	19.101.504.009,53	22.926.706.488,00	23.791.475.532,00	23.345.916.482,00	6,92%
	Penerimaan Lain-lain	86.500.000,00	152.500.000,00	101.500.000,00	35.000.000,00	144.000.000,00	13,59%
	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	-	-	328.980.500,00	1.313.905.250,00	1.213.276.399,00	92,04%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Gambaran realisasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selama periode 2016-2020 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 40,20%, hal ini disebabkan sejak tahun 2017 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkep berubah pengelolaan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 283 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pendapatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bersumber dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kapitasi mulai dianggarkan sebagai rincian pendapatan pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejak tahun 2017 dan terpisah dari retribusi pelayanan umum yang ada pada retribusi pelayanan kesehatan, sedangkan yang menjadi bagian dari retribusi pelayanan kesehatan merupakan Pendapatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bersumber dari JKN Non Kapitasi dan Pendapatan Sarana Kesehatan.

2. Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Dana Perimbangan. Dana perimbangan merupakan salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang diterima pemerintah daerah dan tercantum dalam APBD setiap tahun.

Tabel 3.6
Dana Perimbangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
Tahun 2016-2020

Uraian	TAHUN					Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
2	3	4	5	6	7	8
Dana Perimbangan	1.114.262.819.971,00	1.010.789.986.729,00	1.032.137.488.223,00	1.011.383.049.413,00	961.344.950.496,00	-3,62%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	30.954.288.350,00	31.252.940.140,00	24.873.535.233,00	23.653.274.163,00	24.647.150.589,00	-5,54%
Bagi Hasil Pajak	23.187.965.472,00	27.438.649.541,00	20.095.060.874,00	17.909.485.604,00	20.242.051.573,00	-3,34%
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7.766.322.878,00	3.814.290.599,00	4.778.474.359,00	5.743.788.559,00	4.405.099.016,00	-13,22%
Dana Alokasi Umum (DAU)	701.629.223.000,00	689.947.090.000,00	752.773.975.000,00	784.495.577.000,00	713.388.948.000,00	0,42%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	381.679.308.621,00	289.589.956.589,00	254.489.977.990,00	203.234.198.250,00	223.308.851.907,00	-12,54%
DAK Reguler	250.024.672.686,00	100.966.602.942,00	49.893.574.208,00	59.153.846.162,00	67.962.940.153,00	-27,79%
DAK IPD	33.399.484.414,00	-	-	-	-	-100,00%
DAK Affirmasi	6.319.209.000,00	-	-	-	-	-100,00%
DAK Non Fisik	90.381.567.521,00	125.233.053.647,00	122.554.434.713,00	133.966.536.012,00	140.669.915.933,00	11,69%
DAK P2D2	1.554.375.000,00	-	-	-	-	-100,00%
DAK Penugasan	-	63.390.300.000,00	82.041.969.069,00	10.113.816.076,00	14.675.995.821,00	-38,60%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

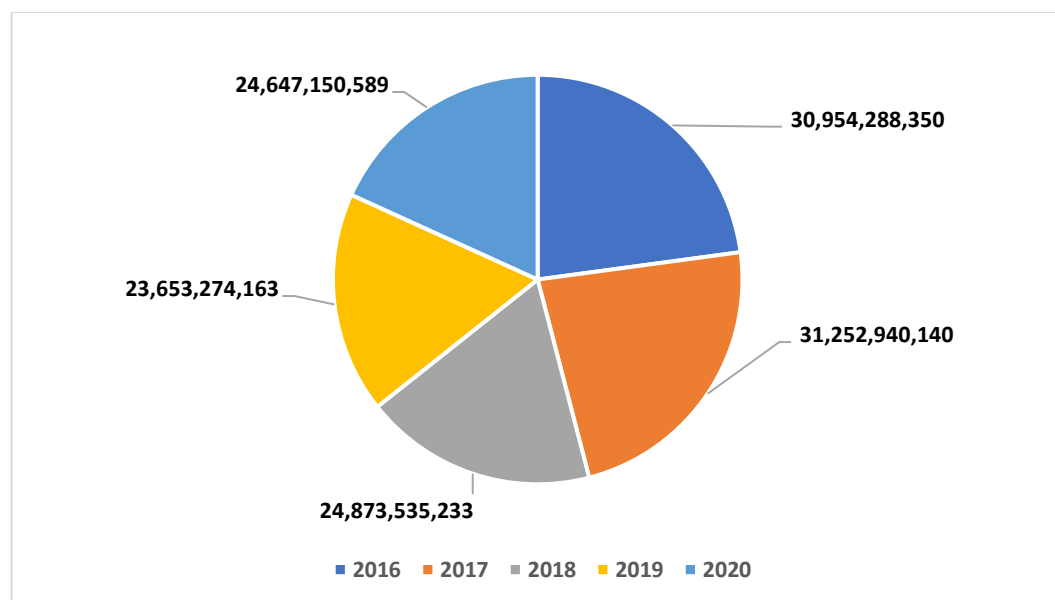
Selama tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 alokasi anggaran dana perimbangan untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami defisit pertumbuhan rata-rata sebesar (3,18%). Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar (6,20%) dari pendapatan tahun 2019. Penyebab turunnya dari pendapatan Dana Perimbangan pada tahun 2020 adanya PMK 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

Bagian penerimaan dari dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat meliputi;

2.a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu mendanai daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Grafik 3.14
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020

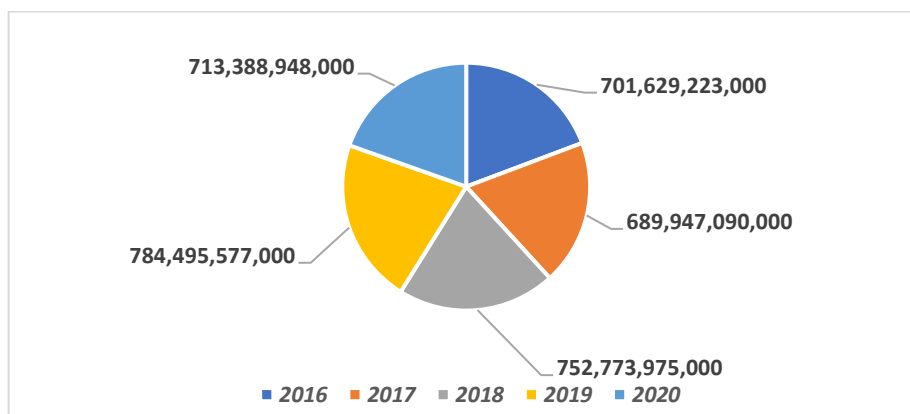


Selama periode tahun anggaran 2016 - 2020 Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami defisit yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak dengan rata-rata pertumbuhan (5,54%). Hal ini disebabkan karena adanya pemindahan kewenangan urusan pemerintahan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, seperti kewenangan tentang Kehutanan, Kelautan dan Pertambangan, menyebabkan beberapa potensi pendapatan yang biasanya diterima menjadi berkurang bahkan tidak dapat sama sekali.

2.b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Grafik 3.15
Dana Alokasi Umum
Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020



Sejak Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mulai menerima Dana Alokasi Umum yang di peruntukan sebagai Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan yang diperuntukan sebagai Dana Kelurahan.

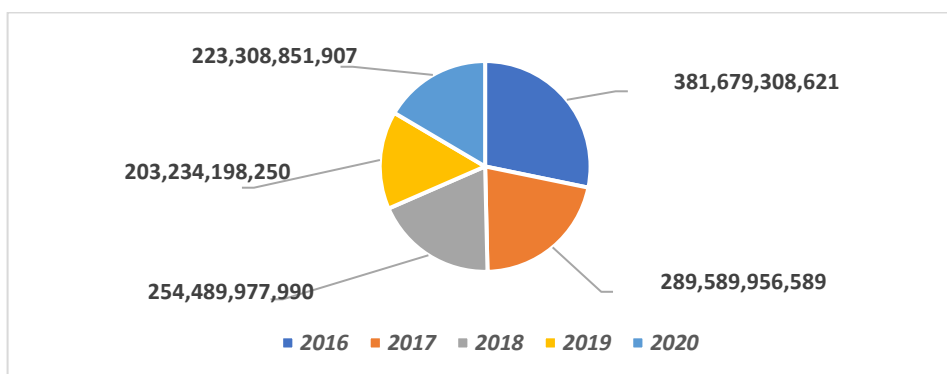
Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) Reguler mengalami peningkatan sebesar dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,42%.

Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Reguler terdapat A sebesar 10% yang diperuntukan pemanfaatannya sebagai Alokasi Dana Desa (ADD) dan sebagai bagian dari pendampingan Dana Kelurahan yang diambil besarnya dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang terkecil.

2.c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Grafik 3.16
Dana Alokasi Khusus
Kabupaten Pangkep Tahun 2016 s/d 2020



Untuk jenis penerimaan transfer ini sama kedudukannya dengan penerimaan Dana Alokasi Umum. Setiap tahun selama tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami defisit pertumbuhan rata-rata sebesar (12,54%).

Untuk mendapatkan anggaran pada Dana Alokasi Khusus (DAK) ini OPD setiap tahunnya mengajukan usulan melalui aplikasi e-Planning Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), kemudian akan dilakukan konfirmasi oleh kementerian terkait sehingga akan ada pagu definitif yang tercantum pada Peraturan Presiden (Perpres) atau melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sifatnya tentatif berdasarkan usulan dan menjadi program prioritas dari pemerintah pusat.

Sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memperoleh Dana Alokasi Khusus yang berfluktuatif anggarannya dan terdiri dari berbagai jenis bidang urusan DAK, seperti DAK Reguler, DAK IPD, DAK Affirmasi, DAK Non Fisik, DAK P2D2, DAK Penugasan.

Untuk DAK Non Fisik dalam periode tahun 2016 - 2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,69% hal ini dikarenakan semakin banyaknya urusan bidang yang tercantum sebagai bagian dari DAK Non Fisik, seperti Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan dan Kesetaraan, Dana Pelayanan Kepariwisata karena semakin banyaknya penerima manfaat.

Untuk DAK Penugasan selama periode tahun 2016 - 2020 mengalami defisit pertumbuhan rata-rata sebesar (38,60%), hal ini dikarenakan ada kriteria teknis dan lokasi prioritas yang tidak mampu dipenuhi oleh OPD pengusul, seperti status kelembagaan, lahan aset pemda, luas lahan pertanian, daerah terkena dampak bencana, rawan pangan, stunting dan miskin, daerah yang memiliki Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian, Pangan Berkelanjutan, daerah perbatasan, sentra produksi komoditas.

3. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian, bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Tabel 3.7
Dana Perimbangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
Tahun 2016-2020

No	Uraian	TAHUN					Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	130.273.273.299,60	185.520.578.299,00	163.574.302.755,00	208.895.525.900,80	190.873.229.372,66	10,02%
	Pendapatan Hibah	19.442.241.309,00	63.575.350.462,00	45.782.920.000,00	48.139.400.000,00	52.744.135.000,00	28,34%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	47.149.673.928,60	47.972.622.280,00	42.214.848.870,00	57.393.104.300,80	49.130.449.372,66	1,03%
	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	13.595.548.629,00	10.366.769.779,00	8.973.042.896,00	13.373.783.181,00	11.022.887.431,00	-5,11%
	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.097.791.998,00	9.166.344.925,00	6.642.549.412,00	10.472.261.534,00	7.317.094.008,00	0,76%
	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan diatas Air	728.883.934,00	-	-	-	-	-100,00%
	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.476.746.954,00	13.779.423.119,00	12.128.140.796,00	17.075.303.761,00	13.536.838.401,00	6,62%
	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	95.090.759,00	121.100.151,00	67.627.796,00	80.886.800,00	75.287.658,00	-5,67%
	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	15.155.611.654,60	14.538.984.306,00	14.403.487.970,00	16.390.869.024,80	17.178.341.874,66	3,18%
	Dana Penyesuaian	49.093.759.000,00	63.085.494.357,00	64.274.262.000,00	93.222.008.800,00	71.528.276.000,00	9,87%
	Dana Insentif Daerah (DID)	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	4.000.000.000,00	22.023.525.000,00	-	-100,00%
	Dana Desa dari APBN	44.093.759.000,00	55.585.494.357,00	60.274.262.000,00	71.198.483.800,00	71.528.276.000,00	12,86%
	Bantuan Keuangan	14.587.599.062,00	10.887.111.200,00	11.302.271.885,00	10.141.012.800,00	17.470.369.000,00	4,61%
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	2.000.000.000,00	-	5.679.808.000,00	68,52%
	Bantuan Keuangan dari Provinsi (bantuan penguatan Otoda)	14.587.599.062,00	10.887.111.200,00	9.302.271.885,00	10.141.012.800,00	11.790.561.000,00	-5,18%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3.a. Pendapatan Hibah

Pendapatan ini merupakan pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah pusat, sepanjang periode tahun 2016-2020 berbagai macam pendapatan Hibah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, diantaranya Pendapatan WISMP, Pendapatan Dana BOS, Pendapatan Non Kas dan Pendapatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pendapatan ini mengalami pertumbuhan sebesar 28,34%, yang setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat berupa Pendapatan Dana BOS, kriteria yang digunakan adalah jumlah peserta didik SD dan SMP dikalikan dengan biaya pendidikan/bulannya, sehingga ketika dialokasikan kesekolah-sekolah akan berbeda jumlahnya sesuai jumlah siswa.

3.b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Merupakan bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, untuk periode tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,03%, pendapatan ini merupakan pendapatan yang bersumber pemanfaatannya berlokasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, seperti Bagi Hasil Provinsi untuk Pajak Rokok, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea-Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pencapaian tertinggi dicapai pada tahun 2019 dengan realisasi sebesar Rp57.393.104.300,80. Hal ini tercapai karena pada sepanjang tahun 2019 sering dilaksanakan razia gabungan, antara Bapenda, Samsat, Perhubungan dan Kepolisian yang bertujuan untuk memeriksa masa berlaku pajak kendaraan, pelaksanaan sosialisasi secara rutin untuk pembelian Bahan Bakar Kendaraan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

3.c. Dana Penyesuaian

Pendapatan ini merupakan pendapatan Hibah dari pemerintah pusat atau disebut sebagai Dana Penyesuaian yang terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa dari APBN. Untuk periode 2016 – 2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,87%, dengan kenaikan yang signifikan bersumber dari Dana Desa dari APBN, sedangkan untuk Dana Insentif Daerah (DID) justru pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak memperoleh dana tersebut.

Untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan wajib memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, diantaranya;

1. Opini BPK atas LKPD wajib opini WTP,
 2. Penetapan Perda tepat waktu dan
 3. Melaksanakan e-goverment (e-planning dan e-budgeting)
- serta kriteria pendukung, diantaranya ;

1. Memiliki kinerja melewati Passing Grade B,
2. Kesehatan Fiscal dan Pengelolaan Keuangan Tax-in Power, Quality of Standing,
3. Inovasi Daerah,
4. SAKIP,
5. Kemudahan Usaha,
6. Pengelolaan Sampah dan beberapa kriteria pendukung lainnya.

3.d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya

Bantuan Keuangan ini diprioritaskan untuk kesehatan gratis yang setiap tahunnya dilakukan Mou antara Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Kantor BPJS Makassar tentang jumlah peserta BPJS yang ditanggung oleh pemerintah kabupaten, hasil dari Mou inilah yang menjadi dasar alokasi bantuan keuangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengakomodir sebesar 40% dari jumlah perjanjian, sisanya ditanggung sendiri sebesar 60% oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Untuk periode tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 28,34%, karena setiap tahunnya makin bertambahnya jumlah penduduk yang ditanggung oleh pemerintah.

3.1.1.2 Kinerja Pelaksanaan Belanja Daerah

Secara umum komponen belanja daerah terdiri dari (1) Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, dan Belanja Tidak Terduga; (2) Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama lima tahun anggaran yaitu periode tahun 2016 sampai dengan 2020 telah menerapkan sistem pendanaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib Pelayanan Dasar, Wajib Bukan Pelayanan Dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang.

Hal ini menunjukkan bahwa belanja yang dialokasikan pada masing-masing SKPD dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat diserap dengan baik sehingga kinerja keuangan belanja mendorong peningkatan kinerja yang baik untuk periode yang akan datang.

Urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, yang pelaksanaannya melalui program dan kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Demikian pula untuk urusan pilihan yang merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata dapat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kearifan lokal dan keunggulan yang dimiliki daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Realisasi belanja daerah dalam rangka pendanaan urusan wajib dan urusan pilihan selama periode tahun anggaran 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel 3.8;

Tabel 3.8
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun Anggaran 2016-2020

U R A I A N	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA	1.401.482.667.933,81	1.338.815.258.407,65	1.393.344.749.057,23	1.379.726.940.481,10	1.355.935.703.352,36	-0,82%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	674.918.758.849,81	661.678.226.511,00	727.268.407.229,00	786.924.023.104,00	834.866.557.830,20	5,46%
Belanja Pegawai	581.197.295.502,00	495.464.658.051,00	537.022.617.887,00	577.289.209.414,00	568.119.636.265,00	-0,57%
Belanja Bunga	1.903.212,61			427.963.895,00	514.316.875,00	305,45%
Belanja Hibah	30.141.003.600,00	35.730.396.960,00	44.352.841.742,00	50.521.787.795,00	84.799.951.912,00	29,51%
Belanja Bantuan Sosial	1.858.700.000,00	1.874.750.000,00	3.755.700.000,00	6.425.500.000,00	17.262.839.750,00	74,57%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	61.197.375.535,20	128.608.421.500,00	141.173.631.600,00	151.848.548.000,00	145.138.424.526,00	24,10%
Belanja Tidak Terduga	522.481.000,00	0,00	963.616.000,00	411.014.000,00	19.031.388.502,20	145,67%
BELANJA LANGSUNG	726.563.909.084,00	677.137.031.896,65	666.076.341.828,23	592.802.917.377,10	521.069.145.522,16	-7,98%
Belanja Pegawai	26.004.524.900,00	44.537.808.058,00	12.014.019.199,00	4.997.617.587,00	5.581.171.029,00	-31,94%
Belanja Barang dan Jasa	209.932.761.163,00	279.717.779.048,65	331.324.166.480,00	352.689.851.566,10	318.861.432.678,36	11,01%
Belanja Modal	490.626.623.021,00	352.881.444.790,00	322.738.156.149,23	235.115.448.224,00	196.626.541.814,80	-20,43%

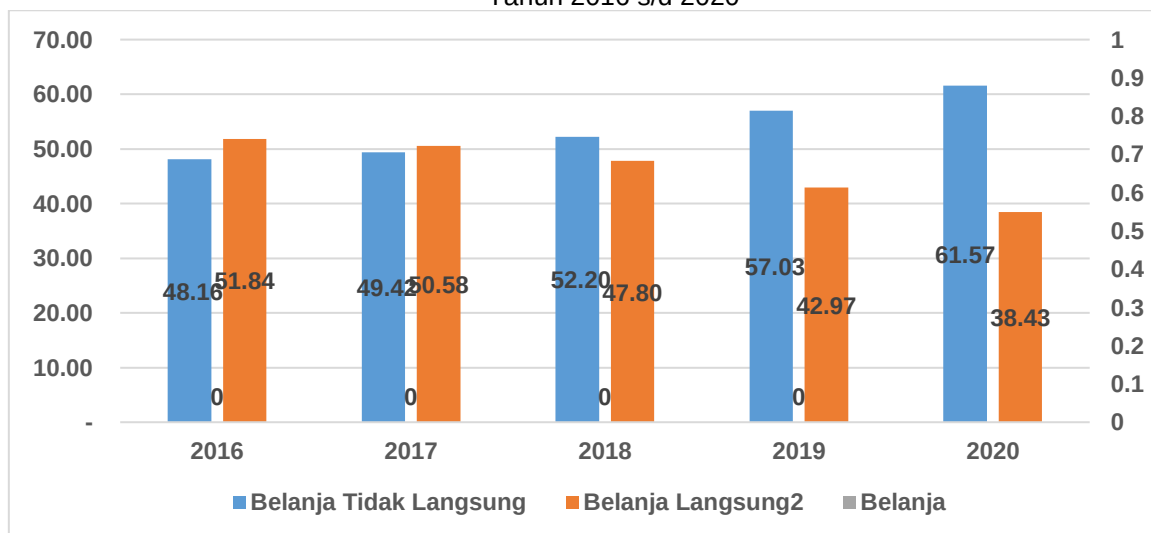
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan belanja daerah selama lima tahun anggaran periode 2016 sampai dengan 2020 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Dari sisi alokasi anggaran belanja daerah setiap tahun mengalami penurunan rata-rata (0,52%) dan penurunan realisasi belanja setiap tahun rata -rata 15,31%.

Secara umum kinerja dalam pengelolaan keuangan khusus belanja daerah sangat baik dengan melihat dari sisi penganggaran dan realisasi belanja rata -rata diatas 90%. Hal tersebut sangat dipengaruhi adanya kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan belanja daerah selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Selanjutnya jika ditelaah struktur belanja daerah berdasarkan kelompok belanja maka terlihat masih besarnya belanja daerah yang teralokasi pada belanja tidak langsung. Selama periode 2016 sampai 2020, peranan belanja tidak langsung mencapai kisaran angka sebesar 50,00 persen sampai dengan 61,57 persen. Sedangkan proporsi belanja langsung mencapai kisaran angka 40,00 persen sampai dengan 38 persen. Komposisi belanja tidak langsung yang lebih besar mengindikasikan terbatasnya kapasitas fiskal daerah untuk mendukung belanja program dan kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

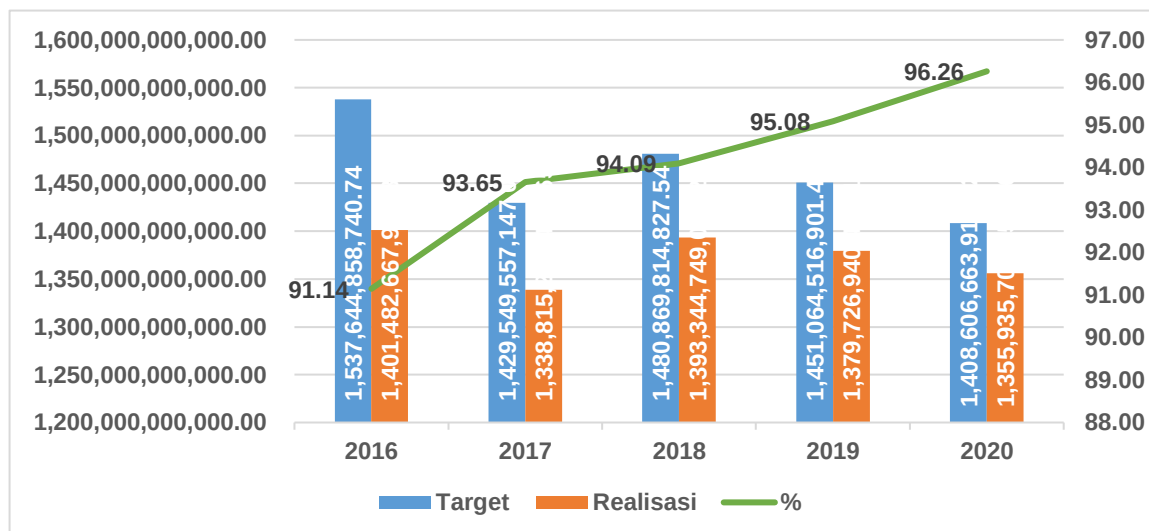
Grafik 3.17
Komposisi Belanja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2016 s/d 2020



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Selama periode tahun 2016-2020, realisasi belanja belum sesuai rencana yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari data realisasi belanja daerah yang mencapai kisaran angka sebesar 91% sampai dengan 96% sebagaimana pada grafik 3.18:

Grafik 3.18
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2016 s/d 2020



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Melihat rata-rata rasio pertumbuhan alokasi anggaran dan realisasi belanja menunjukkan peningkatan setiap tahun, namun masih terjadi permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah yaitu :

- Pedoman pengelolaan belanja daerah sering mengalami perubahan yang relatif lebih cepat dan terjadi in-konsisten terhadap peraturan perundang-undangan antara satu dengan yang lainnya;
- Masih kurangnya sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitasnya khususnya dalam pengelolaan belanja daerah;
- Masih kurangnya komitmen yang keras pimpinan dalam pengelolaan belanja;
- Keterlambatan dalam pelaksanaan anggaran disebabkan oleh Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dari Pemerintah Pusat terlambat ditetapkan seperti petunjuk teknis pengelolaan Dana DAK;
- Keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa yang menyebabkan utang pihak ketiga meningkat;
- Perbedaan penafsiran dari satu pasal atau ayat dari ketentuan peraturan perundang-undangan sering terjadi antara lembaga-lembaga Pemerintah yang berkompeten dalam pembiayaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

2 Solusi Permasalahan Belanja Daerah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah-langkah sehingga pencapaian asas umum belanja daerah dapat dilakukan sesuai ketentuan perundangan-undangan, antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga-lembaga yang berkompeten antara lain Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan saat Pembangunan (BPKP) dan Departemen Keuangan Republik Indonesia terhadap aturan yang setiap saat berubah;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan baik bekerja sama dengan universitas maupun ikut serta dalam workshop pengelolaan keuangan daerah, dan untuk meningkatkan kuantitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah memprioritaskan penerimaan PNS yang berlatar belakang pendidikan ekonomi dan akuntansi;
- c. Untuk penyajian data yang cepat dan akurat dalam pengelolaan keuangan daerah digunakan Informasi Teknologi (sistem komputerisasi) dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
- d. Menetapkan ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah melakukan penyesuaian atau revisi dengan ketentuan yang baru;
- e. Diperlukan komitmen pimpinan dalam pengelolaan belanja daerah.

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Dalam penetapan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selain pendapatan dan belanja terdapat pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berfungsi untuk menutupi defisit sementara pengeluaran pembiayaan untuk memanfaatkan surplus yang ada. Pembiayaan daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan selama lima tahun anggaran dari tahun 2016 sampai 2020 mempunyai fungsi untuk menutupi defisit belanja. Pembiayaan Daerah meliputi;

- a. Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya dan Penerimaan piutang daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan daerah, yang terdiri dari Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah daerah dan Pembayaran pokok utang;

Penerimaan pembiayaan Periode tahun anggaran 2016–2020, total target penerimaan pembiayaan sebesar Rp.351.849.185.552,15 dan total realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 290.355.526.378,00 dengan presentase rata-rata pertumbuhan capaian sebesar 8,65%, secara rinci untuk setiap tahun anggaran dapat dilihat pada tabel 3.5;

Tabel 3.9
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
Tahun 2016-2020

U R A I A N	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	67.899.210.834,74	49.317.860.800,65	65.725.206.247,54	87.098.884.419,25	96.046.512.437,97	9,06%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	67.899.210.834,74	49.317.860.800,65	65.725.206.247,54	37.052.012.219,25	70.361.236.275,97	0,89%
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	50.046.872.200,00	25.685.276.162,00	0,00%
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.461.256.004,05	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	42.351.524.700,00	34.885.147.142,00	17,25%
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	18.429.986.759,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	-46,59%
Pembayaran Utang Pokok	31.269.245,05	0,00	0,00	42.351.524.700,00	33.385.147.142,00	471,62%
PEMBIAYAAN NETTO	49.437.954.830,69	44.317.860.800,65	60.725.206.247,54	44.747.359.719,25	61.161.365.295,97	5,46%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	48.718.011.790,65	64.587.067.335,54	37.380.992.728,25	70.361.236.275,17	53.974.742.469,54	2,59%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3.1.2 Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek dan jangka panjang) dan Ekuitas suatu pemerintah daerah. Gambaran umum perkembangan neraca daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada periode tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa jumlah nilai total aset daerah mengalami penurunan selama periode 2016-2020. Pada tahun 2016, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp.2,027 triliun yang kemudian menurun menjadi sebesar Rp 2,204 triliun pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 kemabli menurun sebesar Rp. 2,204 triliun dan Rp.2.199 triliun di tahun 2019. Faktor utama penyebab turunnya nilai total aset daerah pada tahun 2016 adalah pemberlakuan basis akrual akuntansi keuangan

daerah yang memperhitungkan penyusutan nilai aset tetap daerah dan penghapusan aset yang mengalami rusak berat sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi.

3.1.2.1 Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter.

Analisis aset meliputi empat aspek utama, yakni aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Sepanjang kurun waktu 2016-2020 kabupaten pangkajene dan Kepulauan mencatat perkembangan aset dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,44 persen. Rendahnya pertumbuhan aset daerah menunjukkan bahwa pemanfaatan aset lancar diutamakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek daerah.

3.1.2.2 Kewajiban

Analisis yang terkait dengan kewajiban daerah, diklasifikasikan ke dalam dua komponen, yakni kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya membutuhkan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) mengalami fluktuasi penurunan yang cukup signifikan, yakni dengan rata-rata penurunan deficit 11,87 persen. Fluktuasi nilai kewajiban dengan pihak ketiga dapat dilihat sebagai hal yang wajar selama manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin profesional dan digunakan secara tepat untuk program yang relevan, kenaikan tersebut disebabkan karena meningkatnya utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga (rekanan).

3.1.2.3 Ekuitas Dana

Secara konseptual, ekuitas dana merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah yang terbagi dalam 3 (tiga) klasifikasi, yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri. Selama periode 2016-2020 ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1,89 persen. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama kurun waktu tersebut mampu menciptakan keseimbangan keuangan yang baik, antara asset daerah, kewajiban dan ekuitas dana.

Tabel 3.10
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2016-2019

No	Uraian	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	ASET				
2	ASET LANCAR				
3	Kas di Kas Daerah	34.301.973.317,05	62.236.558.830,92	48.359.056.648,34	18,74%
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	8.862.005,00	50.285.987,00	408.800.452,00	579,19%
5	Kas di Bendahara Penerimaan	53.846.000,00	7.527.000,00	12.628.000,00	-51,57%
6	Kas di Bendahara BLUD	84.761.085,65	4.929.495.444,05	1.056.698.036,20	253,08%
7	Kas di Bendahara FKTP	2.097.279.808,55	-	-	-100,00%
8	Kas di Bendahara BOS	834.270.512,00	3.162.027.501,00	4.160.597.106,00	123,32%
9	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	133.113.623,65	-	-	-100,00%
10	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	0,00%
11	Piutang Pajak Daerah	74.440.350.948,00	76.698.512.276,32	86.834.592.146,89	8,00%
12	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	- 63.908.894.073,42	- 65.720.951.113,11	- 67.754.013.443,87	2,96%
13	Piutang Pajak Daerah Netto	10.531.456.874,58	10.977.561.163,21	19.080.578.703,02	34,60%
14	Piutang Retribusi Daerah	1.843.675.251,86	2.179.405.901,86	2.241.362.901,86	10,26%
15	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	- 1.099.208.015,89	- 1.159.713.346,76	- 1.080.553.905,06	-0,85%
16	Piutang Retribusi Daerah Netto	744.467.235,97	1.019.692.555,10	1.160.808.996,80	24,87%
17	Piutang Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Sah	358.643.187,00	441.724.772,00	441.724.772,00	10,98%
18	Penyisihan Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah	- 9.461.496,81	- 76.459.975,60	- 187.629.752,00	345,32%
19	Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah Netto	349.181.690,19	365.264.796,40	254.095.020,00	-14,70%
20	Piutang Lain-Lain PAD yang SAH	23.579.252.141,00	9.478.282.834,00	7.502.580.099,00	-43,59%
21	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	- 137.153.591,01	- 85.783.014,31	- 39.093.119,12	-46,61%
22	Piutang Lain-Lain PAD yang SAH Netto	23.442.098.549,99	9.392.499.819,70	7.463.486.979,88	-43,57%
23	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	16.314.760.028,00	12.690.134.562,90	12.668.011.209,00	-11,88%
24	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	- 81.573.800,14	- 63.450.672,82	- 63.340.056,05	-11,88%
25	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Netto	16.233.186.227,86	12.626.683.890,08	12.604.671.152,95	-11,88%
26	Piutang Lainnya	1.059.566.647,70	1.046.282.500,70	1.019.921.103,70	-1,89%
27	Penyisihan Piutang Lainnya	- 737.109.581,67	- 763.633.195,37	- 763.533.195,37	1,78%
28	Piutang Lainnya Netto	322.457.066,03	282.649.305,33	256.387.908,33	-10,83%
29	Beban dibayar Dimuka	64.435.879,74	147.347.534,49	72.081.449,86	5,77%
30	Persediaan	11.782.265.486,26	9.628.844.947,43	9.317.549.966,19	-11,07%
31	Jumlah Aset Lancar	100.983.655.362,52	114.826.438.774,71	104.207.440.419,58	1,58%
32	INVESTASI JANGKA PANJANG				
33	Investasi Non Permanen				
34	Investasi Permanen				
35	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	44.520.935.147,00	41.798.065.238,00	44.280.428.711,25	-0,27%
36	Jumlah Investasi Permanen	44.520.935.147,00	41.798.065.238,00	44.280.428.711,25	-0,27%
37	ASET TETAP				
38	Tanah	189.110.374.270,15	194.540.454.371,42	197.279.759.302,34	2,14%
39	Peralatan dan Mesin	455.386.546.097,43	500.264.850.521,15	545.168.979.240,47	9,41%
40	Gedung dan Bangunan	944.765.290.389,25	1.001.083.390.456,08	1.042.186.207.198,42	5,03%
41	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.906.811.072.070,27	2.012.116.018.078,52	2.111.026.702.280,27	5,22%
42	Aset Tetap Lainnya	19.255.766.885,94	19.513.421.392,55	18.473.568.042,73	-2,05%
43	Konstruksi dalam Pengerjaan	35.032.617.693,49	48.362.753.015,09	43.438.438.649,86	11,35%
44	Akumulasi Penyusutan	-1.562.463.709.787,31	-1.806.906.024.617,45	-2.049.415.483.799,07	14,53%
45	Jumlah Aset Tetap	1.987.897.957.619,22	1.968.974.863.217,36	1.908.158.170.915,02	-2,03%
46	DANA CADANGAN				
47	Dana Cadangan				
48	Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	

No	Uraian	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
49	ASET LAINNYA				
50	Tagihan Jangka Panjang	100.296.514,00	103.435.624,00	102.840.874,00	1,26%
51	Aset Tak Berwujud	2.343.831.803,75	3.341.561.785,17	3.568.157.155,17	23,38%
52	Amortisasi Aset Tak Berwujud	- 1.727.613.952,83	- 2.278.902.184,78	- 2.542.024.619,23	21,30%
53	Aset Tak Berwujud Netto	616.217.850,92	1.062.659.600,39	1.026.132.535,94	29,04%
54	Aset Lain-Lain	70.176.383.446,03	73.056.003.383,59	88.932.022.759,66	12,57%
55	Jumlah Aset Lainnya	70.892.897.810,95	74.222.098.607,98	90.060.996.169,60	12,71%
56	Jumlah Aset	2.204.295.445.939,69	2.199.821.465.838,05	2.146.707.036.215,45	-1,31%
57	KEWAJIBAN				
58	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
59	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	133.113.623,65	24.658.487,00	23.037.773,00	-58,40%
	Utang Bunga	-	-		
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-		
60	Pendapatan diterima dimuka	82.288.333,34	183.439.687,50	153.208.312,50	36,45%
61	Utang Beban	26.696.030.908,44	37.216.794.659,83	31.053.548.393,02	7,85%
62	Utang Jangka Pendek Lainnya	20.473.991.101,00	14.867.721.919,80	17.354.495.756,00	-7,93%
63	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	47.385.423.966,43	52.292.614.754,13	48.584.290.234,52	1,26%
64	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
65	Kewajiban Jangka Panjang				
66	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-		
67	Jumlah Kewajiban	47.385.423.966,43	52.292.614.754,13	48.584.290.234,52	1,26%
68	EKUITAS DANA	2.156.910.021.973,26	2.147.528.851.083,92	2.098.122.745.980,92	-1,37%
69	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.204.295.445.939,69	2.199.821.465.838,05	2.146.707.036.215,44	-1,31%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3.1.2.4 Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas)

Kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perkembangan Ratio Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2018-2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Rasio Likuiditas

Kondisi rasio likuiditas yang fluktuatif selama 3 (tiga) tahun terakhir, menunjukkan besarnya aktiva lancar yang digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancarnya mengartikan semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. Untuk mengetahui rincian rasio lancar daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Rasio Lancar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2018-2020

No	Tahun	Aset Lancar	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio
1	2018	100.983.655.362,52	47.385.423.966,43	2,13
2	2019	114.826.438.774,71	52.292.614.754,13	2,20
3	2020	104.207.440.419,58	48.584.290.234,52	2,14

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Berdasarkan perhitungan nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat memenuhi utang jangka pendeknya. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar selama kurun waktu tahun 2016-2019 diatas 2%. Rasio lancar pada tahun 2016 mencapai 2,14 yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 2,14 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo. Persediaan masuk dalam kategori asset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Namun apabila diperhatikan nilai rasio lancar menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini berarti kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Rasio cepat lebih akurat dibandingkan rasio lancar karena telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Angka rasio di atas 1 berarti menunjukkan kemampuan yang kuat dalam melunasi kewajiban-kewajibannya yang jatuh tempo. Berdasarkan perhitungan seperti tampak dalam Tabel Analisis Rasio Neraca Daerah, diperoleh nilai rasio cepat neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang fluktuatif.

Tabel 3.11
Rasio Cepat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2018-2020

No	Tahun	Aset Lancar	Persediaan	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio
1	2018	100.983.655.362,52	11.782.265.486,26	47.385.423.966,43	1,88
2	2019	114.826.438.774,71	9.628.844.947,43	52.292.614.754,13	2,01
3	2020	104.207.440.419,58	9.317.549.966,19	48.584.290.234,52	1,95

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (total debt to total asset ratio) dan rasio hutang terhadap ekuitas (total debt to equity ratio). Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/asset yang dimilikinya. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah

daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas). Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya. Dari tabel di atas, rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2016 sebesar 0,02% artinya sebesar Rp0,02 dari setiap Rp1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, sisanya dari modal sendiri (ekuitas).

Tabel 3.12
 Rasio Cepat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 Tahun 2018-2020

No	Tahun	Total Kewajiban	Ekuitas Dana	Rasio
1	2018	47.385.423.966,43	2.156.910.021.973,26	0,022
2	2019	52.292.614.754,13	2.147.528.851.083,92	0,024
3	2020	48.584.290.234,52	2.098.122.745.980,92	0,023

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

A. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Secara umum, proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan cukup tinggi yang mencapai rerata sebesar 93,98 persen pertahun selama periode tahun 2016-2020. Jika diperbandingkan proporsi realisasi antara belanja tidak langsung langsung dan belanja langsung terlihat adanya proporsi realisasi lebih tinggi pada kelompok belanja tidak langsung yang mencapai rata-rata sebesar 100,92 persen, sedangkan belanja langsung mencapai rata-rata sebesar 87,37 persen.

Proporsi realisasi belanja adalah membandingkan realisasi belanja dengan alokasi anggaran pada tahun anggaran yang sama. Data yang digunakan untuk proporsi realisasi belanja dari tahun anggaran 2016 sampai tahun anggaran 2020. Pendekatan berikutnya adalah analisa proporsi belanja terhadap kebutuhan belanja aparatur. Proporsi ini menggambarkan kebutuhan belanja aparatur yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah setiap tahun anggaran. Untuk mengetahui proporsi belanja aparatur terlebih dahulu diketahui komponen belanja aparatur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.13

Tabel 3.13
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun Anggaran 2016-2019

U R A I A N	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA	1.401.482.667.933,81	1.338.815.258.407,65	1.393.344.749.057,23	1.379.726.940.481,10	1.355.935.703.352,36	-0,52%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	674.918.758.849,81	661.678.226.511,00	727.268.407.229,00	786.924.023.104,00	834.866.557.830,20	5,25%
Belanja Pegawai	581.197.295.502,00	495.464.658.051,00	537.022.617.887,00	577.289.209.414,00	568.119.636.265,00	-0,22%
Belanja Bunga	1.903.212,61			427.963.895,00	514.316.875,00	508,10%
Belanja Hibah	30.141.003.600,00	35.730.396.960,00	44.352.841.742,00	50.521.787.795,00	84.799.951.912,00	18,79%
Belanja Bantuan Sosial	1.858.700.000,00	1.874.750.000,00	3.755.700.000,00	6.425.500.000,00	17.262.839.750,00	51,20%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	61.197.375.535,20	128.608.421.500,00	141.173.631.600,00	151.848.548.000,00	145.138.424.526,00	35,38%
Belanja Tidak Terduga	522.481.000,00	0,00	963.616.000,00	411.014.000,00	19.031.388.502,20	-7,69%
BELANJA LANGSUNG	726.563.909.084,00	677.137.031.896,65	666.076.341.828,23	592.802.917.377,10	521.069.145.522,16	-6,56%
Belanja Pegawai	26.004.524.900,00	44.537.808.058,00	12.014.019.199,00	4.997.617.587,00	5.581.171.029,00	-42,29%
Belanja Barang dan Jasa	209.932.761.163,00	279.717.779.048,65	331.324.166.480,00	352.689.851.566,10	318.861.432.678,36	18,88%

U R A I A N	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Modal	490.626.623.021,00	352.881.444.790,00	322.738.156.149,23	235.115.448.224,00	196.626.541.814,80	-21,75%
SURPLUS/(DEFISIT)	-719.943.040,04	20.269.206.534,89	-23.344.213.519,29	25.613.876.555,92	-7.186.622.826,43	-428,90%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep, 2021

B. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur.

Dalam kerangka untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan overhead cost bagi sumber daya pegawai maupun barang jasa serta kebutuhan lainnya. Dalam konteks penganggaran daerah, overhead cost pemerintah ini diletakkan pada berbagai pos pembelanjaan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dijelaskan bawah rata-rata proporsi presentase belanja aparatur terhadap total belanja sebesar 53%, artinya bahwa selama 6 tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalokasikan belanja aparatur sebesar 53% sementara untuk alokasi belanja langsung yang membiayai program dan kegiatan sebesar 47% sesuai tabel 3.11;

Tabel 3.14
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2018-2020

No.	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	Presentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1.	Tahun 2018	736.570.369.480,00	1.398.344.749.057,23	52,67%
2.	Tahun 2019	793.092.272.615,23	1.422.078.465.181,10	55,77%
3.	Tahun 2020	662.561.715.080,00	1.390.820.850.494,36	47,64%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2021

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tertuang pada tabel 3.15

Tabel 3.15
Perkembangan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun Anggaran 2018 – 2020

No.	Uraian	2018			2019			2020		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	1.480.869.814.827,54	1.393.344.749.057,23	94,09	1.451.064.516.901,41	1.379.726.940.481,10	95,08	1.413.161.670.179,12	1.355.935.703.352,36	95,95
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	731.089.209.267,41	727.268.407.229,00	99,48	780.351.951.066,97	786.924.023.104,00	100,84	834.272.394.843,67	834.866.557.830,20	100,07
1.	Belanja Pegawai	568.331.483.965,41	537.022.617.887,00	94,49	603.857.400.566,97	577.289.209.414,00	95,60	582.376.259.127,18	568.119.636.265,00	97,55
2.	Belanja Bunga					427.963.895,00		565.550.876,00	514.316.875,00	90,94
3.	Belanja Hibah	14.765.131.208,00	44.352.841.742,00	300,39	14.826.000.000,00	50.521.787.795,00	340,76	63.499.125.000,00	84.799.951.912,00	133,55
4.	Belanja Bantuan Sosial	3.979.400.000,00	3.755.700.000,00	94,38	7.320.000.000,00	6.425.500.000,00	87,78	17.800.000.000,00	17.262.839.750,00	96,98
5.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	141.173.631.600,00	141.173.631.600,00	100,00	151.848.550.500,00	151.848.548.000,00	100,00	145.138.424.526,00	145.138.424.526,00	100,00
6.	Belanja Tidak Terduga	2.839.562.494,00	963.616.000,00	33,94	2.500.000.000,00	411.014.000,00	16,44	24.893.035.314,49	19.031.388.502,20	76,45
B.	BELANJA LANGSUNG	749.780.605.560,13	666.076.341.828,23	88,84	670.712.565.834,44	592.802.917.377,10	88,38	578.889.275.335,45	521.069.145.522,16	90,01
1.	Belanja Pegawai	12.465.596.840,00	12.014.019.199,00	96,38	9.394.818.560,60	4.997.617.587,00	53,20	6.214.109.485,00	5.581.171.029,00	89,81
2.	Belanja Barang dan Jasa	388.538.806.250,90	331.324.166.480,00	85,27	409.584.251.324,41	352.689.851.566,10	86,11	356.913.133.322,45	318.861.432.678,36	89,34
3.	Belanja Modal	348.776.202.469,23	322.738.156.149,23	92,53	251.733.495.949,43	235.115.448.224,00	93,40	215.762.032.528,00	196.626.541.814,80	91,13

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep, 2021

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel 3.16 :

Tabel 3.16
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2016 - 2020 (Rp juta)

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Daerah	1.400.762	1.359.084	1.370.000	1.405.351	1.348.749
2	Belanja Daerah	1.401.482	1.338.815	1.393.344	1.379.726	1.355.935
	Surplus / Defisit	(719.943)	20.269	(23.344)	25.625	(7.186)
3	Pembiayaan Daerah					
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	67.899	49.317	65.725	87.098	96.046
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	18.461	5.000	5.000	42.351	34.885
	Pembiayaan Netto	49.437	44.317	60.725	44.747	61.161
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	48.718	64.587	37.380	70.372	53.974

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep, 2021

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2016-2020, telah terjadi peningkatan pembiayaan netto pada setiap tahunnya. Kondisi ini disebabkan oleh adanya SiLPA tahun sebelumnya.

Tabel 3.17
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2016-2020

No	URAIAN	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah dikurangi	1.370.000.535.537,94	1.405.351.973.335,62	1.348.749.080.525,93
2	Belanja Daerah	1.393.344.749.057,23	1.379.726.940.481,10	1.355.935.703.352,36
3	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	42.351.524.700,00	34.885.147.142,00
4	Defisit Riil	-28.344.213.519,29	-16.726.491.845,48	- 42.071.769.968,43

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021.

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA

dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan.

- Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Tabel 3.18
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020

No	URAIAN	Proporsi dari Total Defisit Riil					
		2018	%	2019	%	2020	%
1	SILPA Tahun sebelumnya	65.725.206.247,54	101,76	37.052.012.219,25	99,12	70.361.236.275,97	99,96
2	Pencairan Dana Cadangan	0	-	-	-	0	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	-	-	-	0	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	-	50.046.872.200,00	-	25.685.276.162,00	53,09
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	-	-	-	0	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	-	-	-	0	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep

Tabel 3.19
Realisasi Sisa Perhitungan Anggaran
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020

No	URAIAN	2018		2019		2020	
		Rp	% dari Silpa	Rp	% dari Silpa	Rp	% dari Silpa
	Jumlah SILPA	37.380.992.728,25	100,00	70.372.392.573,77	100,00	53.974.742.469,54	100,00
1	Pelampauan Penerimaan dari PAD	-	-	-	-	9.526.013.556,60	17,65
2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-	10.426.388.764,00	19,32
3	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	6.030.092.182,50	8,57	1.321.667.182,82	2,45
4	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	13.790.222.859,81	36,89	21.736.066.645,64	30,89	56.196.784.859,76	104,12
5	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun Belum terselesaikan	23.590.769.868,44	63,11	42.606.233.745,63	60,54	-	-
6	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep

3.3.3 Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat

Belanja wajib ini digunakan untuk urusan wajib dan mengikat terkait kelangsungan kebutuhan organisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran dengan mempertimbangkan perubahan harga dan kebutuhan.

Tabel 3.20
Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018-2020

2	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
	Belanja			
	Belanja Tidak Langsung			
1	Gaji dan Tunjangan	466.833.566.972,00	494.978.969.313,00	488.590.938.260,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	1.632.679.506,00	73.611.154.455,00	76.184.339.114,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.211.600.000,00	5.161.877.400,00	5.075.000.000,00
4	Belanja Bunga	-	427.963.895,00	514.316.875,00
5	Belanja Hibah	44.352.841.742,00	50.521.787.795,00	84.799.951.912,00
6	Belanja Bantuan Sosial	3.755.700.000,00	6.425.000.000,00	17.262.839.750,00
7	Belanja Bantuan Keuangan	141.173.631.600,00	151.051.622.000,00	144.324.428.526,00
	Pengeluaran Pembiayaan			
8	Penyertaan Modal	5.000.000.000,00		1.500.000.000,00
9	Pembayaran Pokok Hutang pada Pihak Ketiga		42.351.524.700,00	33.385.147.142,00
	Jumlah	727.960.019.820,00	824.529.899.558,00	851.636.961.579,00
	Jumlah Total Belanja	1.393.344.749.057,23	1.379.726.940.481,10	1.355.935.703.352,36
	Proporsi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Terhadap Total Belanja	0,52	0,60	0,63

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada 3 (tiga) tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel diatas. Periode tahun 2018-2020 terdapat kecenderungan menurun menjadi sebesar 56,28% pada tahun 2017 dan mencapai titik terendah sebesar 54,65% pada tahun 2019. Mencermati rincian belanja, pada tahun 2017 terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada belanja hibah karena adanya kenaikan Belanja Operasional Pendidikan (BOP), dan premi asuransi karena adanya kebijakan terkait pemberian jaminan kesehatan.

3.3 KERANGKA PENDANAAN

3.3.1 Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2021-2026. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu tiga tahun ke depan. Asumsi makro ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lima tahun ke depan, tetapi karena adanya bencana terkait dengan merebaknya wabah covid-19 akan memberikan imbas negatif terhadap perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di beberapa sektor antara lain sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor perdagangan besar dan eceran. Berdasarkan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada triwulan pertama 2020 diperkirakan akan jatuh 1-2 persen di bawah level triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tetap optimis untuk pencapaian target pertumbuhan yang telah ditetapkan, perekonomian dapat terkendali dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah multiplier effects dari berbagai proyek infrastruktur (on going maupun finishing), kereta api, peningkatan produksi perikanan dan pertanian pengembangan destinasi wisata yang memacu kenaikan produksi dan mendorong investasi swasta. Selain itu, permintaan terhadap komoditas ekspor utama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diperkirakan juga masih terjaga dan mendapat pengaruh positif dari kenaikan harga komoditas global. Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat, persentase penduduk miskin yang menurun, indeks pembangunan manusia yang meningkat, pertumbuhan investasi yang tinggi, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja

pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor- sektor perekonomian unggulan daerah dan meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik dan luar negeri.

Adanya pandemi Covid-19 berhasil memaksa asumsi-asumsi ekonomi, sosial dan fiskal yang telah direncanakan sebelumnya harus direvisi mendalam. Termasuk juga asumsi pendapatan daerah yang turut mendapat imbas dari dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan pandemi tersebut. Sekitar 90 persen masyarakat menilai, bahwa perhatian pemerintah Kabupaten Pangkep kepada masyarakat dianggap sudah baik hingga cukup baik. Di tengah pandemic covid 19, sekitar 88,1 persen masyarakat menilai sudah sangat berperan sampai cukup berperan dalam menangani wabah covid 19. Sekitar 88,2 persen masyarakat menilai pemerintah kabupaten pangkep sudah cepat dan serius menangani wabah covid 19.

Dari hasil Analisis ekonomi Kabupaten Pangkep ditengah pendemi Covid-19, maka dikeluarkan hasil, bahwa di tahun berjalan perkembangan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah mengalami perlambatan pertumbuhan ,akibat adanya pembatasan social dan kebijakan yang harus dilakukan dalam pengendalian wabah Pandemi Covid-19, sehingga berdampak pada:

1. Melambatnya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di banding tahun sebelumnya, disebabkan adanya perlambatan semua sector, kecuali sector usaha Kesehatan, perikanan, sector informasi dan Telekomunikasi, akomodasi dari subsector makan dan minuman.
2. Sector yang mengalami pertumbuhannya meningkat, masih memberi kontribusi yang rendah terhadap PDRB, seperti sector usaha Kehutanan, Perikanan dan Pertanian, telah mengalami pertumbuhan yang baik namun kontribusi terhadap PDRB mengalami penurunan ini disebabkan telah terjadi deflesi terhadap sector usaha, pertanian, perikanan, perikanan dan kehutanan, begitu juga dengan sector Kesehatan, dan sector informasi dan telekomunikasi dan akomodasi, pertumbuhannya mengalami kenaikan namun kontribusi terhadap PDRB masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena kedua sector tersebut tiba-tiba melanjut sevcara dadakan.
3. Pendapat Perkapita Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah mengalami penurunan, sehingga membatasi pengeluaran utamanya penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan minimal.

4. Meningkatnya angka kemiskinan akibat tidak stabilnya perekonomian di tengah Covid-19 di tahun 2020, semakin kesenjangan penduduk miskin mendekati kesenjangan yang sempurna.

Tabel 3.21
Asumsi Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2022-2026

No.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	69,53	70,00	70,48	70,93	71,17
2	Angka Kemiskinan	%	12,68	11,78	11,13	10,43	9,83
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,05	4,95	4,75	4,63	4,37
4	Pertumbuhan ekonomi	%	4,48 - 5,98	4,60 – 6,13	4,70 – 6,15	4,75 - 6,20	4,80 - 6,35
5	PDRB/kapita	Milyar Rupiah	76,81	76,82	76,84	77,23	77,45
6	Rasio Gini	Nilai	0,331	0,325	0,316	0,311	0,300

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal khususnya Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2022-2026 diperkirakan akan tumbuh melambat. Hal ini disebabkan oleh adanya bencana terkait dengan merebaknya wabah covid-19.

Tabel 3.22
Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2022-2026

No	Uraian	TAHUN				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Asli Daerah	226.288.109.300	236.127.723.300	244.079.996.300	252.839.462.300	262.964.221.300
2	Pendapatan Transfer	1.166.500.542.520	1.211.380.844.000	1.247.750.575.430	1.291.961.139.000	1.332.942.462.890
3	Lain-Lan Pendapatan Daerah yang Sah	53.251.580.000	54.376.613.000	55.422.145.000	56.638.588.000	57.726.360.000

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

3.3.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada dokumen rancangan teknokratik RPJMD tahun 2021-2026 dihitung hingga tahun 2026. Proyeksi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021-2026 dilakukan dengan teknik forecasting least square terhadap masing-masing pos jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan menggunakan data APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2016-2019. Disamping itu juga dilakukan justifikasi kualitatif expert judgement secara rasional pada beberapa pos pendapatan dan belanja daerah yang inline dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam periode lima tahun yang akan datang.

Pada tahun 2022, diasumsikan pandemi Covid-19 sudah bisa ditangani dengan baik di level local Provinsi Sulawesi Selatan maupun nasional. Hal ini berimplikasi terhadap kembali normalnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah juga sudah dapat berlangsung secara normal. Selanjutnya beberapa arah kebijakan lain yang mendasari proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut antara lain sebagai berikut:

A. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Komponen Pendapatan diproyeksikan berdasarkan data pendapatan dari masing-masing perangkat daerah yang menghasilkan Pendapatan Daerah. Data tersebut ditabulasi dan diproyeksi dengan beberapa asumsi :

- 1) Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang masih rendah karena proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah yang masih berkisar antara 13 – 15% dan masih sangat rendah jika dibandingkan dengan dana transfer yang berkisar 85 - 87%.
- 2) Pendapatan asli daerah pada tahun 2021 masih sangat terpengaruh oleh adanya dampak Covid-19 dan diperkirakan baru mulai pulih pada tahun 2022. Secara tahunan, PAD diperkirakan akan mengalami kenaikan rerata pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5-7% pertahun atau setara dengan angka pertumbuhan ekonomi regional. Beberapa faktor pendorong peningkatan PAD antara lain:
 - a. Bertambahnya objek dan wajib pajak serta retribusi;
 - b. Meningkatnya cakupan dan kualitas penyelenggaraan mobilisasi pendapatan daerah oleh OPD terkait;
 - c. Pemantapan kerangka regulasi dan kelembagaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

- d. Peningkatan sistem administrasi dan teknologi informasi mobilisasi pajak dan retribusi daerah;
 - e. Peningkatan tarif untuk beberapa jenis pajak dan retribusi;
 - f. Peningkatan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - g. Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, seperti bagi hasil deviden, jasa giro, dan lain-lain
- 3) Dana transfer dari Pemerintah Pusat dan dana transfer provinsi Sulawesi Selatan diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahun.
- 4) Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah mengoptimalkan alternatif pembiayaan infrastruktur dan terus mensosialisasikan secara insentif inovasi pembiayaan tersebut kepada pemerintah daerah antara lain hibah, lembaga keuangan non bank, serta berbagai sumber-sumber pendanaan alternatif strategis diatas, menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan yang dapat mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 3.23
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2021-2026

No	Uraian	TAHUN				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	1.446.040.231.820,00	1.501.885.180.300,00	1.547.252.716.730,00	1.601.439.189.300,00	1.653.633.044.190,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	226.288.109.300,00	236.127.723.300,00	244.079.996.300,00	252.839.462.300,00	262.964.221.300,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	101.682.829.300,00	103.432.829.300,00	105.432.829.300,00	108.932.829.300,00	113.682.829.300,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	12.157.485.000,00	12.998.514.000,00	13.508.757.000,00	14.035.452.000,00	15.253.952.000,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.059.500.000,00	13.257.475.000,00	14.043.100.000,00	14.328.143.000,00	15.128.143.000,00
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	99.388.295.000,00	106.438.905.000,00	111.095.310.000,00	115.543.038.000,00	118.899.297.000,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.166.500.542.520,00	1.211.380.844.000,00	1.247.750.575.430,00	1.291.961.139.000,00	1.332.942.462.890,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.018.225.202.520,00	1.057.121.466.000,00	1.086.990.558.430,00	1.125.331.681.000,00	1.160.190.473.440,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	20.728.160.000,00	21.000.044.000,00	21.290.048.000,00	21.659.845.000,00	22.038.888.000,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.378.046.000,00	5.485.657.000,00	5.595.379.000,00	5.707.288.000,00	5.821.436.000,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	767.047.400.520,00	792.752.761.000,00	816.179.601.430,00	840.215.848.000,00	864.970.936.440,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	43.516.419.000,00	45.386.883.000,00	47.587.216.000,00	48.991.480.000,00	50.437.299.000,00
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	158.653.087.000,00	166.585.750.000,00	171.589.280.000,00	180.168.788.000,00	189.177.279.000,00
4.2.1.6	Dana Alokasi Khusus Penugasan	22.902.090.000,00	25.910.371.000,00	24.749.034.000,00	28.588.432.000,00	27.744.635.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	81.288.596.000,00	85.353.028.000,00	90.474.210.000,00	94.997.930.000,00	99.747.828.450,00
4.2.2.1	Dana Penyesuaian	81.288.596.000,00	85.353.028.000,00	90.474.210.000,00	94.997.930.000,00	99.747.828.450,00
4.2.2.1.1	Dana Insentif Daerah (DID)	8.193.475.000,00	8.603.150.000,00	9.119.339.000,00	9.575.315.000,00	10.054.082.450,00
4.2.2.1.2	Dana Desa dari APBN	73.095.121.000,00	76.749.878.000,00	81.354.871.000,00	85.422.615.000,00	89.693.746.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	55.078.277.000,00	56.640.629.000,00	57.713.443.000,00	58.807.716.000,00	59.923.872.000,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan	11.908.467.000,00	12.265.721.000,00	12.572.364.000,00	12.823.812.000,00	13.080.289.000,00
4.2.4.1.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-
4.2.4.1.1.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi (bantuan penguatan Otda)	11.908.467.000,00	12.265.721.000,00	12.572.364.000,00	12.823.812.000,00	13.080.289.000,00
4.3	Lain-Lan Pendapatan Daerah yang Sah	53.251.580.000,00	54.376.613.000,00	55.422.145.000,00	56.638.588.000,00	57.726.360.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00
4.3.2	Pendapatan Dana BOS	51.251.580.000,00	52.276.613.000,00	53.322.145.000,00	54.388.588.000,00	55.476.360.000,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas, terdiri dari :

- 1) Prioritas I: Dialokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan SPM yang merupakan mandatori (dalam hal ini untuk membiayai 6 bidang urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Bidang Sosial).
- 2) Prioritas II: Belanja untuk pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta program premium dengan sasaran untuk menurunkan ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan.
- 3) Prioritas III: Belanja operasional penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya.

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama 5 (lima) tahun yang akan datang, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas diatas.

Prioritas pertama, untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur oleh undang-undang, antara lain:

- a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk mencapai target belanja infrastuktur daerah minimal 25 persen, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI;
- d. Belanja yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Provinsi, Pajak Rokok, dengan komposisi 50 persen specific dan 50 persen block grant, dari 50 persen specific grant 75 persen untuk iuran JKN, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- e. Sedangkan belanja mengikat (Mandatory Expenditure), digunakan untuk Belanja Pegawai; Belanja JKN yang bersumber dari Pajak Rokok, Belanja DAK, Belanja Operasional Kantor juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan

Perundang-undangan lainnya, seperti Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga.

Prioritas Kedua, untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026 yang terdiri atas :

- Peningkatan Aksesibilitas Dan Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
- Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat
- Pembangunan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
- Pembangunan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Untuk Meningkatkan Ketahanan Bencana
- Pengembangan SDM Yang Berkualitas Dan Pemberdayaan Berbasis Peningkatan Karakter Serta Budaya Masyarakat Dalam Rangka Menjaga Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Menciptakan Stabilitas Sosial Dan Politik
- Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Teknologi Informasi Serta Inovasi Sistem Pemerintahan Yang Terintegratif Dalam Proses Bisnis Di Semua Level Pemerintahan

Prioritas Ketiga, untuk membiayai prioritas penyelenggaraan pemerintah daerah lainnya. Nilai kapasitas riil Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021-2026, serta pembagian alokasi anggaran berdasarkan prioritas tersebut diatas, ditunjukkan pada tabel Tabel 3.24

Tabel 3.24
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Uraian	Proyeksi Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.444.540.231.820,00	1.496.885.180.300,00	1.542.252.716.730,00	1.591.439.189.300,00	1.648.633.044.190,00
2	Prioritas I	295.975.440.299,00	298.428.510.344,00	311.191.090.692,00	322.547.645.823,00	336.415.839.163,00
3	Prioritas II	393.517.683.286,00	444.816.054.682,00	454.483.156.446,00	486.291.003.222,00	491.290.041.145,65
4	Prioritas III	755.047.108.235,00	753.640.615.274,00	776.578.469.592,00	782.600.540.255,01	820.927.163.881,36

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

3.3.3 Dampak Pandemi terhadap Pendapatan Daerah

Pandemi covid-19 memberi dampak yang sangat besar diberbagai bidang yang membuat ekonomi menjadi terpuruk dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan yang sangat drastic. Dampak covid-19 dari sisi ekonomi berimplikasi kepada sector-sektor usaha yang selama ini menjadi sumber pajak dan retribusi daerah. Kurangnya pendapatan yang diterima dari sector usaha tersebut, tentu menghambat pembiayaan atau belanja kegiatan prioritas lainnya sehingga dibutuhkan anggaran yang besar untuk diarahkan pada agenda penanggulangan covid-19. Kelesuan penerimaan Negara juga berimplikasi pada terganggunya dana transfer pada pemerintah daerah.

Adanya perubahan target pendapatan pajak ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka Penanganan covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Sosial, penyesuaian target pendapatan menindaklanjuti SKB Mendagri dan Menteri Keuangan. Dalam SKB itu, diatur kepala daerah bisa melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD.

3.3.4. Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah

Untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah yang berimplikasi pada semakin meningkatnya kebutuhan dana dan pembiayaan pembangunan di Daerah, sementara itu Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempunyai keterbatasan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan daerah, untuk itu dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan lain melalui Kemitraan Pembiayaan Daerah yang dilakukan antara Pemerintah, Swasta maupun Dunia Usaha, melalui :

1. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha merupakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan ketentuan yang mengacu pada spesifikasi khusus yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan tetap memperhatikan pembagian resiko diantara para pihak terkait. Manfaat penggunaan skema KBPU dalam penyediaan infrastruktur adalah penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu kesinambungan dalam proses perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan; serta mengatasi keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah

melalui pengeralahan dana swasta, sehingga penyediaan infrastruktur dapat lebih dioptimalisasikan.

Dengan landasan hukunya yang telah dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, dimana dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bentuk pengembalian investasi kepada pihak swasta (badan usaha) atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna infrastruktur dalam bentuk tariff (user fee), pembayaran, pembayaran oleh penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) melalui skema ketersediaan layanan (availability payment), ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur antara lain :

- a. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur social;
- b. Termasuk ke dalam 19 jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
- c. Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan social dan analisa nilai manfaat uang (Value for Money) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

2. Obligasi Pemerintah Daerah

Salah satu penerimaan Negara yang dapat dijadikan alternative adalah menerbitkan surat-surat berharga (SSB) Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan telah mempersiapkan sejumlah aturan dalam penerbitan SSB di daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2016 yang merupakan revisi atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Obligasi daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada public melalui penawaran umum dipasar modal dalam bentuk mata uang rupiah. Selain sebagai alternative pembiayaan pembangunan daerah, obligasi daerah merupakan salah satu instrument yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tanpa tergantung sepenuhnya pada APBD. Selain itu, obligasi daerah diharapkan mampu membuka lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur serta mampu meningkatkan daya saing daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai.

3. Pembiayaan melalui Pinjaman Daerah

Pembangunan infrastruktur berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur yang layak dan memadai mampu meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi dan social suatu daerah melalui penciptaan efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan. Salah satu komponen penting pada pembangunan infrastruktur yang baik didukung oleh pembiayaan yang layak dalam tahap perencanaan (planning), proses pembangunan (contruction), hingga tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur (Operational dan maintenance).

Pembiayaan melalui pinjaman merupakan alternative pendanaan APBD yang digunakan untuk : 1) menutup deficit APBD, pengeluaran pembiayaan; dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah, 2) percepatan pencapaian target program pembangunan daerah, 3) adanya kegiatan prioritas daerah, dan 4) pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan social bagi masyarakat.

Manfaat Pinjaman Daerah :

- 1) Infrastruktur public dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat;
- 2) Penghematan anggaran daerah dan meningkatkan pendapatan daerah (PAD);
- 3) Tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah;
- 4) Program pembangunan jangka menengah daerah; dan
- 5) Persiapan untuk mendapatkan akses instrument pembiayaan yang lebih luas (salah satunya obligasi).

Jenis Pinjaman Daerah :

- 1) Pinjaman Jangka Pendek. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pinjaman Jangka Pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- 2) Pinjaman Jangka Menengah. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati atau walikota yang bersangkutan.
- 3) Pinjaman Jangka Panjang. Pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) harus dilunasi sesuai dengan persyaratan perjanjian. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan insvestasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan public dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;

- b. Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- c. Memberikan manfaat ekonomi dan social.

Tabel 3.25
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2026

KODE	URAIAN	PROYEKSI TAHUN				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	226.288.109.300,00	236.127.723.300,00	244.079.996.300,00	252.839.462.300,00	262.964.221.300,00
4.1.1	Pajak Daerah	101.682.829.300,00	103.432.829.300,00	105.432.829.300,00	108.932.829.300,00	113.682.829.300,00
4.1.2	Retribusi Daerah	12.157.485.000,00	12.998.514.000,00	13.508.757.000,00	14.035.452.000,00	15.253.952.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.059.500.000,00	13.257.475.000,00	14.043.100.000,00	14.328.143.000,00	15.128.143.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	99.388.295.000,00	106.438.905.000,00	111.095.310.000,00	115.543.038.000,00	118.899.297.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.166.500.542.520,00	1.211.380.844.000,00	1.247.750.575.430,00	1.291.961.139.000,00	1.332.942.462.890,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.018.225.202.520,00	1.057.121.466.000,00	1.086.990.558.430,00	1.125.331.681.000,00	1.160.190.473.440,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	148.275.340.000,00	154.259.378.000,00	160.760.017.000,00	166.629.458.000,00	172.751.989.450,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	53.251.580.000,00	54.376.613.000,00	55.422.145.000,00	56.638.588.000,00	57.726.360.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00
4.3.3	Lain-lain pendapatan...	51.251.580.000,00	52.276.613.000,00	53.322.145.000,00	54.388.588.000,00	55.476.360.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.446.040.231.820,00	1.501.885.180.300,00	1.547.252.716.730,00	1.601.439.189.300,00	1.653.633.044.190,00
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI	1.061.545.725.901,00	1.095.407.840.428,00	1.127.811.674.153,00	1.148.716.928.467,00	1.198.394.210.918,50
5.1.1	Belanja Pegawai	655.686.832.952,00	675.964.579.613,00	686.919.560.451,00	708.254.522.664,00	735.098.927.692,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	379.547.236.949,00	390.952.500.815,00	402.081.810.202,00	417.737.649.803,00	440.560.527.226,50
5.1.5	Belanja Hibah	20.798.996.000,00	24.385.000.000,00	34.854.543.500,00	15.568.996.000,00	15.478.996.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.512.660.000,00	4.105.760.000,00	3.955.760.000,00	7.155.760.000,00	7.255.760.000,00
5.2	BELANJA MODAL	214.683.177.737,00	226.642.694.342,00	232.112.011.204,00	249.444.062.303,00	271.864.881.597,50
5.2.1	Belanja modal tanah	1.260.000.000,00	1.559.400.000,00	1.284.400.000,00	1.500.000.000,00	1.650.000.000,00
5.2.2	Belanja modal peralatan dan mesin	65.559.779.275,00	68.076.271.625,00	68.555.050.350,00	72.947.613.325,00	76.134.978.797,50
5.2.3	Belanja modal bangunan dan gedung	65.621.718.056,00	63.568.710.517,00	67.403.321.543,00	78.478.110.359,00	80.171.155.918,00
5.2.4	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	69.717.449.906,00	80.280.624.600,00	81.433.625.811,00	82.213.881.419,00	98.187.845.382,00

KODE	URAIAN	PROYEKSI TAHUN				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5.2.5	Belanja modal aset tetap lainnya	12.524.230.500,00	13.157.687.600,00	13.435.613.500,00	14.304.457.200,00	15.720.901.500,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.250.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.3.1	Belanja tidak terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.250.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	163.311.328.182,00	169.834.645.530,00	177.079.031.373,00	188.278.198.530,00	173.373.951.674,00
5.4.1	Belanja bagi hasil	10.919.961.030,00	11.180.421.330,00	11.437.547.530,00	11.846.442.230,00	12.449.641.230,00
5.4.2	Belanja bantuan Keuangan	152.391.367.152,00	158.654.224.200,00	165.641.483.843,00	176.431.756.300,00	160.924.310.444,00
	JUMLAH BELANJA	1.444.540.231.820,00	1.496.885.180.300,00	1.542.252.716.730,00	1.591.439.189.300,00	1.648.633.044.190,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	1.500.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN					
6.1	Penerimaan Pembiayaan					
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran TA sebelumnya	-	-	-	-	-
6.1.1	Pinjaman BLUD	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-
6.1.2	Pembayaran Pinjaman BLUD	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal	1.500.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	(1.500.000.000,00)	(5.000.000.000,00)	(5.000.000.000,00)	(10.000.000.000,00)	(5.000.000.000,00)
6.3	SILPA	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep

Tabel Proyeksi APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2026 menunjukkan angka proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2026. Pendapatan daerah diperkirakan rata-rata tumbuh sebesar 3,85% pertahun. Pada tahun 2021, pendapatan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diperkirakan hanya mencapai sebesar Rp. 1.370.922.526.029,00, dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap seluruh sektor ekonomi daerah. Tahun 2022 merupakan awal pemulihan dari pandemi Covid-19, total pendapatan daerah diperkirakan kembali tumbuh mencapai sebesar Rp. 1.446.040.231.820,00 dan meningkat menjadi Rp. 1.653.633.044.190,00 pada tahun 2026. Sesuai dengan momentum pemulihan ekonomi dan sosial daerah dari Pandemi Covid-19, belanja daerah juga diperkirakan akan mulai pulih pada tahun 2022 dengan pertumbuhan rata-rata pertahun mencapai sebesar 3,70%.

Pada tahun 2021, belanja daerah diperkirakan masih sangat terpengaruh oleh dampak Pandemi Covid-19 dan hanya akan mencapai nilai nominal sebesar Rp.1,376 trilyun yang kemudian diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp. 1,444 trilyun pada tahun 2022, dan menjadi sebesar Rp. 1,648 trilyun pada tahun 2026. Dilihat dari masing-masing pos belanja daerah maka terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada pos belanja operasi yang diperkirakan mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 3,49% atau masih berada dibawah kisaran angka pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan belanja modal dalam kurun waktu yang sama diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,79% pertahun.

Tabel 3.26
Kapabilitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Uraian	Proyeksi Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.446.040.231.820,00	1.501.885.180.300,00	1.547.252.716.730,00	1.601.439.189.300,00	1.653.633.044.190,00
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Penerimaan	1.446.040.231.820,00	1.501.885.180.300,00	1.547.252.716.730,00	1.601.439.189.300,00	1.653.633.044.190,00
	Dikurangi					
4	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.444.540.231.820,00	1.496.885.180.300,00	1.542.252.716.730,00	1.591.439.189.300,00	1.648.633.044.190,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep, 2021

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada bab ini menguraikan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan berbagai isu-isu strategis daerah yang berpengaruh terhadap proses pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama periode 2021-2026. Pada Gambaran Umum Kondisi Daerah yang telah disajikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih adanya permasalahan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan.

Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Selanjutnya berdasarkan permasalahan utama, dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang.

Analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai potensi kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lima tahun mendatang.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

4.1.1. Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah menjelaskan perbedaan hasil pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam periode tertentu (misalnya; Lima tahun) dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dibuat. Permasalahan Pembangunan Daerah ini diklasifikasi dalam dua level permasalahan yaitu permasalahan pada level makro (untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah) dan permasalahan pada level mikro (untuk penentuan program prioritas daerah menurut urusan pemerintahan, baik urusan wajib dan urusan pilihan maupun urusan penunjang).

Sesuai dengan tahapan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005-2025, dimana pada periode ini berada pada tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah IV (Tahun 2020-2025) yang berarti RPJMD yang disusun saat ini memasuki tahun ke-5 (lima). Untuk itu dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 maka permasalahan pembangunan daerah menjadi satu rujukan penting dalam perumusan isu strategis dan

kebijakan pembangunan. Permasalahan Pembangunan Daerah diklasifikasi dalam dua level permasalahan yaitu permasalahan pada level makro untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah) dan permasalahan pada level mikro untuk penentuan program prioritas daerah menurut urusan pemerintahan, baik urusan wajib dan urusan pilihan maupun urusan penunjang.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory dan dirumuskan dengan menggunakan tiga tingkatan masalah, yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Sedangkan Permasalahan pembangunan daerah pada program prioritas daerah menurut urusan pemerintahan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah adalah permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks, baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari: (i) kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal; (ii) kelemahan yang tidak diatasi; (iii) peluang yang tidak dimanfaatkan, dan (iv) ancaman yang tidak diantisipasi.

Berikut diuraikan indikator permasalahan pembangunan daerah untuk prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan urusan, Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, berbagai permasalahan pembangunan pada level makro daerah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan penghidupan yang layak. Berdasarkan indikator tersebut angka IPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah masih kategori sedang (68,72) di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2020, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menempati peringkat ke-18 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan karena angka harapan lama sekolah anak pada usia 7 tahun ke atas yaitu sebesar 12,76 tahun, indikator kedua dalam perhitungan indeks pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah juga masih tergolong rendah 7,66 tahun, berarti rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan hampir menyelesaikan kelas VII pada Sekolah Menengah Pertama. Rendahnya akses terhadap layanan pendidikan dan tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan menjadi penyebab utama rendahnya Rata-rata Lama Sekolah. Selain itu, masih tingginya angka putus sekolah dan rendahnya angka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, salah satunya akibat tingginya angka perkawinan anak, menjadi penyebab lainnya rendahnya rata-rata Lama Sekolah. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 sebesar

66,66 tahun lebih rendah dibandingkan dengan AHH Provinsi dan Nasional. Tinggi rendahnya AHH dipengaruhi banyak variable, terdapat beberapa variable yang menyebabkan AHH di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih rendah. Penyebabnya adalah masih tingginya angka kematian balita (AKABA), masih terbatasnya jumlah tenaga medis, masih rendahnya komplikasi kebidanan yang ditangani, belum optimalnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, belum optimalnya akses terhadap pelayanan kesehatan, serta peran serta masyarakat di bidang kesehatan masih rendah. Selain itu Pertumbuhan ekonomi akan berdampak kepada meningkatnya daya beli masyarakat selain inflasi. Indeks Paritas Daya Beli di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan capaian yang relatif rendah. Daya beli penduduk pada tahun 2020 sebesar Rp. 11 405,00 dan untuk indeks paritas daya beli penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 sebesar 74,15. Kurang berkembangnya sentra-sentra aktifitas ekonomi, banyaknya angkatan kerja yang menganggur, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja yang bekerja, dan rendahnya tingkat produktivitas penduduk, menjadi penyebab masih rendahnya Paritas Daya Beli.

2. Melambatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan tren yang berfluktuatif dalam dua tahun terakhir. Setelah mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,31 persen pada tahun 2016, angka pertumbuhan ekonomi terus mengalami perlambatan di tahun-tahun berikutnya meskipun pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan pada sebesar 6,41 setelah tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 4,76 pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis sebesar -1,69 persen yang merupakan angka terendah sedikitnya dalam 10 tahun terakhir.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami perlambatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun lalu maupun jika dibanding pada tahun 2016. Hal itu disebabkan oleh menurunnya produksi barang dan jasa akibat menurunnya daya beli masyarakat dan menurunnya kegiatan penanaman modal (investasi) oleh dunia usaha dan masyarakat. Kondisi pandemi Covid-19 semakin mempengaruhi secara signifikan pertumbuhan ekonomi yang menekan kinerja hampir seluruh lapangan usaha atau sektor ekonomi mulai dari sektor pertambangan dan penggalian sampai industri pengolahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pertumbuhan ekonomi yang melambat melambat 2 tahun terakhir karena pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari 4,76 menjadi 6,41 dan kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi -1,69. Bahwa subsector dan penggalian dan subsector industry merupakan penyumbang terbesar, sedangkan berdasarkan kontribusi terhadap PDRB tahun 2020 penyumbang terbesar terhadap PDRB Pangkep Tahun 2020 adalah industri 47,74%; pertanian 14,91%; pertambangan 9,52%; dan perdagangan 6,18%. Sedangkan berdasarkan

pertumbuhan subsector yang menunjukkan laju pertumbuhan terbesar adalah LU informasi 11%; jasa kesehatan 10,86%; dan jasa pendidikan 9,72%;

3. Masih Tingginya Dan Meningkatnya Angka Kemiskinan.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih mencatat persentase penduduk miskin yang relatif tinggi (tahun 2020 sebesar 13,96%) dan masih berada di atas angka Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga mencatat angka terbesar kedua di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu mencapai 47,12 jiwa. Target untuk menurunkan angka kemiskinan ke level satu digit tampaknya juga belum berhasil. Masih tingginya angka kemiskinan disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas penduduk sehingga balas jasa ekonomi yang diterima mereka masih berada di bawah garis kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, terbatasnya akses terhadap sumberdaya ekonomi dan layanan publik, menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan berkorelasi terhadap meningkatnya angka stunting dan prevalensi gizi buruk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Olehnya itu, penguatan intervensi 1000 hari pertama kelahiran bayi (HPK) menjadi prioritas dimasing-masing perangkat daerah terkait.

4. Meningkatnya Angka Pengangguran Dan Rendahnya Tingkat Produktivitas Pekerja.

Angka pengangguran diukur dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sebagai indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebesar 8.389 atau 5,18 persen dimana TPT laki-laki 64,95 persen dan TPT perempuan 35,05 persen. Angka tingkat pengangguran terbuka tersebut mengindikasikan rendahnya tingkat produktivitas pekerja, artinya mereka yang bekerja belum sanggup menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Tingkat pengangguran terbuka memiliki kaitan yang erat dengan kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 60,45 persen dari angkatan kerja yang bekerja hanya tamat Sekolah Dasar (SD), tidak tamat SD atau tidak pernah sekolah. Oleh karena itu, rendahnya tingkat produktivitas pekerja tampaknya terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, status pekerja (pada umumnya adalah buruh tani, petani penyakap, dsb.), dan metode produksi yang masih tradisional.

Pandemi Covid-19 mempengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi yang secara otomatis mempengaruhi tingkat pengangguran. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan angka pengangguran meningkat. Ini terjadi karena menurunnya aktivitas ekonomi sehingga penyerapan tenaga kerja menurun, bahkan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada beberapa lapangan usaha, seperti hotel dan restoran, perdagangan, transportasi, dll.

5. Masih Terjadinya Ketimpangan Antar Wilayah.

Ketimpangan antar wilayah, terutama antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan tampak jelas. Konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan menjadi penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah. Konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang cenderung timpang dan perbedaan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi antar wilayah juga berkontribusi terhadap ketimpangan wilayah. Alokasi anggaran pemerintah yang cenderung bias ke wilayah perkotaan, juga menjadi penyebab lain terjadinya ketimpangan antar wilayah. Perbedaan kondisi dan karakteristik geografis dan demografis juga turut menyumbang terjadinya ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

6. Masih Tingginya Angka Kriminalitas.

Data yang dirilis BPS menunjukkan bahwa kasus kriminalitas yang dilaporkan pada tahun 2020 mencapai 114 kasus, menurun cukup signifikan dari tahun sebelumnya (2019: 189 kasus). Dari seluruh kasus yang terjadi di tahun 2020, hanya 78 kasus yang diselesaikan atau 55,26 persen. Kasus penganiayaan ringan, pencurian ringan, dan narkoba merupakan kasus-kasus yang dengan frekuensi yang cukup tinggi. Munculnya pelanggaran hukum tersebut karena rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat yang disebabkan oleh belum optimalnya koordinasi para pihak dalam mencegah kriminalitas, masih terbatasnya keterlibatan para pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam proses penyadaran masyarakat, dan masih lemahnya proses penegakan hukum.

7. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan.

Tata kelola yang baik, dalam arti penerapan norma akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam relasi antara kelembagaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil, belum sepenuhnya terwujud. Pada dunia pemerintah, ini disebabkan oleh belum optimalnya penerapan agenda reformasi birokrasi. Pada dunia bisnis, ini disebabkan oleh belum berkembangnya etos kewirausahaan yang tinggi. Pada masyarakat sipil, ini disebabkan oleh belum terwujudnya keberdayaan masyarakat secara optimal. Pada dunia birokrasi, akar masalahnya adalah belum terpenuhinya ekspektasi dari area-area reformasi birokrasi yang menjadi fokus. Nilai indeks reformasi birokrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2019 sebesar 37,15 dengan Predikat C serta nilai SAKIP 58,94 atau Predikat CC. Meskipun pada Tahun 2020 nilai capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan) dengan predikat B (60,17) namun capaian ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian propinsi yaitu dengan predikat BB (>70-80) pada tahun 2020. Penilaian Sakip ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja.

Belum dikedepankannya profesionalisme dalam pemberian layanan publik, serta masih kurangnya kesadaran SDM Aparatur sebagai pelayan masyarakat, belum memadainya

ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, belum tersedianya SOP dalam setiap pemberian layanan publik, belum memadainya ketersediaan sistem informasi untuk menunjang pelayanan publik, dan belum maksimalnya pengendalian dan pengawasan menjadi sejumlah penyebab mengapa tata kelola pemerintahan belum optimal.

8. Keterbatasan Infrastruktur Dasar Dan Wilayah

Sebagai daerah kepulauan, salah satu pokok masalah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah keterbatasan infrastruktur dasar terutama untuk ketersediaan air minum dan sanitasi di pulau-pulau. Selain itu, sarana-prasarana perhubungan dari daratan ke pulau kecil ataupun antar pulau kecil seperti pelabuhan/dermaga dan kapal/perahu angkutan terus memerlukan tambahan dan pemeliharaan. Infrastruktur jalan ke daerah pedalaman dan dataran tinggi serta jalan desa juga belum menghubungkan secara baik antar desa dan kecamatan. Keterbatasan infrastruktur wilayah dan dasar mengganggu perekonomian dan pelayanan publik.

9. Degradasi Lingkungan Dan Sumberdaya Alam

Masalah lingkungan terjadi pada tiga dimensi wilayah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (Pada dataran tinggi dan pedalaman terjadi degradasi lingkungan akibat berkurangnya tutupan lahan dan perluasan area pertambangan. Selain itu beberapa sungai menyebabkan banjir pada musim hujan. Pada daerah pesisir terjadi abrasi pantai dan berkurangnya area mangrove. Ini disebabkan oleh aktivitas pertanian, pertambangan, pertambakan serta fenomena alam terkait perubahan iklim.

4.1.2. Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Tabel. 4 1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemeritahan

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan		
	Masih Rendahnya Nilai Indeks Pendidikan	1) Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/SMP/MTs yang masih rendah 2) Angka Pendidikan yang ditamatkan jenjang SD/SMP/MTs yang belum optimal 3) Angka Partisipasi Sekolah (APT) SD yang belum tercapai 4) Angka Putus Sekolah (APTs) SD/SMP/MTs yang masih rendah 5) Angka Melek Huruf yang belum tercapai 6) Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI/Paket A, dan jenjang SMP/MTs/Paket B yang belum tercapai 7) Persentase Guru Berkualifikasi S1 keatas SD/SMP/MTs yang masih rendah	1) Belum tercapainya APK untuk jenjang SD/SMP/MTs dan Angka Pendidikan yang ditamatkan untuk jenjang SD/SMP/MTs di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disebabkan karena adanya dampak dari pandemi covid-19, yang mengakibatkan akses layanan secara virtual kepada siswa yang berada pada daerah terpencil sangat terbatas, Sarana pendukung untuk pembelajaran dari rumah masih kurang untuk pembelajaran on line maupun tatap muka langsung, serta masih perlunya peningkatan ketrampilan guru dalam menggunakan media pembelajaran, serta anggaran yang tersedia untuk penggunaan internet yang masih rendah. 2) Untuk Angka Partisipasi Sekolah (APT) SD/SMP/MTs meskipun realisasi capaiannya tiap tahun mengalami peningkatan namun belum mencapai target karena hal ini disebabkan karena factor kemiskinan, factor ekonomi, social, issue gender, dan juga kondisi geografis. 3) Untuk Angka Putus Sekolah (APTs) SD/SMP/MTs meskipun realisasi capain setiap tahunnya mengalami penurunan namun kondisi ini belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan yang masih rendah, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang, ketersediaan media pembelajaran dari sekolah masih terbatas dan peran serta dari sekolah yang belum optimal 4) Angka Melek Huruf di Kabupaen Pangkajene dan Kepulauan, meskipun sudah terbilang tinggi, namun belum mencapai target karena factor kemiskinan dan masih terbatasnya akses diwilayah terpencil

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			5) Persentase guru yang berkualifikasi S1 keatas pada jenjang SD/SMP/MTs belum mencapai target
2	Kesehatan		
	Masih Rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH)	- Masih Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup - Jumlah Rasio dokter per satuan penduduk belum tercapai - Jumlah Rasio tenaga medis per satuan penduduk belum tercapai - Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani belum tercapai - Cakupan pertolongan persalinan dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang belum tercapai - Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) yang belum tercapai - Jumlah Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak yang belum tercapai - Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) yang belum tercapai - Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) yang belum tercapai - Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS yang belum tercapai - Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS yang belum tercapai - Penderita diare yang ditangani yang belum tercapai - Angka kejadian Malaria yang belum tercapai - Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin yang belum tercapai - Cakupan puskesmas yang belum tercapai - Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 yang belum optimal - Cakupan pelayanan nifas yang belum tercapai - Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani belum tercapai	- Angka kematian Bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitive terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status orang tua bayi. Angka kematian bayi juga merupakan tolok ukur dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, kasus kematian bayi terbilang masih tinggi dan angka capaian pertahun berfluktuatif. Peningkatan angka kematian bayi selama 3 (tiga) tahun terakhir meningkat dengan signifikan dengan jumlah kasus kematian bayi pada tahun 2020 sebesar 18 kasus atau persentase AKB sebesar 3,17 dan ini tergolong masih sangat tinggi. Capaian ini memberikan gambaran tentang pentingnya pemerintah memperhatikan persoalan akses masyarakat dalam meningkatkan fasilitas kesehatan, - Jumlah rasio dokter persatuan penduduk belum mencapai target karena tidak diadakannya penerimaan CPNS pada tahun 2016 – 2018 - Jumlah rasio tenaga medis persatuan penduduk belum mencapai target karena tidak diadakannya penerimaan CPNS pada tahun 2016 – 2018 - Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani belum mencapai target karena wabah covid 19 yang membuat sebagian ibu hamil takut untuk datang ke fasilitas kesehatan memeriksakan kehamilannya. - Cakupan pertolongan persalinan dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang belum tercapai karena wabah covid yang turut memberi andil sehingga ada sebagian ibu hamil yang tidak datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya - Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) yang belum mencapai target karena kegiatan posyandu dimana

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		19. Cakupan pelayanan anak balita yang belum tercapai 20. Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat yang belum tercapai 21. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin yang belum tercapai	sebagian besar cakupan imunisasi didapatkan, sempat mengalami kendala atau tidak berjalan karena wabah covid-19 7) Jumlah persentase anak usia 1 Tahun yang diimunisasi campak belum tercapai disebabkan karena hampir di sebagian besar wilayah kerja Posyandu mengalami kendala karena adanya wabah Covid-19. Dan para orang tua juga masih takut membawa anaknya ke Puskesmas 8) Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) yang belum mencapai target Hal ini akibat dari adanya rekomendasi Kementerian Kesehatan untuk melakukan penyisiran kasus di Rumah Sakit baik Pemerintah maupun Swasta karena masih banyaknya kasus TBC yang ditemukan namun tidak dilaporkan 9) Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) tergolong masih tinggi atau belum mencapai target, akibat dari banyaknya kasus TBC yang ditemukan namun tidak dilaporkan dan terjadi kenaikan yang cukup signifikan, akibat dampak dari munculnya covid-19 yang rentan terhadap pengidap tuberkulosis 10) Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS yang masih tinggi karena Masih terdapat petugas TB yang belum terlatih karena adanya <i>turn over</i> pegawaiterlatih yang tidak dibarengi dengan pergantian pegawai yang juga terlatih 11) Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS yang masih tinggi akibat penemuan kasus TBC disertai dengan adanya perluasan jejaring DPM (Dokter Praktek Mandiri) dan penguatan surveilans di rumah sakit dan klinik dengan melakukan penyisiran kasus atau mopping up 12) Penderita diare yang ditangani yang belum mencapai target karena kurangnya kunjungan ke puskesmas, masyarakat masih takut berkunjung ke fasilitas kesehatan, dan menganggap apabila diare yang dialami ringan, cukup diobati dengan minum obat yang dijual bebas. 13) Angka kejadian Malaria yang belum mencapai target karena belum maksimalnya keterlibatan lintas sektor dan lintas program dalam hal penemuan kasus, serta minimnya anggaran

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			pengecegan dan pengendalian malaria di tingkat Kab/Kota, serta tidak adanya regulasi daerah yang dapat mendukung pencegahan dan pengendalian malaria di Kab/Kota. 14) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin yang belum memenuhi target disebabkan karena penambahan jumlah masyarakat miskin yang tiap tahun bertambah 15) Cakupan puskesmas yang belum memenuhi target karena sejak tahun 2016 hingga 2020 tidak mengalami perubahan yang berarti atau tidak ada penambahan jumlah puskesmas 16) Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 yang belum optimal disebabkan factor adanya ibu hamil yang tidak menerima pelayanan dimana seharusnya diberikan saat kontak dengan tenaga kesehatan (missed opportunity). Selain faktor tersebut adanya pernikahan dini yang mengakibatkan ibu hamil malu kontak dengan petugas kesehatan dan pada akhirnya terlambat memperoleh pelayanan antenatal lengkap sesuai standar yang seharusnya diperoleh oleh ibu hamil. Selain itu kondisi geografis yang sulit akses ke fasilitas kesehatan sehingga ibu hamil tidak rutin datang memeriksakan kehamilannya dimana setiap ibu hamil seharusnya mendapatkan pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai standard. 17) Cakupan pelayanan nifas yang belum memenuhi target disebabkan karena dipengaruhi oleh terbatasnya kualitas pelayanan bagi ibu pasca melahirkan baik untuk sumber daya manusia kebidanan, sarana dan prasarana serta ketersediaan standar operasional prosedur. Untuk beberapa wilayah terpencil khususnya dengan akses yang terbatas, ini menjadi kendala tersendiri dan diharapkan kedepan unsur ini bisa terpenuhi secara maksimal sehingga bisa meminimalisir angka kematian ibu 18) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani belum memenuhi target karena distribusi SDM Kesehatan yang Kompeten untuk penanganan Komplikasi neonatus belum merata, serta menyangkut sarana dan prasarana yang belum adekuat dalam menangani bayi baru lahir bermasalah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			19) Cakupan pelayanan anak balita yang belum memenuhi target atau masih rendah, Hal ini disebabkan salah satunya karena kegiatan posyandu yang sifatnya monoton sehingga mengurangi minat ibu untuk datang membawa balitanya berkunjung ke posyandu. Selain itu keterlibatan lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan pelayanan di posyandu yang masih kurang maksimal, tingkat kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan bayi dan Balita belum maksimal, serta kompetensi petugas dalam pelayanan kesehatan bayi dan balita masih rendah 20) Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat belum memenuhi target Karena masa pandemic covid 19 sehingga meminimalisir kontak guna mencegah penularan sehingga sekolah ditutup, siswa tetap belajar walaupun secara daring (dalam jaringan). 21) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin yang belum memenuhi target karena akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat miskin belum maksimal dan belum didukung dengan penganggaran dan kegiatan-kegiatan operasional dalam meningkatkan penyediaan serta efektivitas berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat non personal seperti penyuluhan kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Masih terbatasnya Infrastruktur & Wilayah	1) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik yang masih perlu ditingkatkan 2) Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 yang belum tercapai 3) Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) yang belum tercapai 4) Persentase rumah tinggal bersanitasi yang belum tercapai 5) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik yang belum tercapai atau yang masih perlu ditingkatkan 6) Rasio Jaringan Irigasi yang belum tercapai	1) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik belum memenuhi target diakibatkan dengan meningkatnya kondisi jalan yang rusak karena umur jalan yang sudah melewati ambang batas, serta adanya refocusing anggaran ditahun 2020 2) Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 belum memenuhi target meskipun capainnya mengalami penurunan 3) Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) belum memenuhi target meskipun capaian tiap tahunnya mengalami peningkatan namun cenderung melambat 4) Persentase rumah tinggal bersanitasi yang belum memenuhi target disebabkan tiap tahun jumlah rumah tinggal bertambah yang tidak diimbangi dengan penambahan komponen sanitasi

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			rumah tinggal berakses sanitasi 5) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik yang belum memenuhi target meskipun tiap tahunnya mengalami peningkatan namun cenderung melambat 6) Rasio Jaringan Irigasi yang belum memenuhi target
4	Perumahan Rakyat		
	Cakupan pemukiman yang tertata yang didukung dengan PSU masih rendah	1) Rasio rumah layak huni yang belum optimal 2) Rasio permukiman layak huni yang belum optimal 3) Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang masih rendah 4) Persentase pemukiman yang tertata masih rendah 5) Persentase lingkungan pemukiman kumuh yang masih rendah 6) Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang belum optimal 7) Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan yang belum optimal 8) Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU belum optimal	1) Masih terdapat rumah tidak layak huni di beberapa kecamatan dan desa; 2) Masih terdapat kawasan kumuh terutama di perkotaan dan tidak mengalami perubahan 3) Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang belum memenuhi sarana layak huni 4) Persentase pemukiman yang tertata belum maksimal dalam pemenuhan prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai fungsi penunjang lainnya 5) Persentase lingkungan pemukiman kumuh yang masih tinggi karena tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat penghuninya yang rendah 6) Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang belum optimal karena factor social budaya, sarana dan prasarana serta factor social ekonomi 7) Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan yang belum berkurang karena dipengaruhi dengan bertambahnya jumlah rumah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tiap tahunnya 8) Masih banyak masyarakat yang belum memiliki sanitasi yang layak.
5	Ketentraman Ketertiban & Perlindungan Masyarakat		
	Penanganan K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang belum optimal	1) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang masih rendah 2) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang belum optimal 3) Cakupan pelayanan bencana kebakaran yang belum optimal	1) Belum optimalnya pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT); 2) Belum optimalnya penanganan tindak pidana ringan (TIPIRING). 3) Kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai untuk operasionalisasi penugasan personil ke lapangan 4) Minimnya personil jika di bandingkan dengan cakupan wilayah yang harus di awasi

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			5) Upaya pengurangan resiko bencana belum maksimal 6) Studi kajian mitigasi bencana pesisir dan pulau pulau masih perlu ditingkatkan. 7) Belum adanya data infrastruktur yang layak pakai. 8) Kurangnya sarana dan prasarana bencana pada lorong/wilayah padat penduduk. 9) Perlunya koordinasi kebencanaan pada tingkat kelurahan hingga RT/RW.
6	Sosial		
	Penanganan PMKS yang belum Optimal	1) Persentase PMKS yang tertangani belum optimal 2) Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar belum optimal 3) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social masih rendah	1) Data penanggulangan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) belum sepenuhnya valid dan belum terintegrasi antar SKPD; 2) Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial (aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, dan lain-lain). 3) masih minimnya unit pelaksana teknis daerah untuk pelayanan dan rehabilitasi lanjut usia serta tidak adanya panti rehabilitasi milik daerah untuk pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat fisik dan mental.
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar			
1	Tenaga Kerja		
	Masih rendahnya tingkat produktivitas pekerja	1. Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun yang masih tinggi 2. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan terus mengalami penurunan 3. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek yang masih perlu ditingkatkan 4. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi belum optimal 5. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat masih rendah 6. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan yang mengalami penurunan 7. Masih rendahnya Rasio lulusan S1/S2/S3	1) Angka sengketa pengusaha-pekerja di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tergolong masih tinggi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesepahaman antara perusahaan dan pekerja mengenai aturan, hak, kewajiban, kesejahteraan dan hak maupun kewajiban pekerja lainnya. Diperlukan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi terjadinya sengketa dalam menjaga kondusifitas dan keamanan dalam bekerja antar perusahaan dan pekerja/karyawan 2) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan terus mengalami penurunan, kondisi ini merupakan bagian dampak dari munculnya covid-19 yang berimbas pada menurunnya kesempatan kerja bagi pencari kerja akibat beberapa perusahaan tidak beroperasi secara normal dan juga terbatasnya lapangan pekerjaan 3) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek yang masih perlu ditingkatkan, walaupun capaian setiap tahunnya meningkat namun Pemerintah Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih perlu melakukan pelayanan yang maksimal dan pendataan secara persuasive bagi masyarakat daerah berkesinambungan bagi para pengusaha/perusahaan agar memberikan jaminan calon pekerja agar memperhatikan aspek perlindungan diri 4) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi belum optimal, hal ini tergambarkan pada trend capaian yang berfluktuasi yang terjadi setiap tahunnya karena bergantung pada ketersediaan anggaran untuk menjalankan program pelatihan 5) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat juga masih rendah dan capaiannya mengalami fluktuatif di setiap tahunnya. Imbas dari covid-19 yang berdampak pada refocusing anggaran maka capaian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 33% dari tahun sebelumnya yaitu 54 %. Penurunan capain ini menyesuaikan besarnya anggaran penyelenggaraan pelatihan yang tersedia juga menurun 6) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan belum mencapai target dan mengalami penurunan karena adanya pengurangan anggaran akibat pandemi covid 19. Hal ini perlu menjadi perhatian karena Pelatihan berbasis kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam memberdayakan UKM, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan produktivitas UKM 7) Masih rendahnya Rasio lulusan S1/S2/S3, hal ini berdasarkan pada trend capaian yang berfluktuatif dan mengalami penurunan, sehingga meskipun jumlah lulusan bertambah tetapi dipengaruhi oleh kenaikan jumlah penduduk dan tidak diimbangi dengan kalitas berupa keahlian dan keterampilan yang memadai dari pencari kerja yang berkualifikasi lulusan S1/S2/S3
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak dasar anak yang belum optimal	1) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah yang belum optimal 2) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR masih rendah	1) Rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja yang berpengaruh pada posisi tawar perempuan; atau rendahnya partisipasi perempuan diparllemen (Kesbangpol)

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		3) Partisipasi perempuan di lembaga swasta yang belum optimal 4) Rasio KDRT yang masih tergolong tinggi 5) Partisipasi angkatan kerja perempuan yang belum optimal 6) Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian masih rendah	2) Komposisi perempuan yang masih belum berimbang dalam lembaga pemerintahan; 3) Sumbangan Perempuan dalam pendapatan ekonomi masih rendah (perekonomian) 4) Masih banyak program Perangkat Daerah yang belum mainstreaming gender; 5) Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum. 6) Ketersediaan data dan informasi gender anak secara kontinyu dan tervalidasi belum terbangun 7) Pelembagaan PUG belum berjalan optimal 8) Layanan Sistem Perlindungan Anak yang meliputi pencegahan, deteksi dini penanganan, dan pemulihan belum berjalan secara holistic integrative, baik internal maupun antar sektor dan wilayah 9) Belum tersedianya lembaga layanan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan sosial yang ramah anak belum ada 10) Belum tersedianya lembaga layanan pusat pembelajaran keluarga yang berbasis pemenuhan hak anak dan berkesetaraan gender
3	Pangan		
	Ketersediaan Cadangan Pangan Yang Belum Optimal	1) Masih rendahnya ketersediaan pangan utama 2) Masih rendahnya Ketersediaan energi dan protein perkapita 3) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, belum optimal 4) Pola konsumsi pangan yang belum berimbang, khususnya untuk kelompok umbi-umbian; pangan hewani; sayur dan buah; serta minyak dan lemak	1) Persoalan akses, distribusi dan keragaman pangan masih rendah; 2) Belum meratanya keberadaan lumbung pangan masyarakat. 3) Perlunya peningkatan pengawasan dan pembinaan pangan dengan menambah jumlah sampel pangan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat 4) Tingkat pemahaman dan pola pikir masyarakat terkait pola konsumsi pangan yang berimbang masih terbatas
4	Pertanahan		
	Penanganan Kasus Tanah Negara Yang Belum Optimal	1) Persentase luas lahan bersertifikat dari jumlah luas wilayah masih rendah 2) Penyelesaian izin lokasi yang belum optimal	1) Belum seluruhnya tanah milik pemerintah daerah memiliki sertifikat; 2) Masih banyaknya ijin Hak Pakai (HP) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang belum teridentifikasi kesesuaian pemanfaatannya serta yang telah habis masa pakainya 3) Belum tertibnya dokumen pertanahan

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5	Lingkungan Hidup		
	Kualitas Keterpeliharaan lingkungan hidup belum berfokus pada pengintegrasian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan	1. Tidak Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota, sehingga tidak ada data capain 2. Tidak Terintegrasinya RPPLH dalam pembangunan kabupaten/kota, sehingga tidak ada data capain 3. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten belum optimal 4. Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota yang belum optimal 5. Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang terverifikasi masih rendah 6. Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional 7. Timbulan sampah yang ditangani masih rendah 8. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R belum optimal 9. Persentase cakupan area pelayanan belum optimal 10. Persentase jumlah sampah yang tertangani belum optimal 11. Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan belum optimal	1) Tidak Tersusunnya RPPLH Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sehingga mengakibatkan tidak ada data capain. Factor penyebabnya adalah tidak dialokasikannya anggaran untuk kegiatan penyusunan RPPLH 2) Tidak adanya pejabat PPLH, karena tidak tersedianya SDM yang bisa mengikuti DIKLAT. Disebabkan karena kurangnya alokasi anggaran untuk peningkatan SDM Lingkungan Hidup serta penyediaan sarpras pun terbatas. 3) Terbatasnya kepemilikan MHA di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan karena hanya terfokus pada kearifan lokal masyarakat dan kegiatan yang dilakukan sebatas inventarisasi kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 4) Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terverifikasi hanya 3 kearifan lokal. Kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang ada sudah banyak yang terpengaruh oleh modernisasi sehingga jumlah kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yg diverifikasi menurun di tahun 2019. Selain itu adanya refocusing anggaran menyebabkan kegiatan tidak berjalan maksimal 5) Pembinaan yang dilakukan terhadap operator sekolah adiwiyata dengan jumlah tetap karena disesuaikan dengan sekolah yang dibina oleh tim adiwiyata DLH Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 6) Penghargaan Program adiwiyata dan program iklim terkendala karena adanya covid-19, yang mengakibatkan pembinaan dilakukan dengan tidak maksimal sehingga tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan penghargaan di tahun 2020 7) Pada tahun 2017 sampai dengan 2020 pengurangan sampah lebih rendah dibandingkan thn 2016. Hal ini disebabkan karena kurangnya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sementara timbunan sampah semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. 8) Tahun 2019 dan Tahun 2020 tidak ada penilaian untuk penghargaan ADIPURA, sehingga operasional TPA dianggap sama dengan capaian tahun sebelumnya

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			9) Kemampuan penanganan sampah khususnya upaya mengurangi sampah dan limbah masih terbatas. 10) Minimnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Keterpenuhan Layanan Administrasi Kependudukan Yang Belum Optimal	1) Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk yang belum optimal 2) Masih kurangnya Rasio bayi berakte kelahiran, 3) Masih kurangnya Rasio pasangan berakte nikah 4) Cakupan penerbitan akta kelahiran yang belum optimal	1) Belum seluruh penduduk memiliki dokumen kependudukan; 2) Database dan informasi kependudukan belum seluruhnya lengkap; 3) Sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan kependudukan belum optimal 4) Sebagian masyarakat tingkat kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kartu identitas kependudukan masih rendah sehingga tidak segera melakukan pengurusan akta kelahiran bayinya 5) Masih banyaknya akte perkawinan yang telah diterbitkan sebelumnya secara konvensional dan belum terintegrasi dengan SIAK, menyebabkan datanya perkawinannya belum tercatat dalam SIAK 6) Cakupan penerbitan akte kelahiran yang belum optimal disebabkan karena pengajuan dilakukan secara online namun belum mampu diakses oleh masyarakat khususya di daerah kepulauan akibat terbatasnya jaringan dan faktor cuaca yang tidak menentu
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Masih rendahnya IDM	1) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang belum optimal 2) IDM yang belum memenuhi target	1) Belum optimalnya kapasitas Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan kewenangan desa; 2) Masih terdapat desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun karena adanya kekosongan pemerintah kepala desa
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Belum maksimalnya pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi penguatan ketahanan keluarga balita, remaja, lansia dalam peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga	1. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB belum optimal 2. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk masih rendah	1) Angka kelahiran total masih relatif tinggi 2) Masih rendahnya Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa 3) Peran serta masyarakat dalam kegiatan bina keluarga, balita dan anak (BKB), bina keluarga remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL) dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		3. Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan masih rendah 4. Ratio Akseptor KB, yang masih perlu peningkatan 5. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah belum optimal 6. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) belum optimal 7. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah 8. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi belum optimal 9. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB masih rendah 10. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB masih rendah 11. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB masih rendah 12. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan belum optimal 13. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa masih rendah 14. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri belum optimal 15. Cakupan ketersediaan dan distribusi obat dan alat untuk memenuhi permintaan masyarakat yang belum optimal 16. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan masih rendah 17. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahamidan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak masih rendah 18. Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan	(UPPKS) belum optimal; 4) Peran institusi masyarakat sebagai jejaring dan mitra kerja program kependudukan, Kelaarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPk) belum optimal. 5) Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan 6) Rendahnya keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 7) Rendahnya keikutsertaan KB pria 8) Melemahnya kualitas keluarga dalam menjalankan 8 fungsi keluarga 9) Belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan promosi/KIE melalui berbagai media dalam meningkatkan pemahaman serta perubahan sikap dan perilaku dalam mendukung program keluarga kencana. 10) Belum maksimalnya pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi penguatan ketahanan keluarga balita, remaja, lansia dan peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		keluarga melalui 8 fungsi keluarga yang belum optimal 19. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes belum optimal	
9	Perhubungan		
	Masih minimnya layanan transportasi laut dan darat	1) Arus penumpang angkutan umum yang semakin menurun 2) Kurangnya ijin trayek 3) Uji kir angkutan umum yang belum optimal 4) orang/ barang yang terangkut pada angkutan umum yang semakin menurun 5) orang/ barang yang melalui dermaga/ bandara/ terminal yang semakin menurun	1) Perubahan kondisi ekonomi masyarakat serta meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi sehingga arus angkutan umum yang semakin menurun 2) Berkurangnya ijin trayek disebabkan karena masyarakat cenderung lebih memilih jenis angkutan lain seperti bentor atau kendaraan bermotor karena lebih praktis serta peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi yang digunakan sebagai alat angkutan 3) Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan; 4) Perlu dilaksanaan penataan lahan parkir, terutama pada kawasan wisata dan disekitar jalan protokol ketika banyak pengunjung; 5) Aksesibilitas transportasi umum dalam kabupaten, terutama wilayah perdesaan, masih terbatas. 6) Masih diperlukannya upaya peningkatan pelayanan pada terminal penumpang kualitas bangunan utama dan penunjang terminal maupun secara kuantitas peningkatan jumlah terminal 7) Belum terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan sesuai jumlah dan standar, khususnya pada ruas jalan utama 8) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan pada pelabuhan 9) Dampak dari pandemi Covid-19 mengakibatkan mobilitas masyarakat menurun drastis sehingga jumlah orang/barang yang terangkut pada angkutan umum baik melalui dermaga/ bandara/ terminal mengalami penurunan
10	Komunikasi dan Informatika		
	Masih minimnya akses layanan informasi dan komunikasi	1) Layanan Telekomunikasi yang belum optimal 2) Penduduk yang menggunakan HP/telepon belum optimal	1) Terbatasnya SDM yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi; 2) Belum seluruh desa terjangkau oleh sarana telekomunikasi

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		3) Masih kurangnya Rumah tangga yang memiliki akses internet	3) Perlunya peningkatan efektivitas penerapan strategi dan pemanfaatan media komunikasi public 4) Perlunya peningkatan sarpras infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memadai khususnya daerah kepulauan dan pegunungan yang sulit dijangkau layanan telekomunikasi. 5) Perlunya peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah.
11	Koperasi dan UKM		
	Pertumbuhan Koperasi dan UMKM masih lambat	1) Persentase koperasi aktif yang belum optimal. 2) Persentase BPR/LKM aktif yang belum optimal 3) Persentase UKM non BPR/LKM aktif yang belum optimal 4) Persentase usaha mikro dan kecil yang masih perlu ditingkatkan	1) Tingkat pemahaman masyarakat tentang peran dan manfaat koperasi relative masih terbatas sehingga menjadikan koperasi belum menjadi pilihan utama masyarakat sebagai sarana perekonomian Keberadaan koperasi belum bisa menjawab tantangan kebutuhan ekonomi masyarakat; 2) Menurunnya jumlah koperasi aktif, akibat terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pengurus koperasi 3) Ketersediaan bahan baku tidak berasal dari produk lokal; 4) Masih belum tumbuhnya sentra UKM di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disebabkan karena tingkat produktivitas dan daya saing UKM belum optimal akibat keterbatasan permodalan serta rendahnya penguasaan proses produksi dan teknologi.
12	Penanaman Modal		
	Masih rendahnya realisasi PMDN dan kualitas pelayanan publik dalam perizinan	1) Jumlah investor berskala nasional yang semakin menurun 2) Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) yang belum optimal 3) Rasio Daya serap tenaga kerja yang belum optimal	1) Masih kecilnya investasi yang masuk ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sehingga berpengaruh pada serapan tenaga kerja, selain itu kurangnya kesadaran investor untuk melakukan pelaporan secara online sehingga mempengaruhi akses dan informasi bagi investor lainnya. Mewabahnya pandemi covid-19 juga menjadi penyebab turunnya realisasi investasi diberbagai sektor dan berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tenaga kerja lapangan secara keseluruhan 2) Kenaikan investasi belum cukup untuk mendorong perekonomian masyarakat 3) Menurunnya daya serap tenaga kerja disebabkan karena investasi yang masuk pada kurun waktu lima tahun terakhir mayoritas dari sektor industri yang tidak menggunakan tenaga kerja yang banyak. Industri yang masuk lebih banyak memanfaatkan sistem otomasi/mesin dan jumlah proyek yang

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			teralisasi hanya investasi yang bernilai kecil
13	Kepemudaan dan Olahraga		
	Belum optimalnya peran pemuda dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah.	1) Organisasi pemuda yang aktif belum optimal 2) Masih kurangnya wirausaha muda 3) Belum Optimalnya pembinaan pada seluruh cabang olahraga 4) Kurangnya pelatih yang bersertifikasi 5) Masih kurangnya pembinaan atlet muda 6) Kurangnya atlet yang berprestasi 7) Masih kurangnya prestasi dari semua cabang olahraga	1) Terbatasnya tenaga profesional pembina olahraga; 2) Terbatasnya sarana prasarana untuk meningkatkan kreativitas pemuda; 3) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar yang ditetapkan; 4) Belum optimalnya prestasi atlet termasuk atlet usia dini dan pelajar; 5) Kurang optimalnya peran serta pemuda dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.
14	Statistik		
	Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral yang belum maksimal	1) Sistem data statistik yang terintegrasi belum optimal 2) Penerbitan Buku "kabupaten dalam angka" belum optimal 3) Penerbitan Buku "PDRB" yang belum optimal	1) Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang relatif masih terbatas; Masih diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan penyusunan data statistik 2) Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral; 3) Perlunya peningkatan optimalisasi peran/keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi 4) Perlunya peningkatan upaya mewujudkan single data dan penguatan pengelolaan data statistik sektoral.
15	Persandian		
	Penggunaan Persandian sebagai alat komunikasi yang belum maksimal	Masih rendahnya Persentase Perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Masih rendahnya kapasitas SDM dalam penanggulangan dan pemulihan terhadap gangguan keamanan informasi persandian
16	Kebudayaan		
	Masih rendahnya nilai indeks kebudayaan	1) Masih kurangnya penyelenggaraan festival seni dan budaya. 2) Masih kurangnya karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi 3) Masih kurangnya cagar budaya yang dikelola secara terpadu.	1) Terbatasnya SDM pengelola kebudayaan; 2) Terbatasnya sarana prasarana dalam pelestarian dan pengembangan cagar budaya serta nilai-nilai budaya lokal
17	Perpustakaan		
	Masih rendahnya minat dan gemar	1) Kurangnya jumlah pengunjung perpustakaan.	1) Belum optimalnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	membaca masyarakat	2) Kurangnya koleksi judul buku yang ada di perpustakaan	2) Menurunnya minat baca dan minat pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat 3) Belum optimalnya sarpras dan SDM untuk mendukung gerakan literasi masyarakat;
18	Kearsipan		
	Masih rendahnya pengelolaan kearsipan	1) Kurangnya Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	1) Belum tertibnya pengolahan kearsipan; 2) Terbatasnya tenaga arsiparis; 3) Tempat khusus penyimpanan arsip belum memadai 4) Belum adanya Penerapan Sistem Kearsipan Daerah Terintegrasi" (Penerapan e-arsip terintegrasi)
	Urusan Pilihan		
1	Pariwisata		
	Pemanfaatan sektor pariwisata yang belum berkontribusi positif dalam menaikkan pendapatan	1) Masih terbatasnya kunjungan wisata 2) Masih rendahnya capaian PAD sektor pariwisata 3) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana serta pemasaran destinasi pariwisata	1) Belum terbentuknya branding pariwisata Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; 2) PAD dari sektor pariwisata masih minim; 3) Belum terintegrasinya antara kebutuhan pariwisata daerah dengan sektor pendidikan kepariwisataan. 4) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Usaha Pariwisata yang berdaya saing di bidang pariwisata. 5) Kurangnya inovasi dan kreasi produk wisata dan produk UKM sektor pariwisata.
2	Pertanian		
	Produktivitas komoditi Pertanian yang masih rendah	1) Masih kurangnya kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB 2) Masih kurangnya kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB 3) Masih kurangnya kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB, 4) Masih kurangnya kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	1) Belum tersedianya sebaran komoditas unggulan per wilayah; 2) Belum tersedianya indikator untuk mengukur kesejahteraan petani; 3) Belum adanya insentif bagi para petani yang mengembangkan inovasi lokal; 4) Penguasaan lahan yang sempit oleh petani; 5) Kebijakan pertanian di tingkat nasional belum mampu mendukung produktifitas sektor pertanian; 6) Belum optimalnya penerapan modernisasi pertanian dan perkebunan sebagai sarana untuk mengefisienkan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 7) Belum optimalnya penggunaan benih dan bibit unggul bersertifikat sehingga berdampak pada tingkat produktivitas, dan

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			penerapan budidaya yang lebih ramah lingkungan 8) Pengetahuan petani yang masih terbatas dalam proses produksi; 9) Minimnya generasi penerus yang bergerak di isu pertanian.
3	Energi dan Sumber Daya Mineral		
	Ketersediaan daya listrik yang belum merata dan maksimal	1) Persentase rumah tangga pengguna listrik yang masih perlu ditingkatkan 2) Rasio ketersediaan daya listrik yang belum optimal	1) Kondisi geografis wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memiliki daerah kepulauan dan pegunungan mengakibatkan jaringan listrik ke rumah tangga masih terkendala 2) Masih minimnya pembangunan tower untuk pemenuhan daya listrik
4	Perdagangan		
	Masih rendahnya perlindungan konsumen dalam upaya meningkatkan pemasaran produksi IKM	1) Masih rendahnya ekspor bersih perdagangan 2) Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal yang dibina belum optimal	1) Ketersediaan bahan baku tidak berasal dari produk lokal; 2) Kapasitas produksi IKM yang belum mampu memenuhi permintaan pasar; 3) Masih rendahnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; 4) Kurangnya pembinaan dan pengembangan Pasar Daerah dan Pasar Desa; 5) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri serta peningkatan dan pengembangan ekspor 6) Rendahnya daya saing pasar tradisional dibandingkan dengan retail modern karena belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai
5	Perindustrian		
	Belum optimalnya pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1) Kelompok pengrajin yang dibina masih belum optimal	1) Masih kurangnya pengembangan industri kreatif terutama di bidang pariwisata; 2) Belum optimalnya pengembangan Industri Kecil dan Menengah di mana masih terdapatnya produk pangan industri rumah tangga yang belum mendapatkan legalisasi/sertifikasi industri; 3) Masih rendahnya penerapan teknologi industri oleh IKM dalam penerapan cara produksi yang baik; 4) Masih terbatasnya kemampuan IKM dalam hal peningkatan teknologi produksi, peningkatan inovasi produk, tampilan kemasan yang belum memenuhi permintaan pasar, pendaftaran merek, penerapan manajemen mutu produk dan manajemen usaha;

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			5) Pertumbuhan sentra industri IKM di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih terbatas 6) Penempatan Industri pengolahan di daerah masih rendah karena pertimbangan jarak dengan pasar. 7) Belum optimalnya pemenuhan standarisasi kualitas produk industri kecil dan menengah
6	Kelautan dan Perikanan		
	Masih rendahnya produksi perikanan	1) Masih kurangnya produksi perikanan 2) Konsumsi ikan yang masih rendah 3) Belum optimalnya jumlah kelompok nelayan yang dibina 4) Nilai tukar nelayan yang masih rendah	1) Tingkat produktifitas perikanan masih rendah; 2) Diversifikasi pengolahan produk perikanan masih rendah; 3) Tingkat konsumsi per kapita yang masih rendah. 4) Masih rendahnya penggunaan alat tangkap ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan 5) Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan upaya pembinaan kepada petani untuk menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik
	Urusan Penunjang		
1	Perencanaan		
	Konsistensi Perencanaan yang belum maksimal	1) Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW yang belum maksimal 2) Belum optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan	1) Evaluasi penerapan RTRW dalam pembangunann belum optimal 2) Proses revisi perda RTRW tidak berjalan sesuai dengan jadwal 3) Monitoring dan evaluasi yang belum optimal 4) Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
2	Keuangan		
	Belum optimalnya pengelolaan Keuangan Daerah	1) Persentase SILPA terhadap APBD yang belum optimal 2) Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana masih tinggi	1) Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung yang masih tinggi 2) Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah. 3) Bagi hasil kabupaten/kota dan desa yang belum optimal
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan		
	Pembinaan Kompetensi ASN yang masih rendah	1) Masih rendahnya ASN yang mengikuti Pelatihan formal 2) Masih rendahnya Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	1) Minat dan keinginan bagi sebagian pejabat structural untuk mengikuti diklat masih rendah 2) ASN kurang meminati JFT disebabkan karena prosedur untuk menduduki jabatan fungsional ada standar yang harus dipenuhi dan ASN sudah berada dalam zona nyaman

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		3) Masih rendahnya jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah 4) Masih rendahnya Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	
4	Penelitian dan Pengembangan		
	Pemanfaatan hasil kelitbangan yang belum optimal	1) Persentase Implementasi rencana kelitbangan yang masih perlu ditingkatkan 2) Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang belum optimal dimanfaatkan oleh OPD 3) Kurangnya PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Hasil Kajian dan Penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah khususnya pada program kegiatan di OPD dan untuk pelaksanaan dan pengembangan kajian tentang kelitbangan masih terkendala karena keterbatasan alokasi anggaran
5	Pengawasan		
	Tingkat Pengawasan APIP yang masih rendah	1) Masih rendahnya persentase tindak lanjut temuan 2) Masih tingginya Jumlah temuan BPK 3) Masih tingginya pelanggaran pegawai	1) OPD kurang memperhatikan hasil tindak lanjut temuan dan tidak sesuai dengan rekomendasi 2) Umumnya rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti dari Perangkat Daerah tidak sesuai dengan yang direkomendasikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 3) Banyaknya temuan dari pihak ke-tiga yang sudah tidak bisa dijangkau lokasi keberadaannya sehingga temuan-temuan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti 4) Masih terdapat temuan yang sudah ditindaklanjuti karena yang bersangkutan sudah meninggal 5) Masih rendahnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 6) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD masih belum sepenuhnya berorientasi pada hasil yang berarti OPD belum sepenuhnya mempertanggungjawabkan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi OPD

4.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksestabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu-isu tersebut diidentifikasi berdasarkan tinjauan terhadap isu global, nasional, provinsi dan masalah prioitas daerah sebagai berikut:

4.2.1. Isu Startegis Global

1. Pandemic Covid-19

Covid19 dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana non alam sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virrus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional yang menimbulkan implikasi pada aspek sosial dan ekonomi.

Merebaknya pandemi Covid-19, memunculkan permasalahan baru bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Salah satunya pada aspek ketenagakerjaan Indonesia. Banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan dan menyebabkan angka pengangguran melonjak tajam. Selain itu dampak dalam pembangunan lima tahun kedepan terhadap pandemik akan signifikan pada aspek ekonomi seperti investasi dan produksi, perdagangan dan pariwisata. Pada aspek sosial ia juga berimplikasi pada kemiskinan dan kerentanan sosial serta adaptasi kehidupan baru terkait protokol kesehatan.

Untuk wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dampak yang cukup signifikan dirasakan semenjak merebaknya pandemik Covid-19 adalah pada menurunnya produksi

industri pengolahan yaitu pada industri semen dan marmer dan industri pengolahan lainnya sebagai salah satu sektor usaha penyumbang PDRB bagi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penurunan ini berdasarkan hasil capaian PDRB berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (Hk) mengalami penurunan dari 50,37% pada Tahun 2018 menjadi 48,88% dan 47,74% masing-masing di tahun 2019 dan 2020. Menurunnya produksi pada industri pengolahan berdampak pada menurunnya hasil komoditi ekspor dan berimbas pada banyaknya pekerja yang tidak produktif atau dirumahkan sehingga memicu meningkatnya tingkat pengangguran.

Akibat dari pandemic Covid-19 juga mempengaruhi sektor-sektor lainnya disamping sektor ekonomi, juga kehidupan sosial masyarakat sehingga akan memicu pada meningkatnya masyarakat miskin dan rentan kemiskinan. Imbas keseluruhan dari pandemic covid-19 ini bagi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi sampai pada minus 1,69% Pada tahun 2020.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan isu penting dalam pembangunan global saat ini dengan target pencapaian selama 15 tahun ke depan (2016-2030) sebagai kelanjutan dari MDG's yang ditargetkan sebelumnya. Secara konseptual, SDGs adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang.

Untuk mencapai tujuan SDGs tahun 2030 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah (nasional dan daerah), masyarakat sipil, akademis, media, sektor swasta dan lembaga donor. Secara kolektif kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan secara eksplisit mengenai pentingnya mengintegrasikan SDGs ke dalam dokumen RPJMD untuk memastikan bahwa semua agenda-agenda SDGs benar-benar terakomodir di dalam desain perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Pencapaian SDGs harus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pelaksanaan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) di tingkat daerah ditentukan oleh tingkat capaian pelaksanaan indikator TPB terhadap target yang telah ditentukan baik target daerah maupun target nasional yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan (TPB). Indonesia

mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dan 169 target untuk pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya pencapaian 319 indikator tersebut dilaksanakan berdasarkan pembagian kewenangan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pembagian kewenangan Kabupaten, dari 319 indikator tersebut terdapat 220 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten untuk dilaksanakan. Indikator-indikator tersebut terbagi kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun Indikator TPB di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dikelompokkan berdasarkan capaian yang sudah dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah dengan berdasarkan pada Tujuan TPB dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berdasarkan Tujuan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

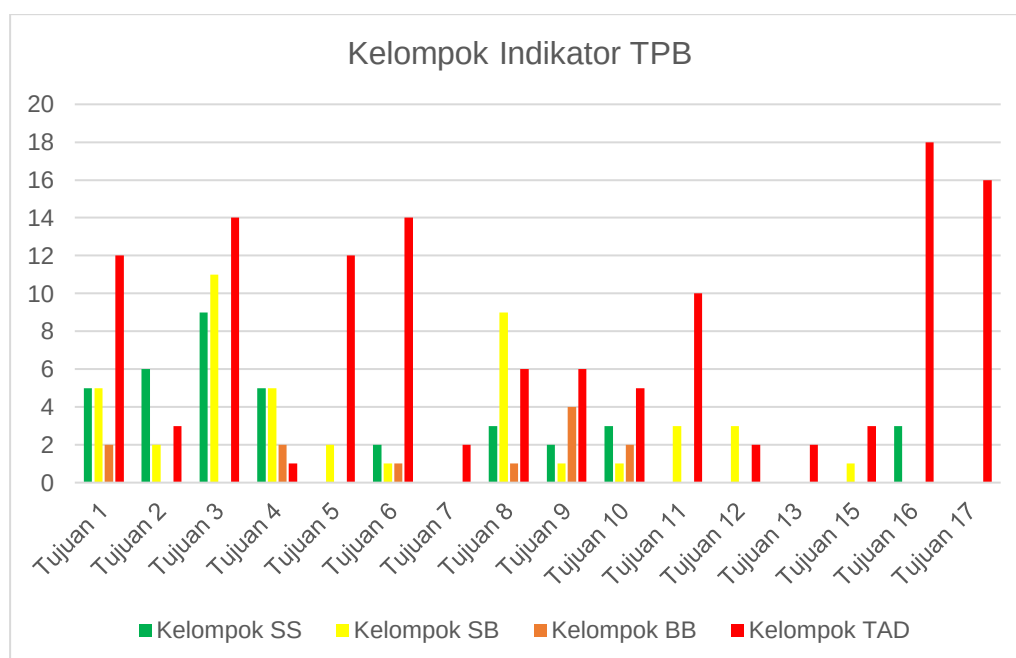
	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	SS	SB	BB	TAD	Total
Tujuan 1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	6	4	2	12	24
Tujuan 2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	6	2		3	11
Tujuan 3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	6	14		14	34
Tujuan 4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	5	5	2	1	13
Tujuan 5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan		3		11	14
Tujuan 6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	3		1	14	18
Tujuan 7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua			4	2	2
Tujuan 8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	3	9	2	6	19
Tujuan 9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	3			6	13
Tujuan 10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	3	2		4	11
Tujuan 11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan		3		10	13
Tujuan 12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	2	1		2	5
Tujuan 13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	1			1	2
Tujuan 14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan					
Tujuan 15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	1			3	4

	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	SS	SB	BB	TAD	Total
Tujuan 16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	3			18	21
Tujuan 17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	6			16	16
	Grand Total TPB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	42	43	12	123	220

Sumber: Hasil Analisis KLHS Tahun 2020

Adapun capaian dan hasil pengelompokkan indikator di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari 220 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten disajikan pada Tabel dan Gambar berikut ;

Gambar. 4.1.
Kelompok Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Tabel. 4. 2.
Jumlah Capaian Indikator TPB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Kriteria	Jumlah Indikator	Persentase
1	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)	42	19,09%
2	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB)	43	19,55%
3	Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB)	12	5,45%
4	Indikator TPB yang belum memiliki data (TAD)	123	55,91%
Total Indikator yang menjadi kewenangan kabupaten		220	100,00%

Sumber: Hasil Analisis KLHS Tahun 2020.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah melaksanakan indikator dalam kelompok SS sebanyak 42 indikator yang tersebar pada 12 tujuan. Secara rinci indikator kelompok SS di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang sudah dilaksanakan dalam setiap tujuan TPB diuraikan pada Tabel berikut;

1. Indikator Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target.

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai indikator-indikator yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan sudah mencapai target nasional sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021. Jumlah indikator tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4.3.

Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB pada Kelompok Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No. TPB	Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB Kelompok SS	Jumlah Indikator Kelompok (SS)
1	Tujuan TPB: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	6
	Indikator 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. Indikator 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. Indikator 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Indikator 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. Indikator 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. 1. Isu TPB : Belum terjaminnya semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	
	Indikator 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. 2. Isu TPB : Belum optimalnya pembangunan ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan masih adanya kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	
2	Tujuan TPB: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	6
	Indikator 2.1.1* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). Indikator 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. Indikator 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. 3. Isu TPB : Masih adanya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	
	Indikator 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. Indikator 2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Indikator 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola	

No. TPB	Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB Kelompok SS	Jumlah Indikator Kelompok (SS)
	Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. 4. Isu TPB : Belum terpenuhinya gizi, termasuk untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan belum terpenuhinya kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	
3	Tujuan TPB: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	6
	Indikator 3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	
	5. Isu TPB : Masih kurangnya upaya untuk mengurangi rasio angka kematian ibu.	
	Indikator 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	
	6. Isu TPB : Masih adanya kematian bayi baru lahir dan balita yang tidak dapat dicegah.	
	Indikator 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.	
	7. Isu TPB : Masih adanya epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan masih adanya hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	
	Indikator 3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	
	8. Isu TPB : Masih adanya hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular dan belum meningkatnya kesehatan mental dan kesejahteraan.	
	Indikator 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	
	9. Isu TPB : Belum terjaminnya akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan belum terintegrasinya kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	
	Indikator 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	
	10. Isu TPB : Belum tercapainya cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan belum terjangkau untuk semua orang.	
4	Tujuan TPB: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	5
	Indikator 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	
	11. Isu TPB : Belum terjaminnya semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	
	Indikator 4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	
	12. Isu TPB : Belum optimalnya upaya dalam meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	
	Indikator 4.5.1.* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi..	
	13. Isu TPB : Masih adanya disparitas gender dalam pendidikan, dan belum terjaminnya akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang	

No. TPB	Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB Kelompok SS	Jumlah Indikator Kelompok (SS)
	cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	
	Indikator 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun. 14. Isu TPB : Belum terjaminnya semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	
	Indikator 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. 15. Isu TPB : Belum meningkat secara signifikan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama dalam pelatihan guru.	
6	Tujuan TPB: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	3
	Indikator 6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Indikator 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. 16. Isu TPB : Masih belum optimalnya upaya dalam meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman.	
	Indikator 6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. 17. Isu TPB : Belum diterapkannya secara optimal pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	
8	Tujuan TPB: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	3
	Indikator 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. 18. Isu TPB : Belum tercapainya tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	
	Indikator 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja. Indikator 8.5.2* Persentase tenaga kerja formal. 19. Isu TPB : Belum tercapainya pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	
9	Tujuan TPB: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	3
	Indikator 9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan. 20. Isu TPB : Belum dikembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	
	Indikator 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. Indikator 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. 21. Isu TPB : Kurangnya promosi industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta secara signifikan belum meningkatnya proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto.	

No. TPB	Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB Kelompok SS	Jumlah Indikator Kelompok (SS)
10	Tujuan TPB: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara Indikator 10.1.1* Koefisien Gini. Indikator 10.1.1.(b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. Indikator 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal. 22. Isu TPB : Belum tercapainya pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi.	3
12	Tujuan TPB: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan Indikator 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). 23. Isu TPB : Belum optimalnya pencapaian pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, dan secara signifikan masih adanya pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah sehingga masih menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Indikator 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. 24. Isu TPB : Belum optimalnya upaya untuk mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	2
13	Tujuan TPB: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya Indikator 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. 25. Isu TPB : Lemahnya kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam.	1
15	Tujuan TPB: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati Indikator 15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. 26. Isu TPB : Belum diintegrasikannya nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	1
16	Tujuan TPB: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan Indikator 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. Indikator 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. Indikator 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. 27. Isu TPB : Belum optimalnya upaya dalam memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	3
Total Indikator Kelompok SS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan		42

Sumber: Hasil Analisis KLHS Tahun 2020.

2. Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai indikator-indikator yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan namun belum mencapai target nasional sesuai dengan RPJMD 2016-2021, jumlah indikator tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini;

Tabel. 4.4.

Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB pada Kelompok Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No. TPB	Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB Kelompok SB	Jumlah Indikator Kelompok SB
1	Tujuan TPB: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	5
	Indikator 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 1. Isu TPB : Masih adanya setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi.	
	Indikator 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. 2. Isu TPB : Belum diterapkannya sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin dan rentan.	
	Indikator 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. 3. Isu TPB : Belum terjaminnya semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	
	Indikator 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. 4. Isu TPB : Belum optimalnya pembangunan ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan masih adanya kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	
2	Tujuan TPB: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2
	Indikator 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. 5. Isu TPB : Masih adanya kelaparan dan belum terjaminnya akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	
	Indikator 2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil. 6. Isu TPB : Masih adanya segala bentuk kekurangan gizi, termasuk untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan belum terpenuhinya kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	
3	Tujuan TPB: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	11
	Indikator 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI). Indikator 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. 7. Isu TPB : Kurangnya tenaga kesehatan terlatih dan kurangnya upaya untuk mengurangi rasio angka kematian ibu.	
	Indikator 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. Indikator 3.2.2* Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. Indikator 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. 8. Isu TPB : Masih adanya kematian bayi baru lahir dan balita yang tidak dapat dicegah.	
	Indikator 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa. Indikator 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	
	Indikator 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit	

No. TPB	Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB Kelompok SB	Jumlah Indikator Kelompok SB
	tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). 9. Isu TPB : Masih adanya epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan masih adanya hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. Indikator 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi. Indikator 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun. 10. Isu TPB : Masih adanya hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular dan belum meningkatnya kesehatan mental dan kesejahteraan. Indikator 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. Indikator 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. Indikator 3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). Indikator 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR). 11. Isu TPB : Belum terjaminnya akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan belum terintegrasinya kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	
4	Tujuan TPB: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua Indikator 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. Indikator 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. Indikator 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. Indikator 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun. 12. Isu TPB : Belum terjaminnya semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Indikator 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 13. Isu TPB : Belum terjaminnya semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	5
5	Tujuan TPB: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan Indikator 5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). 14. Isu TPB : Masih adanya praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa. Indikator 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). Indikator 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. 15. Isu TPB : Belum terjaminnya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi.	3
8	Tujuan TPB: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua Indikator 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. Indikator 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal.	9

No. TPB	Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB Kelompok SB	Jumlah Indikator Kelompok SB
	Indikator 8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. 16. Isu TPB : Belum optimalnya upaya dalam menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan masih belum terdorongnya formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	
	Indikator 8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran. 17. Isu TPB : Belum tercapainya pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	
	Indikator 8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). 18. Isu TPB : Masih adanya proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	
	Indikator 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. Indikator 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara. Indikator 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. Indikator 8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata. 19. Isu TPB : Belum optimalnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	
10	Tujuan TPB: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	1
	Indikator 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Indikator 10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. 20. Isu TPB : Belum tercapainya pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi.	
11	Tujuan TPB: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	3
	Indikator 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. 21. Isu TPB : Belum terjaminnya akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta belum tertatanya kawasan kumuh.	
	Indikator 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). 22. Isu TPB : Masih adanya jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial masih adanya kerugian ekonomi relatif terhadap PDB yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	
	Indikator 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 23. Isu TPB : Masih adanya dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan belum diberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	
12	Tujuan TPB: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	3
	Indikator 12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. 24. Isu TPB : Lemahnya upaya mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	
Total Indikator Kelompok SB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan		43

Sumber: Hasil Analisis KLHS Tahun 2020.

3. Indikator Belum Dilaksanakan Dan Belum Mencapai Target

Berikut ini adalah indikator-indikator yang termasuk dalam kategori belum dilaksanakan namun belum mencapai target RPJM0. Jumlah indikator tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4.5.

Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB pada Kelompok Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No. TPB	Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB Kelompok BB	Jumlah Indikator Kelompok BB
1	Tujuan TPB: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	2
	Indikator 1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. 1. Isu TPB : Belum diterapkannya sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin dan rentan.	
	Indikator 1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) 2. Isu TPB : Belum optimalnya pembangunan ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan masih adanya kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	
4	Tujuan TPB: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	2
	Indikator 4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. 3. Isu TPB : Belum terjaminnya semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	
	Indikator 4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. 4. Isu TPB : Belum terjaminnya semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	
6	Tujuan TPB: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	1
	Indikator 6.3.2.(a) Kualitas air danau. 5. Isu TPB : Masih belum optimalnya upaya dalam meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman.	
8	Tujuan TPB: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	1
	Indikator 8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. 6. Isu TPB : Belum optimalnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	
9	Tujuan TPB: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	4
	Indikator 9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol. Indikator 9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api.	

No. TPB	Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB Kelompok BB	Jumlah Indikator Kelompok BB
	Indikator 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis. 7. Isu TPB : Belum dikembangkannya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	
	Indikator 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. 8. Isu TPB : Kurangnya promosi industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta secara signifikan belum meningkatnya proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto.	
10	Tujuan TPB: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	2
	Indikator 10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri. 9. Isu TPB : Belum tercapainya pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi.	
	Indikator 10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. 10. Isu TPB : Belum optimalnya kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif belum mencapai kesetaraan yang lebih besar.	
Total Indikator Kelompok BB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan		12

Sumber: Hasil Analisis KLHS Tahun 2020.

4. Indikator Belum Memiliki Data

Selanjutnya untuk mencapai TPB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat beberapa indikator yang belum memiliki data pada setiap tujuan dalam TPB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu;

Tabel. 4.6.

Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB pada Kelompok Indikator Belum Memiliki Data di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No. TPB	Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB Kelompok TAD	Jumlah Indikator Kelompok TAD
1	Tujuan TPB: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	12
	Indikator 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. Indikator 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. 1. Isu TPB : Belum diterapkannya sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin dan rentan.	
	Indikator 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. Indikator 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Indikator 1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. 2. Isu TPB : Belum terjaminnya semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	
	Indikator 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per	

No. TPB	Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB Kelompok TAD	Jumlah Indikator Kelompok TAD
	100.000 orang. Indikator 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. Indikator 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. Indikator 1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial. Indikator 1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. 3. Isu TPB : Belum optimalnya pembangunan ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan masih adanya kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	
	Indikator 1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. Indikator 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. 4. Isu TPB : Belum terjaminnya mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau, khususnya untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	
2	Tujuan TPB: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	3
	Indikator 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Indikator 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. 5. Isu TPB : Masih adanya segala bentuk kekurangan gizi, termasuk untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan belum terpenuhinya kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	
	Indikator 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). 6. Isu TPB : Belum optimalnya upaya penggandaan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	
3	Tujuan TPB: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	14
	Indikator 3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. Indikator 3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. Indikator 3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta. Indikator 3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). 7. Isu TPB : Masih adanya epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan masih adanya hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	
	Indikator 3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun. Indikator 3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. 8. Isu TPB : Masih adanya hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular dan belum meningkatnya kesehatan mental dan kesejahteraan.	
	Indikator 3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba. Indikator 3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. 9. Isu TPB : Masih lemahnya upaya pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan	

No. TPB	Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB Kelompok TAD	Jumlah Indikator Kelompok TAD
	zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	
	Indikator 3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan. Indikator 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. 10. Isu TPB : Belum tercapainya cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan belum terjangkau untuk semua orang.	
	Indikator 3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan. 11. Isu TPB : Belum optimalnya upaya mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	
	Indikator 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. 12. Isu TPB : Masih lemahnya pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	
	Indikator 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 13. Isu TPB : Belum adanya dukungan penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular, dan belum tersedianya akses terhadap obat serta vaksin dasar yang terjangkau, untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	
	Indikator 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. 14. Isu TPB : Belum meningkat secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan.	
4	Tujuan TPB: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua Indikator 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)). 15. Isu TPB : Belum optimalnya pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta belum tersedianya lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	1
5	Tujuan TPB: Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan Indikator 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. 16. Isu TPB : Masih adanya segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. Indikator 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. Indikator 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. Indikator 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. Indikator 5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. 17. Isu TPB : Masih adanya segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Indikator 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur	11

No. TPB	Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB Kelompok TAD	Jumlah Indikator Kelompok TAD
	18 tahun. Indikator 5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. 18. Isu TPB : Masih adanya praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Indikator 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. Indikator 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. 19. Isu TPB : Belum terjaminnya partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Indikator 5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. 20. Isu TPB : Belum terjaminnya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi. Indikator 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. 21. Isu TPB : Masih belum optimalnya upaya dalam meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	
6	Tujuan TPB: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Indikator 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. Indikator 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. Indikator 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. 22. Isu TPB : Belum tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Indikator 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. Indikator 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Indikator 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Indikator 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Indikator 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. Indikator 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. 23. Isu TPB : Belum tercapainya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan masih adanya praktik buang air besar di tempat terbuka, serta belum optimalnya pemberian perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, dan kelompok masyarakat rentan. Indikator 6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. 24. Isu TPB : Masih belum optimalnya upaya dalam meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman.	14

No. TPB	Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB Kelompok TAD	Jumlah Indikator Kelompok TAD
	Indikator 6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. 25. Isu TPB : Secara signifikan belum meningkatnya efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan belum terjaminnya penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan masih adanya jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	
	Indikator 6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Indikator 6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. Indikator 6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. 26. Isu TPB : Belum diterapkannya secara optimal pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	
7	Tujuan TPB: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua Indikator 7.2.1* Bauran energi terbarukan. 27. Isu TPB : Belum meningkatnya secara substansial pangsa energi terbarukan. Indikator 7.3.1* Intensitas energi primer. 28. Isu TPB : Belum optimalnya upaya dalam melakukan perbaikan efisiensi energi.	2
8	Tujuan TPB: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua Indikator 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita. Indikator 8.1.1.(a) PDB per kapita. 29. Isu TPB : Kurangnya upaya dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita. Indikator 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. 30. Isu TPB : Belum optimalnya upaya dalam menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan masih belum terdorongnya formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. Indikator 8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa Indikator 8.10.1.(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum). Indikator 8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. 31. Isu TPB : Masih lemahnya kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan.	6
9	Tujuan TPB: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi Indikator 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. Indikator 9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. 32. Isu TPB : Belum meningkatnya akses industri dan perusahaan skala kecil, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan belum terintegrasi ke dalam rantai nilai dan pasar. Indikator 9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. 33. Isu TPB : Masih lemahnya riset ilmiah, belum meningkatnya kapabilitas teknologi sektor industri, dan lemahnya dorongan inovasi serta secara substansial belum meningkatnya jumlah pekerja penelitian. Indikator 9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. Indikator 9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	6

No. TPB	Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB Kelompok TAD	Jumlah Indikator Kelompok TAD
	Indikator 9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet. 34. Isu TPB : Secara signifikan belum meningkatnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan belum optimalnya usaha penyediaan akses universal dan terjangkau internet.	
10	Tujuan TPB: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	4
	Indikator 10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. 35. Isu TPB : Belum tercapainya pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi.	
	Indikator 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. 36. Isu TPB : Belum diberdayakannya dan belum meningkatnya inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	
	Indikator 10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil. Indikator 10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. 37. Isu TPB : Belum optimalnya jaminan kesempatan yang sama dan masih adanya kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan kurangnya promosi legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	
11	Tujuan TPB: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	10
	Indikator 11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). 38. Isu TPB : Belum terjaminnya akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta belum tertatanya kawasan kumuh.	
	Indikator 11.3.1.(b) Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Indikator 11.3.2.(b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. 39. Isu TPB : Masih lemahnya urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi.	
	Indikator 11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. 40. Isu TPB : Kurangnya promosi dan penjagaan warisan budaya dan warisan alam.	
	Indikator 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Indikator 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. Indikator 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. 41. Isu TPB : Masih adanya jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial masih adanya kerugian ekonomi relatif terhadap PDB yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	
	Indikator 11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan. 42. Isu TPB : Masih adanya dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan belum diberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	
	Indikator 11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. 43. Isu TPB : Belum optimalnya penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau	

No. TPB	Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB Kelompok TAD	Jumlah Indikator Kelompok TAD
	yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	
	Indikator 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. 44. Isu TPB : Belum optimalnya upaya dalam meningkatkan secara substansial kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta belum dikembangkan dan diimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini.	
12	Tujuan TPB: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	2
	Indikator 12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. 45. Isu TPB : Kurangnya promosi praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	
	Indikator 12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. 46. Isu TPB : Belum optimalnya jaminan masyarakat memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	
13	Tujuan TPB: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	1
	Indikator 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 47. Isu TPB : Lemahnya kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam.	
15	Tujuan TPB: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	3
	Indikator 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. 48. Isu TPB : Belum terjaminnya pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering.	
	Indikator 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. 49. Isu TPB : Belum optimalnya upaya menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan belum tercapainya dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	
	Indikator 15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. 50. Isu TPB : Belum optimalnya pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan belum meningkatnya akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut.	
16	Tujuan TPB: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16
	Indikator 16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. Indikator 16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. Indikator 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Indikator 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. 51. Isu TPB : Masih adanya segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	

No. TPB	Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB Kelompok TAD	Jumlah Indikator Kelompok TAD
	Indikator 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. Indikator 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Indikator 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. 52. Isu TPB : Masih adanya perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.	
	Indikator 16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). 53. Isu TPB : Masih adanya korupsi dan penyalahgunaan dalam segala bentuknya.	
	Indikator 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. Indikator 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Indikator 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Indikator 16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. Indikator 16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Indikator 16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). 54. Isu TPB : Belum optimalnya pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	
	Indikator 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Indikator 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). 55. Isu TPB : Belum terjaminnya pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	
	Indikator 16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 56. Isu TPB : Belum terjaminnya akses publik terhadap informasi dan belum optimalnya perlindungan kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional.	
	Indikator 16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. 57. Isu TPB : Belum optimalnya penggalakkan dan penegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	
17	Tujuan TPB: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	16
	Indikator 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. Indikator 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. Indikator 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. 58. Isu TPB : Belum optimalnya penguatan mobilisasi sumber daya domestik, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	

No. TPB	Tujuan, Indikator dan Isu Strategis TPB Kelompok TAD	Jumlah Indikator Kelompok TAD
	Indikator 17.6.2.(b) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. Indikator 17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband. 59. Isu TPB : Belum meningkatnya kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan belum meningkatnya berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada.	
	Indikator 17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet. Indikator 17.8.1.(a) Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet. 60. Isu TPB : Belum optimalnya operasionalisasi secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi, dan belum meningkatnya penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	
	Indikator 17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Indikator 17.17.1.(b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 61. Isu TPB : Kurangnya dorongan dan belum meningkatnya kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	
	Indikator 17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Indikator 17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. Indikator 17.18.1.(c) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). Indikator 17.18.1.(d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. 62. Isu TPB : Belum meningkat secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	
	Indikator 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register). Indikator 17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. Indikator 17.19.2.(d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). 63. Isu TPB : Belum diandalkannya inisiatif untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan masih kurangnya dukungan terhadap pengembangan kapasitas statistik.	
Total Indikator Kelompok TAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan		123

Sumber: Hasil Analisis KLHS Tahun 2020.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih menghadapi tantangan dalam hal pencapaian indikator TPB. Hal ini didasarkan atas capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional masih sekitar 19,55% (42 indikator dari total 220 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan).

3. Revolusi Industri 4.0

Istilah Industry 4.0 pertama kali digemakan pada Hannover Fair, 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya, dengan bantuan teknologi. Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Pada level nasional, sejumlah sektor industri telah siap memasuki era Industry 4.0. Beberapa di antaranya seperti industri semen, petrokimia, otomotif, serta makanan dan minuman. Faktor penggerak yang harus diperkuat untuk menyambut Industry 4.0 di Indonesia adalah peningkatan otomatisasi, komunikasi *machine-to-machine*, *komunikasi human- to-machine*, *AI*, serta pengembangan teknologi berkelanjutan. Beberapa dasar faktor penggerak. Pertama adalah peningkatan volume data, daya komputasi, dan konektivitas. Peran SDM industri melalui Pendidikan vokasi yang mengarah pada high skill serta meningkatkan keterampilan SDM industri yang dominan *low/middle ke level high skill*.

Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui e-commerce, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan start up e-commerce dan market place yang memudahkan konsumen untuk berbelanja, seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya. Perkembangan e-commerce sejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha. Pelaku usaha Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan selama proses on farm dan off farm dalam bidang pertanian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun.

Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam perubahan sistem pertanian, karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya perubahan dan memiliki semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif. Dengan adanya sistem pertanian digital pemerintah dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya. Melalui sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, mempermudah distribusi dari petani hingga konsumen dengan memperpendek sistem rantai pasok pangan serta tidak ada keterbatasan waktu dan tempat untuk mengakses segala informasi sehingga berpeluang meningkatkan keberdayaan petani.

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berharap dengan sistem pertanian digital akan mampu menurunkan ketimpangan akses pangan, mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Melalui hilirisasi beberapa komoditas unggulan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan sentuhan teknologi, konektivitas antar daerah, penguatan infrastruktur dan peningkatan daya saing maka diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara positif. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terus mendorong investor lokal menjadi investor hebat di daerah sendiri. Jika ini terwujud, maka daya dorong akan menjadi lebih kuat karena bagaimanapun juga pengusaha lokal yang lebih memahami kondisi SDM dan SDA di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

4. Perubahan Iklim

Pemanasan global (global warming) adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. (IPCC) menyimpulkan bahwa, sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca, selain itu efek rumah kaca factor lain penyebab pemanasan global adalah karena variasi matahari dengan pemanasan akibat efek rumah kaca maka terjadi peningkatan aktivitas matahari yang mampu menaikkan suhu stratosfer dan sebaliknya efek rumah kaca akan menurunkan suhu stratosfer.

Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh makhluk di dalamnya, sehingga perlu langkah dan upaya terpadu dalam penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan dari dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global tersebut, yang salah satu penyebabnya adalah pembentukan beberapa jenis gas rumah kaca yang bisa dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, serta pembangkit tenaga listrik dan lainnya.

Sejalan dengan itu, dari sisi adaptasi perlu pula dilakukan penguatan kapasitas kepada masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada daerah-daerah yang rentan. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh pemerintah provinsi oleh karena itu diperlukan pelibatan secara aktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), mitra pembangunan dan pemerintah kabupaten/kota sesuai perannya masing-masing.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

1. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, yang batasan pengertian SPM secara tekstual tidak berubah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun perubahan yang mendasar adalah pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun SPM pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, dan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Untuk setiap jenis urusan, pemerintah daerah perlu menetapkan jenis, mutu, dan penerima pelayanan dasar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mendesain perencanaan enam urusan wajib pelayanan dasar tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip SPM, agar pelayanan publik dapat lebih dioptimalkan. Seperti halnya SDGs, pencapaian SPM harus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab II.

Untuk sektor pendidikan factor utama penghambat tidak tercapainya SPM adalah keterpenuhan sarana pendidikan yang belum memadai, masih tingginya angka putus sekolah dikarenakan factor ekonomii, akses yang belum terjangkau khususnya daerah yang terpencil, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan baik ditingkat pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Pada sektor kesehatan factor penghambat tidak tercapainya target SPM adalah masih rendahnya pelayanan kesehatan pada ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita sesuai standar, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, dan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis. Pada sektor SPM PU dan Penataan Ruang factor penghambatnya

adalah pada indikator keterpenuhan warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni yang belum memenuhi target atau masih rendahnya jumlah masyarakat yang memperoleh Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni yang terkena relokasi. Selanjutnya pada sektor Ketentraman Ketertiban & Perlindungan Masyarakat yang menjadi factor penghambat sehingga belum terpenuhi target adalah tidak terpenuhinya 2 (dua) indikator SPM karena masih terbatasnya kondisi sarana dan prasarana untuk operasionalisasi penugasan personil ke lapangan, belum optimalnya upaya pengurangan resiko bencana, dan belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk di gunakan pada saat terjadi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Sedangkan pada sektor social yang menjadi factor penghambat sehingga belum terpenuhi target SPM adalah masih ada 2 (dua) indikator yang belum mencapai target 100% yaitu pada jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dan Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.

2. Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah berkisar antara 15 hingga 64 tahun. Banyak negara yang telah berhasil dan terbukti memanfaatkan bonus demografi dengan maksimal seperti Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan masih banyak lagi. Salah satu manfaat yang diberikan oleh bonus demografi adalah, bisa mengubah tingkat perekonomian di sebuah negara, dari negara berkembang menjadi negara maju. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang tidak mungkin terjadi di Indonesia. Mengingat, saat ini jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif di Indonesia.

Terdapat beberapa syarat untuk mencapai keuntungan di dalam bonus demografi, yaitu bisa dimulai dengan melakukan peningkatan pelayanan kesehatan, kualitas dan kuantitas pendidikan, melakukan pengendalian jumlah penduduk, dan kebijakan ekonomi demi mendukung terwujudnya fleksibilitas tenaga kerja. Jumlah penduduk usia produktif yang meningkat juga harus didukung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini juga menjadi salah satu syarat wajib dalam mempersiapkan bonus geografi. Ada banyak cara untuk mewujudkannya, seperti melakukan peningkatan investasi di dalam negeri. Tujuannya untuk mengundang investor asing yang berasal dari negara maju, atau memfasilitasi masyarakat Indonesia untuk menjadi pengusaha. Selain memberikan keuntungan dan kesempatan bagi negara berkembang untuk menjadi negara maju dan juga jumlah usia tidak produktif akan ditanggung oleh usia produktif, namun ternyata bonus demografi juga bisa menjadi bahaya dan ancaman bagi sebuah negara jika tidak dipersiapkan dengan baik. Dampak buruk bonus demografi misalnya: berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari

ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia dengan standar kualifikasi yang diperlukan, meningkatkan jumlah kemiskinan hingga akhirnya memberikan pengaruh buruk kepada pendidikan, hingga ekonomi dan kesehatan.

4.2.3. Isu Strategis Daerah

4.2.3.1. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

1. Mendekatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (continuously). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (accessible) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut okasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting. Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Untuk itu dibutuhkan rumah sakit regional yang secara jarak dapat dijangkau oleh masyarakat dan memberi pelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit regional tersebut harus didukung SDM yang memadai, dan layanan yang ramah anak dan disabilitas.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian dapat terus bertumbuh positif. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Timur Indonesia menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain. Namun hal tersebut tidaklah cukup, kemudahan dalam berinvestasi, pengurusan perijinan, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi prasyarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Dalam survey tahun 2017 yang dibuat oleh lembaga penelitian Asia Competitiveness Institute, Sulawesi Selatan berada di Posisi ke-9 terkait kemudahan berbisnis, tertinggal dari provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Selain kondisi ekonomi, hal lain yang juga mempengaruhi adalah faktor pendidikan dan kesehatan. Demikian juga hak atas rasa aman (perlindungan) bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sesuai

posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menjadi rujukan wilayah lainnya di Indonesia khususnya Kawasan Timur Indonesia. Jika faktor-faktor tersebut dapat diciptakan, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.

3. Kualitas Infrastruktur Yang Menunjang Kegiatan Perekonomian

Sulawesi Selatan memiliki luas kurang lebih 45.500 km persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkoneksi antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 109 Pelabuhan Laut dan 11 Pelabuhan Udara. Namun karena kualitas yang kurang baik di kabupaten/kota lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi provinsi yang rawan terdampak bencana banjir.

Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dimana jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 baru mencapai 37,07% dari anjang jalan 2.009,35 km. Sedangkan pada kondisi jalan rusak cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2016 yakni 25,58 dan meningkat tahun 27,86 persen. Kondisi jalan rusak berat pada tahun 2013 adalah 7,35 persen turun pada tahun 2014 yakni 7,15 persen hingga tahun 2015 sebesar 4,85. Hal ini disebabkan karena ada peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak parah yang berakibat menurunnya capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi. Masih rendahnya persentase jalan provinsi dalam kondisi baik antara lain dikarenakan masih terdapat jalan provinsi dengan perkerasan berupa kerikil sepanjang 152,6 Km (7,59%) dan perkerasan berupa tanah sepanjang 211,52 Km (10,53%). Kondisi jalan ini terdapat di Kabupaten Pinrang, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, Barru, Soppeng, Pangkajene dan Kepulauan, Sinjai, dan Bulukumba. Tentunya dengan hal ini perlunya adanya penanganan terhadap jalan yang rusak ini dapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalandan menunjang arus perekonomian antar daerah/wilayah.

4. Pemerataan Pendapatan Bagi Warga Sulawesi Selatan

Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan perkapita maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah. Pendapatan per kapita masyarakat Sulawesi Selatan saat ini telah meningkat mencapai 44 juta per tahunnya, tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2017 Sulawesi Selatan menjadi Provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan warga tertinggi kedua di Indonesia (0,429).

Selain itu, jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi sebesar 9,48 % pada tahun 2016, diatas target yang ingin dicapai oleh Pemprov Sulawesi Selatan pada akhir masa

periode tiga RPJPD, yaitu 6%

5. Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) Yang Berkualitas

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sulawesi Selatan seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dari total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan tahun 2019 berada di angka 71,66 yang artinya Sulawesi Selatan berada di peringkat 14 dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan tahun 2019 adalah 8,26 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, laki-laki hanya sampai kelas 3 SMP sedangkan perempuan kelas 2 SMP.

6. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Letak geografis yang strategis dan kondisi biofisik wilayah yang mendukung menyebabkan Sulawesi Selatan memiliki sumberdaya alam yang berlimpah. Potensi sumberdaya alam yang menjadi unggulan di Sulawesi Selatan antara lain; di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan/perikanan, pariwisata, energi dan pertambangan.

Untuk sektor pangan, surplus hasil pertanian (padi/beras) selama 2 dekade terakhir memantapkan status Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan penghasil tanaman pangan terbesar di wilayah Indonesia Timur. Potensi sumberdaya alam sektor perikanan/kelautan juga menjadi sektor unggulan Sulawesi Selatan. Komoditi unggulan untuk sektor perikanan/kelautan antara lain; ikan laut, udang tambak dan rumput laut. Produksi rumput laut Sulawesi Selatan mampu memenuhi 30% dari kebutuhan nasional. Sektor pariwisata juga menjadi sektor yang perlu dioptimalkan pengelolaannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, sumberdaya alam yang dimiliki belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hasil produksi sumberdaya alam sebagian besar dikirim/ekspor dalam kondisi bahan mentah/bahan baku (belum diolah), padahal ada potensi pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah (added value) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di

Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah bagaimana menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam memberikan manfaat secara ekonomi namun tetap memperhatikan kemampuan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumberdayaalam sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sumberdaya alam bagi semua lapisan masyarakat, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, wilayah, dan kebutuhan yang berbeda.

7. Revitalisasi Paradigma Pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)

Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian peningkatan nilai tambah industri lokal untuk mendongkrak daya saing ekonomi seharusnya menjadi salah satu fokus untuk lebih ditingkatkan. Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama, yaitu:

- a. Hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri.
- b. Mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri.
- c. Mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur.
- d. Percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi (Debottlenecking).
- e. Meningkatkan integrasi pasar domestik.

Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar. Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. Hilirisasi komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Dengan program hilirisasi ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Sulawesi Selatan pada sektor produksi, industry pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil, baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor

8. Sulawesi Selatan Sebagai Poros Maritim

Sulawesi Selatan sebagai poros maritime Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan laut memiliki garis pantai sepanjang 1.973,7 km serta luas wilayah laut dan pesisir kurang lebih 60.000 km² diyakini memiliki kekayaan maritim yang besar.

Potensi ekonomi yang terkandung di dalam laut dan sepanjang pesisir Sulawesi Selatan bila dikelola secara bijak akan mendatangkan devisa daerah. Sulawesi Selatan memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar dari Pangkajene dan Kepulauan hingga Selayar dan sepanjang Teluk Pangkajene dan Kepulauan yang merupakan destinasi wisata bahari yang tak kalah dengan destinasi pulau yang lain. Pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung seperti shortsea shipping untuk mempercepat konektivitas antar pulau di Sulawesi Selatan.

Untuk dapat menjadi poros utama pertumbuhan maritim di nusantara, Sulawesi Selatan harus membangun dan meningkatkan daya dukung sistem pelayaran, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang terbengkalai di Selayar hingga Palopo, perbaikan tata kelola kepelabuhanandan memodernisasinya sesuai standar internasional, perbaikan pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan yang ada. Dengan memaksimalkan hal tersebut, akan menguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai poros maritim dan pusat konektivitas kawasan timur Indonesia.

Aspek sosial dan budaya bagi masyarakat maritim sangat diperlukan dalam mempercepat pembangunan kemaritiman secara komprehensif dan terpadu. Tantangannya adalah mengubah kebiasaan masyarakat maritim yang tertutup, berpikir sempit dan tidak berkembang menjadi masyarakat maritim yang dinamis, kreatif dan produktif sehingga taraf hidup masyarakat lebih baik tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat maritim dan nilai – nilai positif yang selama ini telah ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Sulawesi Selatan memprioritaskan proses pada sektor sosial dan budaya dalam membangun kemaritiman.

Disamping itu jasa kelautan merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber penerimaan devisa negara melalui beberapa kegiatan yang menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan sebagai upaya membangun jasa kelautan yang efektif dan efisien di Sulawesi Selatan.

4.2.3.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 urusan pendidikan dan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang merupakan bagian dari urusan kokuren kewenangan daerah.

Untuk pemenuhan sektor layanan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih menjadi prioritas utama yang perlu mendapat perhatian. Meskipun capaian Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan selama kurun waktu beberapa tahun

terakhir mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun persoalan pelayanan kedua sektor tersebut masih perlu pembenahan dan peningkatan kualitas layanan yang lebih optimal dalam rangka menciptakan kualitas SDM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berdaya saing serta meningkatkan AHH (Angka Harapan Hidup).

Capaian Indikator Indeks Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk tahun 2020 sebesar 71,78 lebih rendah dibandingkan capaian Indeks Kesehatan Provinsi yang sebesar 77,80. Hal ini dipengaruhi oleh masih tingginya angka kematian bayi (AKB) sebagai indikator yang penting dalam mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat atau wilayah. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, kasus kematian bayi terbilang masih tinggi dan angka capaian pertahun berfluktuatif. Jumlah kematian bayi pada tahun 2020 sebesar 18 bayi dari 5.673 jumlah bayi kelahiran hidup. Dampak dari belum optimalnya jaringan komunikasi dan alat transportasi yang masih terbatas khususnya daerah pegunungan dan kepulauan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk persalinan yang masih kurang menjadi penyebab masih tingginya angka kematian pada indikator tersebut. Selain masalah AKB, salah satu yang menjadi isu persoalan kesehatan lainnya adalah masalah stunting yaitu terkait kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Angka prevalensi Stunting Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019 sebesar 9,7% dan ini masih kategori tinggi.

Untuk capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2020 yang hanya sebesar 60,98 lebih rendah dibandingkan Indeks Pendidikan Provinsi yang sebesar 65,29. Salah satu permasalahan utama pada sektor pendidikan adalah masih tingginya Angka Putus Sekolah (APS). Disebabkan terkendala pada kondisi geografis khususnya daerah-daerah terpencil yang sulit menjangkau akses untuk mendapatkan layanan pendidikan selain dari factor ekonomi dan social. Rendahnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan luar sekolah juga berpengaruh pada Angka Melek Huruf di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta masih tingginya Jumlah Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan baik di tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan menengah.

2. Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Ketahanan Ketahanan Pangan merupakan salah satu upaya prioritas bagi pemerintah dalam upaya menjaga kecukupan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang bersumber dari hasil pengelolaan pertanian. Oleh karena itu sektor pangan sangat berkontribusi besar terhadap sektor pertanian, salah satunya dengan meningkatkan kemandirian petani dan meningkatkan produksi pertanian. Kebijakan pemerintah saat ini dalam mempertahankan

kesediaan pangan yang diterapkan adalah membangun pertanian melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi.

Untuk sektor ketahanan pangan di Kabupten Pangkajene dan Kepulauan pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) tiap tahunnya mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 sebesar 89,0%. Meskipun demikian yang perlu menjadi focus pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah mengendalikan ketersediaan cadangan pangan melalui upaya meningkatkan penguatan cadangan pangan demi menjaga keterediaan dan keterpenuhan pangan masyarakat. Selanjutnya untuk mengatasi masalah tingkat kerawanan pangan yang bisa dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien), maka perlu penanganan yang lebih optimal dan peningkatan sinergitas dengan melibatkan unsur dari kecamatan, kelurahan dan desa serta stakeholder yang terkait. Berdasarkan hasil capaian penanganan daerah rawan pangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sampai tahun 2019 yaitu 25 desa/kelurahan. Dengan capaian ini diharapkan untuk kedepannya lebih ditingkatkan dan lebih dioptimalkan.

3. Infrastruktur Dasar Dan Wilayah

Masalah infrastruktur dasar dan wilayah adalah hal yang prioritas dalam pembangunan daerah mulai dari tingkat nasional, provinsi dan daerah kab/kota. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memiliki kondisi geografis yaitu daratan, pegunungan dan kepulauan tentunya memerlukan pemenuhan infrastruktur yang lebih optimal, apalagi dengan persentase kemiskinan yang tinggi, menandakan bahwa pemenuhan layanan infrastruktur sebagai kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Pangkajene masih terbatas. Hal ini dapat berdasarkan capaian layanan infrastruktur dasar untuk tahun 2020 yang belum optimal seperti rasio panjang jalan (0,737), Ketersediaan Jaringan Irigasi (59,54), dan Jumlah Pelabuhan (5 unit). Selain itu keterpenuhan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat pada tahun 2019 hanya sebesar 5.998 KK atau 20.802 jiwa atau hanya 5,97% dari jumlah total penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sedangkan penyediaan air minum yang berbasis institusi juga mempunyai kendala tersendiri diantaranya kualitas jaringan sarana air bersih (SAB) belum memenuhi syarat teknis, masih terbatasnya cakupan layanan PDAM akibat kurangnya ketersediaan sumber air baku, wilayah pesisir dan kepulauan sangat rawan air bersih karena kurangnya sumber mata air yang layak, terbatasnya kemampuan kelembagaan pengelolaan sarana air minum di perdesaan dan keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan air minum.

Akibat dari dampak pandemic covid-19 sehingga memicu tujuan prioritas pembangunan daerah berfokus pada pemulihan ekonomi yang diawali dengan perbaikan dan pemenuhan infrastruktur dasar dan wilayah. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam mewujudkan target-target pembangunan kedepan agar

memprioritaskan dukungan pada layanan infrastruktur dasar berbasis kewilayahan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan kawasan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

4. Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan pencapaian yang belum maksimal meskipun telah memenuhi target capaian pada tahun 2020. Hal ini dapat dilihat pada Gambaran Umum Daerah yang menunjukkan bahwa capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 sebesar 13,96% dan telah melampaui yang ditargetkan yaitu sebesar 14,50 – 15,80. Namun Jika dibandingkan dengan capain Provinsi yaitu sebesar 8,99% dan Capaian Nasional sebesar 7,88%, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih sangat tinggi. Faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui tingkat garis kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dimana pada tahun 2020 sebesar Rp 358.061 perkapita, yang menunjukkan bahwa terdapat 47,12 jiwa penduduk yang memiliki pendapatan dibawah Rp 358.061(penduduk miskin). Dibandingkan dengan garis kemiskinan Propinsi dan Nasional yang masing-masing sebesar Rp.375.463 untuk Propinsi dan Rp.475.477 untuk nasional, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih dibawah standar capaian propinsi dan nasional. Selain factor garis kemiskinan, beberapa indikator lain yang mempengaruhi adalah masih tingginya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu sebesar 5,18% pada tahun 2020 dan masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat atau tingkat capaian gini ratio Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 0,345 pada tahun 2020.

5. Tata Kelola Dan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan tingkat kepuasan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan standarisasi dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 sebesar 68,25, masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian indeks reformasi birokrasi propinsi yang sebesar 70,00. Salah satu variable pendukung penilaian reformasi birokrasi adalah sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah melalui SAKIP. Kabupaten pangkajene dan Kepulauan selama beberapa tahun ini masih dengan predikat CC meskipun ditahun 2021 ini mendapat predikat B, dan OPINI BPK untuk pengeloaan keuangan beberapa tahun ini dengan WTP, namun itu belum cukup untuk menjadikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Akan tetapi perlu dukungan dan upaya yang serius dengan stakeholder terkait untuk peningkatan yang ebih signifikan baik untuk variable Penilaian SAKIP, Penilaian Pengelolaan Keuangan (Opini

BPK), Pemenuhan 6 (enam) urusan Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui pemanfaatan inovasi layanan public dan penggunaan sistem informasi daerah secara maksimal.

6. Kepemudaan dan Ekonomi Kreatif

Pemuda merupakan kunci dari keberhasilan penerapan ekonomi kreatif. Pemuda memiliki kelebihan yaitu mampu berpikir diluar kebiasaan atau disebut juga out of the box. Dengan adanya kemampuan tersebut, pemuda dapat berpikir secara kreatif dan mampu mengembangkan sesuatu menjadi lebih bernilai. Keterbatasan lapangan pekerjaan akan mampu mendesak paradigma atau pola berpikir pemuda dari yang tadinya bagaimana caranya dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan, menjadi bagaimana caranya agar mendapat gaji tanpa harus menjadi pekerja. Hal inilah yang akhirnya mendorong pemuda untuk mampu menciptakan sesuatu yang kreatif guna untuk mensejahterakan dirinya dan masyarakat serta mampu mengembangkan sesuatu menjadi lebih bernilai.

Dengan memberikan kesempatan bagi pemuda dalam mengembangkan ide kreatifnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi maka hal ini menandakan bahwa Pemerintah perlu mendorong dan melibatkan pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif. Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mempunyai keunikan tersendiri dibanding daerah lain dengan sumber daya alamnya yang cukup melimpah, maka melalui peran ide kreatif pemuda diharapkan tercipta keberagaman ide dan daya cipta yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi kreatif, serta jangkauan pasar yang luas dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Disamping memanfaatkan peluang yang ada tentunya tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Pertama, sumber daya manusia yang banyak tidak menjamin lancarnya perkembangan ekonomi kreatif, tetapi harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang kreatif. Kedua, perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang belum optimal difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, sehingga terkesan setiap daya cipta dan kreatifitas yang lahir berupa hasil karya Pemuda Kreatif belum menjadi kekayaan dan kebanggaan daerah. Ketiga infrastruktur teknologi informasi yang belum kompetitif dan dukungan pembiayaan yang belum optimal. Keempat, iklim usaha belum mendukung pertumbuhan perilaku usaha kreatif baru. Inilah yang terkadang menghambat para pelaku usaha kreatif baru karena keadaan pasar yang menganggap sebelah mata. Kurangnya apresiasi terhadap karya dan insan kreatif juga masih dirasakan. Kelima, akses pasar yang belum menggembirakan. Permasalahan-permasalahan ini harus menjadi perhatian para pelaku dan pendukung ekonomi kreatif, bukan hanya pemerintah namun semua pihak harus menyatukan langkah untuk mengatasi segala permasalahan

tersebut, karena pemuda memiliki peranan yang besar dalam membangun ekonomi kreatif.

7. Degradasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam belum mampu secara maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena lemahnya hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam dengan dukungan sarana-prasarana pada proses produksi, pengolahan dan pemasaran yang berorientasi pada ketahanan pangan dan energi serta perbaikan pendapatan masyarakat. Nilai tambah ekonomi dan tingkat produktivitas faktor produksi daerah juga masih tergolong rendah. Hal ini terutama pada pengelolaan sumberdaya ekonomi yang belum berorientasi pada pengoptimalan potensi sumberdaya alam yang lebih besar. Disamping itu pemeliharaan kualitas lingkungan hidup belum berfokus pada pengintegrasian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada pilar ekologi dalam menyelaraskan pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Keterpeliharaan kualitas lingkungan dapat dianalisa melalui peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon. Kondisi ini dapat diukur melalui variabel Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) yang diukur berdasarkan 3 indikator komposit yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Pada tahun 2020 capaian IKLHD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan hanya sebesar 70,247 sedikit lebih rendah dibandingkan capaian IKLH Propinsi Tahun 2020 yang sebesar 71, 75. Belum optimalnya capaian IKLHD ini disebabkan oleh rendahnya kualitas tutupan lahan, Intensitas dan efektivitas reboisasi belum maksimal, pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan belum optimal, serta koordinasi dan sinergi antar lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah yang belum terjalin dengan baik

8. Kualitas Sumber Daya Manusia

Dilihat dari indikator IPM, meskipun terjadi peningkatan dalam lima tahun terakhir, capaian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lebih rendah dibanding rata-rata Sulawesi Selatan dan rata-rata Indonesia. Pada tahun 2019, IPM Pangkajene dan Kepulauan adalah 68,29, lebih rendah dari rata-rata IPM Sulawesi Selatan 71,66 dan rata-rata IPM nasional 71,92. Ini disebabkan oleh masalah rendahnya indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks pengeluaran masyarakat. Akar masalah dari rendahnya indeks pendidikan adalah terbatasnya akses masyarakat atas PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan, terutama yang hidup di pulau-pulau serta pedalaman dan dataran tinggi. Rendahnya indeks kesehatan akar masalahnya juga terletak pada aksesibilitas atas layanan kesehatan yang sesuai standar terutama untuk ibu hamil, ibu melahirkan dan penanganan penyakit serta keterpenuhan infrastruktur dasar untuk air minum dan sanitasi khususnya di pulau-pulau dan

pedalaman/dataran tinggi. Ini juga ditandai dengan dengan banyaknya anak gizi buruk dan gejala stunting. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan termasuk daerah yang masuk kategori darurat penanganan stunting di Indonesia. Sedangkan rendahnya indeks pengeluaran masyarakat disebabkan oleh ketersediaan barang dan jasa yang sulit dijangkau pada pulau-pulau, pedalaman dan dataran tinggi.

9. Kebudayaan Daerah

Kehidupan sosial pasti berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat dan hubungan antar anggota masyarakat maupun antar masyarakat satu dengan yang lainnya. kehidupan masyarakat beserta hubungannya yang beragam menciptakan suatu kebiasaan yang kemudian disebut sebagai sebuah budaya. Maka dapat disimpulkan bahwa, sosial budaya merupakan suatu pembahasan mengenai fakta-fakta kebiasaan masyarakat dalam hubungan atau interaksi yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat.

Kehidupan sosial budaya tidak selalu berjalan lurus dan sama seperti sebelumnya selama, karena pasti akan ada yang namanya aspek-aspek perubahan sosial budaya yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah karena adanya globalisasi. Globalisasi secara umum dapat dipahami sebagai suatu proses mendunia, yang berarti seluruh standar hidup dalam masyarakat di negara satu dengan negara lain di sama ratakan. Globalisasi merupakan suatu contoh fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dimana sebagai suatu proses penyebaran unsur-unsur baru dalam kehidupan masyarakat, sebagai contoh seperti penyebaran pola pemikiran, informasi, gaya hidup, teknologi, dan masih banyak yang lainnya.

10. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Smart City dan Smart Services

Perkembangan teknologi informasi komunikasi sangat memungkinkan pengembangan smart city dan smart services. Smart City adalah konsep pengembangan dan pengelolaan kota untuk menghasilkan smart services dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara intensif, termasuk jaringan komputer, sensor, *internet of things*, *cloud computing*, *big data*, *data analytic*, *space/geographical information integration*, dan lainnya.

11. Pemenuhan Air Minum Berbasis Masyarakat

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur khususnya pada peningkatan jalan untuk beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia. Namun demikian itu tidak cukup hanya dengan berfokus pada satu jenis infrstruktur saja, karena kebutuhan masyarakat sangat kompleks dan multi dimensi, khususnya dalam pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat yaitu air bersih.

Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memiliki kondisi geografis 3 (tiga) dimensi yaitu daratan, pegunungan dan kepulauan selain sebagai unsur keunikan juga mempunyai tantangan tersendiri. Dengan dikelilingi pegunungan karst dan wilayah kepulauan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan termasuk kedalam wilayah yang sumber penyimpanan air baku untuk sumber air bersih sangat terbatas. Oleh karena itu pemenuhan akses air minum layak dan aman untuk masyarakat masih menjadi masalah yang perlu penanganan yang optimal.

12. Pengembangan Desa Wisata

Desa Wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai ketrampilan dan kemampuan masing-masing dalam memberdayakan potensi secara kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona sehingga tercapai peningkatan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari pembentukan Desa Wisata untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah, membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat dan memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.

Dengan memahami desa wisata beserta tujuan yang ingin dicapai, pada prinsipnya masyarakat sekarang lebih memilih produk wisata yang menghargai kelestarian alam, budaya serta ramah lingkungan. Desa wisata adalah pilihan terbaik memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Ciri khasnya berupa kekayaan alam, budaya, lingkungan, tradisi membuat wisatawan tertarik mengenal, dan mempelajari keunikan desa wisata. Desa wisata paling banyak berasal dari Kabupaten Toraja Utara, Tana Toraja, Barru, Enrekang, dan Kota Makassar. Khusus di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang saat ini telah mengembangkan beberapa potensi desa wisata diantaranya Desa Tompobulu di Kecamatan Balocci, Desa Panaikang dan Desa Kabba di Kecamatan Minasatene, Desa Bantimurung di Kecamatan Tondong Tallasa, Desa Bulu Cindea di Kecamatan Bungoro, Desa Bontomanai di Kecamatan Labakkang dan Desa Bontomatene di Kecamatan Segeri, dan beberapa desa wisata di wilayah Liukang Tupabbiring. Satu desa diantaranya telah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu desa terbaik se-Indonesia tepatnya di Desa

Kabba Kecamatan Minasatene. Hal ini menjadi kontribusi positif untuk pengembangan bagi desa-desa lainnya untuk menonjolkan potensi desa masing-masing dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Melalui pengembangan Desa Wisata dengan kriteria 4A + C1 yaitu memiliki attraction/atraksi wisata unggulan, memiliki amenities/kelembagaan, memiliki aksesibilitas/sarana-prasarana yang memadai, memiliki ancilliries/akomodasi wisata pendukung, memiliki community Involvement/keterlibatan masyarakat, maka pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui pemetaan wilayah dengan mengidentifikasi potensi alam, sosial, budaya yang ada di desa serta dengan mengatur peruntukan wilayah desa dengan membagi wilayah menjadi Utama, Madya dan Nista serta menata wajah desa dengan memperbaiki fasilitas umum, pemukiman, dan menyiapkan sumber daya manusia, kelembagaan, dan jaringan maka Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan siap mendukung program pemerintah pusat dan bersaing dengan daerah-daerah lainnya dalam mengembangkan potensi desa wisata.

13. Pengembangan Desa Digital

Desa digital merupakan salah satu program pemerintah untuk mengurangi kesenjangan arus informasi yang terjadi di desa. Konsep desa digital merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian. Pengembangan desa digital dilakukan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa, melalui pemberdayaan masyarakat desa yang dapat memberikan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah terus meningkatkan percepatan akses dan pembangunan infrastruktur digital untuk melayani publik secara cepat dan efisien. Pemberdayaan harus disesuaikan dengan potensi SDM dan SDA desa, unsur kearifan lokal, karakteristik budaya masyarakat, serta memanfaatkan teknologi digital. Pengembangan desa digital diharapkan dapat lebih optimal dengan adanya dukungan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi.

Program desa digital adalah merupakan Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) untuk mendorong pemulihan ekonomi dari desa agar lebih berkualitas, sebab kantong kemiskinan saat ini masih lebih besar diperdesaan. Membangun sistem pemasaran komoditi unggulan dan produk desa melalui pemanfaatan teknologi informasi adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai dari program desa digital. Akses internet diharapkan dapat mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mempromosikan produk-produk lokalnya dengan menggunakan saluran e-commerce atau market place. Selain itu semakin terbukanya akses informasi, dan sektor layanan pendidikan akan semakin mudah terjangkau bagi masyarakat perdesaan.

Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pengembangan desa digital adalah menjadi suatu tantangan tersendiri khususnya bagi desa di wilayah kepulauan dan pegunungan.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang belum optimal akan menjadi suatu peluang bagi pemerintah yang didukung oleh berbagai stakeholder untuk mewujudkan percepatan pengembangan desa digital guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui inovasi digital.

14. Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dan daerah menjadi salah satu isu penting untuk memastikan bahwa gender benar-benar memberi warna dalam perumusan perencanaan dan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Berbicara tentang perempuan, tidak sedikit hasil kajian yang menyebutkan bahwa perempuan dan anak masih tergolong kelompok rentan yang sering mengalami berbagai masalah, seperti kemiskinan, bencana alam, konflik, kekerasan, dan sebagainya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara-negara lain di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, perempuan mulai bangkit dan berhasil membuktikan bahwasanya keberadaan mereka layak untuk diperhitungkan. Kecerdasan serta kepiawaian perempuan-perempuan Indonesia, khususnya, tidak bisa lagi dianggap remeh karena telah turut berkontribusi terhadap pembangunan. Satu hal yang perlu digarisbawahi, tingkat pendidikan perempuan rata-rata lebih tinggi dari laki-laki. Akan tetapi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan justru sebaliknya lebih rendah dibanding TPAK laki-laki yakni hanya di angka 55%.

Berdasarkan dari gambaran tersebut melalui strategi pengarusutamaan diharapkan akan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan. Strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan. Sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pengarusutamaan gender memiliki strategi untuk mendorong kesetaraan gender. Pertama melalui *mainstreaming* atau pengarusutamaan, kedua, spesifik atau perlindungan secara khusus kepada kelompok rentan dan ketiga adalah afirmatif, adanya kuota tertentu yang diberikan kepada kelompok rentan. proses pembangunan melalui PUG meliputi 5 (lima) aspek yaitu 1) dukungan politik; 2) kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender; 3) tersedianya kelembagaan PUG; 4) data dan informasi yang terpilah

menurut jenis kelamin dalam sistem; dan 5) kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan dan mengawal PUG.

Untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan strategi implementasi PUG dalam pembangunan telah dilaksanakan mulai ranah perencanaan pembangunan meliputi proses perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Melalui strategi PUG maka diharapkan permasalahan pembangunan khususnya terkait masih tingginya perkawinan anak yang dapat mempengaruhi capaian SPM dapat ditekan semaksimal mungkin

15. Pengembangan dan Kelembagaan Geopark Maros-Pangkajene dan Kepulauan Indonesia

Taman Bumi atau yang selanjutnya disebut Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (Geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah. Sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitar kawasan. Masa depan bangsa Indonesia bukan pada kegiatan ekstraktif. Guna menjamin eksistensi umat manusia di muka bumi dan kehidupan yang lebih baik, sudah saatnya merubah mindset pengelolaan Sumber Daya Alam dari ekstraksi ke konservasi dan Peningkatan Nilai Tambah.

Penyelenggaraan kegiatan pariwisata Geopark secara berkelanjutan dimaknai sebagai kegiatan dan upaya penyeimbangan antara pembangunan ekonomi dengan usaha konservasi. Objek-objek warisan bumi di dalam Geopark berpeluang menciptakan nilai ekonomi. Pengembangan ekonomi lokal melalui kegiatan pariwisata berbasis alam (geologi) atau geowisata merupakan salah satu pilihan. Pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan mendorong pengembangan destinasi pariwisata. Pariwisata merupakan prioritas utama pemerintah dan penyumbang PDB, devisa dan lapangan kerja yang paling murah dan mudah. Pengembangan Geopark mendorong terciptanya ekonomi kreatif dan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi baru. Status Geopark dari sebuah kawasan Geologi berpotensi meningkatkan daya tarik suatu destinasi wisata. Dalam konteks perkembangan daerah, laju sektor pariwisata terbukti menjadi penggerak ekonomi paling cepat ketimbang sektor-sektor lain. Faktanya, konsep Geopark memang berpotensi menghadirkan pendapatan yang signifikan. Tiongkok misalnya, dari pendapatan wisata sekitar 6 miliar dollar AS atau Rp 80 Triliun, sekitar 62% di antaranya atau mencapai Rp 49 Triliun, disumbangkan dari pengelolaan 33 kawasan Geopark dunia.

Perlu dibangun township yang nyaman untuk mewadahi wisatawan. Unsur perkotaan

tersebut tidak perlu mewah dan mahal, namun bersih rapi dan teratur saja akan mampu mendatangkan wisatawan dan menjadi transit activity seperti berjalan-jalan menikmati keindahan kota kecil, menikmati restoran-restoran ataupun berbelanja pada toko souvenir kecil. Konsep terintegrasi antara pembangunan kota dan pembangunan obyek wisata geopark haruslah dirancang secara baik. Terbukti, banyak kota kecil yang nyaman dengan pemandangan alam yang indah dapat menjadi tujuan wisata dunia.

Dalam konsep pengembangan Geopark, SDGs adalah sebagai framework yang melibatkan pemerintah dan aktor non pemerintah (OMS, Filantropy, akademisi, media, dll), integrasi sumber pembiayaan (Pemerintah dan non pemerintah, pusat-daerah, dll), serta menerapkan prinsip kemitraan (trust, equal partnership, mutual benefit, akuntabilitas dan transparansi). Pengelolaan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan juga merupakan salah satu kunci sukses yang dapat diterapkan. Dengan penerapan hal tersebut diharapkan akan terjadi perubahan cara pikir (*mind set*) dalam pembangunan yang mengandalkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara ekstraktif berubah menjadi yang sifatnya pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Adapun peran Geopark untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB, Geopark berkontribusi dalam mendukung pencapaian 11 tujuan, 21 target, 49 indikator yang terkait dengan pengembangan Geopark yaitu :

1. Geopark melakukan kemitraan dan kerja sama, tidak hanya antara pemangku kepentingan lokal, tetapi juga secara internasional.
2. Pengembangan Geopark turut melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan.
3. Masyarakat diberikan pengetahuan untuk mengurangi dan beradaptasi dengan efek perubahan iklim.
4. Geopark mendidik dan menciptakan kesadaran tentang pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup.
5. Geopark mengurangi kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana.
6. Geopark merupakan ruang kelas terbuka dan inkubator.
7. Geopark sangat menekankan pemberdayaan perempuan.
8. Promosi geowisata berkelanjutan merupakan salah satu pilar utama Geopark.
9. Melindungi, menjaga dan merayakan warisan

Berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengembangkan Geopark sesuai dengan kewenangannya. Dalam pelaksanaan Pengembangan Geopark, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melibatkan pemangku kepentingan. Pengembangan Geopark utamanya dilakukan melalui pengembangan destinasi pariwisata. Pemerintah Daerah melakukan alur perencanaan sesuai dalam Perpres. Peran Pemerintah Pusat melakukan

koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektor dalam mendukung pengembangan geopark sesuai dengan prioritas dan strategi yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Geopark.

Tujuan dan substansi RAN Geopark antara lain: memberikan prinsip dasar pengembangan Geopark yang baik dan berkelanjutan; menetapkan jenis dan standar pelayanan nasional bagi Geopark tertentu (perencanaan, infrastruktur, konservasi, pemeliharaan); melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memberikan layanan nasional; penyusunan target, indikator, dan tahun guna mendukung peningkatan target nasional jumlah kunjungan wisata mancanegara; meningkatkan kuantitas dan kualitas Geopark Nasional dan UNESCO Global Geopark; serta kerangka pendanaan dan kelembagaan.

Dukungan Pemerintah Pusat dalam penyusunan rencana induk dalam rangka penetapan Geopark, antara lain:

1. Penentuan batas atau deliniasi kawasan;
2. Program konservasi Geoheritage, Geodiversity, Biodiversity dan Cultural
3. Diversity;
4. Program pengembangan pendidikan dan Litbang;
5. Program pelestarian sosial budaya;
6. Program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
7. Pengembangan destinasi pariwisata;
8. Inventarisasi amenitas dan infrastruktur pendukung;
9. Promosi nilai ilmiah Geopark;
10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan Geopark Nasional, Regional dan Global.

Berdasarkan uraian tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memegang peran penting (kunci) dalam proses pengembangan geopark di Maros-Pangkajene dan Kepulauan karena Geopark menganut asas bottom up.

BAB V

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021-2026 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke 5 (lima).

Visi pembangunan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:



VISI

“Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan”

Visi Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 5 (lima) kata kunci yaitu: Masyarakat Madani, Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius yang memiliki makna strategis dan mencerminkan cita-cita, harapan yang ingin diwujudkan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Visi pembangunan tahun 2021-2026 mengandung pemahaman terjalannya sinergi yang harmonis antara 3 (tiga) pilar kekuatan pembangunan daerah yaitu pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap proses manajemen pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat.

Secara filosofi, visi pembangunan tahun 2021-2026 dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung pada kata kunci dan pilar misi sebagai berikut:

Tabel. 5.1.
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021-2026

VISI	POKOK-POKON VISI	PENJELASAN VISI
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan	Masyarakat Madani	Dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki kehidupan ideal yang didalamnya hak dan kewajiban warga dapat terlaksana secara seimbang serta mampu berkembang seiring dengan dunia luar demi majunya kehidupan
	Sejahtera	Adalah kondisi masyarakat Pangkajene dan Kepulauan yang terpenuhi segala kebutuhan hidupnya, semua hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di semua wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta tercipta adanya kesetaraan kondisi yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya secara proporsional sehingga makmur serta sejahtera lahir dan batin.
	Unggul dan Berdaya Saing	Adalah kondisi dimana masyarakat memiliki kekuatan, ketangguhan, dan keutamaan serta kemampuan untuk menghadapi segala persoalan yang dihadapi. Pembangunan yang menjadikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai kabupaten yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih Makmur.
	Religius	Adalah kondisi dimana masyarakat mencapai perkembangan pada aspek rohaniah, batiniah, intelektualitas dan fitrahnya sebagai manusia yang utuh, tidak hanya mencapai perkembangan dari segi jasad/fisik, akan tetapi mengarah pada peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, bermuara pada terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa
	Berbasis Sumberdaya Lokal Berkelanjutan	Bermakna bahwa pembangunan yang dijalankan berbasis pada pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang merupakan potensi lokal untuk suatu manfaat dan daya guna yang memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan).

Sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021-2026 dibangun atas dasar kondisi dan potensi

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan saat ini, dengan mempertimbangkan tantangan yang akan dihadapi hingga tahun 2026.

Disamping itu juga memperhatikan visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang menitikberatkan pada pembangunan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter, serta visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2005-2025, yaitu menjadi daerah maju dan mandiri di Sulawesi Selatan yang didukung oleh struktur ekonomi dan struktur wilayah yang kuat dengan dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan pada tahun 2025.

5.2 MISI

Misi yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi “Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan”, sebagai berikut:



Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya lokal.



Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi



Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah.



Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif.



Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021 -2026 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2.

Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

No.	POKOK-POKON VISI	MISI
1.	Masyarakat Madani	1) Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya lokal
		2) Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi

No.	POKOK-POKON VISI	MISI
2.	Sejahtera	3) Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah
3.	Unggul dan Berdaya Saing	4) Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif
4.	Religius	1) Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya lokal
5.	Berbasis Sumberdaya Lokal Berkelanjutan	5) Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan

5.2.1 Memantapkan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Program-Program Pembangunan Guna Menunjang Percepatan Pembangunan Yang Berbasis Pada Nilai Agama Yang Toleran Dan Budaya Lokal.

Percepatan pembangunan ditunjang dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang didasari pada nilai-nilai agama dan budaya lokal masyarakat dengan menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat.

Dalam konteks ini Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Ekologi dan Ketahanan Sosial yang merupakan dimensi Indeks desa membangun (IDM) bekerja untuk memotret perkembangan kemandirian desa yang mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkolaborasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu Tipologi dan modal sosial.

5.2.2 Memperluas Inovasi Dan Reformasi Birokrasi Demi Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Akuntabel Dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip *Good And Clean Governance*.

Untuk mewujudkan hal tersebut yang perlu dilakukan adalah pelaksanaan sistem rekrutmen yang jujur dan profesional, menerapkan sistem merit (manajemen SDM aparatur negara berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan) pada seluruh formasi birokrasi dengan konsisten dan transparan, membangun budaya birokrasi yang melayani dan meneladani, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengawasannya di seluruh perangkat daerah, melakukan sinergi

horizontal dalam penyusunan metode pengukuran objektif untuk mengukur integritas terhadap pelayanan masyarakat, mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik di seluruh perangkat daerah dengan mengembangkan e-Gov melalui aplikasi sistem informasi menuju smart city, percepatan reformasi birokrasi yang berbasis pada keterbukaan informasi publik dan partisipasi, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pada pemanfaatan APBD agar amanah rakyat dapat dilaksanakan dengan baik.

5.2.3 Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Kelautan/Perikanan, Pariwisata, Dan Industri Kreatif, Dengan Didukung Infrastruktur Berbasis Wilayah.

Potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan jika dikelola secara optimal akan memiliki nilai ekonomi yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemanfaatan potensi sumberdaya ekonomi terutama sektor-sektor unggulan, diperlukan cara-cara kreatif dan inovatif untuk dapat menciptakan nilai tambah yang dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat.

Penciptaan nilai tambah terhadap sumberdaya ekonomi ini harus dilakukan secara bersama-sama dan saling mendukung oleh 3 pilar kekuatan utama pembangunan ekonomi yaitu masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dengan mengatasi berbagai hambatan dan tantangan, sehingga mendorong kemampuan atau keberdayaan untuk memelihara kelangsungan hidup secara berkelanjutan, sehingga masyarakat dan dunia usaha memiliki kemandirian secara ekonomi.

Hal-hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut diantaranya adalah revitalisasi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan dalam payung kebijakan integratif, mengembangkan branding pertanian dan perikanan serta perkebunan, menerapkan pertanian secara terintegrasi (integrated farming system), melindungi petani dari spekulasi harga komoditas, menguatkan citra Pangkajene dan Kepulauan sebagai “Kota Boledong (Bolu, Lemo, Doang”, optimalisasi sektor pariwisata, revitalisasi dan branding destinasi wisata alam melalui pengelolaan promosi wisata dengan pemanfaatan teknologi informasi, memasukkan Pangkajene dan Kepulauan dalam peta wisata di Sulawesi Selatan dan Nasional, optimalisasi peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), penataan pasar tradisional dan jaringan ritel pasar modern agar tidak saling mematikan namun saling melengkapi, pengembangan desa wisata secara terintegrasi dengan komoditi unggulan pertanian, perikanan dan perkebunan, menciptakan iklim yang kondusif untuk percepatan investasi melalui penyederhanaan dan percepatan izin usaha berbasis teknologi informasi serta penyusunan prospektus bisnis.

Dalam pemanfaatan potensi sumberdaya ekonomi perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur penunjang ekonomi diantaranya jalan, jaringan irigasi,

ketersediaan air minum secara merata di semua wilayah agar seluruh potensi sumberdaya ekonomi khususnya sektor unggulan dapat dimanfaatkan secara optimal.

5.2.4 Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Produktif.

Mewujudkan masyarakat Pangkajene dan Kepulauan dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta derajat kesehatan yang baik, dari semua tingkatan usia, serta hidup berlandaskan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing individu, yang mengarah pada peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, bermuara pada terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan melalui optimalisasi pendidikan karakter melalui penguatan madrasah diniyah serta lembaga pendidikan non formal lainnya yang disinergikan dengan pendidikan formal sebagai pilar pembangunan Pangkajene dan Kepulauan yang berdasarkan iman dan taqwa, pemberian penghargaan kepada, guru madrasah diniyah, guru ngaji dan guru TPQ/TPA serta pendidik lembaga pendidikan non formal lainnya sebagai ujung tombak pendidikan karakter dalam menyelesaikan masalah sosial, memperkuat kurikulum pendidikan dengan muatan lokal yang berbasis keagamaan, kearifan lokal dan agrobisnis untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, mewujudkan layanan pendidikan yang komprehensif dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar dan staf pendukung kependidikan, penyediaan dan peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan dan alat bantu pendidikan, peningkatan jumlah sekolah negeri maupun swasta yang berkualitas, biaya terjangkau dan dekat dengan tempat tinggal peserta didik sesuai wilayah sasaran prioritas, memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, penambahan jumlah guru, medis dan tenaga medis untuk mendukung kebutuhan bidang pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah terpencil, mengintegrasikan Jaminan Sosial daerah Pangkajene dan Kepulauan dengan jaminan sosial yang ada di tingkat provinsi dan nasional (BPJS, KIS, KIP, dan Jamkesda), menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat, ketersediaan berbagai kebijakan, pedoman dan akses sistem informasi kesehatan (SIK) daerah di seluruh institusi pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional, terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos-siaga, memperkuat program-program preventif ("dokter masyarakat"), pemenuhan fasilitas kendaraan siaga kesehatan desa, penyediaan fasilitas umum (taman kota edukatif, perpustakaan, sanggar seni) yang ditujukan untuk pemuda dan pelajar sebagai ruang publik positif, penyediaan fasilitas publik untuk berolah raga, serta menjadikan Pangkajene dan Kepulauan sebagai kabupaten yang ramah terhadap perempuan, anak dan disabilitas dengan memberikan penghormatan,

perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan, anak dan disabilitas. Keramahan tersebut akan diwujudkan dalam aspek fasilitas umum, pelayanan publik termasuk dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan bidang lainnya yang terkait dengan kehidupan perempuan, anak dan disabilitas.

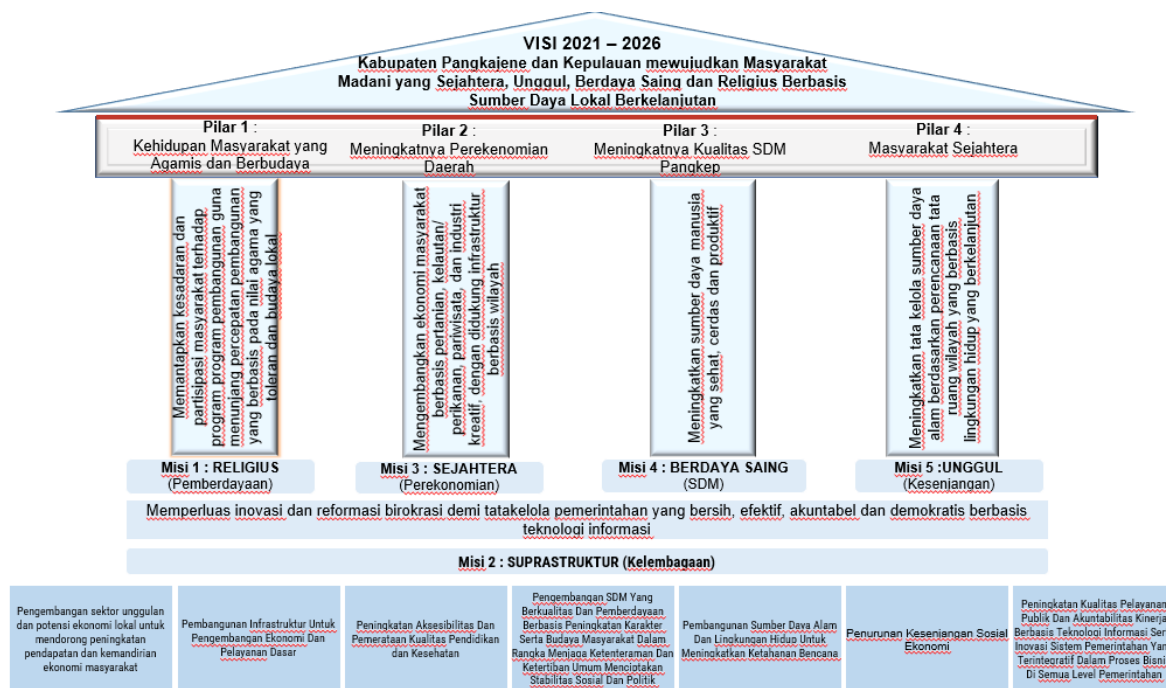
5.2.5 Meningkatkan Tata Kelola Sumberdaya Alam Berdasarkan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Yang Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat harus dapat menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya sehingga kondisinya tetap dapat dipertahankan seperti keadaan semula. Mengingat pengelolaan sumber daya alam, tidak hanya harus mengurangi kerusakan (dampak negatif sekecil mungkin) dan mempertahankan keberadaan sumber daya alam tidak terbarukan, tetapi juga memperbaiki sumber daya alam terbarukan, serta mencapai kembali keadaan sesuai kapasitasnya yang semula, dan bukan saja merupakan keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi juga keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) sehingga dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah perlunya mendorong filosofi ramah lingkungan pada setiap pembangunan pemukiman dan infrastruktur, melakukan konservasi dan pencegahan seperti penyelamatan sumber mata air, pembuatan biopori, sumur resapan, pembuatan IPAL industri, pengelolaan ruang terbuka hijau, dan pengurangan serta pengolahan sampah. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dilakukan peningkatan jalan lingkungan, drainase, penanganan limbah rumah tangga.

Lima butir Misi Pembangunan di atas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemukan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi. Berikut digambarkan konstruksi substansi misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026.

Hal ini didasarkan pada ketentuan ayat (1), (2) dan (3) pada Pasal 166 Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut: (1) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah, (2) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung, (3) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Gambar 5.1 : Pondasi Pilar Misi dalam Pencapaian Visi



Keselarasan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026, disajikan dalam bentuk skema sebagaimana Tabel 5.3. berikut:

Tabel 5.3.
Keselarasan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan
Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026

VISI MISI RPJMN	VISI MISI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Visi	
<i>Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong</i>	<i>Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan</i>
Misi	
1) Peningkatkan kualitas manusia Indonesia;	4) Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif
2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.	3) Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah
3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;	5) Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan
4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;	1) Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya lokal
5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;	
6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;	
7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh	

VISI MISI RPJMN	VISI MISI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
warga;	
8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;	2) Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi
9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.	

Sumber : Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024

Sebagai bagian integral dari Provinsi Sulawesi Selatan, Visi jangka menengah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan harus tetap selaras dengan Visi jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan. Di dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023-2028, Visi jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah:

“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemakan provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”. Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan pokok-pokok visi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 sebagai berikut:

- **Inovatif** dimaknakan sebagai kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”.
- **Kompetitif** dimaknakan sebagai Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”.
- **Produktif** dilaksanakan sebagai kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”.
- **Inklusif** dimaknakan sebagai kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”.
- **Berkarakter** dimaknakan sebagai kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

Untuk mencapai Visi tersebut, Provinsi Sulawesi Selatan mengembangkan sejumlah Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif.
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel

3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter
5. Meningkatkan produktifitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan

Keselarasan Visi Misi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 dengan Visi Misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021-2026, disajikan dalam bentuk tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4.
Keselarasan Visi Dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Visi Dan Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

VISI DAN MISI PROVINSI SULAWESI SELATAN	VISI DAN MISI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Visi	
<i>Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter</i>	<i>Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan</i>
Misi	
1) Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif	1) Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya lokal
2) Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif	2) Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi
3) Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif	3) Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah
4) Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter	4) Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif
5) Meningkatkan produktifitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan	5) Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sumber : Dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Tabel. 5.5.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan, dan
Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

NO	PRIORITAS NASIONAL (RPJMN)	PRIORITAS SULSEL (RPJMD SULSEL)	PRIORITAS KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.	Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan Aksesibilitas Dan Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.	Penguatan infrastruktur wilayah.	Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat
3.	Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	Pengembangan kawasan pertumbuhan.	Pembangunan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
4.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Pembangunan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Untuk Meningkatkan Ketahanan Bencana
5.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan manusia.	Pengembangan SDM Yang Berkualitas Dan Pemberdayaan Berbasis Peningkatan Karakter Serta Budaya Masyarakat Dalam Rangka Menjaga Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Menciptakan Stabilitas Sosial Dan Politik
6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas.	Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi
7.	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.	Pelestarian lingkungan hidup	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Teknologi Informasi Serta Inovasi Sistem Pemerintahan Yang Terintegratif Dalam Proses Bisnis Di Semua Level Pemerintahan

Sumber : Dokumen RPJMN 2020-2024, RPJMD-P Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan merupakan kondisi yang akan dicapai dalam RPJMD di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026 dalam bentuk pernyataan-pernyataan dalam mendukung pencapaian visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai perwujudan pencapaian misi pembangunan.

Sedangkan sasaran pembangunan adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan berupa hasil pembangunan daerah. Sasaran RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan hingga tahun 2026 merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasi secara terukur, spesifik dan dapat dicapai secara rasional dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (2021-2026). Sasaran ini juga menampilkan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005-2025 yang merupakan tahapan akhir dari pembangunan jangka panjang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Berangkat dari Visi, Misi tersebut maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

5.3.1 Dalam Rangka Pencapaian Misi 1 : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya lokal, maka ditetapkan tujuan pembangunan sebagai berikut :

Tujuan 1: Meningkatkan Keswadayaan Dan Kemandirian Masyarakat Dalam Pembangunan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1) Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Lingkungan dan Sosial Masyarakat;

Gambar 5.2 :
Desain Logical Framework Pencapaian Misi-1

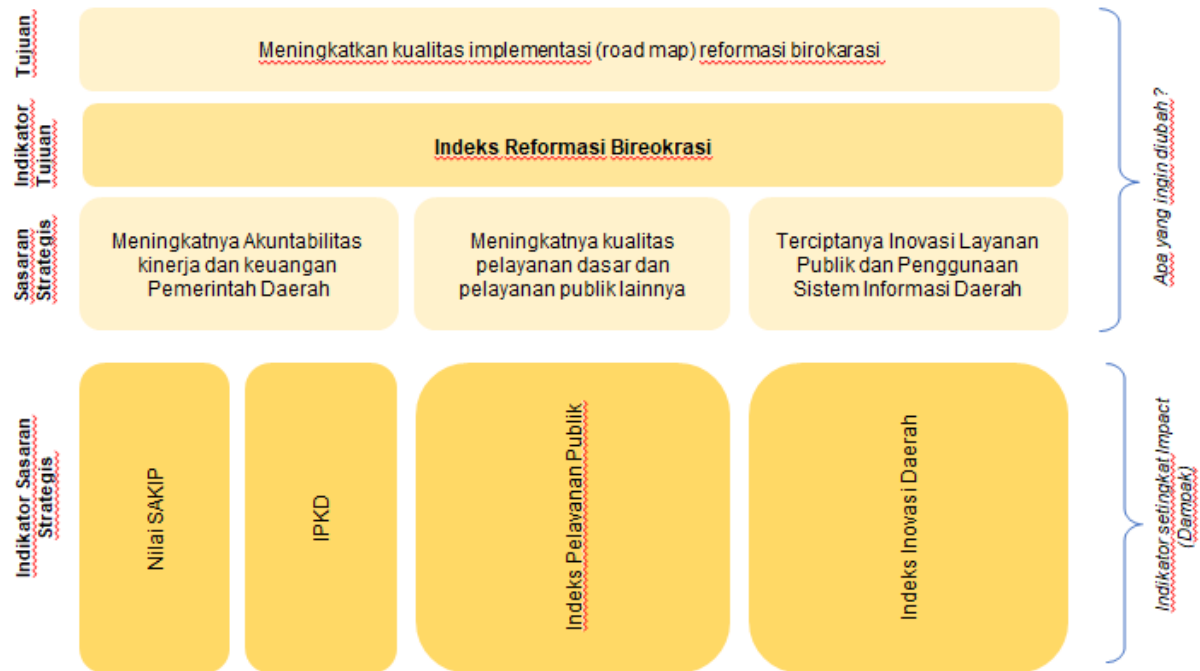


5.3.2 Dalam rangka pencapaian Misi 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi maka ditetapkan tujuan pembangunan sebagai berikut:

Tujuan 2: **Meningkatnya Kualitas Implementasi (Road Map) Reformasi Birokarasi**, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya.
- 3) Terciptanya Inovasi Layanan Publik dan Penggunaan Sistem Informasi Daerah.

Gambar. 5.3.
Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-2

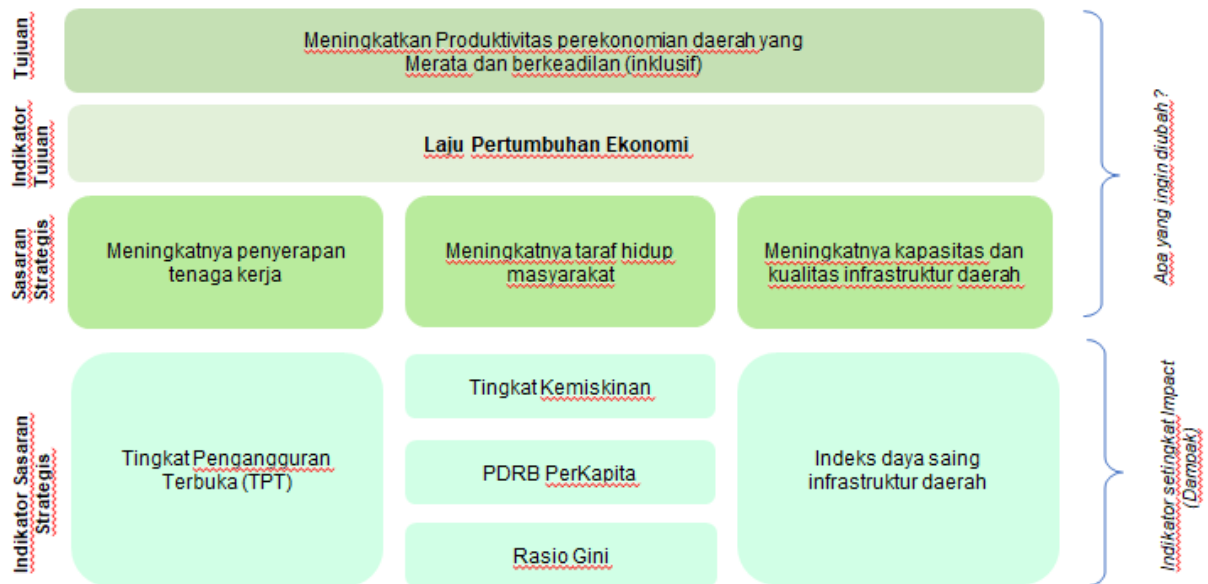


5.3.3 Dalam rangka pencapaian Misi 3 : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah maka ditetapkan tujuan pembangunan sebagai berikut:

Tujuan 3: **Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah Yang Merata Dan Berkeadilan (Inklusif)** dengan sasaran pembangunan:

- 1) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
- 2) Meningkatkan taraf hidup masyarakat lapisan bawah
- 3) Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah

Gambar. 5.4.
Desain Logical Framework Pencapaian Misi-3

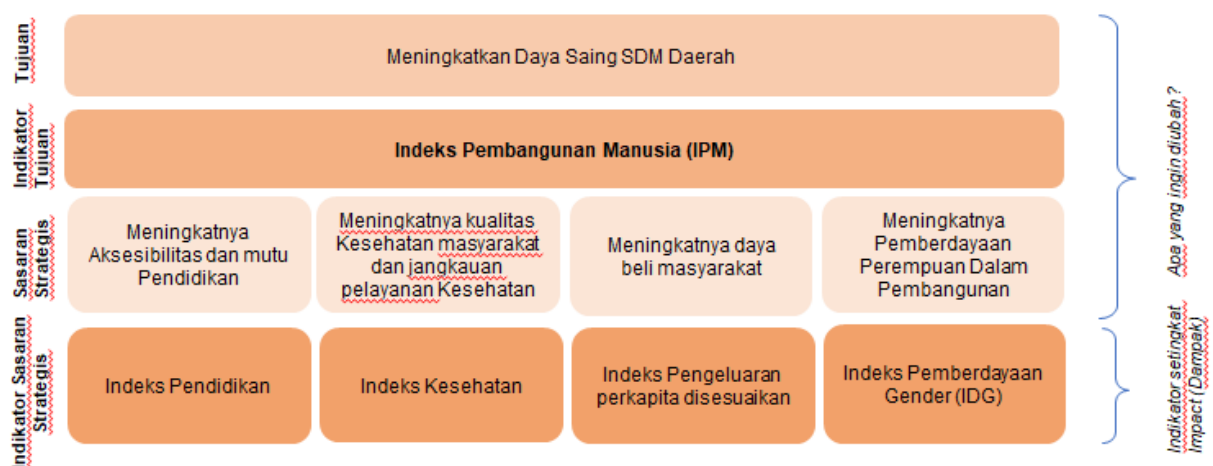


5.3.4 Dalam rangka pencapaian Misi 4 : Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, maka ditetapkan tujuan pembangunan sebagai berikut:

Tujuan 4: **Meningkatkan Daya Saing SDM Daerah**, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu Pendidikan;
- 2) Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan Kesehatan;
- 3) Meningkatnya daya beli masyarakat;
- 4) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan.

Gambar. 5.5.
Desain Logical Framework Pencapaian Misi-4



5.3.5. Dalam rangka pencapaian Misi Meningkatkan tata kelola sumberdaya alam berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan, maka ditetapkan tujuan pembangunan sebagai berikut:

Tujuan 5: **Meningkatkan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan**, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan kepatuhan terhadap RTRW;

Gambar. 5.6.
Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-5



Tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana dijabarkan diatas, selanjutnya disertai dengan indikator tujuan dan sasaran setiap tahun untuk menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran secara terukur. Secara detail, indikator tujuan dan sasaran beserta targetnya tahun 2021 - 2026 terlihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.6.
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026.

Visi : Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan

Misi / Tujuan / Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2020	Target					Kondisi Akhir RPJMD
							2022	2023	2024	2025	2026	
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi 1	Memantapkan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Program Pembangunan Guna Menunjang Percepatan Pembangunan Yang Berbasis Pada Nilai Agama Yang Toleran Dan Budaya Lokal											
Tujuan 1	Meningkatkan Keswadayaan Dan Kemandirian Masyarakat Dalam Pembangunan		1	IDM	Angka	0,6528	0,6882	0,7059	0,7236	0,7413	0,7590	0,7590
	Sasaran 1	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Lingkungan dan Sosial Masyarakat	2	Indeks Ketahanan Ekonomi	Angka	0,5413	0,5869	0,6097	0,6325	0,6554	0,6782	0,6782
			3	Indeks Ketahanan Lingkungan	Angka	0,6472	0,6636	0,6718	0,6800	0,6882	0,6965	0,6965
			4	Indeks Katahanan Sosial	Angka	0,7698	0,8140	0,8360	0,8581	0,8802	0,9022	0,9022
Misi 2	Memperluas Inovasi Dan Reformasi Birokrasi Demi Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Akuntabel Dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi											
Tujuan 2	Meningkatkan Kualitas Implementasi (Road Map) Reformasi Birokarasi		5	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	C (43,01)	CC (>50 - 60)	CC (>50 - 60)	B (>60 - 70)	B (> 60 - 70)	BB (> 70 - 80)	BB (> 70 - 80)
	Sasaran 2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	6	Nilai SAKIP	Huruf / Angka	B (60,17)	B (> 60 - 70)	BB (> 70 - 80)	BB (> 70 - 80)	BB (> 70 - 80)	A (> 80 - 90)	A (> 80 - 90)
			7	IPKD	Angka	67.464	69.300	70.200	71.000	71.800	72.500	72.500
	Sasaran 3	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya	8	Indeks Pelayanan Publik	Angka	n/a	79,91	80,32	80,73	81,14	81,55	81,55
	Sasaran 4	Terciptanya Inovasi Layanan Publik dan Penggunaan Sistem Informasi Daerah	9	Indeks Inovasi Daerah	Angka	2.276	2.382	2.435	2.488	2.541	2.594	2.594
Misi 3	Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Kelautan/Perikanan, Pariwisata, Dan Industri Kreatif, Dengan Didukung Infrastruktur Berbasis Wilayah											
Tujuan 3	Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Yang Merata Dan Berkeadilan (Inklusif)		10	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,69	4,48-5,98	4,60 - 6,13	4,70 - 6,15	4,75 - 6,20	4,80 - 6,35	4,80 - 6,35
	Sasaran 5	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja.	11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5.18	5.05	4.95	4,75	4,63	4,37	4,37

Misi / Tujuan / Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2020	Target					Kondisi Akhir RPJMD
							2022	2023	2024	2025	2026	
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sasaran 6	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	12	Tingkat kemiskinan	Persen	13,96	12,68	11,78	11,13	10,43	9,83	9,83
			13	PDRB/kapita	Rp. Juta	74,8	76,81	76,82	76,84	77,23	77,45	77,45
			14	Rasio Gini	Angka	0,345	0,331	0,325	0,316	0,311	0,300	0,300
	Sasaran 7	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah	15	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	3,25	3,29	3,30	3,32	3,33	3,34	3,34
Misi 4 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Produktif.												
Tujuan 4	Meningkatkan Daya Saing SDM Daerah		16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	68,72	69,53	70,00	70,48	70,93	71,17	71,17
	Sasaran 8	Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu Pendidikan	17	Indeks Pendidikan	Angka	60,98	62,74	63,63	63,89	64,17	64,63	64,63
	Sasaran 9	Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan Kesehatan	18	Indeks Kesehatan	Angka	71,78	72,31	72,57	72,83	73,09	73,32	73,32
	Sasaran 10	Meningkatnya daya beli masyarakat	19	Indeks Pengeluaran perkapita disesuaikan	Angka	74,14	74,10	74,29	75,97	76,08	76,09	76,09
	Sasaran 11	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	20	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	90,61	90,89	91,43	91,89	92,36	92,82	92,82
Misi 5 Meningkatkan Tata Kelola Sumber Daya Alam Berdasarkan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Yang Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.												
Tujuan 5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		21	IKLHD	Angka	70,24	65,83	66,23	66,63	67,03	67,43	67,43
	Sasaran 12	Kepatuhan Terhadap RTRW	22	Persentase Kepatuhan Terhadap RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel 5.6 diatas, menunjukkan tujuan dan sasaran serta indikator yang akan mendukung pencapaian Misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri atas 5 tujuan, 12 sasaran dengan rumusan indikator sebanyak 6 indikator tujuan dan 17 indikator sasaran, sehingga total indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebanyak 22 indikator.

Visi dan Misi jangka menengah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2026 merupakan turunan dan penjabaran dari Visi dan Misi jangka panjang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025. Di dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2005-2025, Visi jangka panjang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025 adalah: **“Menjadi Daerah Maju Dan Mandiri Di Sulawesi Selatan Yang Didukung Oleh Struktur Ekonomi Dan Struktur Wilayah Yang Kuat Dengan Dijiwai Oleh Nilai-Nilai Keagamaan Pada Tahun 2025”**.

Visi singkat ini mengandung pengertian yang luas dan menggambarkan aspirasi dan cita-cita masyarakat Pangkajene dan Kepulauan yang menginginkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dimasa yang akan datang menjadi daerah yang maju di Sulawesi Selatan dalam berbagai dimensi kehidupan, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dan alam, posisi geografis, kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dan tatanan budaya masyarakat lokal.

Sejalan dengan visi tersebut dan dengan memperhatikan kondisi obyektif yang dimiliki, maka visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjadi daerah yang maju mandiri melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mantap;
2. Mengembangkan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan dalam rangka mendukung struktur ekonomi daerah dan wilayah yang kuat;
3. Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan dalam berbagai aspek kehidupan yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.

Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2005-2025 dengan Visi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021-2026, disajikan dalam bentuk tabel 5.7 berikut:

Tabel. 5.7.
Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Visi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

VISI RPJPD PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	VISI RPJMD PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Menjadi daerah maju dan mandiri di Sulawesi Selatan yang didukung oleh struktur ekonomi dan struktur wilayah yang kuat dengan dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan pada tahun 2025	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan
MAJU	UNGGUL
	BERDAYA SAING
MANDIRI	SEJAHTERA
	MASYARAKAT MADANI
NILAI KEAGAMAAN	RELIGIUS

Sumber : Dokumen RPJPD Kabupaten Pangkep 2005 - 2025

Sedangkan keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021-2026, disajikan dalam bentuk tabel 5.8 berikut:

Tabel 5.8.
Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Misi RPJPD Pangkajene Dan Kepulauan	Misi RPJMD Pangkajene Dan Kepulauan
1) Menjadi daerah yang maju mandiri melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mantap	2) Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi
2) Mengembangkan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan dalam rangka mendukung struktur ekonomi daerah dan wilayah yang kuat	3) Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah
	4) Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif
	5) Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan
3) Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan dalam berbagai aspek kehidupan yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan	1) Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya lokal

Sumber : Dokumen RPJPD Kabupaten Pangkep 2005 - 2025

Tabel. 5.9.

Keselarasan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026

Sasaran RPJPD 2005-2025	Indikator	Target RPJPD Periode 2020-2025	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	Indikator	Kondisi Akhir Periode RPJMD (2023)
Pembangunan Politik dan Keamanan	- Penataan peran pemerintah dan masyarakat - Pengembangan budaya politik - Perbaikan proses politik - Peningkatan peran komunikasi dan informasi - Menekan kejahatan konvensional serta mengurangi potensi konflik horisontal antar kelompok masyarakat - Menekan kejahatan sumberdaya alam dan mengamankan sumberdaya alam, terutama di laut		Meningkatkan Keswadayaan Dan Kemandirian Masyarakat Dalam Pembangunan	IDM	0,7590
Penyelenggaraan Pemerintah	- Pembangunan aparatur pemerintah daerah yang dilakukan melalui penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan - Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi - Peningkatan kebudayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan		Meningkatkan Kualitas Implementasi (Road Map) Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Bireokrasi	BB (> 70 - 80)
Pembangunan Sosial Budaya	- Membangun dan memantapkan jati diri - Ikut memantapkan integrasi bangsa berbasis multi kultur; - Mengembangkan budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kesenian yang beradab		Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Lingkungan dan Sosial Masyarakat	Indeks Ketahanan Ekonomi	0,6782
				Indeks Ketahanan Lingkungan	0,6965
				Indeks Ketahanan Sosial	0,9022
Pembangunan Sumber Daya Manusia	- Peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu pelayanan sosial dasar termasuk pendidikan dan		Meningkatkan Daya Saing SDM Daerah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,17
			Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu Pendidikan	Indeks Pendidikan	74,42

Sasaran RPJPD 2005-2025	Indikator	Target RPJPD Periode 2020-2025	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	Indikator	Kondisi Akhir Periode RPJMD (2023)
	kesehatan, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja - Peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan kehidupan umat beragama.		Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	79,21
			Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran perkapita disesuaikan	12.885,47
			Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	92,82
Pembangunan Ekonomi	- Pengembangan mekanisme pasar - Peningkatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan - pengembangan daya saing global melalui peningkatan keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai kabupaten kepulauan dan agraris - Pengembangan agroindustri yang sehat dan kompetitif; - Menggairahkan iklim usaha melalui regulasi dan pengembangan paket insentif - Mendorong peningkatan nilai tambah kegiatan sektor primer terutama pertanian dalam arti luas dan pertambangan		Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Yang Merata Dan Berkeadilan (Inklusif)	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,80 - 6,35
			Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,37
			Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Tingkat kemiskinan	9,83
				PDRB/kapita	77,45
				Rasio Gini	0,300
Pembangunan Infrastruktur	- peningkatan partisipasi daerah dalam pengelolaan daerah aliran sungai - Peningkatan peran petani pemakai air dalam pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan pengelolaan irigasi		Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	3,34

Sasaran RPJPD 2005-2025	Indikator	Target RPJPD Periode 2020-2025	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	Indikator	Kondisi Akhir Periode RPJMD (2023)
	- Penyediaan air untuk pertanian dan air minum - Pembangunan transportasi - Pembangunan perumahan dan pemukiman - Penyediaan tenaga listrik				
Pembangunan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	- Pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan secara rasional, optimal, dan efisien, serta harus dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya - Pengelolaan secara rasional sumberdaya alam yang tidak terbarukan - Peningkatan nilai tambah produk-produk sumberdaya alam - Pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan untuk mendukung agroindustry - Pengelolaan sumberdaya alam untuk kepentingan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan berkelanjutan - Perlindungan sumberdaya alam - Penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	IKLHD	71.747
			Kepatuhan Terhadap RTRW	Persentase Kepatuhan Terhadap RTRW	100

Sumber : Dokumen RPJPD Kabupaten Pangkep 2005 - 2025

Tabel.5.9 diatas menggambarkan keterkaitan antara sasaran RPJPD tahun 2005-2025 dengan tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026, dari tujuan dan sasaran tersebut terdapat beberapa indikator yang memiliki target yang tidak bersesuaian namun indikator tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.

- Sasaran 1 pada RPJPD yaitu Pembangunan Politik dan Keamanan diukur dengan indikator Penataan peran pemerintah dan masyarakat, a). Pengembangan budaya

- politik, b). Perbaikan proses politik, c). Peningkatan peran komunikasi dan informasi, d). Menekan kejahatan konvensional serta mengurangi potensi konflik horizontal antar kelompok masyarakat, serta d). Menekan kejahatan sumberdaya alam dan mengamankan sumberdaya alam, terutama di laut sedangkan pada RPJMD 2021-2026 Meningkatkan Keswadayaan Dan Kemandirian Masyarakat Dalam Pembangunan diukur dengan indikator Indeks Desa Membangun. Memiliki keterkaitan karena karena anatomi Dimensi Ketahanan Sosial, Ekonomi, Lingkungan pada Indeks Desa Membangun mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan hak asal usul masyarakat desa yang menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.
- b. Sasaran 2 pada RPJPD yaitu Penyelenggaraan Pemerintah diukur Pembangunan aparatur pemerintah daerah yang dilakukan melalui penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi Peningkatan kebudayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sedangkan pada RPJMD 2021-2026 Meningkatkan Kualitas Implementasi (Road Map) Reformasi Birokrasi dengan indikator; Indeks Reformasi Birokrasi memiliki keterkaitan karena Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama pembangunan. Tata kelola pemerintahan yang baik juga diperlukan untuk memfasilitasi keterlibatan berbagai aktor dalam pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat memengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu daerah, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.
- c. Sasaran 3 pada RPJPD yaitu Pembangunan Sosial Budaya diukur dengan indikator 1). Membangun dan memantapkan jati diri, 2). Ikut memantapkan integrasi bangsa berbasis multi kultur, 3). Mengembangkan budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kesenian yang beradab sedangkan pada RPJMD 2021-2026 sasaran Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Lingkungan dan Sosial Masyarakat dengan Indikator; Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Lingkungan dan Indeks Ketahanan Sosial memiliki keterkaitan karena Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam SDGs Desa pada

- Kelembagaan Desa yang dinamis dan berbudaya adaptif untuk mempertahankan kearifan lokal dan serta melakukan revitalisasi terhadap Revolusi Industri 4.0.
- d. Sasaran 4 pada RPJPD yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia diukur dengan indikator Peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu pelayanan sosial dasar termasuk pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja serta Peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan kehidupan umat beragama sedangkan pada RPJMD 2021-2026 sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu Pendidikan, Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan Kesehatan, Meningkatnya daya beli masyarakat dengan indikator Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran Perkapita disesuaikan. Indikator tersebut memiliki keterkaitan karena Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Pengeluaran Perkapita disesuaikan dimana ketiga indikator tersebut merupakan variabel dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia.
- e. Sasaran 5 pada RPJPD yaitu Pembangunan Ekonomi dengan indikator Pengembangan mekanisme pasar; Peningkatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan; pengembangan daya saing global melalui peningkatan keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai kabupaten kepulauan dan agraris; Pengembangan agroindustri yang sehat dan kompetitif; Menggairahkan iklim usaha melalui regulasi dan pengembangan paket insentif; Mendorong peningkatan nilai tambah kegiatan sektor primer terutama pertanian dalam arti luas dan pertambangan, sedangkan pada RPJMD 2021-2026 terdapat tiga sasaran yakni 1). Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Yang Merata Dan Berkeadilan (Inklusif) dengan indikator; Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita. 2) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dengan indikator; Tingkat Pengangguran Terbuka, serta sasaran 3). Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah dengan indikator Angka kemiskinan dan Gini Ratio memiliki keterkaitan karena Pembangunan ekonomi adalah usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapita masyarakat pelaku ekonomi dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila upaya apabila tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product atau GDP) pada suatu tahun tertentu lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk.
- f. Sasaran 6 pada RPJPD yaitu Pembangunan Infrastruktur dengan indikator peningkatan partisipasi daerah dalam pengelolaan daerah aliran sungai; Peningkatan peran petani pemakai air dalam pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan pengelolaan irigasi; Penyediaan air untuk pertanian dan air minum; Pembangunan transportasi; Pembangunan perumahan dan pemukiman; Penyediaan tenaga listrik.

Sedangkan pada RPJMD 2021-2026 Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah dengan indikator Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah. Memiliki keterkaitan karena Daya saing Infrastruktur Daerah ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

- g. Sasaran 7 pada RPJPD yaitu Pembangunan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup dengan indikator Pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan secara rasional, optimal, dan efisien, serta harus dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya; Pengelolaan secara rasional sumberdaya alam yang tidak terbarukan; Peningkatan nilai tambah produk-produk sumberdaya alam; Pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan untuk mendukung agroindustry; Pengelolaan sumberdaya alam untuk kepentingan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan berkelanjutan; Perlindungan sumberdaya alam Penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas. Sedangkan pada RPJMD 2021-2026 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator IKLHD. Memiliki keterkaitan karena Penyelenggaraan tata ruang yang meliputi ruang darat, ruang udara, ruang laut termasuk ruang didalam bumi yang harus dikelola secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna. IKLHD menggambarkan kondisi lingkungan hidup Kabupaten Pangkep yang difokuskan pada media lingkungan air, udara, dan tutupan hutan. IKLHD dapat digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan pencapaian tujuan infrastruktur di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan salah satu rujukan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bermanfaat untuk mempercepat dan menjamin tercapainya visi misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan adanya rumusan strategi dan arah kebijakan yang tepat, maka pelaksanaan program prioritas pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam lima tahun ke depan diharapkan akan memiliki fokus yang jelas, terarah dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan consecutive process dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Strategi diawali dengan perumusan alternatif strategi yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternatif strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan alternatif strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang dan Ancaman. Pada akhirnya rumusan alternatif tersebut ditetapkan menjadi strategi melalui aktivitas FGD, scoring, analisis balanced scorecard. Berikut penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin

bergeser ke arah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perizinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan advis aktivitas yang dilakukan oleh seluruh stakeholder.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threat).

Untuk kurun waktu 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menetapkan strategi yang akan dikembangkan sebagai langkah taktis dan efektif, untuk menjamin hasil secara maksimal dari pelaksanaan berbagai program pembangunan, yang merupakan strategi terpadu yang melibatkan dukungan dan komitmen seluruh stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara garis besar, strategi terpadu yang dikembangkan dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan dalam kurun waktu 2021-2026 dengan prinsip:

1. Menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang.
2. Mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan masyarakat.
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan pada Bab V, diperlukan strategi yang menurut Permendagri Nomor. 86 tahun 2017, merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran. Berdasarkan pemahaman tersebut maka rumusan strategi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Strategi 1 : Mengembangkan Kerjasama Dengan Lembaga Eksternal Dalam Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Ketahanan Desa Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal Dan Nilai-Nilai Kebersamaan.

Sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan, maka hal yang terpenting adalah terletak pada pelaksanaan proses/ tahapan suatu program/kegiatan, yang seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat yang tinggi. Alasannya karena masyarakatlah yang paling mengetahui dan memahami masalah yang dihadapi, kebutuhan utamanya, dan potensi-potensi yang dimiliki, sehingga fasilitator sebaiknya melakukan pendekatan secara bottom –up (aspirasi masyarakat).

Sebagai sebuah proses, maka tentunya suatu program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat disadari sepenuhnya oleh seluruh pihak yang terkait, khususnya agen/aparat yang bertindak sebagai fasilitator. Sedapat mungkin sejak awal kegiatan, atau pada tahapan sosialisasi telah memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat/sasaran, bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan membutuhkan beberapa tahapan yang dapat berjalan dengan baik jika masyarakat ikut serta secara aktif/berpartisipasi secara langsung dalam seluruh tahapan kegiatan. Memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian proses yang panjang (tidak seketika), agar masyarakat menjadi lebih berdaya. Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong sosial ekonomi dan politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai power dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri.

Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran tersebut, upaya memberdayakan masyarakat haruslah dilakukan dengan:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya tersebut, dengan memotivasi dan mengembangkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya.
- 2) Upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Diperlukan langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim atau suasana.
- 3) Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranatanya. Menanamkan nilai budaya modern, seperti : kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggungjawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Pembaharuan lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi.
- 5) Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Perlindungan kepada yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Strategi 2 : Mengembangkan Sistem Pemerintahan Yang Integratif Melalui Institusionalisasi Reformasi Birokrasi Dalam Proses Bisnis Di Semua Level Pemerintahan.

Pengembangan sistem pemerintahan yang integratif melalui institusionalisasi reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level pemerintahan diarahkan pada seluruh pelaku pembangunan untuk melakukan inovasi, baik pemerintah, swasta dan masyarakat guna mengangkat nama kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam kontelasi regional Sulawesi Selatan, Nasional dan Internasional. Pemerintah mempunyai peran besar dalam mendorong Inovasi swasta dan masyarakat (kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dsb). Secara internal, nilai inovasi ditanamkan dalam setiap aktivitas pemerintah dan pembangunan daerah melalui reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik. Hal ini mengingat reformasi birokrasi merupakan prasyarat utama tatakelola pemerintahan yang inovatif dan akuntabel. Reformasi birokrasi merupakan pintu masuk seluruh elemen pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan pendekatan pembangunan yang inovatif secara substansial. Bisnis proses pemerintahan merupakan penerjemahan dari tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, merencanakan program, melaksanakan aktifitas pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mempertanggung jawabkan hasil hasil (*outcome*) pembangunan daerah. Agresifitas strategi ini terletak pada perangkat daerah memberikan sentuhan inovasi pada setiap aktivitas pembangunan daerah.

Strategi 3 : Mengembangkan sistem pelayanan yang Andal, Efisien, Responsive, Transparan dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.

Kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu: system pelayanan, SDM pemberi layanan, strategi, dan pelanggan (*customers*), Sistem pelayanan publik yang baik akan menghasilkan kualitas pelayanan publik yang baik pula. Suatu sistem yang baik memiliki dan menerapkan prosedur pelayanan yang jelas dan pasti serta mekanisme control didalam dirinya (*built in control*) sehingga segala bentuk penyimpangan yang terjadi secara mudah dapat diketahui. Dalam kaitannya dengan SDM pemberi layanan, akan dibutuhkan petugas pelayanan yang mampu memahami dan mengoperasikan system

pelayanan yang baik sehingga memerlukan petugas yang memiliki kompetensi menjalankan teknologi computer dan petugas yang mampu memahami kebutuhan dan kepentingan pelanggan. Selain itu sistem pelayanan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan menyediakan sistem pelayanan dan strategi yang tepat. Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kompetensi aparat, kualitas peralatan yang digunakan untuk memproses pelayanan, budaya birokrasi, dan sebagainya. Kompetensi aparat merupakan akumulasi dari sejumlah sub variabel seperti tingkat pendidikan, jumlah tahun pengalaman kerja, dan variasi pelatihan yang pernah diterima. Sedangkan kualitas dan kuantitas peralatan yang digunakan akan mempengaruhi prosedur, kecepatan proses, dan kualitas keluaran (output) yang akan dihasilkan.

Efisiensi dapat didefinisikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input dan output. Dengan demikian apabila suatu output dapat dicapai dengan input yang minimal maka dinilai efisien. Input dalam pelayanan publik dapat berupa uang, tenaga, waktu, dan materi lain yang digunakan untuk menghasilkan sebuah output. Artinya harga pelayanan publik harus dapat terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat. Disamping itu, masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik dalam waktu yang relatif singkat dan tidak banyak membutuhkan tenaga. Dengan menggunakan bantuan teknologi modern, maka proses pelayanan publik dapat dilakukan dengan cepat dan hemat tenaga.

Pelayanan publik yang responsive dapat diterjemahkan sebagai bentuk kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan dan mengembangkannya kedalam berbagai program pelayanan. Responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi, serta tuntutan warga pengguna layanan. Tujuan utama pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan warga pengguna agar dapat memperoleh pelayanan yang diinginkan dan memuaskan, oleh karena itu penyedia layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan warga pengguna, kemudian memberikan pelayanan sesuai dengan harapan warga tersebut.

Pelayanan publik yang transparan tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Warga seringkali tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai berbagai hal yang terkait dengan pelayanan publik yang mereka perlukan.

Strategi 4 : Menciptakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 04 Butir (c) yang menyebutkan bahwa, "Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Seharusnya para penyelenggara

pelayanan publik wajib melakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan publik, hal ini juga dapat mendorong pemerintah melakukan percepatan dalam e-government yaitu suatu upaya dalam menciptakan pemerintahan yang berbasis elektronik.

Tujuan reformasi birokrasi diantaranya; meniadakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pembuatan dan implementasi kebijakan publik, meningkatkan efisiensi (baik dalam segi biaya dan waktu) pada setiap pelaksanaan tugas organisasi, menjadikan birokrasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lebih antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi tuntutan perubahan di dalam masyarakat. Inovasi kebijakan dilakukan dalam rangka efisiensi kinerja organisasi. Organisasi publik melakukan efisiensi untuk peningkatan nilai dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Inovasi pelayanan publik dimaksudkan untuk menemukan formulasi baru maupun pengembangan metode pelayanan publik. Gerakan Satu Institusi, Satu Inovasi juga dimaksudkan agar setiap institusi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mampu mandiri mengembangkan pelayanan publik sesuai dengan sumber daya, kebutuhan pengguna layanan, dan kreatifitas yang dimiliki.

Strategi 5 : Mengembangkan agrobisnis perdesaan melalui revitalisasi perikanan, pertanian dan perkebunan rakyat, meningkatkan kualitas dan nilai tambah komoditi unggulan, meningkatkan aksesibilitas petani terhadap teknologi, meningkatkan kapasitas pelaku usaha dagang kecil, fasilitasi usaha perdagangan konvensional dan non konvensional (e-commerce), penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran serta pencitraan produk dalam rangka promosi serta menarik investasi agrobisnis, perluasan pertanian organik, revitalisasi pasar tradisional serta penataan kawasan dan diversifikasi produk unggulan dan memperluas kesempatan kerja melalui fasilitasi akses informasi ketenagakerjaan dan meningkatkan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pembinaan.

Dalam perkembangannya selama ini kondisi kawasan perdesaan pada umumnya masih tetap dicirikan oleh masih besarnya jumlah penduduk miskin, terbatasnya alternatif lapangan kerja, dan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja perdesaan. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya kendala seperti rendahnya tingkat penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga petani dan tingginya ketergantungan pada kegiatan budidaya pertanian (on-farm), lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi antara sektor pertanian, perikanan dan perkebunan dengan sektor industri pengolahan dan jasa penunjang serta keterkaitan antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat perdesaan, rendahnya akses masyarakat kepada sumber permodalan dan sumberdaya ekonomi produktif lainnya, serta terbatas dan belum meratanya tingkat pelayanan

prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat. Oleh karena itu program-program pengembangan pertanian, perikanan, perkebunan dan penyediaan bahan pangan harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat petani dan masyarakat desa, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan nilai tambah (added value) pertanian dan bahan pangan bagi masyarakat petani dan nelayan melalui hubungan industrial antara pertanian pangan dan sektor-sektor perekonomian lainnya.

Strategi 6 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Melalui Peningkatan Kualitas Aksesibilitas, serta mengupayakan pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan penduduk miskin.

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkajene dan Kepulauan) kontradiktif dengan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita kabupaten ini merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu agenda pembangunan. Beberapa program di sektor terkait, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan. Selain melakukan program penanggulangan kemiskinan yang bersifat langsung, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga melakukan pemutakhiran BDT serta survei kebutuhan pangan dan nonpangan terhadap 30% RTM yang terdaftar dalam BDT. Upaya ini dapat dijadikan landasan bagi perbaikan koordinasi dan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan. Upaya peningkatan kualitas SDM, khususnya peningkatan lama sekolah dan kualitas pendidikan, merupakan kunci pengurangan kemiskinan. Upaya tersebut perlu dilakukan tidak hanya dengan meningkatkan akses terhadap fasilitas pendidikan dan menurunkan biaya pendidikan, tetapi juga dengan memberi perhatian dan penanganan lebih serius pada berbagai hambatan sosial budaya. Beberapa strategi yang dilaksanakan antara lain :

- a) Bantuan peralatan usaha, seperti sarana produksi pertanian/peternakan/perikanan (pupuk, bibit/benih tanaman, alat tangkap, hewan ternak, mesin pengolah hasil pertanian, dll.);
- b) Dana untuk modal usaha, baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman bergulir;
- c) Pendampingan pengembangan usaha, termasuk konsultasi usaha, bantuan pemasaran yang menghubungkan wirausaha dengan konsumen, pengurusan perizinan, dan sertifikasi usaha;
- d) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), seperti pelatihan keterampilan, sekolah lapang, dan lain-lain;
- e) Kegiatan padat karya untuk pembangunan infrastruktur dengan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat; dan

- f) Bantuan untuk menyelesaikan perselisihan dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Strategi 7 : Percepatan pembangunan infrastruktur terutama penunjang ekonomi dan penunjang sektor unggulan lokal seperti pertanian, perikanan dan pariwisata sebagai penopang utama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur di 2021-2026 akan berfokus pada tiga kerangka utama, yaitu Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan, yang juga ditopang dengan pembangunan energi dan ketenagalistrikan, serta pelaksanaan transformasi digital.

Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama. Karena sebagian besar di daerah pedesaan rakyat hidup pada sektor pertanian, perikanan dan unggulan lokal kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian daerah, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pedesaan dengan lebih baik. Pembangunan industri harus memperhatikan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) dengan sektor pertanian atau sektor primer sedangkan keterkaitan kedepan (*forward linkage*) harus memperhatikan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik sehingga produk yang dihasilkan tidak sia-sia yaitu dengan membuka akses pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta mengembangkan konektivitas antara daerah tersebut dengan pusat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut.

Strategi 8 : Meningkatkan akses layanan pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga kependidikan yang berkualitas dan berdaya saing yang tidak hanya bertumpu terhadap Pendidikan formal juga fokus pada Pendidikan non formal melalui penanaman dan penguatan pendidikan karakter dan berfokus terhadap menciptakan sumber daya manusia yang kreatif.

Meningkatkan keterjangkauan penduduk terhadap layanan pendidikan dalam rangka pemerataan akses layanan pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan akses pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan formal termasuk pendidikan non formal, Meningkatkan fasilitas bantuan biaya operasional satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan Meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak swasta bagi pembiayaan bagi peningkatan mutu dan pengawasan pendidikan, Program gratis peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui *boarding school* di UKM/PTN/PTS, Pengembangan perpustakaan Taman Desa serta Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi untuk lanjut ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Strategi 9 : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan baik dalam Preventif, Represif, maupun Kuratif melalui Penyediaan Sarana, Prasarana dan Tenaga Medis Berkualitas.

Mendorong pembangunan rumah sakit bertaraf nasional dan internasional, Peningkatan pelayanan kesehatan berbasis SPM dan SDGs, dengan standar biaya yang jelas, Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada RSUD (Pemerintah) maupun swasta, Peningkatan Pelayanan Kesehatan secara merata pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Peningkatan pelayanan bagi ibu hamil di setiap desa, Penyediaan obat-obatan dan peralatan medis yang memadai di Rumah sakit dan Puskesmas, Terwujudnya peningkatan kesejahteraan perawat dan tenaga kesehatan, Peningkatan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Menyediakan sarana kesehatan 'RUMAH SANTAI HEBAT' sebagai lokasi isolasi pasien covid-19, MOBILE KOCO (Kotak Gorona) Setiap Rumah, Membebaskan biaya perawatan bagi pasien terdampak Covid-19, Kota cerdas untuk kesehatan

Strategi 10 : Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan penguatan sektor strategis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berupaya memperbaiki daya beli masyarakat di masa pandemi Covid-19, salah satunya dilakukan dengan mendorong sisi permintaan melalui realisasi bantuan sosial seperti Program subsidi gaji dan semi bansos seperti Kartu Prakerja. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah meningkatkan konsumsi rumah tangga dengan mendorong usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, dan (usaha) besar harus didorong untuk mulai bergerak karena konsumsi rumah tangga akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kedepan dengan memberikan perhatian khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja.

Strategi 11 : Meningkatkan pemahaman dan komitmen pentingnya perspektif pemberdayaan gender dan implementasinya dalam berbagai bidang pembangunan termasuk pencapaian kabupaten layak anak serta peningkatan layanan publik bagi penyandang disabilitas.

Meningkatkan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan serta mengembangkan kelembagaan penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak dan peningkatan upaya pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan melakukan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di kabupaten yang akan dilaksanakan melalui strategi:

- a. Meningkatkan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan;
- b. Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dengan mengoptimalkan upaya pencegahan;
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

Strategi 12 : Meningkatkan koordinasi penataan ruang daerah, Meningkatkan pengelolaan SDA LH sesuai daya dukung daya tampung serta Meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan penanganan bencana baik fisik maupun sosial.

Mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan dalam menyelaraskan upaya-upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon. Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan hingga tahun 2030 memiliki 5 prinsip dasar yaitu; People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang selaras. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang difokuskan pada pelaksanaan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan hukum dan tata kelola dan pilar pembangunan lingkungan secara terintegrasi. Pilar pembangunan lingkungan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meliputi 6 (enam) tujuan pembangunan yaitu: Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua, Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan, Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Tujuan 13 Mengatasi Perubahan Iklim, Tujuan 14 Sumber Daya Maritim Berkelanjutan, dan Tujuan 15 Pengelolaan Ekosistem Terrestrial Berkelanjutan.

Berdasarkan analisis diatas, strategi pembangunan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam kurun waktu lima tahun kedepan selengkapnya disajikan pada Tabel 6.1. berikut:

Tabel. 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Visi : Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan.		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1 : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya lokal		
Tujuan 1 : Meningkatnya Keswadayaan Dan Kemandirian Masyarakat Dalam Pembangunan	1. Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Lingkungan dan Sosial masyarakat	Mengembangkan Kerjasama Dengan Lembaga Eksternal Dalam Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Dan Ketahanan Desa Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal Dan Nilai-Nilai Kebersamaan
Misi 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi		
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas implementasi (road map) reformasi birokrasi	2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Mengembangkan Sistem Pemerintahan Yang Integratif Melalui Institusionalisasi Reformasi Birokrasi Dalam Proses Bisnis Di Semua Level Pemerintahan
	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Dan Pelayanan Publik Lainnya	Mengembangkan sistem pelayanan yang Andal, Efisien, Responsive, Transparan dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
	4. Terciptanya Inovasi Layanan Publik dan Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Menciptakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
Misi 3 : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah		
Tujuan 3 : Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah yang merata dan berkeadilan (inklusif)	5. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Mengembangkan agrobisnis perdesaan melalui revitalisasi perikanan, pertanian dan perkebunan rakyat, meningkatkan kualitas dan nilai tambah komoditi unggulan, meningkatkan aksesibilitas petani terhadap teknologi, meningkatkan kapasitas pelaku usaha dagang kecil, fasilitasi usaha perdagangan konvensional dan non konvensional (e-commerce), penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran serta pencitraan produk dalam rangka promosi serta menarik investasi agrobisnis, perluasan pertanian organik, revitalisasi pasar tradisional serta penataan kawasan dan diversifikasi produk unggulan dan memperluas kesempatan kerja melalui fasilitasi akses informasi ketenagakerjaan dan meningkatkan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pembinaan

Visi : Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan.		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	6. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Melalui Peningkatan Kualitas Aksesibilitas, serta mengupayakan pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan penduduk miskin.
	7. Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Percepatan pembangunan infrastruktur terutama penunjang ekonomi dan penunjang sektor unggulan lokal seperti pertanian, perikanan dan pariwisata sebagai penopang utama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Misi 4 : Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif		
Tujuan 4 : Meningkatkan Daya Saing SDM Daerah	8. Meningkatnya Aksesibilitas Dan Mutu Pendidikan	Meningkatkan akses layanan pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga kependidikan yang berkualitas dan berdaya saing yang tidak hanya bertumpu terhadap Pendidikan formal juga fokus pada Pendidikan non formal melalui penanaman dan penguatan pendidikan karakter dan berfokus terhadap menciptakan sumber daya manusia yang kreatif
	9. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan baik dalam Preventif , Represif, maupun Kuratif melalui Penyediaan Sarana, Prasarana dan Tenaga Medis Berkualitas
	10. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sector pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan penguatan sektor strategis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
	11. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pentingnya perspektif pemberdayaan gender dan implementasinya dalam berbagai bidang pembangunan termasuk pencapaian kabupaten layak anak serta peningkatan layanan publik bagi penyandang disabilitas
Misi 5 : Meningkatkan tata kelola sumberdaya alam berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan		
Tujuan 5 : Meningkatkan Daya dukung dan daya tampung lingkungan.	12. Kepatuhan Terhadap RTRW	Meningkatkan koordinasi penataan ruang daerah, Meningkatkan pengelolaan SDA LH sesuai daya dukung daya tampung serta Meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan penanganan bencana baik fisik maupun sosia

6.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan mengacu pada strategi di atas, maka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD ditetapkan arah kebijakan yang komprehensif. Arah kebijakan menjadi acuan untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

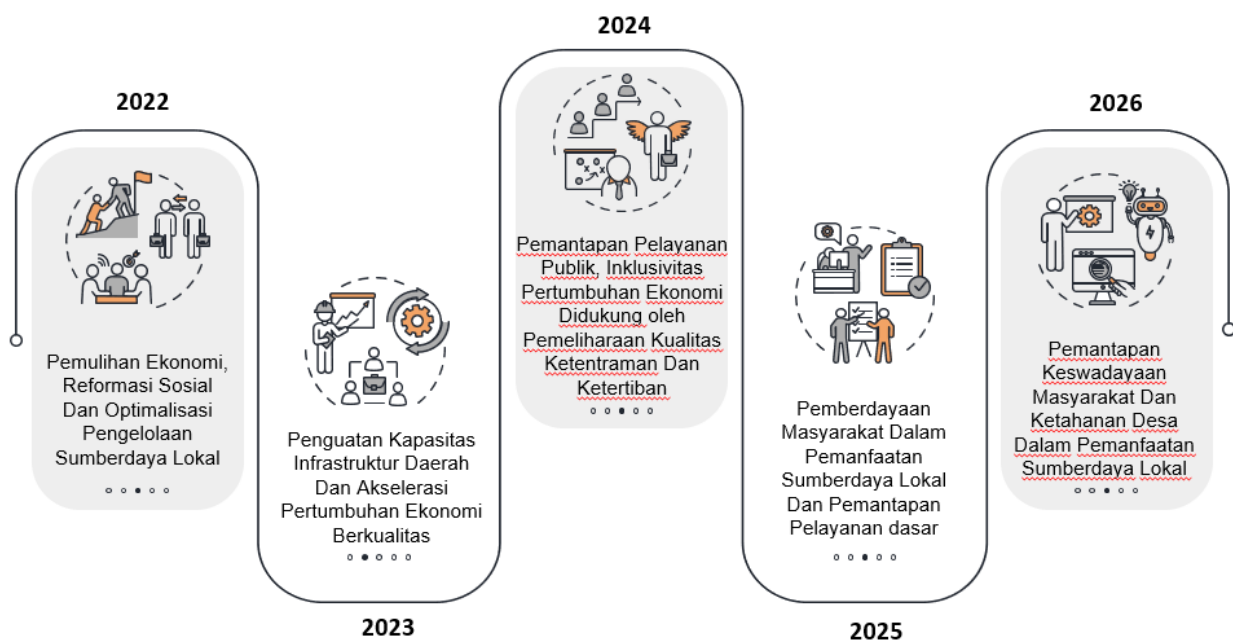
Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inherent tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi.

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritas kebijakan tersebut bukan berarti program pembangunan operasional OPD yang tidak menjadi prioritas kebijakan tidak berjalan. Program tersebut tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibandingkan dengan program yang merupakan kebijakan yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah tersebut adalah program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang akan melahirkan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Keterkaitan tema atau fokus pembangunan, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.1
Tema Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2026



Berdasarkan deskripsi tersebut, arah kebijakan sebagaimana dimaksud diterangkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel. 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2022 - 2026

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
Visi : Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan.								
1.	Misi 1 : Memantapkan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Program-Program Pembangunan Guna Menunjang Percepatan Pembangunan Yang Berbasis Pada Nilai Agama Yang Toleran Dan Budaya Lokal							
	Tujuan 1 : Meningkatnya Keswadayaan Dan Kemandirian Masyarakat Dalam Pembangunan	Sasaran 1 : Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Lingkungan dan Sosial Masyarakat	Mengembangkan kerjasama dengan lembaga eksternal dalam fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan ketahanan desa berbasis potensi sumberdaya lokal dan nilai-nilai kebersamaan	Fasilitasi penyadaran keswadayaan dan kemandirian masyarakat lokal	Fasilitasi pengorganisasian masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal	Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi desa	Pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi desa
2.	Misi 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi							
	Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas implementasi (road map) reformasi birokarasi	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur, kualitas perencanaan dan penganggaran, serta kualitas pengawasan diiringi dengan pengembangan transparansi rekrutmen dalam jabatan dan pengembangan e-government	1. Penataan dan penguatan kelembagaan 2. Pengembangan dan implementasi e-government 3. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur	1. Meningkatkan Komitmen pimpinan dan staf dalam implementasi SAKIP di OPD. 2. Meningkatkan komitmen pimpinan dan staf dalam pengelolaan keuangan dari perencanaan sampai dengan pertanggungja waban	Meningkatkan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur	Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik secara konsisten

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
		Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya	Mengembangkan sistem pelayanan yang Andal, Efisien, Responsive, Transparan dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.	Peningkatan inovasi layanan di segala bidang	Peningkatan kualitas layanan publik melalui teknologi informasi.	Pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan publik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan publik	Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik
		Sasaran 4 : Terciptanya Inovasi Layanan Publik dan Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Menciptakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur	Meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi	Penerapan teknologi Informasi elektronik secara terintegrasi untuk mendukung pengembangan good governance antar organisasi di lingkungan pemerintah	Meningkatkan penerapan open government dengan fokus pada publikasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah, pelaporan kinerja instansi pemerintah, dan layanan informasi	Pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi
3.	Misi 3 : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah							
	Tujuan 3 : Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah yang merata dan berkeadilan (inklusif)	Sasaran 5 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Mengembangkan agrobisnis perdesaan melalui revitalisasi perikanan, pertanian dan perkebunan rakyat, meningkatkan kualitas dan nilai tambah komoditi unggulan, meningkatkan aksesibilitas petani terhadap teknologi, meningkatkan kapasitas pelaku usaha dagang kecil, fasilitasi usaha perdagangan konvensional dan non konvensional (e-commerce), penguatan kemitraan antara petani	Peningkatan investasi dan perputaran ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada sektor unggulan pertanian, industri, dan perdagangan berbasis kearifan lokal	Meningkatkan fasilitasi permodalan dan pemasaran bagi usaha mikro dan industri kreatif	Pengintegrasian sektor pertanian, perikanan dan perkebunan melalui sektor pariwisata dan meningkatkan akses pemasaran produk melalui toko online.	Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil usaha perekonomian melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan potensi loka	Peningkatan daya saing dan kompetensi tenaga tenaga

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
			dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran serta pencitraan produk dalam rangka promosi serta menarik investasi agrobisnis, perluasan pertanian organik, revitalisasi pasar tradisional serta penataan kawasan dan diversifikasi produk unggulan dan memperluas kesempatan kerja melalui fasilitasi akses informasi ketenagakerjaan dan meningkatkan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pembinaan					
		Sasaran 6 : Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Melalui Peningkatan Kualitas Aksesibilitas, serta mengupayakan pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan penduduk miskin.	Perluasan jangkauan cakupan pengentasan PMKS baik dari aspek wilayah maupun jenis	Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial	Memperkuat sistem dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kinerja penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di kantong-kantong kemiskinan	Peningkatan kinerja penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di kantong-kantong kemiskinan
		Sasaran 7 : Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah	Percepatan pembangunan infrastruktur terutama penunjang ekonomi dan penunjang sektor unggulan lokal seperti pertanian, perikanan dan pariwisata sebagai penopang utama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian dan pengembangan industri pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan terutama pada kualitas pelayanan angkutan umum dan angkutan pedesaan.	Akselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur kecamatan luar kota	Akselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur kecamatan luar kota	Akselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur kecamatan luar kota

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
4.	Misi 4 : Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif							
	Tujuan 4 : Meningkatkan daya saing SDM daerah	Sasaran 8 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	Meningkatkan akses layanan pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga kependidikan yang berkualitas dan berdaya saing yang tidak hanya bertumpu terhadap Pendidikan formal juga fokus pada Pendidikan non formal melalui penanaman dan penguatan pendidikan karakter dan berfokus terhadap menciptakan sumber daya manusia yang kreatif	Peningkatan moralitas dan karakter peserta didik dan tenaga kependidikan dengan merancang dan menerapkan integrasi nilai-nilai moral dan karakter dalam proses belajar mengajar	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Non formal	Meningkatkan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Akselerasi implementasi program dan kebijakan termasuk diseminasi praktik-praktik baik untuk menjangkau yang belum terjangkau	Pemantapan dan reviu kapasitas kelembagaan dalam perencanaan Pendidikan di semua jenjang
		Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan baik dalam Preventif , Represif, maupun Kuratif melalui Penyediaan Sarana, Prasarana dan Tenaga Medis Berkualitas	Meningkatkan sarana prasarana Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan	Menjalin kemitraan, dunia usaha, ormas dan LSM untuk berkontribusi penyelesaian masalah kesehatan	Meningkatkan promosi komunikasi, informasi dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat	Akselerasi pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh kecamatan	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh kecamatan
		Sasaran 10 : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan penguatan sektor strategis	Pemberdayaan masyarakat dalam Pengembangan usaha pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan serta sektor potensial	Pemberdayaan masyarakat dalam Pengembangan usaha pengolahan hasil produksi pertanian dan	Pemberdayaan masyarakat dalam Pengembangan usaha pengolahan hasil produksi pertanian dan	Pemberdayaan masyarakat dalam Pengembangan usaha pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan serta sektor potensial	Pemerataan tenaga medis di desa-desa terpencil

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
			Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.	lainnya skala kecil dan menengah	perikanan serta sektor potensial lainnya skala kecil dan menengah	perikanan serta sektor potensial lainnya skala kecil dan menengah	lainnya skala kecil dan menengah	lainnya skala kecil dan menengah
		Sasaran 11 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pentingnya perspektif pemberdayaan gender dan implementasinya dalam berbagai bidang pembangunan termasuk pencapaian kabupaten layak anak serta peningkatan layanan publik bagi penyandang disabilitas	Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dalam dunia usaha dan lembaga masyarakat	Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak	Meningkatkan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan anak (PUG dan PUHA)	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan anak (PUG dan PUHA)
5.	Misi 5 : Meningkatkan tata kelola sumberdaya alam berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan							
	Tujuan 5 : Daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Sasaran 12 : Kepatuhan Terhadap RTRW	Meningkatkan koordinasi penataan ruang daerah, Meningkatkan pengelolaan SDA LH sesuai daya dukung daya tampung serta Meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan penanganan bencana baik fisik maupun sosial.	1. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam penegakan hukum terhadap pemanfaatan jasa lingkungan dan ketaatan pelaksanaan pembangunan rendah karbon 2. Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar daerah aliran sungai (DAS).	1. Pencanaan gerakan Go Green dan meningkatkan afirmasi pemerintah terhadap upaya lingkungan sehat. 2. Peningkatan ketersediaan lahan 3. Penurunan pelanggaran perijinan tata ruang 4. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) 5. Peningkatan peran serta masyarakat/ swasta.	1. Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dan persampahan 2. Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon	Pemantauan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian degradasi SDA	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam konservasi SDA dan LH.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Mengingat tiap-tiap arah kebijakan melekat pada masing-masing strategi, maka secara tidak langsung perumusan horizon waktu berdasarkan strategi sama saja dengan menggunakan perspektif arah kebijakan.

6.3 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Tahapan ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Bupati terpilih dalam 5 (lima) tahun. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam kegiatan atau program sesuai yang datur kepmendagri 050-3708 tahun 2020, atau kedalam kebijakan umum maupun strategis. Jika bunyi janji Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada pada level output, maka akan diterjemahkan kedalam kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan kedalam kebijakan umum maupun strategis. Pernyataan ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:

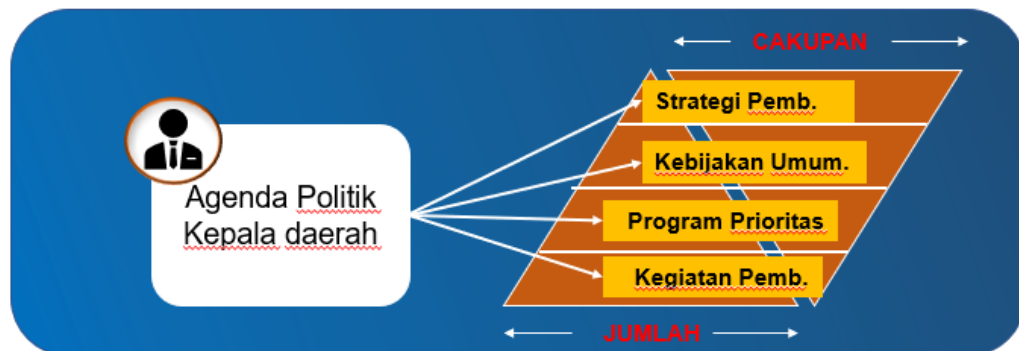
Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, berikut arah kebijakan tahunan yang dituangkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan:

Tabel 6.3.
Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	
	Prioritas Karena Wajib dengan Sendirinya	Prioritas Pendukung Strategi Pembangunan
Tahun 2022 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial Dan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Lokal.	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pelayanan Umum 4. Urusan Pemerintahan	Melengkapi sarana dan prasarana aparatur dan system pendukung layanan dasar pemerintahan hingga ke desa/kelurahan.
		Mempercepat agenda pembangunan infrastruktur dasar yang mempunyai daya ungkit perekonomian.
		Pemberdayaan kelompok usaha dan pelaku ekonomi kreatif.
		Infrastruktur Sistem Informasi Sosial Dalam Penguatan City Branding Pangkajene dan Kepulauan. Dan Pemanfaatan teknologi informasi Digital dalam penanganan permasalahan dan isu-isu strategis.
		Perencanaan Akses Destinasi Pariwisata Unggulan.
Tahun 2023 Penguatan Kapasitas Infrastruktur Daerah Dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pelayanan Umum 4. Urusan Pemerintahan	Infrastruktur Aksesibilitas antar Kawasan pedesaan dan pertanian
		Penguatan kelompok usaha dalam rangka membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal yang mendukung ekonomi unggulan kabupaten.
		Peningkatan Investasi untuk mendorong tumbuhnya peluang kerja.
		Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan
		Perluasan kesempatan kerja yang didukung oleh peningkatan daya saing tenaga kerja.
		Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan serta peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan.
Tahun 2024 Pemantapan Pelayanan Publik, Pengembangan Iklim Demokrasi Dan Pemeliharaan Kualitas Ketentraman Dan Ketertiban	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pelayanan Umum 4. Urusan Pemerintahan	Mempercepat kemudahan investasi pembangunan berorientasi pada sector unggulan daerah
		Menjalankan system inovasi daerah untuk produk unggulan hingga ke wilayah pedesaan dan kelurahan
		Penguatan Kerjasama pemerintah dan swasta
		Pemberdayaan kelompok usaha dan pelaku ekonomi kreatif
		Pengembangan dan penguatan pasar untuk produk pertanian yang integratif dengan pariwisata

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	
	Prioritas Karena Wajib dengan Sendirinya	Prioritas Pendukung Strategi Pembangunan
Tahun 2025 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dan Pemantapan Pelayanan Dasar.	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pelayanan Umum 4. Urusan Pemerintahan	Penguatan produktifitas pertanian dan perikanan dan produk olahan turunan Pengembangan dan pemasaran produk unggulan kabupaten Pengembangan pelaku usaha berbasis pemberdayaan masyarakat Mempermudah akses modal Membangun keterpaduan antar wilayah untuk pengembangan pariwisata dan pertanian.
Tahun 2026 Pemantapan Keswadayaan masyarakat dan ketahanan desa dalam pemanfaatan sumberdaya lokal	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pelayanan Umum 4. Urusan Pemerintahan	Memantapkan system terintegratif perekonomian berbasis potensi unggulan daerah sampai kelevel Desa/Kel Membangun alternatif industri hasil pertanian, perikanan dan perkebunan Membangun keberlanjutan pengendalian pembangunan unggulan Memperluas pasar dan produk olahan hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan pariwisata Menjamin system pasar yang berorientasi pada masyarakat kelas bawah

Gambar 6.2
Ilustrasi Transformasi Agneda Politik Kepala Daerah



Berdasarkan keterangan tersebut diatas, beserta ilustrasi yang digambarkan diatas, maka dijabarkan program-program prioritas pembangunan daerah melalui janji-janji kampanye Bupati terpilih dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk periode 2021-2026, maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Aksesibilitas Dan Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
2. Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

3. Pembangunan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar;
4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi;
5. Pembangunan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Untuk Meningkatkan Ketahanan Bencana;
6. Pengembangan SDM Yang Berkualitas Dan Pemberdayaan Berbasis Peningkatan Karakter Serta Budaya Masyarakat Dalam Rangka Menjaga Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Menciptakan Stabilitas Sosial Dan Politik;
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Teknologi Informasi Serta Inovasi Sistem Pemerintahan Yang Terintegratif Dalam Proses Bisnis Di Semua Level Pemerintahan.

Tabel 6.4.

Kesesuaian Prioritas Pembangunan dengan Misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan		Misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	
1.	Peningkatan Aksesibilitas Dan Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;	Misi 4	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif
2.	Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat	Misi 3	Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah
3.	Pembangunan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar;		
4.	Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi		
5.	Pembangunan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Untuk Meningkatkan Ketahanan Bencana;	Misi 5	Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan
6.	Pengembangan SDM Yang Berkualitas Dan Pemberdayaan Berbasis Peningkatan Karakter Serta Budaya Masyarakat Dalam Rangka Menjaga Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Menciptakan Stabilitas Sosial Dan Politik;	Misi 1	Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya lokal
7.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Teknologi Informasi Serta Inovasi Sistem Pemerintahan Yang Terintegratif Dalam Proses Bisnis Di Semua Level Pemerintahan	Misi 2	Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi

6.4 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perumusan Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Program Pembangunan Daerah juga dijabarkan dari program prioritas yang ditawarkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Yusran Lalogau, SP, M.Si dan Syahban Sammana, SH pada saat proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), yang merupakan bagian dari Visi, Misi, dan Program KDH yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan Visi dan Misi yang disampaikan oleh Bupati terdapat 10 (Dasacita) Pangkajene dan Kepulauan Hebat yang akan menjadi arahan dalam menetapkan program prioritas, yaitu :

Tabel 6.5.
Integrasi Program KDH dan Wakil KDH Terpilih ke Dalam Program Pembangunan Daerah

PROGRAM STRATEGIS KEPALA DAERAH	DEFENISI PROGRAM PRIORITAS SESUAI KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020
PANGKEP KUAT	
Pelaksanaan Meritokrasi	Program Kepegawaian Daerah
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN dan Honorer	
Government Digital	Program Informasi dan Komunikasi Publik Program Aplikasi Informatika
Pengembangan Kualitas Pelayanan Publik dan Etika Publik	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Program Informasi Dan Komunikasi Publik Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
PANGKEP MAJU	
Perencanaan Tata ruang Pangkajene dan Kepulauan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Pengembangan Kawasan kota baru	Program Pengembangan Permukiman
Optimalisasi dan pengembangan pasar, serta pembangunan terminal BBM pulau	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan
Peremajaan dan rehabilitasi kampung, serta bedah rumah	Program kawasan Pemukiman
Pengembangan RTH dan RPTRA (Ruang Publik Terbuka Ramah Anak) dan Pembangunan Gudang logistic pulau	Program Pengelolaan Keanejaragaman hayati (KEHATI) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
PANGKEP CERDAS	
Peningkatan Kesra Guru Dan tenaga pendidik serta Honorer	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan Pendidikan formal dan non formal	Program Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Hebat dan gratis pakaian Seragam	
Beasiswa Prasejahtera dan siswa pulau, serta Kartu Pangkajene dan Kepulauan Cerdas	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
PANGKEP BERPRESTASI	
Pertukaran Pemuda Berprestasi	Program pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaaan
Penciptaan dan Pembinaan Wirausaha Muda dan UKM	Program Pengembangan UMKM
Pembangunan Rumah Siap Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas tenaga kerja
Pembangunan Sport Centre dan Gelanggang Olah Raga, Serta Time Sport	Program Penataan Bangunan Gedung
Penguatan Organisasi Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

PROGRAM STRATEGIS KEPALA DAERAH	DEFENISI PROGRAM PRIORITAS SESUAI KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020
PANGKEP SEHAT	
Peningkatan Status Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Dokter Siaga	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan
Satgas Tanggap Kesehatan (Home Visite)	
Gerakan Bersih Lingkungan dan Pembangunan Apotik Pulau	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman
Sarana Rumah Santai Hebat untuk Isoman pasien Covid-19	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
PANGKEP BERBUDAYA	
Pelestarian cagar budaya, dan situs sejarah serta penguatan kelembagaan adat	Program Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya
Penyediaan SIM-Cabud	
Wisata Jelajah kampung budaya	Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata
Festival Budaya dan seni	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
PANGKEP PEDULI	
Pengerusetamaan peran perempuan dalam pemerintahan dan politik	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Rumah Kreatif Perempuan	
Pelibatan Disabilitas dalam pengambilan keputusan sebagai agen perubahan	Program Pemberdayaan Sosial
Memerangi Diskriminasi Disabilitas	
Beasiswa untuk anak disabilitas dan kesempatan kerja khusus disabilitas	Program penempatan Tenaga Kerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
PANGKEP INDAH	
Pembangunan Pintu gerbang batas Kabupaten	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Sport tourism, eco tourism dan pengembangan wisata budaya	Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata
Pengembangan dan Penataan pinggir sungai, dan penataan UKM / PKL	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Penetapan kelender hari Bandeng Nasional	Program Pengembangan Ekonomi Kratif melalui Pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan intelektual
PANGKEP SEJAHTERA	
Kartu Belanja Prasejahtera	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pengembangan Pusat Perdagangan, Industri dan Distribusi	Program perencanaan dan Pembangunan Industri
Pembinaan UKM dan Pembentukan Lembaga Keuangan Masyarakat Desa	Program administasi Pemerintah Desa
Zona Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian
Gerakan Ekonomi Pulau	Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan Program administasi Pemerintah Desa

PROGRAM STRATEGIS KEPALA DAERAH	DEFENISI PROGRAM PRIORITAS SESUAI KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020
PANGKEP RELIGIUS	
Pembentukan Kampung Religius	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Pergelaran Kegiatan Keagamaan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
Pembangunan Satu Sekolah Satu Musholah	Program Pengelolaan Pendidikan
Peningkatan Kesejahteraan Guru mengaji, Iman Kampung dan Pemandi Jenazah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat Program Koodinasi Ketentraman dan ketertiban Umum

Selain itu, berdasarkan arahan Permendagri 86 Tahun 2017, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan, antara lain:

- 1) Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Pencapaian SDGs.
- 3) Pengentasan Kemiskinan.
- 4) Pencapaian NSPK dan SPM.
- 5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Proyek prioritas strategis daerah merupakan upaya menjawab isu-isu pembangunan daerah melalui pelaksanaan pembangunan, khususnya pada kegiatan yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek prioritas strategis daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dimaksudkan untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional melalui sinergitas perencanaan pembangunan nasional dan daerah dengan menerapkan prinsip kolaborasi sumber pendanaan yaitu APBN, APBD, KPBU, dan Swasta. Salah satu contoh pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah dari sisi peningkatan kualitas infrastruktur daerah melalui program pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Proyek prioritas strategis daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan sinergitas antara arahan pembangunan kewilayahan dan proyek prioritas nasional (Major Project) dengan prioritas pembangunan daerah yang disajikan berdasarkan sasaran misi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026. Pelaksanaan proyek prioritas strategis daerah, indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dan RKPD dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan guna memastikan prioritas pembangunan dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Daftar prioritas pembangunan daerah beserta sumber pendanaan dan tahun pelaksanaan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.6.
Rencana Proyek Prioritas Strategis Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2022 - 2026

No	Sasaran Pembangunan Dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Sumber Anggaran				KPB	Tahun Pelaksanaan
		APBD	APBD PROVINSI	APBN	SWASTA / BUMN		
1.	Meningkatnya keswadayaan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan						
	Pembangunan Desa Digital (P3PD)			√			2022-2026
	Pembangunan desa wisata			√			2022-2026
	Penetapan Batas Desa			√			2022-2026
	BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa			√			2022-2026
	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional			√			2022-2026
	Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)			√			2022-2026
	Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa			√			2022-2026
	Pengendalian Penggunaan Dana Desa			√			2022-2026
	Pengembangan Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes			√			2022-2026
	Pengadaan dan rehabilitasi Jalan Desa	√					2022-2026
	Kawasan Pemukiman dengan “Peremajaan Kampung	√					2022-2026
	Pengembangan potensi sumberdaya alam pedesaan	√					2022-2026
2.	Terwujudnya Masyarakat agamais yang toleran, tentram, tertib, dan patuh pada norma hukum						
	Wisata Jelajah Kampung	√					2022-2026
	Penetapan desa wisata, desa mandiri dan desa religius	√		√	√		2022-2026
	Pembangunan kampung Religius	√			√		2022-2026
3.	Berkembangnya kebudayaan daerah						
	Pembangunan Sistem Informasi Destinasi dan Cagar Budaya	√				√	2022-2026
	Penguatan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	√			√		2022-2026
4.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah						
	Optimalisasi Website semua OPD dan kerjasama dengan Media	√			√		2022-2026
	Kerjasama dengan TPI Paotere dengan Badan Pendapatan Daerah untuk hasil perikanan	√	√				2022-2026
	Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Plihan bagi Jabatan Administrasi	√					2022-2026
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	√					2022-2026
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya						
	Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	√		√			2022-2026

No	Sasaran Pembangunan Dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Sumber Anggaran				KPB	Tahun Pelaksanaan
		APBD	APBD PROVINSI	APBN	SWASTA / BUMN		
	Pengadaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi (Smart City)	√			√	√	2022-2026
	Optimalisasi penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	√		√			2022-2026
	Penarikan pajak dengan system menjemput bola	√					2022-2026
6.	Meningkatnya efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan						
	Bank Data Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.	√					2022-2026
	pemetaan pajak untuk meningkatkan potensi Pajak	√					2022-2026
	Rancangan Potensi Pendapatan Sebagai Kebijakan Publik dengan melampirkan target yang akan dicapai	√					2022-2026
7.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor perekonomian unggulan daerah						
	Peningkatan Riset dan kualitas SDM untuk pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif	√			√		2022-2026
	Pelestarian dan pemajuan warisan budaya serta seni budaya daerah	√	√		√		2022-2026
	Pelestarian cagar budaya	√	√		√		2022-2026
	Program Pengelolaan Ruang Laut			√			2022-2026
	Kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; kawasan perkebunan; Kawasan pertambangan dan energi; kawasan industri dan agroindustri; kawasan peternakan; Kawasan perikanan	√	√				2022-2026
	Pembangunan TPI	√		√		√	2022-2026
	Pembangunan industri pengolahan komoditas unggulan pertanian dan perkebunan	√	√				2022-2026
	Peningkatan kualitas SDM Nelayan	√					2022-2026
	Pemberdayaan kelompok pelaku usaha perikanan	√					2022-2026
	Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana pembudidaya (ikan, udang dan rumput laut)	√					2022-2026
	Peningkatan kualitas SDM Pembudidaya	√	√				2022-2026
	Grand Desain Pengembangan Pertanian Berbasis Komoditi	√	√				2022-2026
	Grand Desain Pengembangan Peternakan	√	√				2022-2026
	Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK)	√					2022-2026
	Rumah Siap Kerja	√					2022-2026
	Penerbitan izin Lembaga tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam daerah kabupaten/kota dan pengelolaan informasi pasar kerja	√					2022-2026
	Pendataan Serapan Tamatan SMK dalam Dunia Kerja, dan Kerjasama dengan Industri	√	√		√		2022-2026

No	Sasaran Pembangunan Dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Sumber Anggaran				KPB	Tahun Pelaksanaan
		APBD	APBD PROVINSI	APBN	SWASTA / BUMN		
	Pengembangan Komoditi Unggulan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	√	√				2022-2026
	Pengembangan Garam Dan Jeruk	√	√				2022-2026
	Pengembangan Pertanian dan Perikanan Di KabupatenPangkajene dan Kepulauan	√	√	√	√		2022-2026
8.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah						
	Pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil (ARSINUM) Berbasis Masyarakat		√				2022-2026
	Penanganan kawasan kumuh dan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa/Milik	√	√				2022-2026
	Pengembangan Wisata Kuliner di KabupatenPangkajene dan Kepulauan	√					2022-2026
	Penambahan fungsi Terminal kota menjadi area sentra UKM dan stasiun foods	√			√		2022-2026
	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang gizi seimbang	√	√				2022-2026
	Subsidi Sembako Pulau	√					2022-2026
	Peta Kerawanan Pangan	√					2022-2026
	Toko Tani Indonesia	√					2022-2026
	Pojok Pangan Lokal (PPL)	√					2022-2026
	Export Kripik Pisang (Lahan 1000 Ha)	√			√		2022-2026
	Efektifitas Pola Tanam Komoditi	√					2022-2026
	Validasi data penerima manfaat dan PMKS	√		√	√		2022-2026
	Peningkatan kesiapsiagaan reaksi cepat penanganan PMKS	√					2022-2026
	Pemberian Perlindungan jaminan kesehatan PBI-APBN dan PB-Pemda (KIS)	√	√	√			2022-2026
	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan PMKS	√					2022-2026
	Peningkatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang Disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar serta Gelandangan dan Pengemis dan PMKS lainnya	√	√	√	√		2022-2026
	Kredit Usaha Tanpa Agunan dan Bunga (KUTAB)	√					2022-2026
	Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat	√	√	√	√		2022-2026
9.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah						
	Pembangunan jalur KA Makassar-Parepare		√			√	2022-2026
	Pengembangan Sumber daya air minum berkelanjutan berbasis masyarakat	√	√	√			2022-2026

No	Sasaran Pembangunan Dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Sumber Anggaran				KPB	Tahun Pelaksanaan
		APBD	APBD PROVINSI	APBN	SWASTA / BUMN		
	Pedestrian Kota Pangkajene	√	√	√		√	2022-2026
	Pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan destinasi pariwisata		√				2022-2026
	Pembangunan Fasilitas infrastruktur umum di kawasan Geopark Pangkajene dan Kepulauan Maros	√	√	√			2022-2026
	Grand desain rencana induk kepariwisataan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	√					2022-2026
	Peningkatan Fungsi dan peranan dermaga sebagai dermaga tangkap atau parkir	√					2022-2026
	Perbaikan jalan kabupaten untuk mendukung Pangkajene dan Kepulauan Maju	√	√	√			2022-2026
	Inventarisasi kelayakan dan pemeliharaan jembatan						2022-2026
	Inventarisasi kewenangan dan pemeliharaan pengairan saluran irigasi area pertanian	√	√				2022-2026
	Perbaikan sistem dan fungsi drainase area perkotaan	√					2022-2026
	Pemasangan tanggul dan bronjong pada area DAS	√	√	√			2022-2026
	Sarana Penghubung Terminal Stasiun Kereta Api ke Kota Pangkajene dan Kepulauan	√	√	√			2022-2026
	Jalan Alternatif Sepanjang Pesisir Pangkajene dan Kepulauan	√	√	√			2022-2026
	Grand Desain Waduk Tunggu (Penanggulungan Banjir)	√	√	√	√		2022-2026
	Grand Desain Tata Kota dan Kawasan Pemukiman Baru	√	√	√			2022-2026
	Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana sumber air baku untuk air minum (Tagari)	√	√	√			2022-2026
	Penambahan dan peningkatan titik penerangan jalan	√	√		√	√	2022-2026
	Pengadaan sumber listrik dari tenaga surya di wilayah kepulauan	√	√	√	√	√	2022-2026
	Pengadaan lahan untuk perumahan bagi ASN/KORPRI yang layak huni DP 0%	√	√				2022-2026
	Pengembangan Perumahan dengan "Bedah Rumah" bagi rumah berdampak bencana	√					2022-2026
	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan "peningkatan infrastruktur	√	√	√			2022-2026
	Pengadaan regulasi pengembangan pemukiman disertai dengan penyerahan Fasum dan Fasos (30 % Kawasan Perumahan)	√	√	√			2022-2026
	Pembuatan city branding	√	√	√	√	√	2022-2026
	Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	√	√		√		2022-2026

No	Sasaran Pembangunan Dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Sumber Anggaran				KPBU	Tahun Pelaksanaan
		APBD	APBD PROVINSI	APBN	SWASTA / BUMN		
	Grand desain kawasan industri maritim	√	√	√			2022-2026
	Peningkatan kualitas SDM Nelayan	√					2022-2026
	Pembangunan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	√	√	√	√		2022-2026
10.	Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu Pendidikan						
	Pengadaan grand desain gelanggang remaja dalam mendukung Pangkajene dan Kepulauan berprestasi	√	√		√		2022-2026
	Pelaksanaan POPSI (Pekan olah raga dan seni)	√					2022-2026
	Penguatan kelembagaan dengan KONI KabupatenPangkajene dan Kepulauan (Komite Olahraga Nasional Indonesia	√	√				2022-2026
	Penguatan organisasi kepemudaan	√					2022-2026
	Peningkatan Aksesibilitas Dan Pemerataan Kualitas Pendidikan	√			√		2022-2026
11.	Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan Kesehatan						
	Penanganan stunting	√	√				2022-2026
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	√	√	√			2022-2026
	Peningkatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	√	√	√			2022-2026
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan melalui smile service	√	√	√			2022-2026
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	√	√	√			2022-2026
	Peningkatan Aksesibilitas Dan Pemerataan Kualitas Kesehatan	√	√	√			2022-2026
12.	Meningkatnya daya beli masyarakat						
	Intesifikasi Produksi Pertanian	√	√				2022-2026
	Pengembangan Desa Jeruk	√			√		2022-2026
	Peningkatan Produksi Daging Ternak Besar dan Kecil	√					2022-2026
13.	Meningkatnya kesetaraan gender						
	Pengendalian tingginya tingkat kelahiran di wilayah kepulauan	√			√		2022-2026
14.	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan kepatuhan terhadap RTRW						
	Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu					√	2022-2026
	Pengadaan dan pemasangan apar pada gedung-gedung pemerintah dan swasta	√			√		2022-2026
	Pemetaan daerah rawan bencana kebakaran	√	√				2022-2026
	Peningkatan Ketrampilan dan Keselamatan Petugas Pemadam Kebakaran	√			√		2022-2026
	Pengadaan sarana dan prasarana pos kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran di tiap Kecamatan	√			√		2022-2026
	Penguatan mitigasi bencana	√			√		2022-2026
	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	√			√		2022-2026

No	Sasaran Pembangunan Dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Sumber Anggaran				KPBU	Tahun Pelaksanaan
		APBD	APBD PROVINSI	APBN	SWASTA / BUMN		
	Penguatan sistem tata kelola penanganan bencana	√			√		2022-2026
	Peningkatan kualitas SDM dalam penanganan bencana	√			√		2022-2026
	Reaksi cepat pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana.	√			√		2022-2026
	Penghijauan dan normalisasi DAS	√					2022-2026
	Satu Pohon Produktif untuk Satu Rumah	√			√		2022-2026
	Satu Desa Satu Bank Sampah	√			√		2022-2026
	Pembentukan UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup	√					2022-2026
	Penambahan Armada Sampah	√			√	√	2022-2026
	Pembangunan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Untuk Meningkatkan Ketahanan Bencana	√	√				2022-2026

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMPD-P Prov. Sul-Sel 2018-2023 diolah 2021

Perumusan program pembangunan daerah bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah, dimana secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah di seluruh urusan (wajib dan pilihan). Berdasarkan rumusan permasalahan maka disusun program prioritas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan.

Perhitungan pagu program dilakukan dengan menentukan output dari setiap kegiatan pada program, menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program selanjutnya menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Program prioritas pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif disajikan pada Tabel 6.7.

Tabel 6.7
Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcame)	Awal RPJMD 2020	Asumsi Capaian		TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
MISI 1	Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya lokal																	
	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya lokal.																	
	Sasaran 1 : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Lingkungan dan Sosial Masyarakat																	
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang menjalin kerjasama	100%	100%	192.140.000	54%	27.600.000	69%	21.000.000	79%	25.500.000	86%	38.400.000	93%	75.000.000	93%	154.400.000	DPMD
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LPM difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	100%	100%	1.008.976.000	92%	835.000.000	100%	880.000.000	93%	935.000.000	93%	985.000.000	93%	1.035.000.000	93%	4.870.000.000	DPMD
	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase Desa yang diFasilitas	100%	100%	3.352.104.500	100%	3.226.976.000	100%	578.489.000	100%	527.123.000	100%	445.490.000	100%	703.173.000	100%	5.481.251.000	DPMD
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	39.806.472.702	100%	40.600.090.095	100%	39.806.472.702	100%	39.936.337.422	100%	40.000.637.862	100%	40.216.101.426	100%	200.559.639.507	Kecamatan

Misi	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcame)	Awal RPJMD 2020	Asumsi Capaian		TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	5.811.688.999	100%	4.220.532.000	100%	4.220.937.000	100%	4.191.901.500	100%	4.201.286.500	100%	5.003.626.500	100%	21.838.283.500	Semua Kecamatan
	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik social	Persentase pencegahan potensi dan penangann konflik	100%	100%	897.339.000	65%	1.130.000.000	70%	1.180.000.000	80%	1.210.000.000	90%	1.600.000.000	80%	1.674.998.300	90%	6.794.998.300	Bakesbangpol
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengelola, Pelestarian dan Pembinaan Kebudayaan Daerah	100%	0%	0	20%	99.999.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	100%	499.999.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	0%	0	20%	50.000.100	20%	60.000.000	20%	60.000.000	20%	60.000.000	20%	60.000.000	20%	290.000.100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MISI 2	Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi																	
	Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas implementasi (road map) reformasi birokrasi																	
	Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	B	643.248.144.248	B	713.541.682.371	B	761.470.575.416	BB	772.827.027.806	BB	801.741.736.069	A	840.574.706.266	A	4.533.403.872.176	Semua Perangkat Daerah
		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Misi	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcame)	Awal RPJMD 2020	Asumsi Capaian		TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	165.383.753.503	100%	175.437.565.420	100%	180.429.360.878	100%	187.869.520.837	100%	199.150.260.542	100%	184.898.594.073	100%	927.785.301.750	BPKD
	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan pendapatan daerah	90%	95%	2.073.321.000	95%	1.838.100.000	95%	1.678.934.000	95%	1.762.425.000	95%	1.953.000.000	95%	2.499.785.521	100%	9.732.244.521	BAPENDA
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd & APBD Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	250.000.000	100%	1.785.000.000	100%	1.481.788.000	100%	2.740.000.000	100%	2.577.000.000	100%	3.081.500.000	100%	11.665.288.000	Bappelitbag da
	Program kepegawaian daerah	Persentase pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah	100%	0	0	100%	773.364.282	100%	1.207.720.000	100%	1.208.270.000	100%	1.258.270.000	100%	1.265.770.000	100%	5.713.394.282	BKPSDM

Misi	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Awal RPJMD 2020	Asumsi Capaian		TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	persentase Menurunan temuan inspektorat tiap tahun dibanding tahun sebelumnya	100%	97%	3.415.488.000	95%	2.981.257.000	90%	2.777.404.176	85%	3.073.004.176	80%	3.177.404.176	75%	3.247.404.176	75%	15.256.473.704	Inspektorat
	Program aplikasi informatika	Persentase peningkatan Aplikasi Informatika yang digunakan	100%	100%	637.477.302	100%	1.400.000.000	100%	1.716.500.000	100%	1.792.500.000	100%	2.019.313.573	100%	1.990.000.000	100%	8.918.313.573	DISKOMINF O STATISTIK DAN PERSANDI AN
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100%	100%	11.278.526.500	100%	11.779.985.600	100%	13.209.206.000	100%	13.299.816.000	100%	13.538.393.289	100%	14.366.483.500	100%	66.193.884.389	SET. DPRD
	Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya																	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS Terhadap	50%	0,07%	39.605.548.671	0,07%	193.050.541.699	0,07%	198.033.772.105	0,06%	205.723.493.010	0,06%	212.400.611.900	0,06%	218.124.559.350	0,05%	1.027.332.978.064	Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan dan non perizinan yang tepat waktu	94%	94%	22.948.000	94%	66.338.000	94%	128.300.000	94%	134.300.000	94%	157.300.000	100%	175.300.000	100%	661.538.000	DPM-PTSP

Misi	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcame)	Awal RPJMD 2020	Asumsi Capaian		TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pencatatan Sipil	Presentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	91,95%	91,95%	153.070.000	92%	265.000.000	92,20%	270.000.000	92,50 %	280.000.000	98,33 %	300.000.000	98,33%	320.000.000	92,75 %	1.435.000.000	Dinas Catatan Sipil
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Publik yang dilimpahkan ke kecamatan	100%	100%	2.419.193.000	100%	2.417.217.000	100%	2.464.200.100	100%	2.495.814.570	100%	2.541.344.360	100%	2.598.725.961	100%	12.542.927.468	Kecamatan
	Sasaran 4 : Terciptanya Inovasi Layanan Publik dan Penggunaan Sistem Informasi Daerah																	
	Program informasi dan komunikasi publik	Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	100%	1.850.538.200	100%	2.431.978.000	100%	575.500.000	100%	615.500.000	100%	710.000.000	100%	843.487.875	100%	5.176.465.875	DISKOMINF O STATISTIK DAN PERSANDI AN
	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	100%	205.982.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	355.000.000	100%	1.555.000.000	DISKOMINF O STATISTIK DAN PERSANDI AN
MISI 3	Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah																	
	Tujuan 3 : Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Yang Merata Dan Berkeadilan (Inklusif)																	
	Sasaran 5 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja																	

Misi	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Awal RPJMD 2020	Asumsi Capaian		TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Peningkatan Ekonomi Kreatif dan Perlindungan Hak cipta	100%	0,86%	40.000.000	22,07%	191.000.000	21,21%	263.000.000	18,62 %	263.000.000	18,62 %	263.000.000	18,62%	263.000.000	18,62 %	1.243.000.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
	Program pengembangansu mber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	6,58%	409.676.284	15,35%	725.000.000	15,35%	885.000.000	15,35 %	905.000.000	15,35 %	925.000.000	32,02%	945.000.000	32,02 %	4.385.000.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Produksi Tanaman Pangan			1.432.001.950	0,3	236.975.450	0,3	654.662.500	0,3	857.477.450	0,3	832.077.450	0,4	877.899.950	1,6	3.459.092.800	Dinas Pertanian
		Persentase Produksi Hortikultura				5		5		5		5		25				
		Persentase Produksi Perkebunan				0,34		0,3		0,3		0,3		1,7				
		Persentase Produksi Hasil Ternak				19		19		20		21		100				
		Persentase Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Peternakan				0		0		20		20		0		40		
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	68,97%	148.000.000	72,41%	101.700.000	75,86%	101.700.000	79,31 %	48.000.000	82,76 %	48.000.000	82,76%	9.500.000	100%	308.900.000	KOPERIND AG

Misi	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Awal RPJMD 2020	Asumsi Capaian		TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Ekspor Bersih Pedagang	100%	100%	10.840.000	16%	35.000.000	35%	35.000.000	49%	11.000.000	51%	11.000.000	52%	1.000.000	52%	93.000.000	KOPERIND AG
	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase Pertambahan Jumlah Indutri Kecil dan Menengah di Kabupaten	100%	100%	514.460.854	20%	493.913.500	40%	513.913.500	60%	565.000.000	80%	585.000.000	100%	560.000.000	100%	2.717.827.000	KOPERIND AG
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pesentase Peningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100%	-	0	100%	63.599.000	100%	100.000.000	100%	50.000.000	100%	52.000.000	100%	42.000.000	100%	307.599.000	DPMPSTP
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	18.094,40		0	20.000 Ton	1.993.000.000	22.000 Ton	1.458.500.000	23.000 Ton	2.334.624.000	24.000 Ton	2.500.546.500	25.000 Ton	3.285.546.500	25.000 Ton	9.071.670.500	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	442.605,70		0	450.000 Ton	6.325.016.409	460.000 Ton	7.564.048.500	470.000 Ton	5.105.084.807	480.000 Ton	6.552.338.000	490.000 Ton	7.802.860.000	2.350.000 Ton	26.797.009.716	Dinas Perikanan
	Sasaran 6 : Meningkatkan taraf hidup masyarakat																	

Misi	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcame)	Awal RPJMD 2020	Asumsi Capaian		TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang diberdayakan	100%	100%	192.483.000	20%	2.322.112.000	40%	2.422.112.000	60%	2.522.112.000	80%	2.637.429.000	85%	2.565.682.000	85%	12.469.447.000	KOPERIND AG
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pemberdayaan social	28,18%	21,18%	459.929.000	28,25%	754.000.000	28,50%	798.000.000	28,75 %	380.000.000	29,00 %	380.000.000	29,25%	380.000.000	29,25 %	2.312.000.000	Dinas Sosial
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	2,10%	2,10%	449.000.000	50%	980.620.000	55%	983.120.000	60%	1.064.963.200	65%	1.041.876.000	75%	1.185.420.000	75%	5.255.999.200	Dinas Ketenagake rjaan
		Tingkat produktivitas tenaga kerja	24%	24%		24%		28%		32%		36%		40%		40%		
	Program hubungan industrial	Persentese perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,61%	21,61%	276.089.800	37,82%	426.810.600	61,49%	583.895.200	40,36 %	633.175.200	49,00 %	638.095.200	49,00%	652.175.300	56,67 %	2.934.151.500	Dinas Ketenagake rjaan
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100%	0	0	100%	24.649.635.677	100%	22.457.625.914	100%	22.410.718.208	100%	25.544.910.218	100%	25.521.057.806	100%	122.658.764.384	SETDA

Misi	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcame)	Awal RPJMD 2020	Asumsi Capaian		TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggua ng Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase pengurangan rumah tidak layak huni	15%	15%	68.750.000	15%	985.270.000	18%	922.500.000	20%	812.500.000	23%	1.182.500.000	25%	1.472.500.000	100%	5.375.270.000	DPKPP
Sasaran 7 : Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah																		
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Luasan Areal Tanam	9%	9%	4.339.185.000	9	4.325.314.550	9	6.544.145.400	10	4.656.874.950	10	5.181.287.000	12	6.679.561.600	49	27.387.183.500	Dinas Pertanian
		Persentase Luasan HMT dan Fasilitas RPH	19%	19%		19%		19%		20%		21%		21		100		
	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya Kualitas dan kapasitas Pengelolaan Pelayaran	23,40%	9%	1.729.654.000	16,18%	1.548.437.100	17,98%	1.508.883.850	20,26 %	1.038.883.850	21,86 %	1.290.883.850	23,64%	1.540.883.850	100%	6.927.972.500	Dinas Perhubunga n
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase luas tanah yang dibebaskan	100%	0	0	100%	2.020.000.000	100%	1.259.400.000	100%	1.284.400.000	100%	1.319.400.000	100%	1.365.400.000	100%	7.248.600.000	DPKPP
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	0	0	74%	29.419.310.000	80%	21.870.785.000	85%	22.793.910.000	90%	24.874.225.000	93%	27.381.579.000	100%	126.339.809.000	DPKPP

Misi	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Awal RPJMD 2020	Asumsi Capaian		TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Menuju Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Pangkep Yang Maju	72,32%	14%	1.837.943.000	1%	2.298.368.301	1%	365.662.000	1%	502.659.000	1%	227.202.000	1%	502.799.000	77,32 %	3.896.690.301	PUTR
	Program Pengembangan Permukiman	Presentase Panjang Jalan Yang Terbangun	53,73%	5882,35	2.265.306.500	1%	1.393.896.000	1%	315.153.000	1%	369.539.000	1%	176.303.700	1%	402.249.000	58,73 %	2.657.140.700	PUTR
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase luas Kawasan yang terlindungi oleh infrastruktur Pengendali Banjir	20,23%	13,90%	9.947.912.000	16,38%	13.809.023.250	16,64%	10.323.295.000	16,90 %	14.499.423.723	17,39 %	14.935.886.193	18,65%	16.293.916.999	18,65 %	69.861.545.165	PUTR
		Persentase Luas Kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi	14,91%	10,25%		21,59%		30,40%		32,65 %		35,47 %		40,08%		40,08 %		
		Persentase luas jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	62,98%	65,69%		68,50%		74,04%		79,18 %		83,42 %		88,56%		88,56 %		

Misi	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcame)	Awal RPJMD 2020	Asumsi Capaian		TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dan jumlah jembatan dalam kondisi baik	100%	76,05%	29.497.100.200	78,03%	24.738.803.650	80,45%	30.753.591.800	82,62 %	30.656.056.900	85,07 %	34.363.210.900	88,17%	41.091.014.900	88,17 %	161.602.678.150	PUTR
MISI 4	Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif																	
	Tujuan 4 : Meningkatkan Daya Saing SDM Daerah																	
	Sasaran 8 : Meningkatkan Aksesibilitas dan mutu Pendidikan																	
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	54,29%	100%	70.320.608.300	100%	87.434.339.600	100%	85.050.959.883	100%	87.183.781.812	100%	91.605.204.819	100%	86.933.876.997	100%	438.208.163.111	Dinas Pendidikan
		Persentase Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	93,09%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		Persentase Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	100%			100%		100%		100%		100%		100%				

Misi	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcame)	Awal RPJMD 2020	Asumsi Capaian		TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggua ng Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Peningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	-	0	4%	7.551.562.400	6%	7.671.263.812	8%	7.714.494.641	10%	7.752.682.631	12%	7.727.029.405	12%	38.417.032.889	Dinas Pendidikan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik	100%	100%	58.724.000	13%	739.775.200	24%	526.868.000	33%	561.811.000	44%	572.967.000	55%	634.105.000	55%	2.887.614.200	DPK
	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase Peningkatan pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan.	100%	100%	1.596.150.000	100%	1.249.981.000	100%	1.050.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.050.000.0000	100%	5.346.150.000	DISPARPO RA
	Sasaran 9: Meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan Kesehatan																	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan	35%	39,80%	440.066.780	40%	510.644.200	41%	249.715.680	42%	226.010.000	43%	239.000.000	44%	246.000.000	44%	1.471.369.880	Dinas Kesehatan
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS peserta KB Aktif	77,70%	-	0	77,72%	3.626.621.000	77,74%	4.714.621.000	77,76 %	4.719.621.000	77,78 %	4.907.196.000	77,80%	5.165.551.000	77,80 %	14.269.835.000	DPPPKBDP PPA
	Sasaran 10 : Meningkatkan daya beli masyarakat																	

Misi	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcame)	Awal RPJMD 2020	Asumsi Capaian		TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggua ng Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang ditingkatkan skala usahanya	100%	100%	85.968.000	20%	157.001.000	40%	157.001.000	60%	157.001.000	80%	157.001.000	85%	157.001.000	85%	785.005.000	KORERIND AG
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,50%	89,50%	776.889.900	90%	1.533.837.502	90,30%	1.492.917.442	90,60 %	1.557.563.796	90,80 %	1.579.654.442	91%	1.660.870.292	91,00 %	7.824.843.474	Dinas Ketapang
	Sasaran 10 : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan																	
	Program pengendalian penduduk	%Cakupan Kampung KB	48.54%	48.54%		58%	142.150.000	67,96%	115.000.000	77,67 %	118.000.000	87,37 %	155.000.000	97%	230.000.000	97,09 %	760.150.000	DPPKBDPP PA
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	% Keluarga yang mendapatkan Pemberdayaan Kualitas Keluarga	1,80%	1,80%	32.715.000	1%	153.761.000	2,50%	200.000.000	3%	260.000.000	3,50%	305.000.000	4%	415.000.000	4%	1.333.761.000	DPPPKBDP PPA
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100,00%	100,00%	59.798.000	75%	41.875.000	80,00%	42.000.000	85,00 %	72.914.000	90,00 %	113.000.000	90%	130.000.000	90%	399.789.000	DPPPKBDP PPA
MISI 5	Meningkatkan Tata Kelola Sumberdaya Alam Berdasarkan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Yang Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan																	
	Tujuan 5 : Daya dukung dan daya tampung lingkungang																	
	Sasaran 12 : Kepatuhan Terhadap RTRW																	

Misi	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcame)	Awal RPJMD 2020	Asumsi Capaian		TARGET CAPAIAN										Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	33.044.000	82,42%	415.000.000	80%	280.000.000	78%	240.000.000	77%	205.000.000	76%	155.000.000	66%	1.295.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100%	100%	4.915.000	0,076%	2.622.160.000	0,076%	2.422.160.000	0,076 %	2.450.080.000	0,076 %	2.543.080.000	20%	1.712.160.000	100%	11.749.640.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	100%	100%	4.067.615.000	21%	2.916.293.000	23%	2.919.330.000	24%	2.969.330.000	24%	2.969.330.000	24%	3.059.330.000	24%	14.833.613.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase wilayah yang telah menyusun perencanaan tata ruang	100%		0	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	600.000.000	100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	3.700.000.000	PUPR

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan dalam konteks kemampuan pembiayaan pembangunan daerah berhubungan erat dengan kapasitas riil kemampuan keuangan. Kapasitas riil kemampuan keuangan adalah kemampuan belanja pembangunan yang telah disesuaikan dengan asumsi-asumsi pendapatan yang menjadi dasar proyeksi belanja, serta pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang meliputi komponen belanja tidak langsung berupa belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan partai politik serta belanja tak terduga. Sedangkan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama yang meliputi komponen belanja langsung berupa belanja rutin kebutuhan operasional organisasi perangkat daerah serta belanja pemenuhan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pendanaan dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah. Kapasitas riil kemampuan daerah mengalami pertumbuhan yang sangat positif dalam lima tahun kedepan, hal ini dipengaruhi oleh proyeksi Pendapatan daerah diperkirakan rata-rata tumbuh sebesar 2,8% pertahun, dimana pada tahun 2026 pendapatan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diproyeksi sebesar Rp. 1.653 Triliun, dibanding dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.370 Triliun. Dari sisi belanja, pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 1.444 Triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,51 % jika dibanding dengan tahun 2026 sebesar Rp. 1.648 Triliun. Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut, dapat dirumuskan kerangka pendanaan keuangan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Kerangka pendanaan ini menyajikan hasil penghitungan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah beserta dengan alokasi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2022-2026.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2022-2026

KODE	URAIAN	TAHUN				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI	1.061.545.725.901,00	1.095.407.840.428,00	1.127.811.674.153,00	1.148.716.928.467,00	1.198.394.210.918,50
5.1.1	Belanja Pegawai	655.686.832.952,00	675.964.579.613,00	686.919.560.451,00	708.254.522.664,00	735.098.927.692,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	379.547.236.949,00	390.952.500.815,00	402.081.810.202,00	417.737.649.803,00	440.560.527.226,50
5.1.5	Belanja Hibah	20.798.996.000,00	24.385.000.000,00	34.854.543.500,00	15.568.996.000,00	15.478.996.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.512.660.000,00	4.105.760.000,00	3.955.760.000,00	7.155.760.000,00	7.255.760.000,00
5.2	BELANJA MODAL	214.683.177.737,00	226.642.694.342,00	232.112.011.204,00	249.444.062.303,00	271.864.881.597,50
5.2.1	Belanja modal tanah	1.260.000.000,00	1.559.400.000,00	1.284.400.000,00	1.500.000.000,00	1.650.000.000,00
5.2.2	Belanja modal peralatan dan mesin	65.559.779.275,00	68.076.271.625,00	68.555.050.350,00	72.947.613.325,00	76.134.978.797,50
5.2.3	Belanja modal bangunan dan gedung	65.621.718.056,00	63.568.710.517,00	67.403.321.543,00	78.478.110.359,00	80.171.155.918,00
5.2.4	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	69.717.449.906,00	80.280.624.600,00	81.433.625.811,00	82.213.881.419,00	98.187.845.382,00
5.2.5	Belanja modal aset tetap lainnya	12.524.230.500,00	13.157.687.600,00	13.435.613.500,00	14.304.457.200,00	15.720.901.500,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.250.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.3.1	Belanja tidak terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.250.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	163.311.328.182,00	169.834.645.530,00	177.079.031.373,00	188.278.198.530,00	173.373.951.674,00
5.4.1	Belanja bagi hasil	10.919.961.030,00	11.180.421.330,00	11.437.547.530,00	11.846.442.230,00	12.449.641.230,00
5.4.2	Belanja bantuan Keuangan	152.391.367.152,00	158.654.224.200,00	165.641.483.843,00	176.431.756.300,00	160.924.310.444,00
	JUMLAH BELANJA	1.444.540.231.820,00	1.496.885.180.300,00	1.542.252.716.730,00	1.591.439.189.300,00	1.648.633.044.190,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

7.2. Program Perangkat Daerah

Pagu indikatif merupakan kebutuhan pendanaan pelaksanaan program pembangunan yang dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Dalam RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2026 terdapat program perangkat daerah sebanyak 151 program. Keseluruhan program prioritas pembangunan dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program perangkat daerah, beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan perangkat daerah berdasarkan urusan, selengkapnya disajikan sebagaimana Tabel 7.2

Tabel 7.2
Rencana Program Prioritas Disertai Pendanaan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2022-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	GRAND TOTAL			1.444.540.231.820		1.496.885.180.300		1.542.252.716.730		1.591.439.189.300		1.648.633.044.190		7.723.750.362.340	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			339.175.659.138		350.907.736.633		365.386.829.065		379.244.591.396		398.705.944.874		1.833.420.761.106	
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			83.963.333.109		86.714.263.674		89.991.212.112		93.554.993.753		92.922.946.381		447.146.749.029	
1 1 2	PROGRAM PENGELOLA AN PENDIDIKAN	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisip asi dalam PAUD (SPM)	100%	78.234.339.600	100%	80.950.959.883	100%	84.183.781.812	100%	87.705.204.819	100%	86.933.876.997	100%	418.008.163.111	DISDIK BUD
		Persentase warga negara usia 7- 15 tahun yang berpartisip asi dalam pendidikan Dasar (SPM)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesai kan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisip asi dalam pendidikan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		kesetaraan (SPM)													
1 1 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Peningkatan Penerapan Kurikulum muatan lokal	25,26%	155.000.000	37,89%	155.000.000	50,52%	155.000.000	63,15%	160.066.324	75,78%	170.000.000	75,78%	795.066.324	DISDIK BUD
1 1 4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,91%	5.506.953.530	5,87%	5.541.263.812	7,82%	5.584.494.641	9,78%	5.622.682.631	11,73%	5.747.029.405	11,73%	28.002.424.019	DISDIK BUD
1 1 5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Peningkatan Pengendalian Perizinan Pendidikan	67%	67.039.979	71%	67.039.979	83%	67.935.659	91%	67.039.979	100%	72.039.979	100%	341.095.575	DISDIK BUD
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			189.930.708.504		198.656.654.678		205.707.166.910		212.174.975.721		217.940.863.236		1.024.410.369.049	
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100%	187.154.213.804	100%	196.332.860.998	100%	203.224.078.910	100%	209.649.897.721	100%	215.073.285.236	100%	1.011.434.336.669	Dinas Kesehatan, RS. Batara Siang, RS. Pratama
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100%		100%		100%		100%		100%	100%			
		Persentase bayi baru lahir yang mendapat pelayanan	100%		100%		100%		100%		100%	100%			

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangrehajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		kesehatan(SPM)													
		Persentase balita yang mendapat layanan kesehatan (SPM)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatk an pelayanan kesehatan (SPM)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Warga Negara usia produkti f yang mendapatk an layanan kesehatan (SPM)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatk an layanan kesehatan (SPM)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase warga negara penderita hipertensi yang mendapatk an pelayanan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		kesehatan (SPM)													
		Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatk an layanan kesehatan (SPM)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan (SPM)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Warga Negara terduga tuberculosi s yang mendapatk an layanan kesehatan (SPM)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahk an daya tahan tubuh manusia (Human Immunodef	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		iciency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)													
		Rasio daya Tampung Rumah sakit Terhadap Jumlah Penduduk	0,07%		0,07%		0,07%		0,06%		0,06%		0,05%		
		Persentase rumah sakik yang terakreditasi	50%		50%		50%		100%		100%		100%		
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	40%	418.063.800	41%	249.715.680	42%	226.010.000	43%	239.000.000	44%	246.000.000	44%	1.378.789.480	Dinas Kesehatan
1 2 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Peningkatan Pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	61%	451.443.200	61%	505.783.000	61%	655.783.000	62%	655.783.000	65%	855.783.000	65%	3.124.575.200	Dinas Kesehatan
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKA	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya	48%	1.906.987.700	49%	1.568.295.000	49%	1.601.295.000	50%	1.630.295.000	50%	1.765.795.000	50%	8.472.667.700	Dinas Kesehatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	T BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat													
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAANUMUM DAN PENATAAN RUANG			36.403.952.000		36.860.983.356		40.193.301.293		41.339.875.560		49.711.866.570		204.509.978.779	
1 3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase Luas Kawasan yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	16,38%	6.236.470.000	16,64%	6.323.295.000	16,90%	7.499.423.723	17,39%	7.935.886.193	18,65%	10.453.548.000	18,65%	38.448.622.916	PUTR
		Persentase Luas Kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi	21,59%		30,40%		32,65%		35,47%		40,08%		40,08%		
		Persentase luas jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	68,50%		74,04%		79,18%		83,42%		88,56%		88,56%		
1 3 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Persentase Jumlah Warga Negara yang	100%	9.213.479.000	100%	9.542.765.356	100%	9.861.864.570	100%	10.278.373.667	100%	10.909.497.570	100%	49.805.980.163	PUTR

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	PENYEDIAA N AIR MINUM	memperole h kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)													
		Persentase Warga Negara yang memperole h layanan pengolaha n air limbah domestic (SPM)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1 3 4	PROGRAM PENGEMBAN GAN SISTEM DAN PENGELOLA AN PERSAMPAH AN REGIONAL	persentase pengemba ngan sistem pengelolaa n persampah aan regional	1 Unit	100.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	100.000.000	5 Unit	400.000.000	PUTR
1 3 5	PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBAN GAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Warga Negara yang memperole h layanan pengolaha n air limbah domestik (SPM)	0,50%	100.000.000	1%	50.000.000	1,50%	50.000.000	2,00%	50.000.000	2,50%	100.000.000	2,50%	350.000.000	PUTR
1 3 6	PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBAN GAN SISTEM DRAINASE	Presentase terlaksana nya Pengelolaa n dan Pengemba ngan Sistem Drainase	59%	392.612.000	60%	365.662.000	61%	502.659.000	62%	227.202.000	63%	502.799.000	63%	1.990.934.000	PUTR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE			
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
		kabupaten pangkep														
1 3 7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Presentase Panjang Jalan Yang Terbangun	65%	428.596.000	66%	315.153.000	67%	369.539.000	68%	176.303.700	69%	402.249.000	69%	1.691.840.700	PUTR	
1 3 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	rasio kepatuan IMB kabupaten pangkep	5%	335.000.000	11%	327.000.000	14%	327.000.000	14%	135.000.000	15%	135.000.000	15%	1.259.000.000	PUTR	
1 3 9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	rasio kepatuan IMB kabupaten pangkep	16%	1.065.000.000	19%	1.073.000.000	21%	1.073.000.000	23%	665.000.000	25%	1.365.000.000	24,75%	5.241.000.000	PUTR	
1 3 #	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dan jumlah jembatan dalam kondisi baik	78,03%	17.032.795.000	80,45%	17.414.108.000	82,62%	19.409.815.000	85,07%	20.922.110.000	88,17%	24.743.773.000	88,17%	99.522.601.000	PUTR	
1 3 #	PROGRAM PENGEMBANGAN JASAKONSTRUKSI	Presentase Pengembangan Jasa Konstruksi	38,05%	500.000.000	45,50%	400.000.000	53,50%	400.000.000	61,50%	400.000.000	69,50%	400.000.000	70%	2.100.000.000	PUTR	
1 3 #	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase wilayah yang telah menyusun perencanaan tata ruang	56%	1.000.000.000	63%	1.000.000.000	66%	600.000.000	69%	500.000.000	72%	600.000.000	72%	3.700.000.000	PUTR	
1 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN				22.408.494.000		23.119.535.000		24.094.160.000		25.568.975.000		28.320.829.000		123.511.993.000	
1 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi	100%	342.500.000	100%	341.250.000	100%	408.750.000	100%	466.250.000	100%	798.750.000	100%	2.357.500.000	DPKPP	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		korban bencana kabupaten (SPM)													
		Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerinta h Daerah kabupaten/ kota yang memperole h fasilitas penyediaa n rumah yang layak huni (SPM)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1 4 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMA N	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani	8%	705.270.000	10%	787.500.000	12%	732.500.000	15%	732.500.000	17%	1.372.500.000	100%	4.330.270.000	DPKPP
1 4 4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMA N KUMUH	Persentase perumahan dan kawasan kumuh	15%	68.750.000	18%	100.000.000	20%	100.000.000	23%	100.000.000	25%	200.000.000	100%	568.750.000	DPKPP
1 4 5	PROGRAM PENINGKAT AN PRASARANA , SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkata n Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	74%	21.286.974.000	80%	21.881.785.000	85%	22.843.910.000	90%	24.261.225.000	93%	25.924.579.000	100%	116.198.473.000	DPKPP
1 4 6	PROGRAM PENINGKAT AN PELAYANAN SERTIFIKASI	Persentase Peningkata n pelayanan sertifikasi	100%	5.000.000	12%	9.000.000	12%	9.000.000	12%	9.000.000	33%	25.000.000	100%	57.000.000	DPKPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE			
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
	KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMA N	kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukima n														
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.894.471.525		3.801.299.925		3.795.988.750		4.800.771.362		7.904.439.687		25.196.971.249	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR				3,549,574,025		2,556,402,425		2,561,091,250		3,565,873,862		6,041,182,125		18,274,123,687	
1 5 2	PROGRAM PENINGKAT AN KETENTERA MAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperole h layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	100%	717.113.025	100%	723.941.425	100%	728.630.250	100%	733.412.862	100%	588.291.125	100%	3.491.388.687	SATPO L PP DAN DAMKA R	
1 5 4	PROGRAM PENCEGAHA N, PENANGGUL ANGAN, PENYELAMA TAN KEBAKARAN BAHAN BAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Warga Negara yang memperole h layanan penyelama tan dan Evakuasi korban kebakaran (SPM)	100%	2.832.461.000	100%	1.832.461.000	100%	1.832.461.000	100%	2.832.461.000	100%	5.452.891.000	100%	14.782.735.000	DINAS PEMAD AM KEBAK ARAN	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				1.344.897.500		1.244.897.500		1.234.897.500		1.234.897.500		1.863.257.562		6.922.847.562	
1 5 3	PROGRAM PENANGGUL ANGAN BENCANA	Jumlah Warga Negara yang memperole h layanan informasi rawan bencana (SPM)	100%	1.344.897.500	100%	1.244.897.500	100%	1.234.897.500	100%	1.234.897.500	100%	1.863.257.562	100%	6.922.847.562	BPBD
		Jumlah Warga Negara yang memperole h layanan pencegaha n dan kesiapsiag aan terhadap bencana (SPM)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Jumlah Warga Negara yang memperole h layanan penyelama tan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				1.574.700.000		1.755.000.000		1.605.000.000		1.805.000.000		1.905.000.000		8.644.700.000
1 6 2	PROGRAM PEMBERDAY AAN SOSIAL	Persentase potensi dan sumber kesejahter aan Sosial yang	28,25%	406.800.000	28,50%	406.800.000	28,75%	406.800.000	29,00%	406.800.000	29,25%	406.800.000	29,25%	2.034.000.000	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		mendapatk an pemberday aan Sosial													
1 6 3	PROGRAM PENANGANA N WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase pemulanga n Warga Nagara Migran Korban tindak Kekerasan	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	125.000.000	Dinas Sosial
1 6 4	PROGRAM REHABILITA SI SOSIAL	Persentase Warga Negara penyandan g disabilitas yang memperole h rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	100%	453.200.000	100%	603.200.000	100%	453.200.000	100%	653.200.000	100%	753.200.000	100%	2.916.000.000	Dinas Sosial
		Persentase anak telantar yang memperole h rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperole h rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		Persentase Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1 6 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial	16,92%	457.000.000	18,15%	460.000.000	19,38%	460.000.000	20,61%	460.000.000	21,84%	460.000.000	21,84%	2.297.000.000	Dinas Sosial
1 6 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar hidup korban bencana	100%	155.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	855.000.000	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		Logistik pangan lain (SPM)													
1 6 7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100%	77.700.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000		417.700.000	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			37.984.777.470		32.230.263.370		33.129.073.670		34.704.418.500		34.278.777.000		172.327.310.010	
2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			1.534.708.720		1.637.151.720		1.597.898.720		1.733.882.950		1.750.557.200		4.413.716.120	
2 7 2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase efektivitas penyusunan perencanaan tenaga kerja	50%	21.986.520	55%	14.786.520	60%	14.786.520	63%	15.000.000	65%	23.000.000	65%	89.559.560	DISNAKER
2 7 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	50%	838.370.000	55%	777.470.000	60%	723.770.000	65%	782.162.750	75%	808.270.000	75%	89.559.560	DISNAKER
		Persentase Tingkat produktivitas tenaga kerja	24%		28%		32%		36%		40%		40%		
2 7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan kesempatan kerja	5,20%	247.567.000	5,80%	245.000.000	6%	247.567.000	6,20%	278.785.000	6,50%	281.352.000	6,50%	1.300.271.000	DISNAKER
2 7 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS	37,82%	426.785.200	61,49%	599.895.200	40,36%	611.775.200	49,00%	657.935.200	49,00%	637.935.200	56,67%	2.934.326.000	DISNAKER

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE			
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
		Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)														
2 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				803.407.000		928.884.000		972.384.000		1.194.384.000		1.274.384.000		5.173.443.000	
2 8 2	PROGRAM PENGARUSU TAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga pemerintah Tk daerah yang dilatih PUG	85%	162.308.000	87%	235.000.000	90%	235.000.000	100%	395.000.000	95%	420.000.000	100%	1.447.308.000	DPPKB DPPPA	
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	85%		87%		90%		100%		95%		100%			
2 8 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pesentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehen sif	75%	185.957.000	80%	185.957.000	85%	185.957.000	90%	185.957.000	90%	185.957.000	90%	929.785.000	DPPKB DPPPA	
2 8 4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang mendapatkan pemberdayaan kualitas keluarga	1,30%	182.715.000	2,50%	233.000.000	3,00%	280.000.000	3,50%	330.000.000	4,00%	380.000.000	4,00%	1.405.715.000	DPPKB DPPPA	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
2 8 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentas staekholde r yang memanfaatkan data gender dan anak	87%	80.000.000	90%	68.000.000	85%	68.000.000	90%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	376.000.000	DPPKB DPPPA
2 8 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kecamatan layak anak	75%	59.000.000	80%	73.500.000	85%	70.000.000	90%	70.000.000	90%	75.000.000	90%	347.500.000	DPPKB DPPPA
2 8 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan komprehen sip	80%	133.427.000	80%	133.427.000	85%	133.427.000	90%	133.427.000	95%	133.427.000	95%	667.135.000	DPPKB DPPPA
2 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			1.765.367.550		1.892.615.150		1.957.962.150		2.009.002.550		2.145.760.800		9.770.708.200	
2 9 2	PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase peningkatan saran dan prasarana kedaulatan dan kemandirian pangan	92%	602.450.000	93%	636.697.600	94%	665.307.600	95%	707.848.000	96%	735.390.400	96%	3.347.693.600	Dinas Ketapang
2 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90%	987.917.550	90,30%	1.055.917.550	90,60%	1.092.654.550	90,80%	1.101.154.550	91%	1.201.370.400	91,00%	5.439.014.600	Dinas Ketapang
2 9 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	34%	25.000.000	33%	25.000.000	32%	25.000.000	31%	25.000.000	30%	29.000.000	30%	129.000.000	Dinas Ketapang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		yang di intervensi													
2 9 5	PROGRAM PENGAWAS AN DAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman dikonsumsi	92%	150.000.000	93%	175.000.000	95%	175.000.000	96%	175.000.000	97%	180.000.000	96%	855.000.000	Dinas Ketapan g
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			1.318.000.000		1.293.000.000		1.293.000.000		1.293.000.000		1.293.000.000		6.490.000.000	
2 # 2	PROGRAM PENGELOLA AN IZIN LOKASI	Persentase Penetapan Surat Keputusan penetapan tanah lokasi	100%	50.000.000		-		-		-		-	100%	50.000.000	DPKPP
2 # 4	PROGRAM PENYELESAI AN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase fasilitasi tindak lanjut sengketa tanah asset Pemda yang diselesaika n	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	80.000.000	DPKPP
2 # 5	PROGRAM PENYELESAI AN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGU NAN	Persentase luas tanah yang dibebaska n	100%	1.220.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	5.220.000.000	DPKPP
2 # 7	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase lokasi tanah ulayat yang didata	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	160.000.000	DPKPP
2 # 8	PROGRAM PENGELOLA	Persentase pengeloa	100%	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	200.000.000	DPKPP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	AN TANAH KOSONG	n tanah yang kosong dimanaatkn													
2 # 9	PROGRAM PENGELOLA AN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin membuka tanah yang diterbitkan	100%	-	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	500.000.000	DPKPP
2 # #	PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH	Persentase penata gunaan tanah yang dilaksanak an	100%	-	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	280.000.000	DPKPP
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				5.504.410.000		5.364.410.000		5.624.410.000		5.539.410.000		4.769.410.000		26.802.050.000
2 # 2	PROGRAM PERENCANA AN LINGKUNGA N HIDUP	Persentase Perencana an Lingkunga n Hidup	60%	150.000.000	90%	100.000.000	100%	50.000.000		-		-	100%	300.000.000	Dinas Lingkun gan Hidup
2 # 3	PROGRAM PENGENDAL IAN PENCEMARA N DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGA N HIDUP	nilai emisi gas rumah kaca CO2 eq	8.242	447.000.000	8.042	405.000.000	7.800	430.000.000	7.650	455.000.000	7.600	255.000.000	66,26%	1.992.000.000	Dinas Lingkun gan Hidup
2 # 4	PROGRAM PENGELOLA AN KEANEKARA GAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaa n Keanekara gaman Hayati (Kehati)	0,08%	2.652.160.000	0,08%	2.522.160.000	0,08%	2.672.160.000	0,08%	2.542.160.000	20%	1.712.160.000	100%	12.100.800.000	Dinas Lingkun gan Hidup
2 # 5	PROGRAM PENGENDAL IAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH	Persentase Pengendali an Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah	20%	65.000.000	33%	65.000.000	47%	65.000.000	53%	65.000.000	60%	65.000.000	60%	325.000.000	Dinas Lingkun gan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)													
2 # 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaa n Lingkungan Hidup (Pplh)	13%	85.000.000	20%	85.000.000	20%	85.000.000	27%	85.000.000	27%	85.000.000	27%	425.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 # 7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAA N MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaa n Kearifan Lokal yang terkait Dengan PPLH	13%	25.000.000	20%	25.000.000	20%	25.000.000	27%	25.000.000	27%	25.000.000	27%	125.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 # 8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	Persentase Peningkata n Pendidikan , Pelatihan Dan Penyuluha n Lingkungan Untuk	10%	50.000.000	10%	50.000.000	10%	50.000.000	10%	50.000.000	10%	50.000.000	60%	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	MASYARAKAT	Masyarakat													
2 # 9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	10%	25.000.000	10%	25.000.000	10%	25.000.000	10%	25.000.000	10%	25.000.000	50%	125.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 # #	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	375.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 # #	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	21%	1.930.250.000	23%	2.012.250.000	23,50%	2.147.250.000	23,75%	2.217.250.000	24%	2.477.250.000	24%	10.784.250.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			1.411.840.000		1.482.432.000		1.527.750.000		1.604.150.000		1.684.370.000		7.710.542.000	
2 # 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Ktp Elektronik Perekaman	95,15%	839.840.000	95,20%	875.000.000	95,40%	895.000.000	96,15%	936.150.000	96,25%	955.000.000	96,25%	4.500.990.000	Dukcapil
		Presentase Anak Usia 0-17 Tahun Yang Memiliki KIA	35,00%		40,00%		45,00%		50,00%		55,00%		55,00%		
2 # 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran Umur 0-18 Tahun Pencatatan Sipil	92%	265.000.000	92,20%	270.000.000	92,50%	280.000.000	98,33%	300.000.000	92,75%	320.000.000	92,75%	1.435.000.000	Dukcapil

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
2 # 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Jumlah OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	35,70%	230.000.000	35,70%	240.432.000	35,70%	255.750.000	35,70%	270.000.000	35,70%	311.370.000	35,70%	1.307.552.000	Dukcapil
2 # 5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	'Presentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	77.000.000	100%	97.000.000	100%	97.000.000	100%	98.000.000	100%	98.000.000	100%	467.000.000	Dukcapil
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			4.397.500.000		1.240.000.000		1.542.500.000		1.580.000.000		1.697.500.000		10.457.500.000	
2 # 2	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	23%	87.500.000	31%	60.000.000	31%	60.000.000	40%	60.000.000	43%	60.000.000	43%	327.500.000	DPMD
2 # 3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang menjalin kerjasama	54%	75.000.000	69%	45.000.000	79%	75.000.000	86%	75.000.000	93%	75.000.000	93%	345.000.000	DPMD
2 # 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi	100%	3.350.000.000	100%	245.000.000	100%	422.500.000	100%	415.000.000	100%	482.500.000	100%	4.915.000.000	DPMD
2 # 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok	92%	885.000.000	100%	890.000.000	93%	985.000.000	93%	1.030.000.000	93%	1.080.000.000	93%	4.870.000.000	DPMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		Binaan LPM)													
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			4.000.984.000		4.977.104.500		4.987.104.500		5.330.634.500		5.129.702.500		24.425.530.000	
2 # 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan kab/kota yang mendapatk an fasilitasi pembinaan penangana n terpadu isu kependudu kan di Kampung KB	58%	130.000.000	68%	21.000.000	78%	21.000.000	87%	205.359.000	97%	253.120.500	97%	630.479.500	DPPKB DPPPA
2 # 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS peserta KB Aktif	77,72%	2.547.835.000	77,74%	3.043.000.000	77,76%	2.993.000.000	77,76%	2.943.000.000	77,80%	2.743.000.000	100%	14.269.835.000	DPPKB DPPPA
2 # 4	PROGRAM PEMBERDAY AAN DAN PENINGKAT AN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangu nan Keluarga	60%	1.323.149.000	70%	1.913.104.500	80%	1.973.104.500	90%	2.182.275.500	100%	2.133.582.000	100%	9.525.215.500	DPPKB DPPPA
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			346.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		1.746.000.000	
2 # 2	PROGRAM PENYELENG GARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkata n Penyeleng garaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	17,68%	171.000.000	19,30%	175.000.000	19,30%	175.000.000	19,30%	175.000.000	19,61%	175.000.000	100%	871.000.000	Dinas Perhub ungan
2 # 3	PROGRAM PENGELOLA	Persentase Peningktan Kualitas	16,18%	175.000.000	17,98%	175.000.000	20,26%	175.000.000	21,86%	175.000.000	23,64%	175.000.000	100%	875.000.000	Dinas Perhub ungan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	AN PELAYARAN	dan kapasitas Pengelolaan Pelayaran													
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			2.360.000.000		2.385.500.000		2.420.500.000		2.570.000.000		2.630.000.000		12.366.000.000	
2 # 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	700.000.000	100%	735.000.000	100%	790.000.000	100%	739.500.000	100%	799.500.000	100%	3.764.000.000	DISKO MINFO STATIS TIK DAN PERSANDIAN
2 # 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Aplikasi Informatika yang terkoneksi	100%	1.660.000.000	100%	1.650.500.000	100%	1.630.500.000	100%	1.830.500.000	100%	1.830.500.000	100%	8.602.000.000	DISKO MINFO STATIS TIK DAN PERSANDIAN
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			2.343.464.000		2.499.901.000		2.612.591.000		2.740.361.000		2.734.361.000		12.930.678.000	
2 # 2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	% Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	11%	42.000.000	15%	42.000.000	20%	42.000.000	24,40%	48.000.000	28,90%	42.000.000	28,90%	216.000.000	KORER INDAG
2 # 3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	% Capaian Koperasi berkualitas	20%	48.568.000	40%	48.568.000	60%	48.568.000	80%	48.568.000	85%	48.568.000	85%	242.840.000	KORER INDAG
2 # 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	% capaian Penilaian dan penghargaan KSP/USP	20%	18.397.000	40%	27.417.000	60%	27.417.000	80%	27.417.000	90%	27.417.000	90%	128.065.000	KORER INDAG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
2 # 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	% Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan	20%	245.499.000	40%	265.624.000	60%	278.314.000	80%	300.084.000	85%	300.084.000	85%	1.389.605.000	KORER INDAG
2 # 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	% Koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan perlindungan	17%	20.317.000	34%	20.317.000	51%	20.317.000	68%	20.317.000	58%	20.317.000	58%	101.585.000	KORER INDAG
2 # 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang diberdayakan	20%	1.811.682.000	40%	1.938.974.000	60%	2.038.974.000	80%	2.138.974.000	85%	2.138.974.000	85%	10.067.578.000	KORER INDAG
2 # 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	% Usaha Mikro yang ditingkatkan skala usahanya	20%	157.001.000	40%	157.001.000	60%	157.001.000	80%	157.001.000	85%	157.001.000	85%	785.005.000	KORER INDAG
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			588.033.000		572.330.500		572.330.500		619.426.500		609.426.500		2.961.547.000	
2 # 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100%	62.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	22.000.000	100%	12.000.000	100%	120.000.000	DPMPT SP
2 # 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	80%	108.560.000	80%	108.560.000	80%	108.560.000	80%	108.560.000	80%	108.560.000	80%	542.800.000	DPMPT SP
2 # 4	PROGRAM PELAYANAN	Persentase Layanan Perizinan	94%	79.900.000	94%	79.900.000	94%	79.900.000	94%	79.900.000	100%	79.900.000	100%	399.500.000	DPMPT SP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	PENANAMAN MODAL	dan non perizinan yang tepat waktu													
2 # 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan jumlah investor PMDN/PM A guna mendukung peningkatan investasi daerah	100%	322.573.000	100%	356.870.500	100%	356.870.500	100%	393.966.500	100%	393.966.500	100%	1.824.247.000	DPMPT SP
2 # 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan non Perizinan yang akurat dan tepat waktu	80%	15.000.000	90%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	75.000.000	DPMPT SP
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			10.050.000.000		6.050.000.000		6.050.000.000		6.550.000.000		6.550.000.000		35.250.000.000	
2 # 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAA N	Persentase Peningkatan jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan.	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	3.750.000.000	DISPAR PORA
2 # 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAG AAN	Persentase Peningkatan jumlah cabang olahraga yang dibina dan	100%	9.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.500.000.000	100%	5.500.000.000	100%	30.000.000.000	DISPAR PORA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		atlet yang berprestasi													
2 # 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentasi organisasi pramuka aktif	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.500.000.000	DISPAR PORA
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			350.000.000		370.000.000		380.000.000		390.000.000		390.000.000		1.880.000.000	
2 # 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	350.000.000	100%	370.000.000	100%	380.000.000	100%	390.000.000	100%	390.000.000	100%	1.880.000.000	DISKOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			150.000.000		125.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		695.000.000	
2 # 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAAN INFORMASI	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100%	150.000.000	100%	125.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	695.000.000	DISKOMINFO
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		2.000.000.000	
2 # 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan, Pelestarian dan Pembinaan Kebudayaan Daerah	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	100%	500.000.000	DISDIKBUD
2 # 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Peningkatan Pengembangan	20%	20.000.000	20%	20.000.000	20%	20.000.000	20%	20.000.000	20%	20.000.000	20%	100.000.000	DISDIKBUD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		Kesenian Tradisonal													
2 # 4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal	20%	170.000.000	20%	170.000.000	20%	170.000.000	20%	170.000.000	20%	170.000.000	20%	850.000.000	DISDIK BUD
2 # 5	PROGRAM PELESTARIA N DAN PENGELOLA AN CAGAR BUDAYA	Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	20%	60.000.000	20%	60.000.000	20%	60.000.000	20%	60.000.000	20%	60.000.000	20%	300.000.000	DISDIK BUD
2 # 6	PROGRAM PENGELOLA AN PERMUSEU MAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Permuseum an	20%	50.000.000	20%	50.000.000	20%	50.000.000	20%	50.000.000	20%	50.000.000	20%	250.000.000	DISDIK BUD
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			604,545,200		539,550,000		574,493,000		585,649,000		650,105,000		2,964,296,200	
2 # 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAK AAN	persentase perpustaka an yang dibina	13,36%	591.863.200	24,04%	526.868.000	33,41%	561.811.000	43,78%	572.967.000	55,30%	634.105.000	55,30%	2.887.614.200	DPK
	PROGRAM PELESTARIA N KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno yang dibina	100%	12.682.000	100%	12.682.000	100%	12.682.000	100%	12.682.000	100%	16.000.000	100%	76.682.000	DPK
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			69.200.000		135.066.500		138.831.800		87.200.000		96.200.000		526.498.300	
2 # 2	PROGRAM PENGELOLA AN ARSIP	persentase penyeleng garaan kearsipan perangkat daerah	59,31%	54.200.000	69,96%	120.066.500	78,62%	123.831.800	88,28%	72.200.000	100%	81.200.000	100%	451.498.300	DPK
2 # 3	PROGRAM PERLINDUN GAN DAN PENYELAMA TAN ARSIP	Prosentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	75.000.000	DPK

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			17.191.250.950		18.445.268.850		16.981.006.850		20.774.467.450		20.065.867.200		93.457.861.300	
3 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			8.137.596.000		6.785.345.000		7.292.925.000		8.028.109.000		9.229.028.000		39.473.003.000	
3 # 3	PROGRAM PENGELOLA AN PERIKANAN TANGKAP	Nilai produksi perikanan tangkap	20.000 Ton	2.652.113.000	22.000 Ton	1.272.415.000	23.000 Ton	2.063.895.000	24.000 Ton	2.661.500.000	25.000 Ton	2.632.270.000	25.000 Ton	11.282.193.000	Dinas Perikan an
3 # 4	PROGRAM PENGELOLA AN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai produksi perikanan budidaya	450.000 Ton	4.065.483.000	460.00 0 Ton	4.220.565.000	470.00 0 Ton	4.029.030.000	480.00 0 Ton	4.086.609.000	490.00 0 Ton	4.767.528.000	2.350.0 00 Ton	21.169.215.000	Dinas Perikan an
3 # 5	PROGRAM PENGAWAS AN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkata n pengawas an sumberday a kelautan dan perikanan	24%	320.000.000	23%	170.000.000	22%	120.000.000	21%	210.000.000	20%	220.000.000	100%	1.040.000.000	Dinas Perikan an
3 # 6	PROGRAM PENGOLAHA N DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai produksi pengolaha n dan pemasaran hasil perikanan	37 Ton	1.100.000.000	40 Ton	1.122.365.000	42 Ton	1.080.000.000	44 Ton	1.070.000.000	47 Ton	1.609.230.000	210 Ton	5.981.595.000	Dinas Perikan an
3 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			3.066.456.000		5.590.030.000		3.437.265.000		6.125.380.000		3.797.188.000		22.016.319.000	
3 # 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkata n tersebar luasnya potensi obyek wisata Kabupaten Pangkep	18,75%	156.456.000	18,75%	201.030.000	18,75%	197.265.000	18,75%	215.886.000	18,75%	237.188.000	18,75%	1.007.825.000	DISPAR PORA
3 # 2	PROGRAM PENINGKAT AN DAYA TARIK	Persentase Peningkata n daya tarik	19,19%	1.994.000.000	18,61%	4.241.000.000	18,03%	2.072.000.000	19,83%	4.721.494.000	19,25%	2.352.000.000	19,25%	15.380.494.000	DISPAR PORA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	DESTINASI PARIWISATA	destinasi pariwisata													
3 # 4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Peningkatan Berkembangnya Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	22,07%	191.000.000	21,21%	263.000.000	18,62%	263.000.000	18,62%	263.000.000	18,62%	263.000.000	18,62%	1.243.000.000	DISPAR PORA
3 # 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Berkembangnya Kompetensi Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15,35%	725.000.000	15,35%	885.000.000	15,35%	905.000.000	15,35%	925.000.000	32,02%	945.000.000	32,02%	4.385.000.000	DISPAR PORA
3 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			4.689.285.450		4.798.275.850		4.919.198.850		5.039.360.450		5.527.215.200		24.973.335.800	
3 2 7 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0,3	865.355.000	0,3	868.187.000	0,3	878.187.000	0,3	897.187.000	0,4	1.167.337.000	1,6	4.676.253.000	Dinas Pertanian
		Persentase Penyediaan Produksi Hortikultura	5		5		5		5		25				
		Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	0,34		0,3		0,3		0,3		1,7				
		Persentase Peningkatan	19		19		20		21		100				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		n Produksi Hasil Ternak													
		Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Peternakan	0		0		20		20		0		40		
3 2 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luasan Areal Tanam	9	2.834.800.000	9	2.968.790.400	10	3.076.230.400	10	3.169.392.000	12	3.279.561.600	49	15.328.774.400	Dinas Pertanian
		Persentase Luasan HMT dan Fasilitas RPH	19		19		20		21		21		100		
3 2 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan	10	119.300.000	10	115.000.000	10	122.000.000	10	130.000.000	10	140.000.000	50	626.300.000	Dinas Pertanian
3 2 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT		105.345.000		106.813.000		106.813.000		106.813.000		137.663.000		563.447.000	Dinas Pertanian
		- Tanaman Pangan	0		0		0		1		1		2		
		- Hortikultura	5		5		5		5		5		25		
		- Perkebunan	3		3		3		3		3		15		
3 2 6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase sertifikasi Izin Usaha Pelaku	15	55.000.000	17	30.000.000	20	20.000.000	23	20.000.000	25	25.000.000	100	150.000.000	Dinas Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		Usaha di Bidang Peternaka n													
3 2 7	PROGRAM PENYULUHA N PERTANIAN	Persentase peningkata n pemberday aan penyuluh	100	709.485.450	100	709.485.450	100	715.968.450	100	715.968.450	100	777.653.600	500	3.628.561.400	Dinas Pertania n
3 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			769.000.000		656.200.000		656.200.000		856.200.000		787.018.000		3.724.618.000	
3 3 0 2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTAR AN PERUSAHAA N	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperole h Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat dan IUTM/IUTS /SIUP Toko Swalayan)	21%	42.000.000	39%	40.000.000	49%	43.000.000	57%	42.000.000	65%	42.000.000	65%	209.000.000	KORER INDAG
3 3 0 3	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANG AN	Persentase pengemba ngan dan pengelolaa n sarana distribusi perdagang an di wilayah kerjanya	20%	300.000.000	40%	150.000.000	60%	150.000.000	80%	350.000.000	100%	283.818.000	100%	1.233.818.000	KORER INDAG
3 3 0 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersedia an Harga Barang Kebutuhan Pokok	68,97%	148.000.000	72,41%	187.200.000	75,86%	184.200.000	79,31%	185.200.000	82,76%	182.200.000	82,76%	886.800.000	KORER INDAG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
3 3 5	PROGRAM PENGEMBAN GAN EKSPOR	Persentase Peningkata n Ekspor Bersih Pedagang	16%	60.000.000	35%	60.000.000	49%	60.000.000	51%	60.000.000	52%	60.000.000	52%	300.000.000	KORER INDAG
3 3 6	PROGRAM STANDARDI SASI DAN PERLINDUN GAN KONSUMEN	Persentase alat ukur, takar, timbangan dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah dan Pengawas an Alat UTTP / BDKT.	31,24%	154.000.000	32,35%	154.000.000	32,91%	154.000.000	34,58%	154.000.000	35,25%	154.000.000	35,25%	770.000.000	KORER INDAG
3 3 7	PROGRAM PENGGUNAA N DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase capaian Pemasara n produk dalam negeri	30%	65.000.000	50%	65.000.000	60%	65.000.000	80%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	325.000.000	KORER INDAG
3 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			528.913.500		615.418.000		675.418.000		725.418.000		725.418.000		3.270.585.500	
3 3 1 2	PROGRAM PERENCANA AN DAN PEMBANGU NAN INDUSTRI	Pesentase Pertumbuh an Jumlah Indutri Kecil dan Menengah di Kabupaten	20%	493.913.500	40%	559.000.000	60%	619.000.000	80%	669.000.000	100%	669.000.000	100%	3.009.913.500	KORER INDAG
3 3 1 3	PROGRAM PENGENDAL IAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase Jumlah Pemantau an dan Pengawas an Dengan Jumlah Izin Usaha Indutri (IUI)	20%	10.000.000	40%	24.000.000	60%	24.000.000	80%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	106.000.000	KORER INDAG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait													
334	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan Informasi Secara Lengkap dan Terkini	20%	25.000.000	40%	32.418.000	60%	32.418.000	80%	32.418.000	100%	32.418.000	100%	154.672.000	KORERINDAG
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			38.365.380.737,00		37.443.572.259,00		37.759.132.259,00		41.468.804.459,00		42.041.804.048,00		197.078.693.762	
41	SEKRETARIAT DAERAH			27.217.914.259,00		24.273.256.259,00		24.364.816.259,00		27.466.407.459,00		27.575.320.548,00		130.897.714.784,00	
412	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	25.573.254.899,00	100%	22.627.054.899,00	100%	22.717.054.899,00	100%	25.817.054.899,00	100%	25.924.344.788,00	100%	122.658.764.384	SETDA
413	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan	100%	1.644.659.360,00	100%	1.646.201.360,00	100%	1.647.761.360,00	100%	1.649.352.560,00	100%	1.650.975.760,00	100%	8.238.950.400	SETDA
42	SEKRETARIAT DPRD			11.147.466.478		13.170.316.000		13.394.316.000		14.002.397.000		14.466.483.500		66.180.978.978	
422	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas terhadap Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100%	11.147.466.478	100%	13.170.316.000	100%	13.394.316.000	100%	14.002.397.000	100%	14.466.483.500	100%	66.180.978.978	Set. DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTHAN			186.236.028.782		192.785.380.800		201.408.964.625		212.530.570.980		199.048.179.508		992.009.124.695	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
5 1	PERENCANAAN			1.700.000.000		1.745.000.000		3.065.000.000		2.895.000.000		1.890.000.000		11.295.000.000	
5 1 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	650.000.000		675.000.000		1.925.000.000		1.735.000.000		680.000.000	100%	5.665.000.000	BAPPE LITBANGDA
5 1 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM dan Pemerintahan	85%	1.050.000.000	90%	1.070.000.000	90%	1.140.000.000	95%	1.160.000.000	100%	1.210.000.000	100%	5.630.000.000	BAPPE LITBANGDA
		Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Perekonomi dan SDA	95%		95%		95%		95%		100%		100%		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		Persentase Kesesuaia n program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangu nan Daerah lingkup bidang Infrastrukt ur dan Kewilayah an	85%		90%		90%		95%		100%		100%		
5 2	KEUANGAN			181.136.042.782		187.604.894.800		194.922.978.625		206.229.584.980		193.124.567.408		963.018.068.595	
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			179.223.042.782		185.749.894.800		193.034.978.625		204.276.584.980		190.453.232.924		952.737.734.111	
5 2 2	PROG. PENGELOLA AN KEUANGAN DAERAH	Persentase Peningkata n Pengelolaa n Keuangan Daerah	100%	178.546.879.782	100%	185.049.922.800	100%	192.310.008.625	100%	203.525.366.980	100%	189.702.014.924	100%	949.134.193.111	BPKD
5 2 3	PROG. PENGELOLA AN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkata n Perencana an dan Pelaksana an Pengelolaa n Barang Milik Daerah serta Kesesuaia n Pemanfaat an BMD	100%	676.163.000	100%	699.972.000	100%	724.970.000	100%	751.218.000	100%	751.218.000	100%	3.603.541.000	BPKD
	BADAN PENDAPATAN DAERAH			1.913.000.000		1.855.000.000		1.888.000.000		1.953.000.000		2.671.334.484		10.280.334.484	
5 2 4	PROGRAM PENGELOLA AN	Persentase Peningkata n	95%	1.913.000.000	95%	1.855.000.000	95%	1.888.000.000	95%	1.953.000.000	95%	2.671.334.484	100%	10.280.334.484	BAPEN DA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	PENDAPATA N DAERAH	Pengelolaan pendapata n daerah													
5 3	KEPEGAWAIAN			1.458.974.915		1.535.104.159		1.450.933.000		1.425.933.000		1.825.000.000		7.695.945.074	
5 3 2	PROGRAM KEPEGAWAI AN DAERAH	Persentase pelaksana an manajeme n kepegawai an daerah	100%	1.458.974.915	100%	1.535.104.159	100%	1.450.933.000	100%	1.425.933.000	100%	1.825.000.000	100%	7.695.945.074	BKPSD M
5 4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.391.011.085		1.350.381.841		1.420.053.000		1.430.053.000		1.658.612.100		7.250.111.026	
5 4 2	PROGRAM PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pengemba ngan sumber daya manusia	100%	1.391.011.085	100%	1.350.381.841	100%	1.420.053.000	100%	1.430.053.000	100%	1.658.612.100	100%	7.250.111.026	BKPSD M
5 5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		2.750.000.000	
5 5 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH	Persentase Peningkata n Rekomend asi Hasil Penelitian dan Pengemba ngan yang ditindak lanjuti	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	2.750.000.000	BAPELI T BANGD A
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			3.518.404.176		3.608.404.176		3.604.004.176		3.608.404.176		3.608.404.176		17.947.620.880	
6 1	INSPEKTORAT DAERAH			3.518.404.176		3.608.404.176		3.604.004.176		3.608.404.176		3.608.404.176		17.947.620.880	
6 1 2	PROGRAM PENYELENG GARAAN PENGAWAS AN	Persentase Penuruan Temuan Inspektorat tiap tahun dibandingk an tahun sebelumny a	95%	2.762.404.176	90%	2.877.404.176	85%	2.923.004.176	80%	2.877.404.176	75%	2.927.404.176	75%	14.367.620.880	INSPEK TORAT

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
6 1 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPIN GAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusa n kebijakan, Pendampin gan dan Asistensi	100%	756.000.000	100%	731.000.000	100%	681.000.000	100%	731.000.000	100%	681.000.000	100%	3.580.000.000	INSPEK TORAT
7	UNSUR KEWILAYAH AN			48.488.871.283		48.198.204.512		48.405.245.290		48.546.196.620		49.200.262.967		242.838.780.672	
7 1	KECAMATA N			48.488.871.283		48.198.204.512		48.405.245.290		48.546.196.620		49.200.262.967		242.838.780.672	
7 1 2	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyeleng garaan pemerintah an pelayanan publik	100%	2.453.217.000	100%	2.480.064.000	100%	2.512.812.650	100%	2.531.133.673	100%	2.565.700.145	100%	12.542.927.468	semua kecama tan
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberday aan masyaraka t desa dan kelurahan	100%	41.322.805.283	100%	40.978.610.012	100%	41.116.099.640	100%	41.266.197.195	100%	41.361.336.322	100%	206.045.048.452	semua kecama tan
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentrama n dan ketertiban umum	100%	4.567.117.000	100%	4.575.242.000	100%	4.581.733.000	100%	4.499.265.752	100%	5.003.626.500	100%	23.226.984.252	Semua Kecama tan
7 1 5	PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM	Persentase penyeleng araan urusan pemerintah umum	100%	22.500.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	50.000.000	100%	162.500.000	Kec. Pangkaj ene
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWAS AN PEMERINTA HAN DESA	persentase pembinaan dan pengawas an pemerintah an desa	100%	123.232.000	100%	134.288.500	100%	164.600.000	100%	219.600.000	100%	219.600.000	100%	861.320.500	Kec. Pangkaj ene, Kalmas
8	USUR PEMERINTAHAN UMUM			11.114.543.014		19.870.361.714		22.294.573.478		3.008.996.000		3.118.996.000		59.407.470.206	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perang kat Daerah Penang gung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
8 1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			11.114.543.014		19.870.361.714		22.294.573.478		3.008.996.000		3.118.996.000		61.229.199.206	
8 1 2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAA N	Persentase Tingkat partisipasi masyaraka t dalam pengemba ngan wasbang	40%	60.000.000	50%	60.000.000	60%	60.000.000	70%	80.000.000	80%	80.000.000	90%	340.000.000	Bakesb angpol
8 1 3	PROGRAM PENINGKAT AN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBAN GAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Tingkat partisapsi politik	40%	9.639.543.014	50%	18.390.361.714	60%	20.819.573.478	70%	983.996.000	80%	973.996.000	90%	50.807.470.206	Bakesb angpol
8 1 4	PROGRAM PEMBERDAY AAN DAN PENGAWAS AN ORGANISASI KEMASYARA KATAN	Indeks Kinerja Ormas	35%	35.000.000	40%	35.000.000	45%	30.000.000	50%	60.000.000	55%	80.000.000	55%	240.000.000	Bakesb angpol
8 1 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBAN GAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengemba ngan ketahanan ekonomi yang terpenuhi	35%	260.000.000	40%	225.000.000	50%	225.000.000	55%	335.000.000	60%	410.000.000	60%	1.455.000.000	Bakesb angpol
8 1 6	PROGRAM PENINGKAT AN KEWASPADA AN	Persentase pencegaha n potensi dan	65%	1.120.000.000	70%	1.160.000.000	80%	1.160.000.000	90%	1.550.000.000	80%	1.575.000.000	90%	7.462.339.000	Bakesb angpol

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **RPJMD**
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANA N KONFLIK SOSIAL	penangann konflik													
URUSAN PENUNJANG				762.465.316.270		793.395.987.986		813.283.887.317		847.552.739.719		898.564.808.417		4.115.262.739.709	
X X X 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	762.465.316.270	B	793.395.987.986	B	813.283.887.317	BB	847.552.739.719	BB	898.564.808.417	A	4.115.262.739.709	Semua Perangkat Daerah
		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDG's).

8.1.1 Indikator Kinerja Makro

Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 8.1
Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2026

No	Indikator	Satuan	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Laju Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,48 - 5,98	4,60 - 6,13	4,70 - 6,15	4,75 - 6,20	4,80 - 6,35	4,80 - 6,35
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	12,68	11,78	11,13	10,43	9,83	9,83
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,05	4,95	4,75	4,63	4,37	4,37
4	Rasio Gini	Angka	0,331	0,325	0,316	0,311	0,300	0,300
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	69,53	70,00	70,48	70,93	71,17	71,17
6	PDRB/kapita	Rp. Juta	76,81	76,82	76,84	77,23	77,45	77,45

Sumber: Dok. Perubahan RPJMD Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

8.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah pada masa jabatan pemerintah daerah. Adapun target IKU disajikan sebagai berikut.

Tabel 8.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2022-2026

Indikator	Satuan	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
IDM	Angka	0,6882	0,7059	0,7236	0,7413	0,7590	0,7590
Indeks Ketahanan Ekonomi	Angka	0,5869	0,6097	0,6325	0,6554	0,6782	0,6782
Indeks Ketahanan Lingkungan	Angka	0,6636	0,6718	0,6800	0,6882	0,6965	0,6965
Indeks Katahanan Sosial	Angka	0,8140	0,8360	0,8581	0,8802	0,9022	0,9022
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	CC (>50 - 60)	CC (>50 - 60)	B (>60 - 70)	B (> 60 - 70)	BB (> 70 - 80)	BB (> 70 - 80)
Nilai SAKIP	Huruf / Angka	B (> 60 - 70)	BB (> 70 - 80)	BB (> 70 - 80)	BB (> 70 - 80)	A (> 80 - 90)	A (> 80 - 90)
IPKD	Angka	69.300	70.200	71.000	71.800	72.500	72.500
Indeks Pelayanan Publik	Angka	79,91	80,32	80,73	81,14	81,55	81,55
Indeks Inovasi Daerah	Angka	2.382	2.435	2.488	2.541	2.594	2.594
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,48 - 5,98	4,60 - 6,13	4,70 - 6,15	4,75 - 6,20	4,80 - 6,35	4,80 - 6,35
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,05	4,95	4,75	4,63	4,37	4,37
Tingkat kemiskinan	Persen	12,68	11,78	11,13	10,43	9,83	9,83
PDRB/kapita	Rp. Juta	76,81	76,82	76,84	77,23	77,45	77,45
Rasio Gini	Angka	0,331	0,325	0,316	0,311	0,300	0,300
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	3,29	3,30	3,32	3,33	3,34	3,34
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	69,53	70,00	70,48	70,93	71,17	71,17
Indeks Pendidikan	Angka	62,74	63,63	63,28	64,17	64,63	64,63
Indeks Kesehatan	Angka	72,31	72,57	72,83	73,09	73,32	73,32
Indeks Pengeluaran perkapita disesuaikan	Angka	74,10	74,29	75,97	76,08	76,09	76,09
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	90,89	91,43	91,89	92,36	92,82	92,82
IKLHD	Angka	65,83	66,23	66,63	67,03	67,43	67,43
Persentase Kepatuhan Terhadap RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100

8.1.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (outcome based) pada masa jabatan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah daerah.

Tabel 8.3
Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2026

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/	Satuan	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,48 - 5,98	4,60 - 6,13	4,70 - 6,15	4,75 - 6,20	4,80 - 6,35	4,80 - 6,35
2	Laju inflasi	%	2,0-4,0	2,0-4,0	2,0-4,0	2,0-4,0	2,0-4,0	2,0-4,0
3	PDRB Perkapita	Rp. Juta	76,81	76,82	76,84	77,23	77,45	77,45
4	Rasio Gini	Angka	0,331	0,325	0,316	0,311	0,300	0,300
7	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	12,53	11,83	11,13	10,43	9,83	9,83
8	Rasio kesenjangan kemiskinan	Nilai	1,65	1,43	1,24	1,08	0,98	0,98
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	69,53	70,00	70,48	70,93	71,17	71,17
11	Angka melek huruf	Angka	94,09	94,69	95,29	95,50	95,66	95,66
12	Angka rata-rata lama sekolah	Angka	7,78	7,84	7,90	7,97	8,03	8,03
13	Angka usia harapan hidup	Angka	67,00	67,17	67,34	67,52	67,69	67,69
14	Persentase balita gizi buruk	%	0,0008	0,0007	0,0006	0,0005	0,0004	0,0004
15	Prevalense balita gizi kurang	%	0,000085	0,00008	0,000075	0,00007	0,000065	0,000065
16	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	Sudah terpenuhi di tahun 2020				
17	Angka partisipasi angkatan kerja	%	64,83	65,98	66,26	66,62	67,52	67,52
18	Tingkatan Partisipasi angkatan kerja	%	64,83	65,98	66,26	66,62	67,52	67,52
19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,05	4,95	4,75	4,63	4,37	4,37
20	Rasio penduduk yang bekerja	%	95,28	95,51	95,75	95,98	96,21	96,21
21	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga kerja	%	8,65	8,74	8,82	8,91	9,00	9,00
22	Rasio Kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	66,53	67,29	68,06	68,83	69,61	69,61
23	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	36,45	36,62	36,79	36,97	37,14	37,14
24	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	47,77	49,99	52,31	57,73	66,72	66,72

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/	Satuan	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,28	84,37	85,08	85,39	85,69	85,69
26	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%						
27	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	Pencapaian Skor Pola pangan Harapan (PPH)	Angka	90,61	91,42	92,42	93,07	93,91	93,91
29	Penguatan Cadangan pangan	%	11,08	15,20	20,85	28,60	39,24	39,24
30	Penanganan daerah rawan pangan	Kecamatan	4	3	2	1	0	0
31	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	18,87	18,96	19,04	19,1	19,23	19,23
32	Kontribusi sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB	%	2,70	2,75	2,90	3,20	3,53	3,53
33	Produksi sektor pertanian	Ton	3,003	3,142	3,288	3,441	3,601	3,601
34	Kontribusi sektor perkebunan (Tanaman keras) terhadap (PDRB)	%	0,11	1,13	1,23	1,44	1,69	1,69
35	Produksi sektor Perkebunan	Ton	2742,50	2807,49	2863,02	2934,65	3000,08	3000,08
36	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	93,06	94,72	96,41	98,13	100,00	100,00
37	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
38	Kontribusi Sektor pertambangan terhadap PDRB	%	11,33	11,36	11,46	11,48	11,50	11,50
39	Kontribusi Sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,80	2,58	2,68	2,79	2,91	2,91
40	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	16,81	17,44	18,10	18,77	19,45	19,45
41	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	72,92	74,93	76,95	79,02	81,14	81,14
42	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	44,22	44,07	43,85	42,98	42,93	42,93
43	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor	%	18,97	18,99	19,01	19,03	19,05	19,05
44	Pertumbuhan industri	%	3,16	6,61	14,84	28,30	43,96	43,96
B	ASPEK DAYA SAING							
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	944,455,69	961,927,15	979,721,81	997,845,66	1,016,304,78	1,016,304,78
2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	51,24	54,76	58,52	62,54	66,56	66,56
3	Nilai tukar petani	%	99,77	100,88	102,01	103,14	104,29	104,29
4	Produktivitas total daerah	Rp/Angkatan Kerja	154,83	155,31	155,78	156,26	156,74	156,74

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/	Satuan	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
5	Persentase desa swasembada terhadap total desa	%	16,92	20,00	24,62	27,69	30,77	30,77
6	Rasio Ekspor + impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	%	50,36	55,73	56,55	57,01	60,51	60,51
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di Bank umum	%	95,78	92,78	89,17	87,36	86,46	86,46
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	%	89,00	88,01	87,03	86,06	86,00	86,00
9	Angka kriminalitas yang tertangani	10000	2	1	1	0	0	0
10	Rasio ketergantungan	%	186,43	182,13	177,94	173,84	169,84	169,84
C ASPEK PELAYANAN UMUM								
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar								
Pendidikan								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	100	100	100	100
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Peningkatan Penerapan Kurikulum muatan lokal	%	25,26	37,89	50,52	63,15	75,78	75,78
6	Persentase Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	%	3,91	5,87	7,82	9,79	11,73	11,73
7	Persentase Peningkatan Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	67	71	83	91	100	100
Kesehatan								
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	50	50	50	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/	Satuan	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	40	41	42	43	44	44
16	Persentase Peningkatan Pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	%	61	61	61	62	65	65
17	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	48	49	49	50	50	50

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/	Satuan	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	16,38%	16,64%	16,90%	17,39%	18,65%	18,65%
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	21,59%	30,40%	32,65%	35,47%	40,08%	40,08%
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	68,50	74,04	79,18	83,42	88,56	88,56
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	100	100	100	100
6	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	%	5	11	14	14	15	15
7	Presentase terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	%	59	60	61	62	63	63
8	Presentase panjang jalan yang terbangun	%	65	66	67	68	69	69
9	Persentase panjang jalan dan jumlah jembatan dalam kondisi baik	%	78,03	80,45	82,62	85,07	88,17	88,17
10	Presentase pengembangan jasa konstruksi	%	38,05	45,50	53,50	61,50	69,50	70
11	Persentase wilayah yang telah menyusun perencanaan tata ruang	%	56	63	66	69	72	72
	Perumahan Rakyat							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	8	10	12	15	17	17

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/	Satuan	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	15	18	20	23	25	25
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	74	80	85	90	93	93
6	Persentase Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	12	12	12	33	100
Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
Sosial								
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase potensi dan sumberkesejahteraan Sosial yang mendapatkan pemberdayaan Sosial	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase pemulihan Warga Nagara Migran Korban tindak Kekerasan	%	28,25	28,50	28,75	29,00	29,25	29,25
5	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial	%	16,92	18,15	19,38	20,61	21,84	21,84

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/	Satuan	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
6	Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar								
	Tenaga Kerja							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	50	55	60	63	65	65
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	50	55	60	63	65	65
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	24	28	32	36	40	40
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	37,82	61,49	40,36	49,00	56,67	56,67
5	Persentase peningkatan kesempatan kerja	%	5,20	5,80	6	6,20	6,50	6,50
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	85	87	90	95	100	100
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	80	80	85	90	95	95
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	75	80	85	90	90	90
4	Persentase lembaga pemerintah Tk daerah yang dilatih PUG	%	85	87	90	95	100	100
5	Persentase keluarga yang mendapatkan pemberdayaan kualitas keluarga	%	1,30	2,50	3,00	3,50	4,00	4,00
6	Persentas stakeholder yang memanfaatkan data gender dan anak	%	87	90	85	90	100	100
7	Persentase kecamatan layak anak	%	75	80	85	90	90	90
	Pangan							
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	92	93	94	95	96	96
2	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	90	90,30	90,60	90,80	91	91
3	Persentase daerah rentan rawan pangan yang di intervensi	%	34	33	32	31	30	30

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/	Satuan	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
4	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman dikonsumsi	%	92	93	95	96	97	97
	Pertanahan							
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	-	-	-	-	100
2	Persentase fasilitasi tindak lanjut sengketa tanah asset Pemda yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase luas tanah yang dibebaskan	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase lokasi tanah ulayat yang didata	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pengeloan tanah yang kosong dimanfaatkan	%	-	100	100	100	100	100
6	Persentase izin membuka tanah yang diterbitkan	%	-	100	100	100	100	100
7	Persentase penata gunaan tanah yang dilaksanakan	%	-	100	100	100	100	100
	Lingkungan Hidup							
1	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	21	23	23,5	23,75	24	24
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	13	20	20	27	27	27
3	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	%	60	90	100	-	-	100
4	Nilai emisi gas rumah kaca CO ² eq	Nilai	8.242	8.042	7.800	7.650	7.600	7.600
5	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	%	0,08	0,08	0,08	0,08	20	100
6	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	%	20	33	47	53	60	60
7	Persentase pengakuan keberadaan kearifan lokal yang terkait dengan PPLH	%	13	20	20	27	27	27
8	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	10	10	10	10	10	60
9	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	10	10	10	10	10	60

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/	Satuan	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
10	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Perekaman KTP elektronik	%	95,15	95,20	95,40	96,15	96,25	96,25
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Kepemilikan akta kelahiran	%	35	40	45	50	55	55
3	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7
4	Presentase Kepemilika Akta Kelahiran Umur 0-18 tahun	%	92	92,20	92,50	98,33	92,75	92,75
5	Presentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	23	31	31	40	43	43
2	Persentase Desa yang menjalin kerjasama	%	54	69	79	86	93	93
3	Persentase Desa yang di fasilitasi	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	%	92	100	93	93	93	93
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	%	58	68	78	87	97	97
2	Persentase PUS peserta KB Aktif	%	77,72	77,74	77,76	77,76	77,80	100
3	Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga	%	60	70	80	90	100	100
	Perhubungan							
1	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	%	17,68	19,30	19,30	19,30	19,61	19,61
2	Persentase Peningkatan Kualitas dan kapasitas Pengelolaan Pelayaran	%	16,18	17,98	20,26	21,86	23,64	23,64

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/	Satuan	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	20	40	60	80	85	85
2	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	11	15	20	24,40	28,90	28,90
3	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	20	40	60	80	90	90
4	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	20	40	60	80	85	85
5	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan	%	17	34	51	58	58	58
6	Persentase UMKM yang diberdayakan	%	20	40	60	80	85	85
7	Persentase Usaha Mikro yang ditingkatkan skala usahanya	%	20	40	60	80	85	85
	Penanaman Modal							
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	%	80	80	80	80	80	80
3	Persentase Layanan Perizinan dan non perizinan yang tepat waktu	%	94	94	94	94	100	100
4	Persentase Peningkatan jumlah investor PMDN/PMA guna mendukung peningkatan investasi daerah	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan non Perizinan yang akurat dan tepat waktu	%	80	90	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/	Satuan	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	Kepemudaan dan Olahraga							
1	Persentase peningkatan jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Peningkatan jumlah cabang olahraga yang dibina dan atlet yang berprestasi	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentasi organisasi pramuka aktif	%	100	100	100	100	100	100
	Statistik							
1	Persentasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	%	100	100	100	100	100	100
	Persandian							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	100	100	100	100	100
	Kebudayaan							
1	Persentase Peningkatan Pengelolaan, Pelestarian dan Pembinaan Kebudayaan Daerah	%	20	20	20	20	20	20
2	Persentase Peningkatan Pengembangan Kesenian Tradisional	%	20	20	20	20	20	20
3	Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal	%	20	20	20	20	20	20
4	Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	%	20	20	20	20	20	20
5	Persentase Peningkatan Pengelolaan Permuseuman	%	20	20	20	20	20	20
	Perpustakaan							
1	Persentase pembinaan perpustakaan	%	13,36	24,04	33,41	43,78	55,30	55,30
	Kearsipan							
1	Persentase penyelenggaraan kearsipan Perangkat Daerah	%	59,31	68,69	78,62	88,28	100	100
2	Persentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100
Urusan Pilihan								
	Kelautan dan Perikanan							
1	Nilai produksi perikanan tangkap	Ton	20.000	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/	Satuan	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
2	Nilai produksi perikanan budidaya	Ton	450.000	460.000	470.000	480.000	490.000	2.350.000
3	Persentase Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	%	24	23	22	21	20	100
4	Nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Ton	37	40	42	44	47	210
Pariwisata								
1	Persentase Peningkatan tersebar luasnya potensi obyek wisata	%	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
2	Persentase Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	%	19,19	18,61	18,03	19,83	19,25	19,25
3	Persentase Peningkatan Berkembangnya Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	%	22,07	21,21	18,62	18,62	18,62	18,62
4	Persentase Peningkatan Berkembangnya Kompetensi Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	15,35	15,35	15,35	15,35	32,02	32,02
Pertanian								
1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	1,6
2	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	5	5	5	5	5	25
3	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	0,34	0,3	0,3	0,3	0,3	1,7
4	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Ternak	%	19	19	20	21	21	100
5	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Peternakan	%	0	0	20	20	0	40
6	Persentase Luasan Areal Tanam	%	9	9	10	10	12	49
7	Persentase Luasan HMT dan Fasilitas RPH	%	19	19	20	21	21	100
8	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan	%	10	10	10	10	10	50
9	Persentase Penurunan Serangan OPT							
	Tanaman Pangan		0	0	1	1	2	2
	Hortikultura		5	5	5	5	5	25
	Perkebunan		3	3	3	3	3	15
10	Persentase sertifikasi Izin Usaha Pelaku Usaha di Bidang Peternakan	%	15	17	20	23	25	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/	Satuan	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
11	Persentase peningkatan pemberdayaan penyuluh	%	100	100	100	100	100	100
	Perdagangan							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	21	39	49	57	65	65
2	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	20	40	60	80	100	100
3	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan pokok	%	68,97	72,41	75,86	79,31	82,76	82,76
4	Persentase Peningkatan Ekspor Bersih Pedagang	%	16	35	49	51	52	52
5	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Pengawasan Alat UTTP / BDKT	%	31,24	32,35	32,91	34,58	35,25	35,25
6	Persentase capaian Pemasaran produk dalam negeri	%	30	50	60	80	100	100
	Perindustrian							
1	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	20	40	60	80	100	100
2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	20	40	60	80	100	100
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	20	40	60	80	100	100
Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan								
	Sekretariat Daerah							
1	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100
	Sekretariat DPRD							
1	Persentase peningkatan kualitas pelayanan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/	Satuan	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
	Perencanaan							
1	Persentase konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM dan Pemerintahan	%	85	90	90	95	100	100
3	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Perekonomi dan SDA	%	95	95	95	95	100	100
4	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	85	90	90	95	100	100
	Keuangan							
1	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Kesesuaian Pemanfaatan BMD	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Peningkatan Pengelolaan pendapatan daerah	%	95	95	95	95	100	100
	Kepegawaian							
1	Persentase pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah	%	100	100	100	100	100	100
	Pendidikan dan Pelatihan							
1	Persentase pengembangan sumber daya manusia	%	100	100	100	100	100	100
	Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase Peningkatan Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100
Fungsi Pengawasan Urusan Pemerintahan								
	Inspektorat Daerah							
1	Persentase Penurunan Temuan Inspektorat tiap tahun dibandingkan tahun sebelumnya	%	95	90	85	80	75	75

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/	Satuan	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
2	Persentase Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	%	100	100	100	100	100	100
Fungsi Kewilayahan								
	Kecamatan							
1	Persentase penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100
Fungsi Pemerintahan Umum								
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
1	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan wasbang	%	40	50	60	70	80	80
2	Persentase Tingkat partisipasi politik	%	40	50	60	70	80	80
3	Indeks Kinerja Ormas	%	35	40	45	50	55	55
4	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi yang terpenuhi	%	35	40	50	55	60	60
5	Persentase pencegahan potensi dan penangan konflik	%	65	70	80	90	80	80

8.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 8.4
Penetapan Target Indikator SPM
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2026

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	PENDIDIKAN							
1.1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	KESEHATAN							
2.1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.11.	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
3	PEKERJAAN UMUM							
3.1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestic	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	PERUMAHAN RAKYAT							
4.1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.2.	Fasilitasi penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerinta Daerah Kab/Kota yang memperoleh Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	TRANTIBUMLINMAS							
5.1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	SOSIAL							
6.1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
6.2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi.

Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8.5
Penetapan Target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022-2026

No. TPB	Tujuan, Isu Strategis, dan Indikator TPB	Urusan	Proyeksi				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tujuan TPB: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun						
	Isu strategis TPB: Masih adanya setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi.						
	Indikator 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Sosial	12.43%	11.76%	11.10%	10.43%	9.76%
	Isu Strategis TPB: Belum diterapkannya sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin dan rentan.						
	Indikator 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Kesehatan	97.90%	100%	100%	100%	100%
	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.						
	Indikator 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Pendidikan	98.60%	100%	100%	100%	100%
	Isu Strategis TPB: Belum optimalnya pembangunan ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan masih adanya kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.						
Indikator 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	158.1	153.2	148.2	143.3	138.4	
2	Tujuan TPB: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan						
	Isu Strategis TPB: Masih adanya kelaparan dan belum terjaminnya akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kond isi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.						
	Indikator 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Pangan	99.34	99.23	99.13	99.02	98.92
	Isu Strategis TPB: Masih adanya segala bentuk kekurangan gizi, termasuk untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan belum terpenuhinya kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.						
	Indikator 2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Kesehatan	81.06%	74.43%	67.80%	61.16%	54.53%
3	Tujuan TPB: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia						
	Isu Strategis TPB: Masih kurangnya upaya untuk mengurangi rasio angka kematian ibu.						
	Indikator 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).	Kesehatan	5236	0	0	0	0
	Indikator 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Kesehatan	97.64%	99.15%	100%	100%	100%

No. TPB	Tujuan, Isu Strategis, dan Indikator TPB	Urusan	Proyeksi				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Isu Strategis TPB: Masih adanya kematian bayi baru lahir dan balita yang tidak dapat dicegah.						
	Indikator 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Kesehatan	0	0	0	0	0
	Indikator 3.2.2* Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Kesehatan	7.96	6.96	5.97	4.97	3.98
	Indikator 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Kesehatan	89.15%	89.88%	90.61%	91.34%	92.08%
	Isu Strategis TPB: Masih adanya epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan masih adanya hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.						
	Indikator 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Kesehatan	51.70%	45.30%	38.90%	32.50%	26.00%
	Indikator 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Kesehatan	248	239	230	222	213
	Indikator 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Kesehatan	0	0	0	0	0
	Isu Strategis TPB: Masih adanya hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular dan belum meningkatnya kesehatan mental dan kesejahteraan.						
	Indikator 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.	Kesehatan	42.00%	39.70%	37.50%	35.30%	33.10%
	Indikator 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur	Kesehatan	67.60%	61.00%	54.50%	48.00%	41.50%
	≥18 tahun.						
	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan belum terintegrasinya kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						
	Indikator 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50.64%	52.56%	54.48%	56.40%	58.32%
	Indikator 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.80%	16.00%	17.20%	18.40%	19.50%
	Indikator 3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	23	18	13	8	3
	Indikator 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.38	2.37	2.36	2.34	2.33
4	Tujuan TPB: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua						
	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.						
	Indikator 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%

No. TPB	Tujuan, Isu Strategis, dan Indikator TPB	Urusan	Proyeksi				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Indikator 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Pendidikan	108.21 %	108.95	109.68	110.42%	111.15%
	Indikator 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Pendidikan	7.9 thn	8.0 thn	8.1 thn	8.2 thn	8.4 thn
	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.						
	Indikator 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Pendidikan	60.80%	63.50%	66.20%	68.90%	71.60%
	Tujuan TPB: Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan						
5	Isu Strategis TPB: Masih adanya praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa.						
	Indikator 5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	23 thn	18 thn	13 thn	8 thn	3 thn
	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi.						
	Indikator 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.30%	7.70%	7.10%	6.50%	5.80%
	Indikator 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	78.32%	79.16%	79.99%	80.83%	81.66%
8	Tujuan TPB: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua						
	Isu Strategis TPB: Belum optimalnya upaya dalam menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan masih belum terdorongnya formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.						
	Indikator 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Tenaga Kerja	-	-	-	-	-
	Indikator 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal.	Tenaga Kerja	-	-	-	-	-
	Indikator 8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Tenaga Kerja	-	-	-	-	-
	Isu Strategis TPB: Belum tercapainya pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.						
	Indikator 8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran.	Tenaga Kerja	-	-	-	-	-
	Isu Strategis TPB: Masih adanya proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.						
	Indikator 8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Tenaga Kerja	14.29%	18.75%	23.22%	27.68%	32.14%

No. TPB	Tujuan, Isu Strategis, dan Indikator TPB	Urusan	Proyeksi				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Isu Strategis TPB: Belum optimalnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.						
	Indikator 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Pariwisata	2.31%	3.02%	3.73%	4.45%	5.16%
	Indikator 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara.	Pariwisata	123	170	217	264	311
	Indikator 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Pariwisata	21571	31374	41178	50982	60785
	Indikator 8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.	Pariwisata	12.78	17.44	22.09	26.74	31.39
10	Tujuan TPB: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara						
	Isu Strategis TPB: Belum tercapainya pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi.						
	Indikator 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Sosial	12.43%	11.76%	11.10%	10.43%	9.76%
	Indikator 10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.19	23.04	26.89	30.75	34.6
11	Tujuan TPB: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan						
	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta belum tertatanya kawasan kumuh.						
	Indikator 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-
	Isu Strategis TPB: Masih adanya jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial masih adanya kerugian ekonomi relatif terhadap PDB yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.						
	Indikator 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	140.7	126.9	113	99.2	85.4
	Isu Strategis TPB: Masih adanya dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan belum diberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.						
	Indikator 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Lingkungan Hidup	33.88%	39.65%	45.41%	51.18%	56.94%
12	Tujuan TPB: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan						
	Isu Strategis TPB: Lemahnya upaya mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek -praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.						
	Indikator 12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Lingkungan Hidup	4	5	7	8	9

Sumber: Dok. KLHS RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026

BAB IX

P E N U T U P

9.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan tahapan pembangunan pada tahun 2026, maka ditetapkan pedoman transisi, pada saat RPJMD ini berakhir, maka penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2027 tetap berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dengan prioritas pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan hingga akhir periode RPJMD dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005-2025.

Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan periode 2021 – 2026 seharusnya akan berakhir pada Februari 2026, namun adanya penegasan Pemerintah pusat untuk tetap melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga masa jabatan seluruh Kepala Daerah hasil pemilukada tahun 2020 akan berakhir pada tahun 2024. Selanjutnya untuk penyusunan RKPD tahun 2025 dan tahun 2026 mengacu kepada RPJMD tahun 2021-2026.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Sebagai penjabaran dari visi, misi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka Dokumen RPJMD wajib dijadikan pedoman bagi setiap Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bupati Pangkajene dan Kepulauan mempublikasikan RPJMD Tahun 2021 – 2026 kepada seluruh pemangku kepentingan serta para pihak yang berpotensi membantu terwujudnya Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah.
- b. Sekretaris Daerah berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 – 2026 guna mewujudkan kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sinergis dan bernilai tambah tinggi.
- c. Kepala Bappeda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 – 2026.

- d. Inspektorat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melaksanakan reviu atas dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan sebagai turunan dari dokumen RPJMD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keabsahan, dan keandalannya.
- e. DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021 – 2026.
- f. OPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik- baiknya;
- g. OPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;
- h. OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra OPD, selain itu OPD sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing Perangkat Daerah
- i. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 – 2026, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra OPD.
- j. Dalam hal program prioritas Pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional dimana di dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (*Public Private Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang ada dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau di Sulawesi Selatan, serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bersama DPRD dan masyarakat harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama periode 5 (lima) tahun yang tertuang dalam RPJMD dimaksud dan untuk menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal serta menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat.

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



MUHAMMAD YUSRIAN LALOGAU